



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan berwawasan lingkungan dalam upaya peningkatan daya saing daerah melalui kolaborasi antarsektor, diperlukan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- b. bahwa agar pelaksanaan tujuan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta berkelanjutan, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924);
12. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7.Badan...

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, Program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RKPD

Pasal 2

RKPD tahun 2026 berpedoman pada visi, misi, dan Program Bupati yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, Program yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2026;
 - e. bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII penutup.
- (2) Isi dan uraian RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RKPD tahun 2026 menjadi:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026; dan
 - b. dasar penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2026.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijadikan sebagai landasan penyusunan rancangan APBD tahun 2026.

Pasal 5

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak tertuang dalam RKPD tahun 2026, dapat dimasukkan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 sepanjang mendapatkan persetujuan dari Bupati dan DPRD, serta dituangkan ke dalam perubahan RKPD tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III...

BAB III PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melakukan tahapan evaluasi dalam hal terjadi keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud ada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2026.

BAB IV LAPORAN KINERJA

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran, kegiatan, dan Indikator Kinerja masing-masing Program dan kegiatan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V...

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BAPPEDA.
- (3) Pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD tahun 2026 telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras, dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, Program pembangunan Daerah, dan Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RKPD tahun 2026 dan Program strategis nasional;
 - b. pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana Program dan kegiatan prioritas Daerah, serta Indikator Kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD tahun 2026; dan
 - c. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja Program/kegiatan mencakup masukan, keluaran, dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2026.
- (4) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKPD tahun 2026.
- (5) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026.
- (6) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada tahun 2026.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Agustus 2025

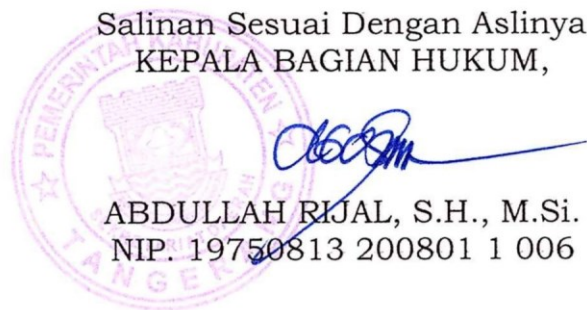
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULLAH RIJAL, S.H., M.Si.
NIP. 19750813 200801 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politis serta *top up* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD 2025-2029. Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta RKPD provinsi Tahun 2026 juga RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024. Selain itu penyusunan RKPD 2026 juga harus berpedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029.

RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. (2) Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RKPD Tahun 2026 memuat Program, kegiatan, dan

subkegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Secara umum Dokumen RKPD mempunyai nilai yang penting dan strategis, antara lain :

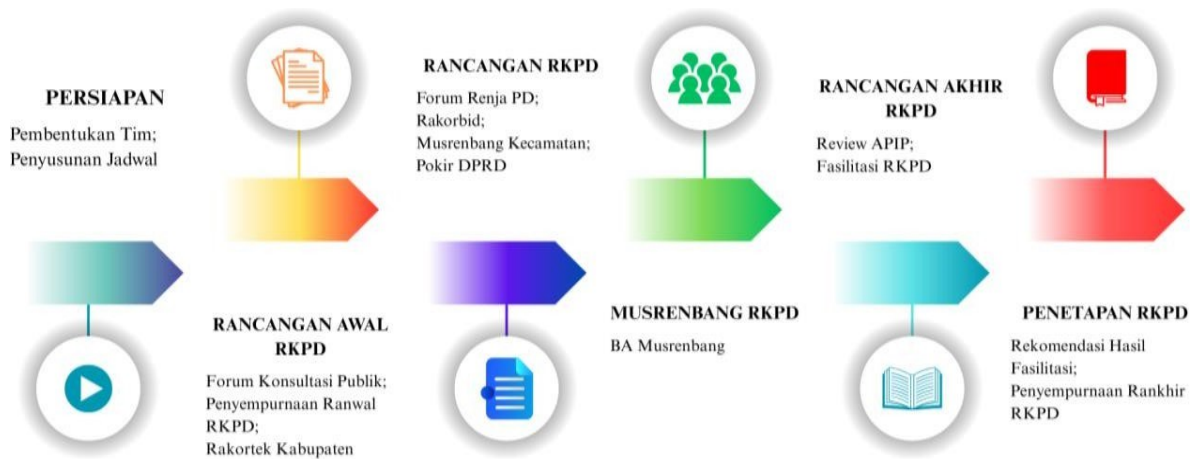
1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja serta kerangka pendanaan selama 1 (satu) tahun. RKPD tersebut disusun dengan tahapan : penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Kecamatan; perumusan rancangan akhir; dan penetapan RKPD.

Lebih lanjut penyusunan RKPD ini memperhatikan terhadap beberapa dokumen strategis lainnya seperti:

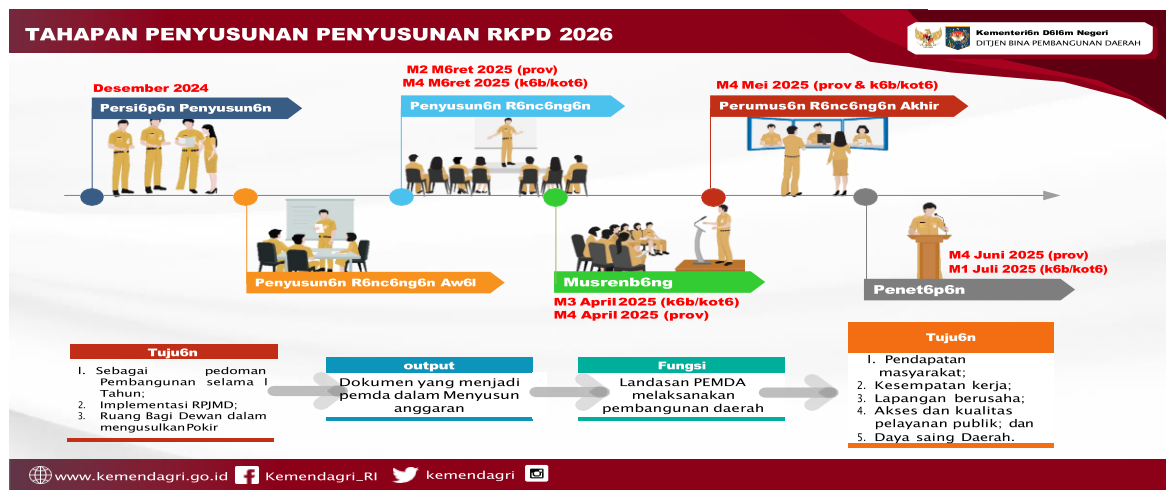
1. Sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai langkah awal untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”;
2. Memperhatikan arah pengembangan pusat pertumbuhan wilayah serta indikasi-indikasi program strategis kewilayahan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031;
3. Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029;
4. Hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 dan 2025 yang sedang berjalan;
5. Serta dokumen perencanaan lainnya.

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagaimana tercantum pada Gambar 1.1 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mulai dari Persiapan, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, Musrenbang RKPD, Rancangan Akhir RKPD sampai dengan Penetapan RKPD.



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026

Pengimplementasian tahapan penyusunan RKPD tersebut telah dilaksanakan sebagaimana indikasi linimasa di bawah ini.



Gambar 1.2
Tahapan penyusunan RKPD 2026

Pelaksanaan pentahapan tersebut dilakukan melalui beberapa pendekatan yang berorientasi kepada proses (Pasal 7 dan 8 dalam Permendagri 86 Tahun 2017) meliputi:

1. Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses ini didahului dengan mengumpulkan, menelaah, mengolah dan menganalisis berbagai informasi data capaian pembangunan tahun kebelakang dan gambaran indikasi pembangunan kedepan (memperhatikan pembangunan kabupaten/kota maupun mempertimbangkan pembangunan nasional) dengan basis metode dan kerangka pikir ilmiah guna memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (akademisi, unsur masyarakat, dunia usaha, media dan pemerintahan) untuk saling berkolaborasi dan kebersamai menuntun perencanaan Provinsi Banten yang lebih baik;
3. Politis, dilaksanakan dengan mencermati pokok-pokok pikiran DPRD hasil penjaringan masukan/dialog dengan

masyarakat;

4. Atas-bawah dan bawah-atas, hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari level terkecil di Daerah hingga level nasional.

Selain berorientasi terhadap proses, juga diamanatkan agar berorientasi terhadap substansi (Pasal 9 dan 10 dalam Permendagri 86 Tahun 2017) meliputi:

1. Holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya;
2. Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
3. Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan RKPD Dasar Hukum Penyusunan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);”,
5. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055)
6. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)”.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)”.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);”.
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);”.
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
 23. Peraturan Gubernur Banten 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Banten (Nomor 4-231/2024);
 24. Peraturan Gubernur Banten 30 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2026;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0920);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

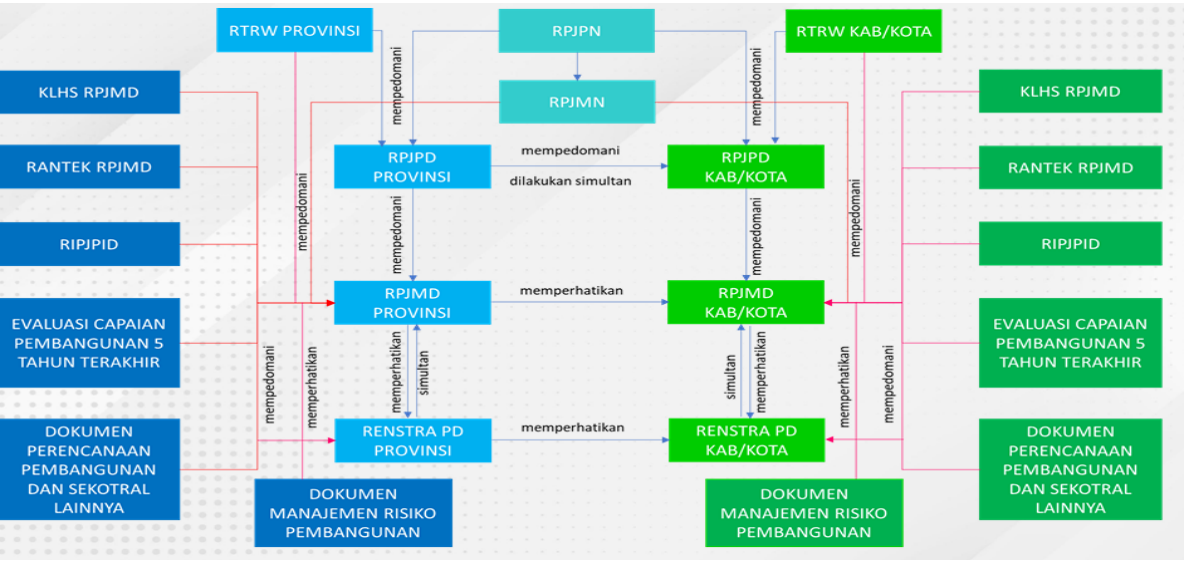
Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Secara umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan, disajikan dalam Gambar 1.3. Keterkaitan antar dokumen perencanaan di daerah seperti yang ditampilkan pada gambar di atas telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), meliputi:

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
- 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
- 5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).



Gambar 1.3
Hubungan Antar Dokumen

Meskipun demikian pada tahun 2026 merupakan tahun kedua perencanaan dari RPJPN dan RPJPD 2025-2045, serta RPJMN 2025-2029 dan RPJMD 2025-2029 dimana penyusunannya dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan menggunakan kaidah penyusunan yang memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan serta prioritas pembangunan daerah tahun 2026 secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah :

- a) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 sesuai dengan prioritas pembangunan, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029;
- b) Memberikan landasan operasional dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah Tahun 2026;
- c) Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026.

1.5 Sistematika RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026

Penyajian RKPD disusun menurut sistematika sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagaimana dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan mengenai Latar Belakang Penyusunan Dokumen RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2026.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan mengenai Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
Menjelaskan mengenai Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang didalamnya terkait dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta prioritas Pembangunan Daerah pada tahun anggaran 2026 yang akan datang.
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**
Menjelaskan mengenai Sistem Pengukuran Kinerja yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Dan Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
- BAB VII PENUTUP**
Memuat hal-hal penting dan perludilakukan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2026.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi wilayah secara detail. Analisis ini mencakup beberapa hal seperti geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, serta aspek pelayanan umum di suatu daerah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya. Selain itu, analisis gambaran kondisi daerah menjadi landasan dalam analisis isu dan permasalahan pembangunan Kabupaten Tangerang.

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Geografi wilayah dan demografi merupakan landasan dalam pembangunan wilayah. Maka dari itu, dalam membangun Kabupaten Tangerang diperlukan analisis mengenai kondisi geografi dan kondisi demografi wilayah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui daya tampung dan daya dukung lingkungan serta mengetahui kondisi pertumbuhan dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah.

2.1.1.1 ASPEK GEOGRAFI

Aspek geografi merupakan gambaran atas potensi dan masalah terhadap karakteristik fisik suatu wilayah. Aspek ini bertujuan untuk memberikan gambaran meliputi karakteristik wilayah kerawanan bencana, potensi pengembangan wilayah, serta mengetahui daya dukung dan daya tampung wilayah.

A) Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

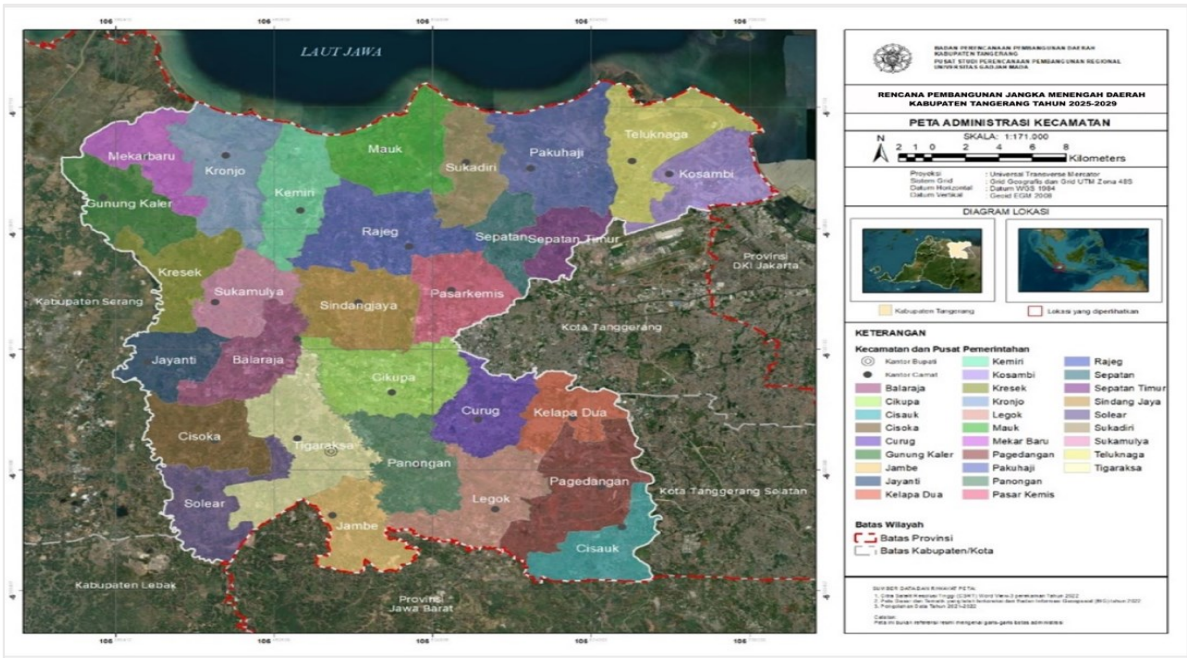
Kabupaten Tangerang berada pada sisi timur Provinsi Banten dengan luas wilayah 1.034,54 km². Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak,
- Sebelah Barat : Kabupaten Serang,
- Sebelah Timur : Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

2) Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Tangerang berada di koordinat 106°20'-106°44' Bujur Timur dan 6°00'-6°21' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Tangerang terletak yang strategis, berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan bagian dari aglomerasi Jabodetabek. Kabupaten Tangerang juga dilintasi oleh jalur utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra yang memberikan dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang. Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki aksesibilitas yang baik, ditandai dengan wilayah yang dilalui oleh Jalan Tol Merak-Jakarta, akses *double track* kereta api, hingga menjadi jalan alternatif menuju Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu,

Kabupaten Tangerang menjadi salah satu wilayah penyangga bagi Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut menciptakan interaksi antar wilayah yang dapat menumbuhkan fenomena interdependensi. Fenomena tersebut mampu memicu pertumbuhan wilayah, *backwash effect*, dan *trickling down* yang membentuk hubungan sinergis antar daerah. Kabupaten Tangerang tumbuh cepat melalui penyediaan infrastruktur, pusat kegiatan, dan permukiman.



Gambar 2. 1
Peta Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Sumber: ArcMap dan Badan Informasi Geospasial, 2023

- B) Topografi
- Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang didominasi oleh dataran rendah dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 0-3%. Wilayah dengan dataran rendah berada di sisi utara Kabupaten Tangerang. Selain itu, terdapat wilayah dataran tinggi yang berada di bagian tengah ke arah selatan dengan kemiringan tanah rata-rata 0-8% menurun ke arah utara. Wilayah dataran rendah di Kabupaten Tangerang didominasi dengan ketinggian wilayah 0-25 mdpl yang tersebar pada bagian wilayah Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresiek, Gunung Kaler, Kronjo, Mekarbaru, Pakuhaji, Sepatan dan Sepatan Timur. Sementara itu, pada sisi utara Kabupaten Tangerang merupakan wilayah pesisir yang memiliki garis pantai sepanjang ± 50 km.
- C) Geologi
- Kabupaten Tangerang memiliki struktur batuan yang terbentuk dari alluvium meliputi lempung, kerikil, dan kerakal serta Tuff Banten (Banten Tuff) yang terdiri atas batu apung dan batu pasir tufaan. Wilayah utara Kabupaten Tangerang adalah daerah dengan keadaan bergelombang lemah, yang termasuk dalam kategori lahan bentukan asal pengendapan atau berjenis aluvial. Secara umum, jenis tanah di wilayah ini terdiri atas aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial kelabu tua dan glei humus rendah, asosiasi glei humus, dan planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan latosol merah kecokelatan, podsolik kuning, asosiasi podsolik kuning, asosiasi podsolik kuning dan hidromorf kelabu yang kaya akan zat hara sehingga membuka peluang pengembangan pertanian dan budidaya.

Jenis tanah tersebut terbentuk melalui proses pengendapan dalam sungai dan danau di daerah dataran dan cekungan. Selain itu, di wilayah dataran rendah juga dapat ditemukan jenis tanah glei regosol dan sedikit podsolik.

Karakteristik jenis tanah di wilayah Kabupaten Tangerang ini memiliki tekstur tanah yang didominasi oleh tekstur halus dan tekstur sedang. Namun, juga terdapat tekstur kasar seluas 3.553 Ha. Berdasarkan teksturnya, tanah di wilayah ini sangat cocok untuk digunakan sebagai kawasan budidaya pertanian dan tanaman keras.

D) Hidrologi

Sumber daya air Kabupaten Tangerang berasal dari sumber air permukaan dan air tanah. Wilayah Kabupaten Tangerang potensi cadangan air tanah yang tinggi, meskipun di Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga, dan Kosambi mengalami intrusi air laut dan eksploitasi untuk kegiatan industri. Sementara itu, sumber air permukaan berasal dari aliran sungai yang memiliki debit relatif tinggi meski berfluktuasi pada musim kemarau. Namun demikian, kualitas air yang berasal dari aliran sungai ini mulai menurun karena pencemaran yang merupakan akibat dari kegiatan sehari-hari masyarakat di sekitar daerah aliran sungai. Kondisi pencemaran tersebut juga memerlukan perhatian khusus karena tingginya pertumbuhan penduduk dan kegiatan masyarakat dapat berakibat pada peningkatan kebutuhan air.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, Kabupaten Tangerang memiliki kawasan resapan air seluas 1.555 Ha yang meliputi daerah aliran sungai Cidurian, Ciujung, Cubareo, dan Cimanceuri. Keempat DAS tersebut keberadaannya harus dijaga untuk menjaga keseimbangan alam dan ketersediaan air di wilayah ini. Sumber air permukaan di wilayah ini terdiri atas sungai, situ, rawa, ataupun embung. Wilayah Kabupaten Tangerang dilalui oleh 3 (tiga) sungai besar yang membentuk daerah aliran sungai yang cukup luas. Ketiga sungai tersebut adalah Sungai Cisadane dengan debit tahunan mencapai 77.644 m³/detik, Sungai Cidurian dengan debit maksimum pada 1999 mencapai 21 m³/detik, dan Sungai Cimanceuri dengan debit rata-rata hingga 9,3042 L/detik. Selain itu, Kabupaten Tangerang juga memiliki 38 sungai kecil yang melintas di wilayah ini. Sumber air lain yang dimanfaatkan adalah situ dan rawa. Kabupaten Tangerang memiliki 6 situ dan 12 rawa yang tersebar di berbagai wilayah.

Selain itu, terdapat juga sumber air baku permukaan lain, yaitu Embung Gagak dan Embung Cigarukgak. Embung Gagak seluas 86.460 m² di Kampung Kebon Cabe Desa Gagak Kecamatan Pakuhaji yang memiliki debit hingga 45.5 L/detik. Sementara itu, Embung Cigarukgak di Desa Kemuning Kecamatan Kresek memiliki luas 1.770.000 m² dan mampu menghasilkan air dengan debit hingga 180 L/detik. Kedua embung tersebut memiliki peran sebagai pengelola air hujan dan sumber air di wilayah sekitar.

Berdasarkan data dari hasil kajian RISPAM, Kabupaten Tangerang memiliki berbagai potensi cadangan air tanah dengan debit 3 -10 L/detik/Km². Selain itu, wilayah ini juga memiliki lima cekungan air bawah tanah (CABT) yang sangat potensial untuk dimanfaatkan, yaitu potensi sebagai imbuhan air tanah bebas (Q1) sebesar 3.278 juta m³/tahun dan potensi sebagai aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 100 juta m³/tahun. Namun demikian, akibat penggunaan yang dilakukan oleh pelaku industri, sebagian wilayah Kabupaten Tangerang mengalami penurunan muka air

tanah yang cukup drastis. Hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri untuk menjaga cadangan air di wilayah Kabupaten Tangerang.

E) **Klimatologi**

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan rata-rata temperatur suhu yang cenderung sedang dengan kelembapan yang cukup tinggi. Sementara itu, jumlah curah hujan di wilayah ini berkisar pada 60,10 - 613,00 mm/tahun dengan jumlah hari hujan antara 14 sampai 31 hari dalam satu bulan. Adapun jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember.

Tabel 2.1
Kondisi Curah Hujan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Januari	322,60	21	3,30
Februari	191,00	19	2,50
Maret	149,50	23	3,70
April	483,60	27	3,70
Mei	102,60	14	2,80
Juni	123,40	15	4,00
Juli	88,70	28	3,60
Agustus	234,80	31	5,70
September	76,50	30	5,50
Oktober	60,10	31	5,60
November	613,00	30	3,90
Desember	218,90	31	2,00

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

Berdasarkan hasil pantauan Stasiun Meteorologi Budiarto Curug tahun 2024, rerata temperatur di wilayah ini berkisar antara 26,46 - 28,22°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober yang mencapai suhu 37,30°C dan temperatur terendah mencapai 20,40°C.

Tabel 2.2
Kondisi Suhu Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Bulan	Suhu (°C)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	23,10	27,08	34,90
Februari	22,80	27,28	35,20
Maret	21,40	27,05	34,40
April	23,00	27,58	35,60
Mei	23,40	28,22	35,40
Juni	22,00	27,48	34,80
Juli	19,70	26,46	34,20
Agustus	20,80	27,33	34,80
September	21,30	27,59	36,30
Oktober	20,40	28,10	37,30
November	22,30	27,26	34,90
Desember	22,60	26,93	33,60

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

Berdasarkan hasil pantauan Stasiun Meteorologi Budiarto Curug tahun 2024, rerata kelembapan di wilayah ini berkisar antara 74,27 – 86,54%. Kelembapan maksimum di wilayah ini mencapai 100% yang terjadi di bulan Januari. Sedangkan kelembapan terendah terjadi pada bulan Oktober.

Tabel 2.3
Kondisi Kelembapan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Bulan	Kelembapan (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	53,00	85,06	100,00
Februari	45,00	85,08	99,00
Maret	48,00	86,23	99,00
April	42,00	86,54	99,00
Mei	45,00	82,52	99,00
Juni	40,00	82,56	99,00
Juli	55,00	81,42	98,00
Agustus	70,25	76,91	88,50
September	66,75	77,10	92,25
Oktober	61,75	74,27	85,25
November	63,00	83,15	92,75
Desember	69,25	83,15	95,50

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

F) Penggunaan Lahan

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian berupa sawah irigasi sebesar 50.709,86 Ha atau 49,52%. Sementara itu, wilayah terbangun di Kabupaten Tangerang didominasi oleh kawasan permukiman, baik perkampungan maupun permukiman perkotaan seluas 18.426,6 Ha atau 18%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang menyebabkan tingginya alih fungsi lahan di wilayah ini. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian tersendiri utamanya menjaga daya dukung dan daya tampung wilayah.

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang

No	Guna Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Persawahan	57.431	56,08
2	Kebun Campuran	16.835	16,44
3	Perkampungan	14.874	14,52
4	Perairan Darat	5.919	5,78
5	Perkebunan	2.183	2,13
6	Tegalan/Ladang	2.049	2
7	Jasa, Industri, dan Pergudangan	1.785	1,74
8	Sungai/Danau	1.126	1,1
9	Pertambangan	111	0,11
10	Tanah Terbuka	93	0,09
11	Padang	8	0,01

Sumber: RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kawasan lindung dan budidaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031.

1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang memiliki peruntukan preservasi. Kabupaten Tangerang memiliki kawasan lindung yang terdiri atas kawasan hutan lindung yang berupa hutan bakau di sisi pantai utara seluas 1.555,32 Ha, kawasan resapan air seluas 1.555 Ha, kawasan sempadan pantai sebesar 325 Ha, kawasan sempadan sungai dengan luas 529 Ha, dan kawasan sekitar danau dan situ seluas 310 Ha.

Masing-masing guna lahan tersebut memiliki peranan dan ketentuan pemanfaatan tersendiri yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam.

2) Kawasan Budidaya

Kabupaten Tangerang memiliki kawasan budidaya yang terdiri atas kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan transportasi, serta kawasan pertahanan dan keamanan.

G) Sumber Daya Hutan

Hutan merupakan salah satu jenis guna lahan yang terdapat di wilayah Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang memiliki hutan seluas 1.555,32 Ha. Kawasan hutan di Kabupaten Tangerang hanya terdiri atas hutan lindung yang merupakan hutan bakau di wilayah pantai utara. Hutan lindung tersebut berlokasi di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi. Keberadaan hutan lindung ini pengelolaan dan pengembangannya diatur dalam RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, salah satu program yang dikembangkan adalah rehabilitasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada Kawasan Peruntukan Lindung.

H) Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung

1) Kapasitas D3TLH Penyediaan Pangan

Daya dukung dan daya tampung penyediaan pangan dalam pemanfaatan ruang difokuskan pada kawasan budidaya pertanian pangan. Ketersediaan lahan menjadi faktor utama dalam memenuhi kebutuhan pangan, yang semakin terancam oleh alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, serta peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi yang mengurangi kualitas lingkungan. Analisis daya dukung dan daya tampung pangan dilakukan dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan pangan, serta status ambang batas daya dukung lingkungan hidup di suatu wilayah. Hasil analisis menunjukkan Kabupaten Tangerang telah mengalami penurunan daya dukung lahan, dengan 97.944,52 Ha atau 96% lahan terlampaui yang menandakan perlunya upaya lebih lanjut untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan penduduk.

2) Daya Dukung Daya Tampung Air

Air adalah sumber daya alam esensial yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta perlu dijaga keberlanjutannya. Daya dukung dan daya tampung air ini ditentukan oleh kinerja jasa lingkungan hidup yang mencakup bentang alam, vegetasi alami, dan penutupan lahan. Daya dukung dan daya tampung air dipengaruhi oleh ketersediaan dan kebutuhan air. Saat ini, ketersediaan air di wilayah tersebut mencapai 1.123.896.242,78 m³/tahun, sementara kebutuhan air mencapai 1.797.028.714,27 m³/tahun. Ketersediaan maupun kemampuan lahan dalam penyediaan air didominasi oleh lahan yang telah terlampaui seluas 84.338,35 hektar atau 83% dari total luas daerah yang menunjukkan lahan tersebut berada dalam kategori krisis air, terutama di wilayah utara dan barat.

I) Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang diatur dalam dokumen RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, meliputi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan cagar budaya. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan wilayah yang terdiri atas kawasan hutan lindung dengan luas 1.555,32 Ha yang meliputi Kecamatan Kronjo, Mauk, Pakuhaji, Kecamatan, dan Kosambi serta kawasan resapan air dengan luas 1.555 Ha yang berada di hulu DAS Cidurian, Ciujung, Cibareo, dan Cimanceuri. Sementara itu, kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai (325 Ha), sempadan sungai (559 Ha), dan kawasan sekitar situ/danau atau waduk (310 Ha). Adapun kawasan cagar budaya tersebar dalam 19 lokasi.

Kawasan peruntukan budidaya di Kabupaten Tangerang terdiri atas 8 (delapan) kawasan yang meliputi kawasan pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, peruntukan industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan, serta transportasi. Kawasan pertanian terdiri atas 14.094 Ha kawasan tanaman pangan dan 49 Ha kawasan peternakan. Kawasan perikanan meliputi kawasan perikanan tangkap dan 151 Ha kawasan perikanan budidaya. Selanjutnya, kawasan pertambangan dan energi terdiri atas kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 95 Ha. Kawasan peruntukan industri Kabupaten Tangerang memiliki luas 14.878 Ha yang terdiri atas kawasan peruntukan industri dan sentra industri kecil dan menengah. Adapun peruntukan pariwisata Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 3 yakni pariwisata alam, budaya, dan buatan. Kawasan permukiman di Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 2 yakni kawasan permukiman perkotaan dengan luas 66.543 Ha dan kawasan permukiman perdesaan seluas 2.900 Ha.

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang sangat strategis dan memiliki berbagai potensi pengembangan wilayah. Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang, wilayah Kecamatan Jambe dan Kecamatan Mauk direncanakan sebagai kawasan strategis *dryport* dengan kegiatan utama meliputi transportasi dan pergudangan. Selain itu, kawasan reklamasi seluas 9.000 Ha di pantai utara direncanakan dikembangkan sebagai kawasan perumahan perkotaan, pelabuhan terpadu, dan industri.

J) Wilayah Rawan Bencana

1) Kebencanaan

Kabupaten Tangerang memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi, terutama terkait gempa bumi. Selain itu terdapat beberapa potensi kebencanaan seperti tsunami, banjir, dan kekeringan. Gempa bumi berpotensi terjadi di seluruh wilayah, sementara tsunami mengancam pesisir pantai utara, seperti Kecamatan Kronjo, Kemeri, dan Mauk. Banjir rob dan kekeringan juga menjadi ancaman, dipicu oleh perubahan siklus iklim global. Berdasarkan data InaRisk 2023, tingkat kebencanaan di Kabupaten Tangerang dikategorikan dalam tiga kelas bahaya: rendah, sedang, dan tinggi, yang mencakup bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan, likuefaksi, tsunami, dan abrasi.

- **Bencana Banjir**
Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya banjir dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa sebagian besar wilayah memiliki dampak dan risiko bahaya banjir dengan klasifikasi tinggi seluas 34.891,52 hektar yang cenderung berdampak pada kawasan permukiman perkotaan mencapai 17.372,71 hektar. Selain itu bahaya banjir juga berdampak pada kawasan tanaman pangan dan kawasan peruntukan industri.
- **Bencana Banjir Bandang**
Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya banjir bandang dengan pola ruang, diketahui bahwa Kabupaten Tangerang memiliki dampak dan risiko bahaya banjir bandang dengan klasifikasi tinggi seluas 142,86 hektar, sedang seluas 90,42 hektar, dan rendah seluas 27,61 hektar dengan kecenderungan berdampak pada kawasan permukiman perkotaan seluas 76,87 hektar.
- **Bencana Cuaca Ekstrem**
Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya cuaca ekstrem dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa kawasan permukiman perkotaan akan sangat terdampak dari adanya potensi bahaya cuaca ekstrem dengan luas 65.928,34 hektar, diikuti kawasan peruntukan industri dan kawasan tanaman pangan.
- **Bencana Gelombang Ekstrem**
Kabupaten Tangerang memiliki kawasan pesisir di wilayah utara yang berpotensi mengalami bahaya gelombang ekstrem. Dampak dari potensi gelombang ekstrem dan abrasi paling besar terjadi di kawasan lindung dengan klasifikasi rendah yang luasnya mencapai 291,66 hektar, sedangkan dampak tertinggi terdapat di kawasan permukiman perdesaan seluas 83,92 hektar.
- **Bencana Gempa Bumi**
Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya gempa bumi dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa wilayah yang terdampak dengan status bahaya gempa bumi tinggi memiliki luasan paling kecil. Sebagian besar berada dalam kondisi bahaya gempa bumi rendah hingga sedang, terutama kawasan permukiman perkotaan yang memiliki klasifikasi sedang mencakup area seluas 48.136,67 hektar.
- **Bencana Kebakaran Hutan**
Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya kebakaran hutan dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa kawasan industri memiliki nilai bahaya tinggi mencapai 8,76, sementara sebagian besar area yang terdampak berada pada klasifikasi bahaya rendah hingga sedang, termasuk kawasan permukiman dan perkotaan.
- **Bencana Likuefaksi**
Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya likuefaksi dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa kawasan permukiman perkotaan memiliki luas terbesar dalam klasifikasi bahaya sedang, yaitu 25.378,40 hektar. Sementara

itu, sebagian besar kawasan lainnya juga berada dalam klasifikasi bahaya sedang.

- **Bencana Tsunami**
Secara administratif, wilayah Kabupaten Tangerang memiliki kawasan pesisir dengan risiko tsunami yang relatif rendah. Berdasarkan analisis, kawasan yang terdampak memiliki klasifikasi indeks bahaya rendah. Namun, ada beberapa area yang terkena dampak cukup luas, seperti kawasan hutan lindung seluas 341,79 hektar dan kawasan permukiman perkotaan seluas 264,55 hektar.

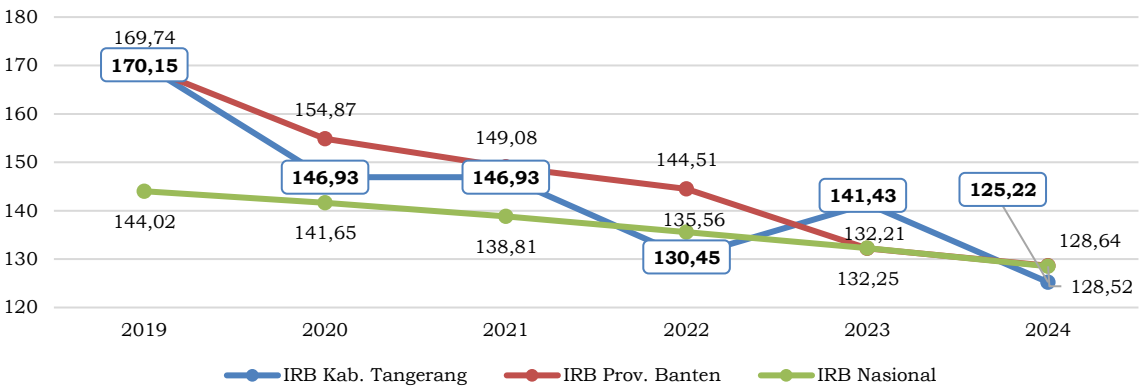
2) Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Pembangunan yang terus berkembang di Kabupaten Tangerang akan mempengaruhi lingkungan, terutama terkait dengan risiko bencana sehingga diperlukan *overlay* bahaya bencana dengan pola dan struktur ruang. Saat ini, perkembangan pola ruang di Kabupaten Tangerang akan sangat dipengaruhi oleh pembangunan tersebut, dan beberapa proyek pembangunan diproyeksikan akan terpengaruh oleh perubahan dalam pola ruang.

Selain itu, bencana kebakaran sering terjadi di kawasan industri, rumah kontrakan, pasar, dan perumahan yang tidak tertata. Bencana angin puting beliung kerap melanda Kecamatan Kronjo, Gunung Kaler, Kresek, Jayanti, Solear, Mauk, Sukadiri, Panongan, Cisoka, Tigaraksa, Jambe, dan Legok. Selain itu, ada wilayah yang rawan bencana banjir di Kecamatan Tigaraksa, Teluknaga, Jayanti, Pasar Kemis, dan Kresek. Di bagian utara Kabupaten Tangerang, terdapat area yang rentan terhadap erosi atau abrasi akibat gelombang laut, seperti di Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Kemiri, dan Kronjo.

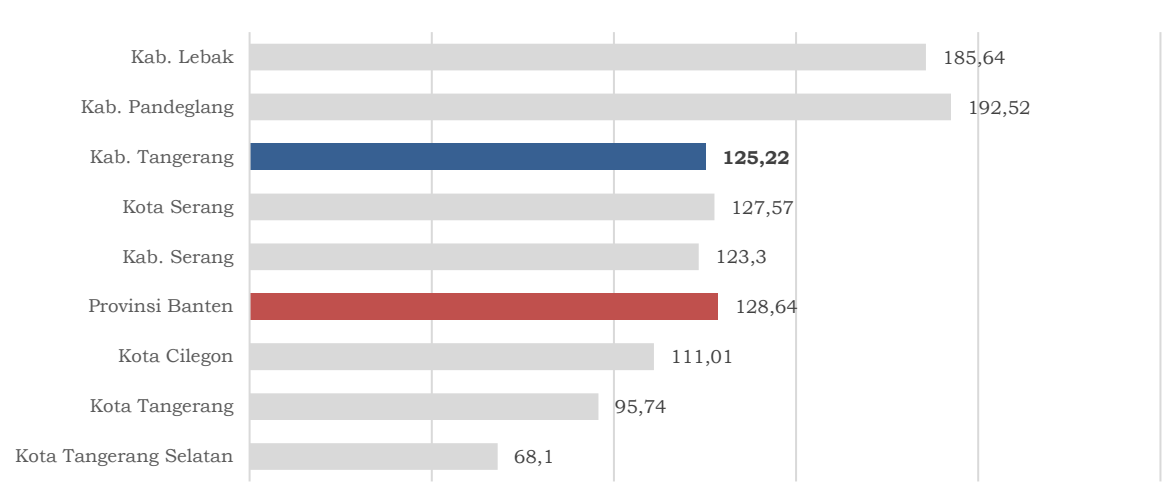
K) Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang memiliki kerawanan bencana pada beberapa jenis bencana. Bencana kebakaran rawan terjadi pada kawasan peruntukan industri, rumah kontrakan, pasar, dan perumahan tidak tertata. Bencana angin puting beliung juga rawan terjadi di 12 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Sementara itu, banjir dapat diakibatkan oleh pasang surut di kawasan pesisir dan banjir akibat luapan aliran sungai Kecamatan Tigaraksa, Teluknaga, Jayanti, Pasar Kemis, dan Kresek. Sedangkan bencana kekeringan juga rawan terjadi pada musim kemarau.



Gambar 2.2
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional
Tahun 2019-2024

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

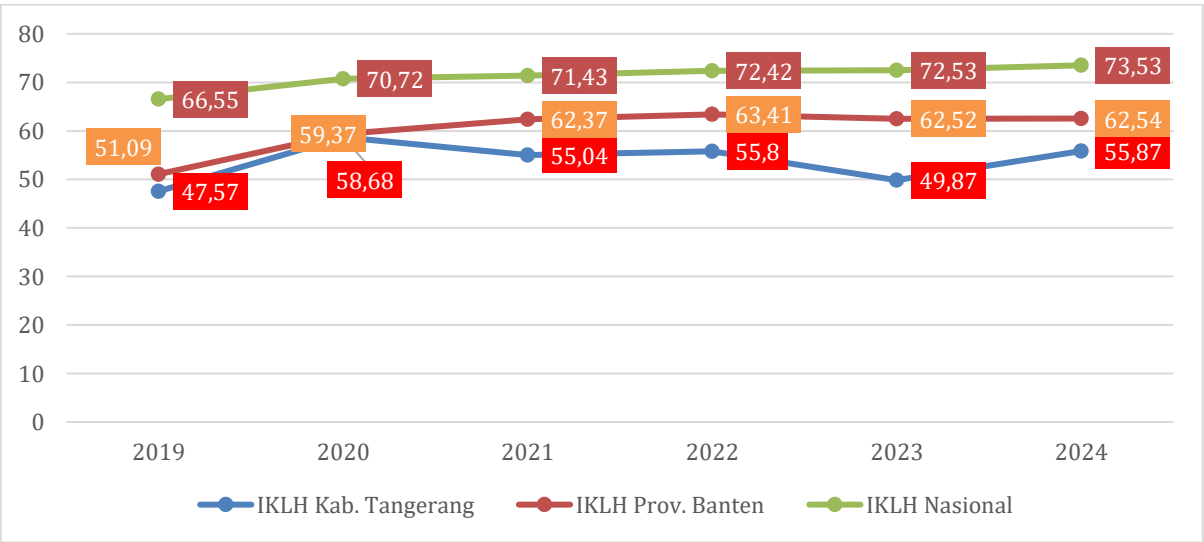


Gambar 2.3
Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2024, Kabupaten Tangerang memiliki indeks mencapai 125.22 yang tergolong ‘Sedang’ dan capaian tersebut di atas IRB Provinsi Banten dan nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang memiliki nilai indeks tertinggi keempat. Dalam lima tahun terakhir, IRB Kabupaten Tangerang menunjukkan tren penurunan risiko bencana yang mengindikasikan bahwa penanganan bencana di Kabupaten Tangerang semakin baik. Meskipun demikian, ancaman bencana akibat perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana di Kabupaten Tangerang.

L) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

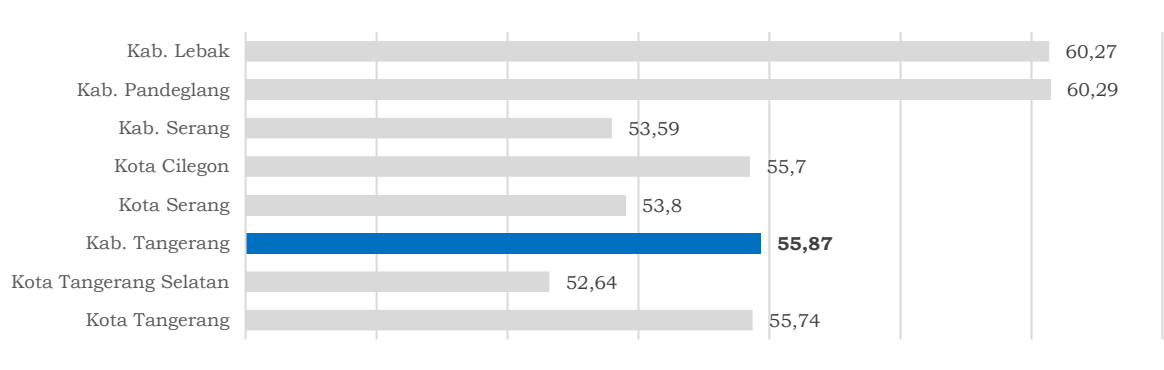
Pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana indeks ini digunakan secara nasional dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komponen IKLH ini meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).



*Menggunakan metode perhitungan lama

Gambar 2.4
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: Buku IKLH Menteri KLHK 2015, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022, RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, dan Tangerang Satu Data (diolah)



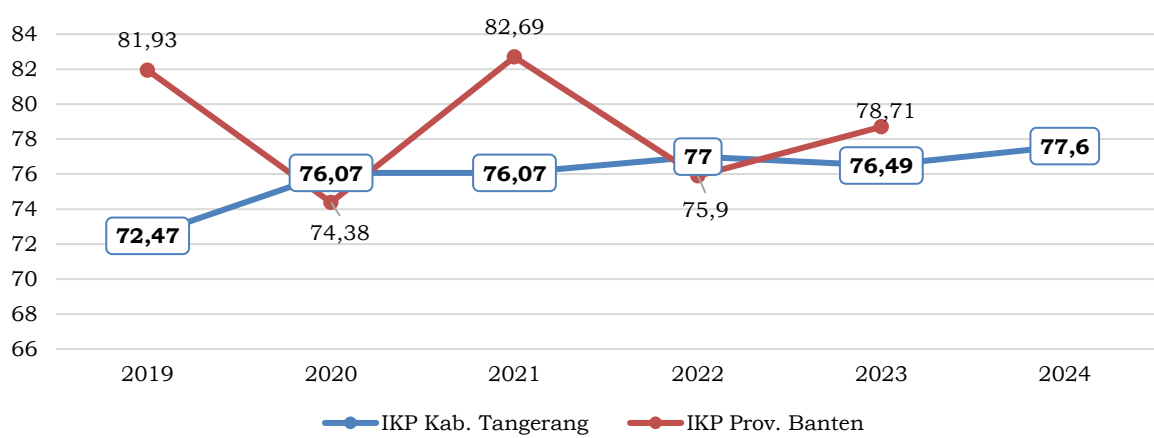
Gambar 2.5
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Perhitungan Baru) Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada tahun 2023, IKLH memiliki komponen perhitungan baru, yaitu (1) pada IKU berupa penambahan parameter PM 2.5; (2) pada IKA berupa perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-NA; serta (3) pada IKL berupa perubahan klasifikasi tutupan lahan dan memasukkan faktor koreksi lahan gambut. Dengan konversi rumus baru, capaian IKLH Kabupaten Tangerang tahun 2024 adalah 55,87 dengan sub komponen IKU sebesar 73,33; IKA sebesar 55,69; serta IKL sebesar 23,86. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian IKLH Kabupaten Tangerang termasuk dalam ketiga terendah. Berdasarkan dokumen Profil IKLH, dijabarkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan capaian IKLH Kabupaten Tangerang yaitu peningkatan pemantauan kualitas udara, meningkatkan pelayanan IPAL domestik dan industri, pemeliharaan tanaman mangrove, dan lain sebagainya.

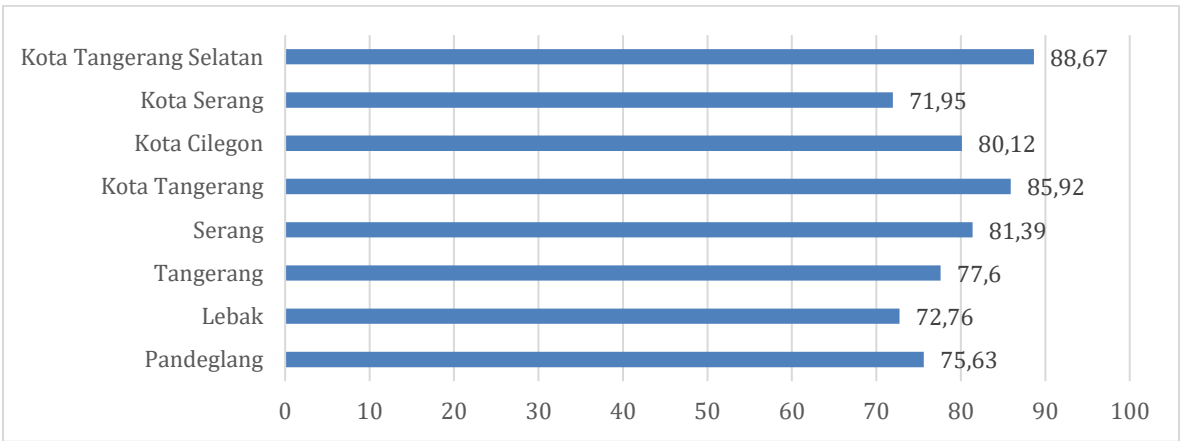
Kualitas lingkungan hidup mempengaruhi ketahanan terhadap ancaman krisis iklim. Ancaman krisis iklim menjadi hal penting dalam arahan pembangunan wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dan berita menunjukkan ancaman krisis iklim di Kabupaten Tangerang yaitu El nino musim kemarau panjang dan kenaikan muka air laut di wilayah pesisir Tangerang.

M) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan di wilayah tertentu. IKP terdiri atas ketersediaan, keterjangkauan/aksesibilitas pangan, dan pemanfaatan pangan.



Gambar 2.6
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019 - 2024
Sumber: Publikasi Indeks Ketahanan Pangan



Gambar 2.7
Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Publikasi Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024

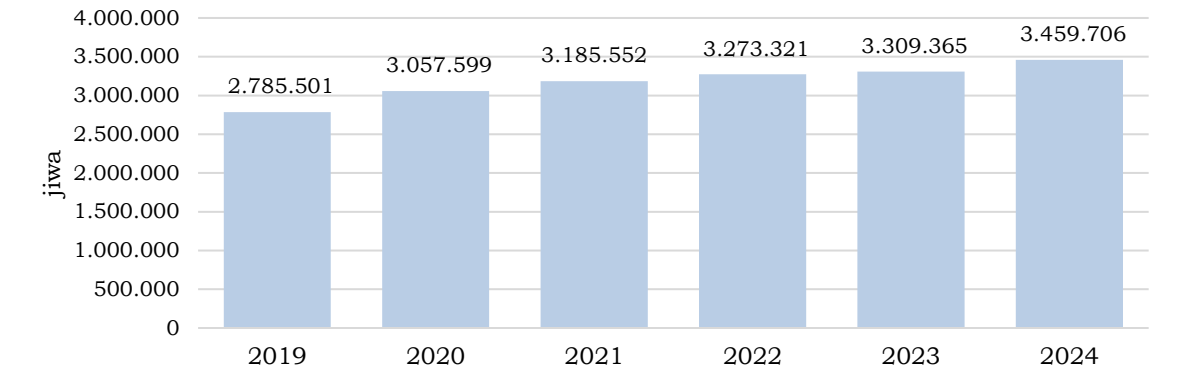
Capaian IKP Kabupaten Tangerang tahun 202 sebesar 76,49 dan capaian ini lebih rendah dibandingkan IKP Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian IKP Kabupaten Tangerang tahun 2023 menempati peringkat ke-empat terendah. Di tahun 2024, capaian tersebut meningkat menjadi sebesar 77,6. Dalam enam tahun terakhir, IKP Kabupaten Tangerang cenderung mengalami tren peningkatan dari tahun 2019-2024. Hal ini menunjukkan ketahanan pangan Kabupaten Tangerang semakin baik meski sempat stagnan pada tahun 2021.

2.1.1.2 ASPEK DEMOGRAFI

Dinamika perubahan penduduk berubah secara pesat dan perlu dianalisis untuk mengetahui kondisi saat ini dan yang akan datang. Dalam analisis ini memuat struktur, distribusi, dan proyeksi penduduk Kabupaten Tangerang.

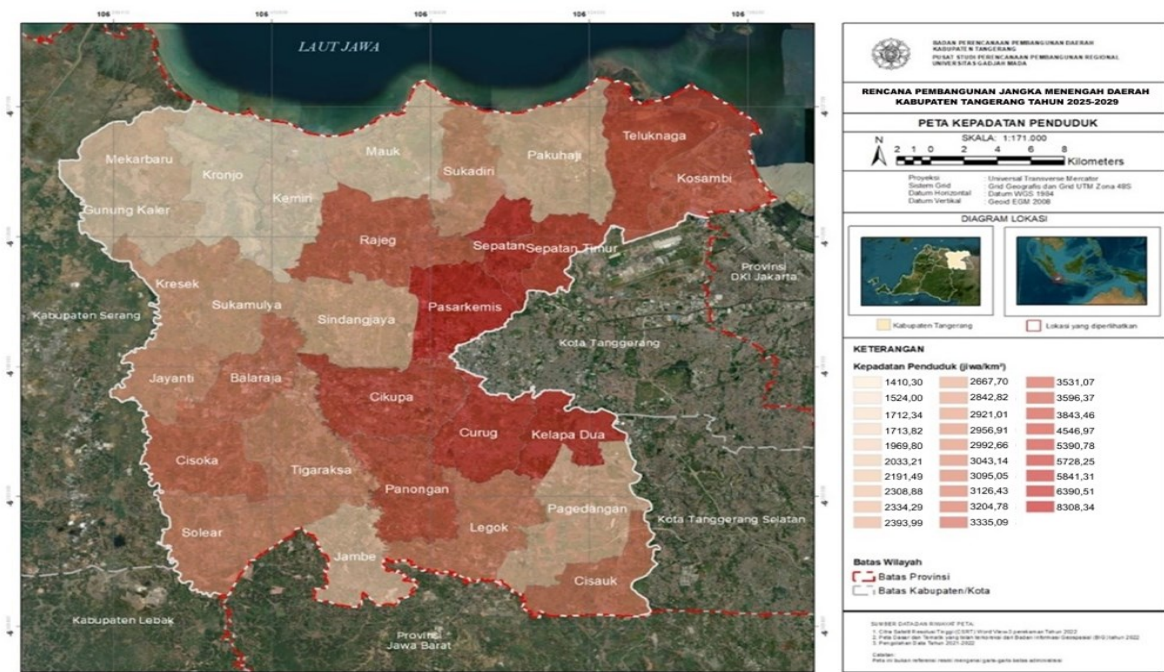
A) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 3.459.706 jiwa penduduk yang tersebar di 29 kecamatan. Kecamatan Pasar Kemis merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi dari wilayah lain yakni dengan penduduk 258.477 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Mekar Baru merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Tangerang yaitu dengan 44.942 jiwa/km². Secara umum, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang memiliki tren peningkatan yang terjadi secara signifikan dengan laju pertumbuhan 1,93% per tahun dari tahun 2020-2024.

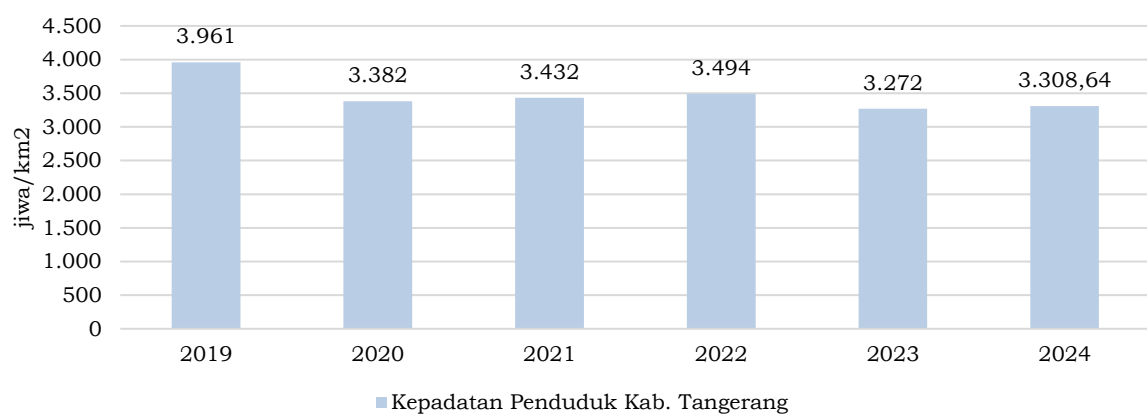


Gambar 2.8
Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

B) **Kepadatan dan Distribusi Penduduk**
Kabupaten Tangerang memiliki kepadatan penduduk mencapai 3.308,64 jiwa/km² yang berarti tiap 1 km² wilayah Kabupaten Tangerang dihuni oleh 3.308 jiwa penduduk. Kecamatan terpadat di wilayah ini adalah Kecamatan Pasar Kemis (8.411 jiwa/km²), Kecamatan Kelapa Dua (6.507 jiwa/km²), dan Kecamatan Sepatan (5.962 jiwa/km²). Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Kemiri dengan kepadatan 1.555 jiwa/km².

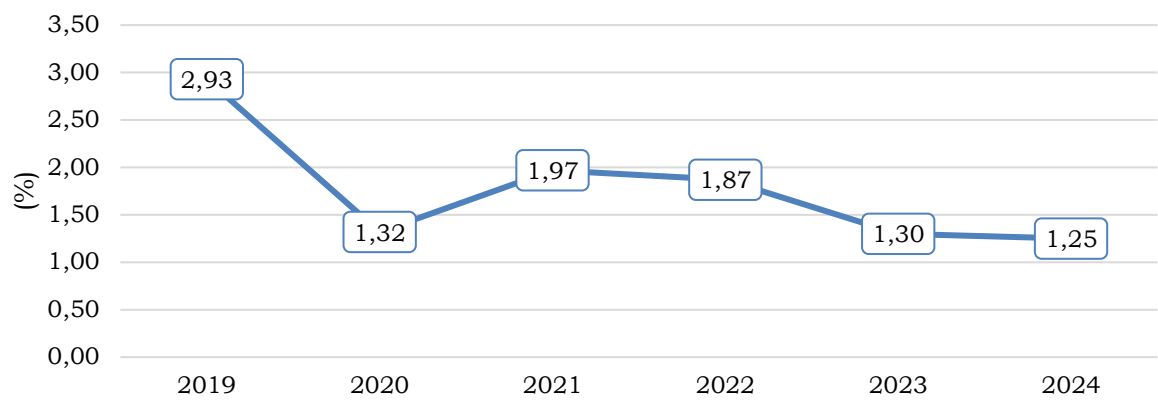


Gambar 2.9
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Per Kecamatan Tahun 2023
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

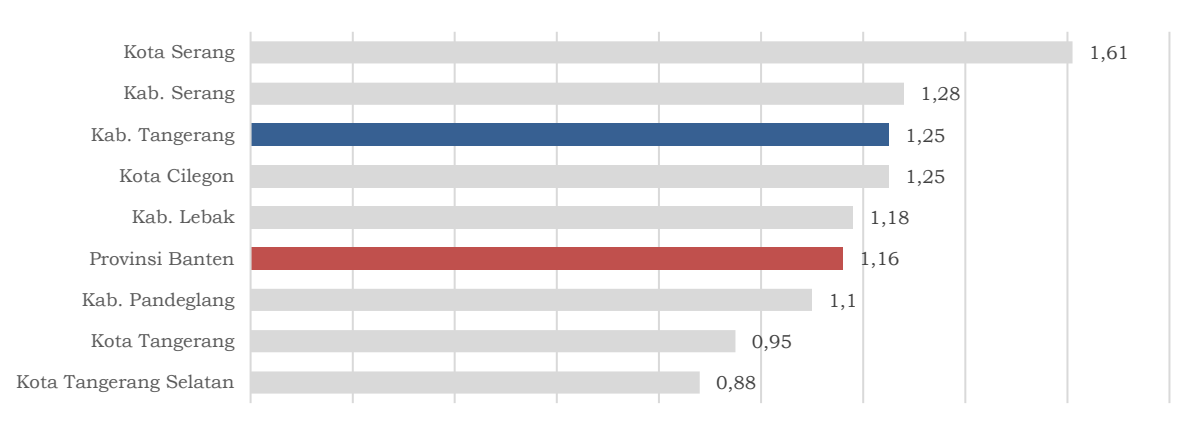


Gambar 2.10
Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

C) **Pertumbuhan Penduduk**
Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang cenderung menurun dan fluktuatif, dengan laju pertumbuhan berkisar pada angka 1% sampai 3%. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 mencapai nilai terendah hingga 1,25%. Laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini relatif rendah dengan tren yang semakin menurun. Hal ini menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah ini cenderung rendah yang berimplikasi terhadap *dependency ratio* dan bonus demografi.



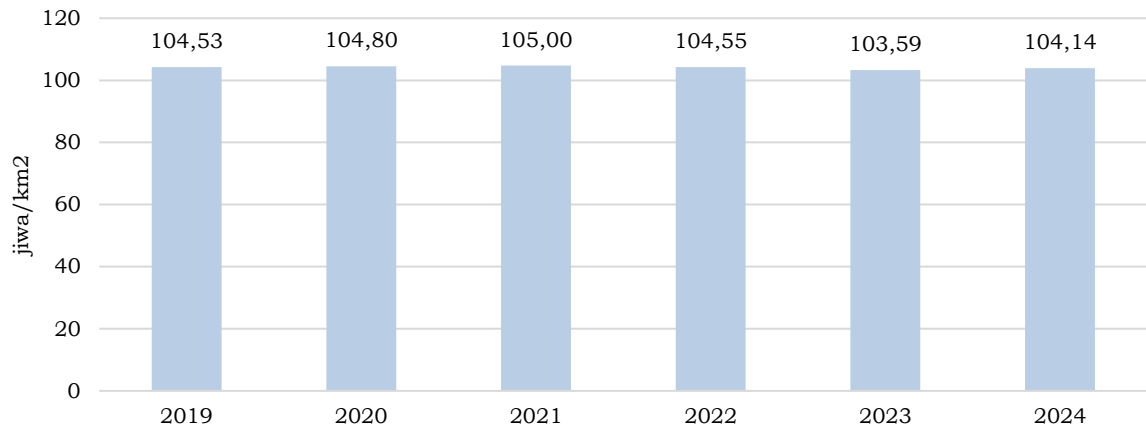
Gambar 2.11
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024



Gambar 2.12
Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024

D) Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

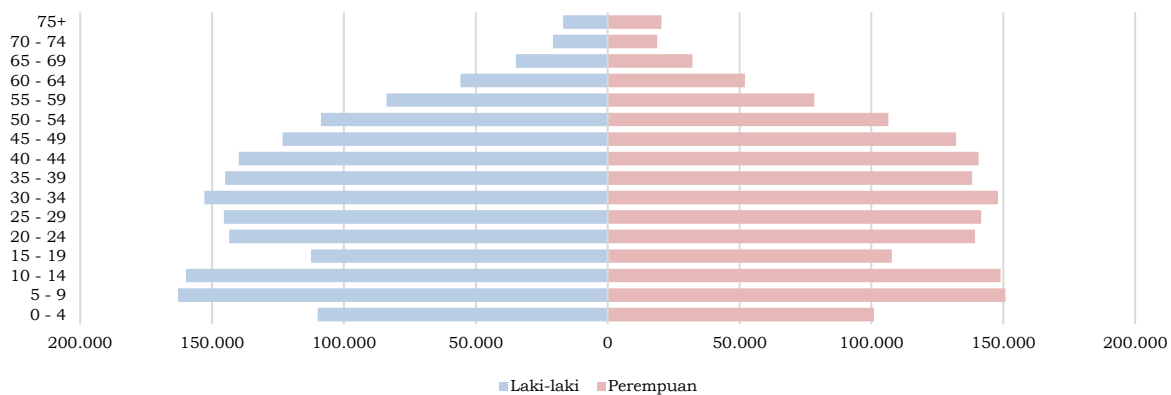
Pada tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki di wilayah ini mencapai 1.761.008 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 1.698.698. Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* di Kabupaten Tangerang mencapai 104,14 yang artinya terdapat 104 jiwa penduduk laki-laki setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Secara umum, rasio jenis kelamin Kabupaten Tangerang relatif sama pada kurun waktu 2019-2024, yakni berkisar pada angka 103-105.



Gambar 2.13
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

E) Penduduk Menurut Kelompok Umur

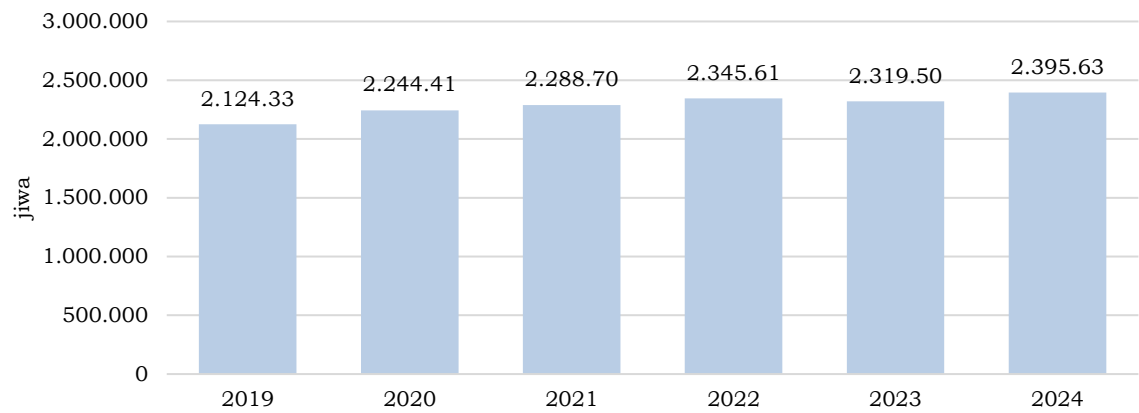
Penduduk Kabupaten Tangerang didominasi oleh penduduk usia muda. Hal ini dapat dilihat dalam piramida penduduk yang tergolong dalam piramida ekspansif atau berbentuk seperti kerucut. Piramida tersebut menggambarkan jumlah masyarakat usia muda lebih tinggi dari kelompok umur lain yang dapat terjadi akibat tingginya angka kelahiran dan rendahnya tingkat kematian bayi. Tingginya jumlah penduduk usia muda ini menjadi peluang pada masa yang akan datang sebagai bonus demografi. Namun, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap rasio ketergantungan masyarakat non produktif.



Gambar 2.14
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

F) Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif adalah penduduk yang dianggap sudah produktif atau termasuk dalam rentang usia 15-64 tahun. Penduduk usia produktif Kabupaten Tangerang cenderung tinggi dan memiliki tren peningkatan dari waktu ke waktu. Tingginya jumlah penduduk usia produktif menjadi efek dari terjadinya bonus demografi. Tingginya angka produktif ini harus diseimbangkan dengan lapangan pekerjaan yang memadai untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

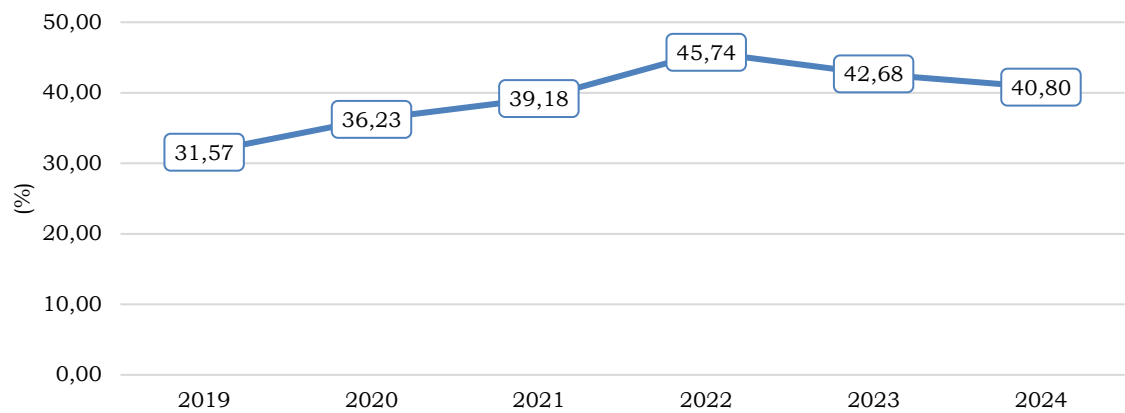


Gambar 2.15
Penduduk Usia Produktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

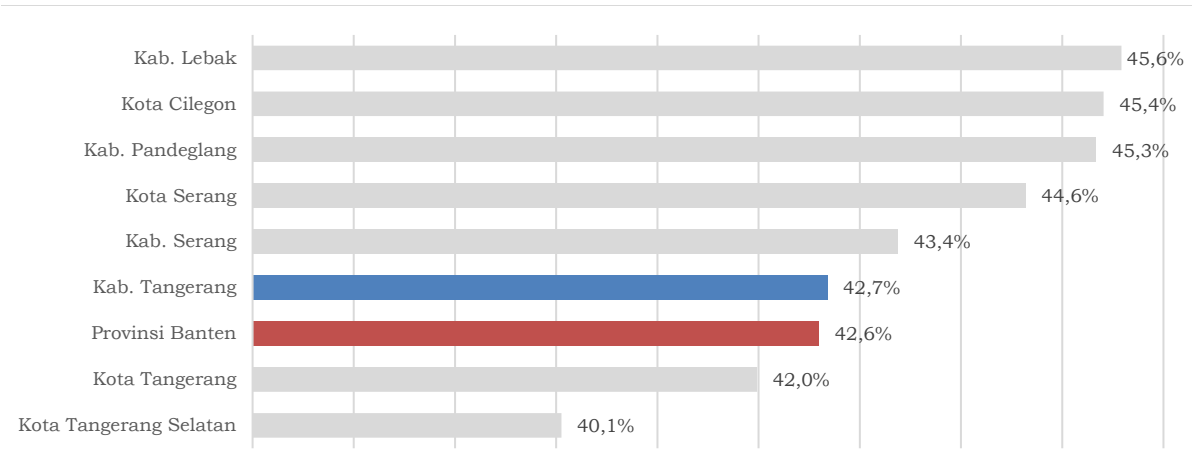
G) Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau *Dependency Ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (bukan angkatan kerja) lalu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan

dari tahun 2019 sampai dengan 2022 dan menurun pada tahun 2023-2024.



Gambar 2.16
Rasio Ketergantungan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025



Gambar 2.17
Perbandingan Rasio Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023
Sumber : BPS Provinsi Banten, BPS Kabupaten/Kota, 2023

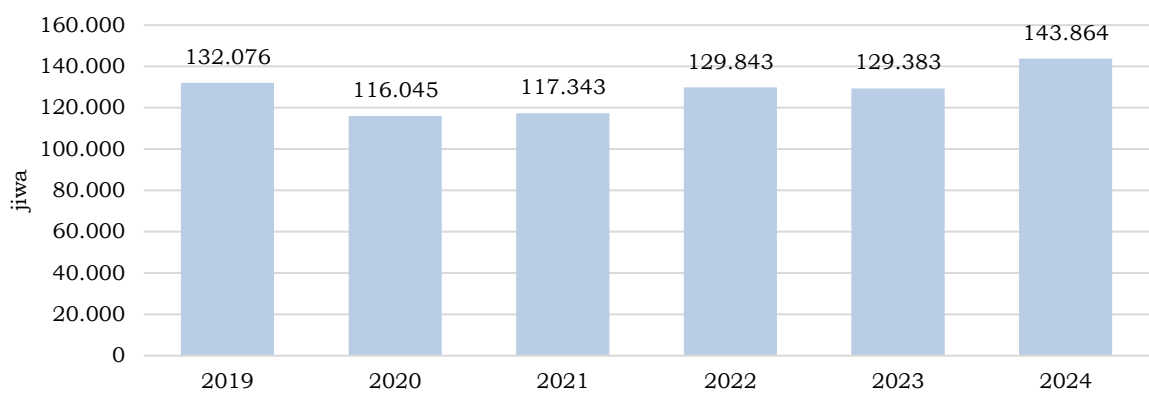
Pada tahun 2023, rasio ketergantungan Kabupaten Tangerang sebesar 42,7% dan rasio tersebut lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, rasio ketergantungan Kabupaten Tangerang menempati peringkat ketiga terendah. Semakin rendah angka rasio ketergantungan, maka semakin rendah juga beban tanggungan angkatan penduduk produktif.

H) Bonus Demografi

Berdasarkan penduduk kelompok umur, Kabupaten Tangerang sedang menikmati bonus demografi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan usia non produktif. Kondisi seperti ini menjadi tantangan pembangunan daerah, diperlukan penanganan dan pengelolaan yang baik untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat.

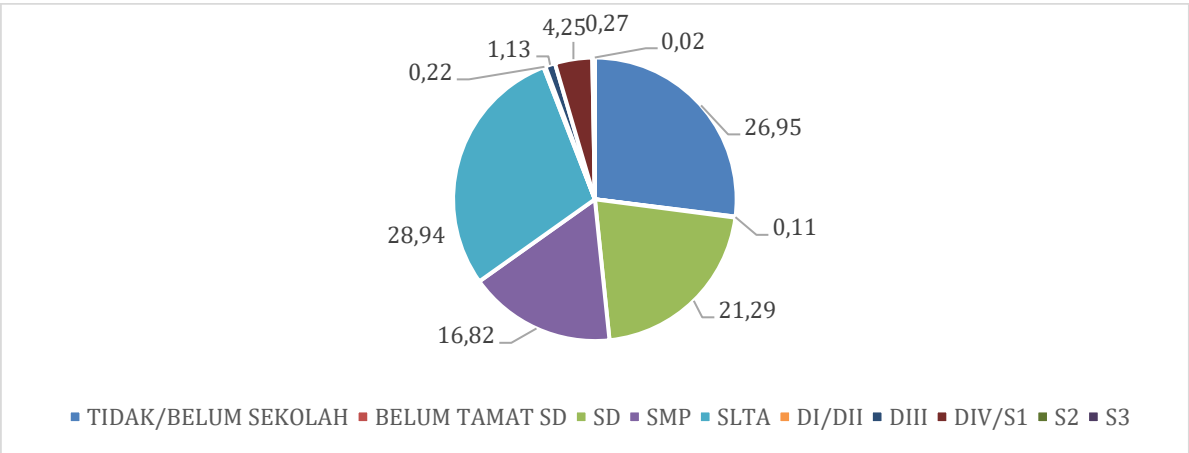
I) Penduduk Usia Lanjut

Penduduk usia lanjut adalah penduduk yang termasuk dalam usia lebih dari 65 tahun dan telah dianggap tidak produktif. Jumlah penduduk usia lanjut di Kabupaten Tangerang sempat relatif stagnan. Penduduk usia lanjut Kabupaten Tangerang pada 2024 mencapai 143.864 jiwa penduduk. Tingginya jumlah penduduk usia lanjut ini perlu didukung program ramah lansia untuk menjaga kesejahteraan lansia.



Gambar 2.18
Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2025

J) **Penduduk Menurut Pendidikan**
Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah aglomerasi perkotaan yang didominasi oleh tingkat pendidikan sekolah dasar (21,29%) dan SMA (28,94%). Tingginya masyarakat dengan pendidikan sekolah dasar dan tidak/belum bekerja selaras dengan komposisi masyarakat Kabupaten Tangerang yang masih tergolong pada usia anak-anak. Sementara itu, tingginya tamatan SMA diserap oleh sektor industri yang berkembang pesat di wilayah ini. Selain itu, Kabupaten Tangerang juga memiliki penduduk tamatan diploma, sarjana, pascasarjana, dan doktor yang cukup tinggi. Hal ini memberikan gambaran bahwa akselerasi pendidikan berkembang secara pesat di Kabupaten Tangerang. Selain itu, hal tersebut juga menggambarkan tingginya kualitas masyarakat Tangerang.



Gambar 2.19
Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2024

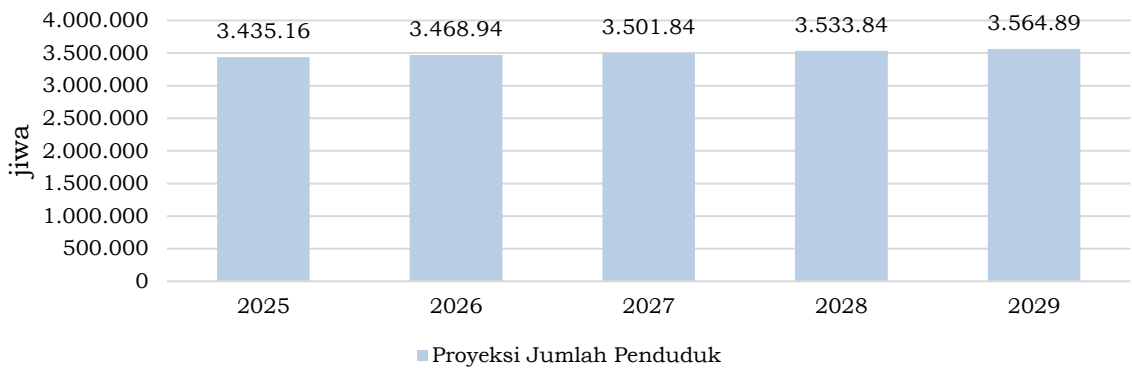
K) **Penduduk Menurut Agama**
Agama Islam merupakan agama yang memiliki penganut paling banyak di Kabupaten Tangerang yaitu dengan 3.236.913 jiwa. Selain itu, hal ini juga didukung dengan keberadaan berbagai sarana prasarana yang terbesar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Selain itu, Kristen menjadi agama dengan penganut terbesar kedua di wilayah ini, yaitu sebesar 113.286 jiwa. Sementara itu, Agama Budha dan Katolik di urutan berikutnya dengan jumlah penganut sebanyak 58.221 jiwa dan 48.129 jiwa.

Tabel 2.5
Penduduk Menurut Agama Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Agama	Jumlah
Budha	58.221
Hindu	2.006
Islam	3.236.913
Katolik	48.129
Kristen	113.286
Konghucu	971
Kepercayaan	180
Jumlah	3.459.706

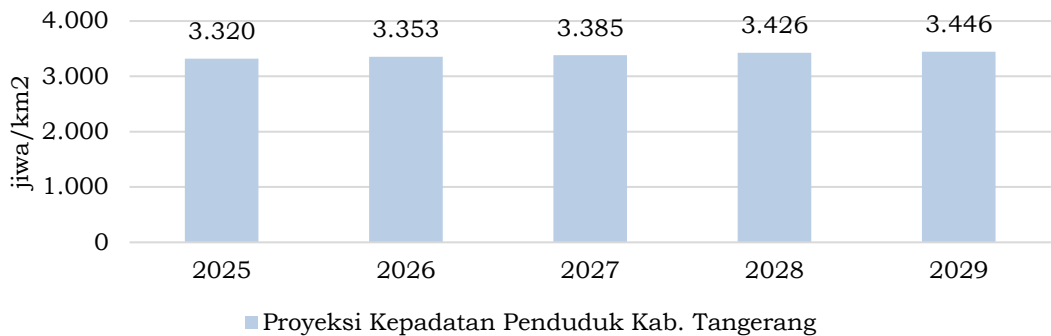
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

L) **Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029**
Proyeksi penduduk bermanfaat sebagai acuan dan target dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor pembangunan, seperti sektor kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, perumahan, dan sebagainya. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan yang menurun. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2029 diperkirakan mencapai 3.564.890 jiwa.



Gambar 2.20
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029
Sumber: Olahan Penyusun, 2024

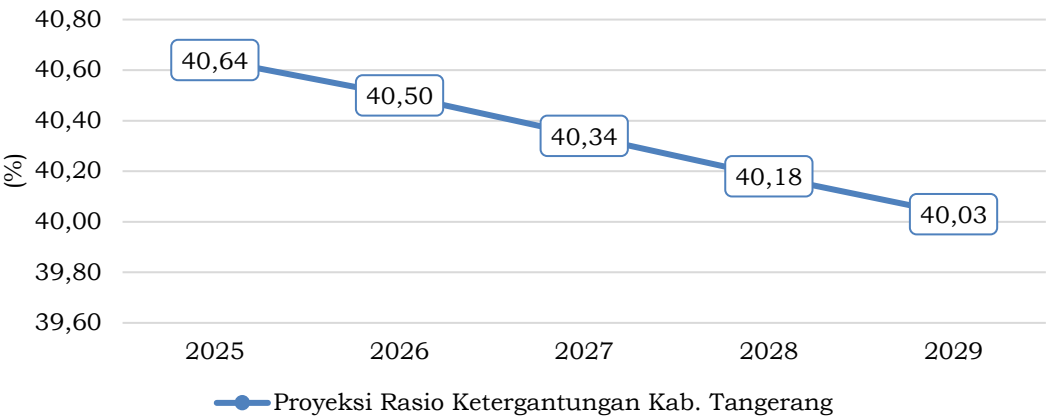
1) **Proyeksi Kepadatan Penduduk**
Kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023. Berdasarkan hasil proyeksi, kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2029 mencapai 3.446 jiwa yang berarti tiap 1 km² wilayah Kabupaten Tangerang dihuni oleh 3.446 jiwa penduduk.



Gambar 2.21
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029
Sumber: Olahan Penyusun, 2024

2) Proyeksi Rasio Ketergantungan

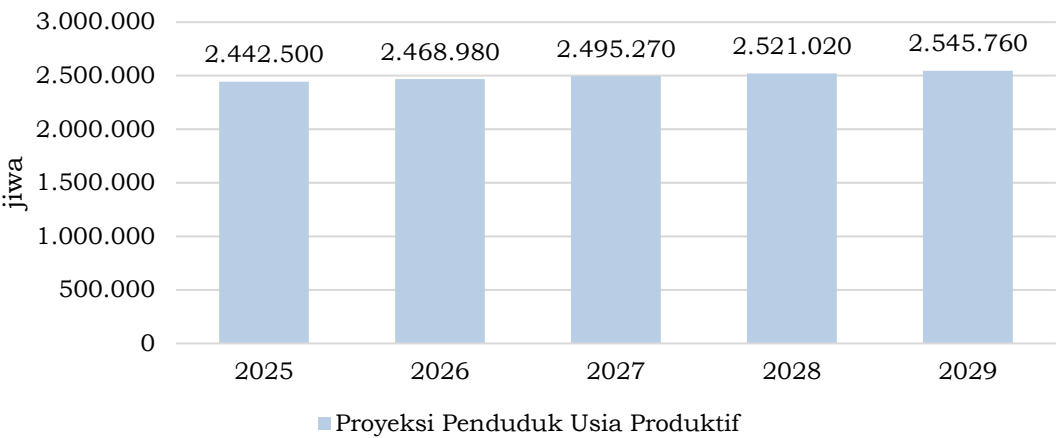
Aspek penting dalam kependudukan yang perlu diperhatikan adalah beban ketergantungan, yaitu perbandingan antara penduduk produktif dengan usia non produktif. Semakin rendah angka beban ketergantungan, mengindikasikan bahwa penduduk usia produktif tinggi. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang, rasio ketergantungan Kabupaten Tangerang cenderung menurun. Penurunan rasio ketergantungan ini terjadi akibat peningkatan jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2025 hingga 2029. Saat ini, Kabupaten Tangerang berada pada fase bonus demografi, ditandai dengan besarnya proporsi penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0 hingga 14 tahun dan lebih dari usia 65 tahun) dengan proporsi lebih dari 70 persen dari total penduduk, serta besaran rasio ketergantungan kurang dari 50 persen.



Gambar 2.22
Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029
Sumber: Olahan Penyusun, 2024

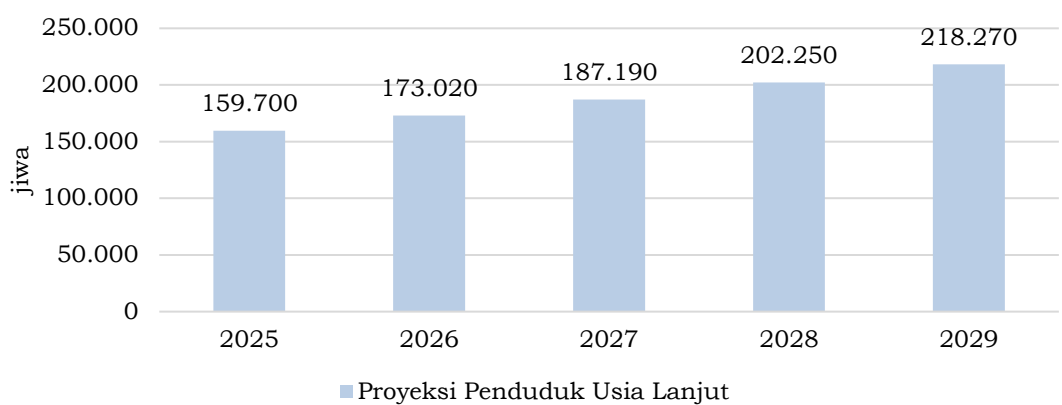
3) Proyeksi Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif di Kabupaten Tangerang diproyeksikan mengalami peningkatan pada kurun waktu 2025 - 2029. Peningkatan ini berkisar pada angka 2,4 hingga 2,5 juta penduduk usia produktif. Peningkatan ini salah satunya dapat berdampak pada peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah ini.



Gambar 2.23
Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029
Sumber: Olahan Penyusun, 2024

- 4) Bonus Demografi
- Berdasarkan hasil proyeksi pada rentang waktu 2025-2029, Kabupaten Tangerang masih mendapatkan bonus demografi yang ditandai dengan tingginya penduduk usia produktif. Bonus demografi ini perlu dimanfaatkan khususnya dalam mengelola produktivitas penduduk.
- 5) Proyeksi Penduduk Usia Lanjut
- Dalam kurun waktu 2025-2029, terdapat peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang cukup signifikan. Hal ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan fasilitas dan penanganan kesehatan maupun sosial bagi para lansia.



Gambar 2.24
Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029
Sumber: Olahan Penyusun, 2024

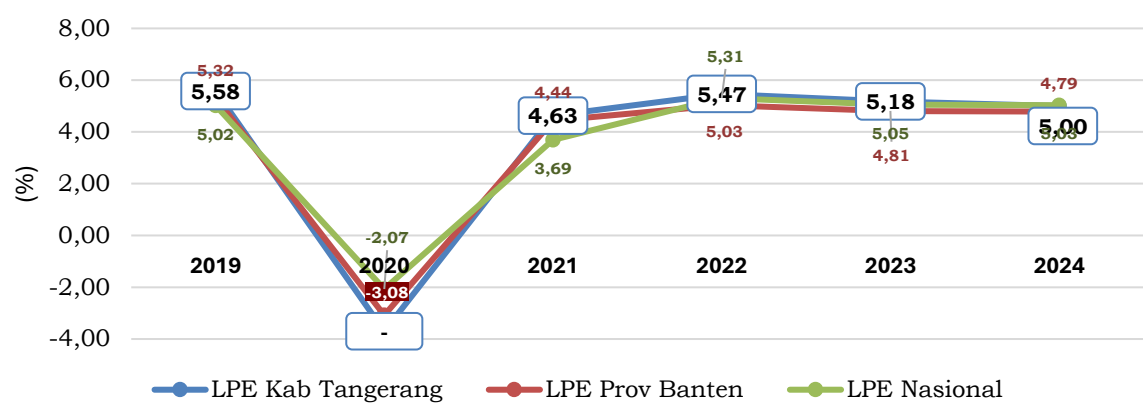
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi ketercapaian masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat dan mengetahui permasalahan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis ini terdiri atas dua hal, yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya.

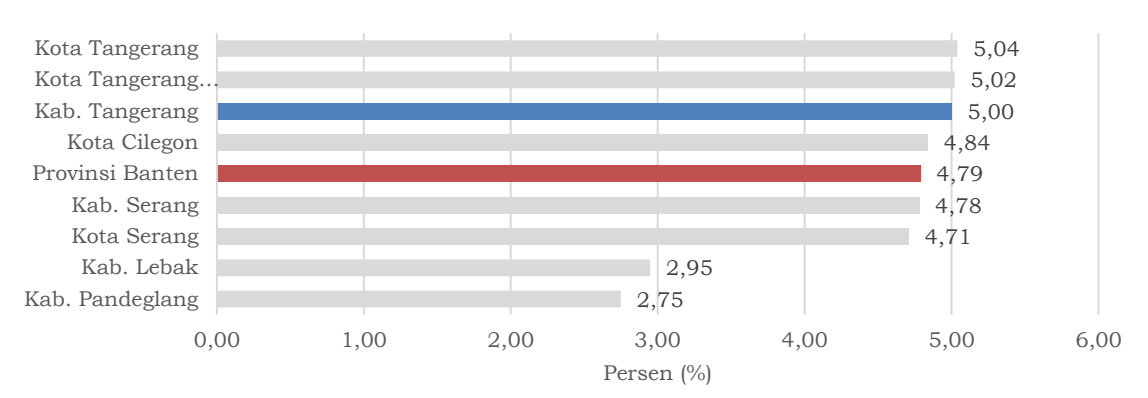
2.1.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

A) Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2024 yang terukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan dari waktu ke waktu khususnya setelah adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi tren pada tahun 2022-2024 menunjukkan penurunan LPE. Capaian LPE tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi makro wilayah dari berbagai sektor.



Gambar 2.25
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional
Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



Gambar 2.26
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2023
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Pada tahun 2024, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang sebesar 5,00 persen dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten dan nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian LPE Kabupaten Tangerang tertinggi ketiga. Secara lebih detail, lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tertinggi (2024), yaitu Administrasi Pemerintahan, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta jasa lainnya.

Tabel 2.6
PDRB Per Sektor ADHK Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	2,84	-0,84	2,26	1,74	-0,28
B	Pertambangan dan Penggalian	2,30	-5,90	-9,45	-12,35	0,25	4,80
C	Industri Pengolahan	3,20	-8,47	4,26	5,44	7,01	4,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-4,23	-12,35	11,69	5,59	-0,45	-13,42
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,71	8,60	5,81	1,35	5,69	1,93
F	Konstruksi	9,44	-3,29	11,96	8,25	1,74	5,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,22	-3,70	1,82	3,27	4,83	5,94
H	Transportasi dan Pergudangan	9,55	-5,32	9,90	7,89	5,84	6,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,86	-5,63	4,45	8,33	8,93	9,15
J	Informasi dan Komunikasi	9,69	9,12	5,17	6,84	9,34	6,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,72	1,56	6,07	6,81	-0,48	0,90
L	Real Estate	9,49	1,96	3,07	5,19	5,20	5,33
M, N	Jasa Perusahaan	9,20	-6,00	-2,25	4,46	8,52	8,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,75	-0,38	-0,76	1,09	3,17	26,36
P	Jasa Pendidikan	8,30	0,62	-1,10	-0,09	6,82	7,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,13	4,41	9,14	2,92	8,94	13,23
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,36	-6,11	1,39	7,77	10,98	4,68
Produk Domestik Regional Bruto		5,56	-3,76	4,70	5,47	5,18	5,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

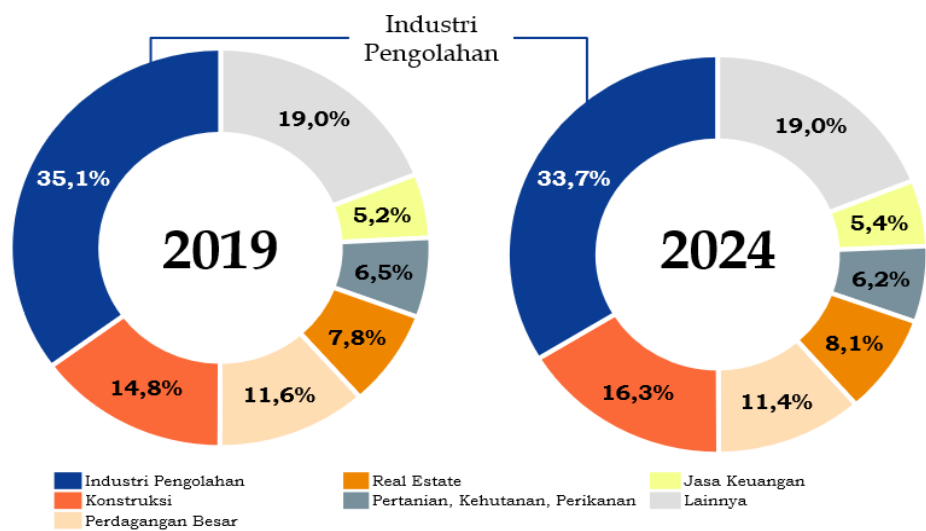
1) PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kabupaten Tangerang sebesar 186.104,15 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 62.789,24 miliar rupiah (33,7% dari PDRB), lapangan usaha Konstruksi sebesar 30.437,51 miliar rupiah (16,3% dari PDRB) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21.127,95 miliar rupiah (11,4% dari PDRB). Jika melihat perbandingan kontribusi sektor lapangan usaha PDRB tahun 2019 dan 2024, sektor konstruksi dan real estate menunjukkan peningkatan karena berbagai proyek pembangunan strategis nasional dan daerah dalam lima tahun terakhir.

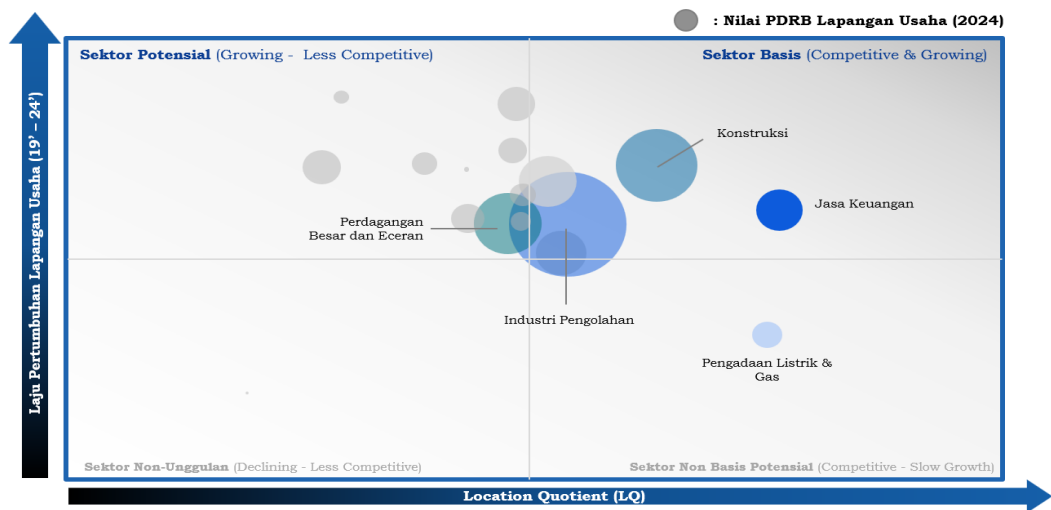
Tabel 2.7
PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
(dalam Miliar Rupiah)

Kode	Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB dalam Miliar Rupiah					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.045,55	9.435,98	9.473,10	10.135,98	10.921,46	11.456,58
B	Pertambangan dan Penggalian	58,54	55,54	50,93	45,88	47,24	51,19
C	Industri Pengolahan	49.164,34	45.200,55	48.117,52	53.176,12	58.318,29	62.789,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.693,53	4.096,16	4.630,76	4.936,40	4.893,85	4.053,44
E	Pengadaan Air	85,48	93,49	100,24	102,87	110,40	119,98
F	Konstruksi	20.797,30	20.159,33	23.459,65	26.926,03	28.336,15	30.437,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.234,31	15.934,12	16.403,33	17.698,47	19.324,82	21.127,95
H	Transportasi dan Pergudangan	4.320,45	4.148,08	4.651,38	5.330,79	6.083,52	6.711,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.133,60	2.021,19	2.123,07	2.342,57	2.586,71	2.904,43
J	Informasi dan Komunikasi	4.505,50	4.898,70	5.144,75	5.553,03	6.132,02	6.587,77
K	Jasa Keuangan	7.290,26	7.412,07	8.239,97	9.597,07	9.774,50	9.966,91
L	Real Estate	10.957,41	11.392,27	11.859,43	12.706,97	13.853,03	15.035,63
M.N	Jasa Perusahaan	1.537,10	1.470,01	1.454,75	1.569,84	1.769,91	1.974,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.469,16	2.571,45	2.618,05	2.742,84	2.941,08	3.813,07
P	Jasa Pendidikan	3.899,57	3.981,03	3.957,24	4.030,36	4.404,83	4.941,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	656,87	695,57	774,48	811,76	917,22	1.063,50
R.S.T.U	Jasa lainnya	2.240,33	2.166,13	2.225,00	2.461,19	2.886,59	3.068,90
PDRB (dalam miliar rupiah)		140.089,29	135.731,68	145.283,68	160.168,18	173.301,26	186.104,15

sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)



Gambar 2.27
Perbandingan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 dan Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

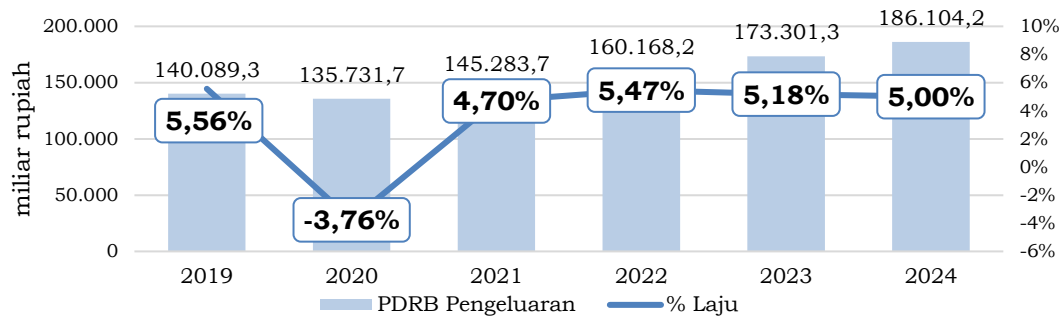


Gambar 2.28
Positioning Matrix Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tangerang
Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Gambar diatas merupakan analisis *Positioning Matrix* Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tangerang untuk mengetahui sektor unggulan berdasarkan tren laju dan besaran nilai PDRB dari 17 sektor lapangan usaha. Berdasarkan analisis tersebut, sebagian besar jenis lapangan usaha PDRB (termasuk lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar) merupakan Sektor Potensial. Maka dari itu diperlukan upaya peningkatan daya saing melalui akselerasi produktivitas tenaga kerja, pengembangan pasar dan value added lapangan usaha tersebut. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar (Industri Pengolahan dan Konstruksi) dan jasa keuangan termasuk dalam kategori “Sektor Unggulan”, yaitu yang tumbuh cepat dan berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah. Hal ini didukung dengan posisi Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari penyangga Jakarta dan Jabodetabek menjadikannya daerah strategis untuk pengembangan sektor perindustrian dan sektor jasa.

2) PDRB Menurut Pengeluaran

Selain dilihat berdasarkan lapangan usaha, kondisi perekonomian juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran pelaku ekonominya. Pada tahun 2024, PDRB ADHB menurut pengeluaran Kabupaten Tangerang sebesar 186.104,2 miliar rupiah. Laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peningkatan utamanya setelah pandemi tahun 2019.



Gambar 2.29
PDRB ADHB dan Laju PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Tabel 2.8
PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 (dalam Juta Rupiah)

PDRB Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tangerang (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	72.998.709,26	71.693.730,68	74.770.602,15	81.562.475,55	88.647.200,83	97.947.130
Konsumsi LNPRT	710.429,81	679.685,90	701.768,54	749.881,39	811.729,66	951.440
Konsumsi Pemerintah	5.031.644,99	4.621.839,02	4.890.012,15	5.219.166,20	6.001.089,65	6.914.430
Pembentukan Modal Tetap Bruto	35.233.021,18	35.450.044,41	37.900.875,49	40.717.192,10	46.853.056,17	50.185.960
Perubahan Inventori	4.346,34	716,21	61,28	300,11	49.843,77	240.860
Net Ekspor	26.111.136,01	23.285.665,67	27.020.356,91	31.919.161,45	30.945.748,91	29.864.320
Ekspor	98.587.772,18	94.833.778,71	105.562.340,92	132.194.567,86	150.386.973,45	
Impor	72.476.636,17	71.548.113,04	78.541.984,01	100.275.406,41	119.441.224,54	
PDRB	140.089.287,58	135.731.681,88	145.283.676,52	160.168.176,80	173.302.663,99	186.104.150

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

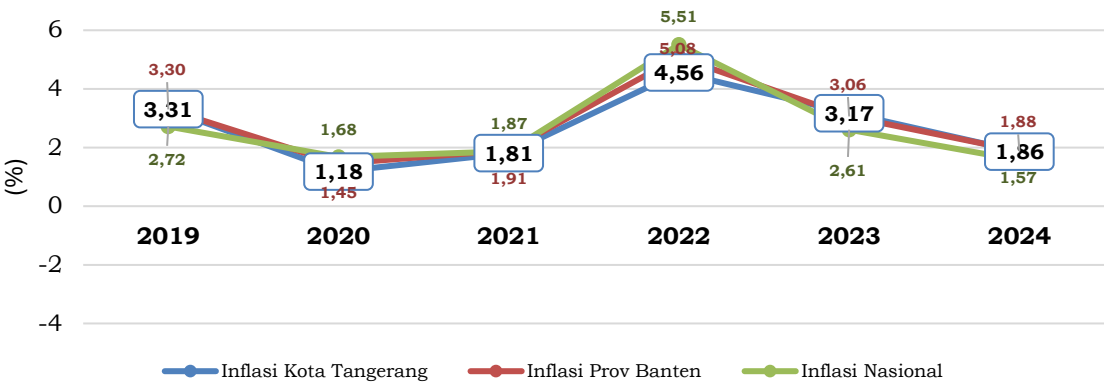
Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran tahun 2024, komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki kontribusi terbesar yaitu sekitar 52,63%. Hal tersebut juga berhubungan dengan tingkat inflasi di Kabupaten Tangerang yang mempengaruhi dengan daya beli masyarakat konsumsi barang dan jasa yang lebih lanjut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada Triwulan IV 2024, Tangerang mengalami inflasi yoy (*year on year*) sebesar 2,15%.. Selain itu, ekspor luar wilayah juga mempunyai peran penting yaitu sebesar 82,53% produk wilayah Kabupaten Tangerang diekspor ke luar wilayah.

Sementara itu, unsur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang dapat menggambarkan investasi, memberikan kontribusi sebesar 26,97% kepada perekonomian. Kinerja investasi Kabupaten Tangerang terlihat dari laju kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN. Dalam lima tahun terakhir, nilai PMDN Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif dan berhasil meningkat 55,3 dari tahun 2021-2022 (DPMPTSP, 2022). Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh

berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi.

B) Laju Inflasi

Laju inflasi adalah persentase peningkatan kenaikan harga barang dan jasa konsumsi rumah tangga. Laju inflasi berpengaruh erat terhadap perekonomian masyarakat salah satunya adalah daya beli masyarakat. Inflasi Kabupaten Tangerang merujuk pada inflasi Kota Tangerang¹. Berdasarkan data BPD Kabupaten Tangerang, secara umum laju inflasi Kabupaten Tangerang meningkat drastis setelah menurun pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga di wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (2024), laju inflasi 2024 (yoy), inflasi tetap terjaga mengalami perlambatan dari tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan inflasi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Penurunan laju inflasi perlu diperhatikan, karena deflasi yang berkepanjangan bisa mengindikasikan pelemahan ekonomi. Maka dari itu diharapkan inflasi terus terjaga di 2,5%+1,0%.

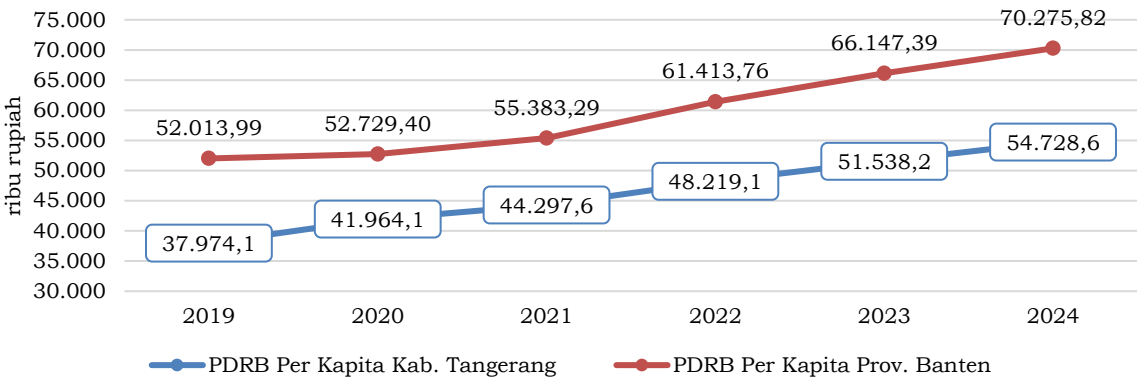


Gambar 2.30
Laju Inflasi Kota Tangerang (termasuk Kabupaten Tangerang) dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024); Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Banten, Bank Indonesia (2025)

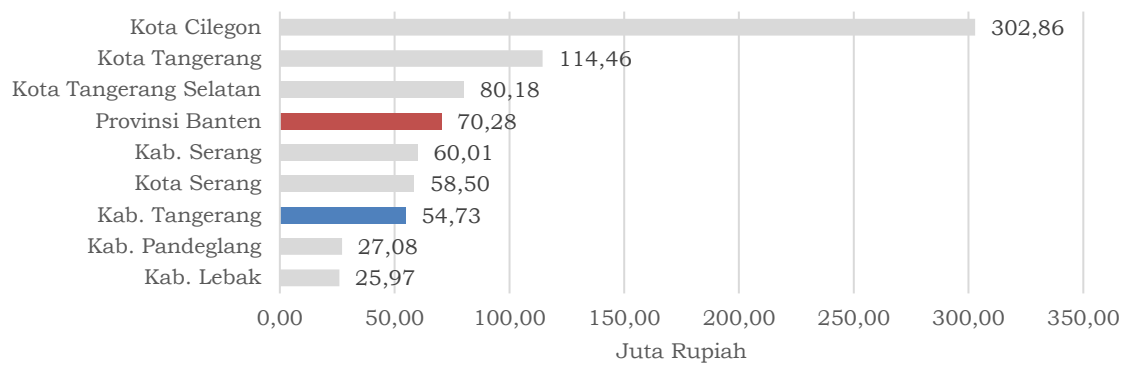
C) PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan rata-rata masyarakat dalam suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu 2019-2024. Hal ini menunjukkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang dapat mengindikasikan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, PDRB per kapita Kabupaten Tangerang di bawah Provinsi Banten.



¹ Inflasi Kabupaten Tangerang merujuk kepada inflasi Kota Tangerang sebagai *sister city* dengan pola konsumsi dan besaran PDRB yang hampir sama serta letak geografis yang berdekatan dengan Kabupaten Tangerang

Gambar 2.31
PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

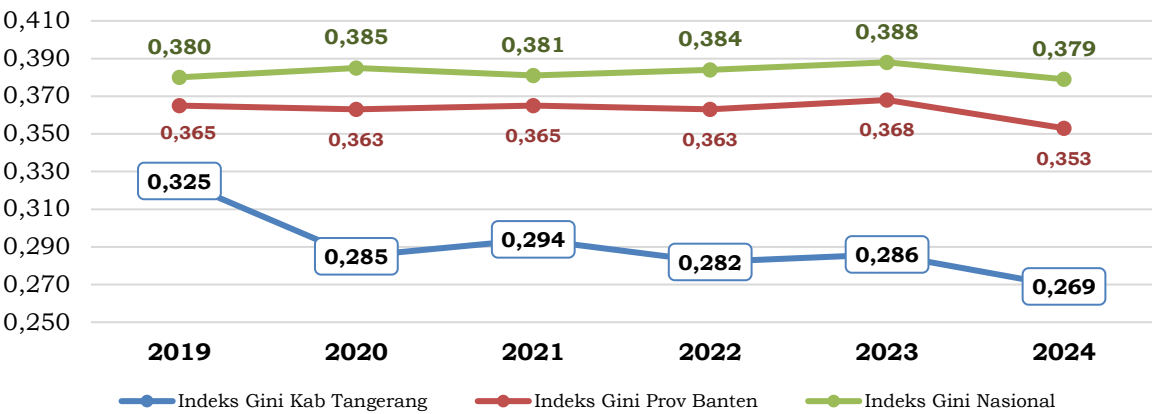


Gambar 2.32
Perbandingan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Pada tahun 2024, capaian PDRB ADHB per kapita Kabupaten Tangerang sebesar 54,73 juta rupiah dan capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian PDRB per kapita Kabupaten Tangerang terendah ketiga. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi dan nilai tambah sektor unggulan dalam rangka mendorong pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang.

D) Indeks Gini

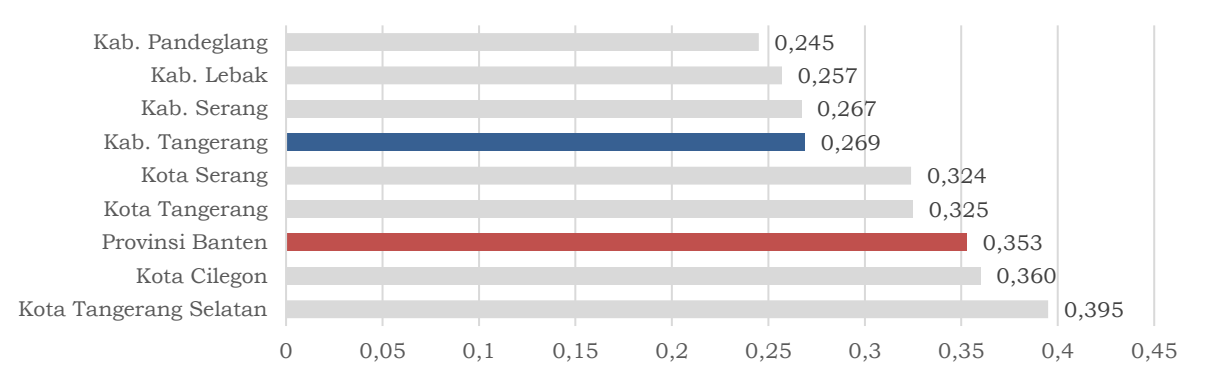
Indeks Gini merupakan salah satu tolak ukur dalam mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Pada tahun 2024, Indeks gini Kabupaten Tangerang sebesar 0,269 dalam kategori ‘Rendah’. Indeks tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang cenderung merata dan tidak memiliki *gap* yang tinggi antar kelompok masyarakat yang dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah ini cenderung rendah. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Gini Kabupaten Tangerang cenderung menurun dan capaian tersebut lebih baik dibandingkan Provinsi Banten dan nasional.



Gambar 2.33
Indeks Gini Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

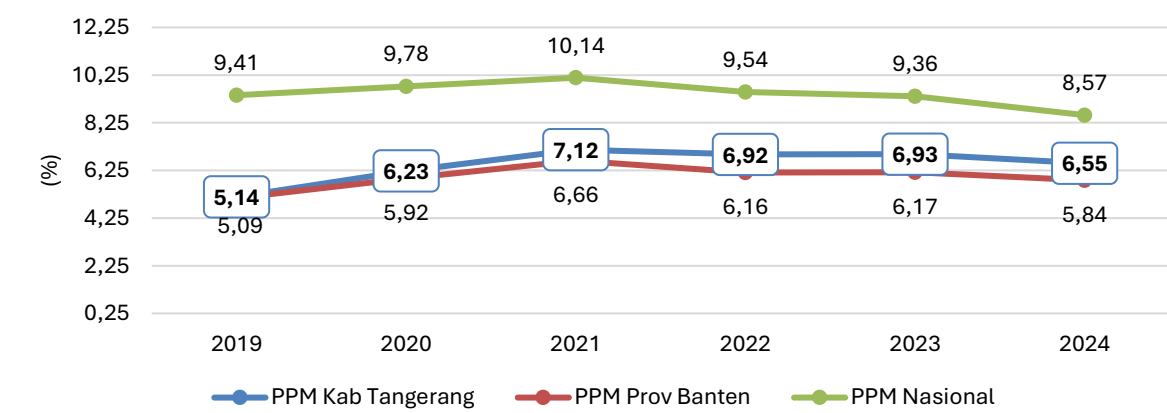
Indeks Gini Kabupaten Tangerang tergolong rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2024. Kabupaten Tangerang berada pada posisi ke-empat dengan

kedudukan di atas Provinsi Banten yang memiliki capaian sebesar 0,353. Kabupaten/kota dengan indeks gini paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kota Tangerang Selatan dengan angka 0,395. Sementara itu, indeks gini paling rendah yaitu Kabupaten Pandeglang dengan angka 0,245.



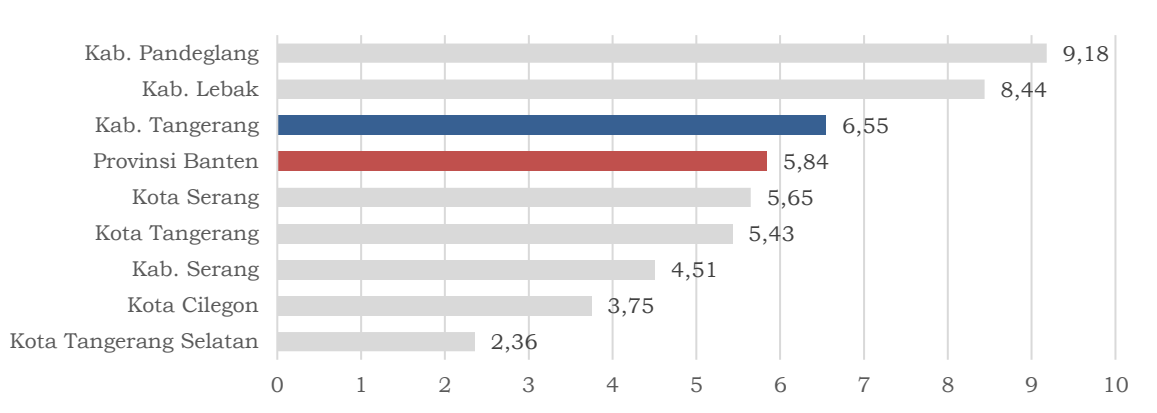
Gambar 2.34
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

E) Persentase Penduduk Miskin
Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dalam kurun waktu 2019-2021, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan akibat pandemi covid-19. Pada periode tahun 2022-2024, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan. Hal ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.35
Persentase Penduduk Misikin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

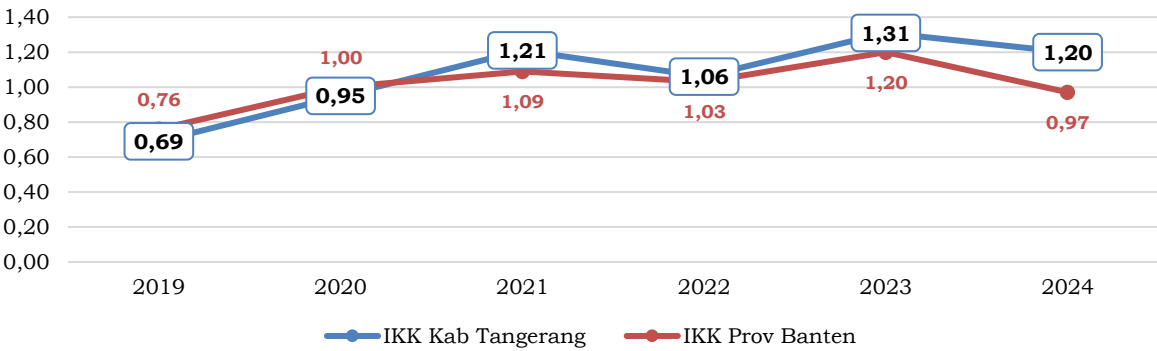
Persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2024. Kabupaten Tangerang berada pada posisi ke-tiga tertinggi dengan kedudukan di atas Provinsi Banten yang memiliki capaian sebesar 5,84%. Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Pandeglang dengan angka 9,18%. Sementara itu, tingkat kemiskinan paling rendah yaitu Kota Tangerang Selatan dengan angka 2,36%.



Gambar 2.36
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

F) Rasio Kesenjangan Kemiskinan

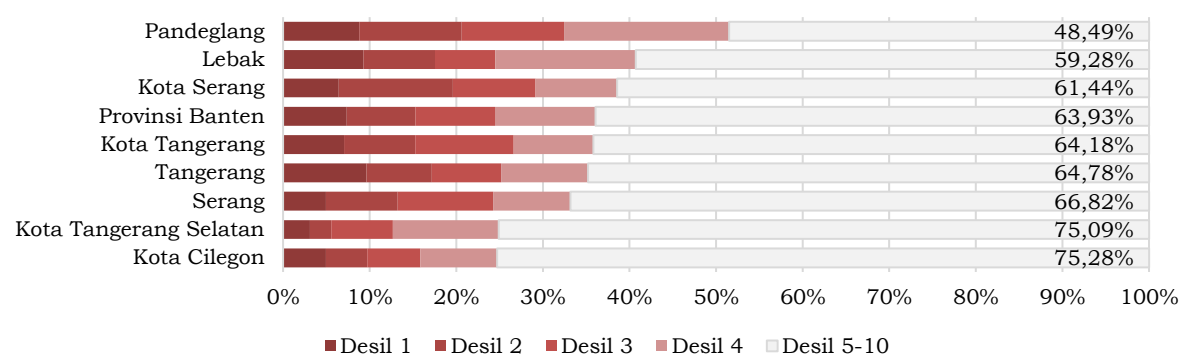
Rasio Kesenjangan Kemiskinan yang tinggi menunjukkan kualitas kesejahteraan yang belum optimal. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tangerang relatif tinggi yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang mencapai nilai 1,20. Tingginya indeks ini mengindikasikan besarnya *gap* antara pendapatan masyarakat miskin dengan garis kemiskinan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.37
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

G) Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga (Desil dan/atau Kemiskinan)

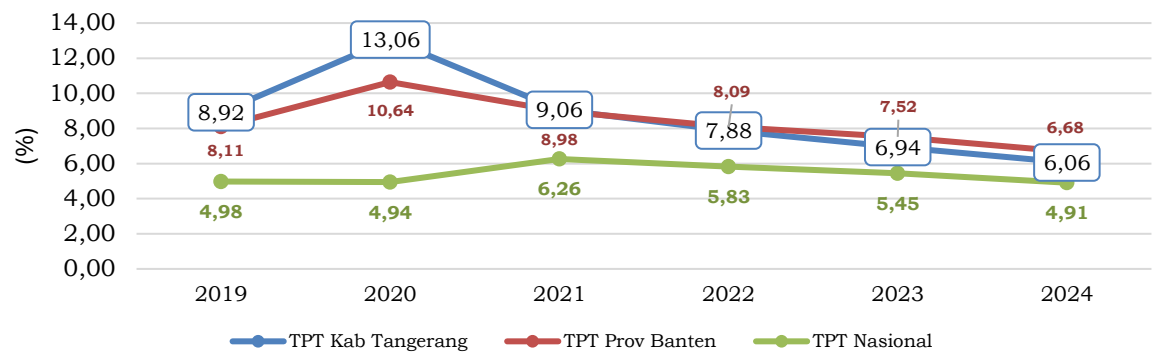
Tingkat kesejahteraan rumah tangga ditunjukkan dari persentase kelompok pendapatan dalam instrumen Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data P3KE digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan sosial bagi keluarga dan individu. Diagram dibawah ini menunjukkan persentase jumlah penduduk berdasarkan kelompok pendapatan desil 1 (10%), desil 2(20%), desil 3 (30%), desil 4 (40%), desil 5-10 (> 40%). Desil 1 termasuk dalam kelompok miskin dan Desil 2-4 termasuk dalam kelompok rentan miskin.



Gambar 2.38
Perbandingan Persentase Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pendapatan (Desil) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Website P3KE Kemenko PMK (<https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>)

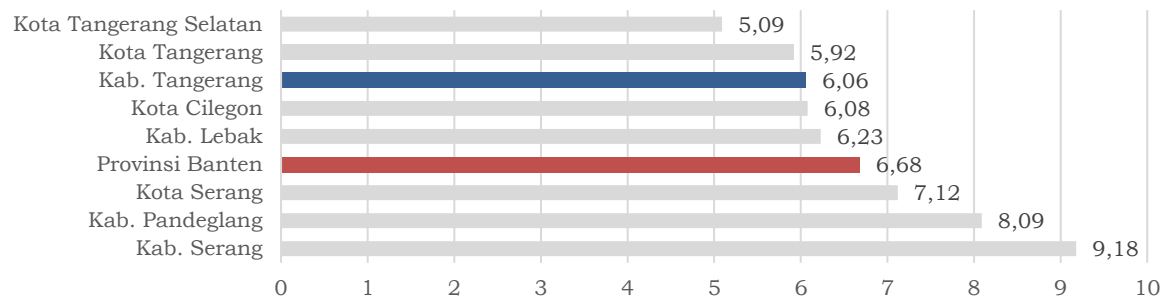
Berdasarkan gambar diatas, jumlah rumah tangga pada desil 1-4 di Kabupaten Tangerang terendah ke-4 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Jumlah rumah tangga dengan pendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 295.195 KK atau 35,2% dari total KK. Sementara itu, jumlah individu dengan pendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 1.169.049 jiwa.

H) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan nilai persentase jumlah masyarakat yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPT digunakan sebagai alat evaluasi kondisi penyerapan tenaga kerja dalam suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 6,06% (102.510) jiwa tergolong dalam kategori sedang dan berada di atas TPT nasional. Kondisi ini mencerminkan tingginya pengangguran di wilayah Kabupaten Tangerang yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan. Kondisi ini memerlukan penanganan untuk dapat membuka lapangan kerja bagi seluruh masyarakat.



Gambar 2.39
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

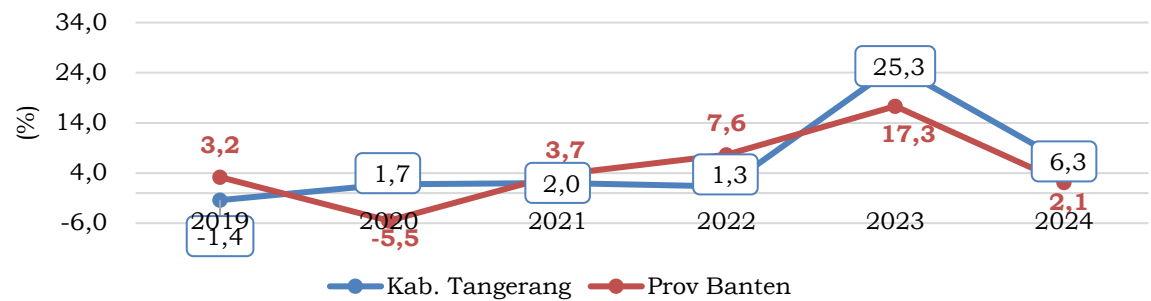
Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cenderung rendah dengan posisi ketiga terendah pada tahun 2024. Sementara itu, kabupaten/kota lain di Provinsi Banten dengan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah adalah Kota Tangerang Selatan dengan TPT sebesar 5,09%, sementara TPT tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Serang sebesar 9,18%.



Gambar 2.40
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

I) Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

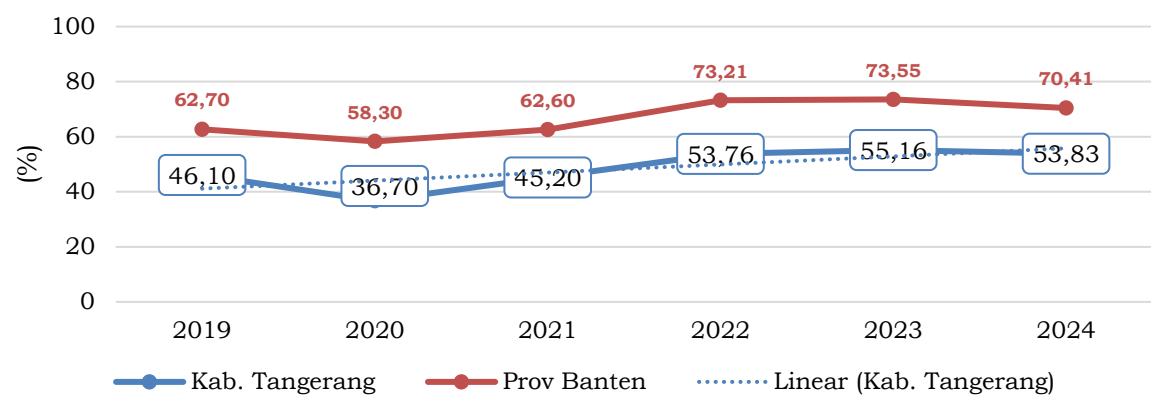
Laju pertumbuhan PDRB terhadap pekerja di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023, tetapi menurun pada tahun 2024. Hal ini disebabkan peningkatan partisipasi angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan PDRB Kabupaten Tangerang. Secara umum laju pertumbuhan PDRB ini tergolong rendah dan diperlukan strategi dalam mendorong produktivitas tenaga kerja dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.41
Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Analisis Penyusun, Badan Pusat Statistik, 2024

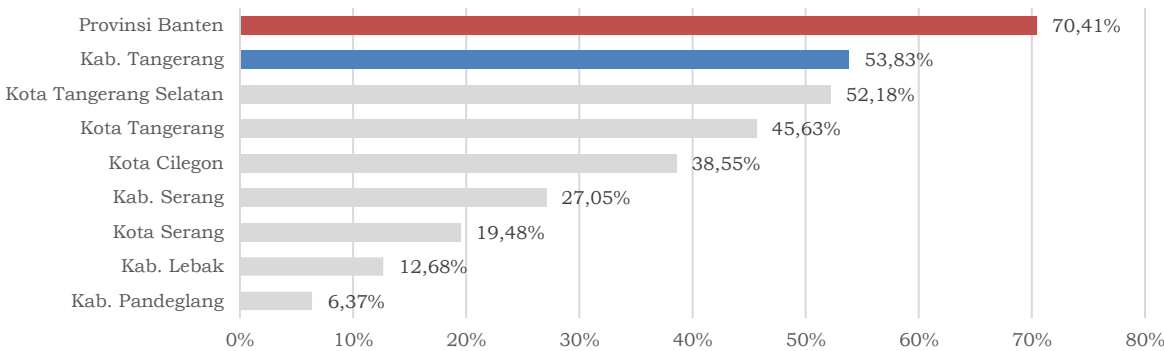
J) Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dengan tren relatif meningkat pada kurun waktu 2019-2024. PAD Kabupaten Tangerang menjadi salah satu sumber pendapatan yang memiliki proporsi terbesar. Akan tetapi, persentase PAD terhadap pendapatan di Kabupaten Tangerang lebih rendah dibandingkan Provinsi Banten.



Gambar 2.42
Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten
Tahun 2019-2024

Sumber: Website DJPK Kementerian Keuangan RI, 2024; Analisis Penyusun



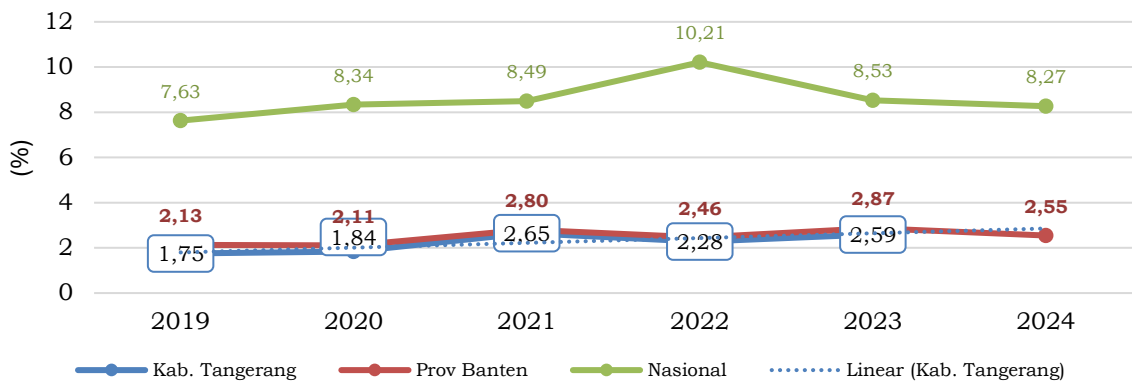
Gambar 2.43
Perbandingan Persentase PAD terhadap Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten Tahun 2024

Sumber: Website DJPK Kementerian Keuangan RI, 2024; Analisis Penyusun

Pada tahun 2024, realisasi PAD Kabupaten Tangerang sebesar 4,56 triliun rupiah dengan pendapatan sebesar 8,48 triliun rupiah sehingga persentase PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 53,83%. Capaian tersebut paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, tetapi lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Banten.

K) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.



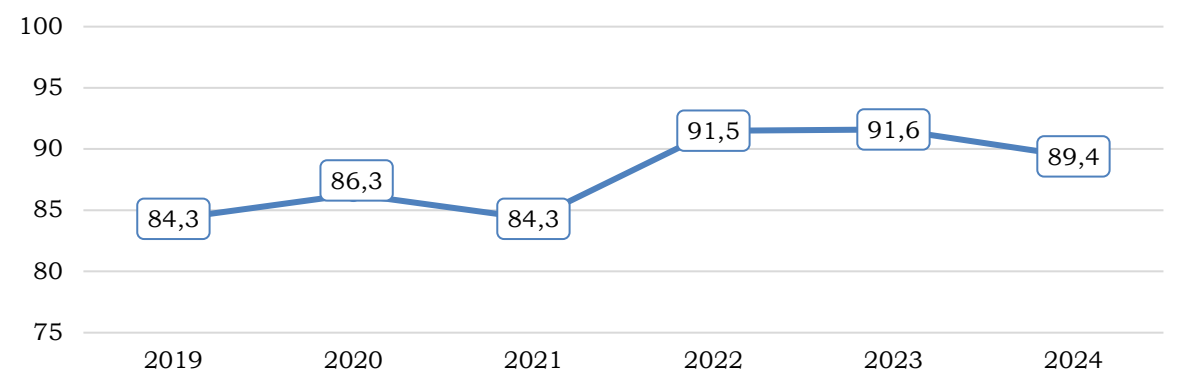
Gambar 2.44
Perbandingan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Nasional dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 2,59 dan capaian ini lebih baik dibandingkan Provinsi Banten (2,87) dan nasional (8,27). Akan tetapi, merujuk pada tren dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (semakin rendah/buruk). Maka dari itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kecukupan pangan yang bergizi dan berkelanjutan.

L) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah salah satu alat ukur untuk mengetahui kondisi kualitas dan kuantitas cadangan pangan dalam suatu wilayah. Capaian Skor PPH Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Skor PPH Kabupaten Tangerang 84,3 meningkat hingga 91,6 pada tahun 2023, mengalami penurunan di 2024 dengan skor 89,4. Skor PPH ini menunjukkan ketercukupan gizi dan keragaman komoditas pangan yang dikonsumsi masyarakat semakin ideal.



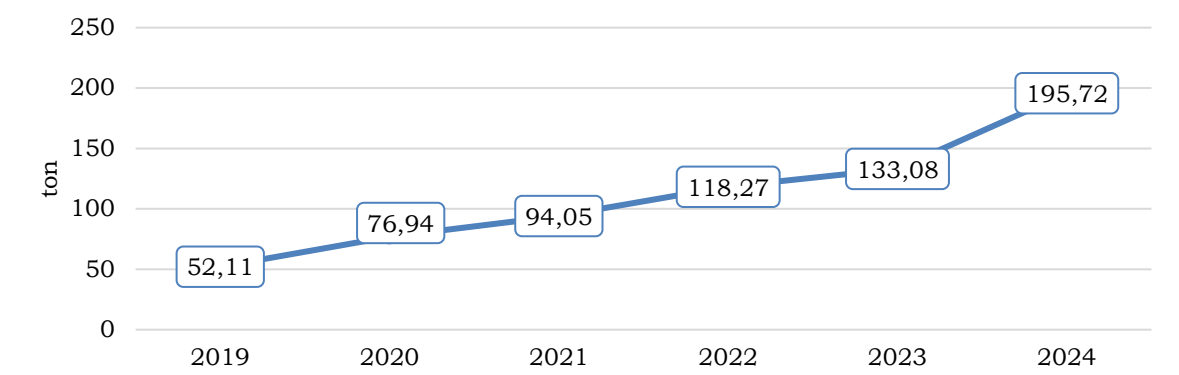
Gambar 2.45

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2026

M) Penguatan Cadangan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan. Dalam menjamin ketahanan pangan, Kabupaten Tangerang melakukan berbagai upaya penguatan cadangan pangan. Dalam kurun waktu 2019-2024, capaian penguatan cadangan pangan mengalami peningkatan.



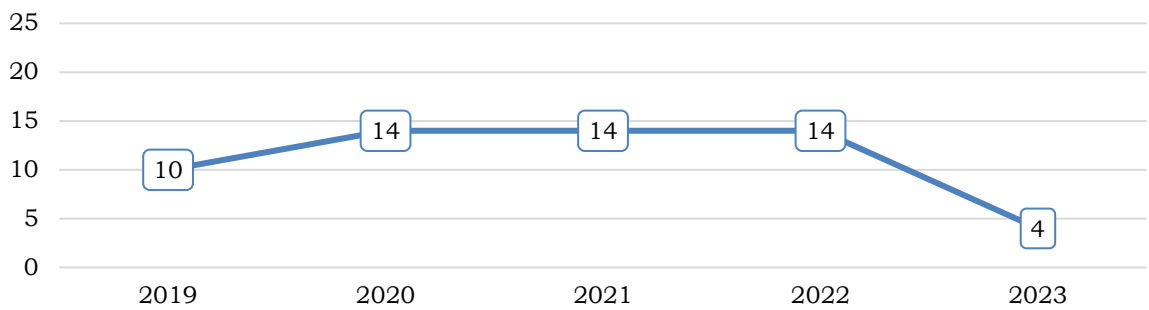
Gambar 2.46

Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

N) Penanganan Daerah Rawan Pangan

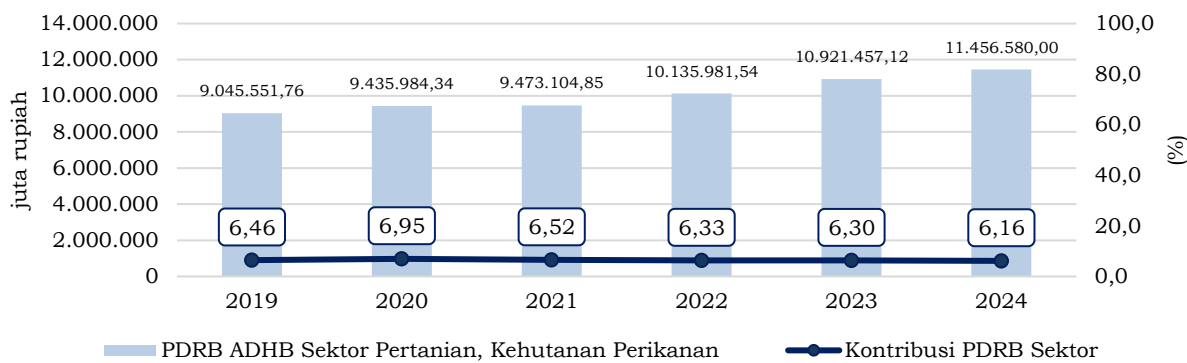
Penguatan ketahanan pangan juga dilaksanakan melalui program penanganan daerah rawan pangan. Penanganan daerah rawan pangan berfokus pada pemenuhan cadangan pangan dalam suatu daerah. Pada 2020- 2023 jumlah daerah rawan pangan yang ditangani mencapai 14 daerah dan pada tahun 2023 menurun menjadi 4 daerah.



Gambar 2.47
Jumlah Daerah Rawan Pangan yang Ditangani di Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2023

Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2026; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

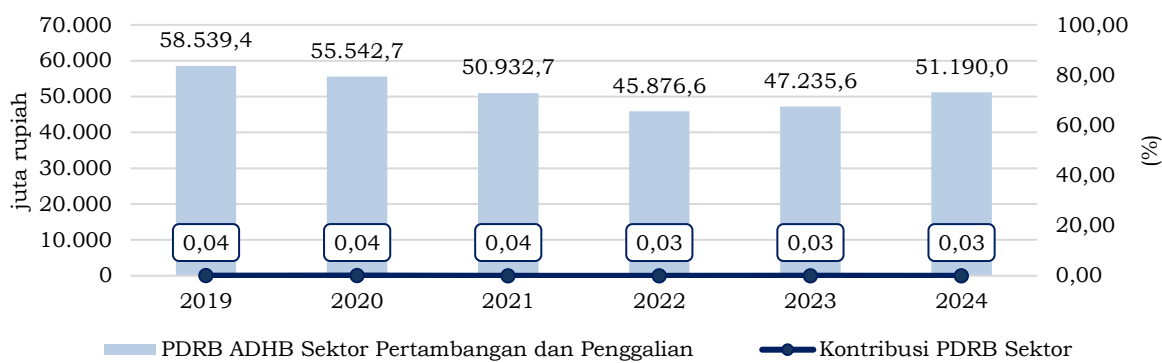
- O) **Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB**
Pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sektor penopang ekonomi berbagai wilayah. Sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Tangerang bukan menjadi penyokong ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian/perkebunan yang relatif rendah dan terus menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11.456,58 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 6,16% terhadap total PDRB Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.48
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

- P) **Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB**
Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor primer dalam perekonomian. Kontribusi sektor pertambangan Kabupaten Tangerang cenderung rendah dan mencapai nilai 0,03% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan bukan merupakan sektor yang menyokong perekonomian Kabupaten Tangerang.

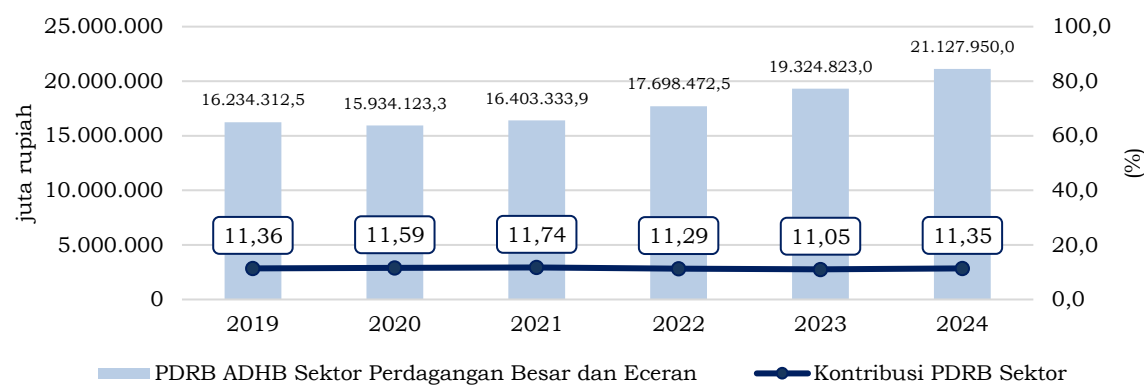


Gambar 2.49
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Q) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sebagai salah satu kota penyangga Jabodetabek, Kabupaten Tangerang tumbuh didukung dengan kegiatan perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan Kabupaten Tangerang cenderung tinggi meski mengalami tren penurunan. Dalam rentang waktu 2019-2024, kontribusi sektor perdagangan berkisar pada angka 11% dalam PDRB. Hal ini menunjukkan kuatnya perkembangan sektor perdagangan dalam menyokong ekonomi Kabupaten Tangerang.

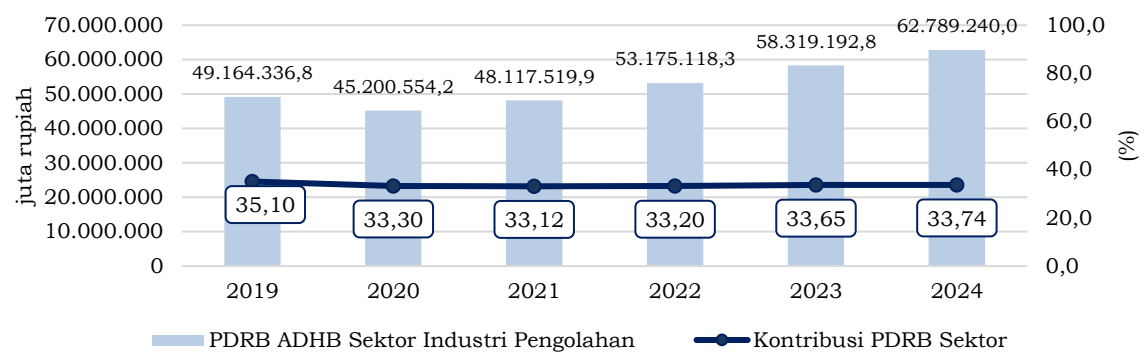


Gambar 2.50

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

R) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang tumbuh pesat di Kabupaten Tangerang. Sektor industri memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB meski tren pertumbuhannya cenderung stagnan. Kontribusi sektor industri dalam PDRB mencapai berkisar antara 34-35%. Hal ini menunjukkan bahwa industri menjadi sektor penyokong perekonomian Kabupaten Tangerang.

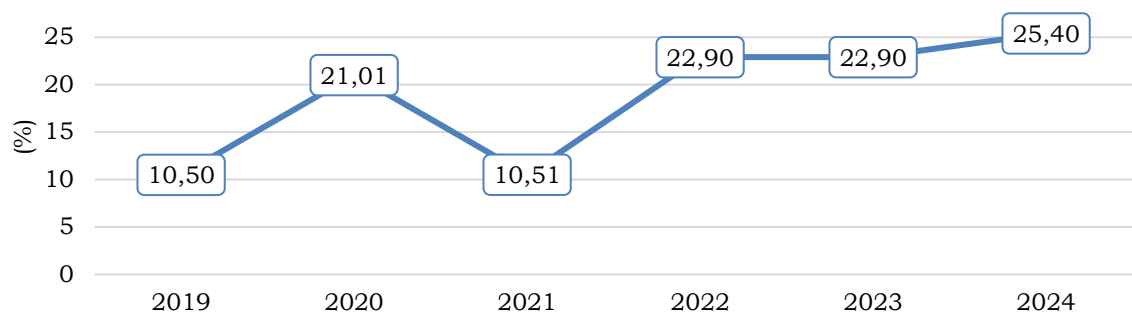


Gambar 2.51

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

S) Pertumbuhan Industri

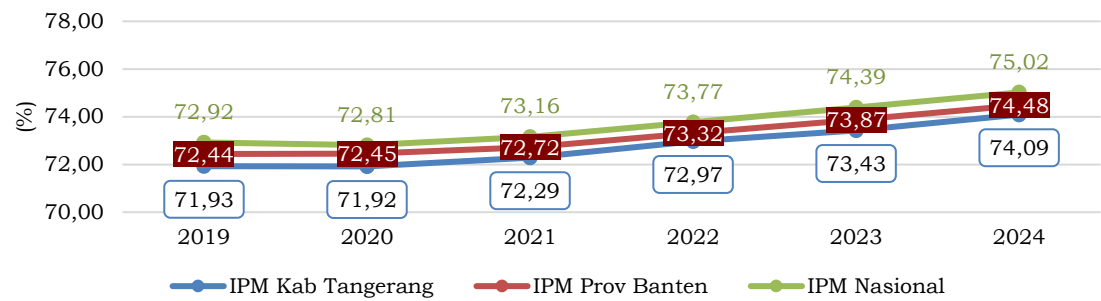
Industri sebagai salah satu sektor yang berkembang pesat di Kabupaten Tangerang tidak sering dengan pertumbuhan industri di wilayah ini. Pertumbuhan Industri Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dalam kurun waktu 2020-2021 dan meningkat pada tahun 2022-2024. Pertumbuhan industri di wilayah ini berkisar antara 10-22%.



Gambar 2.52
Pertumbuhan Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang

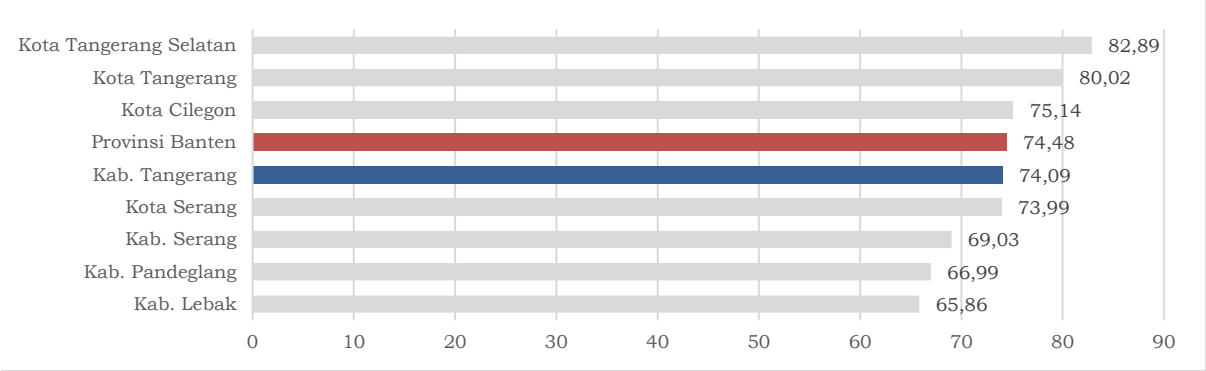
2.1.2.2 KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDAYA

A) Indeks Pembangunan Manusia
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 74,09 dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut memberikan indikasi adanya peningkatan kualitas masyarakat di wilayah ini. Meskipun demikian, IPM Kabupaten Tangerang lebih rendah dibandingkan Provinsi Banten. Kondisi ini dimungkinkan terjadi akibat tingkat pengeluaran per kapita dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang tergolong rendah dan di bawah Provinsi Banten dan Nasional. Maka dari itu, diperlukan fokus penanganan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan daya saing SDM di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.53
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional, 2024

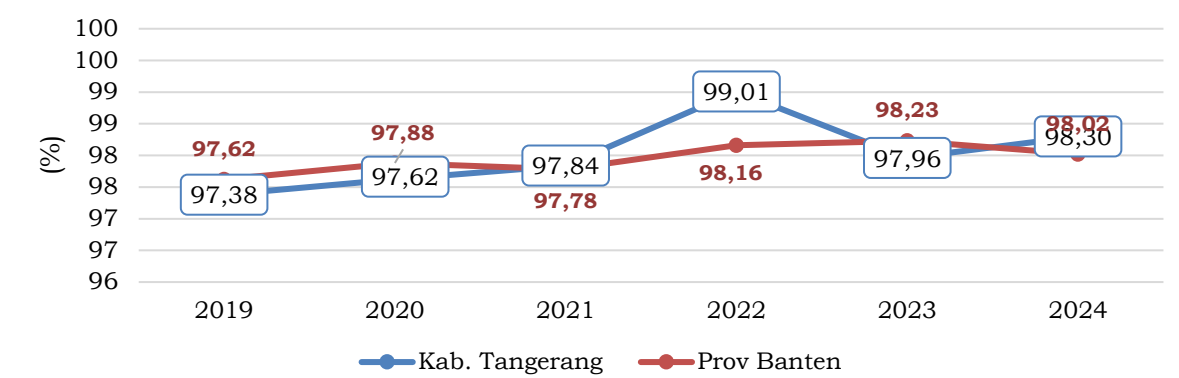
Dalam lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan, tetapi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang masih menempati posisi kelima IPM terendah. Sementara itu, IPM tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan (sebesar 82,89).



Gambar 2.54
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2024

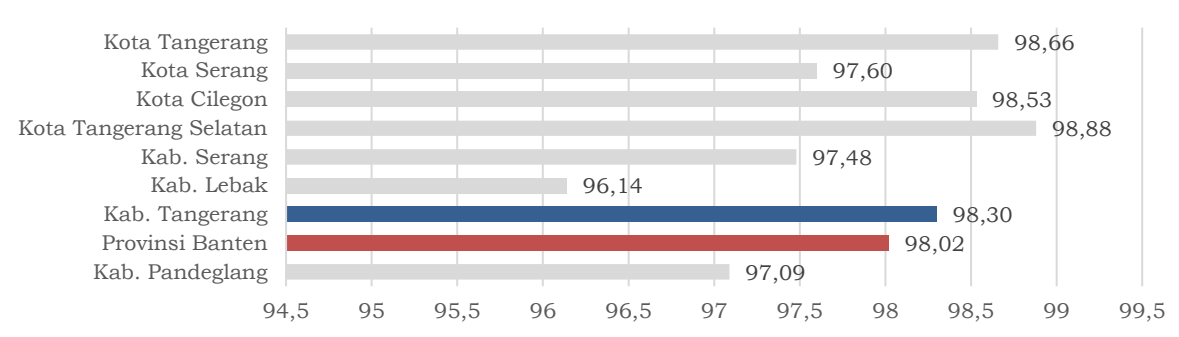
B) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan indikator pengukur kualitas dan kemampuan masyarakat di atas 15 tahun dalam membaca dan menulis huruf. Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kabupaten Tangerang memiliki angka melek huruf 98,30% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mampu membaca dan menulis secara lancar. Masyarakat buta huruf didominasi dalam rentang usia 50 tahun ke atas. Namun, juga terdapat beberapa masyarakat dalam rentan usia 15-19 tahun dan 35-39 tahun yang masih belum memiliki kemampuan baca tulis.



Gambar 2.55
Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, 2025

Secara umum, angka melek huruf penduduk di atas 15 tahun di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 di atas capaian Provinsi Banten dan wilayah di sekitarnya. Kabupaten/Kota dengan angka melek huruf paling tinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan dengan angka sebesar 98,88. Sementara Kabupaten Lebak menjadi wilayah di Provinsi Banten dengan angka melek huruf paling rendah pada tahun 2024 dengan angka sebesar 96,14.



Gambar 2.56
Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2.9
Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf 2019-2023

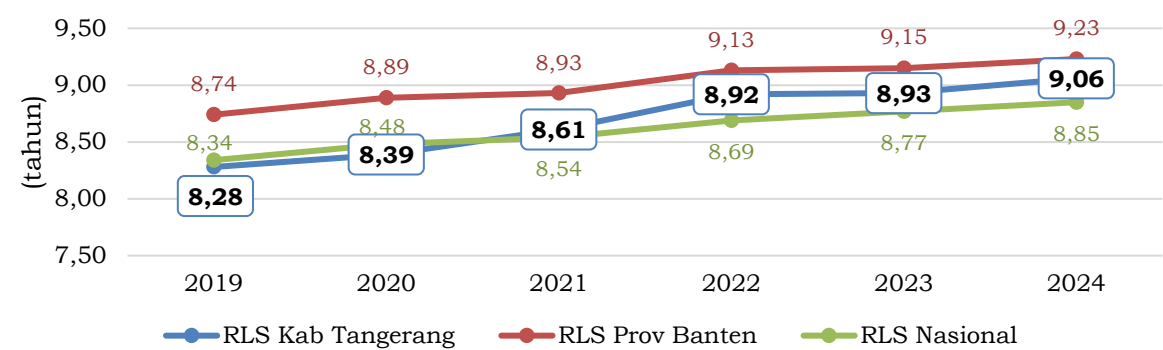
Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
15-19	99,98%	100,00%	99,84%	100,00%	99,92%
20-24	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
25-29	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
30-34	100,00%	100,00%	99,38%	99,67%	100,00%
35-39	99,97%	100,00%	100,00%	99,81%	99,35%
40-44	100,00%	100,00%	99,30%	99,91%	100,00%
45-59	99,06%	96,66%	99,04%	100,00%	100,00%

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
50+	86,41%	89,22%	91,28%	95,81%	92,07%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

C) Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan nilai yang menunjukkan rerata lama waktu yang dihabiskan oleh masyarakat di atas 15 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya. Kabupaten Tangerang memiliki lama rerata sekolah 9,06 tahun atau hampir setara dengan waktu menempuh pendidikan setara SMP. Secara umum RLS Kabupaten Tangerang terus meningkat dari waktu ke waktu yang menunjukkan peningkatan kualitas capaian pendidikan di wilayah ini. Namun, jika di sandingkan dengan wilayah yang lebih luas, Kabupaten Tangerang memiliki capaian RLS yang cenderung lebih rendah. Hal ini menunjukkan diperlukannya upaya peningkatan dan pemupukan semangat dalam mengenyam pendidikan formal bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

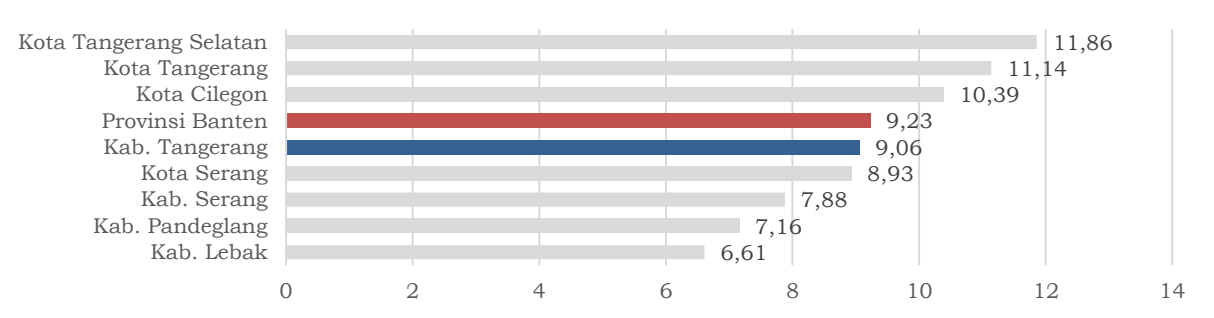


Gambar 2.57

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2024

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 berada pada posisi standar atau di tengah-tengah apabila dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten, dan masih di bawah capaian Provinsi Banten yang mencapai angka 9,23 tahun. Wilayah di Provinsi Banten dengan rata-rata lama sekolah paling tinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan yang mencapai angka 11,86 tahun. Sementara Kabupaten Lebak memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dengan angka 6,61 tahun.



Gambar 2.58

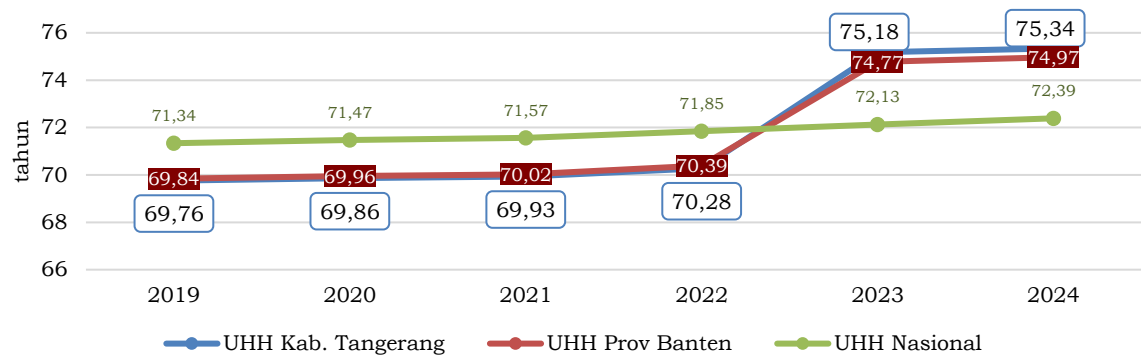
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

D) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan gambaran rerata perkiraan tingkat kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kesejahteraan melalui kondisi kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Tangerang mencapai nilai

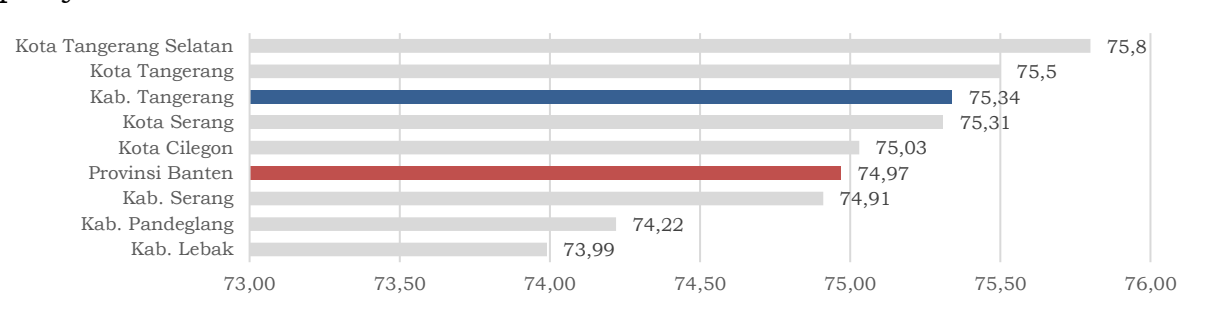
75,34 tahun yang tergolong pada usia harapan hidup yang tinggi. UHH masyarakat Kabupaten Tangerang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.



Gambar 2.59
Usia Harapan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional
Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2024

Berdasarkan perbandingan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, di tahun 2024, Usia Harapan Hidup di Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga dengan capaian tertinggi, tetapi sudah berada di atas capaian Provinsi Banten dan Nasional. Namun, tetap diperlukan arahan strategis dalam peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan kesehatan.

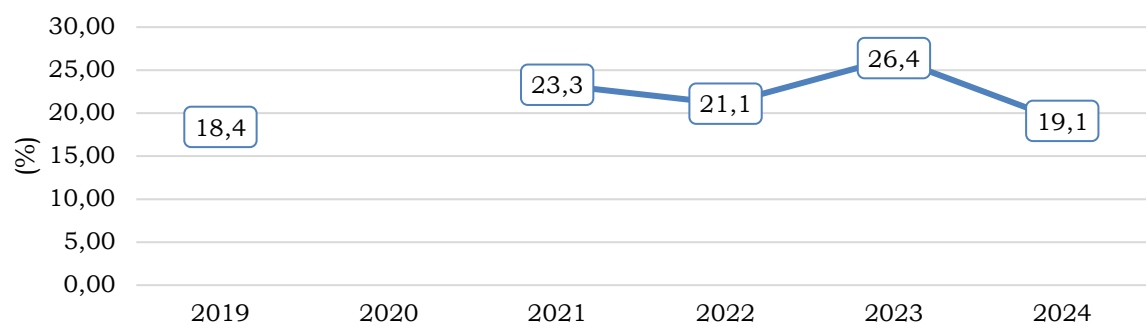


Gambar 2.60
Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

E) *Prevalensi Stunting*

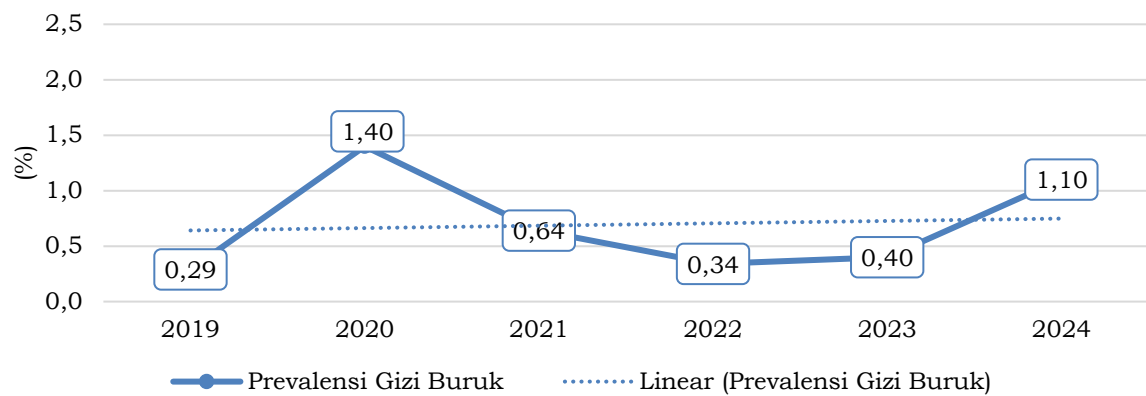
Stunting merupakan kondisi anak di bawah lima tahun yang tidak dapat berkembang karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. *Stunting* diukur menggunakan panjang/tinggi badan menurut umur bila Z-Score TB/U atau PB/U kurang dari -2 SD. Penyebab dari *stunting* dapat dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi merupakan faktor yang mempengaruhi status gizi anak dan berdampak pada *stunting*. Sementara itu faktor tidak langsung berupa akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Angka *Stunting* di Kabupaten Tangerang cenderung menurun pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Angka *stunting* tertinggi ada di tahun 2021 dengan 23,3%, dan mengalami penurunan ditahun 2024 menjadi 19,1. Kementerian Kesehatan di lain sisi menargetkan prevalensi *stunting* untuk ditekan menuju angka 18% pada tahun 2025. Terjadi peningkatan di tahun 2022-2023, sehingga untuk bisa mencapai target nasional, Kabupaten Tangerang perlu menurunkan angka *stunting* rata-rata 4,2% per tahun hingga periode 2025.



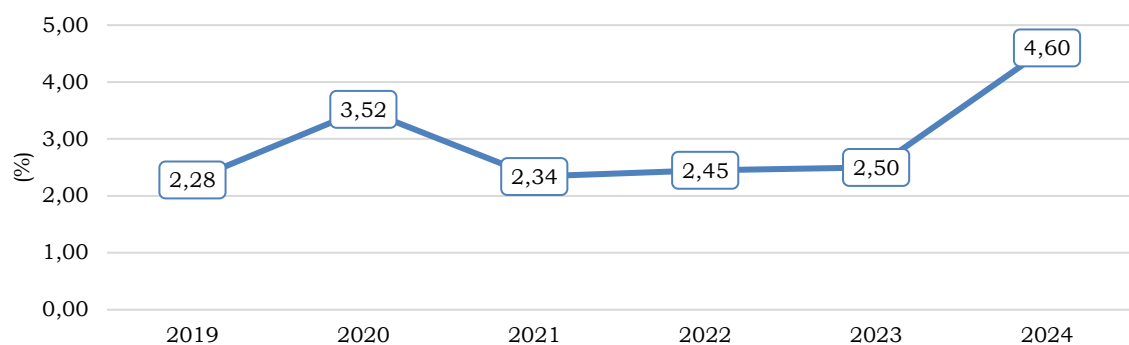
Gambar 2.61
Prevalensi *Stunting* Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2024

F) **Prevalensi Balita Gizi Buruk**
Gizi buruk merupakan kondisi berat badan balita yang lebih rendah dari rentang angka normal anak seusianya. Prevalensi balita gizi buruk menunjukkan kualitas kesehatan balita. Secara umum, prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan meski sempat naik pada tahun 2020. Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Tangerang cenderung rendah. Meskipun rendah, kondisi tersebut memerlukan penanganan untuk memastikan asupan gizi balita.



Gambar 2.62
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 – 2023 dan Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2024

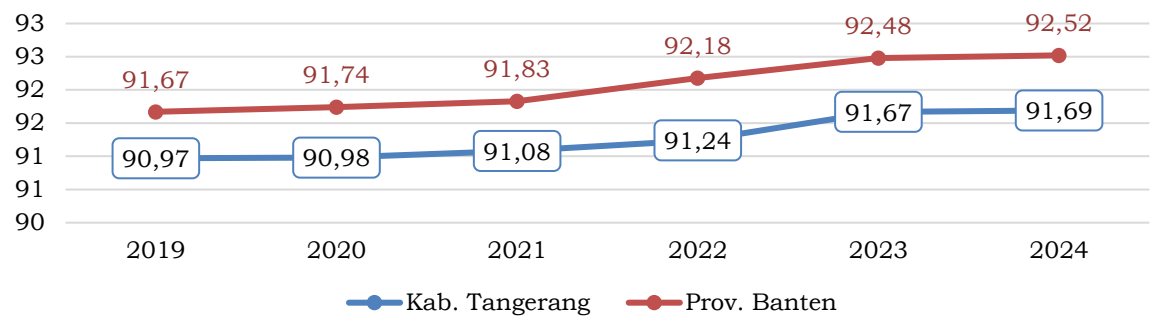
G) **Prevalensi Balita Gizi Kurang**
Balita gizi kurang adalah balita yang menunjukkan indikasi kurangnya asupan energi dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan. Prevalensi balita dengan gizi kurang di Kabupaten Tangerang relatif stagnan meski sempat meningkat pada tahun 2020. Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Tangerang tahun 2024 mencapai 4.6% dari total balita. Hal ini mengindikasikan perlunya penanganan dan penanggulangan agar menjaga kualitas gizi balita dan terhindar dari kondisi kurang gizi.



Gambar 2.63
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 – 2023 dan Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2024

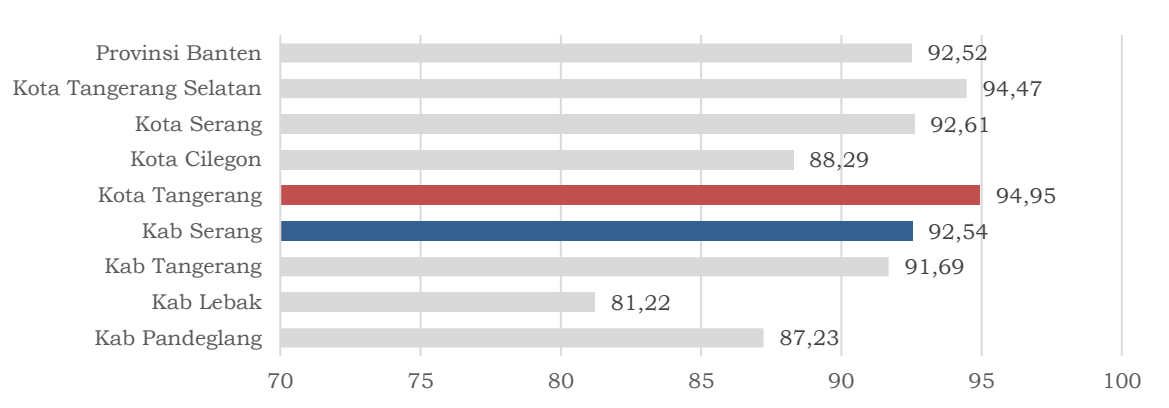
H) Cakupan Desa Siaga Aktif
Desa siaga aktif merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapsiagaan sumber daya, kemampuan, dan kemauan untuk mencegah dan menangani permasalahan kegawatdaruratan. Berdasarkan data tahun 2019 dan 2020, cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Tangerang berkisar pada angka 85,45%. Hal ini mengindikasikan masih adanya desa yang belum memiliki kesiapan dalam menangani dan menanggulangi kegawatdaruratan.

I) Indeks Pembangunan Gender
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG membutuhkan data IPM yang terdiri dari tiga unsur, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Semakin mendekati 100, maka semakin kecil ketimpangan pembangunan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang mengalami trend peningkatan tiap tahunnya sejak tahun 2019. Namun meskipun demikian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang selalu berada di bawah Provinsi Banten pada tahun 2019-2024.



Gambar 2.64
Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019 – 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, 2024

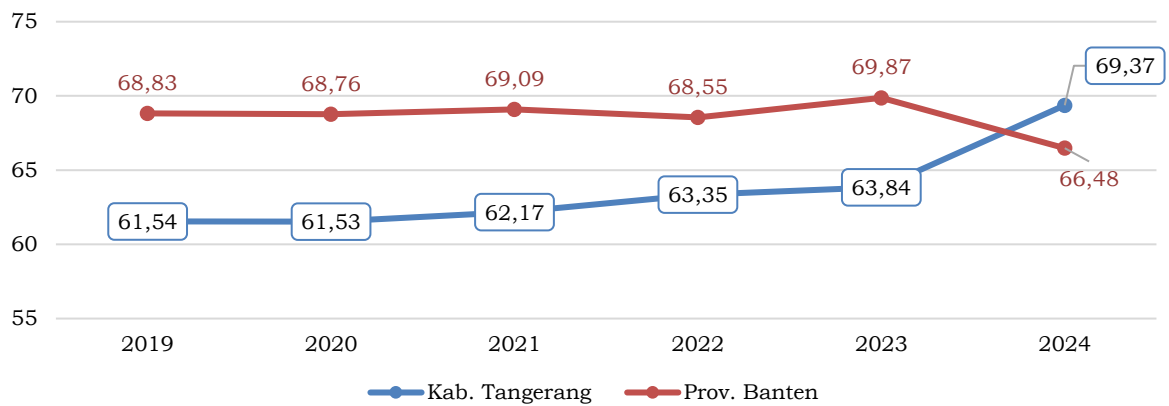
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 sebesar 91,69 cenderung berada di posisi standar apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak menjadi wilayah dengan capaian Indeks Pembangunan Gender paling rendah di Provinsi Banten tahun 2024 dengan indeks 81,22. Sementara IPG tertinggi di Provinsi Banten dicapai oleh Kota Tangerang dengan indeks sebesar 94,95.



Gambar 2.65
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

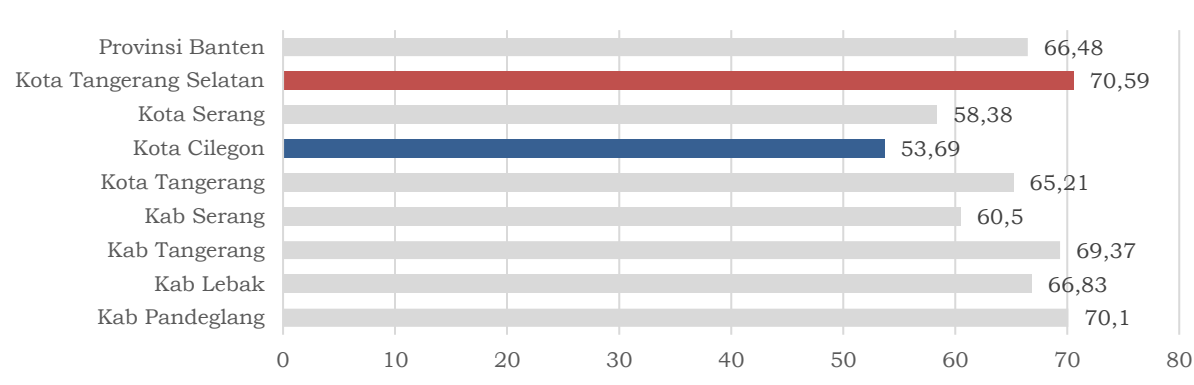
J) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur yang mencerminkan tingkat keterlibatan aktif perempuan dalam aspek ekonomi dan politik. IDG fokus pada tingkat partisipasi dengan cara mengukur kesenjangan gender dalam sektor ekonomi, partisipasi politik, dan proses pengambilan keputusan. IDG memiliki beberapa dimensi, termasuk representasi di lembaga parlemen, proses pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. IDG Kabupaten Tangerang cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan mencapai 69,37 pada tahun 2024.



Gambar 2.66
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2025

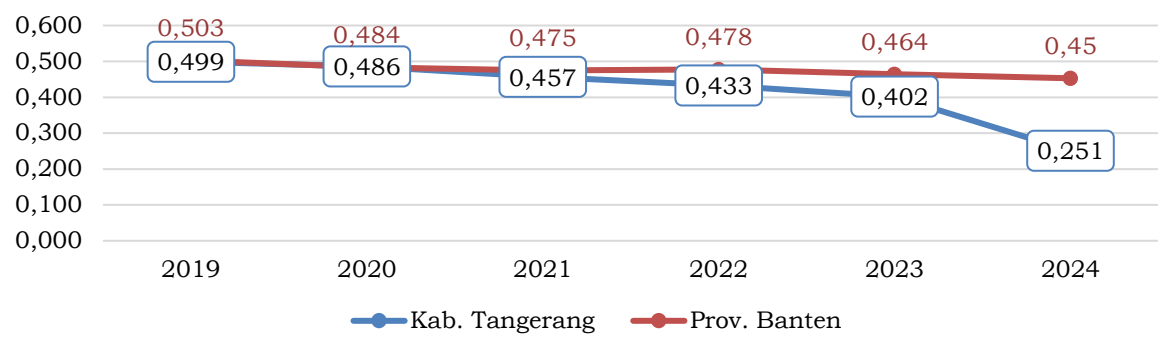
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 cenderung tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, meski masih berada di bawah capaian provinsi. Kabupaten Cilegon menjadi wilayah dengan capaian IDG paling rendah di Provinsi Banten tahun 2024 dengan indeks 53,69. Sementara itu, IDG tertinggi di Provinsi Banten dicapai oleh Kota Tangerang Selatan dengan indeks sebesar 70,59.



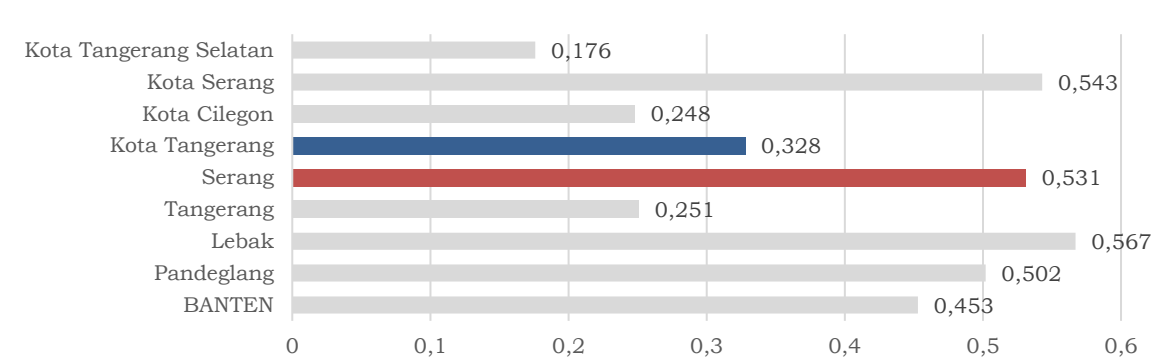
Gambar 2.67
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

K) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan dampak negatif atau kerugian yang timbul dari kurangnya kesetaraan gender terhadap pencapaian pembangunan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung Indeks Ketimpangan Gender meliputi andil persalinan di luar fasilitas kesehatan, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang menikah dan melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun, persentase populasi dengan pendidikan setidaknya SMA, persentase laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen, serta proporsi angkatan kerja dalam populasi usia kerja. Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Tangerang memiliki kecenderungan menurun, artinya perbaikan kesetaraan gender telah meningkat. Dibandingkan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Tangerang tergolong cukup baik, dengan posisi 4 terbaik di Provinsi Banten.



Gambar 2.68
Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2025



Gambar 2.69
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2025

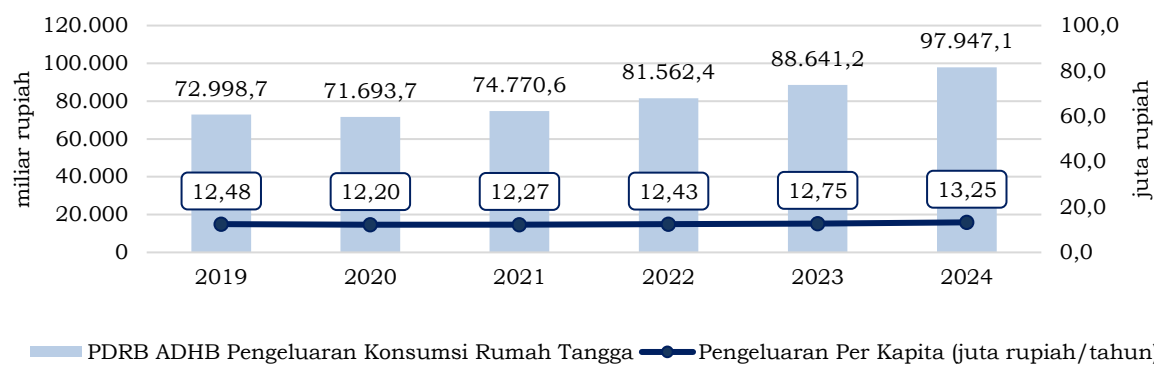
2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi daya saing daerah. Aspek ini meliputi pemahaman mengenai daya saing ekonomi daerah, daya saing SDM, daya saing infrastruktur lingkungan, serta iklim berinvestasi.

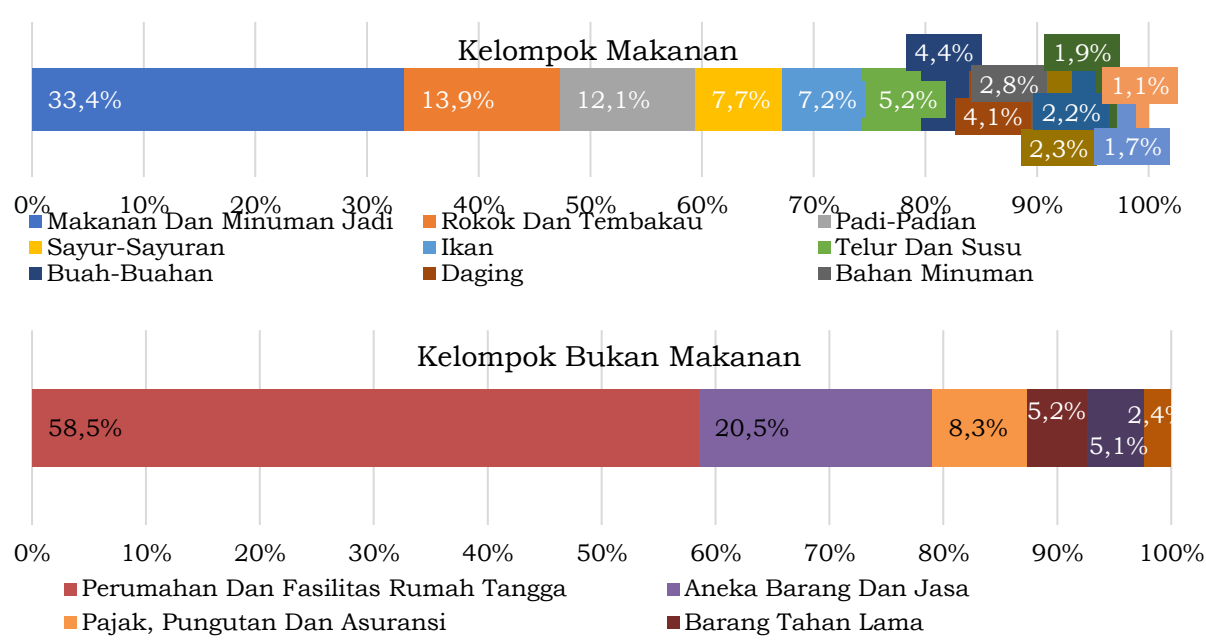
2.1.3.1 DAYA SAING EKONOMI DAERAH

A) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita dapat dilihat melalui PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tangerang, pengeluaran konsumsi rumah tangga (2019-2024) meningkat 6,1% per tahun. Pada tahun 2021-2023 terjadi peningkatan yang menunjukkan adanya peningkatan penghasilan masyarakat yang tercermin pada peningkatan kinerja sektor Perdagangan, Transportasi, dan Pariwisata (Bank Indonesia, 2023)².



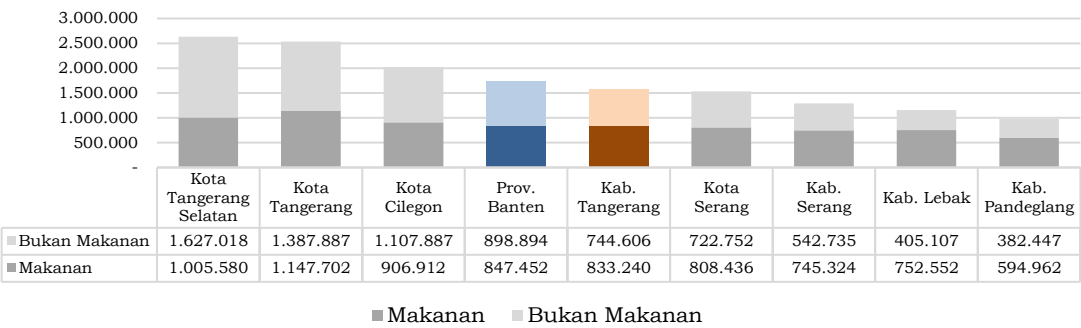
Gambar 2.70
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025



Gambar 2.71
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

² Bank Indonesia (2023). Laporan Perekonomian Provinsi Banten November 2023.
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/>

Pada tahun 2024, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.577.846 per jiwa/bulan dengan pengeluaran kelompok makanan sebesar Rp833.240 per jiwa/bulan (atau 52,43% dari total pengeluaran) dan pengeluaran kelompok bukan makanan sebesar Rp744.606 per jiwa/bulan (atau 47,57% dari total pengeluaran).

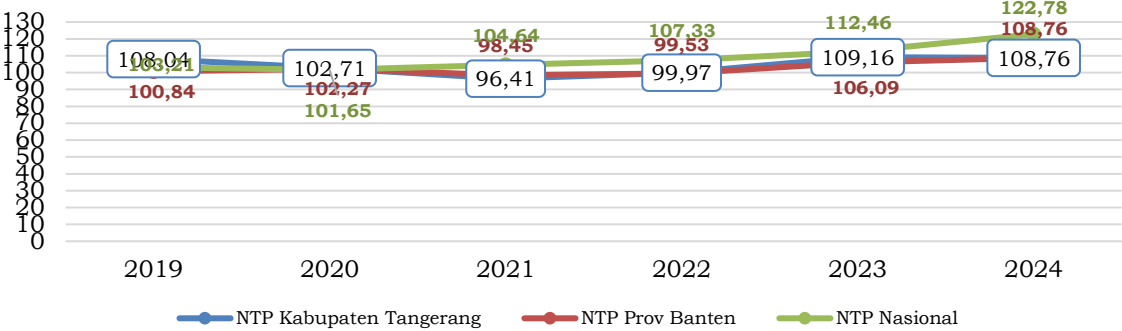


Gambar 2.72
Perbandingan Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Perbandingan pengeluaran per kapita dapat mencerminkan perbandingan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan/atau kontribusi sektor ekonomi, serta potensi pasar dalam suatu daerah. Berdasarkan diagram di atas, bahwa pengeluaran per kapita Kabupaten Tangerang tertinggi keempat diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Selain itu, dari gambar di atas tercermin bahwa wilayah perkotaan memiliki kecenderungan pengeluaran makanan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran bukan makanan.

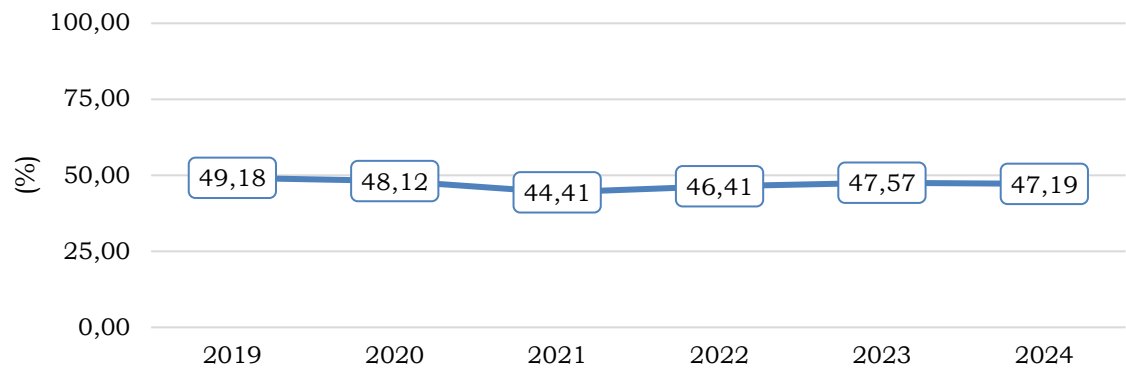
B) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani padi dengan indeks harga yang dibayarkan oleh petani padi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Jurnal *Social Economic of Agriculture*, NTP di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan angka NTP. Pada tahun 2023, NTP Kabupaten Tangerang sebesar 109,16 dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten tetapi lebih rendah dibandingkan nasional. Capaian NTP Kabupaten Tangerang dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019-2021 menunjukkan penurunan capaian NTP yang mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani Kabupaten Tangerang semakin menurun, meskipun angka tersebut tergolong cukup tinggi. Akan tetapi dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) menunjukkan peningkatan capaian NTP.



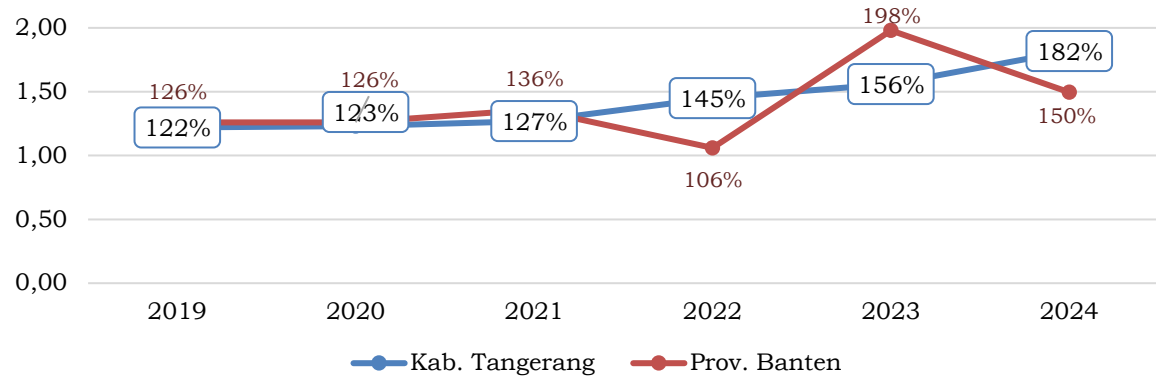
Gambar 2.73
Nilai Tukar Petani Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Provinsi Banten; BPS Nasional; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

C) **Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita**
Pengeluaran konsumsi non pangan merupakan nilai seluruh kemampuan daya beli penduduk dalam bentuk non pangan. Konsumsi non pangan terdiri atas lima sektor dengan jumlah persentase terbesar adalah sektor perumahan dan fasilitas rumah tangga. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita pada kurun waktu 2019-2024 memiliki angka yang stagnan. Hal ini menandakan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang tidak cukup meningkat untuk diinvestasikan kepada sektor lain selain konsumsi pangan. Maka dari itu, sektor konsumsi non pangan yang penting untuk pembangunan ekonomi jangka panjang menjadi terbatas.



Gambar 2.74
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

D) **Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)**
Rasio ekspor dan impor terhadap PDB merupakan indikator keterbukaan ekonomi suatu wilayah. Nilai indikator keterbukaan ekonomi dapat dihitung menggunakan perbandingan antara total nilai ekspor dan impor barang dan jasa pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan PDB dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi kegiatan ekspor dan impor, semakin menunjukkan semakin tingginya derajat keterbukaan ekonomi suatu negara/daerah. Nilai ekspor dan impor Kabupaten Tangerang dapat dilihat melalui PDRB ADHB menurut pengeluaran.

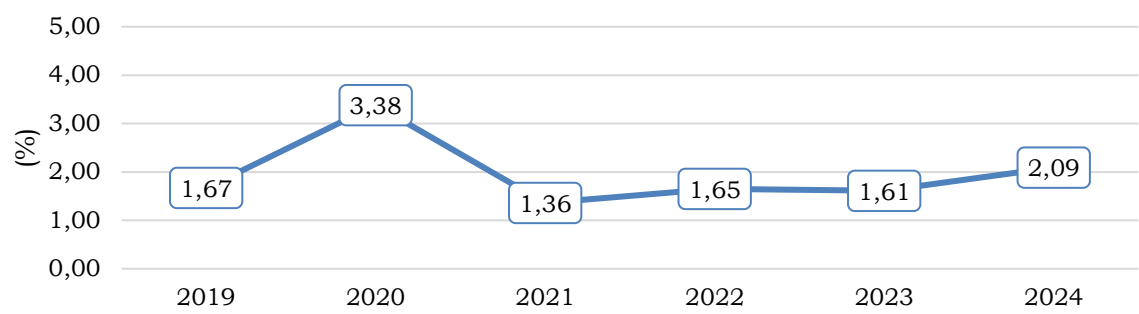


Gambar 2.75
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Kabupaten Tangerang perlahan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2019-2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ekspor atau penjualan barang dan jasa keluar daerah lebih tinggi daripada impor yang berdampak kepada peningkatan pasar dan daya saing ekonomi daerah.

E) Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio Kewirausahaan Daerah adalah perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap dibandingkan dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Rasio ini menunjukkan jumlah wirausaha yang mempekerjakan orang dalam suatu daerah. Pada tahun 2019-2024, Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan. Akan tetapi, capaian ini masih rendah sehingga diperlukan upaya untuk mendorong penciptaan wirausaha baru dan skalabilitas usaha.

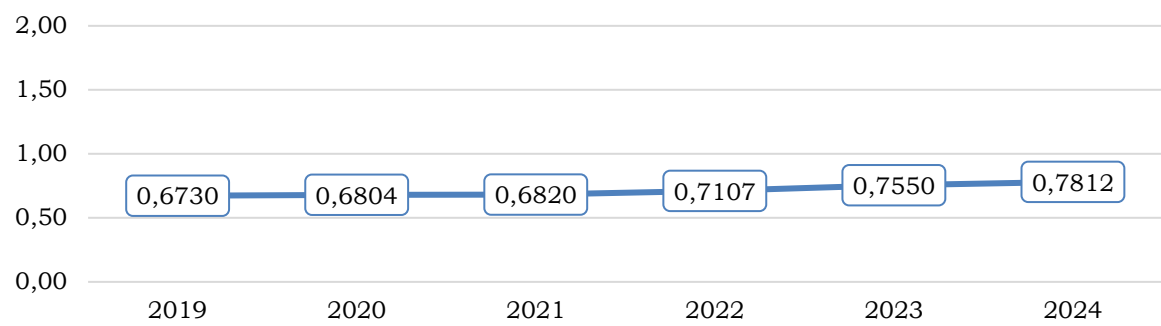


Gambar 2.76
Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

F) Indeks Desa

Indeks Desa merupakan alat ukur yang digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui tingkat kemajuan pembangunan suatu desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024. Indeks Desa diukur melalui 6 (enam) dimensi, yaitu Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Indeks Desa menjadi indikator tunggal dalam mengukur kinerja pembangunan desa dan digunakan sebagai indikator pembangunan dalam RPJP dan/atau RPJM nasional serta daerah. Pada periode sebelum tahun 2024, telah ada indikator Indeks Desa Membangun untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Maka dari itu, dalam mengukur tingkat kemajuan pembangunan desa dalam lima tahun terakhir menggunakan Indeks Desa Membangun.



Gambar 2.77
Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Capaian indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 sebesar 0,7812 dengan status ‘Maju’. Capaian IDM Kabupaten Tangerang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten (0,6930) dan nasional (0,7034). Dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tangerang.

2.1.3.2 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

A) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja merupakan indikator yang menggambarkan persentase jumlah angkatan kerja 15 tahun ke atas terhadap total penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang rasio penyerapan angkatan kerja dalam lapangan pekerjaan. Pada 2024, angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Tangerang tergolong rendah dalam nilai 65,88%. Hal tersebut menunjukkan serapan angkatan kerja di wilayah ini masih cenderung rendah dan masih tingginya jumlah angkatan kerja yang menganggur di wilayah ini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya serapan lulusan sekolah dasar dan SMP dalam lapangan pekerjaan. Sementara itu, masyarakat dengan lulusan SMA dan perguruan tinggi cenderung sudah terserap dan mendapatkan pekerjaan lain.

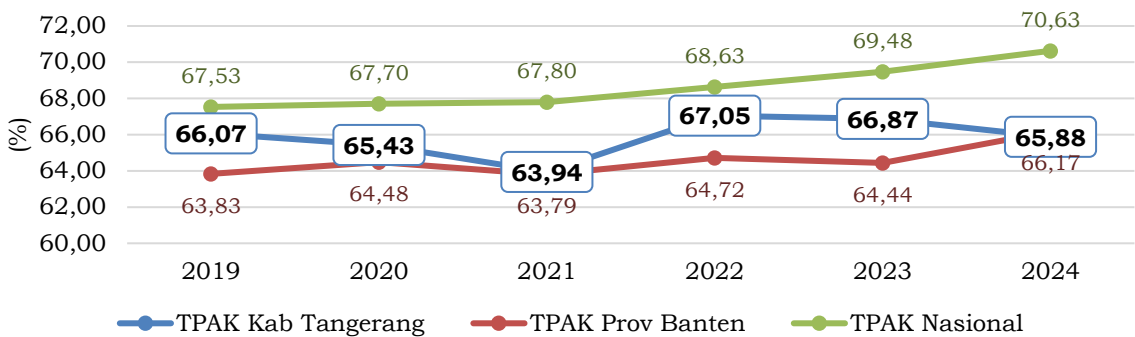
Tabel 2.10

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Tahun 2024				
SD	SMP	SMA	PT	Total
58,54	55,73	74,82	79,27	65,88

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

B) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

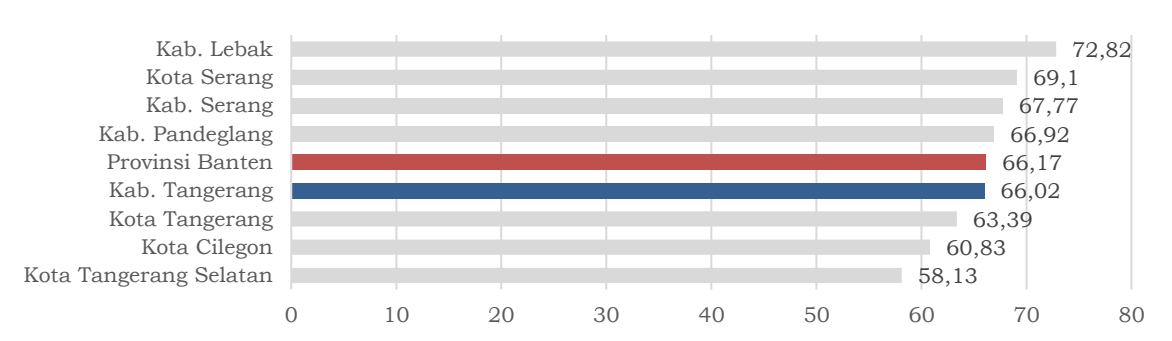
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun). Capaian TPAK di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dalam enam tahun (2019-2024). Persentase ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Tangerang mencapai persentase stagnan dan memerlukan optimalisasi yang dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja.



Gambar 2.78

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024



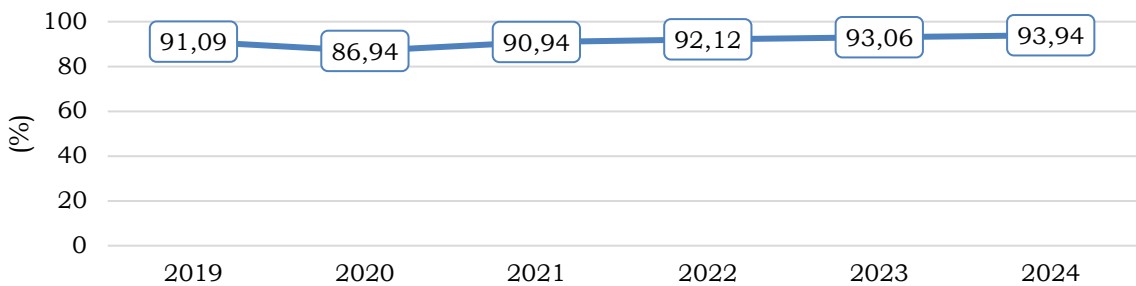
Gambar 2.79

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

C) Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

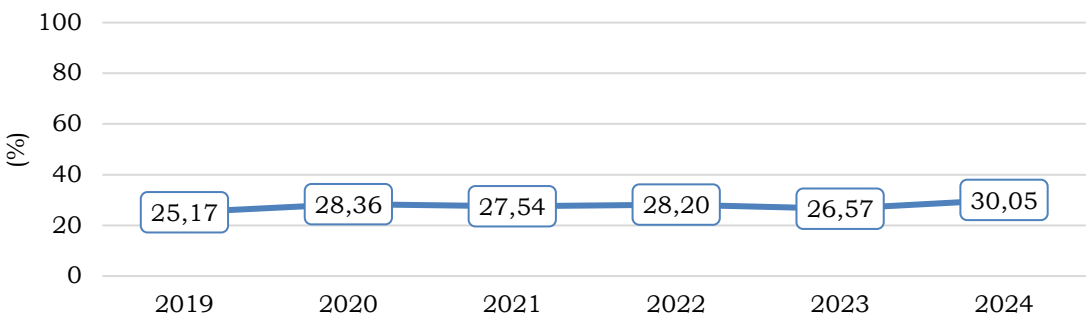
Rasio Kesempatan Kerja atau *employment to population ratio* merupakan proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam 5 tahun (2019-2024). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Tangerang sudah bekerja.



Gambar 2.80
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

D) Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja

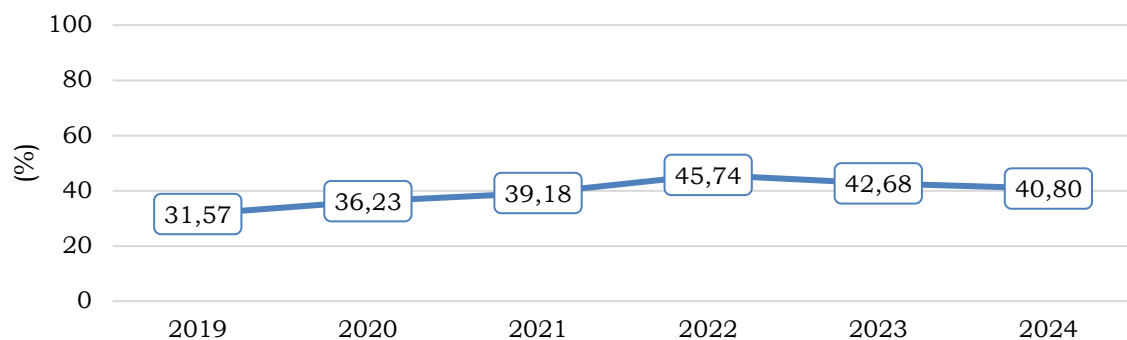
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri merupakan seseorang yang bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomi merupakan seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap. Sedangkan proporsi pekerja bebas keluarga terbagi menjadi tiga aspek yaitu pekerja bebas pertanian, pekerja keluarga dan pekerja bebas non pertanian. Pada grafik ini, kontribusi tenaga kerja ditambahkan dengan kontribusi pekerja berusaha sendiri dan dibandingkan dengan total kesempatan kerja akan menghasilkan nilai tingkat kesempatan kerja rentan.



Gambar 2.81
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

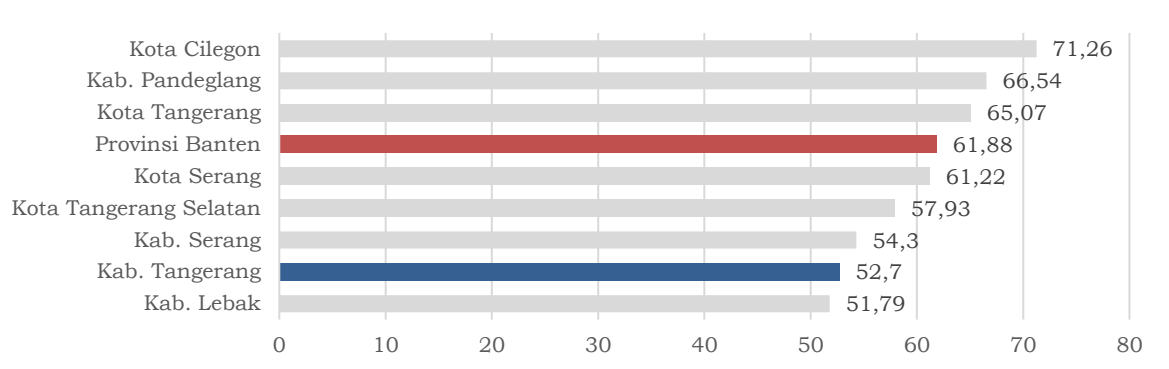
E) Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Pada Kabupaten Tangerang, Rasio Ketergantungan mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Pada tahun 2024, rasio ketergantungan mengalami penurunan sekitar 40 orang artinya beban 100 orang yang produktif hanya menanggung 40 orang yang tidak produktif baik usia lanjut/lansia maupun anak-anak. Hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi semakin menurun dan seiring dengan peningkatan jumlah orang produktif dan berusia kerja.



Gambar 2.82
Rasio Ketergantungan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

F) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, indikator kunci urusan perpustakaan salah satunya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2023, IPLM Kabupaten Tangerang adalah 49,93. Meskipun capaian di tahun 2024 telah meningkat menjadi 52,7, IPLM Kabupaten Tangerang masih berada di urutan kedua terendah di Provinsi Banten.



Gambar 2.83
Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2025

2.1.3.3 DAYA SAING FASILITAS WILAYAH / INFRASTRUKTUR

A) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap
Tingkat kemantapan jalan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan seberapa tinggi kesiapan jalan dan kondisi jalan. Menurut Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

Tabel 2.11
Proporsi dan Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (km)	566,25	569,28	752,7	774,86	802.16	463.74

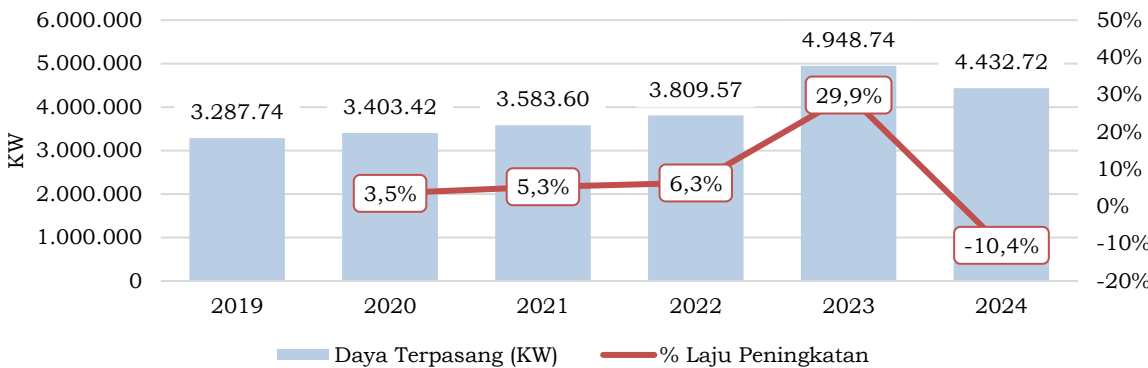
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Sedang (km)	312,75	299,79	148	114,21	132.86	243.92
Panjang Jalan Total (km)	992,61	992,61	992,61	992,61	992.61	1096.26
Persentase Kondisi Mantap (%)	88,55%	87,55%	90,74%	92,59%	94.20%	64.55%

Sumber: opendata.tangerangKabupatengo.id, 2023

Proporsi panjang jalan di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren yang meningkat. Jika dilihat dari presentase, jalan mantap berhasil naik dari 88,55% pada tahun 2019 menuju 92,59% pada tahun 2022. Seiring pembukaan jalan baru tahun 2024 panjang jalan Kabupaten bertambah menjadi 1.096,26 Km sehingga kondisi jalan mantap sebesar 64,55%. Angka proporsi jalan dalam kondisi mantap memperlihatkan seberapa panjang jalan yang sudah mencapai kelayakan (kondisi baik dan sedang). Jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat harus mendapatkan perbaikan segera demi menjaga keselamatan berkendara.

B) Daya Listrik Terpasang

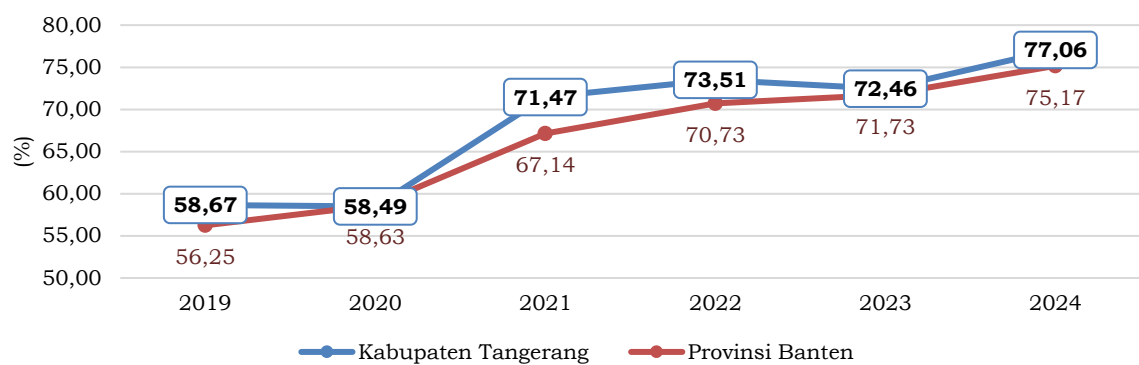
Daya listrik yang terpasang menunjukkan jumlah kWh yang mampu digunakan di kabupaten/kota masing-masing. Daya ini dialirkan untuk memberikan layanan listrik kepada rumah tangga. Pada tahun 2024, besaran daya terpasang di Kabupaten Tangerang sebesar 4,43 juta KW dan menjadi kabupaten yang memiliki daya listrik terbesar di Provinsi Banten.



Gambar 2.84
Daya Listrik Terpasang di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

C) Rumah Tangga dengan Akses Internet

Jangkauan dan akses terhadap internet menunjukkan keterbukaan terhadap informasi layanan dasar, peluang ekonomi (*e-commerce*), pengembangan sumber daya manusia (literasi digital), dan lain sebagainya. Kabupaten Tangerang sendiri memperlihatkan tren yang positif dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2024. Dalam hal ini, pengguna internet di Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga terbanyak di Provinsi Banten di bawah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

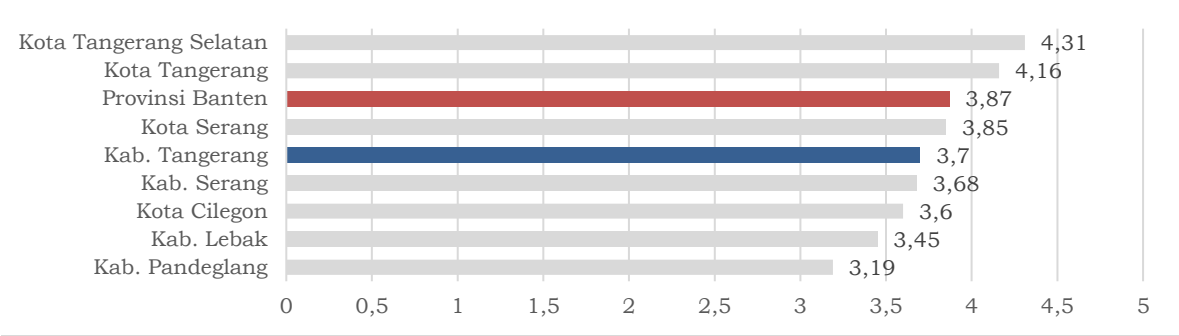


Gambar 2.85
Persentase Penduduk yang Mengakses Internet di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten

2.1.3.4 DAYA SAING IKLIM INVESTASI

A) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

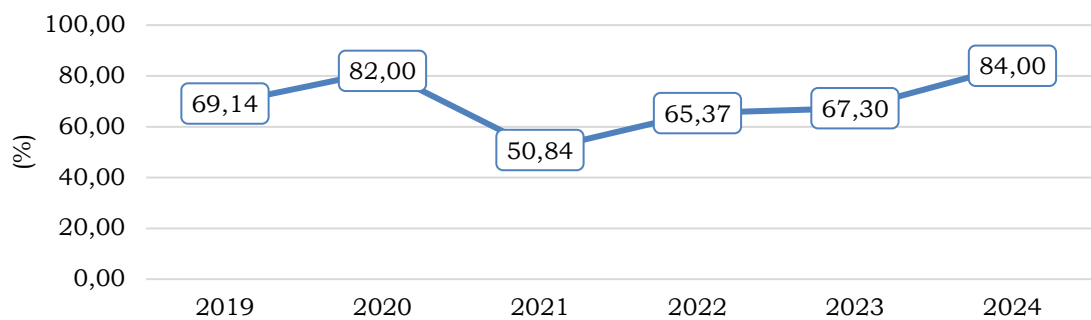
Indeks Daya Saing Daerah merupakan posisi relatif suatu daerah dengan standar faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta potensi yang dapat digali terhadap posisi daerah lain. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 mencapai 3,70 dan capaian ini berada di posisi keempat capaian IDSD tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan nilai IDSD Kabupaten Tangerang. Komponen pilar yang unggul di Kabupaten Tangerang adalah Pilar 10 “Ukuran Pasar”. Sementara itu, komponen pilar yang terendah adalah Pilar 11 “Dinamisme Bisnis”.



Gambar 2.86
Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

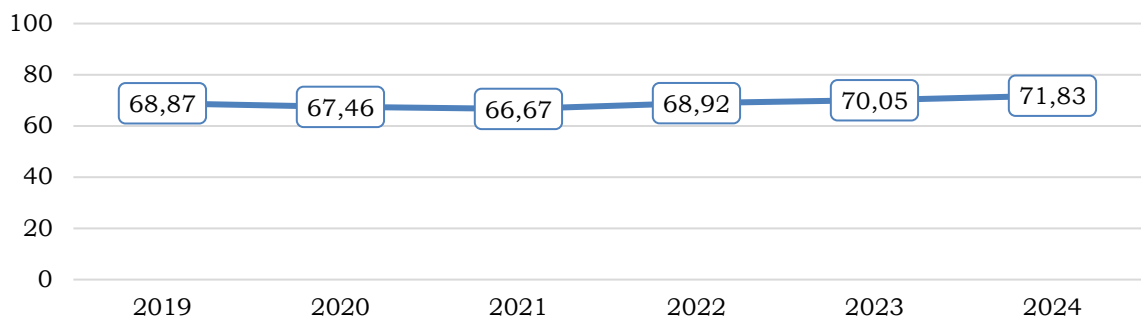
B) Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator keamanan di mana tindak kriminal sudah ditangani dalam suatu wilayah tertentu. Angka kriminalitas yang tertangani dapat dihitung dengan jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun dibandingkan dengan total jumlah penduduk. Pada Kabupaten Tangerang, angka kriminalitas yang tertangani mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan jumlah 1.309 kasus yang tertangani pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa instansi terkait dapat mengatasi kasus kriminalitas yang semakin meningkat dan tingkat keamanan juga semakin tinggi. Berdasarkan tren dalam lima tahun terakhir, persentase angka kriminalitas yang tertangani cenderung menurun.



Gambar 2.87
Persentase Angka Kriminalitas atau Tindak Pidana yang Tertangani di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

C) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan nilai kerukunan di antara aliran/pemahaman/mazhab yang ada serta pemeluk agama-agama yang telah diakui oleh negara, meliputi Islam, Hindu, Kristen, Budha, Katolik, dan Konghucu. Jika melihat dari standar kategori tinggi (61-80), Kabupaten Tangerang dalam lima tahun terakhir (2019-2023) memiliki nilai yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa penduduk Kabupaten Tangerang rukun dalam hal agama.



Gambar 2.88
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang 2019-2024
Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2025

D) Lama Proses Perijinan
Sistem perijinan dan non-perijinan di Kabupaten Tangerang diatur dalam Perda Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan. Jenis perizinan dan non-perizinan diberikan berdasarkan urusan pemerintah daerah. Prosedur perizinan dan non-perizinan terdiri dari verifikasi, permohonan, pemeriksaan dokumen, pengecekan lapangan, serta pemberian keputusan. Jangka waktu pelayanan DPMPTSP ditetapkan paling lama 5 (Lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Non-perizinan secara lengkap dan benar. Selain itu, pemohon dapat mengajukan pengaduan melalui DPMPTSP paling lambat 30 hari kerja sejak pemohon menerima pelayanan perizinan dan nonperizinan. Sistem informasi pelayanan perizinan dan non-perizinan berbasis web di Kabupaten Tangerang yaitu “SIPINTER”.

2.1.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

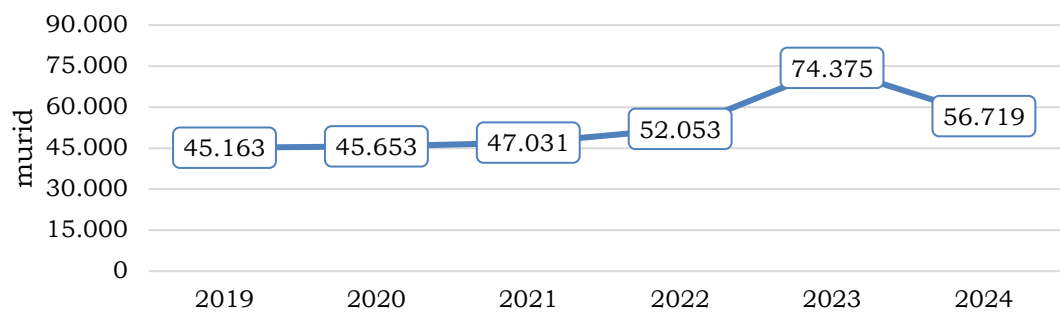
Aspek pelayanan umum merupakan pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Aspek ini meliputi tiga fokus utama yaitu fokus layanan urusan wajib dasar, fokus layanan urusan wajib non dasar dan fokus layanan urusan pilihan.

2.1.4.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR

Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar merupakan pelayanan yang berfokus kepada kebutuhan wajib masyarakat yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan. Fokus ini meliputi unsur pendidikan, unsur kesehatan, unsur pekerjaan umum dan penataan ruang, unsur perumahan rakyat dan kawasan permukiman, unsur ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta unsur sosial.

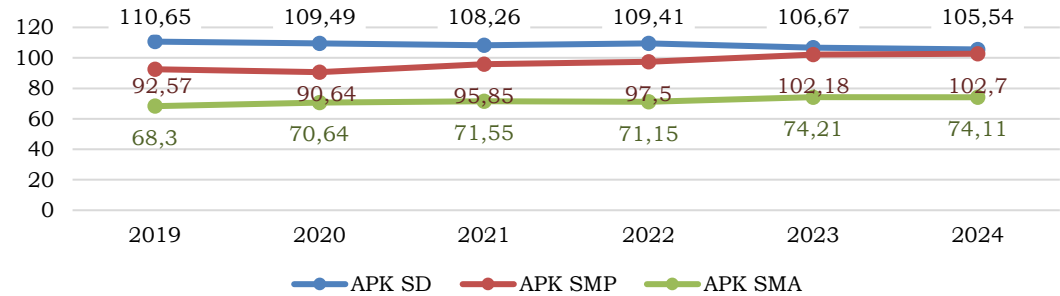
- A) Pendidikan
1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan yang berfokus pada pemberian stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini di Kabupaten Tangerang berkembang pesat ditandai dengan tingginya jumlah murid PAUD. Selain itu, pertumbuhan PAUD juga memiliki tren positif pada kurun waktu 2019-2023, tahun 2024 mengalami penurunan anak usia dini yang bersekolah.



Gambar 2.89
Jumlah Murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

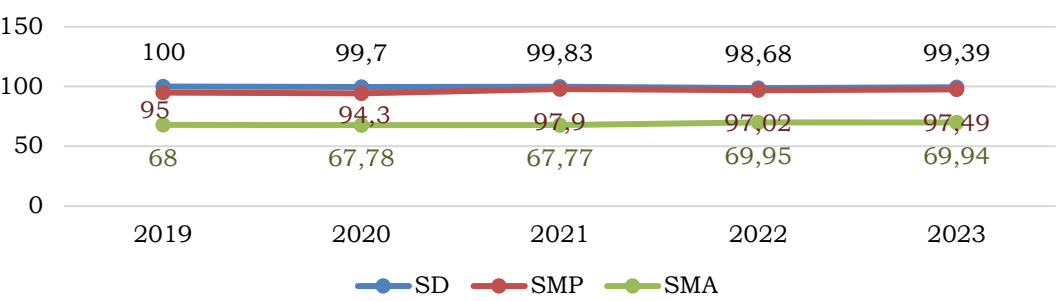
- 2) Angka Partisipasi Kasar (APK)
- Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi kasar sekolah dasar di Kabupaten Tangerang di tahun 2024 menurun dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 105,54. Selain itu, angka partisipasi kasar SMP juga tergolong tinggi. Kedua hal tersebut mengindikasikan bahwa tingginya jumlah penduduk yang bersekolah pada tingkat sekolah dasar dan SMP yang mungkin terjadi akibat ketidaksesuaian usia dengan jenjang yang ditempuh. Sedangkan APK SMA berkisar pada nilai 74,11 yang mengindikasikan bahwa masih adanya penduduk usia SMA yang belum/tidak mengambil pendidikan setara SMA.



Gambar 2.90
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2020-2025

3) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Tangerang didominasi oleh jenjang sekolah dasar. Hampir seluruh masyarakat telah mengenyam bangku sekolah dasar. Sedangkan pada jenjang SMP, angka pendidikan yang ditamatkan berkisar di angka 90. Hal ini menunjukkan adanya masyarakat yang belum menempuh pendidikan SMP. Di sisi lain, masyarakat yang mampu menamatkan bangku pendidikan SMA masih tergolong rendah dan berkisar pada angka 70. Hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat Kabupaten Tangerang yang belum mengenyam pendidikan SMA.



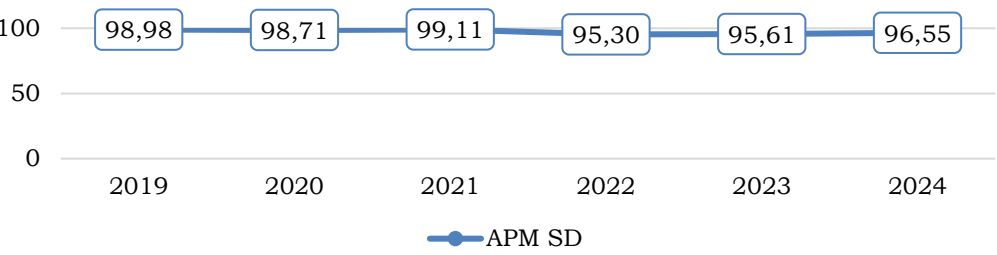
Gambar 2.91
Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah rasio antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai. APM merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian jumlah masyarakat yang bersekolah sesuai dengan usianya.

a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD

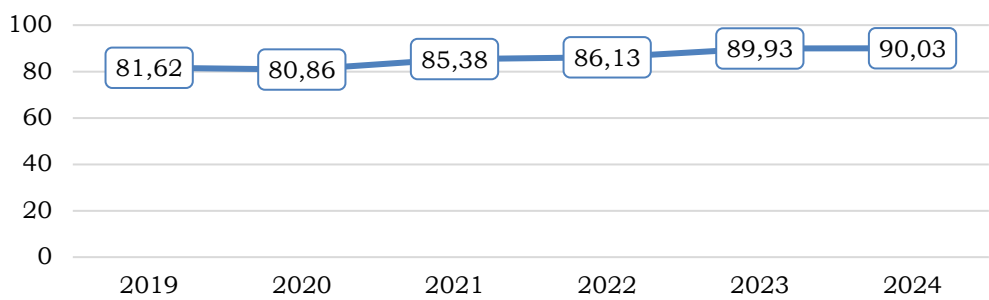
APM tingkat sekolah dasar di Kabupaten Tangerang tergolong pada tingkat tinggi. Namun selama 2 tahun terakhir, APM tingkat sekolah dasar mengalami penurunan yang dimungkinkan karena masih ditemukannya anak yang tidak bersekolah sesuai dengan usianya. Harapannya seiring berjalannya waktu kondisi ini dapat diperhatikan untuk memberikan pendidikan bagi seluruh anak-anak.



Gambar 2.92
Angka Partisipasi Murni SD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

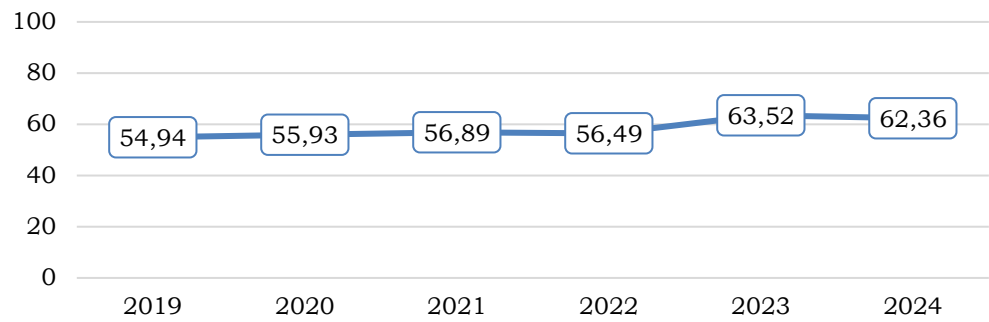
b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP terus meningkat dari waktu ke waktu. Akan tetapi, peningkatan ini masih jauh dari ideal. APM SMP di Kabupaten Tangerang berkisar dalam rentang nilai 80-90%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih adanya masyarakat berusia SMP yang tidak bersekolah. Maka dari itu diperlukan penanganan lebih lanjut untuk mengatasi kondisi ini.



Gambar 2.93
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

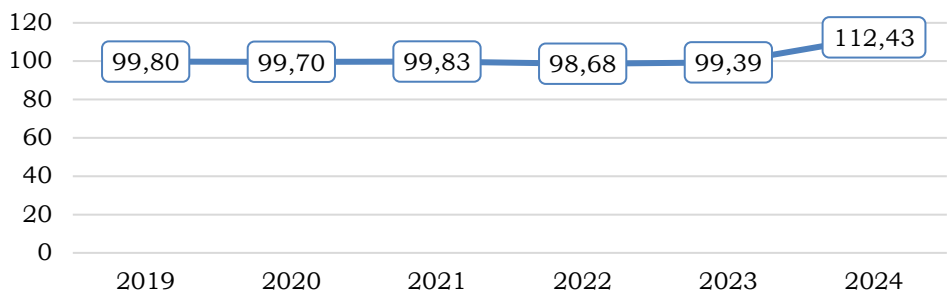
- c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA
- Angka Partisipasi Murni tingkat SMA tergolong rendah meski pada 2023 telah meningkat tajam. Nilai APM yang jauh dari ideal ini memerlukan penanganan khusus agar masyarakat mampu melanjutkan pendidikan secara merata.



Gambar 2.94
Angka Partisipasi Murni SMA Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

- 5) Angka Partisipasi Sekolah (APS)
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan rasio jumlah murid usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. APS menunjukkan ukuran daya serap sistem pendidikan dalam masyarakat sesuai dengan kelompok usianya.

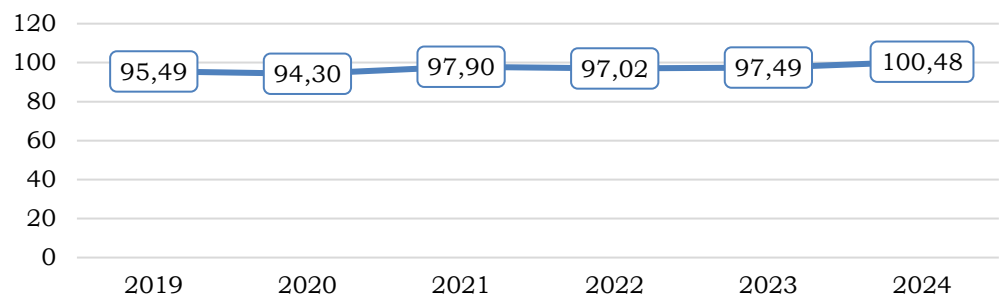
- a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD
- Angka Partisipasi Sekolah rentang usia 7-12 tahun menunjukkan nilai yang baik meski belum sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7-12 tahun sebagian besar menempuh pendidikan dasar. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa anak yang tidak/belum mengenyam pendidikan dasar.



Gambar 2.95
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP

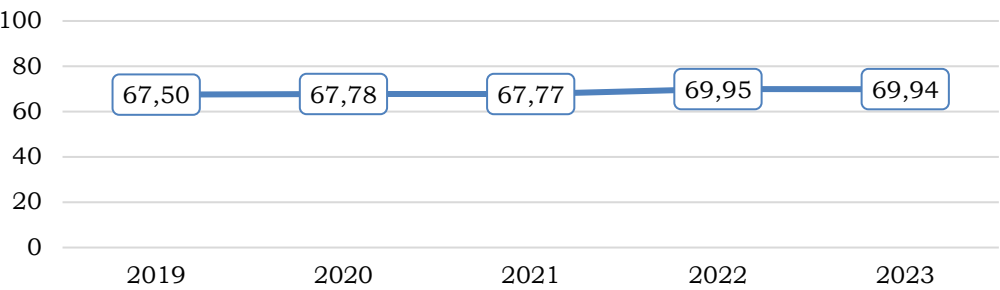
Angka Partisipasi Sekolah rentang usia 13-15 tahun atau SMP tergolong tinggi meski mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Tingginya nilai ini mengindikasikan bahwa banyaknya penduduk usia 13-15 tahun yang mengenyam pendidikan setara SMP. Meskipun demikian masih terdapat sebagian penduduk dalam rentang usia tersebut yang belum mengenyam pendidikan menengah.



Gambar 2.96
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA

Angka Partisipasi Sekolah rentang usia 16-18 tahun atau setingkat SMA di Kabupaten Tangerang masih tergolong rendah meski telah meningkat dari waktu ke waktu. Rendahnya APS di rentang usia ini menunjukkan banyaknya penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan tingkat atas di Kabupaten Tangerang. Hal ini seharusnya mampu menjadi perhatian tersendiri untuk memberikan pendidikan tingkat atas bagi masyarakat.

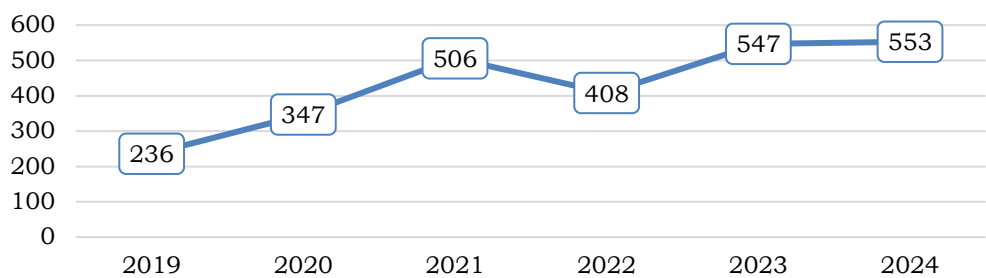


Gambar 2.97
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

6) Angka Putus Sekolah

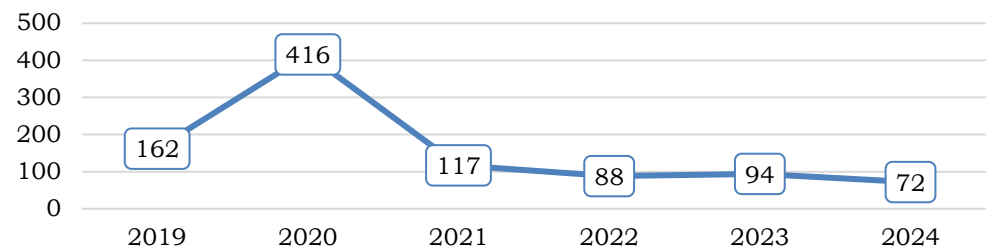
a. Angka Putus Sekolah SD

Putus sekolah merupakan fenomena yang masih terus berkembang di Kabupaten Tangerang. Jumlah siswa putus sekolah di wilayah ini cenderung berfluktuasi. Jumlah siswa SD yang putus sekolah mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan masih tingginya masyarakat usia pendidikan dasar yang mengalami putus sekolah.



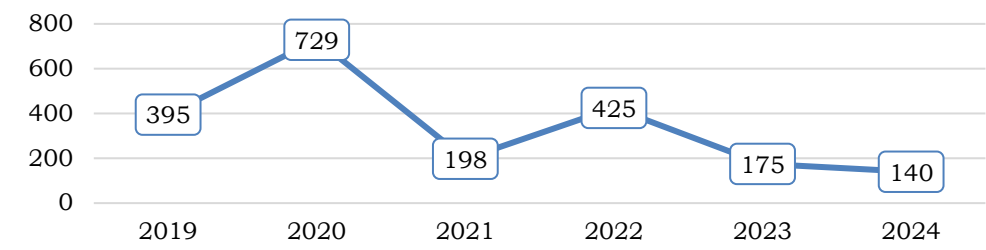
Gambar 2.98
Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

- b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP
- Fenomena putus sekolah juga banyak berkembang pada siswa SMP. Jumlah siswa putus sekolah melonjak drastis pada 2020. Meskipun demikian jumlah siswa SMP yang putus sekolah menurun pada 2021 menurun dari waktu ke waktu. Permasalahan adanya siswa yang putus sekolah ini perlu menjadi penanganan tersendiri khususnya untuk menciptakan generasi yang berkualitas.



Gambar 2.99
Angka Putus Sekolah (APS) SMP Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

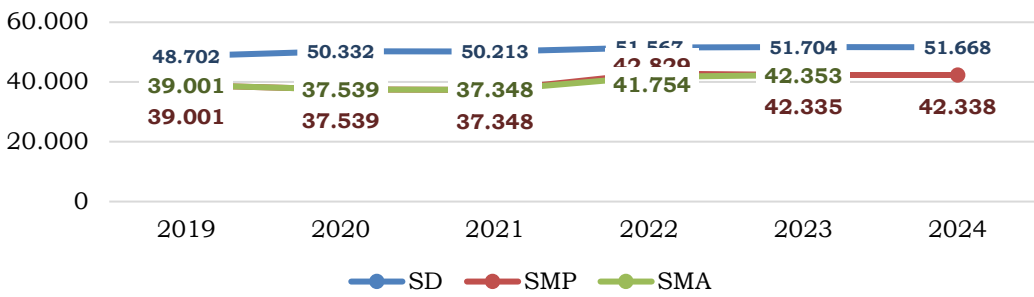
- c. Angka Putus Sekolah (APS) SMA
- Jumlah siswa SMA yang putus sekolah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada 2020, jumlah siswa SMA yang putus sekolah mencapai 729 siswa, sedangkan pada 2024 jumlah tersebut dapat menurun hingga angka 140 siswa. Tingginya jumlah siswa yang putus sekolah dapat mempengaruhi kualitas dan kesempatan kerja masyarakat Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.100
Angka Putus Sekolah (APS) SMA Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

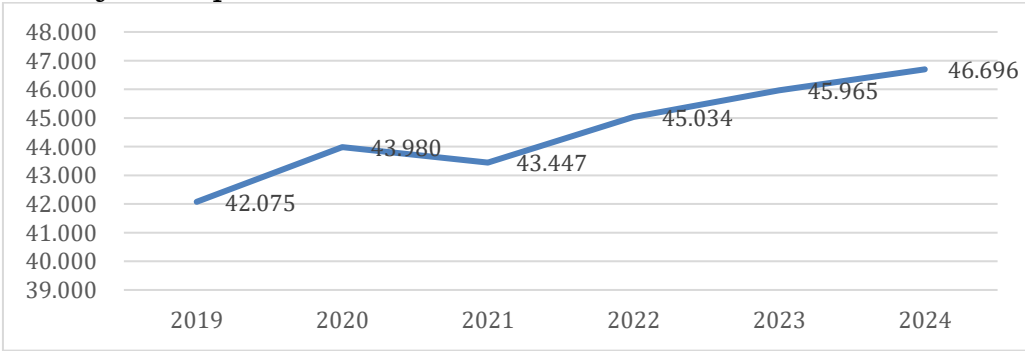
- 7) Angka Kelulusan Siswa
- Angka Kelulusan Siswa di Kabupaten Tangerang dalam rentang waktu 2019-2024 telah mencapai 100%. Hal ini menandakan seluruh siswa SD, SMP, dan SMA lulus dan tidak ada siswa yang harus tidak lulus. Secara umum jumlah siswa yang lulus juga relatif mengalami peningkatan dari waktu ke waktu hal ini menunjukkan

peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Tangerang.



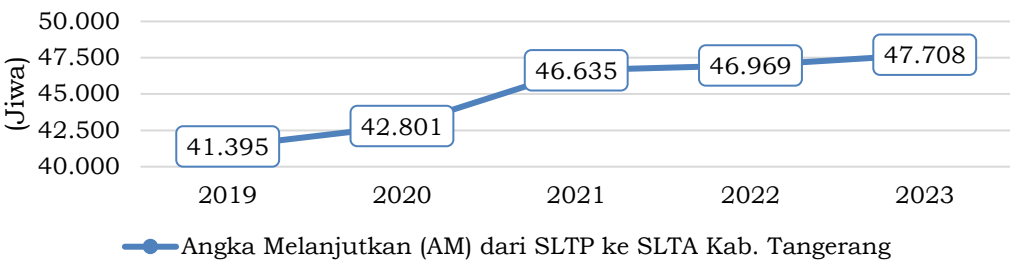
Gambar 2.101
Jumlah Siswa Lulus di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2024

- 8) Angka Melanjutkan
- a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP
- Angka melanjutkan dari SD ke SMP merupakan persentase jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SMP. Angka melanjutkan dari SD ke SMP Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Tingginya angka melanjutkan ini mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan.



Gambar 2.102
Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

- b. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA
- Angka melanjutkan dari SMP ke SMA merupakan persentase jumlah lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA. Angka melanjutkan dari SMP ke SMA Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tingginya angka melanjutkan ini mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah. Meskipun demikian masih terdapat masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan.

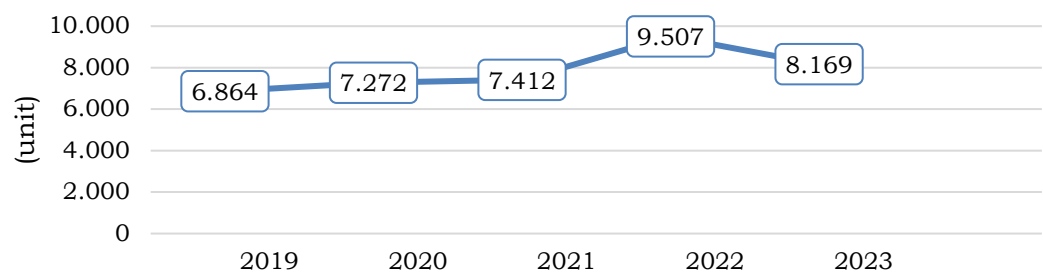


Gambar 2.103
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

9) Fasilitas Pendidikan

a. Fasilitas Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik

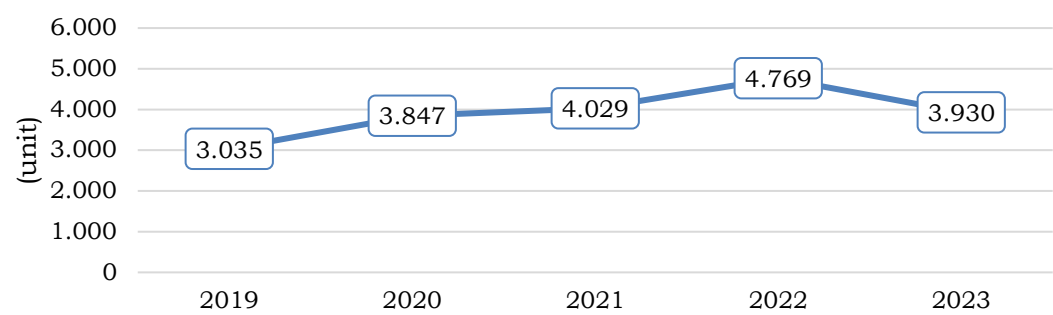
Kualitas fasilitas pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam penyediaan layanan pendidikan. Penyediaan fasilitas SD dengan kondisi baik relatif meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun demikian pada 2023 jumlah fasilitas pendidikan SD dengan kondisi baik sempat mengalami penurunan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dapat memberikan layanan pendidikan dengan kualitas yang baik.



Gambar 2.104
Jumlah Fasilitas Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kabupaten
Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

b. Fasilitas Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik

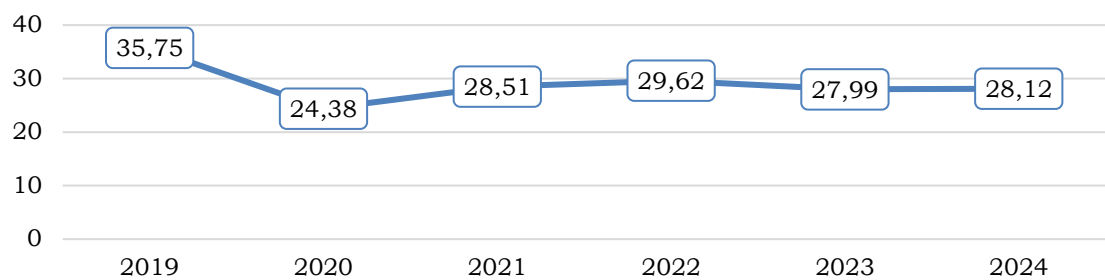
Kualitas fasilitas pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam penyediaan layanan pendidikan. Penyediaan fasilitas SMP dengan kondisi baik meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun demikian pada 2023 jumlah fasilitas pendidikan SMP dengan kondisi baik sempat mengalami penurunan yang cukup drastis.



Gambar 2.105
Jumlah Fasilitas Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik Kabupaten
Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

10) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

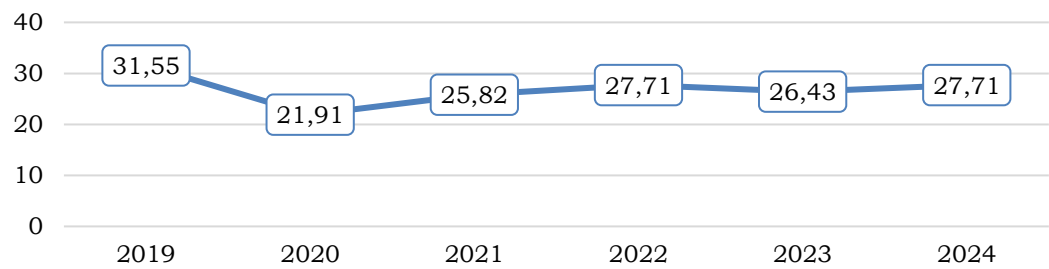
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar adalah persentase ketersediaan sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Dalam kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Tangerang cenderung stabil meski sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Rasio ini tergolong sedang dan menunjukkan ketersediaan pendidikan dasar di Kabupaten Tangerang berkisar antara 24-30 sekolah untuk 10.000 penduduk. Meskipun demikian rasio tersebut masih menunjukkan daya tampung penduduk usia pendidikan dasar dalam mengenyam pendidikan dasar.



Gambar 2.106
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2023

11) Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

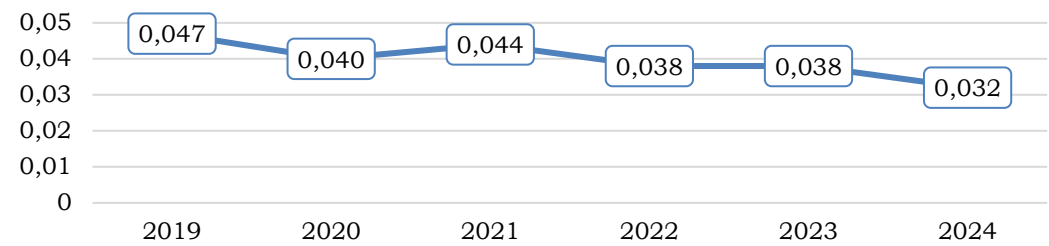
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah adalah persentase ketersediaan sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Dalam kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Tangerang mengalami cenderung stabil meski sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2020. Rasio ini menunjukkan ketersediaan pendidikan menengah di Kabupaten Tangerang berkisar antara 21-31 sekolah untuk 10.000 penduduk. Meskipun demikian rasio tersebut masih menunjukkan daya tampung yang cukup baik untuk penduduk usia pendidikan menengah dalam mengenyam pendidikan menengah.



Gambar 2.107
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2023

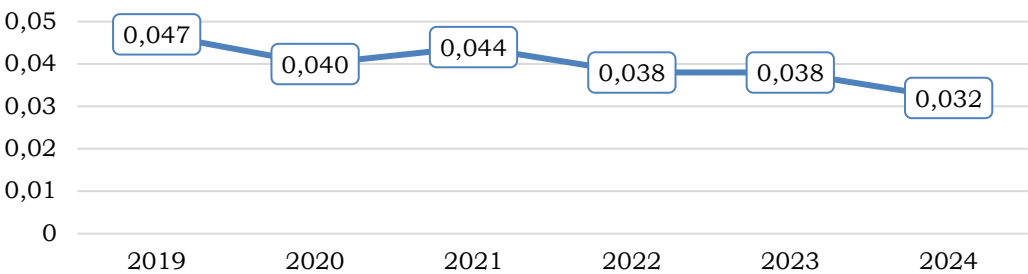
12) Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan jumlah guru per 10.000 murid pendidikan dasar. Kabupaten Tangerang memiliki rasio yang rendah hal ini menunjukkan jumlah guru yang masih sedikit dibanding dengan jumlah murid pendidikan dasar. Dalam kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Tangerang cenderung stagnan dengan kecenderungan tren menurun.



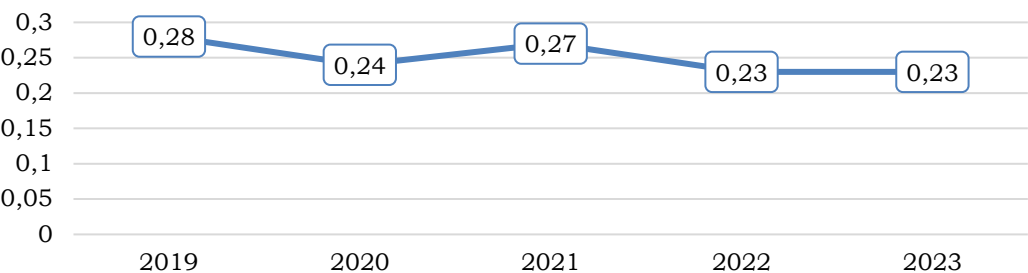
Gambar 2.108
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2023

- 13) Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah
- Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan jumlah guru per 10.000 murid pendidikan menengah. Dalam kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan pada kurun 2021-2024. Kabupaten Tangerang memiliki rasio yang cenderung rendah, hal ini menunjukkan jumlah guru yang masih sedikit dibanding dengan jumlah murid pendidikan menengah.



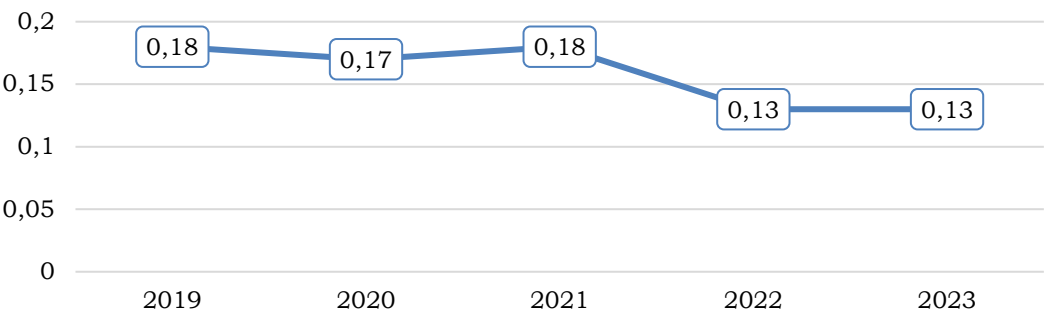
Gambar 2.109
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten
Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2024

- 14) Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar
- Rasio guru terhadap murid per kelas di sekolah dasar Kabupaten Tangerang berada pada kisaran angka 0,2. Hal ini menunjukkan masih rendahnya jumlah guru pada setiap kelas di sekolah dasar.



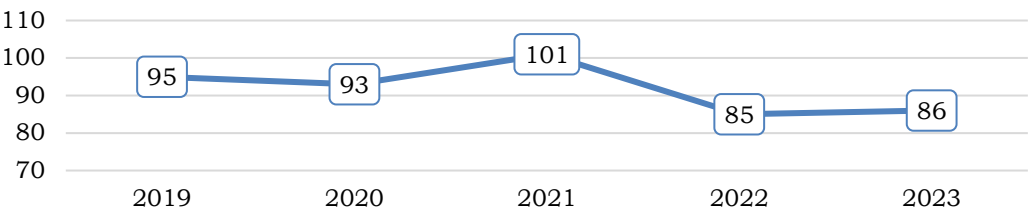
Gambar 2.110
Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Kabupaten
Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2023

- 15) Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah
- Rasio guru terhadap murid per kelas di sekolah menengah Kabupaten Tangerang relatif menurun dan berada pada kisaran angka 0,13-0,18. Hal ini menunjukkan masih rendahnya jumlah guru pada setiap kelas di sekolah menengah.



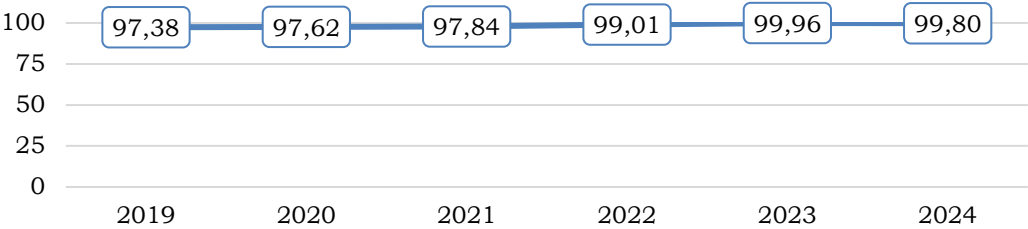
Gambar 2.111
Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah Kabupaten
Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2023

- 16) Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar
- Proporsi murid kelas 1 yang dapat menamatkan sekolah dasar mengalami fluktuasi pada kurun waktu 2019-2023. Secara umum proporsi ini tergolong baik, tetapi jumlah tersebut belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya murid belum dapat menamatkan sekolah dasar.



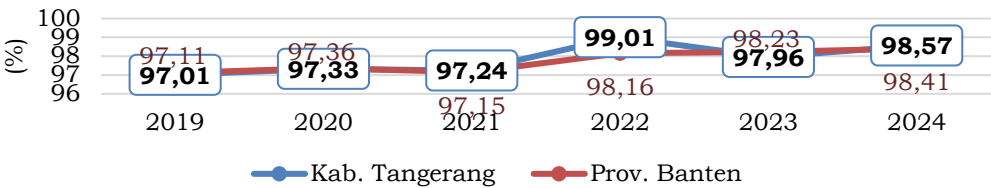
Gambar 2.112
Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

- 17) Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun
- Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun merupakan persentase masyarakat dalam rentang usia 15-24 tahun yang mampu membaca dan menulis per jumlah masyarakat usia 15-24 tahun. Angka ini cenderung mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 99,90 pada tahun 2024. Capaian yang belum mencapai 100% tersebut menunjukkan masih adanya masyarakat yang masih mengalami buta aksara.



Gambar 2.113
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

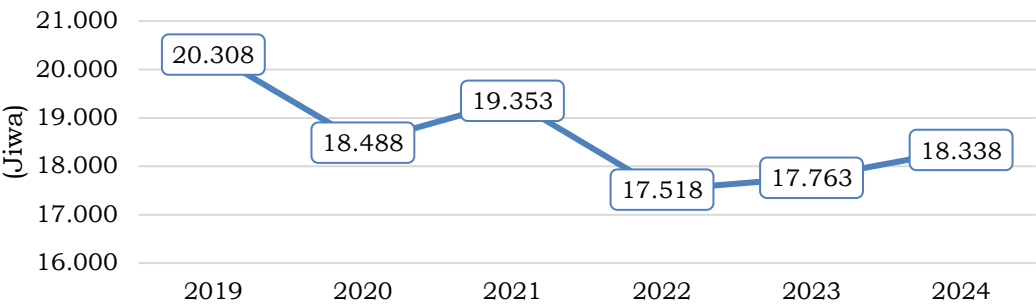
- 18) Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)
- Penduduk usia >15 tahun yang tidak buta aksara menunjukkan jumlah masyarakat dewasa yang memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis. Secara umum, Kabupaten Tangerang memiliki persentase memiliki tren meningkat dan belum menyentuh 100%. Hal ini menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut.



Gambar 2.114
Persentase Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

19) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan jumlah guru yang memiliki ijazah S1/D-IV. Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi ini cenderung mengalami penurunan pada kurun waktu 2019-2023. Meskipun demikian guru yang memenuhi kualifikasi ini cenderung tinggi. Tingginya jumlah ini menunjukkan kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.115
Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

20) Persentase Sekolah yang sudah Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Inklusivitas merupakan salah satu aspek yang perlu dipenuhi dalam bidang pendidikan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang adil dan tanpa diskriminasi, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 2022, persentase sekolah yang telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus di Kabupaten Tangerang sebesar 45%. Angka tersebut kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 50%. Angka tersebut diharapkan akan terus meningkat seiring perbaikan sarana pendidikan yang merata dan berkualitas.

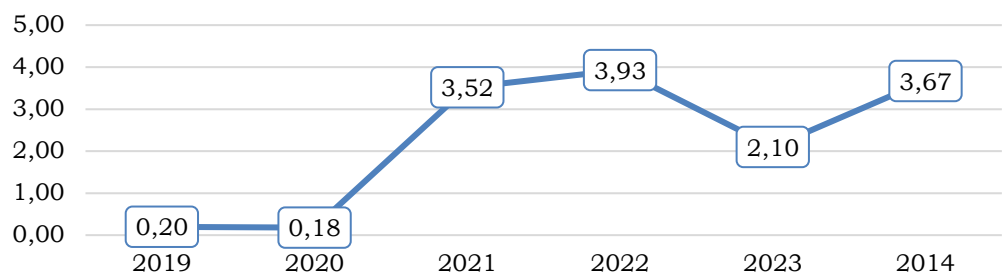
21) Persentase Sekolah yang Memenuhi Syarat Pendidikan Inklusi

Indikator lain yang menunjukkan inklusivitas di bidang pendidikan adalah persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan khusus. Sebuah sekolah dapat dikatakan siap melaksanakan pendidikan inklusif jika memenuhi persyaratan seperti tenaga profesional yang memadai, sarana-prasarana yang mendukung, kurikulum inklusif, hingga lingkungan kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Di tahun 2022, persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi di Kabupaten Tangerang sebesar 52,98% dan meningkat di tahun 2023 menjadi 54,765%.

B) Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi atau AKB merupakan jumlah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran bayi pada suatu tahun tertentu. Pada lima tahun terakhir, AKB Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi yang memuncak pada tahun 2022. Dimulai dengan angka 0,2 pada tahun 2019 dan 0,18 pada tahun 2020. Lalu diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022, yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 mencapai angka 3,52 dan 3,93. Lalu tahun berikutnya, nilai AKB turun dari lonjakan menjadi 2,1 pada tahun 2023.



Gambar 2.116
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 - 2024

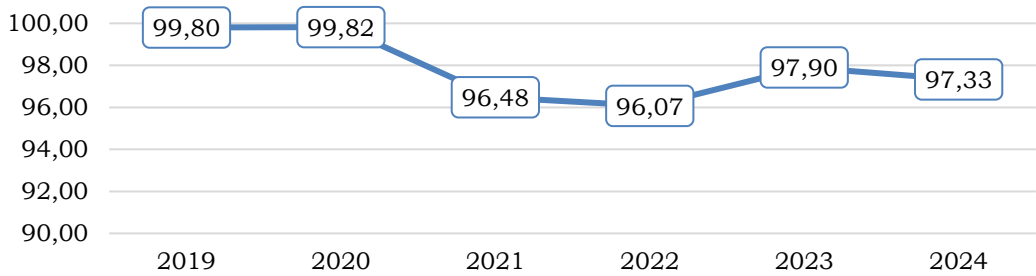
Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2024

Tabel 2.12
Penyebab Kematian Bayi Kabupaten Tangerang 2024

Penyebab Kematian Bayi							
No	Penyebab	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	BBLR	42	84	76	42	125	96
2	Asfiksia	67	50	89	67	47	48
3	Tetanus	1	1	1	1	0	2
4	Sepsis	39	24	24	39	1	0
5	Kelainan Kongenital	20	34	32	20	37	31
6	Ikterus	2	1	1	0	0	0
7	Pendarahan Intrakranial	0	0	0	0	0	0
8	Pneumonia	2	0	1	1	10	1
9	Diare	0	0	5	0	5	1
10	Lain-lain	54	9	22	56	11	19
Total		227	203	251	226	256	198

Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2024

- 2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
- Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merupakan persentase bayi lahir dan mampu bertahan hidup hingga mencapai usia 1 tahun. Indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan ibu dan anak dan efektivitas sistem kesehatan di sekitarnya. AKB dapat dihitung dengan rumus (1-angka kematian bayi). Berdasarkan rumus tersebut, angka kematian bayi ditentukan dengan jumlah kematian bayi dengan usia di bawah 1 tahun dengan kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada waktu yang sama.

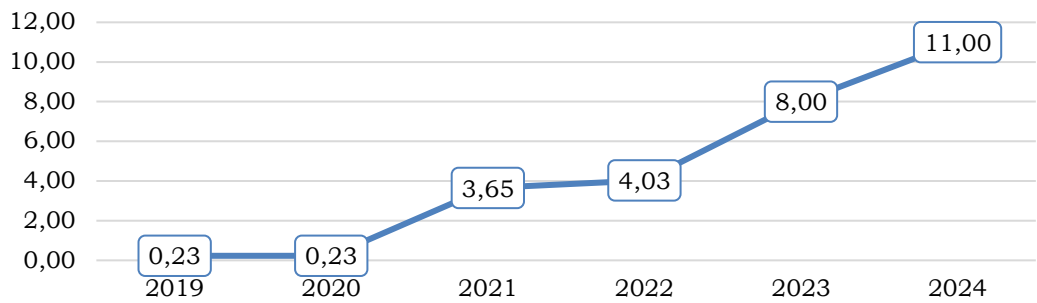


Gambar 2.117
Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 - 2024

Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2024

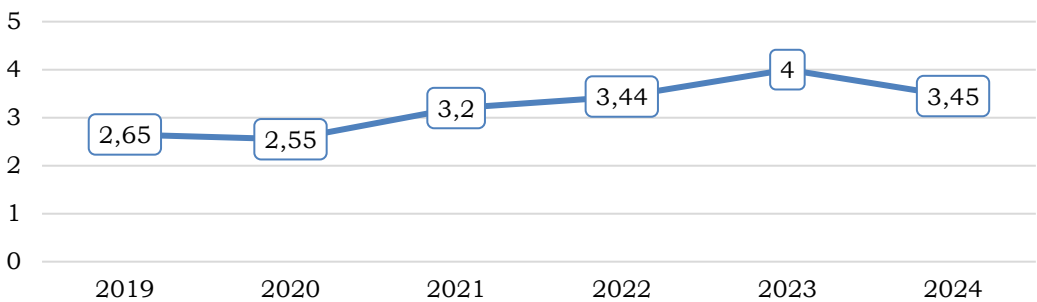
AKHB Kabupaten Tangerang mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021 dan menurun lagi pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penyebaran COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Lalu AKBH meningkat pada tahun 2023 dengan meredanya kasus penyebaran COVID-19.

- 3) Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup
- Angka kematian balita (AKBa) merupakan jumlah kematian anak yang berusia 0 - 4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada tahun tersebut. Dalam lima tahun terakhir, angka kematian balita Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan setiap tahunnya.



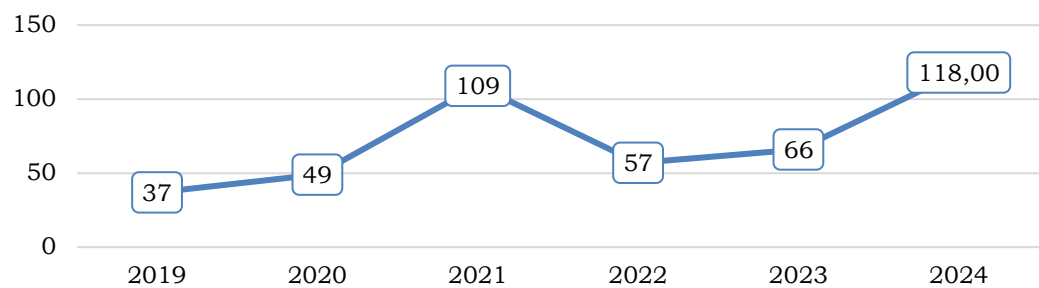
Gambar 2.118
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 - 2024
Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2023

- 4) Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup
- Angka kematian neonatal merupakan jumlah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian neonatal Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai sebesar 3,45.



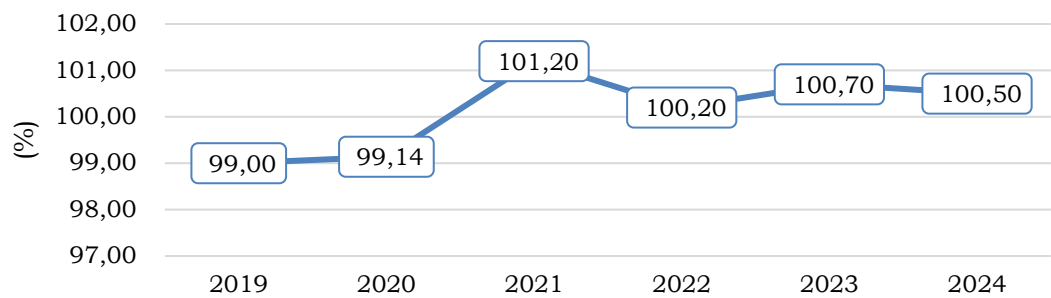
Gambar 2.119
Angka Kematian Neonatal Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024
Sumber: Buku Resume Analisis Statistik Sektor Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2023

- 5) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
- Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup ibu. AKI digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan ibu, baik dari kesehatan ibu, status gizi, perilaku hidup sehat, serta tingkat pelayanan kesehatan yang juga memberi fokus kepada ibu yang sedang hamil, melahirkan dan masa nifas. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan drastis pada tahun 2021 dan mencapai angka 109 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup ibu. Angka tersebut mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 mencapai angka 66, tahun 2024 dilaporkan angka kematian ibu sekitar 34 jiwa dengan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup sebesar 118.



Gambar 2.120
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 - 2024
Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2024

- 6) Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan
- Persentase persalinan ibu hamil di fasilitas kesehatan cenderung meningkat, bahkan di tahun 2021 hingga tahun 2023 persentasenya telah mencapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang telah berupaya menekan angka kematian ibu melalui persalinan di lingkungan mendukung dengan bantuan tenaga medis terlatih.



Gambar 2.121
Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 - 2024
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2024

- 7) Rasio Posyandu per Satuan Balita
- Posyandu merupakan salah satu wadah kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana dan dibimbing oleh petugas kesehatan. Kesuksesan posyandu dapat dinilai dari penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Terkait dengan hal tersebut, pemerintah menentukan rasio minimal posyandu tiap daerah 1 : 100. Rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Tangerang menurun dari tahun 2019 di angka 1 : 52 hingga pada tahun 2023 mencapai angka 1 : 189. Hal ini menandakan bahwa jumlah posyandu tidak mengikuti perkembangan jumlah balita.

Tabel 2.13
Rasio Posyandu per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024

Rasio Posyandu per Satuan Balita						
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Posyandu Aktif	1.293	1.263	1.180	1.375	1.310	2.024
Balita	67.861	126.855	186.023	193.345	247.253	243.841
Rasio Posyandu per Satuan Balita	1 : 52	1 : 100	1 : 158	1 : 141	1 : 189	1:8,30

Sumber: Profil Statistik Kabupaten Tangerang, 2023

- 8) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk
- Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tangerang semakin meningkat lima tahun terakhir, terutama pada fasilitas dasar yaitu puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu (Pustu).

Tabel 2.14
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten
Tangerang Tahun 2019 – 2024

Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk						
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Puskesmas	1 : 63.522	1 : 69.491	1 : 83.830	1 : 74.394	1 : 75.213	1:78.629
Rasio Poliklinik	1 : 6.639	1 : 7.263	1 : 6.045	1 : 5.288	1:3.900	1:6.313
Rasio Pustu	1 : 68.170	1 : 76.440	1 : 86.096	1 : 86.140	1 : 87.089	1:82.373

Sumber: Profil dan Data Statistik Kabupaten Tangerang, 2023-2024

- 9) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
- Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan lanjut yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Kesediaan fasilitas rumah sakit di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2021 dari 25 unit menjadi 27 unit pada tahun 2021. Dengan membandingkan jumlah penduduk dan fasilitas rumah sakit yang ada di Kabupaten Tangerang, rasio rumah sakit belum memenuhi dari sisi rasio 1 : 100.000.

Tabel 2.15
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 – 2024

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk						
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit	25	25	27	27	27	29
Penduduk	2.794.969	3.057.599	3.185.552	3.273.321	3.309.365	3,459,706
Rasio	1 : 116.457	1 : 132.939	1 : 117.983	1 : 121.234	1 : 122.569	1: 119,300

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

- 10) Rasio Dokter per Satuan Penduduk
- Rasio dokter per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan dokter yang bisa memberikan pelayanan kepada penduduk Kabupaten Tangerang. Sebagian besar rasio menurut jenis dokter menurun dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dokter yang dapat memberikan pelayanan untuk penduduk Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.16
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

Rasio Dokter per Satuan Penduduk						
Jenis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dokter Spesialis	1 : 4.068	1 : 4.223	1 : 3.765	1 : 3.609	1 : 3,313	1:2,709
Dokter Umum	1 : 6.767	1 : 7.568	1 : 2.907	1 : 2.805	1 : 2,968	1: 1,520
Dokter Gigi	1 : 20.108	1 : 21.685	1 : 22.277	1 : 21.118	1 : 20,179	1:6,359
Dokter Spesialis Gigi	1 : 64.999	1 : 67.947	1 : 69.251	1 : 68.194	1 : 68,945	1:34,254
Rata-Rata	1 : 2.180	1 : 2.327	1 : 1.495	1 : 1.438	1 : 1.423	1:11.210

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

11) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga Medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga medis yang bisa memberikan pelayanan kepada penduduk Kabupaten Tangerang. Dalam lima tahun terakhir, angka rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Tangerang menurun. Hal ini menandakan bahwa jumlah tenaga medis setiap tahunnya meningkat.

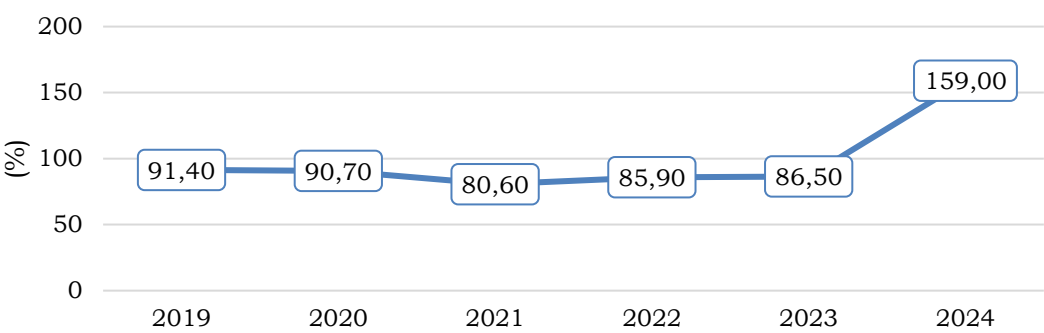
Tabel 2.17
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 – 2024

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk						
Tenaga Medis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perawat	1 : 1.481	1 : 932	1 : 843	1 : 895	1 : 919	1 : 2,236
Bidan	1 : 2.516	1 : 2.100	1 : 1.638	1 : 2.225	1 : 2.270	1 : 5,179
Farmasi	1 : 9.671	1 : 6.304	1 : 8.824	1 : 9.949	1 : 9.592	1 : 32,034
Tenaga Kesehatan Masyarakat		1 : 40.232	1 : 96.532	1 : 32.409	1 : 33.428	1 : 41,186
Tenaga Kesehatan Lingkungan		1 : 48.533	1 : 46.846	1 : 39.919	1 : 40.358	1 : 22,465
Tenaga Gizi	1 : 32.500	1 : 27.796	1 : 25.484	1 : 23.720	1 : 23.471	1 : 9,970
Ahli Teknologi Laboratorium Medik		1 : 20.116	1 : 10.548	1 : 10.732	1 : 10.573	1 : 2,236

Sumber: BPS Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2024

12) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Kabupaten Tangerang memiliki cakupan komplikasi fluktuatif. Berdasarkan grafik di bawah ini, bahwa pada tahun 2019 mencapai cakupan yang cukup tinggi yaitu 91,4%, menurun pada tahun 2020 mencapai angka 90,7%, dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 80,6%. Pada tahun 2024, cakupan komplikasi yang bisa ditangani kebidanan meningkat menjadi 159%. Angka-angka ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan bidan kesulitan dalam menangani pasien.

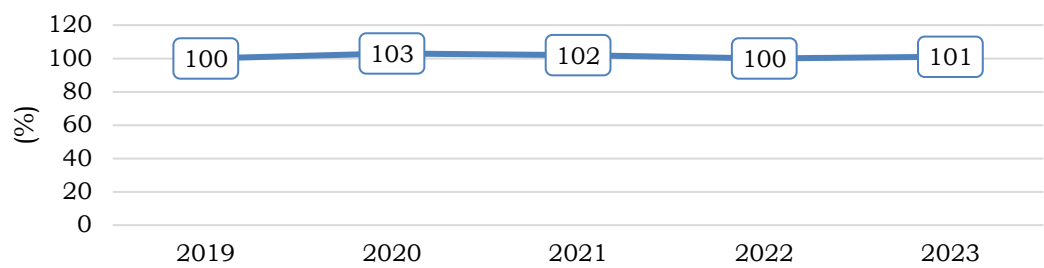


Gambar 2.122
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang, 2023-2024

13) Cakupan Pertolongan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

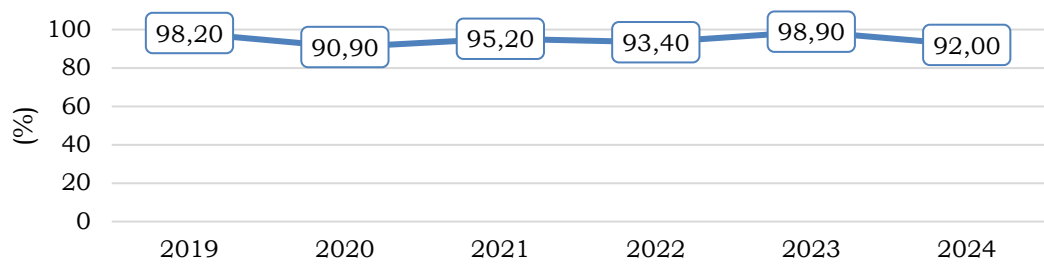
Dalam lima tahun terakhir, cakupan pertolongan oleh tenaga kerja kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Tangerang selalu berada di angka 100% bahkan lebih, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 103%. Hal ini menandakan bahwa kualitas tenaga kesehatan pada Kabupaten Tangerang meningkat.



Gambar 2.123
Cakupan Pertolongan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi
Kebidanan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Open Data dan Data Sektoral Kabupaten Tangerang, 2024

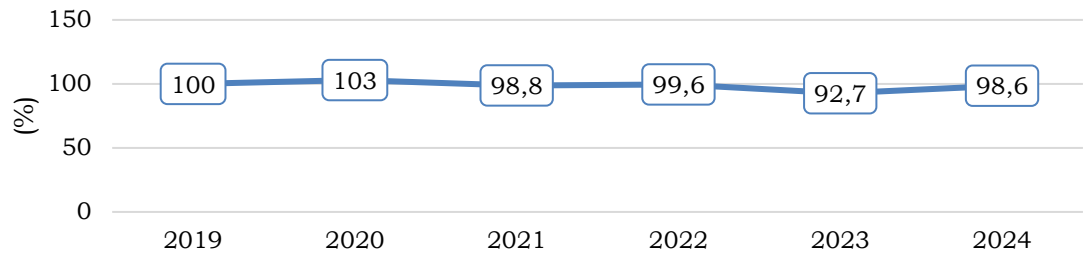
- 14) Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
- UCI merupakan salah satu indikator dari unsur kesehatan dalam mengukur keberhasilan pemberian imunisasi kepada anak-anak. UCI yang diterapkan pada kelurahan/desa adalah gambaran daerah di mana angka UCI di atas 80% merupakan persentase bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap di dalam daerah tersebut.

Dalam lima tahun terakhir, cakupan UCI Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif. Dari tahun 2019 yang mencapai angka 98,2% lalu menurun pada tahun 2020 dengan angka 90,9%. Angka UCI kemudian naik pada tahun 2021 hingga mencapai 95,2% dan menurun lagi pada tahun 2022 dengan angka 93,4%. Pada tahun 2023, cakupan UCI mencapai 98,90%. Hal ini menandakan bahwa upaya imunisasi anak-anak di Kabupaten Tangerang perlu dipertahankan karena persentase saat ini sudah cukup baik.



Gambar 2.124
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: Open Data dan Data Sektoral Kabupaten Tangerang, 2024

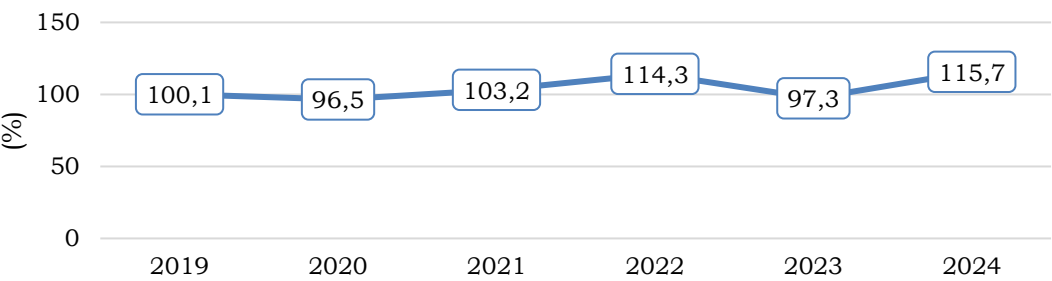
- 15) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan merupakan persentase di mana jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di sarana pelayanan suatu wilayah kerja dibandingkan dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang dicatat pada suatu wilayah pada waktu yang sama.



Gambar 2.125
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023

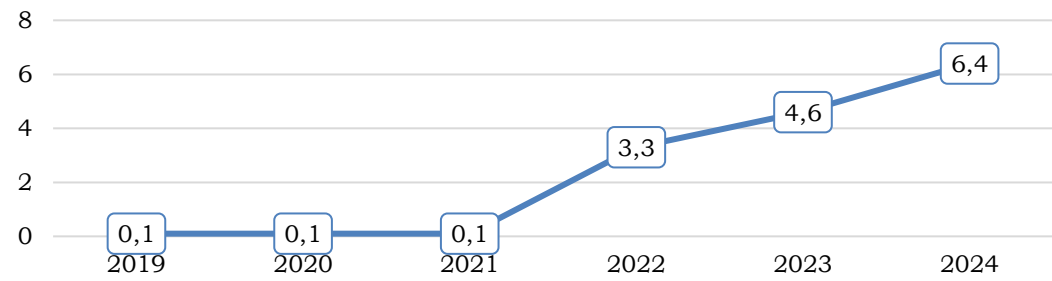
Dalam lima tahun terakhir, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuatif. Berdasarkan grafik diatas, capaian pada tahun 2019 sebesar 100% dan tahun 2024 mencapai 98.6% yang menandakan bahwa perlunya peningkatan dalam penyediaan fasilitas dan kesadaran kesehatan baik dari instansi terkait dan masyarakat Kabupaten Tangerang.

- 16) Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak
- Program imunisasi merupakan salah satu upaya intervensi kesehatan untuk melindungi penduduk dari penyakit tertentu, dengan pertimbangan pembiayaan yang paling *cost effective*. Imunisasi campak merupakan imunisasi yang biasa dilakukan pada usia 1 tahun dengan pemberian vaksinasi. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak terhitung dengan jumlah anak usia 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak selama 1 tahun dibandingkan dengan jumlah anak usia 1 tahun pada tahun sama. Dalam tahun 2019-2024, persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi yang menurun. Meskipun menurun, capaian persentase 115,7% merupakan cakupan yang sudah sangat baik.



Gambar 2.126
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Resume Analisis Statistik Sektorl Kabupaten Tangerang

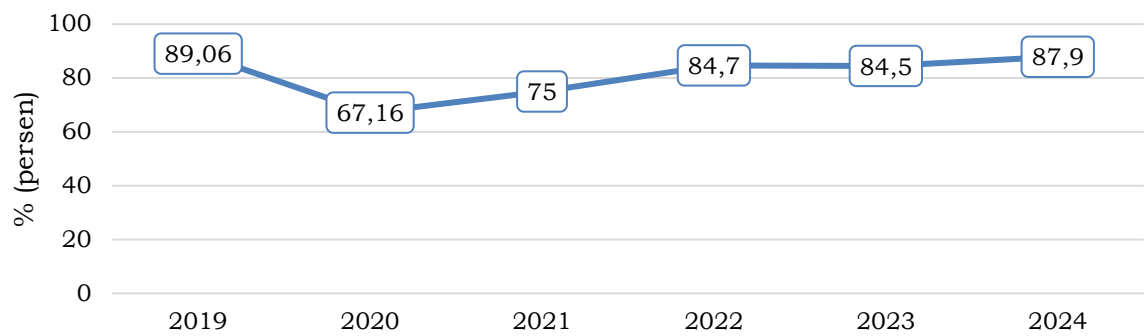
- 17) Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk
- Kasus AFP (*Acute Flaccid Paralysis*) merupakan kasus kelumpuhan pada anak usia < 15 tahun. Non polio AFP Rate per 100.000 penduduk Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 0,1 menjadi 6,4 pada tahun 2024. Peningkatan ini dapat menandakan bahwa semakin baik fasilitas kesehatan Kabupaten Tangerang untuk mendeteksi penyakit AFP.



Gambar 2.127
Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kab. Tangerang Tahun 2019 – 2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

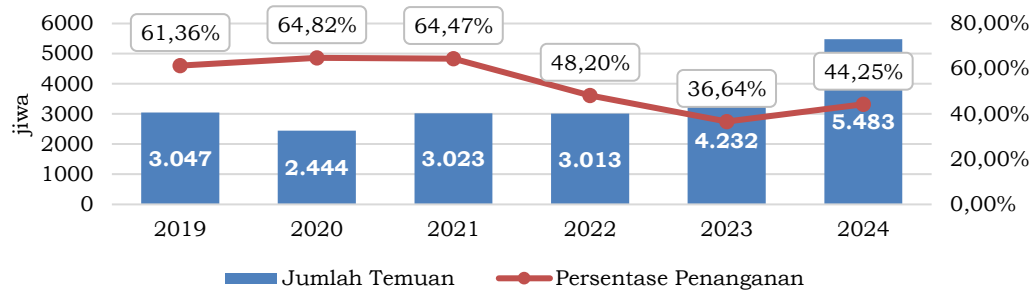
- 18) Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani
- Pneumonia balita adalah balita mengalami batuk, kesukaran bernapas dan hasil perhitungan napas yang tidak normal. Cakupan

balita pneumonia yang ditangani merupakan persentase penderita pneumonia balita (usia 0-59 bulan) yang ditangani sesuai standar di sarana kesehatan daerah. Cakupan balita pneumonia yang ditangani oleh Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan, dari 89,06% pada tahun 2019 menjadi 87,9% pada tahun 2024. Meskipun persentase ini cukup tinggi, cakupan tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan peningkatan fasilitas pendukung penanganan pneumonia di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.128
Persentase Balita Pneumonia yang Ditangani di Kab. Tangerang
Tahun 2019 – 2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2024

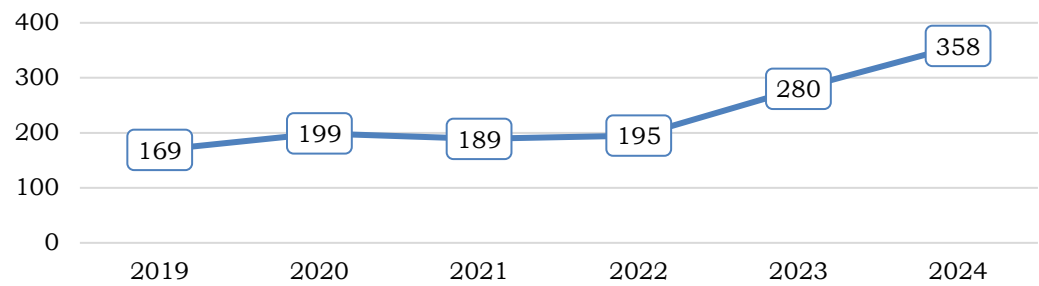
- 19) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Tuberculosis Bakteri Tahan Asam) merupakan penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam suatu wilayah tertentu. Cakupan penemuan yang ada di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan jumlah dari tahun 2019 berjumlah 3.047 dan tahun 2023 mencapai 4.232 temuan. Sementara itu, persentase penanganan penderita penyakit TBC BTA cenderung mengalami kenaikan seiring penambahan kasus temuan TBC BTA dari 36,64% menjadi 44,25% pada tahun 2024 sehingga pencegahan dan penanganan penyakit TBC BTA perlu ditingkatkan.



Gambar 2.129
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019-2024

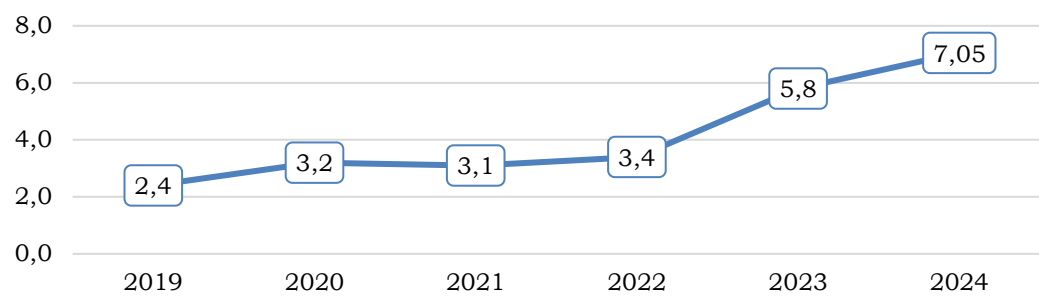
- 20) Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)
- Prevalensi Tuberkulosis merupakan salah satu indikator kualitas kesehatan masyarakat. Prevalensi Tuberkulosis didapatkan dengan membandingkan jumlah kasus tuberkulosis dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu per 100.0000 penduduk. Dalam lima tahun terakhir, tingkat prevalensi tuberkulosis Kabupaten Tangerang cenderung meningkat dan pada tahun 2024 mencapai angka 358 kasus tiap 100.000 penduduk. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kabupaten

Tangerang perlu ditingkatkan untuk menurunkan jumlah penduduk yang menderita tuberkulosis seperti pemberian edukasi kepada masyarakat setempat.



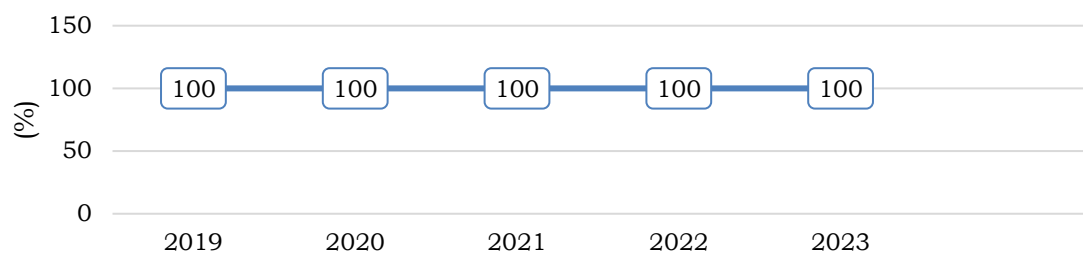
Gambar 2.130
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2024

- 21) Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)
- Tingkat kematian karena tuberkulosis di Kabupaten Tangerang meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, kematian akibat tuberkulosis tercatat 2 kasus per 100.000 penduduk. Angka ini meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 7 kasus per 100.000. Hal ini menandakan bahwa selain upaya pencegahan, Kabupaten Tangerang juga perlu meningkatkan upaya penyembuhan baik dari kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan.



Gambar 2.131
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2024

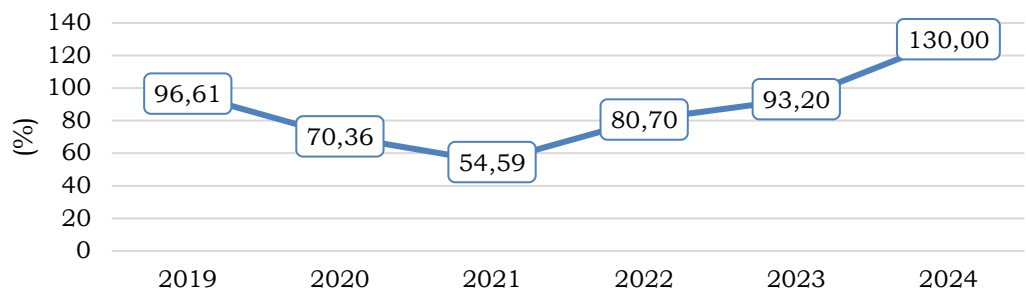
- 22) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
- DBD atau Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit yang menular melalui gigitan nyamuk dengan manifestasi klinis demam tinggi, fenomena hemoragik, dan dapat menyebabkan kematian. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Tangerang tertangani dengan baik hingga dalam lima tahun mencakup 100% pasien dapat ditangani.



Gambar 2.132
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023

23) Penderita Diare yang Ditangani

Diare merupakan penyakit yang memberikan dampak kepada pasien dengan sering buang air besar dengan kondisi cair. Pada Kabupaten Tangerang, penderita diare yang ditangani mengalami peningkatan pada tahun 2024 sekitar 130%.



Gambar 2.133
Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2024

24) Angka Kejadian Malaria

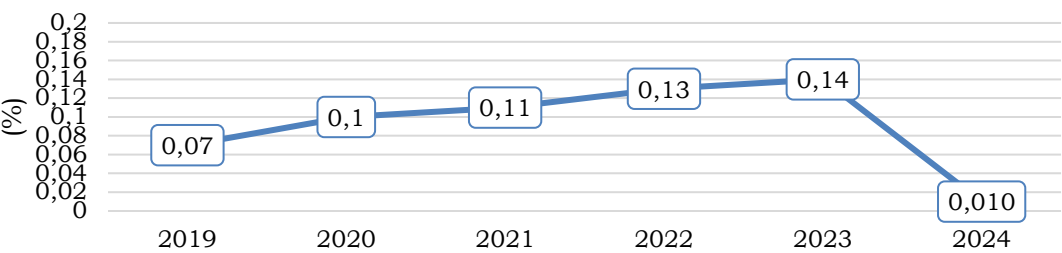
Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit melalui gigitan nyamuk. Pada tahun 2019-2022 tidak ditemukan kejadian malaria di Kabupaten Tangerang, tetapi pada tahun 2023 terdapat 9 angka, dan tahun 2024 sekitar 12 kasus dugaan kejadian malaria yang tercatat oleh Dinas Kesehatan.

25) Tingkat Kematian Akibat Malaria

Pada tahun 2019-2023 tidak ditemukan kematian akibat malaria di Kabupaten Tangerang yang tercatat oleh Dinas Kesehatan. Capaian ini menandakan bahwa Kabupaten Tangerang dapat menangani angka kejadian malaria yang terjadi pada tahun 2024.

26) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS merupakan salah satu indikator kualitas kesehatan masyarakat. Angka prevalensi HIV/AIDS didapatkan berdasarkan persentase jumlah pasien HIV/AIDS terhadap jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi yang meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 0,14%. Prevalensi yang meningkat berimplikasi bahwa fasilitas kesehatan dan instansi terkait di Kabupaten Tangerang masih kurang memadai dalam penanganan dan pencegahan HIV/AIDS.

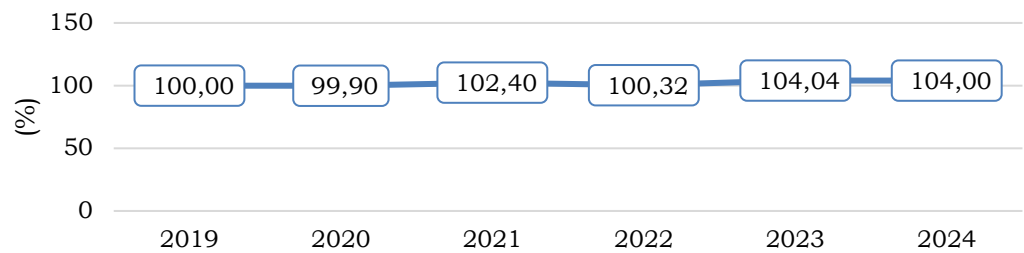


Gambar 2.134
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023

27) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan angka persentase kunjungan bayi yang berumur 29 hari hingga 11 bulan pada sarana pelayanan kesehatan seperti polindes, puskesmas, pustu, rumah

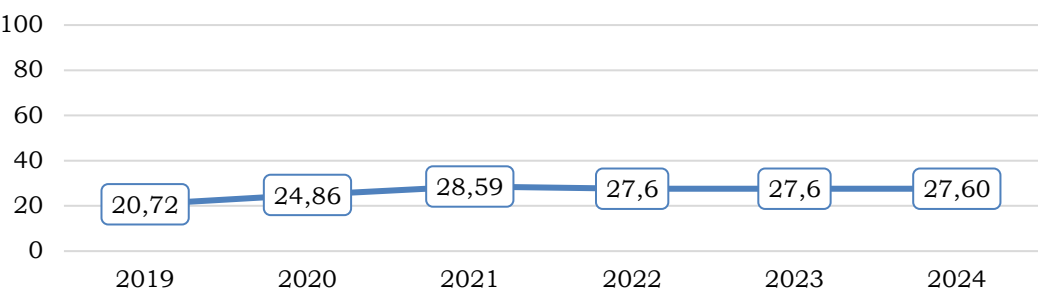
sakit, rumah sakit bersalin ataupun di tempat lain seperti rumah, tempat penitipan anak, posyandu dan sebagainya melalui kunjungan petugas kesehatan. Cakupan kunjungan bayi pada Kabupaten Tangerang telah mencapai klasifikasi tinggi yang bahkan melampaui 100% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.



Gambar 2.135
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023

28) Cakupan Puskesmas

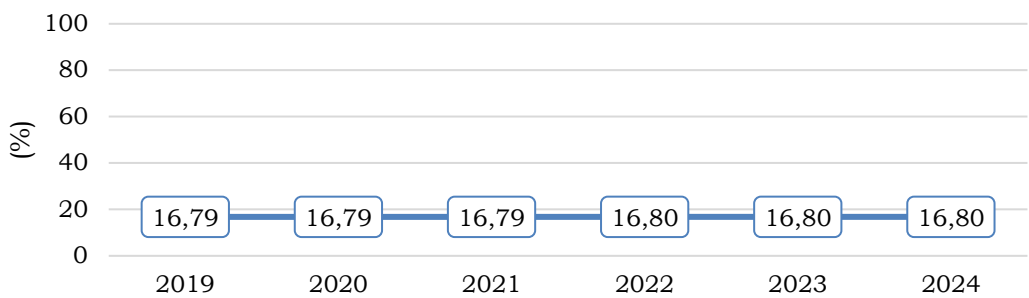
Cakupan puskesmas merupakan persentase jumlah puskesmas terhadap jumlah seluruh kecamatan. Cakupan puskesmas diharapkan untuk meningkat karena selaras dengan penyediaan fasilitas kesehatan dalam suatu wilayah. Cakupan puskesmas Kabupaten Tangerang mengalami kecenderungan meningkat dari tahun 2019 di angka 20,72% hingga pada tahun 2023 mencapai 27,6%.



Gambar 2.136
Cakupan Puskesmas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023

29) Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Cakupan puskesmas pembantu ditentukan oleh persentase jumlah pembantu puskesmas terhadap jumlah seluruh kecamatan. Pada Kabupaten Tangerang, cakupan puskesmas pembantu mengalami kecenderungan stabil dari tahun 2019 di angka 16,79% hingga pada tahun 2023 mencapai 16,8%.

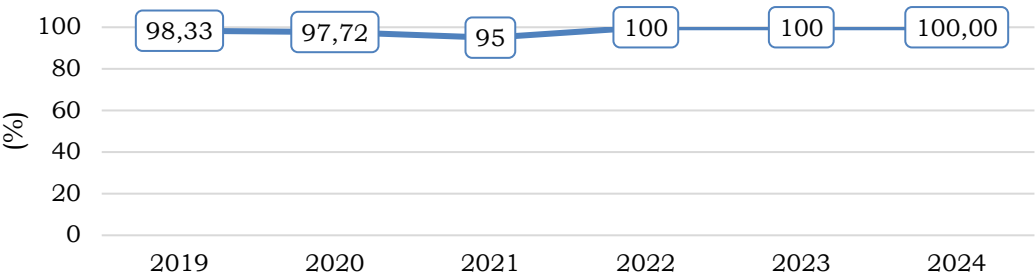


Gambar 2.137
Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023

30) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan antenatal sesuai standar dan secara lengkap serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat, paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 kali pada triwulan ke-1, 1 kali pada triwulan ke-2 dan 2 kali pada triwulan ke-3 di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 juga menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil dan manajemen program KIA dalam suatu wilayah.

Dalam lima tahun terakhir, persentase kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Tangerang cenderung meningkat. Pada tahun 2019, cakupan kunjungan ibu hamil K4 mencapai 98,33% dan menurun pada tahun 2020 di angka 97,72% dan 95% pada tahun 2021. Cakupan ini meningkat pesat di angka 100% pada tahun 2022 dan 2023. Cakupan ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah sadar akan pentingnya pemeriksaan kehamilan yang sesuai standar.

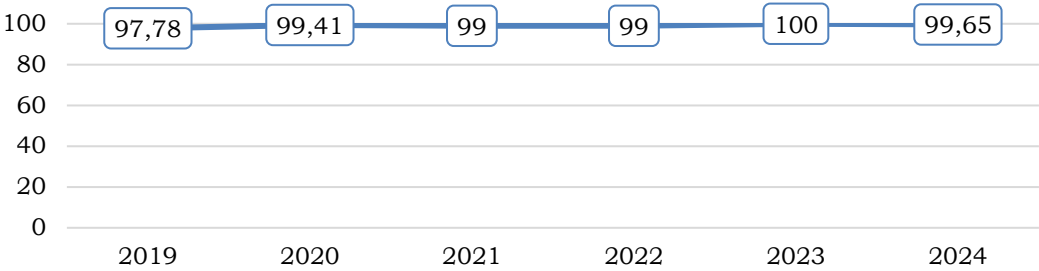


Gambar 2.138
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023

31) Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas merupakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang sesuai standar, dimulai dengan 6 jam pasca melahirkan hingga 42 hari oleh tenaga kesehatan. Pada pelayanan nifas, untuk melakukan deteksi dini komplikasi pada ibu diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan minimal 3 kali dengan beberapa ketentuan waktu, yaitu:

- a. Kunjungan nifas pertama pada lingkup waktu 6 jam hingga 3 hari setelah persalinan
- b. Kunjungan nifas kedua pada kurun waktu 2 minggu setelah persalinan
- c. Kunjungan nifas ketiga pada kurun waktu 6 minggu setelah persalinan.

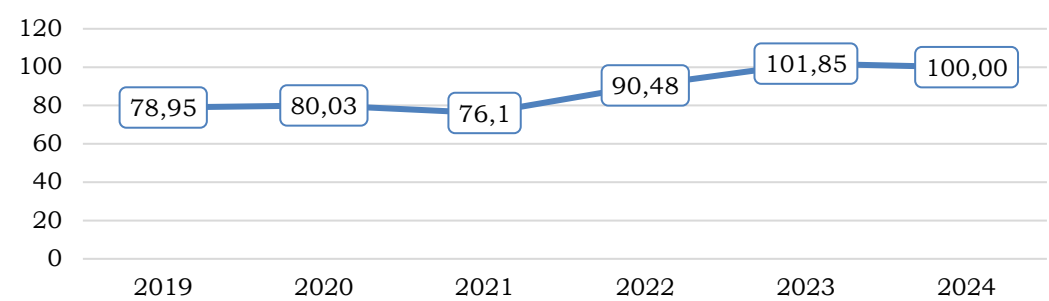


Gambar 2.139
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, cakupan pelayanan nifas Kabupaten Tangerang dalam lima tahun mengalami peningkatan pesat. Pada tahun 2019, cakupan pelayanan nifas mencapai angka 97,78% yang sudah mencapai target SPM cakupan pelayanan nifas yaitu 90%. Angka ini kemudian naik pada tahun 2020 yaitu 99,41% dan turun pada tahun 2021 di angka 99%. Angka ini stagnan pada tahun 2022 dan kemudian naik menjadi 100% pada tahun 2023, dan berkurang di tahun 2024 dengan cakupan sebesar 99,65. Grafik ini menandakan bahwa kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu nifas sudah sangat baik dan perlu dipertahankan.

32) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani merupakan jumlah persentase bayi usia 0 - 28 hari dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang memiliki cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani meningkat drastis hingga mencapai persentase 101,85. Hal ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan terhadap neonatus meningkat.

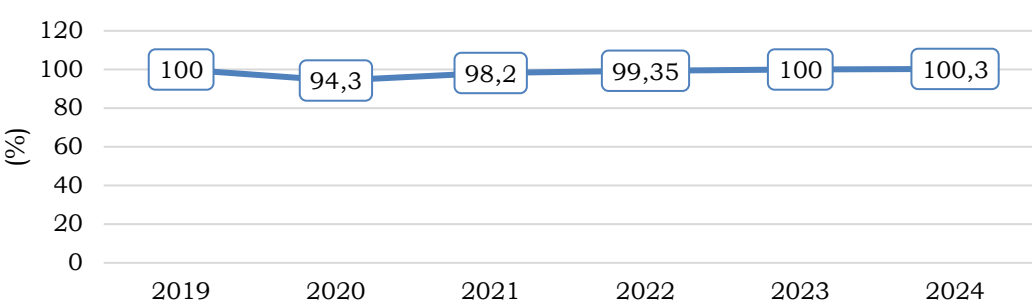


Gambar 2.140
Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024

33) Cakupan Pelayanan Anak Balita

Pelayanan Anak Balita merupakan salah satu skala kesehatan dalam suatu wilayah. Cakupan pelayanan anak balita pada Kabupaten Tangerang memiliki angka yang cukup stabil. Pada tahun 2019, angka cakupan mencapai 100%. Angka cakupan pelayanan anak balita kemudian turun pada tahun 2020 dengan angka 94% dan angka tersebut naik menjadi 98% pada tahun 2021. Angka tersebut terus naik hingga pada tahun 2024 mencapai 100.3%.

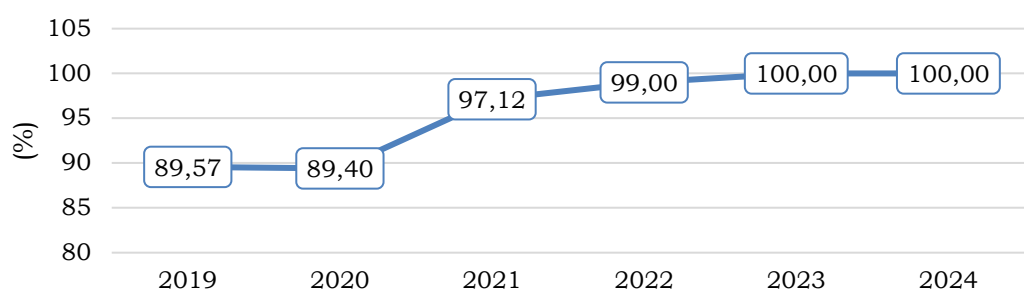


Gambar 2.141
Pelayanan Anak Balita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024

34) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

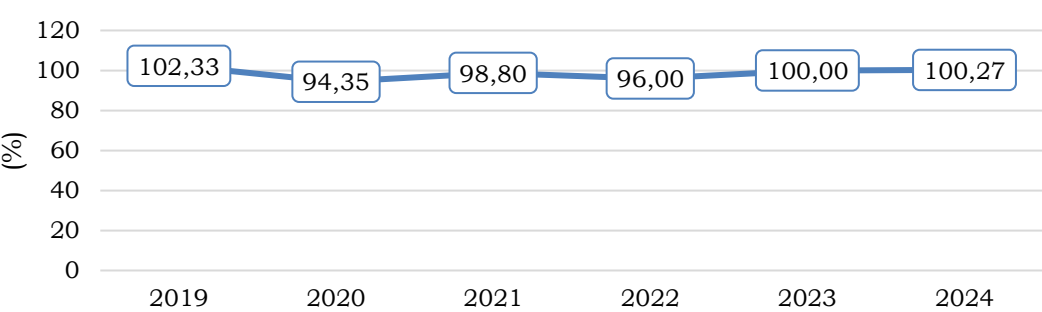
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2019, cakupan penjaringan kesehatan telah mencapai 89,57%, sudah cukup tinggi, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 100%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki komitmen kuat dalam memastikan kesehatan siswa.



Gambar 2.142
Pelayanan Anak Balita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023

35) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin merupakan persentase pasien miskin yang bisa mengakses sarana pelayanan kesehatan strata 1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin diharapkan untuk meningkat karena selaras dengan penyediaan fasilitas kesehatan setara dalam suatu wilayah. Cakupan ini ditentukan oleh jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 dibandingkan dengan jumlah seluruh masyarakat miskin. Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang mencakup pelayanan yang cukup stabil dengan persentase di atas 90%.



Gambar 2.143
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023

36) Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) merupakan persentase banyaknya rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan diagnosis dan penanganan permasalahan pada jalan nafas, ventilasi pernafasan, dan sirkulasi pembuluh darah, serta dapat melakukan resusitasi dasar, stabilisasi dan evakuasi. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% yang menandakan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan gawat darurat sudah sangat baik dan telah mencakup seluruh wilayah.

Tabel 2.18
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)						
Jenis	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Sakit Umum	Jumlah	20	20	20	22	22
	Cakupan	100%	100%	100%	100%	100%
Rumah Sakit Khusus	Jumlah	5	5	5	5	5
	Cakupan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2024

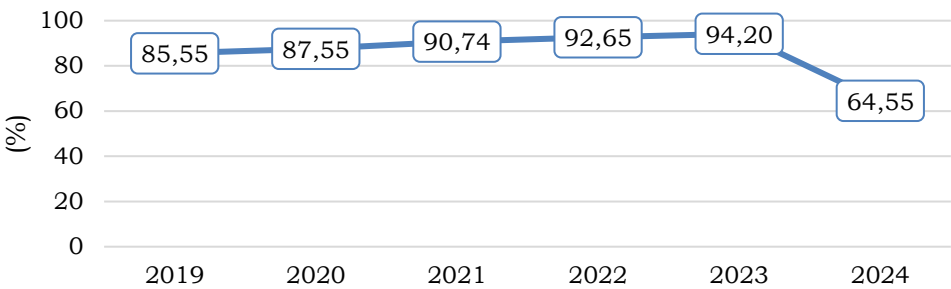
- 37) Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam
- Cakupan desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam adalah persentase timbulnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2019, Kabupaten Tangerang mencakup 4 desa/kelurahan dan tahun 2023 mencapai 5 desa/kelurahan. Peningkatan jumlah ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang telah meningkatkan pelayanan kesehatan dalam penyelidikan epidemiologi.

Tabel 2.19
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam

Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam				
2019	2020	2021	2022	2023
4 desa/kel.	274 desa/kel.	274 desa/kel.	3 desa/kel.	5 desa/kel.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2024

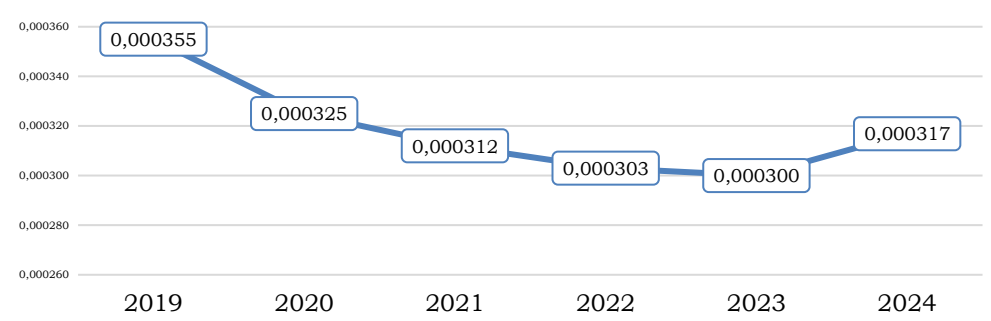
- C) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Pekerjaan Umum
- a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
- Sebagai wilayah dengan lokasi yang sangat strategis, Kabupaten Tangerang memiliki aksesibilitas yang baik didukung dengan kondisi yang baik sebesar 94,20%. Nilai ini cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2019-2023. Kualitas jalan yang baik di wilayah ini menjadi peluang tersendiri untuk mengembangkan Kabupaten Tangerang salah satunya menjadi pilihan jalan alternatif yang menghubungkan berbagai lokasi. Lokasinya yang strategis dan dilalui oleh berbagai kendaraan memberikan dampak buruk pada kondisi jalan yang menurun.



Gambar 2.144
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang

b. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

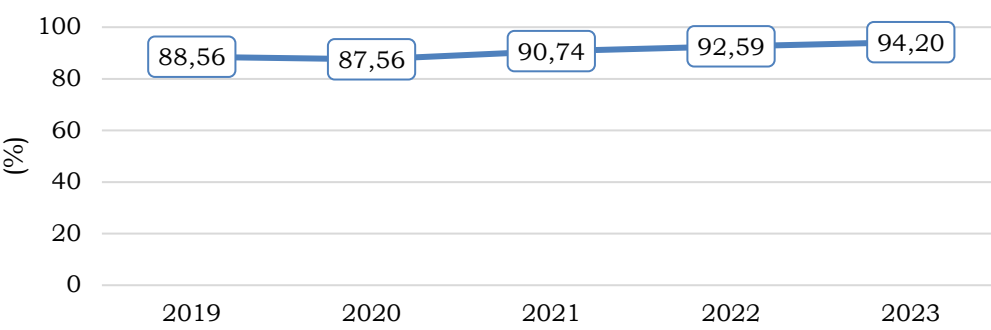
Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan aksesibilitas yang baik. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mengalami penurunan dari kurun waktu 2019-2023. Rasio panjang jalan di Kabupaten Tangerang cenderung rendah berkisar di angka 0,0003, pembukaan jalan baru serta pembangunanya menambah panjang jalan di Kabupaten Tangerang menjadi sekitar 1.096,26 Km.



Gambar 2.145
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

c. Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

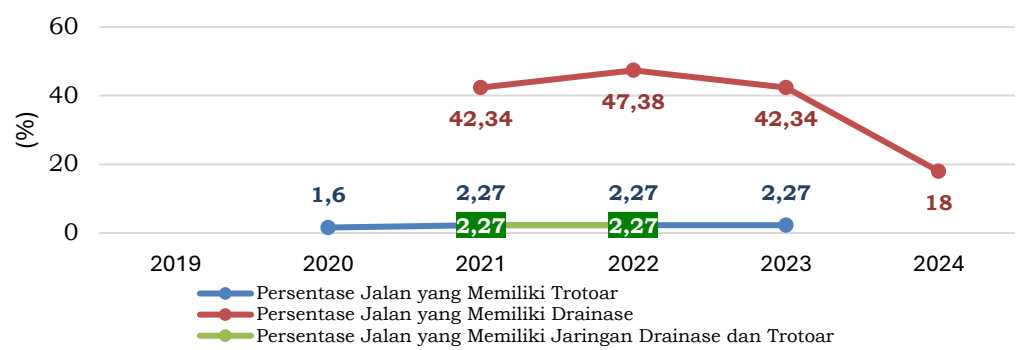
Tumbuhnya permukiman yang tidak terencana berakibat pada munculnya kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4. Sebagai kawasan yang tumbuh dari aglomerasi Jabodetabek, sebagian besar permukiman di wilayah ini sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Hal ini menunjukkan aksesibilitas yang baik di wilayah ini.



Gambar 2.146
Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

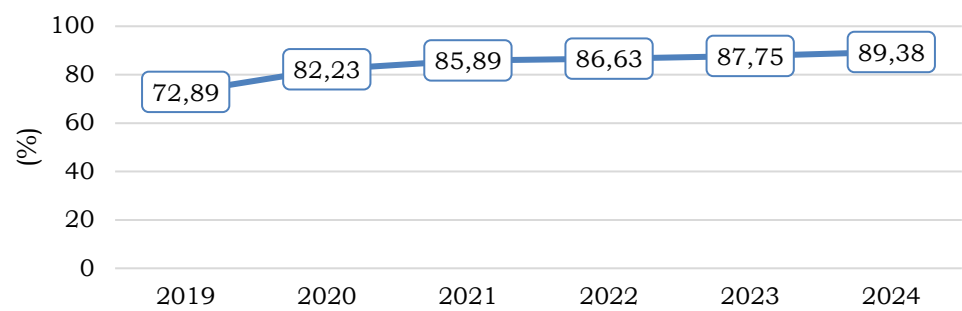
d. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 meter)

Trotoar dan drainase merupakan elemen penting dalam pembangunan jalan. Penyediaan trotoar dan drainase di jalanan Kabupaten Tangerang masih sangat rendah dan belum menyeluruh di seluruh wilayah. Hanya 2,27% jalan di Kabupaten Tangerang yang memiliki trotoar dan drainase.

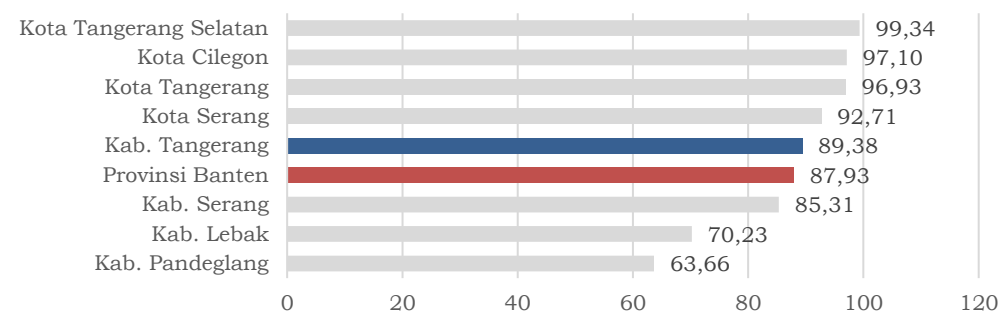


Gambar 2.147
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran
Pembuangan Air Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

- e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
- Sanitasi merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan rumah tangga. Rumah yang baik adalah rumah yang memiliki akses sanitasi yang baik. Pada tahun 2024, persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 89,38%. Pada kurun waktu 2019-2023, persentase rumah tinggal berakses sanitasi mengalami peningkatan yang mengindikasikan kualitas kebersihan di wilayah ini semakin meningkat. Meskipun begitu, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, capaian Kabupaten Tangerang terbilang masih cukup rendah, yaitu berada di posisi 4 terendah.



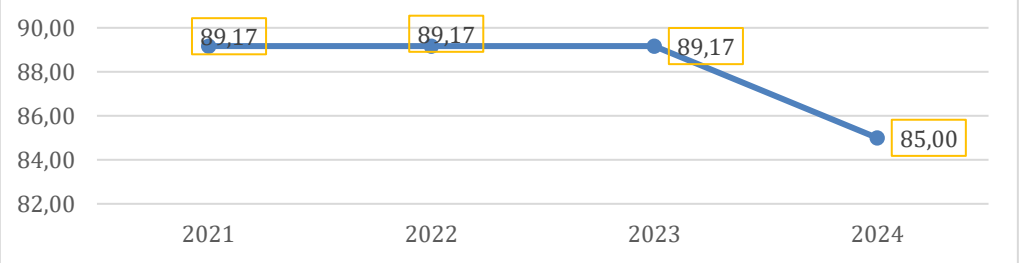
Gambar 2.148
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024; BPS Provinsi Banten (diolah)



Gambar 2.149
Perbandingan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

- f. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
- Dalam kurun waktu tahun 2021-2023, sebesar 89,17% dari total drainase di wilayah Kabupaten Tangerang memiliki

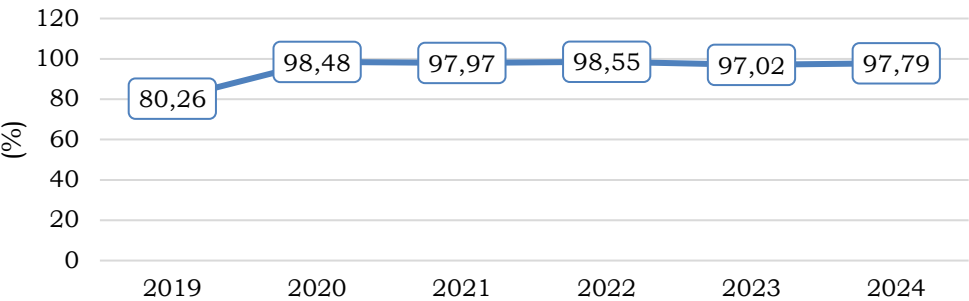
kondisi yang baik atau tidak terdapat sumbatan. Sedangkan persentase sisanya atau 10,83% mengalami sumbatan dan memerlukan penanganan.



Gambar 2.150
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2023
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

g. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup. Penyediaan air di Kabupaten Tangerang terukur melalui persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum yang layak. Persentase rumah tangga berakses air minum layak terus meningkat drastis pada tahun 2020. Sedangkan pada 2020-2024 persentase tersebut cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Tangerang telah terlayani air minum layak, meski terdapat beberapa rumah tangga yang belum berakses air minum layak.



Gambar 2.151
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

h. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Sebagai wilayah yang terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan, Kabupaten Tangerang memiliki berbagai macam rumah ibadah. Masjid di wilayah ini menjadi jumlah terbesar sesuai dengan jumlah penganutnya yang mendominasi wilayah ini. Namun jika dilihat berdasarkan rasio terhadap jumlah penganutnya, rumah ibadah umat Konghucu memiliki cakupan yang lebih tinggi karena rasio yang cenderung rendah, yakni 1 rumah ibadah melayani 94 orang.

Tabel 2.20
Rasio Jumlah Rumah Ibadah terhadap jumlah Penganut

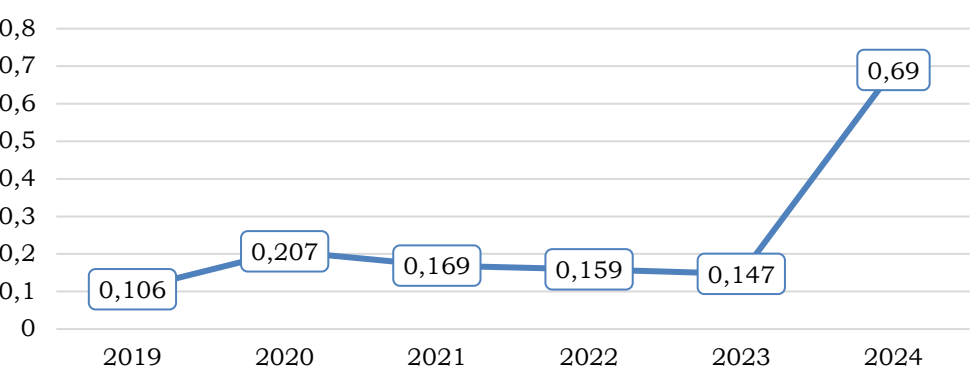
	Budha	Hindu	Islam	Khatolik	Konghucu	Kristen
Jumlah	43	1	1395	5	8	341
Rasio	1:1261,65	1:1935	1:2201	1:8654,60	1:94,13	1:299,96

Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2024

2) Penataan Ruang

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

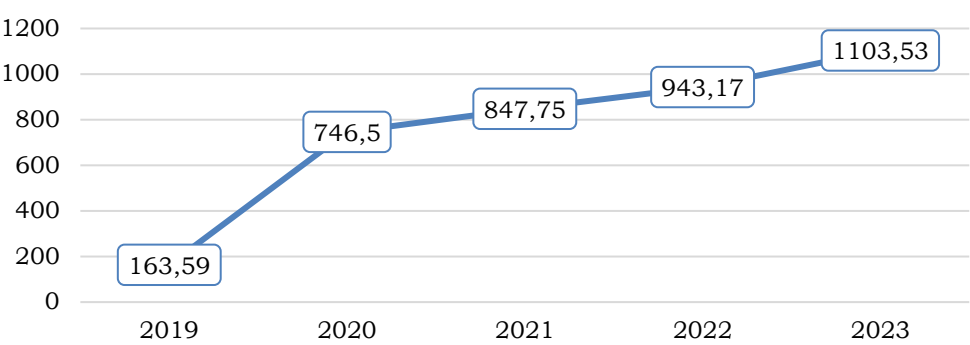
Sebagai wilayah perkotaan, Kabupaten Tangerang memiliki jumlah ruang terbuka hijau yang cukup terbatas. Ruang terbuka hijau tersebut belum banyak yang memiliki hak pakai atau hak guna. Rasio RTH tiap satuan wilayah yang ber HPL/HGB mengalami penurunan yang berkisar di angka 0,01.



Gambar 2.152
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

b. Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

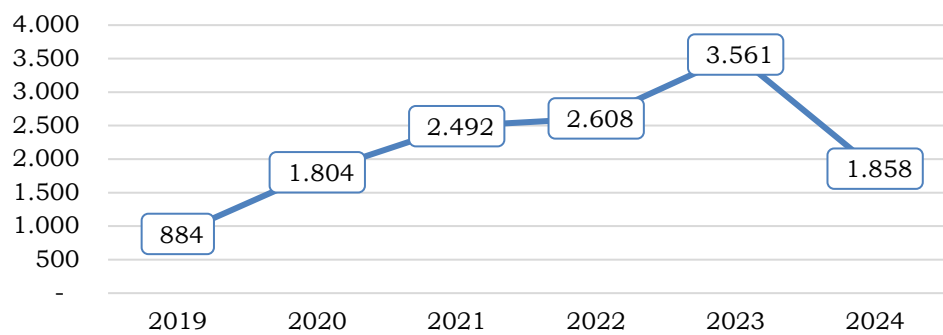
Ruang terbuka hijau merupakan salah satu unsur perkotaan yang wajib dimiliki dalam suatu wilayah. Luasan RTH wajib yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan pentingnya penyediaan ruang hijau dalam pelayanan masyarakat.



Gambar 2.153
Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

c. Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan

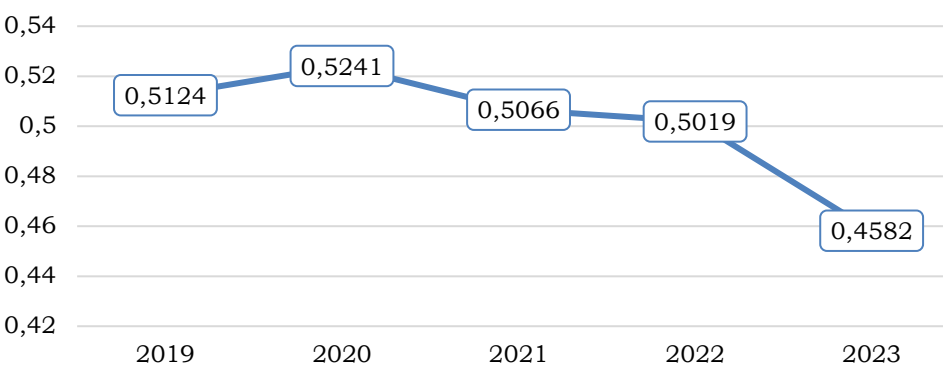
Izin membangun bangunan merupakan salah satu izin yang diperlukan dalam mendirikan bangunan. Jumlah bangunan di wilayah ini yang memiliki IMB mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2019-2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan penataan ruang. Meskipun demikian jumlah IMB ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah bangunan yang ada di wilayah ini.



Gambar 2.154
Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

- d. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya
- Perubahan penggunaan ruang merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di lapangan. Salah satu bentuk perubahan penggunaan ruang adalah berubahnya peruntukan ruang publik. Perubahan penggunaan ruang di Kabupaten Tangerang mencapai 1.838,90 Ha pada 2020. Sedangkan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 1.969,92 Ha. Hal ini dapat berdampak dan peningkatan kebutuhan ruang publik di Kabupaten Tangerang.
- e. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan

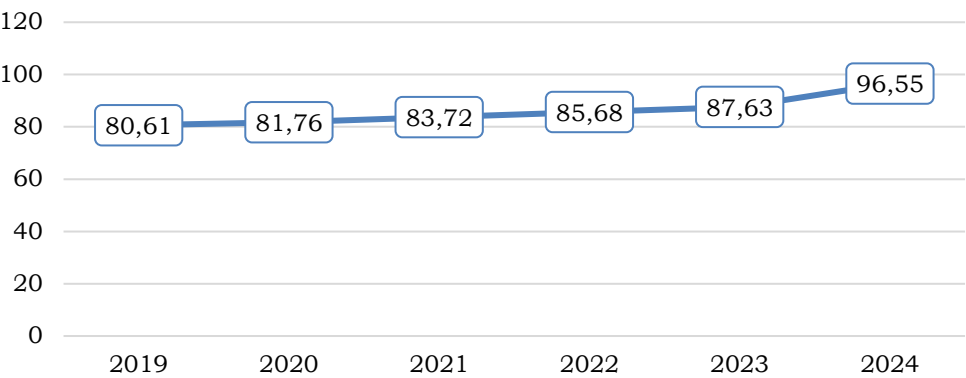
Sebagai salah satu indikator kualitas tata ruang, tutupan lahan dapat terukur melalui pemotretan citra udara. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan di Kabupaten Tangerang relatif stagnan dan berkisar pada angka 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setengah dari luas daratan di Kabupaten Tangerang tertutup oleh pepohonan.



Gambar 2.155
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan
Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kabupaten
Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

- f. Ketaatan Terhadap RTRW
- Rencana tata ruang wilayah digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pemanfaatan ruang. Keterwujudan RTRW sangat dipengaruhi oleh ketaatan terhadap RTRW. Dalam rentang tahun 2019-2024, ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan. Hal ini

menunjukkan peningkatan kesadaran dalam upaya perwujudan penataan ruang.



Gambar 2.156
Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

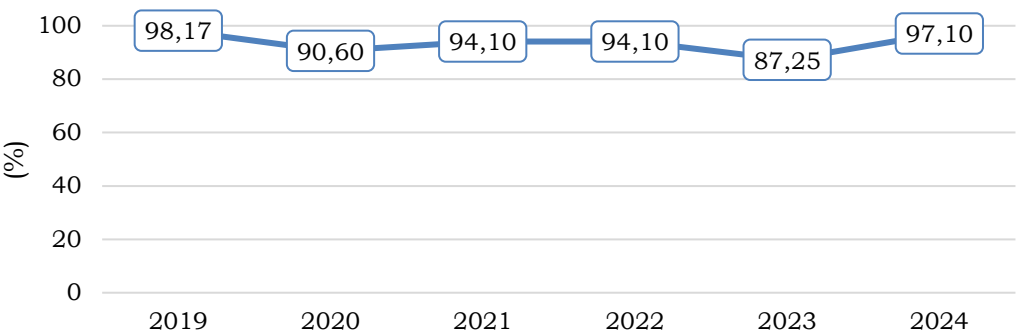
D) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan. Rasio rumah layak huni dapat dihitung dengan perbandingan jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk. Kabupaten Tangerang memiliki rasio rumah layak huni sebesar 97,1 persen. Cakupan ini menunjukkan bahwa penduduk yang memiliki rumah layak huni semakin meningkat.

2) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren menurun dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, cakupan masih mencapai 98,17%. Tetapi persentase tersebut mengalami penurunan bertahap hingga pada tahun 2023 mencapai 87,25%, naik menjadi 97,10% ditahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya program dan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas rumah yang layak dan aman untuk dihuni penduduk Kabupaten Tangerang.

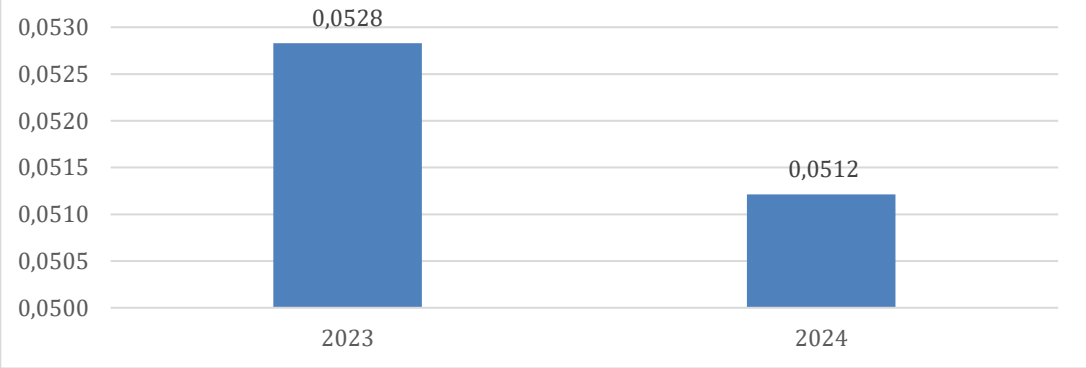


Gambar 2.157
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2024

3) Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

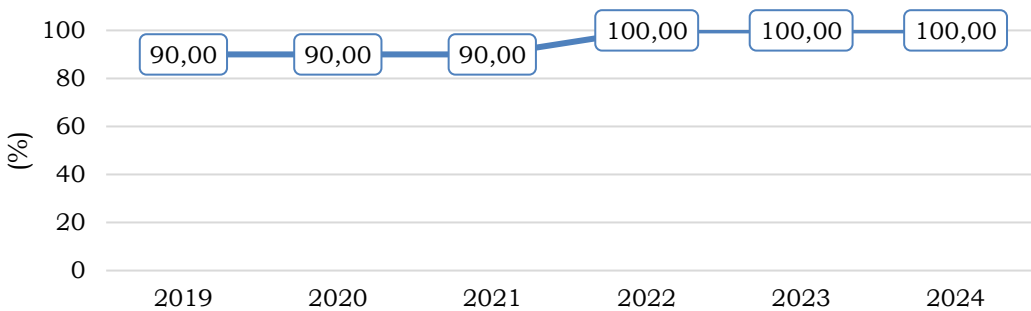
Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam tahun 2023-2024. Pada tahun 2023, persentase permukiman kumuh tercatat sebesar 0,0528%, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,0512% pada

tahun 2024. Penurunan ini menandakan bahwa upaya penataan kawasan permukiman di Kabupaten Tangerang terus dilaksanakan.



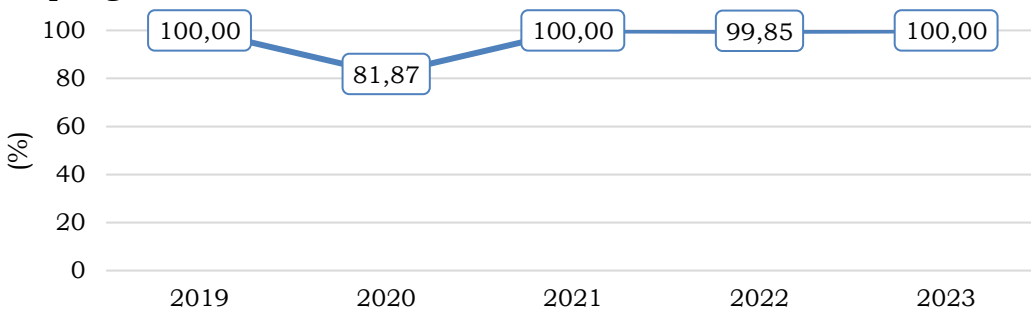
Gambar 2.158
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Tangerang
Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2024

- E) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- 1) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
- Petugas perlindungan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Cakupan Linmas di Kabupaten Tangerang tergolong baik karena sudah mencapai angka 100% pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan layanan perlindungan masyarakat di wilayah ini sudah baik.



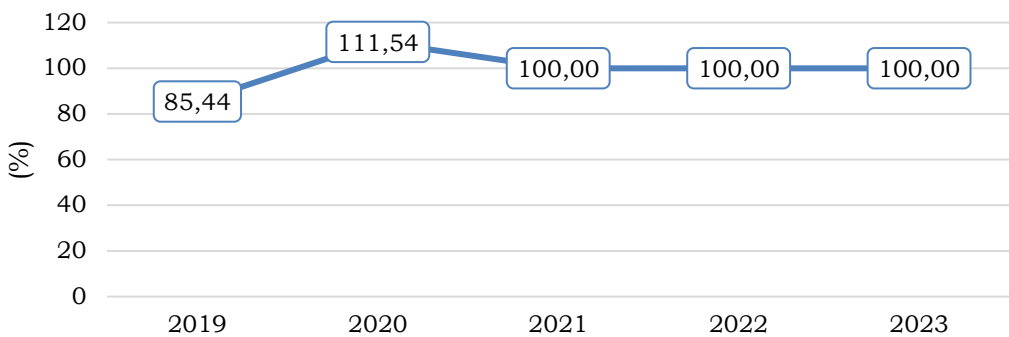
Gambar 2.159
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, 2024

- 2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)
- Penyelesaian pelanggaran K3 di wilayah Kabupaten Tangerang sudah baik ditandai dengan tingkat penyelesaian pelanggaran mencapai 100% pada 2019, 2021, dan 2023. Sedangkan pada tahun 2020, penyelesaian pelanggaran K3 mengalami penurunan yang cukup signifikan.



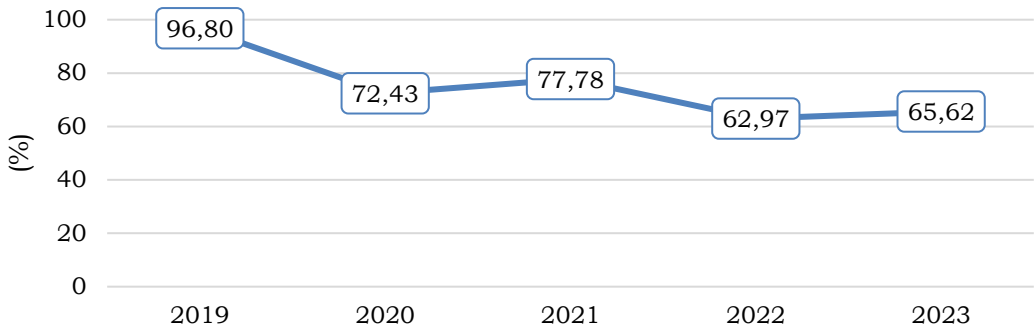
Gambar 2.160
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, 2024

- 3) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten
- Bencana kebakaran merupakan salah satu bencana yang mengancam permukiman perkotaan. Dalam menangani kebakaran, cakupan pelayanan kebakaran di wilayah ini telah mencapai angka 100% pada kurun waktu 2019-2023. Hal ini menunjukkan tingkat layanan kebakaran wilayah ini sudah tergolong baik.
- 4) Persentase Penegakan Perda
- Dalam menjamin ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat diperlukan adanya penegakan peraturan daerah. Penyelesaian penegakan perda di wilayah ini sudah tergolong baik yakni pada 2020-2023 telah mencapai angka 100%. Angka tersebut meningkat drastis dari tahun 2019 yang hanya 85,44%. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjamin ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat melalui penegakan Perda.



Gambar 2.161
Persentase Penegakan Perda Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2023
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, 2024

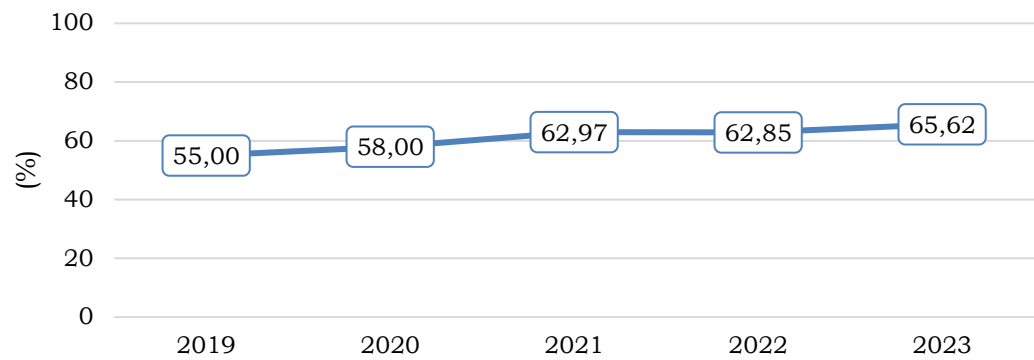
- F) Sosial
- 1) Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
- PPKS merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau seseorang dan/atau keluarga yang karena suatu masalah, hambatan atau gangguan tidak dapat melakukan fungsi sosialnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi angka persentase maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat. Pada grafik di bawah, persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial menurun tiap tahunnya dari tahun 2019 mencakup 96,8% hingga pada tahun 2023 mencakup 65,62%.



Gambar 2.162
Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2023
Sumber: Buku Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2024

2) Persentase PPKS yang Tertangani

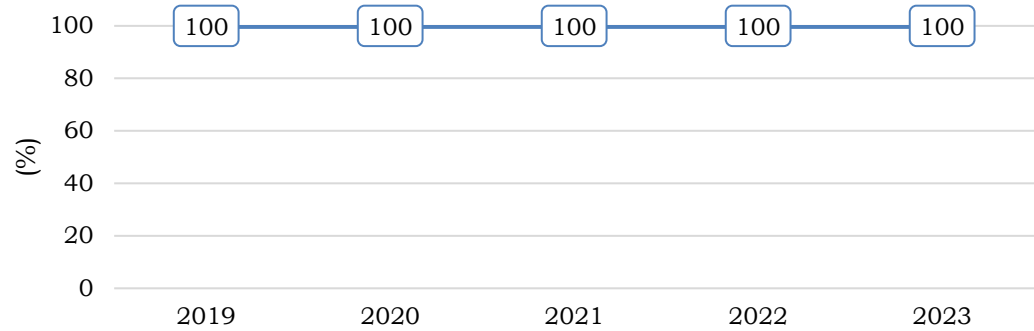
Persentase PPKS yang tertangani merupakan persentase PPKS yang menerima pelayanan untuk memenuhi kebutuhan layak bagi kemanusiaan dalam kelangsungan hidupnya dan juga dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Persentase ini ditentukan oleh PPKS yang tertangani dibandingkan dengan total jumlah PPKS pada suatu wilayah. Pada grafik di bawah, dapat dilihat bahwa PPKS yang tertangani dalam kurun lima tahun, pada tahun 2019, persentase PPKS yang tertangani mencapai 55% dan cenderung mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 cakupannya menjadi 65,62%.



Gambar 2.163
Persentase PPKS yang Tertangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Buku Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2024

3) Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Persentase LKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial ditentukan berdasarkan jumlah LKS yang menyediakan sarana prasarana kesehatan sosial dibandingkan dengan jumlah LKS yang seharusnya menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan sosial.

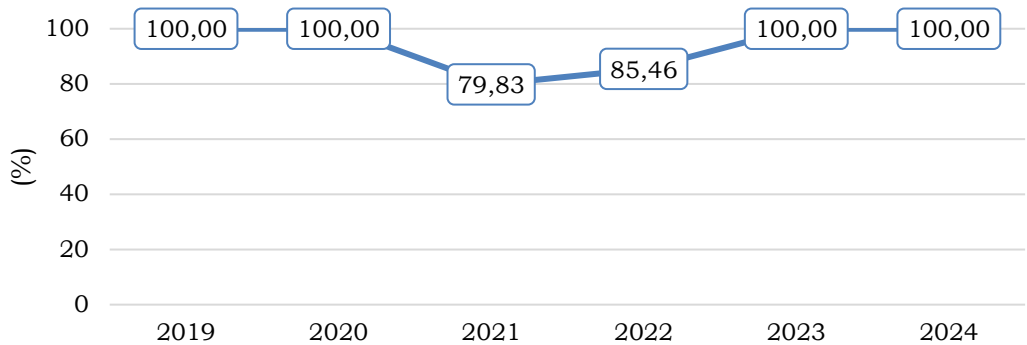


Gambar 2.164
Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, 2024

Berdasarkan grafik di atas, lembaga kesejahteraan sosial di Kabupaten Tangerang memiliki capaian yang sangat baik dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, yaitu sebesar 100%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa lembaga kesejahteraan sosial sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan berupa fasilitas atau sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial.

4) Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

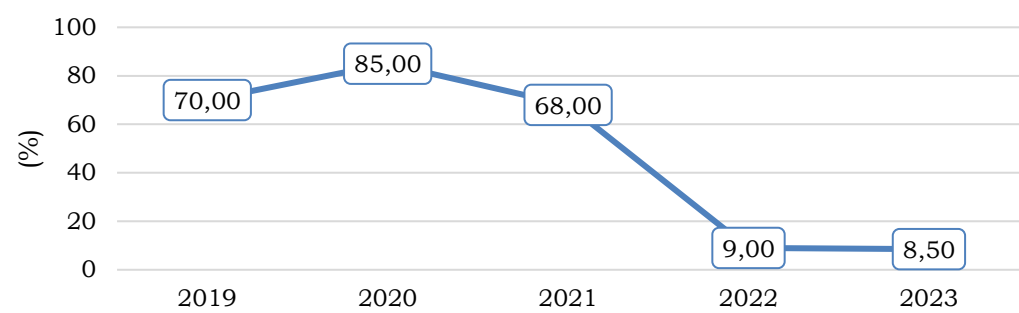
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat ditentukan dengan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dibandingkan dengan total korban bencana selama masa tanggap darurat. Berdasarkan grafik di bawah, Kabupaten Tangerang memiliki persentase yang cukup stabil mendekati 100%. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tangerang dapat menangani masalah secara dini.



Gambar 2.165
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Buku Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2024

5) Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Persentase yang telah menerima jaminan sosial ditentukan dari jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah mendapatkan jaminan sosial dengan total jumlah penduduk yang menyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. Diagram di bawah menunjukkan persentase penyandang cacat fisik di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan dari tahun 2021 di mana persentase cakupan turun dari 68% menjadi 8,5% pada tahun 2023.



Gambar 2.166
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Buku Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2024

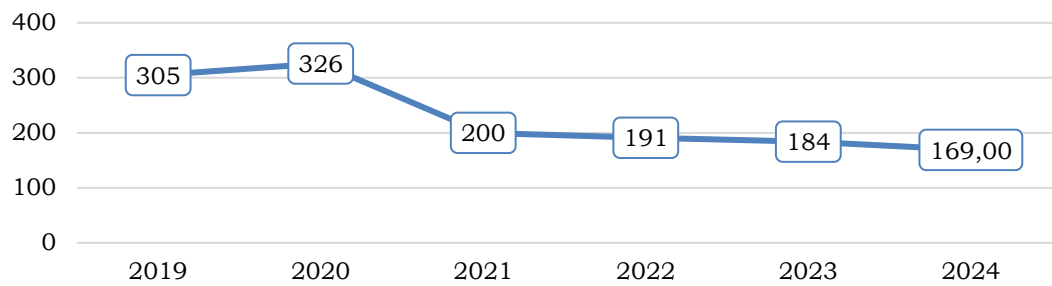
2.1.4.2 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR

A) Tenaga Kerja

1) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja adalah fenomena yang banyak terjadi di dunia kerja. Pada 2021-2023, jumlah kasus sengketa pengusaha dan pekerja di Kabupaten Tangerang cenderung menurun drastis hingga angka 184. Meskipun

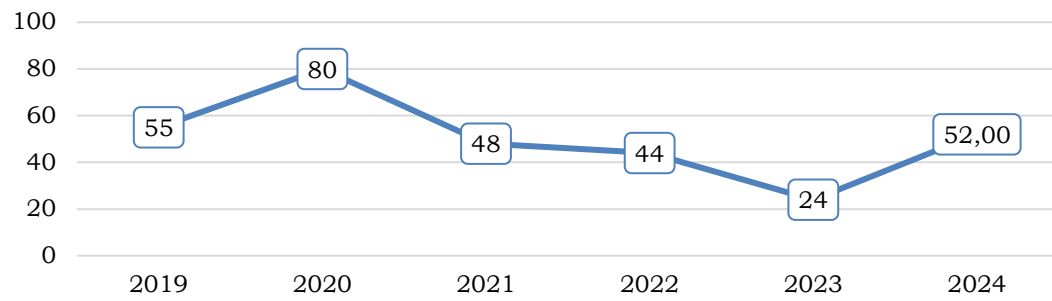
demikian sengketa pengusaha-pekerja sempat meningkat pada tahun 2020 yakni saat Pandemi yang mungkin terjadi akibat tingginya kasus PHK.



Gambar 2.167
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024

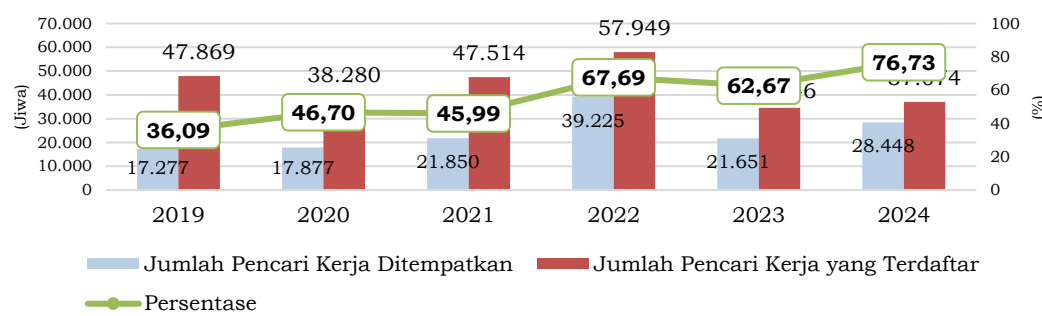
- 2) Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
- Sengketa perusahaan dengan pekerja sebagian diselesaikan melalui perjanjian bersama. Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama memiliki kecenderungan tren yang sama dengan jumlah sengketa pengusaha-pekerja. Namun, jumlah penyelesaian kasus ini masih jauh dari jumlah kasus yang terjadi. Hal ini menunjukkan masih adanya kasus ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan melalui perjanjian bersama.



Gambar 2.168
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024

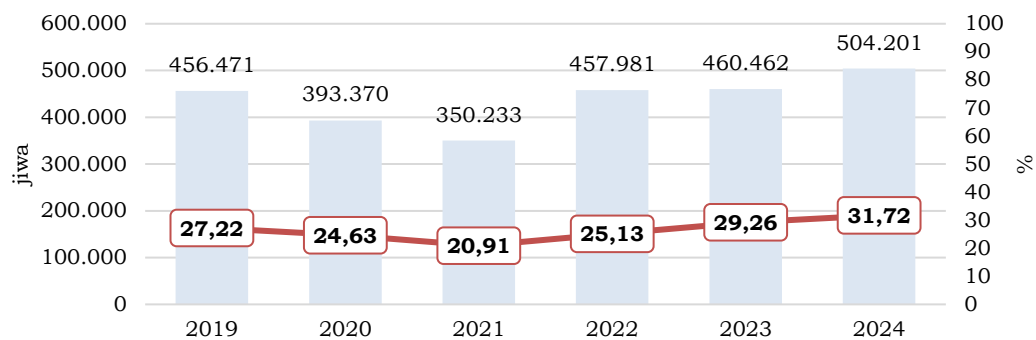
- 3) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
- Berdasarkan data tahun 2019-2024, menunjukkan peningkatan persentase pencari kerja yang ditempatkan. Akan tetapi, jumlah pencari kerja yang ditempatkan masih belum mengakomodasi seluruh pencari kerja di wilayah ini.



Gambar 2.169
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

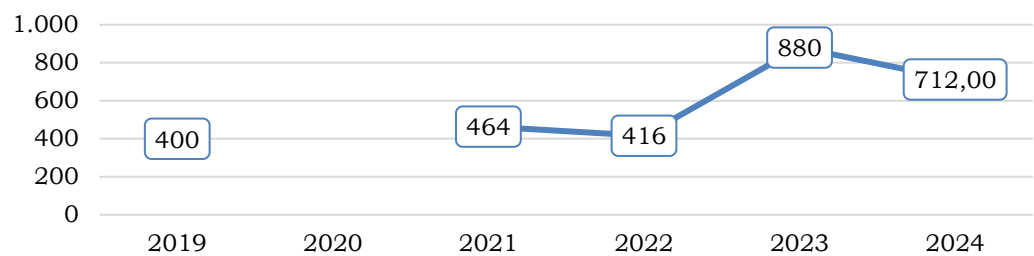
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024

- 4) **Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek**
Program Jamsostek merupakan program penyediaan asuransi yang ditujukan bagi para pekerja. Besaran pekerja/buruh yang telah menjadi peserta program ini cenderung berfluktuasi dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019-2021. Sementara itu, pada 2022, 2023 dan 2024 mengalami peningkatan hingga ke angka 457.981, 460.462, dan 504.201 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan upaya penjaminan keselamatan pekerja/buruh. Akan tetapi, persentase besaran pekerja yang menjadi peserta program Jamsostek masih rendah.



Gambar 2.170
Besaran dan Persentase Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024

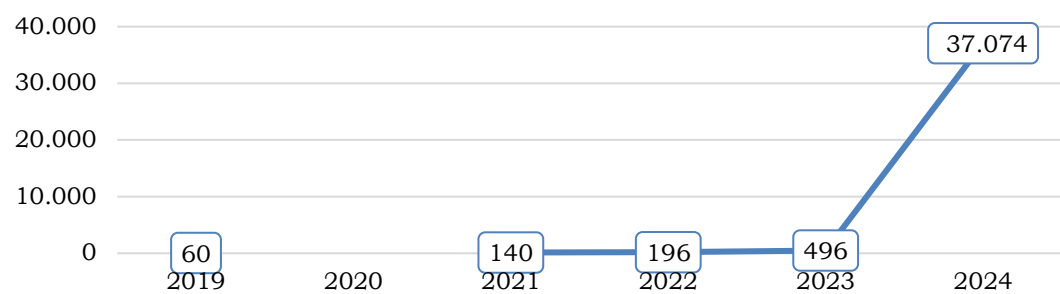
- 5) **Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**
Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Salah satu bentuk pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan sesuai kompetensi pekerja. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada rentang waktu 2019-2023. Meskipun demikian pada 2020, tidak dilaksanakan pelatihan sesuai kompetensi karena adanya pandemi Covid-19.



Gambar 2.171
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024

- 6) **Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat**
Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain pelatihan sesuai kompetensi pekerja, juga terdapat pelatihan berbasis masyarakat. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada 2022, 2023 dan 2024 yakni 68, 204 dan 624 jiwa.

- 7) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
- Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain kedua pelatihan di atas, terdapat pelatihan lain yang dilakukan, yakni pelatihan kewirausahaan. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada rentang waktu 2019-2023. Meskipun demikian pada 2020, tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.



Gambar 2.172
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024

- 8) Rasio Lulusan S1/S2/S3
- Kualitas tenaga kerja salah satunya dapat digambarkan melalui pendidikan terakhir tenaga kerja. Berdasarkan data tahun 2021-2024, rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2024, terdapat 1 lulusan S1/S2/S3 di antara 10 pekerja di wilayah Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.21
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Rasio Lulusan S1/S2/S3					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	2:17	1:8	1:11	1:10

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024

- B) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
- Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan memiliki jumlah yang meningkat tiap tahunnya yaitu PNS 58,2% dan PPPK mencapai 66,6%. Grafik peningkatan pada partisipasi perempuan berimplikasi bahwa perempuan diberdayakan dalam lembaga pemerintah.

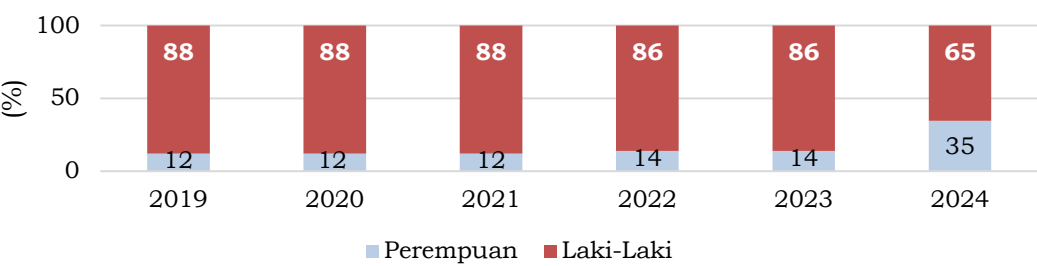
Tabel 2.22
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2023

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PNS	44,48%	55,6%	57,7%	58,2%	
PPPK	PPPK mulai ada di tahun 2022	PPPK mulai ada di tahun 2022	67,8%	66,6%	

Sumber: BPS dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, 2024

2) Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

Berdasarkan hasil pemilu 2024, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Daerah belum mencukupi target keterwakilan 35% perempuan. DPRD perempuan di Kabupaten Tangerang hanya mencapai 19 anggota legislatif perempuan dari 55 anggota legislatif DPRD Kabupaten Tangerang atau 65%.



Gambar 2.173
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 - 2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

3) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemberdayaan perempuan pada lembaga swasta. Pada tahun 2019, partisipasi perempuan di Kabupaten Tangerang hanya mencapai 23,18% lalu angka ini terus meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 58,17%.

Tabel 2.23
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta				
2019	2020	2021	2022	2023
23,18%	-	55,58%	57,70%	58,17%

Sumber: Buku Data Sektoral 2024 Kabupaten Tangerang

4) Rasio KDRT

KDRT merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan dan dilakukan oleh pasangan suami istri. Pada Kabupaten Tangerang, rasio KDRT mengalami fluktuasi peningkatan jumlah kasus dari tahun 2019 Kabupaten memiliki rasio 1 kasus KDRT dari 37.140 rumah tangga. Namun angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 1 kasus dari 24.723 rumah tangga. Lalu rasio tersebut menurun pada tahun 2021 mencapai 1 kasus dari 25.987 rumah tangga, hingga pada tahun 2022 meningkat lagi di angka 1 kasus dari 20.621 rumah tangga.

Tabel 2.24
Rasio KDRT Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023

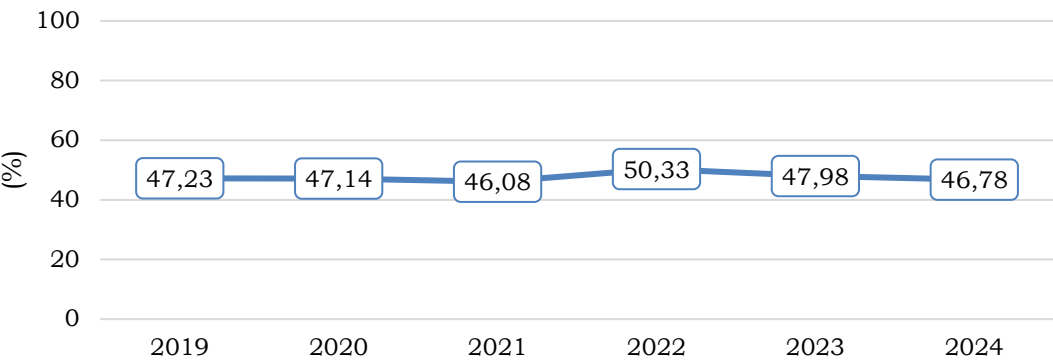
Rasio KDRT					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
KDRT	25	32	31	40	36
RT	928.509	791.148	805.595	824.820	
Rasio KDRT	1 : 37.140	1 : 24.723	1 : 25.987	1 : 20.621	

Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

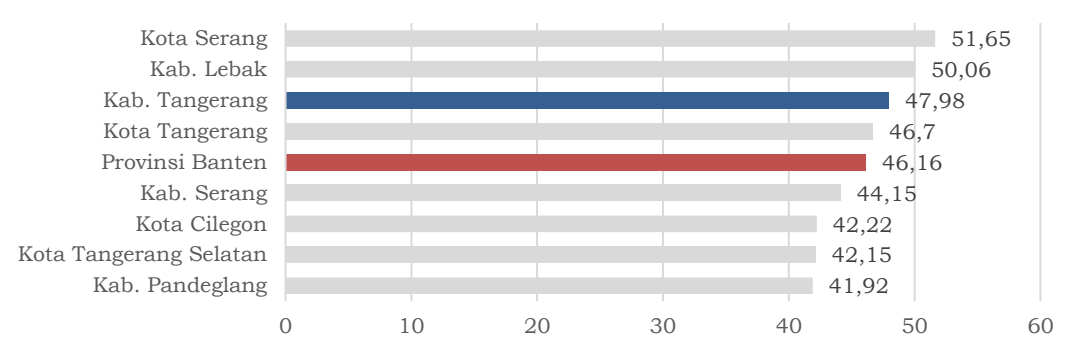
Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dalam kurun 5 tahun. Pada tahun

2019, partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai persentase 47,23%. Persentase ini menurun pada tahun 2021 menjadi 46,08% dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 50,33%. Lalu partisipasi angkatan kerja perempuan kembali menurun menjadi 46,78% pada tahun 2024.



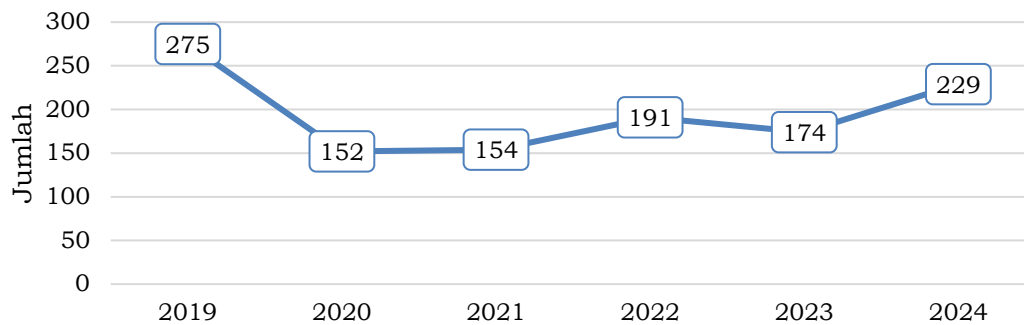
Gambar 2.174
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 - 2023
Sumber: Buku Data Sektoral 2024 Kabupaten Tangerang

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 cenderung tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Meskipun belum mencapai angka 50%, TPAK perempuan Kabupaten Tangerang berada di atas TPAK Provinsi Banten. Di samping itu, Kota Serang menjadi wilayah dengan TPAK perempuan paling tinggi di Provinsi dengan angka 51,65%; sementara Kabupaten Pandeglang menjadi wilayah dengan TPAK perempuan paling rendah di Provinsi Banten dengan persentase 41,92%.



Gambar 2.175
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten Tahun 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

- 6) Jumlah Kasus korban (Perempuan dan Anak) Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu
- Jumlah Kasus korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2024. Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 275. Angka tersebut berfluktuasi dengan kecenderungan naik hingga menjadi 229 (49 laporan kekerasan pada perempuan dan 180 laporan kekerasan anak) pada tahun 2024.



Gambar 2.176

Jumlah Kasus Korban (Perempuan dan Anak) Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, 2024

7) Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, rasio ini berada di angka 91,41%, yang berarti jumlah perempuan yang bersekolah di SD sedikit lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Lalu rasio ini menurun pada tahun 2020 menjadi 91,3%. Tetapi pada tahun 2023, rasio APM meningkat signifikan menjadi 96,63% yang menandakan bahwa perempuan yang dapat mengenyam pendidikan dasar semakin meningkat dan upaya dalam kesetaraan gender berhasil.

8) Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMP di Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, rasio APM berada di 93,87% dan pada tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 94%. Kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang bersekolah di SMP lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2023, rasio APM meningkat menjadi 110,43% yang menandakan bahwa jumlah perempuan melebihi laki-laki. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa program kesetaraan gender berhasil.

9) Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA

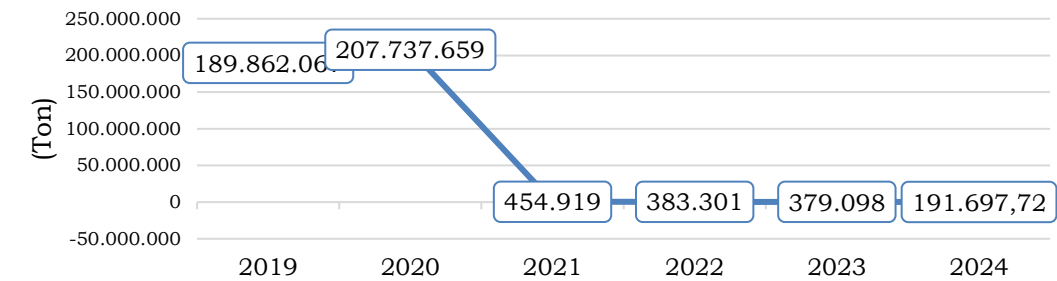
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMA di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan pada tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, rasio APM mencapai 121,65% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 119,34%. Pada tahun 2023, rasio tersebut turun lagi menjadi 102,93%. Meskipun rasio APM menurun, jumlah siswa perempuan di SMA masih melebihi jumlah siswa laki-laki.

10) Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi

Pada tahun 2023, rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di perguruan tinggi di Kabupaten Tangerang tercatat mencapai 109,96%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa perempuan sedikit melebihi jumlah mahasiswa laki-laki. Rasio ini menandakan bahwa program kesetaraan gender pada pendidikan terlaksana dengan baik.

C) Pangan
1) Ketersediaan Pangan Utama

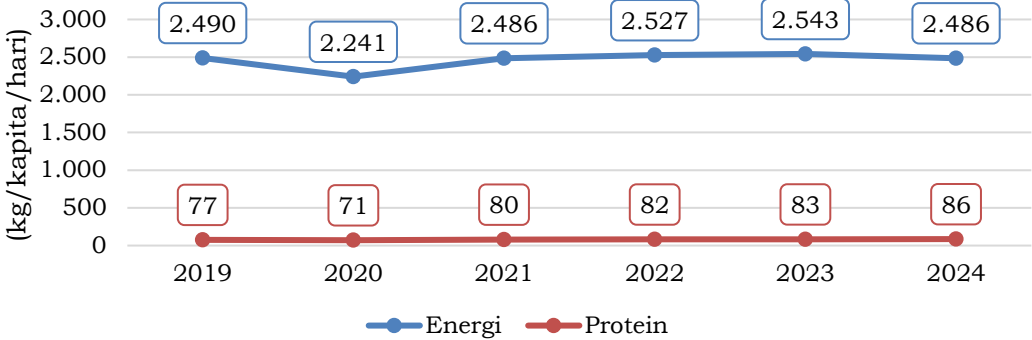
Pangan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat. Penyediaan pangan Kabupaten Tangerang cenderung menurun terutama pada tahun 2021-2024. Pada tahun tersebut, ketersediaan pangan utama berkisar antara 370.000 - 450.000 ton. Sedangkan pada 2019-2020 ketersediaan pangan di Kabupaten Tangerang berkisar antara 180.000.000 - 207.737.659 ton. Penurunan yang signifikan ini memerlukan penanganan untuk memastikan ketersediaan pangan di Kabupaten Tangerang



Gambar 2.177
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, 2024

2) Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

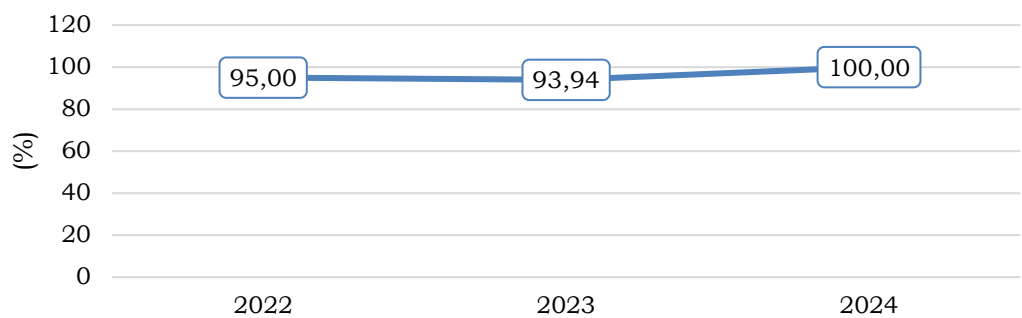
Energi dan protein sebagai salah satu kebutuhan utama yang harus dipenuhi dalam tubuh manusia memerlukan pasokan yang mencukupi. Ketersediaan energi di Kabupaten Tangerang relatif sama dari tahun 2019-2024, yakni berkisar antara 2.200-2.500 kg/kapita/hari. Sedangkan ketersediaan protein cenderung stagnan pada angka 70-83 kg/kapita/hari. Hal ini menunjukkan terpenuhinya kebutuhan protein dan energi per kapita di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.178
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, 2024

3) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

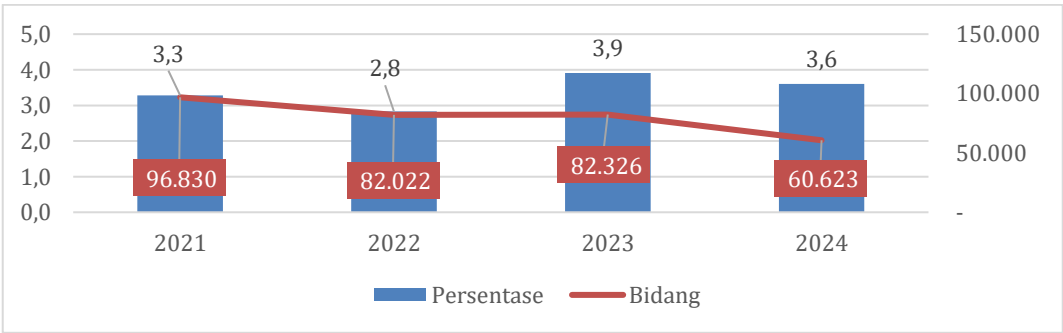
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan adalah salah satu upaya menjamin kualitas ketahanan pangan dalam suatu wilayah. Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan ini tergambar pada persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan. Persentase tersebut cenderung tinggi yakni berkisar di angka 90%. Hal ini menunjukkan kualitas pangan di wilayah ini cenderung baik. Pada tahun 2022-2024 tidak dilakukan pengukuran, karena *refocusing* untuk penanganan pandemi.



Gambar 2.179
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, 2024

D) Pertanian
1) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Kabupaten Tangerang memiliki grafik persentase luas lahan bersertifikat yang meningkat dalam tahun 2021-2024. Pada tahun 2021, lahan di Kabupaten Tangerang yang memiliki sertifikat mencapai 37,839,610 m2 dengan persentase 3,3%. Angka tersebut terus menurun hingga pada tahun 2024 mencapai 60,623 bidang dengan luas 41,544,732 m2 dengan persentase 3,6%.



Gambar 2.180
Persentase Luasan Lahan Bersertifikat Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024
Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka 2023-2024

2) Penyelesaian Izin Lokasi
Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada seseorang/perusahaan untuk memperoleh dan menggunakan tanah. Bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025, Kabupaten Tangerang telah melakukan 100% penyelesaian izin lokasi dari tahun 2019-2023. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tangerang memudahkan penyelesaian izin lokasi di dalam daerah.

E) Lingkungan Hidup

- 1) Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kurun waktu 2025-2055, Kabupaten Tangerang telah memiliki dokumen ini sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Tersusunnya RPPLH Kabupaten
Penyusunan RPPLH Kabupaten Tangerang baru dimulai pada tahun 2021 yang berisi sub RPPLH atau peta D3LTH. Sementara itu, pada tahun selanjutnya tersusun dokumen *review* RPPLH Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.25
Tersusunnya RPPLH Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2055

Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota				
2020	2021	2022	2023	2024
Tidak Ada	Ada (Sub RPPLH/Peta D3LTH)	Ada (Review)	Ada (Review)	Ada (revisi/verifikasi KLH)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2024

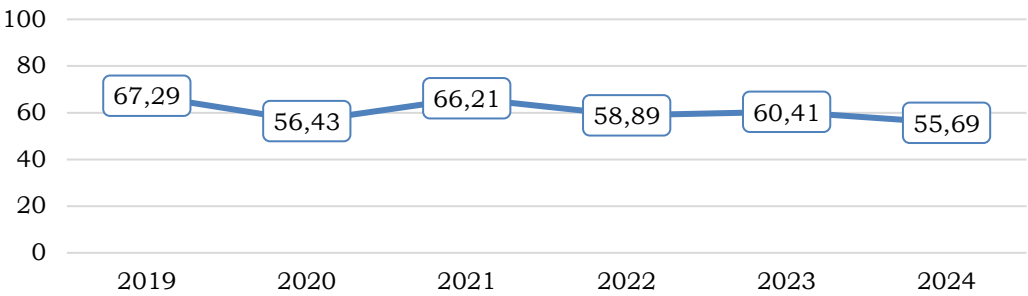
- 3) Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten
RPPLH sebagai instrumen pengelolaan lingkungan harus seiring dengan rencana pembangunan. Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup, RPPLH tahun 2025-2055 menjadi dasar penyusunan RPJPD 2025-2045.
- 4) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten
Kajian lingkungan hidup strategis merupakan salah satu dokumen yang menjadi bahan pertimbangan dalam berbagai perencanaan. Pada 2021, KLHS di Kabupaten Tangerang terdapat pada KLHS RDTR Cipati dan Cisojati. Sedangkan pada 2022 terdapat 4 KLHS RDTR, 1 KLHS RPJMD, dan 1 KLHS RPJPD. Tahun 2023 terdapat peningkatan pada KLHS yakni menjadi 6 KLHS RDTR, 1 KLHS RPJMD, 1 KLHS RPJPD.

Tabel 2.26
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P** tingkat daerah/provinsi				
2020	2021	2022	2023	2024
Tidak Ada	Ada (KLHS RDTR Cipati dan Cisojati)	KLHS RDTR = 4 KLHS RPJMD = 1 KLHS RPJPD = 1	KLHS RDTR = 6 KLHS RPJMD = 1 KLHS RPJPD = 1	KLHS RDTR = 1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2024

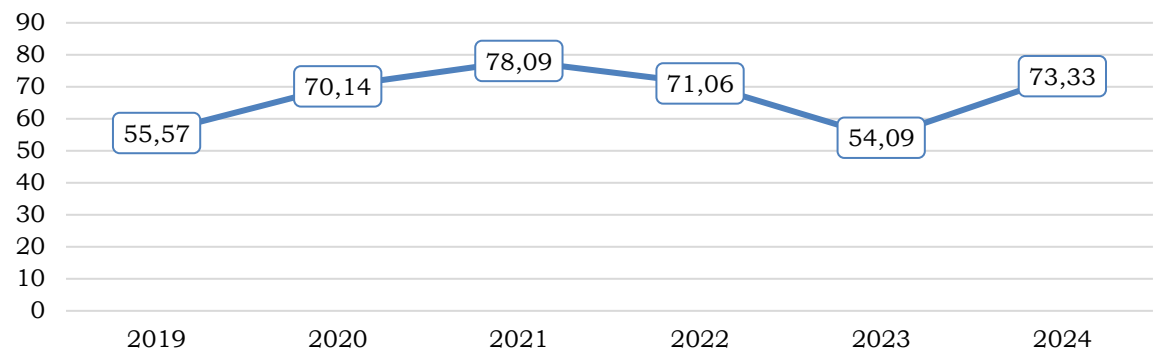
- 5) Peningkatan Indeks Kualitas Air
Indeks kualitas air adalah indeks yang menggambarkan kondisi/kualitas air pada suatu wilayah. Indeks kualitas air di Kabupaten Tangerang cenderung berfluktuasi pada tiap tahunnya. Secara umum kualitas air ini tergolong sedang hingga buruk yang berkisar pada angka 56-67. Rendahnya kualitas air ini disebabkan akibat adanya polutan dalam air permukaan dan air tanah.



Gambar 2.181
Peningkatan Indeks Kualitas Air Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025

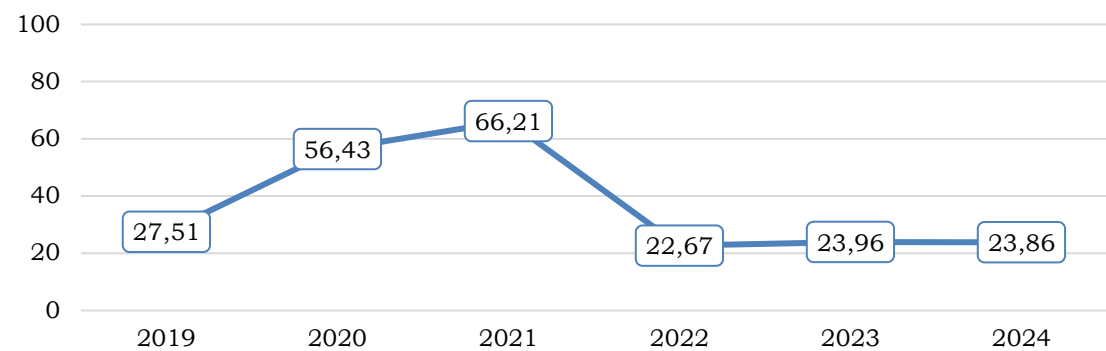
- 6) Peningkatan Indeks Kualitas Udara
Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Tangerang meningkat pada tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022 dan 2023, meningkat kembali tahun 2024 di angka 73,33 (51-100) menunjukkan kualitas udara yang "sedang" atau "tidak sehat" untuk kelompok rentan. Kualitas udara ini cenderung sedang

mengarah ke kondisi yang memburuk. Untuk itu diperlukan adanya penanganan untuk meningkatkan kualitas udara di Kabupaten Tangerang.



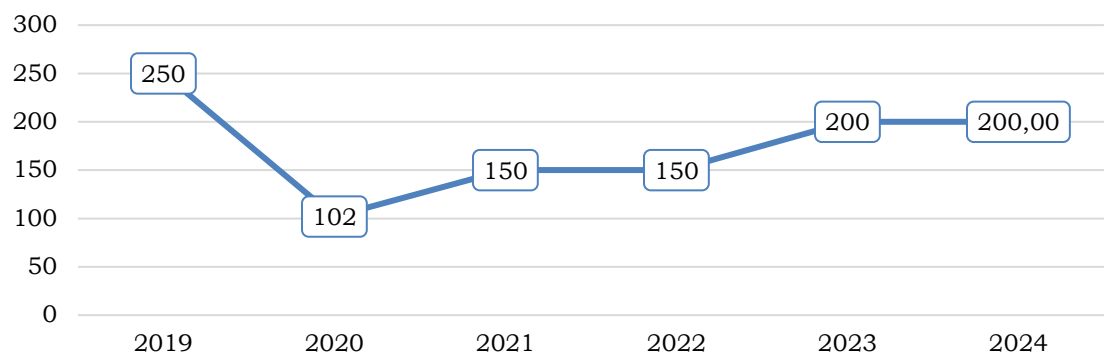
Gambar 2.182
Peningkatan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025

- 7) **Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan**
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan yang pada tahun 2022 dan 2024. Hal ini terjadi akibat perubahan penghitungan luasan area lahan *mangrove*. Secara umum kondisi tutupan lahan di wilayah ini cenderung buruk ditandai nilai indeks yang rendah. Hal ini terjadi akibat tingginya penggunaan lahan untuk lahan terbangun.



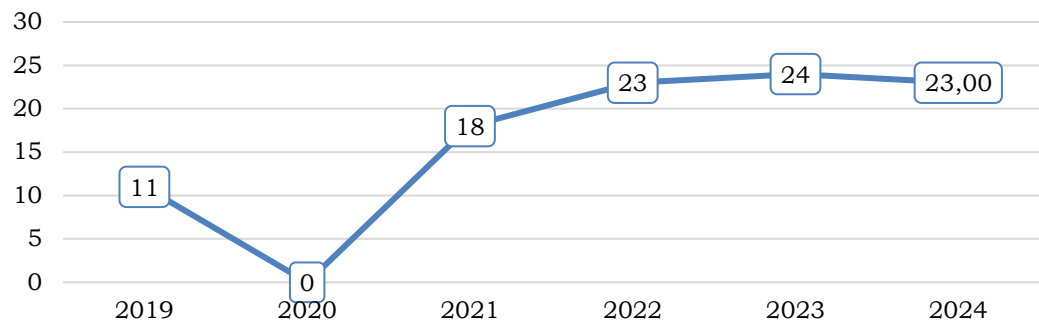
Gambar 2.183
Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025

- 8) **Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten**
Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Pembinaan dan pengawasan ini mengalami peningkatan pada kurun waktu 2020-2023. Sedangkan pada 2019-2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Secara umum pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan besarnya upaya untuk menjaga lingkungan wilayah Kabupaten Tangerang.



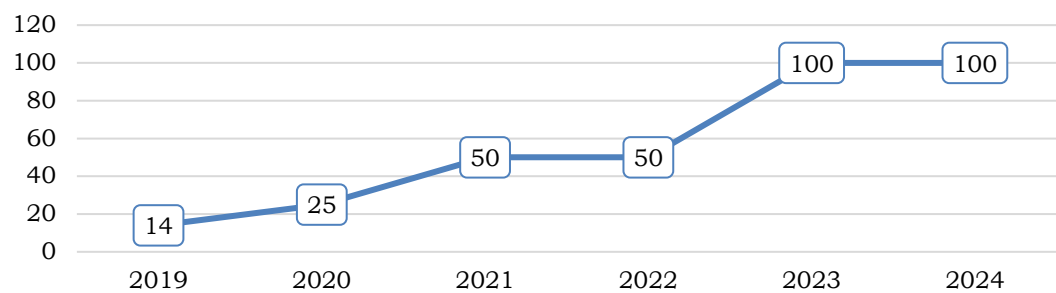
Gambar 2.184
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Kabupaten
Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025

- 9) Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
- Penghargaan lingkungan hidup merupakan upaya menjaga kualitas lingkungan hidup. Penghargaan lingkungan hidup diberikan kepada instansi/ wilayah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Meskipun sempat vakum pada masa pandemi Covid-19, pemberian penghargaan ini semakin meningkat dari 2021-2024. Pada tahun 2023 terdapat 24, dan 2024 sekitar 23 penghargaan yang diberikan. Banyaknya jumlah penghargaan yang diberikan mengindikasikan peningkatan kualitas lingkungan hidup di berbagai instansi/wilayah.



Gambar 2.185
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten
Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025

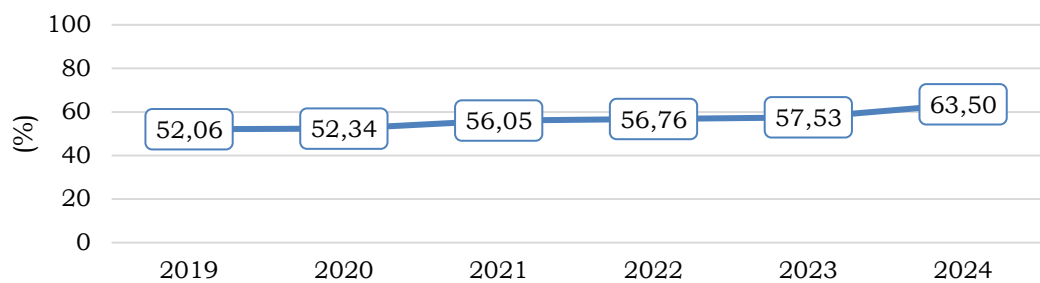
- 10) Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampak lintas Kabupaten/Kota yang Ditangani
- Aduan masyarakat merupakan salah satu bentuk pemantauan terhadap perizinan lingkungan hidup. Pengaduan masyarakat terkait perizinan lingkungan hidup Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2019-2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap perizinan lingkungan hidup.



Gambar 2.186
Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025

11) Timbulan Sampah yang Terkelola

Dalam pengelolaan timbulan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023), tren menunjukkan peningkatan persentase timbulan sampah yang terkelola di Kabupaten Tangerang dan pada tahun 2023 mencapai 57,53%, dan 2024 sekitar 63,5%. Akan tetapi, capaian ini masih jauh dari yang diharapkan 100% timbulan sampah yang terkelola.



Gambar 2.187
Data dan Informasi Penanganan Sampah di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2024

Tabel 2.27

Fasilitas Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tangerang

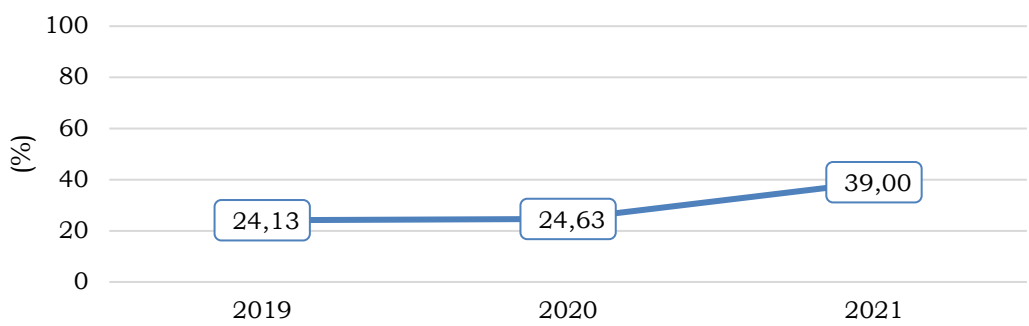
Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (unit)	Timbulan Sampah yang Dikelola (ton/tahun)
Bank Sampah	102	732,46
TPST 3R	36	22.985,58
TPA (TPA Jatiwaringin)	1	498.590,00
Jumlah		522.308,04

Sumber: Website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang dijelaskan bahwa rendahnya jumlah sampah yang ditangani disebabkan oleh minimnya infrastruktur pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari Statistik Sektorial Kabupaten Tangerang, jumlah areal pengelolaan sampah (tahun 2017-2019) stagnan pada angka 941 km². Sementara itu dari sisi armada sampah yang dapat mengangkut 2.925 ton/hari atau 51% dari total sampah yang ada. Maka dari itu diperlukan langkah dalam penanganan sampah dari tingkat rumah tangga, TPS 3R, hingga layanan persampahan skala regional yaitu TPA.

12) Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani pada Kondisi Khusus di Kabupaten

Sampah memiliki cara penanganan tersendiri yang disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Penanganan sampah pada kondisi khusus di Kabupaten Tangerang masih terbatas. Dalam rentang waktu 2019-2021 sampah yang tertangani pada kondisi khusus hanya berkisar pada 24,13-39,00% yang tiap tahunnya meningkat perlahan. Hal ini memerlukan penanganan khususnya dalam mengelola sampah kondisi khusus.



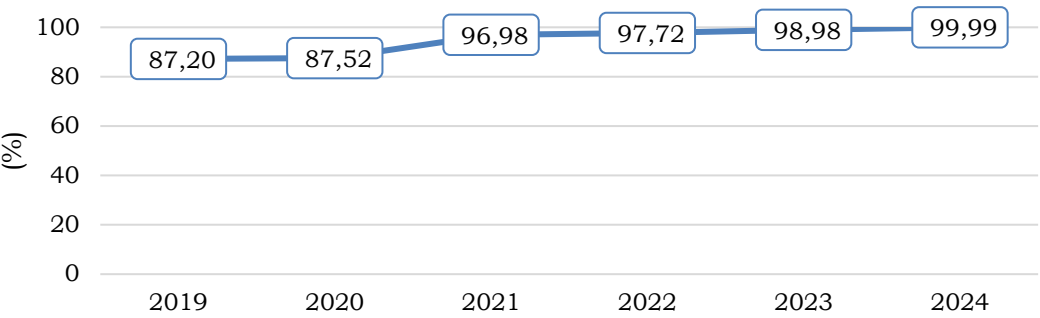
Gambar 2.188
Jumlah Sampah yang Tertangani pada Kondisi Khusus di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2024

F) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Kabupaten Tangerang memiliki rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk yang cenderung stabil pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk mencapai 87,20%. Lalu rasio ini naik di angka 87,52% pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021 pada angka 96,98% dan terus meningkat mencapai 98,98% pada tahun 2023. Tahun 2024 mencapai 99,99%. Berdasarkan grafik tersebut, penduduk Kabupaten Tangerang sudah taat administrasi dan terdaftar secara resmi menjadi penduduk Kabupaten Tangerang.

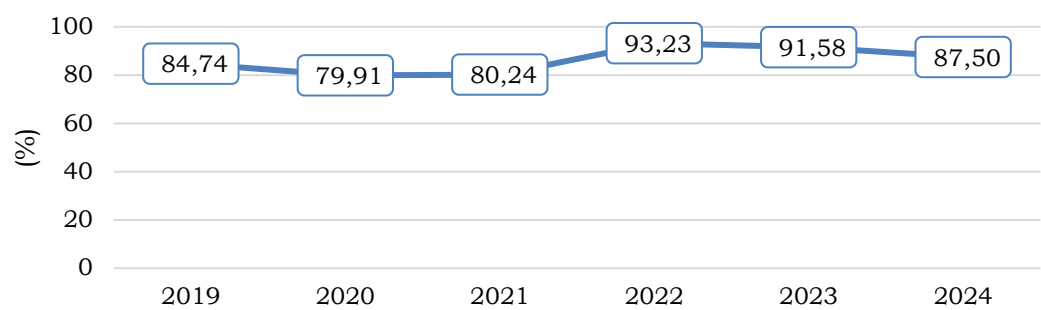


Gambar 2.189
Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024

Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2025

2) Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Rasio bayi berakta kelahiran ditentukan berdasarkan jumlah bayi yang berakta kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh bayi yang lahir pada tahun dan wilayah yang sama. Kabupaten Tangerang memiliki rasio bayi berakta kelahiran yang secara umum meningkat. Hal ini menandakan bahwa keluarga bayi yang lahir di Kabupaten Tangerang sudah cukup taat administrasi.



Gambar 2.190
Rasio Bayi Berakta Kelahiran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2025

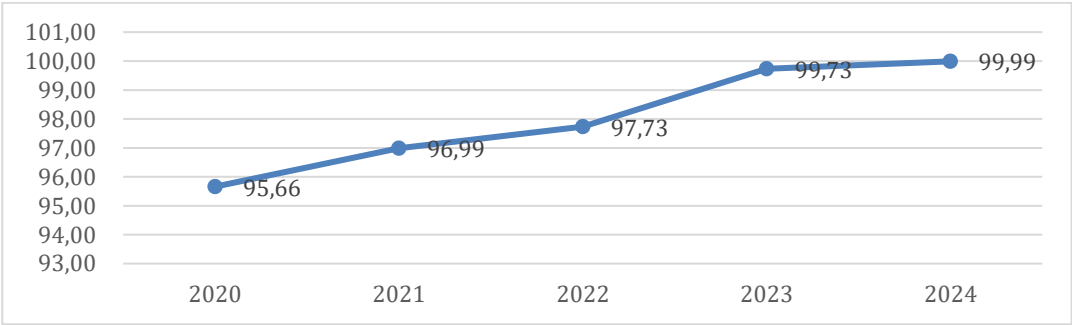
- 3) Rasio Pasangan Berakta Nikah
- Rasio pasangan yang memiliki akta nikah di Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022, rasio tercatat mencapai 50,28%, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 meningkat menjadi 54,16%, dan 58,80%. Peningkatan ini menunjukkan upaya optimalisasi administrasi pencatatan pernikahan dan kesadaran masyarakat mengenai dokumen resmi.
- 4) Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Kabupaten
- Ketersediaan *database* kependudukan skala kabupaten merupakan salah satu aspek yang menentukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif mengenai data kependudukan. Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2019-2023 telah tersedia *database* kependudukan skala kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang sudah memiliki *database* yang baik untuk mendukung data kependudukan.
- 5) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
- Berdasarkan Perpres Nomor 26 Tahun 2009, KTP berbasis NIK merupakan KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus dan berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Pada Kabupaten Tangerang, penerapan KTP Nasional sudah berbasis NIK yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang sudah menciptakan lingkungan yang pemerintahnya memiliki keakuratan data penduduk.

Tabel 2.28
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, 2024

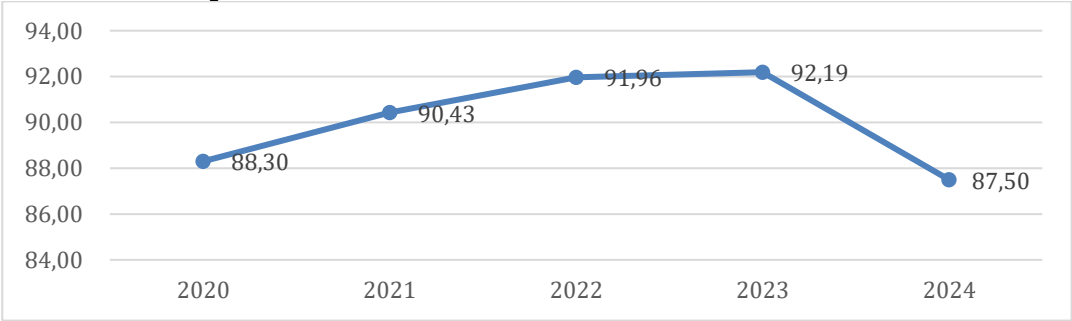
- 6) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Penerbitan KTP merupakan persentase jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan terhadap jumlah penduduk yang wajib ber-KTP. Pada Kabupaten Tangerang, cakupan penerbitan KTP mengalami peningkatan tiap tahunnya dalam kurun tahun 2020-2023. Peningkatan ini menandakan bahwa penduduk Kabupaten Tangerang sudah taat administrasi dan memiliki KTP.



Gambar 2.191
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, 2024

- 7) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
- Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerbitan akta kelahiran merupakan persentase jumlah bayi yang memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan jumlah bayi pada kurun waktu yang sama. Berdasarkan grafik di bawah ini, Kabupaten Tangerang memiliki cakupan penerbitan akta kelahiran yang meningkat. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak bayi yang sudah terdaftar dalam administrasi pemerintah.



Gambar 2.192
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, 2024

- G) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 1) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- Lembaga pemberdayaan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Tangerang selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 cenderung stagnan di angka 274 kelompok atau sama dengan jumlah kelurahan/desa di wilayah ini. Tahun 2024 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina sebanyak 246.
- 2) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
- PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan perempuan yang dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Tangerang selama kurun waktu tahun 2019 hingga

2024 cenderung stagnan di angka 274 kelompok atau sama dengan jumlah kelurahan/desa di wilayah ini.

3) Jumlah BUMDes

BUMDes berperan penting dalam mendorong optimalisasi potensi dan memberdayakan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Pada tahun 2022, Kabupaten Tangerang memiliki 83 BUMDes. Akan tetapi, pada tahun 2023 baru hanya 2 BUMDes yang mendapatkan bantuan penyertaan modal. Tahun 2024 BUMDes yang sudah mempunyai badan hukum sebanyak 15.

4) Persentase LSM Aktif

LSM atau lembaga swadaya masyarakat berperan dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi dan/atau mencapai haknya. Pada tahun 2023, terdapat 46 LSM yang bergerak aktif di Kabupaten Tangerang. Jumlah ini menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

5) Persentase LPM Berprestasi

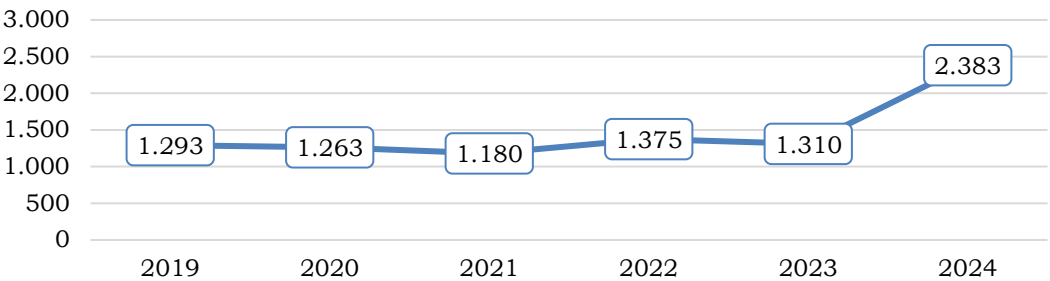
Lembaga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tangerang berkembang pesat ditandai dengan 125 LPM yang tergolong dalam LPM berprestasi pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tangerang

6) Persentase PKK Aktif

PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan perempuan yang dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan keluarga. Jumlah PKK yang bergerak aktif di Kabupaten Tangerang mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan seluruh PKK berpartisipasi aktif mendukung pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan pemberdayaan keluarga.

7) Jumlah Posyandu Aktif

Posyandu adalah upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jumlah posyandu yang aktif mengalami fluktuasi. Secara umum jumlah posyandu aktif di Kabupaten Tangerang berkisar antara 1.100-1.300. Tingginya jumlah posyandu yang aktif menunjukkan adanya upaya pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat bawah.



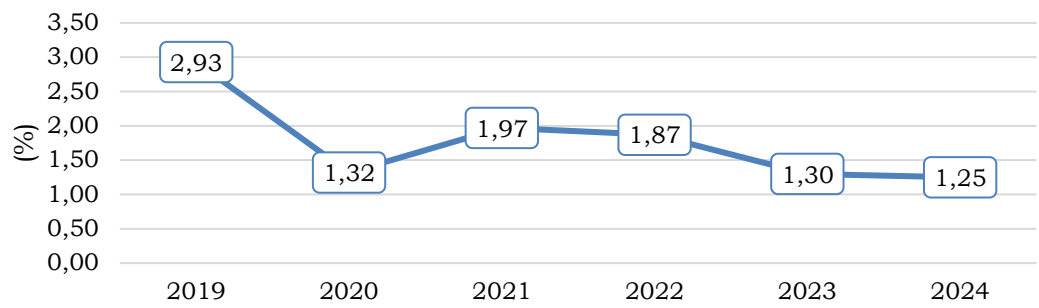
Gambar 2.193
Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan Data Statistik Sektor

H) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

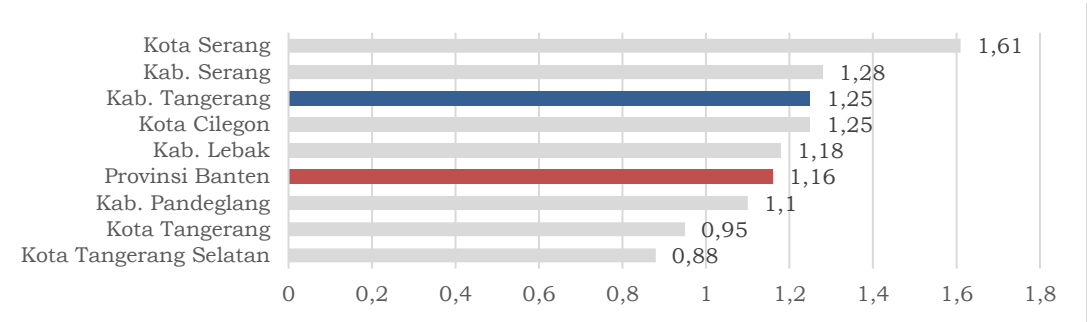
1) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

LPP atau laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan rata-rata pertambahan jumlah penduduk dalam

jangka waktu tertentu. Angka ini dihitung menggunakan jumlah penduduk akhir periode dikurangi jumlah penduduk awal periode dibandingkan dengan jumlah penduduk awal periode. Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun.

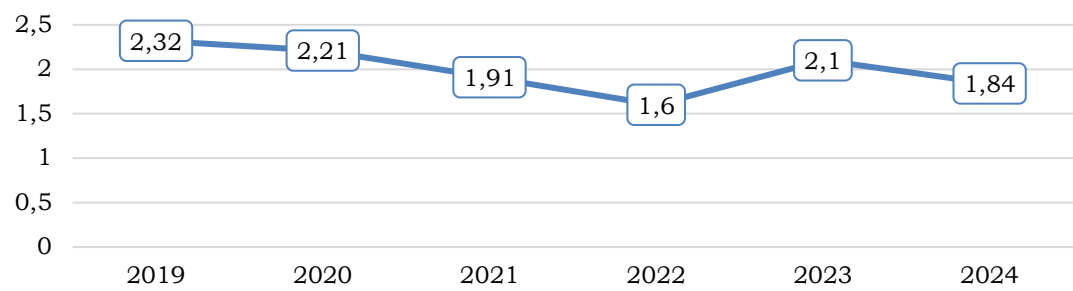


Gambar 2.194
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024



Gambar 2.195
Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024

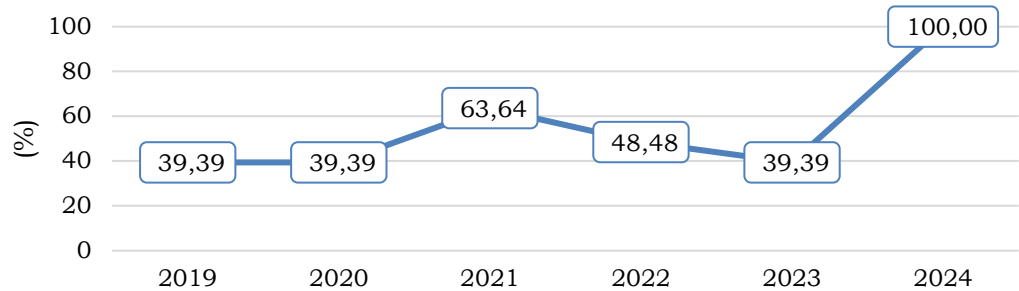
- 2) Total Fertility Rate (TFR)
- Total fertility rate* atau TFR merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksi. Kabupaten Tangerang memiliki rata-rata TFR pada tahun 2019-2023 mencapai angka 2. Hal ini menandakan bahwa wanita dengan usia 15-49 tahun secara rata-rata memiliki 2 anak selama masa usia suburnya. TFR 1,84 di tahun 2024, populasi cenderung mengalami penurunan alami dalam jangka panjang jika tidak ada faktor lain seperti imigrasi.



Gambar 2.196
Total Fertility Rate Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, RPJMD 2019-2024

- 3) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB
- Perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Kampung KB adalah yang melaporkan kegiatannya di Kampung KB ke Pokja Kampung KB tingkat kota. Semakin tinggi Persentase

Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB maka menunjukkan semakin baik perhatian pemerintah daerah terhadap program kampung KB. Kabupaten Tangerang memiliki persentase yang cenderung stagnan dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 angka ini meningkat hingga 63,63% dan angka tersebut kembali menjadi 39,39%, tahun 2024 Kabupaten Tangerang melakukan integrasi program Kampung KB sehingga angka mencapai 100%.



Gambar 2.197

Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024

Sumber : Open data Kabupaten Tangerang, 2024

4) Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Rancangan Induk Pengendalian Penduduk adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh perangkat daerah untuk mengatur dan mengelola pertumbuhan penduduk di wilayah tertentu. Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk mengacu pada proporsi atau persentase dari semua lembaga pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pemanfaatan dokumen strategis. Di tahun 2019-2022, belum semua Perangkat Daerah memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Di tahun 2023-2024, terdapat 2% Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk.

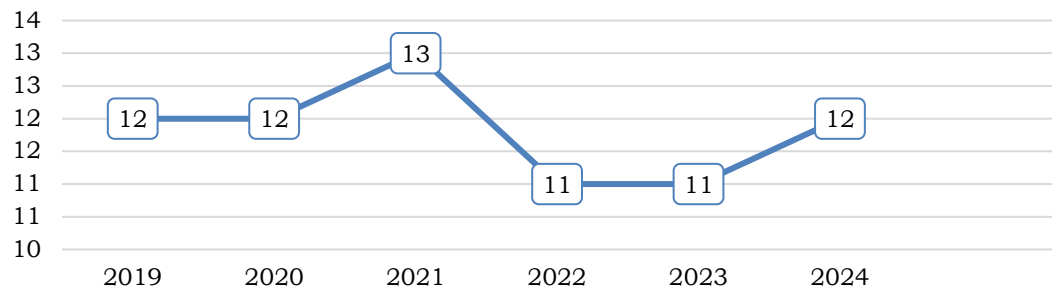
5) Jumlah Kebijakan yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk

Pengendalian penduduk merupakan usaha pemerintah dalam mempengaruhi pola pertumbuhan penduduk ke arah yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. Dalam kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Tangerang baru memiliki 1 kebijakan berkaitan dengan program pengendalian penduduk di Kabupaten Tangerang. Adanya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2046 menjadi salah satu arah kebijakan dalam perencanaan kependudukan di Kabupaten Tangerang.

6) Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan meningkat di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana (DPPKB), selama kurun waktu 2019-2023, cenderung menurun dari capaian 13 sektor pada tahun 2021 menjadi 11 sektor pada tahun 2022 dan 2023, 12 sektor di 2024. Hal ini menandakan bahwa perlu peningkatan sektor-sektor di Kabupaten Tangerang dalam upaya memperhatikan masa depan penduduk dalam perencanaan dan pelaksanaan program.



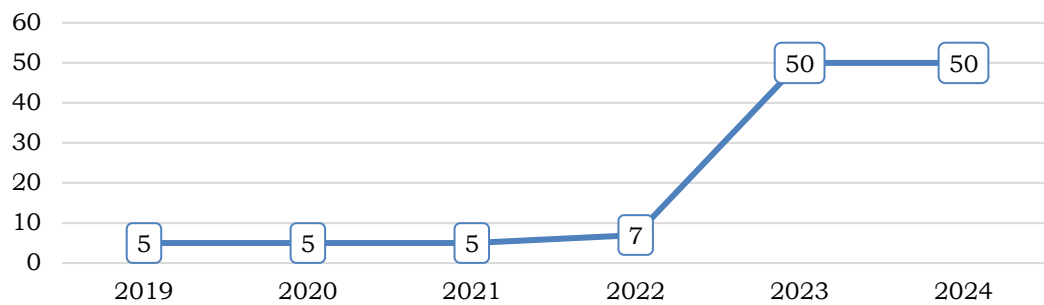
Gambar 2.198

Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2019-2024

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, 2024

7) Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Pada tahun 2019-2024, jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini memuncak pada tahun 2024 dengan besaran 50 kerja sama. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan dan mengindikasikan bahwa kependudukan merupakan salah satu program prioritas.



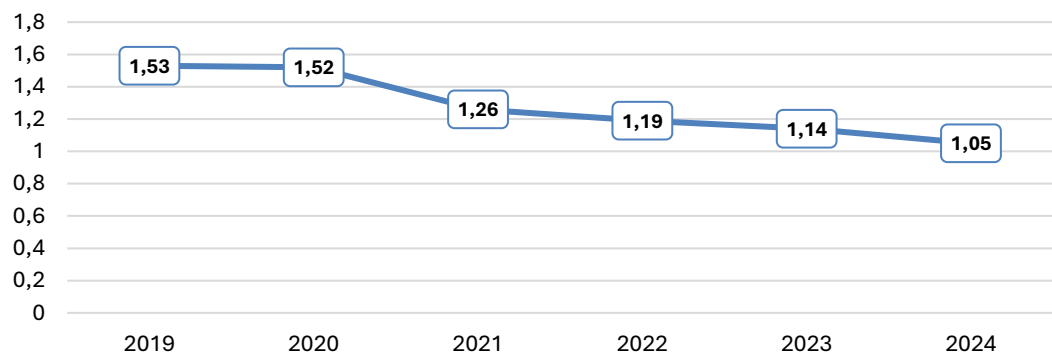
Gambar 2.199

Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024

8) Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga

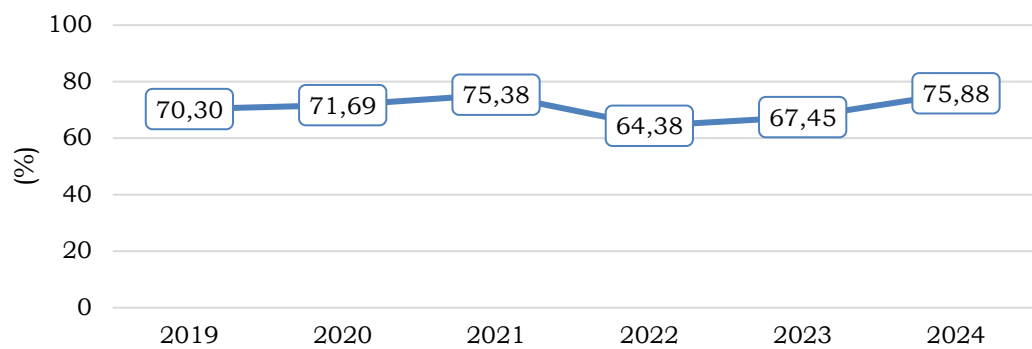
Rata-rata jumlah anak per keluarga ditentukan berdasarkan jumlah anak yang tercantum dalam KK (Kartu Keluarga) dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga yang ada di suatu daerah. Dalam tahun 2019-2023, rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami penurunan di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2019, rata-rata tersebut mencapai 1,53 dan angka ini sedikit menurun pada tahun 2020 mencapai 1,52. Tetapi pada tahun 2024, jumlah tersebut menurun hingga mencapai 1,05 atau 1 anak. Penurunan ini menandakan bahwa program keluarga berencana di Kabupaten Tangerang berhasil.



Gambar 2.200
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024

9) Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah 15-49 Tahun

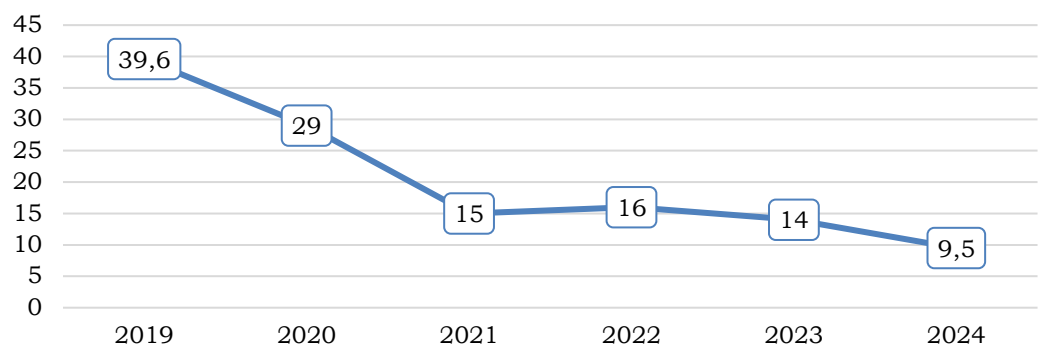
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 tahun dihitung dengan jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur. Pada Kabupaten Tangerang, dalam kurun waktu 2019-2023, angka pemakaian kontrasepsi/CPR mengalami fluktuasi yang meningkat pada tahun 2024 pada persentase 75,88%. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya pemakaian kontrasepsi/CPR pada pasangan PUS di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.201
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah 15-49 tahun
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024

10) Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)

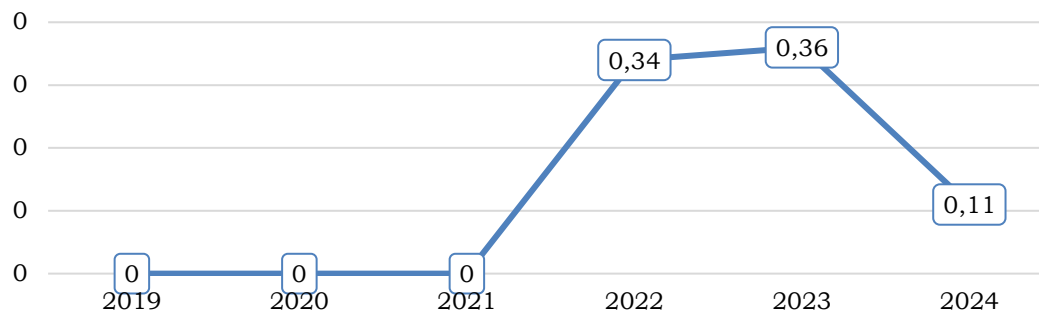
ASFR atau *age specific fertility rate* merupakan banyaknya kelahiran dari 1.000 wanita kelompok umur 15-19 tahun yang dibandingkan dengan jumlah wanita kelompok 15-19 tahun. ASFR Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dalam kurun waktu 2019-2024. Pada tahun 2024, angka tersebut mencapai 14 yang menandakan bahwa dalam 1000 wanita usia 15-19 tahun di Kabupaten Tangerang terdapat 9,5 orang yang sudah memiliki anak. Dengan penurunan angka ASFR menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan masyarakat bahwa melahirkan di bawah 20 tahun menyebabkan risiko kesehatan tinggi bagi ibu dan anak.



Gambar 2.202
Angka Kelahiran Remaja per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024

11) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun

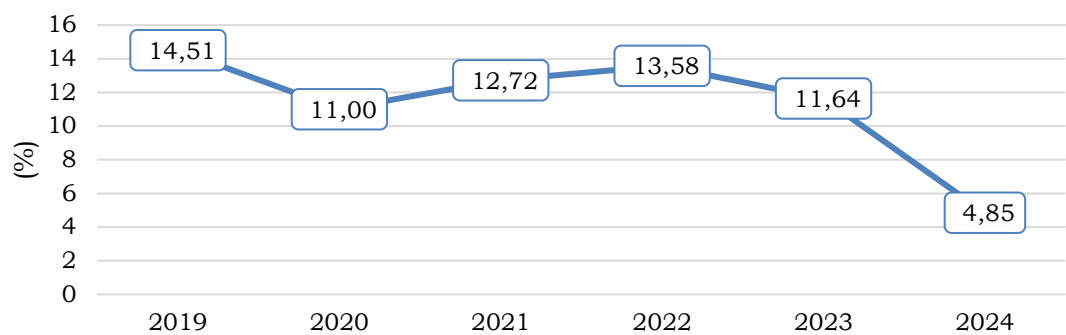
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun di Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2019-2021 cakupannya nol (0). Pada tahun 2022, cakupannya mencapai 0,34 kemudian naik mejadi 0,36 di tahun 2023, mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 0,11. Hal ini menandakan bahwa perempuan di bawah 20 tahun di Kabupaten Tangerang sudah memiliki pengetahuan yang semakin baik mengenai menikah muda dan program pendewasaan usia kawin pertama sudah berhasil dilakukan.



Gambar 2.203
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024

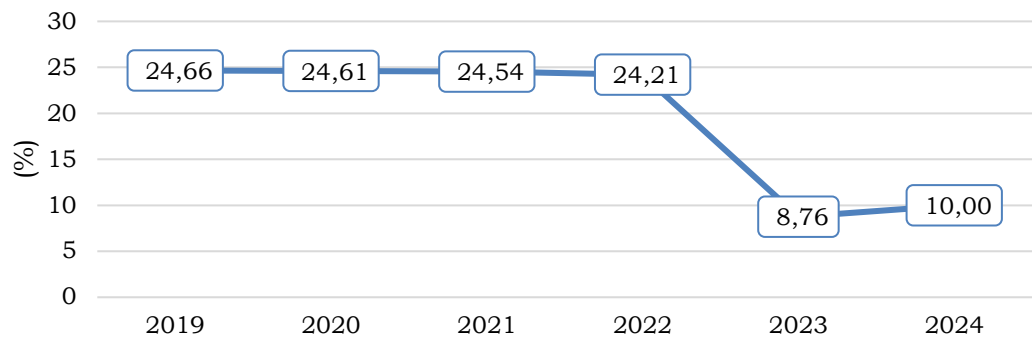
12) Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi adalah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tetapi belum terlayani KB. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses jangkauan, informasi, dana, dukungan dan kualitas (Sarana, prasarana dan tenaga) pelayanan KB. Kabupaten Tangerang memiliki cakupan PUS yang rendah menurun pada tahun 2019-2024, dengan capaian 4,85% di tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pelayanan KB yang ada pada Kabupaten Tangerang semakin baik.



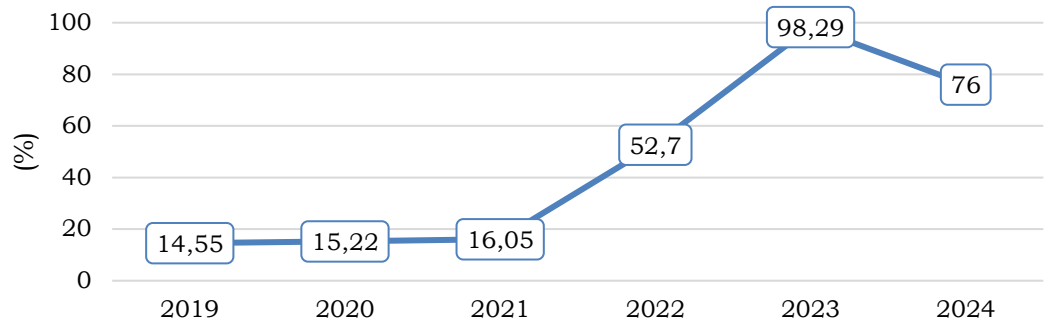
Gambar 2.204
Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber : BPS 2024, RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023

- 13) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang adalah metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama dan terdiri dari metode operasi wanita, operasi pria dan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD dan alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. Semakin tinggi pengguna MKJP maka menunjukkan semakin baik partisipasi masyarakat terhadap program kependudukan. Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang memiliki persentase yang cukup rendah dengan angka terendah pada tahun 2024 yaitu 10%.



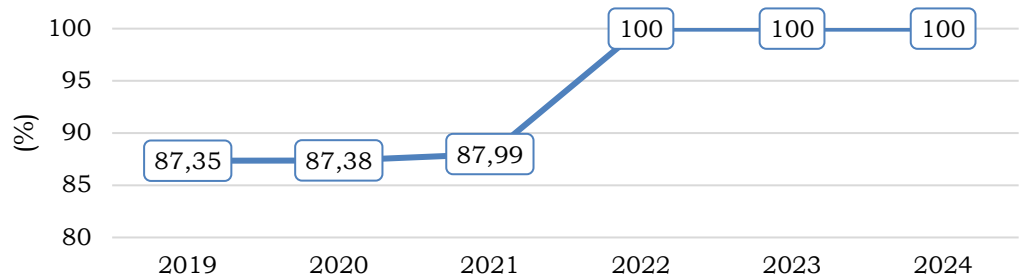
Gambar 2.205
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : Buku Ranwal RPJPD Kabupaten Tangerang dan DPPKB, 2024

- 14) Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
- Kabupaten Tangerang memiliki persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi yang meningkat dalam tahun 2019-2023, dengan capaian telah mencapai 98,29% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga semakin baik.



Gambar 2.206
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : RKPD dan DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024

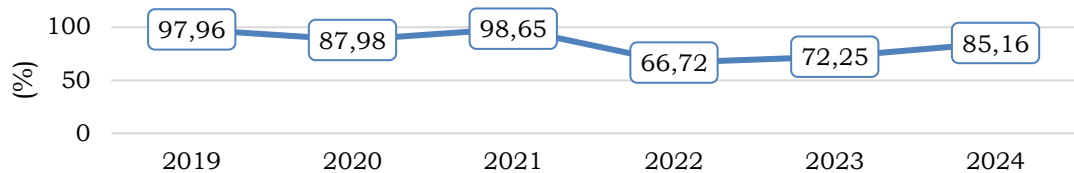
- 15) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB
- Bina keluarga balita atau BKB merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga dalam membina tumbuh dan berkembangnya anak usia balita. Pada tahun 2019-2024, cakupan BKB meningkat hingga mencapai 100% di tahun 2022-2024. Persentase tersebut menunjukkan bahwa keinginan peserta KB terhadap pembinaan keluarga balita semakin tinggi.



Gambar 2.207
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2023

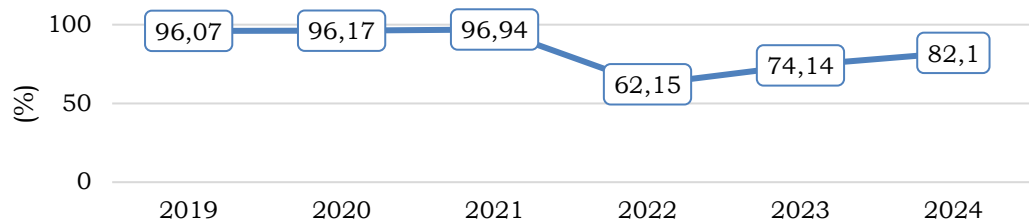
- 16) Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB
- Bina keluarga remaja (BKR) merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk membina tumbuh dan berkembangnya remaja usia 10-24 tahun. Pada tahun 2019-2024, cakupan BKR menunjukkan penurunan dengan capaian 85.16% di tahun 2024. Persentase tersebut menunjukkan bahwa keinginan peserta KB terhadap pembinaan keluarga remaja semakin menurun.



Gambar 2.208
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber : RKPD dan DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024

- 17) Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB
- Bina keluarga lansia atau BKL merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga lansia yang sehat, mandiri, dan produktif. Pada tahun 2019-2024, cakupan BKR menunjukkan penurunan dengan capaian 82.1% di tahun 2024. Persentase tersebut menunjukkan bahwa keinginan peserta KB Kabupaten Tangerang terhadap pembinaan keluarga lansia semakin menurun.

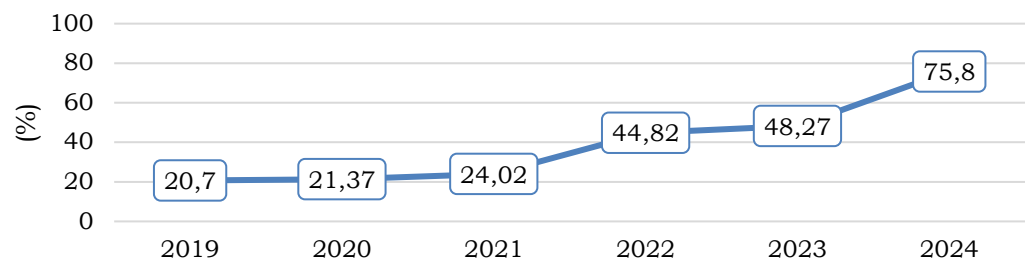


Gambar 2.209
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2023

18) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

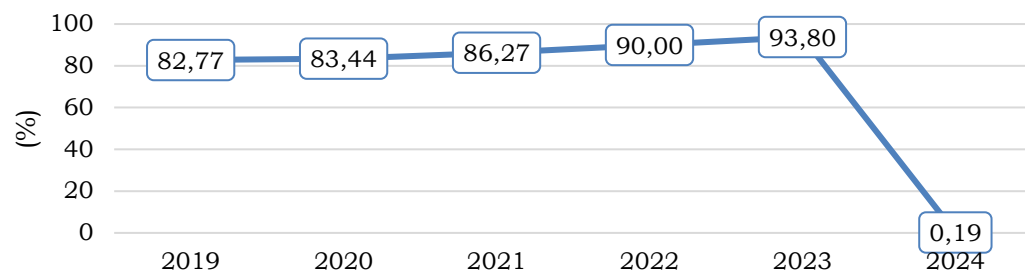
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan kegiatan pelayanan keluarga melalui konseling, bimbingan, pemberian KIE dan fasilitas keluarga sejahtera. Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang memiliki persentase yang meningkat, sebesar 75,8% pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin baiknya penyediaan sarana konseling keluarga di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.210
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2023

19) Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

PIK-R merupakan wadah bagi remaja untuk melaksanakan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja. Pada Kabupaten Tangerang, cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa meningkat dalam kurun waktu 2019-2023. Dapat dilihat dalam grafik di bawah, jika persentase tersebut sudah cukup baik, terutama dalam tahun 2023 mencapai 93,8%. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak remaja yang peduli dan ingin mempersiapkan diri mereka untuk memiliki ilmu berkeluarga. Tahun 2024 turun menjadi 0,19%.



Gambar 2.211
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2023

20) Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan petugas program KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kabupaten Tangerang memiliki PKB/PLKB yang meningkat dalam kurun waktu 2019-2023. Meskipun cakupan stabil 100% tiap tahunnya, jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan meningkat dari 7 pada tahun 2019 menjadi 60 pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa

pemerintah Kabupaten Tangerang semakin peduli dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.

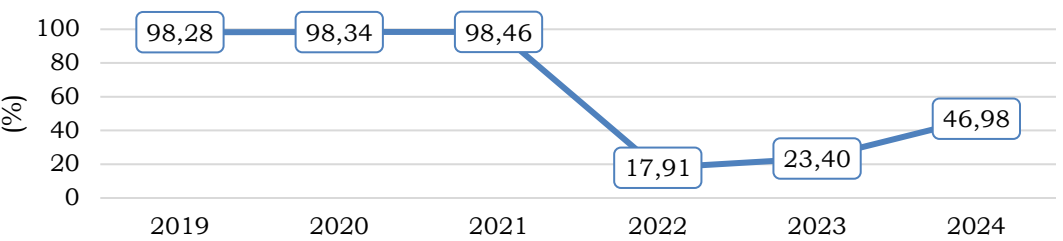
Tabel 2.29
Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk						
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PKB/PLKB yang diberdayakan	7	7	8	23	60	31
Total PKB/PLKB	7	7	8	23	60	31
Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2023

21) Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri

UPPKS merupakan salah satu kelompok kegiatan masyarakat yang melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan yang cukup drastis hingga 46,98% di tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin sedikit anggota UPPKS yang melakukan KB mandiri.



Gambar 2.212
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2023

22) Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

PPKBD merupakan petugas yang bekerja langsung di lapangan dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan pengendalian penduduk. PPKBD bertujuan untuk memberikan penyuluhan, motivasi, dan konseling kepada masyarakat, serta melakukan pengarsipan program KB di desa/kelurahan tempat tugasnya. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang telah menyediakan 1 petugas pada tiap desa/kelurahan. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang telah memberikan pelayanan yang optimal.

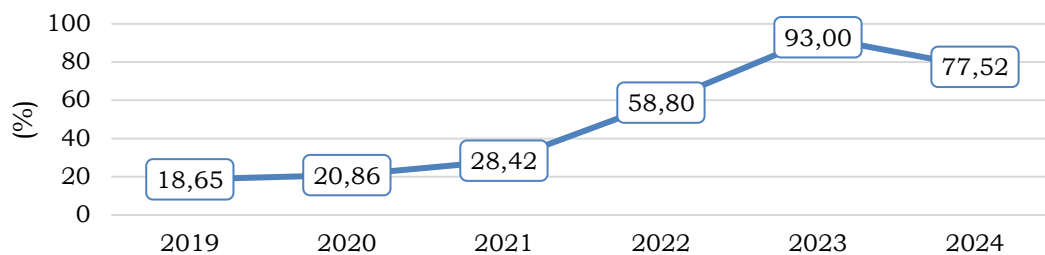
Tabel 2.30
Rasio Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan						
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Petugas Pembantu Pembina KB	274	274	274	274	274	274
Jumlah Desa	274	274	274	274	274	274
Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1:1

Sumber: DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024

23) Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi ditentukan berdasarkan jumlah alat dan obat kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang daerah dibandingkan dengan perkiraan permintaan masyarakat. Pada Kabupaten Tangerang, cakupan tersebut mengalami peningkatan drastis dalam lima tahun (2019-2023). Pada tahun 2019, cakupan tersebut hanya mencapai 18,65%, sedangkan pada tahun 2024 cakupan tersebut mencapai 77,52%. Peningkatan ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan kontrasepsi.



Gambar 2.213
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2023

24) Persentase Faskes dan Jejaringnya (di seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama dengan BPJS dan Memberikan pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

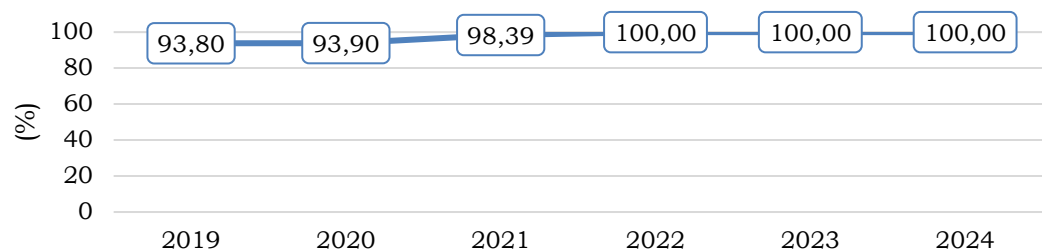
Seluruh faskes dan jejaringnya di Kabupaten Tangerang telah bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan. Hal ini menandakan bahwa fasilitas pendukung kesehatan Kabupaten Tangerang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat baik dari pelayanan program jaminan sosial maupun keluarga berencana. Tahun 2023 sekitar 100% faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR, sedang tahun 2024 sekitar 52,77%.

25) Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa merupakan ketersediaan informasi dan data anggota keluarga mengenai demografi, keluarga berencana dan ketahanan serta pembinaan keluarga. Kabupaten Tangerang telah mencakup 100% atau seluruh desa dalam kurun waktu 2019-2024. Cakupan tersebut dapat mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang telah sangat baik dalam penyediaan informasi.

26) Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

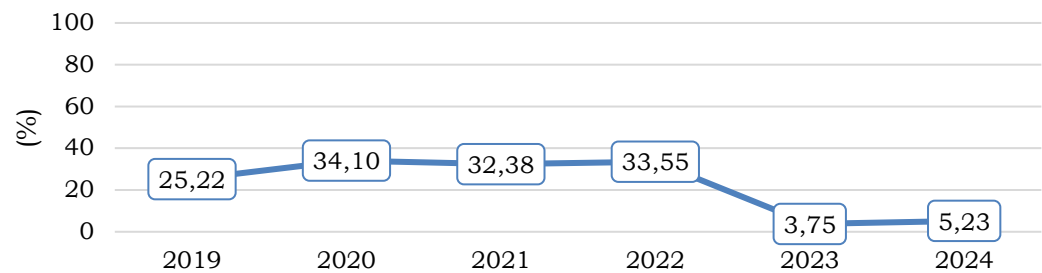
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga terhitung berdasarkan jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan dibandingkan dengan total jumlah kelompok kegiatan dalam suatu daerah. Kabupaten Tangerang memiliki cakupan yang meningkat selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2021. Selanjutnya, cakupan ini stabil di angka 100% ada tahun 2022-2024. Grafik ini menandakan bahwa Kabupaten Tangerang terus berupaya memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada keluarga.



Gambar 2.214
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2023

27) Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

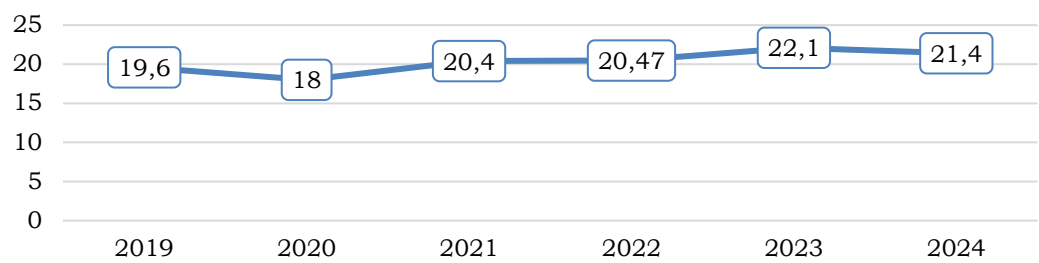
Pada Kabupaten Tangerang, cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019, cakupan ini mencapai angka 25,22% dan meningkat pada tahun 2020 mencapai 34,10% lalu stabil pada tahun 2021 dengan angka 32,38%, dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 33,55%. Akan tetapi, persentase tersebut menurun cukup signifikan pada tahun 2024 hingga di angka 5.23%. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus berupaya melakukan pemantauan terhadap masyarakat, terutama dalam tumbuh kembang anak.



Gambar 2.215
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024

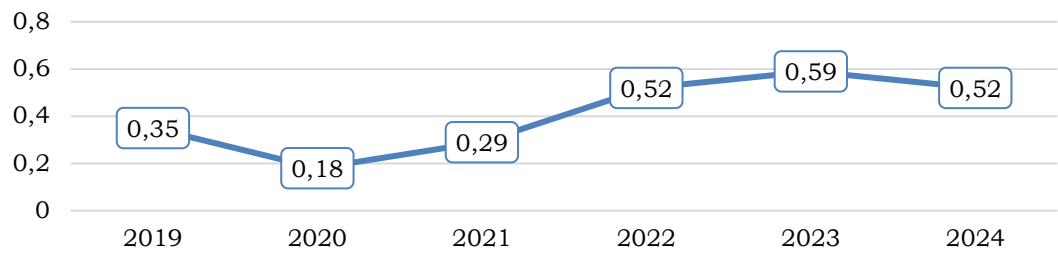
28) Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Umur kawin pertama atau UKP merupakan saat dimulainya masa reproduksi dan menjadi indikator penekanan laju pertumbuhan penduduk. Rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan usia dalam kurun waktu lima tahun (2019-2023). Pada tahun 2019, rata-rata usia kawin pertama wanita berada di usia 19,6 tahun dan menurun pada tahun 2020 menjadi 18 tahun. Lalu pada tahun 2024, rata-rata tersebut meningkat menjadi usia 21,4 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program penekanan jumlah penduduk menunjukkan keberhasilan dengan terus berupaya melalui pemantauan pernikahan usia muda.



Gambar 2.216
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024

29) Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes
Pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (PPKB) melalui APBD dan APBDes pada tahun 2024 mencapai 0,52% di Kabupaten Tangerang. Dalam 5 tahun terakhir, persentase pembiayaan program cenderung mengalami peningkatan yang menandakan bahwa pemerintah semakin memperhatikan program-program yang terkait dengan kependudukan.

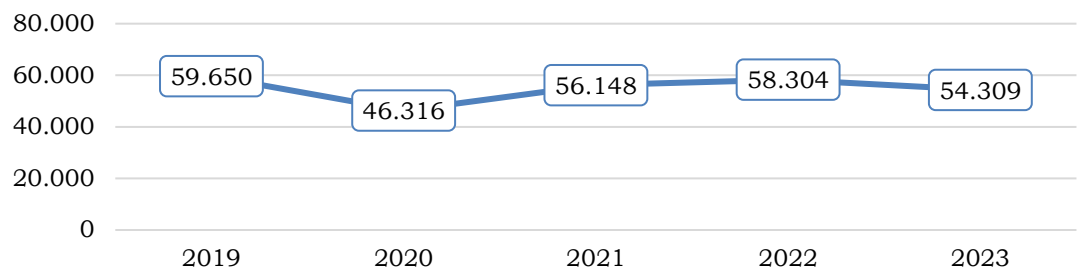


Gambar 2.217
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Melalui APBD dan APBDes Tahun 2019-2024
Sumber: DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024

I) Perhubungan

1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum menjadi salah satu pelayanan yang dibutuhkan masyarakat untuk bermobilisasi. Pengguna angkutan umum di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu meski sempat mengalami penurunan drastis pada 2020 yakni hanya mencapai 46.316 unit. Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2023 di Kabupaten Tangerang mencapai 54.309 unit. Tingginya arus ini menunjukkan angkutan umum masih menjadi transportasi andalan masyarakat dalam mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari.



Gambar 2.218
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024

2) Rasio Ijin Trayek

Izin trayek menjadi salah satu syarat dalam pengembangan angkutan umum. Berdasarkan informasi dari Dinas Perhubungan, selama tahun 2019 hingga 2023, jumlah izin trayek di wilayah ini stagnan di angka 1.408 izin. Jumlah izin trayek yang sama ini menunjukkan tidak adanya penambahan atau pengurangan trayek baru di wilayah Kabupaten Tangerang.

3) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Kir merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. Uji kir menjadi salah satu syarat kendaraan untuk transportasi. Uji kir di Kabupaten Tangerang relatif berfluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah uji kir mengalami penurunan hingga 46.316, namun kondisi tersebut dapat kembali meningkat menjadi 67.597 uji kir pada tahun 2024.

Tabel 2.31
Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Jenis Angkutan Umum		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mobil Barang	Pick up	25.661	20.376	23.464	23.960	21.813	19.205
	Light Truck	18.320	16.662	23.485	25.020	23.515	21.127
	Truck	12.290	7.052	7.018	7.107	6.954	6.533
	Tr. Head	0	161	187	16		
	Mobil Box						19.205
Mobil Bus	Bus	315	209	103	178	198	310
	Micro Bus	823	514	562	847	804	735
Mobil Penumpang	Taxi	153	58	34	0	0	364
	Angkutan Kota	1.762	1.043	913	727	546	118
Kend. Tempelan		326	235	371	431	447	
Kend. Khusus		0	6	11	18	32	
JUMLAH		59.650	46.316	56.148	58.304	54.309	67.597

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024

4) Jumlah Pelabuhan Laut/Sungai/Udara/Terminal Bus

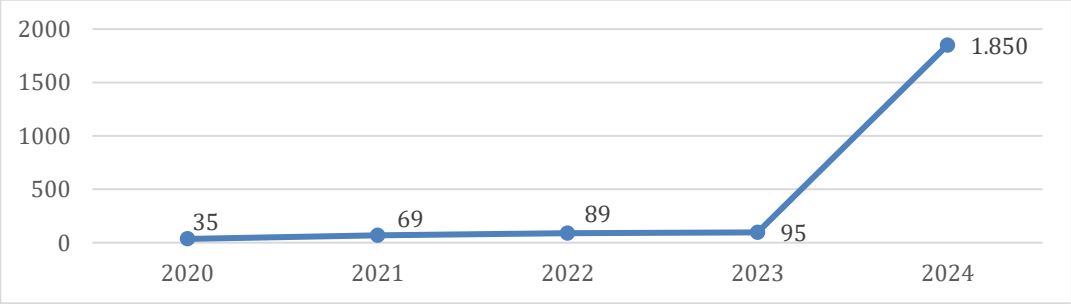
Sarana transportasi memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat. Kabupaten Tangerang hanya memiliki 2 bandara yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Budiarto. Selain itu, Kabupaten Tangerang juga memiliki 2 dermaga, yaitu Dermaga Kronjo dan Derma Cituis. Sementara itu, untuk mendukung kelancaran transportasi darat, Kabupaten Tangerang yang memiliki 29 kecamatan tidak memiliki satu pun terminal. Satu-satunya terminal bus yang ada di wilayah Kecamatan Pasar Kemis sudah tidak berfungsi lagi.

5) Layanan Angkutan Darat

Sesuai dengan jumlah izin trayek di wilayah Kabupaten Tangerang, wilayah ini memiliki jumlah angkutan darat yang sama, yakni 1.408 angkutan penumpang darat. Jumlah ini stagnan dari tahun 2019-2023 menunjukkan tidak adanya penambahan angkutan darat untuk meningkatkan cakupan transportasi di wilayah ini.

6) Pemasangan Rambu-rambu

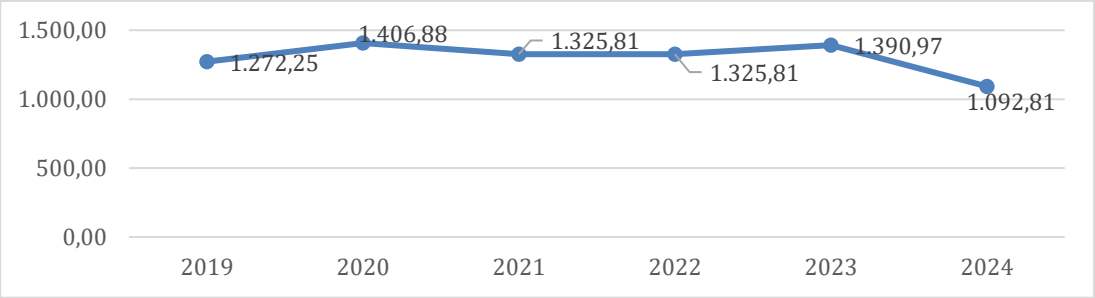
Pemasangan rambu-rambu sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2023, terdapat peningkatan pemasangan rambu dari 35 unit menjadi 95 unit rambu. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan.



Gambar 2.219
Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024

7) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

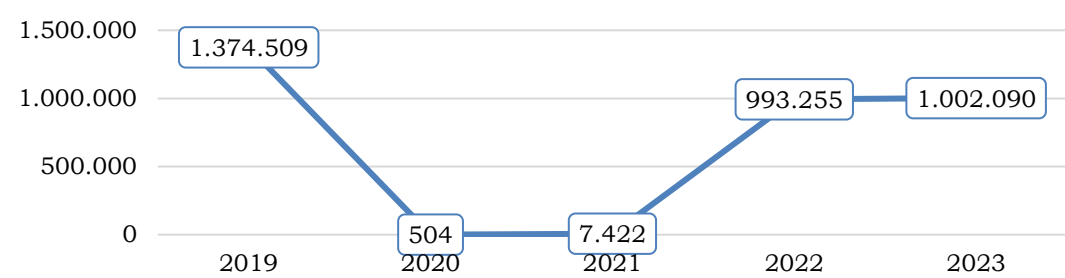
Kendaraan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat serta kegiatan ekonomi wilayah. Tingginya jumlah kendaraan ini juga berakibat pada penurunan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Tangerang berkisar di angka 1.200-1.400. Nilai tersebut menandakan tiap 1 km jalan melayani 1.200-1.400 kendaraan.



Gambar 2.220
Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024

8) Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut dalam angkutan umum di Kabupaten Tangerang tergolong besar yakni mencapai 1.002.090 pada tahun 2023. Angka ini sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dan 2021 yang terjadi akibat adanya pandemi covid-19.



Gambar 2.221
Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024

9) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun

Jumlah orang dan barang yang diangkut melalui Dermaga Kronjo dan Dermaga Cituis memiliki tren yang sama yakni sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2020. Berdasarkan jumlahnya, Dermaga Cituis mengangkut barang dan orang yang lebih banyak daripada Dermaga Kronjo. Hal ini menunjukkan kapasitas dermaga Cituis yang lebih tinggi. Selain itu, tingginya animo penggunaan transportasi laut ini menunjukkan eksistensi transportasi laut.

Tabel 2.32
Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Jumlah Barang dan orang yang terangkut		Dermaga Kronjo	Dermaga Cituis
2019	Barang (Kg)	501.600	1.800.000
	Orang	2.012	14.400
2020	Barang (Kg)	1.003.200	3.600
	Orang	4.025	28.800
2021	Barang (Kg)	1.984.000	3.821.000
	Orang	5.660	15.321
2022	Barang (Kg)	714.000	13.333.000
	Orang	3.354	3.105.000
2023	Barang (Kg)	1.864.000	2.520.000
	Orang	5.982	21.600

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024

J) Komunikasi dan Informatika

1) Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Di tahun 2022 sempat terjadi penurunan angka indeks menjadi 2,66 dengan kategori ‘baik’. Namun di tahun 2023, indeks SPBE meningkat menjadi sebesar 3,37 dengan kategori yang sama, tahun 2024 penilaian SPBE Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan menjadi 3,91 ini menandakan perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan digital.

Tabel 2.33
Indeks SPBE Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

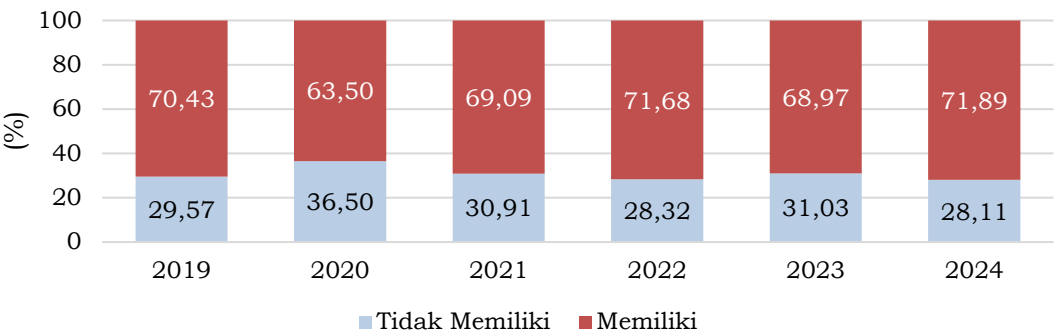
Indeks SPBE					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
2,98	Tidak ada penilaian	2,99	2,66	3,37	3,91

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, 2024

2) Cakupan Layanan Telekomunikasi

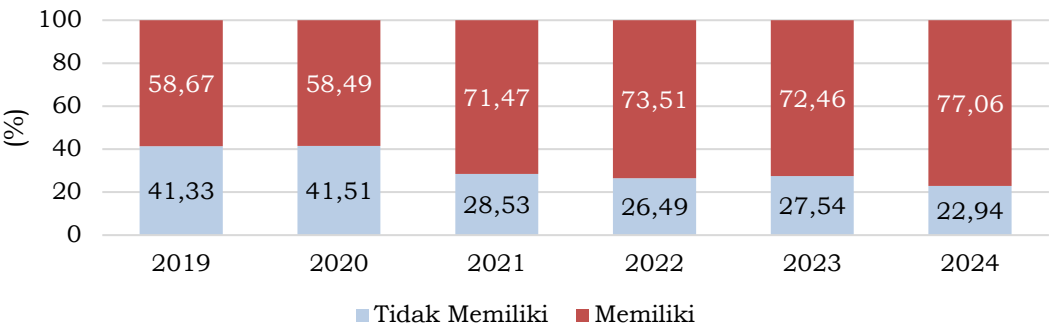
Cakupan Layanan telekomunikasi Kabupaten Tangerang telah dipenuhi oleh operator telepon seluler dengan cakupan 100% dan melayani 246 dari 246 desa. Hal ini menandakan bahwa daerah Kabupaten Tangerang sudah maju dan cepat dalam pertukaran informasi, baik jarak dekat maupun jarak jauh.

- 3) **Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon**
Persentase penduduk Kabupaten Tangerang yang menggunakan HP/Telepon pada tahun 2019-2023 cenderung menurun. Pada tahun 2024, persentase penduduk yang memiliki HP/Telepon mencapai 71,89% dan yang tidak memiliki terdapat 28,11%.



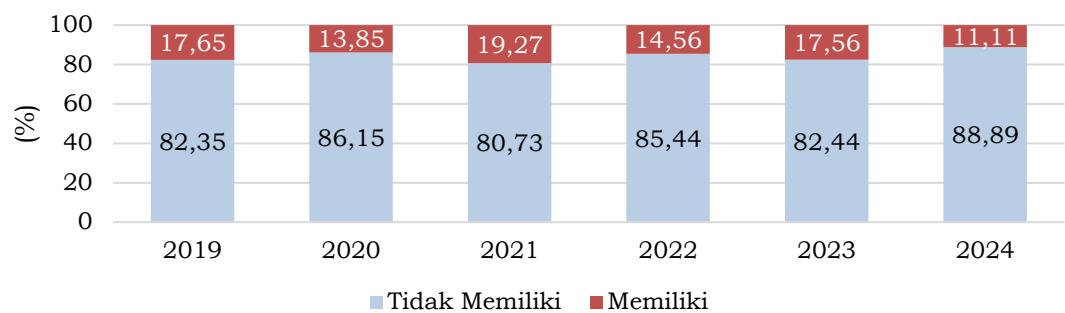
Gambar 2.222
Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: Buku Profil Statistik Kab. Tangerang Tahun 2024

- 4) **Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet**
Persentase rumah tangga Kabupaten Tangerang dengan akses internet pada tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang mengakses internet mencapai 77,06% dan yang tidak sebesar 22,94%. Hal ini menandakan bahwa pengaruh akses internet pada kehidupan penduduk Kabupaten Tangerang semakin besar, salah satunya pada penyebaran informasi dan telekomunikasi.



Gambar 2.223
Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

- 5) **Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi**
Persentase rumah tangga Kabupaten Tangerang yang memiliki komputer pribadi pada tahun 2019-2023 cenderung stagnan. Pada tahun 2023, persentase penduduk memiliki komputer pribadi mencapai 11,11% dan yang tidak memiliki terdapat 88,89%. Hal ini menandakan bahwa tren memiliki komputer pribadi pada kehidupan penduduk Kabupaten Tangerang tidak terjadi. Teknologi digital mengubah pola konsumsi media masyarakat dari konvensional menjadi digital. Pemanfaatan perangkat dari sistem kabel (*wire*) ke nirkabel (*wireless*) sudah banyak digunakan masyarakat.



Gambar 2.224
Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024

Sumber: Buku Profil Statistik Kab. Tangerang Tahun 2024

K) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1) Persentase Koperasi Aktif

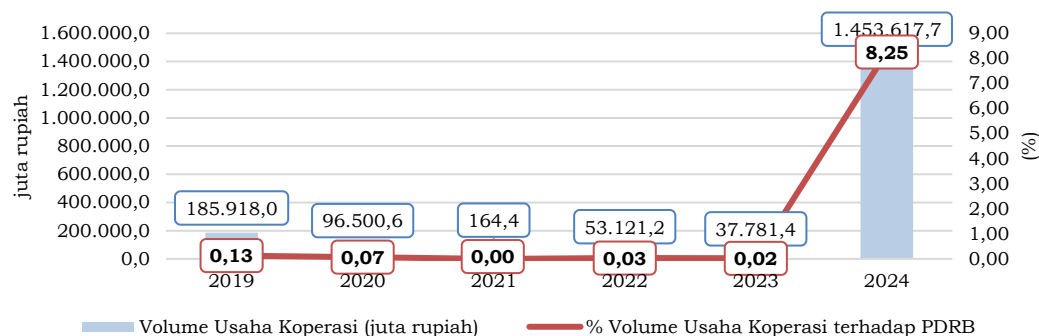
Koperasi sebagai pemantik ekonomi masyarakat saat ini mulai tergeser dengan munculnya berbagai inovasi dalam bidang keuangan. Meskipun demikian, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Tangerang relatif mengalami peningkatan pada kurun waktu 2020-2024. Meskipun demikian jumlah ini cenderung rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain.



Gambar 2.225
Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2024

2) Volume Usaha Koperasi

Volume usaha koperasi menunjukkan skalabilitas aktivitas usaha koperasi di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2024, volume usaha koperasi di Kabupaten Tangerang mencapai 1,45 triliun rupiah dan capaian ini paling tinggi di antara kabupate/kota di Provinsi Banten. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk terus meningkatkan volume usaha koperasi melalui peningkatan akses koperasi terhadap pemodalan serta optimalisasi dan inovasi layanan koperasi.



Gambar 2.226
Volume Usaha Koperasi Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

3) Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Seiring berjalannya waktu, semakin tingginya jumlah usaha mikro dan kecil yang berkembang menyokong perekonomian masyarakat. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Tangerang. Selama kurun waktu 2021-2023 terdapat peningkatan persentase usaha mikro dan kecil, yaitu dari 96,96 pada tahun 2021 menjadi 98,51% pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan tingginya dan pesatnya perkembangan usaha mikro dan kecil di wilayah Kabupaten Tangerang.

L) Penanaman Modal

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investor merupakan seseorang/sekelompok orang/perusahaan yang melakukan penanaman modal pada suatu daerah/perusahaan. Investor menanamkan modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari sejumlah dana yang diberikan. Sedangkan daerah/perusahaan yang ditanamkan modal dapat mempercepat program dan pembangunan ekonominya. Pada Kabupaten Tangerang, jumlah investor dalam tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dengan tahun 2019 sejumlah 2.776 investor dan tahun 2023 sejumlah 15.399 investor. Kondisi penanaman modal tahun 2024 di Kabupaten Tangerang untuk PMDN sebanyak 17.630 investor, PMA sebanyak 1.565 investor sehingga total 19.195 investor. Peningkatan ini menandakan bahwa perekonomian di Kabupaten Tangerang akan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.34
Investor Berskala Nasional Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)						
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PMDN	1.140	2.173	3.223	4.009	10.863	17.630
PMA	1.636	1.778	1.680	1.677	4.536	1.565
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2.776	3.951	4.903	5.686	15.399	19.195

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan Provinsi Banten dalam Angka 2023-2025

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Semakin tinggi nilai suatu investasi atau penanaman modal yang ditanamkan oleh investor, maka semakin tinggi perputaran perekonomian dalam suatu wilayah. Perputaran ekonomi dalam suatu wilayah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

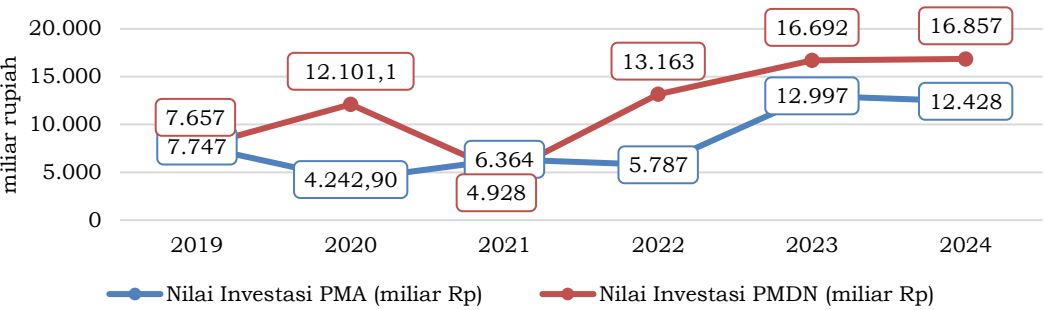
Tabel 2.35
Nilai Investasi dan Jumlah Proyek PMA dan PMDN Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)						
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PMA						
Nilai Investasi (Miliar Rp)	7.747	4.242,9	6.364	5.787	12.997	12.428
Jumlah Proyek (proyek)	1.636	1.778	1.680	1.677	4.536	1.565
PMDN						
Nilai Investasi (Miliar Rp)	7.657	12.101,1	4.928	13.163	16.692	16.857
Jumlah Proyek (proyek)	1.140	2.173	3.223	4.009	10.863	17.630

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka 2023-2024

Pada tahun 2019-2024, jumlah nilai investasi berskala nasional Kabupaten Tangerang cenderung meningkat, baik dari nilai

investasi maupun jumlah proyek. Dapat dilihat pada grafik di bawah, nilai investasi PMA dan PMDN pada tahun 2019 mencapai 15.403 miliar rupiah. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 29.285 miliar rupiah, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tangerang semakin meningkat ditandai dengan semakin banyaknya investasi yang masuk. Selain itu, jika dilakukan perbandingan antara investari dan pertumbuhan ekonomi (ICOR) dalam lima tahun terakhir menunjukkan nilai ICOR Kabupaten Tangerang masih berada pada kisaran normal yaitu 3-4 dimana dapat diinterpretasikan bahwa investasi digunakan secara efisien (Bappeda, 2024)³.

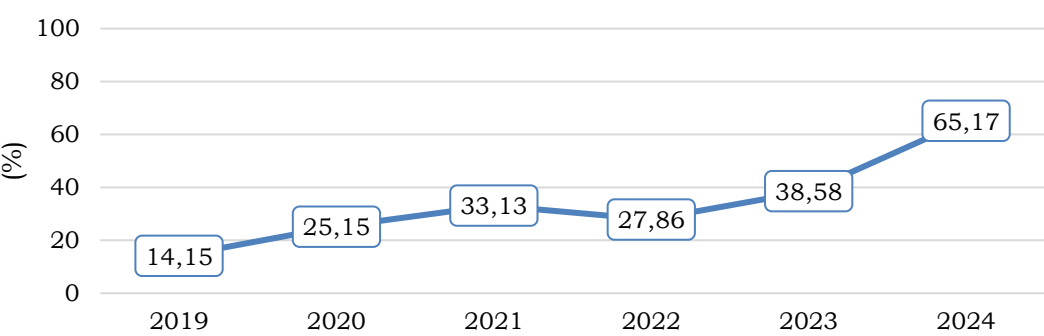


Gambar 2.227
Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan Provinsi Banten dalam Angka 2023-2025

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Penanaman modal daerah bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal. Rasio daya serap dapat dihitung dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dibandingkan Jumlah seluruh PMA/PMDN. Pada Kabupaten Tangerang, rasio tenaga kerja mengalami peningkatan dalam tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, rasio daya serap tenaga kerja sebesar 14,15% dan meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 65,17%. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang semakin meningkat.



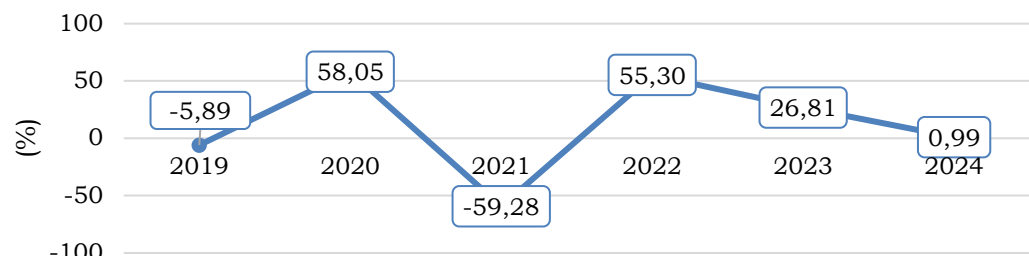
Gambar 2.228
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA/PMDN) Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

³ Analisis ICOR Kabupaten Tangerang dalam Dokumen Pengembangan Dan Penataan Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Tangerang Tahun 2024 (Bappeda Kabupaten Tangerang, 2024)

4) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)

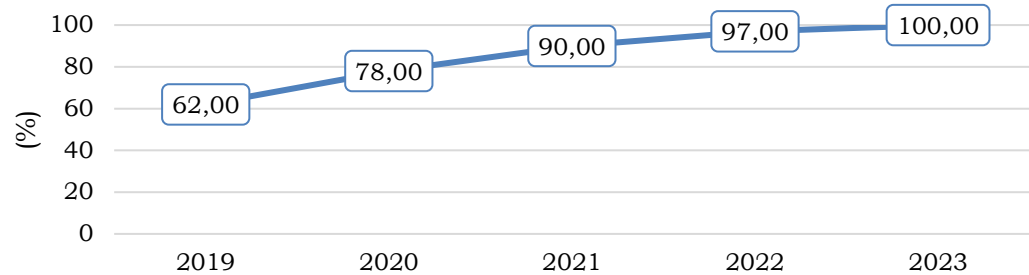
Kenaikan dan penurunan realisasi nilai investasi merupakan gambaran kondisi capaian investasi pada tahun evaluasi dikurangi dengan realisasi sebelum evaluasi yang dibandingkan dengan capaian realisasi sebelum evaluasi. Dapat dilihat pada grafik di bawah, Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi pada nilai realisasi PMDN. Hal ini menandakan bahwa penanaman modal dan investasi di Kabupaten Tangerang masih belum stabil.



Gambar 2.229
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

M) Kepemudaan dan Olahraga
1) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

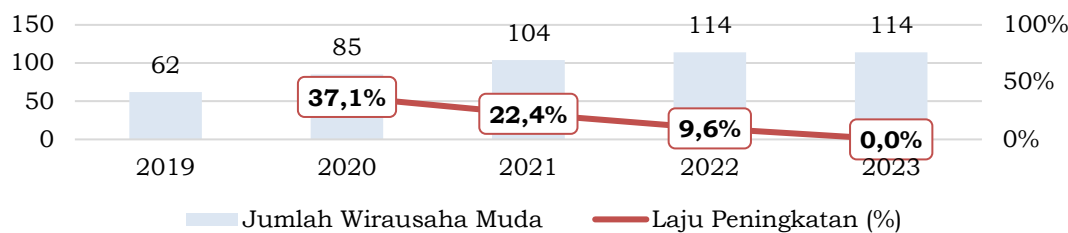
Organisasi kepemudaan di Kabupaten Tangerang meningkat dalam kurun waktu 2019-2023 dan telah mencapai 100%. Pada tiap-tiap tahunnya, seluruh organisasi kepemudaan di Kabupaten Tangerang aktif menjalankan kegiatan masing-masing. Hal ini menunjukkan peningkatan produktivitas dan kualitas pemuda di wilayah ini.



Gambar 2.230
Jumlah Organisasi Kepemudaan Aktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Data Sektoral dan Opendata, Kabupaten Tangerang 2024

2) Wirausaha Muda

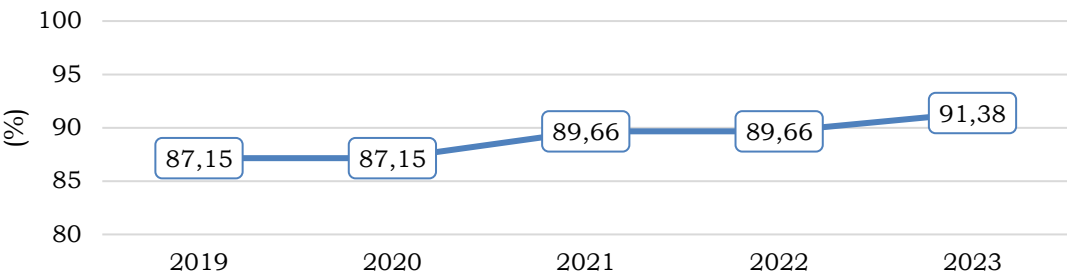
Wirausahawan muda di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam rentang waktu 2019-2023. Hal ini menunjukkan peningkatan produktivitas dan daya saing pemuda di wilayah ini. Perkembangan wirausahawan muda perlu didukung dengan adanya berbagai kegiatan pendukung.



Gambar 2.231
Jumlah Wirausahawan Muda Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Data Sektoral dan Opendata, Kabupaten Tangerang 2024

3) Cakupan Pembinaan Olahraga

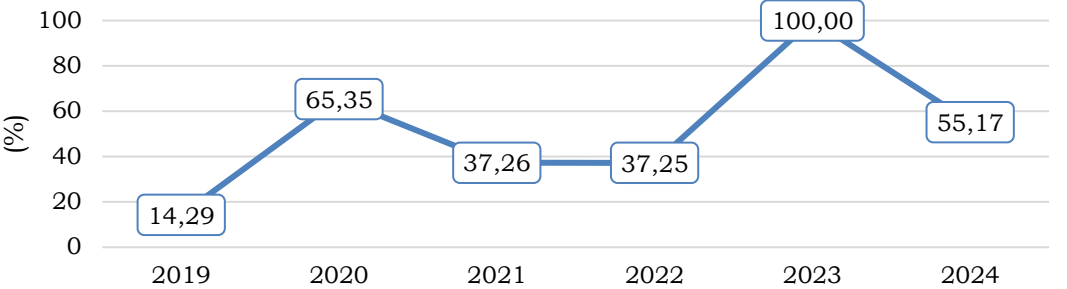
Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan dari kurun waktu 2019-2023. Peningkatan pembinaan olahraga ini menunjukkan bertambahnya jenis olahraga yang dibina dan dikembangkan di wilayah Kabupaten Tangerang. Sayangnya jumlah ini cenderung belum optimal dan masih terdapat beberapa jenis olahraga yang belum dibina.



Gambar 2.232
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Data Sektoral dan Opendata, Kabupaten Tangerang 2024

4) Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

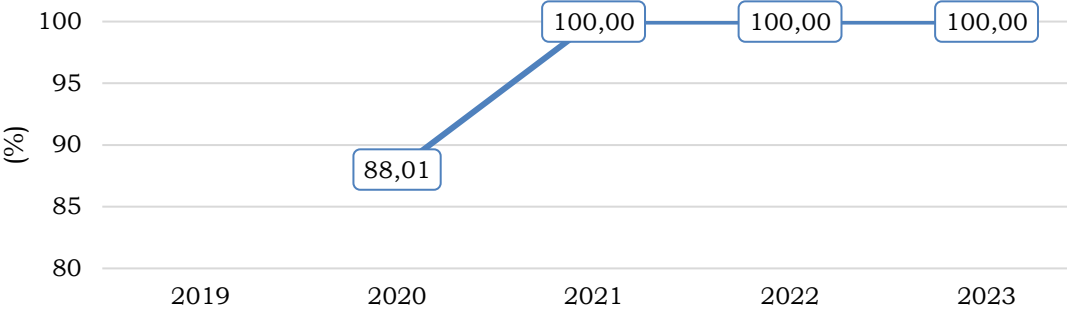
Sertifikasi pelatih menjadi salah satu indikator kinerja pelatih olahraga. Cakupan pelatih bersertifikasi mengalami peningkatan pada tahun 2020. Sementara itu, pada tahun sebelumnya cakupan pelatih bersertifikasi tergolong rendah. Di tahun 2023, cakupan pelatihan yang bersertifikasi telah mencapai 100%, tahun 2024 jumlah pelatih sebanyak 87 Orang dengan sertifikasi sebanyak 48 orang pelatih atau 55,17%.



Gambar 2.233
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Kabupaten Tangerang 2019-2024
Sumber: Data Sektoral dan Opendata, Kabupaten Tangerang 2024

5) Cakupan Pembinaan Atlet Muda

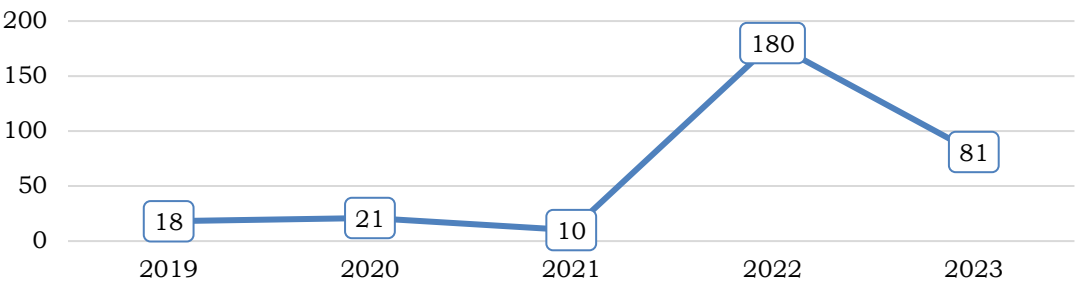
Atlet muda merupakan salah satu aset daerah yang harus dibina dan dilatih. Cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Tangerang cenderung meningkat pada kurun waktu 2020-2023 dan telah mencapai 100%. Hal ini perlu dipertahankan untuk membentuk atlet yang berkualitas.



Gambar 2.234
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Data Sektoral dan Opendata, Kabupaten Tangerang 2024

6) Jumlah Atlet Berprestasi

Atlet berprestasi merupakan atlet daerah yang mampu meraih prestasi di berbagai ajang. Tahun 2022 menjadi tahun dengan atlet berprestasi terbesar yakni terdapat 180 atlet berprestasi. Pada tahun 2023 jumlah atlet berprestasi menurun menjadi 81. Hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan kualitas atlet dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

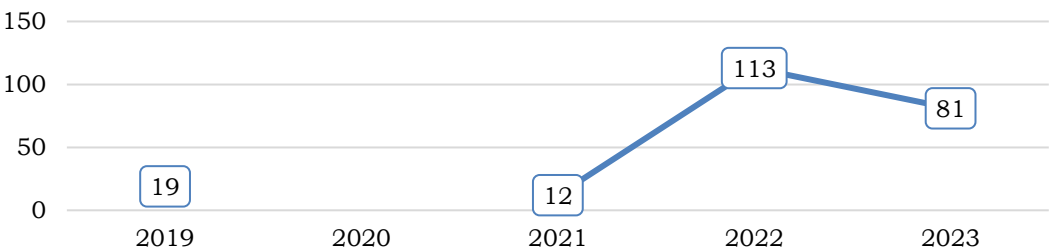


Gambar 2.235
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

7) Jumlah Prestasi Olahraga

Prestasi bidang olahraga erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan sebuah bangsa. Semakin tinggi prestasi olahraga, semakin sejahtera bangsa itu, demikian pula sebaliknya. Semakin banyak atlet berprestasi menunjukkan berhasilnya pembinaan atlet yang telah dilakukan.

Berdasarkan data dari bidang Pemuda dan Olahraga, pada tahun 2019 Kabupaten Tangerang memiliki sebanyak 19 prestasi olahraga. Jumlah ini sempat menurun pada tahun 2021 menjadi 12 prestasi. Seiring dengan tren jumlah atlet berprestasi, jumlah prestasi olahraga Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2022, namun kembali menurun pada tahun 2023.



Gambar 2.236
Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

N) Statistik

1) Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

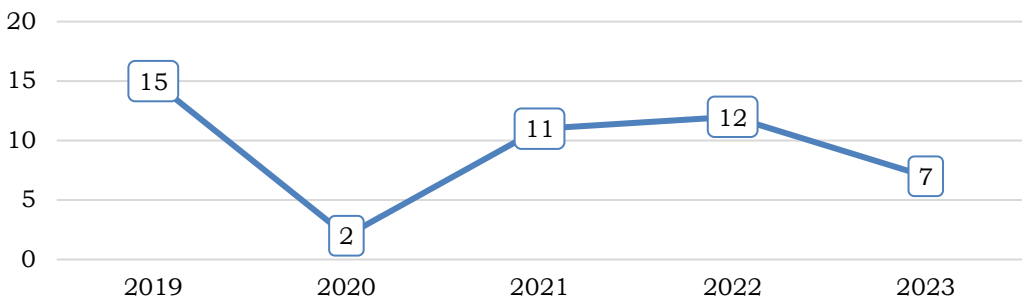
Sistem data dan statistik yang terintegrasi dalam Kabupaten Tangerang sudah tersedia dari tahun 2022. Sistem data ini berupa Portal Satu Data Kabupaten Tangerang yang dapat diakses melalui internet. Sistem data yang tersedia dapat menghasilkan informasi yang terintegrasi dengan cepat dan tepat, baik dengan antar OPD maupun masyarakat.

2) Buku “Kabupaten Dalam Angka”

Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang telah mempublikasikan buku Kabupaten Dalam Angka yang merupakan hasil kerja sama dari BPS Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Publikasi buku ini dilakukan secara rutin

untuk menyampaikan perkembangan data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Tangerang.

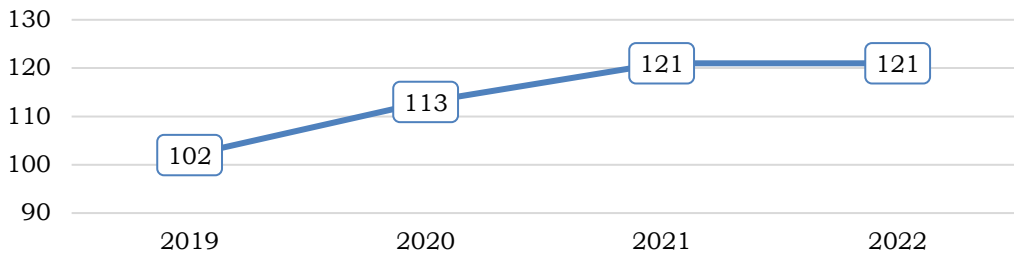
- 3) Buku “PDRB”
PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto adalah pendataan statistik yang dapat mengetahui kondisi ekonomi dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan suatu daerah. PDRB diterbitkan oleh BPS Kabupaten Tangerang yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Selama kurun waktu tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang telah mempublikasikan buku PDRB.
- O) Persandian
1) Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah
Dalam kurun waktu tahun 2019-2024 belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam aktivitas komunikasi. Hal ini terjadi akibat keterbatasan sumber daya dalam penggunaan persandian.
- P) Kebudayaan
1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi karena pandemi yang semakin menurun lima tahun terakhir. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa minat pertunjukan kebudayaan pada masyarakat Kabupaten Tangerang semakin menurun tiap tahunnya.



Gambar 2.237
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

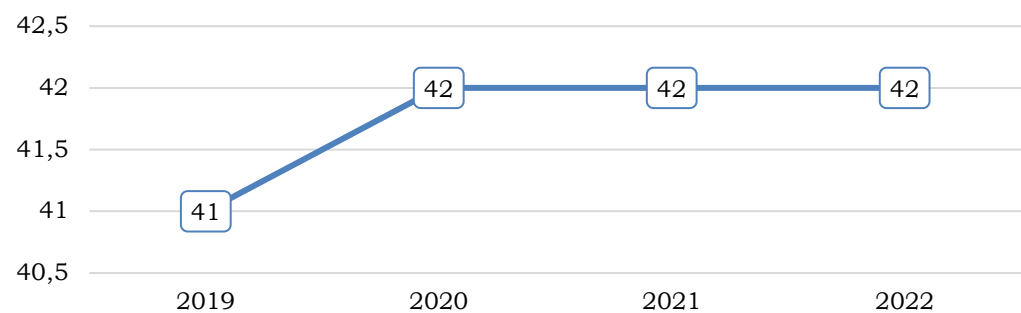
- 2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada Kabupaten Tangerang mengalami sedikit peningkatan selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2022. Hal ini mengindikasikan mulai adanya kesadaran penduduk Kabupaten Tangerang dalam menjaga warisan budaya.



Gambar 2.238
Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022

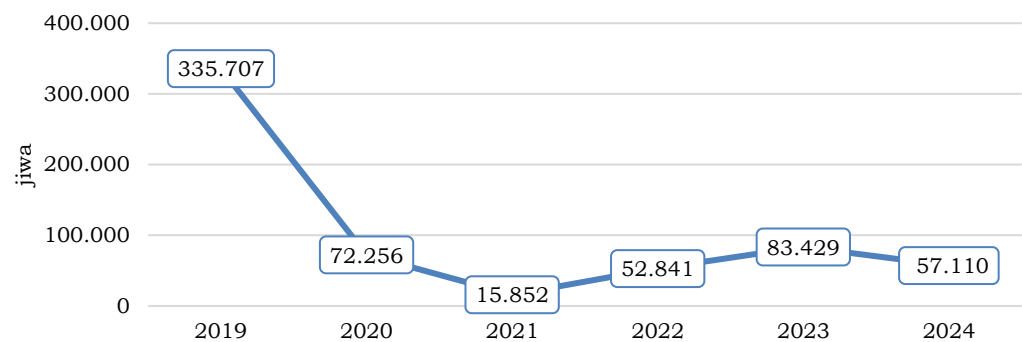
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

- 3) Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
- Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan revitalisasi dan inventarisasi pada karya budaya di wilayah. Grafik di bawah ini menunjukkan selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2022, karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi masih belum banyak. Selama tiga tahun terakhir karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi sejumlah 42 karya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman budaya.



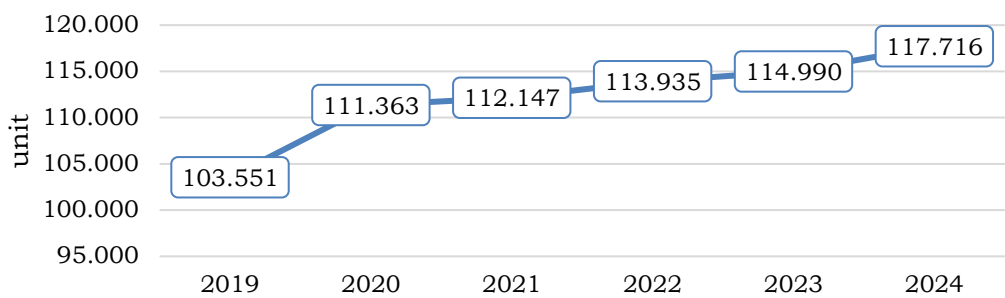
Gambar 2.239
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten
Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

- Q) Perpustakaan
- 1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
- Perpustakaan merupakan salah satu ruang publik yang bertujuan sebagai sarana pendukung kegiatan pendidikan sekarang mulai tergeser. Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan pada kurun waktu 2020-2021. Meskipun demikian pada tahun selanjutnya terdapat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Peningkatan jumlah pengunjung tersebut masih jauh dari jumlah normal pada kondisi sebelum pandemi.



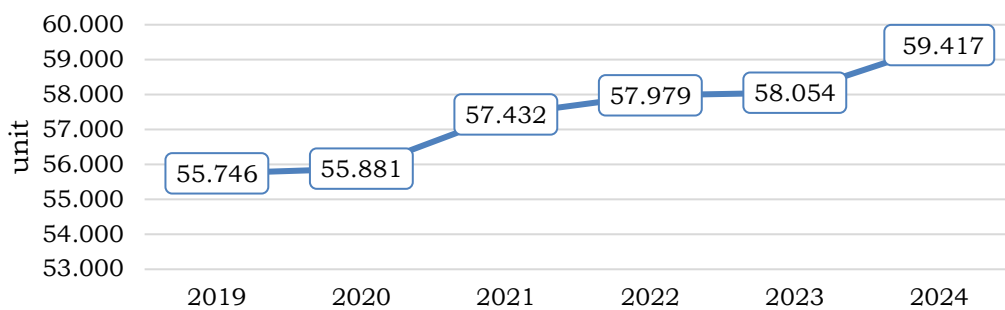
Gambar 2.240
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, 2024

- 2) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
- Sebagai sumber pengetahuan, perpustakaan menyediakan berbagai sumber wawasan salah satunya adalah buku. Jumlah buku yang tersedia di Kabupaten Tangerang meningkat dari tahun 2019 ke 2024. Peningkatan jumlah buku ini merupakan upaya untuk meningkatkan minat masyarakat maupun kualitas perpustakaan di Kabupaten Tangerang.



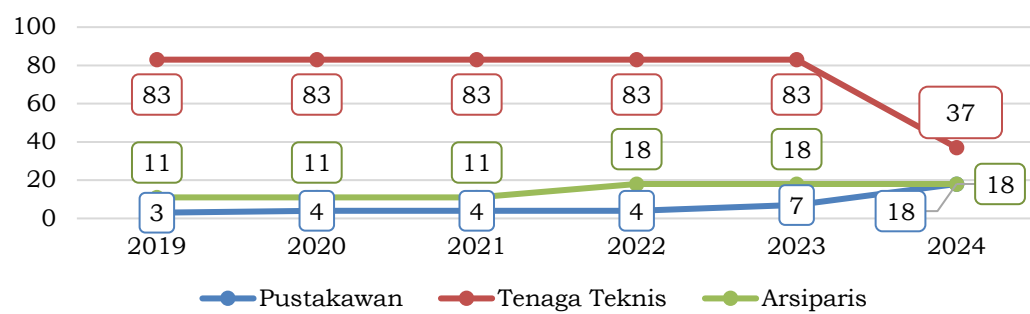
Gambar 2.241
Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, 2024

- 3) Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
- Selain jumlah buku yang terus bertambah, koleksi judul buku di perpustakaan juga mengalami peningkatan. Koleksi judul buku pada tahun 2024 mencapai 59.417 judul atau jumlah terbesar pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Beragamnya judul buku di perpustakaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik di tiap perpustakaan.



Gambar 2.242
Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, 2024

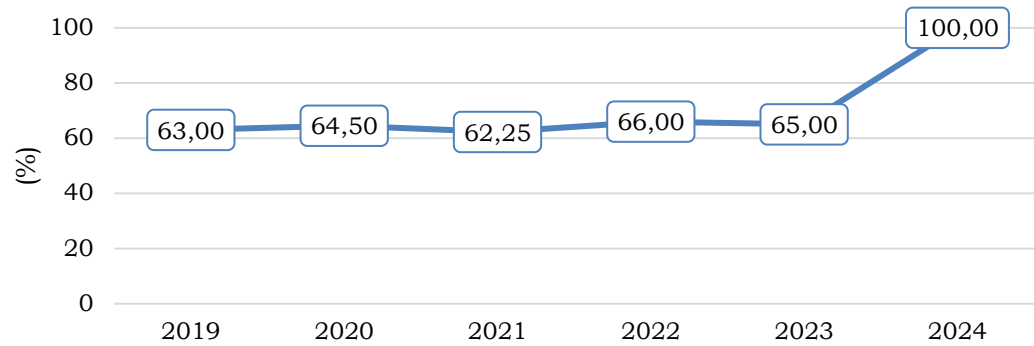
- 4) Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat
- Tenaga yang bekerja di perpustakaan menjadi salah satu indikator kualitas perpustakaan. Selama tahun 2024 terdapat 18 orang pustakawan, dengan 37 tenaga teknis. Arsiparis di wilayah Kabupaten Tangerang juga mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 18 orang arsiparis yang sebelumnya hanya 7 orang.



Gambar 2.243
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Arsiparis Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, 2024

- R) Kearsipan
- 1) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
- Persentase perangkat daerah mengelola arsip secara baku di Kabupaten Tangerang cenderung sedikit meningkat dalam kurun

waktu 2019-2024. Peningkatan jumlah ini mengindikasikan bahwa beberapa perangkat daerah Kabupaten Tangerang telah mengikuti regulasi dalam mengelola kearsipan yang berlaku.



Gambar 2.244
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten
Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Renstra Disperpusip Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

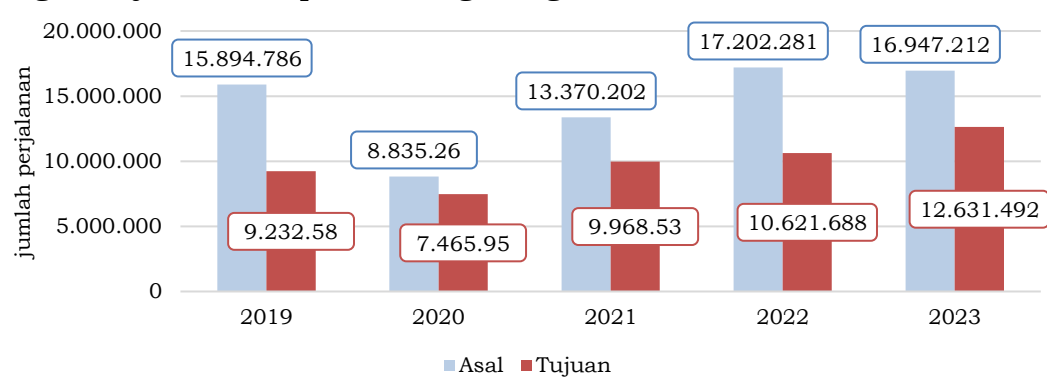
- 2) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
- SDM dalam mengelola kearsipan bertanggung jawab untuk menata arsip data-data administrasi dan birokrasi. Dengan adanya SDM yang kompeten, kearsipan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang meningkatkan SDM pengelola kearsipan dengan mengadakan satu kegiatan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang mendukung peningkatan kualitas SDM pengelolaan kearsipan.

2.1.4.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

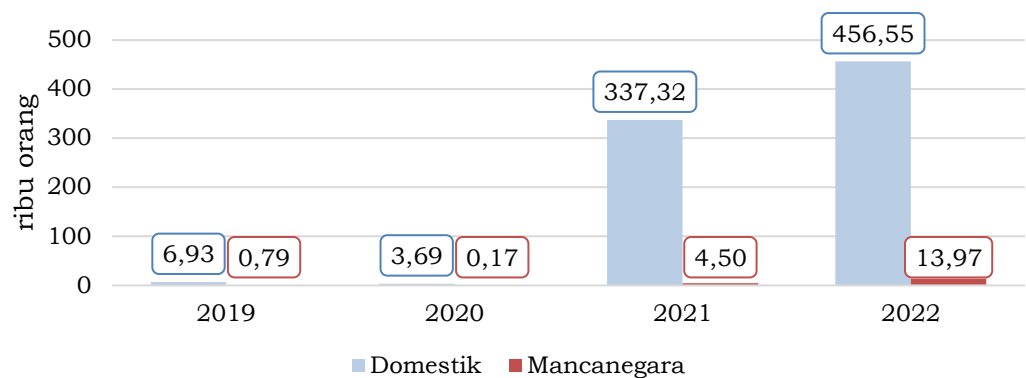
A) Pariwisata

1) Kunjungan Wisata

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 29,58 juta perjalanan dengan 57,3% diantaranya merupakan perjalanan asal Kabupaten Tangerang. Tren menunjukkan penurunan drastis jumlah perjalanan pada pandemi (2020-2021) dan meningkat kembali hingga tahun 2023. Selain itu, tren menunjukkan jumlah perjalanan asal Kabupaten Tangerang ke luar wilayah lain lebih tinggi dibandingkan perjalanan dengan tujuan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.245
Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Domestik) Asal dan Tujuan
Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023
Sumber: BPS Provinsi Banten, diolah (2024)

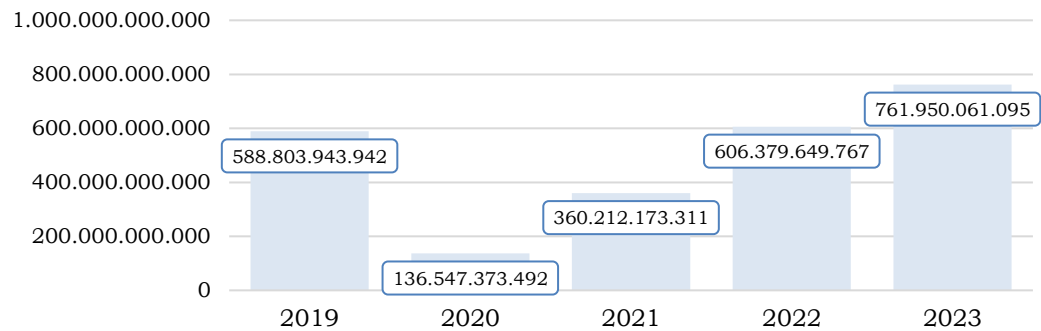


Gambar 2.246
Jumlah Tamu (Domestik dan Mancanegara) pada Usaha Akomodasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Berdasarkan grafik di atas dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah tamu domestik dan mancanegara pada usaha akomodasi di Kabupaten Tangerang. Peningkatan drastis pada tahun 2021-2022 menunjukkan sektor pariwisata Kabupaten Tangerang kembali bangkit setelah pandemi. Namun, pada kurun waktu 2016-2018 jumlah tamu pada usaha akomodasi mencapai 450 – 550 ribu pengunjung. Selain itu, data dari BPS Provinsi Banten (2024) menunjukkan bahwa rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di Kabupaten Tangerang yaitu 1,67 hari. Maka dari itu diperlukan arahan strategis dalam meningkatkan daya tarik wisata alam dan sektor MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, dan Exhibitions*) di yang diharapkan dapat meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang.

2) PAD Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang berkembang pesat dan terukur melalui PAD sektor pariwisata. PAD sektor pariwisata dihitung berdasarkan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir. PAD pariwisata mengalami penurunan signifikan sebesar -46,22% pada tahun 2019-2020 karena pandemi covid. Akan tetapi dapat meningkat sebesar +28,37% pada tahun 2021-2023. Pada tahun 2023, PAD sektor pariwisata Kabupaten Tangerang sebesar Rp 761.95 miliar. Kontribusi terbesar adalah pajak restoran sebesar Rp 515,40 juta atau 67,64% dari total PAD pariwisata Kabupaten Tangerang. Hal ini menunjukkan adanya resiliensi dalam bidang pariwisata di Kabupaten Tangerang.

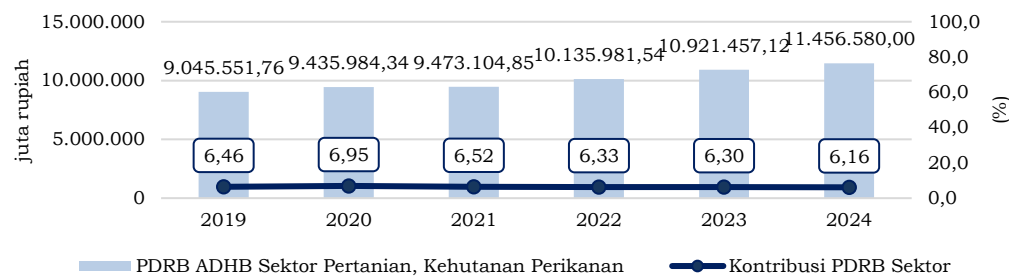


Gambar 2.247
PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

B) Pertanian

1) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sektor penopang ekonomi berbagai wilayah. Sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Tangerang bukan menjadi penyokong ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian/perkebunan yang relatif rendah dan terus menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11.456,58 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 6,16% terhadap total PDRB Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.248
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, 2025

2) Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tangerang, kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB pada tahun 2019 sebesar 302.614 dan angka tersebut meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah 357.704. Jumlah yang meningkat ini memberikan harapan bahwa kelompok petani dapat mendukung sektor pertanian.

3) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya merupakan nilai produksi rata-rata persatuan luas per komoditas tanaman padi atau bahan pangan utama lokal lainnya pada periode satu tahun. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2019-2024. Tercatat pada tahun 2019, produktivitas mencapai 48,05 kuintal/ha dan meningkat menjadi 51,17 kuintal/ha pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa produktivitas pertanian pangan di Kabupaten Tangerang semakin meningkat dan dapat berkelanjutan mendukung kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.36
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

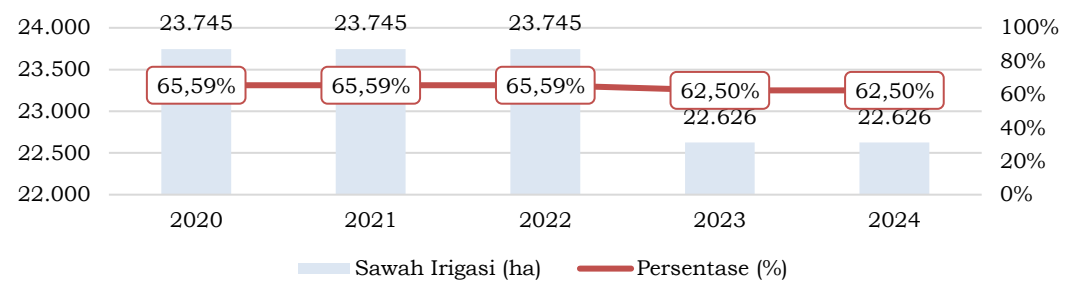
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
48,05 Ku	48,37 Ku	48,85 Ku	49,24 Ku	49,00 Ku	51,17 Ku

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, 2024

4) Cakupan Layanan Irigasi pada Lahan Pertanian

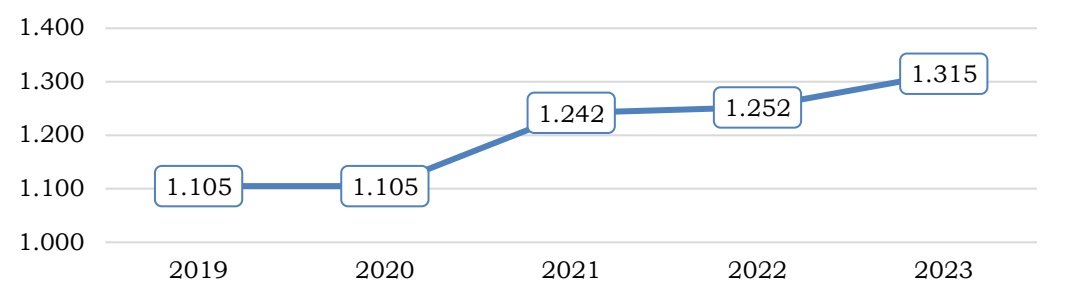
Infrastruktur irigasi berperan penting dalam menjamin ketersediaan air dalam periode tanam di lahan pertanian untuk mendorong produktivitas hasil pertanian. Dengan adanya irigasi juga memungkinkan tanaman pertanian untuk ditanam tanpa mengikuti musim dan dengan adaptasi teknologi dalam irigasi dapat mendorong efisiensi dalam penggunaan air sehingga menekan biaya

operasional. Luas dan persentase lahan pertanian dengan irigasi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020-2021 sebesar 65,59% dan menurun pada tahun 2024 menjadi 62,5%



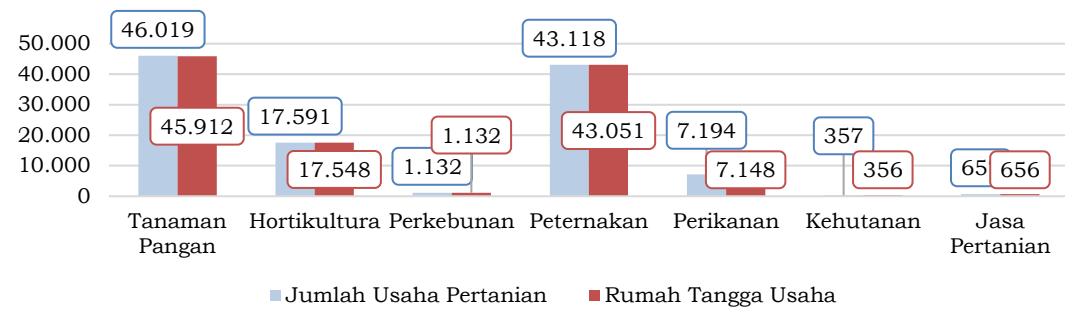
Gambar 2.249
Luas dan Persentase Lahan Pertanian dengan Irigasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- 5) Cakupan Bina Kelompok Petani
- Kelompok Petani merupakan perkumpulan yang dikembangkan dari dan untuk petani dengan tujuan untuk memperkuat kepentingan petani. Cakupan bina kelompok tani pada Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam kurun tahun 2019-2023. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak jenis kelompok tani yang terbina maka semakin meningkat kesejahteraan petani di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.250
Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, 2024

- 6) Jumlah Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Usaha Pertanian
- Berdasarkan Sensus Pertanian BPS (2024), Jumlah Usaha Pertanian adalah banyaknya unit usaha pertanian yang meliputi Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum, dan Usaha Pertanian Lainnya. Sementara itu, Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah rumah tangga yang memelihara / menguasai / melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ ditukar.

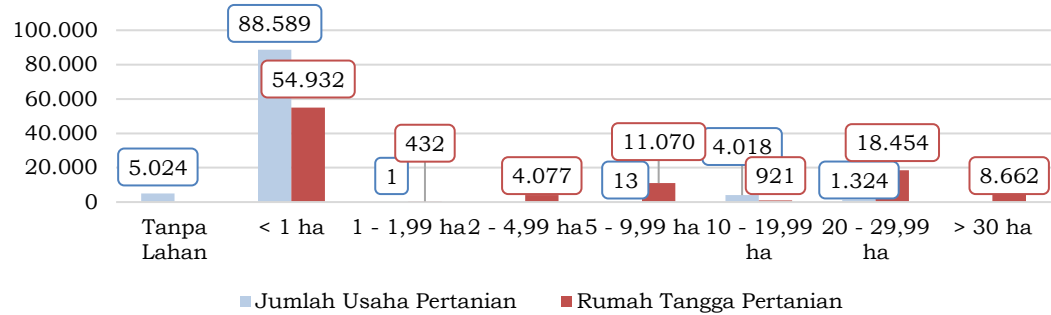


Gambar 2.251
Jumlah Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor di Kabupaten Tangerang Tahun 2023
Sumber: Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Tangerang (2024)

Pada tahun 2023, Jumlah Unit Usaha Pertanian di Kabupaten Tangerang mencapai 99.008 unit usaha, dimana 99,93% (98.936 unit) merupakan Usaha Pertanian Perorangan. Jumlah unit usaha pertanian perorangan paling banyak terdapat di Kecamatan Sindang Jaya yaitu 8,89% (8.798 unit) dari keseluruhan di Kabupaten Tangerang. Sementara itu, Rumah Tangga Usaha Pertanian di Kabupaten Tangerang sebesar 98.548 rumah tangga. Subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan merupakan sub sektor yang paling dominan dan/atau terbanyak dibandingkan sub sektor lainnya.

7) Penguasaan Lahan Pertanian

Penguasaan lahan pertanian berpengaruh kepada kesejahteraan petani. Pentingnya penguasaan lahan bagi petani adalah pengaruhnya pada sistem bagi hasil, hak untuk berusaha petani, sumber daya lahan yang terbatas, dan tingkat pendapatan petani. Dampak lebih jauh jika penguasaan lahan petani yang sangat rendah berpengaruh pada kemiskinan struktural di suatu wilayah (Halim & Faisal, 2022)⁴.



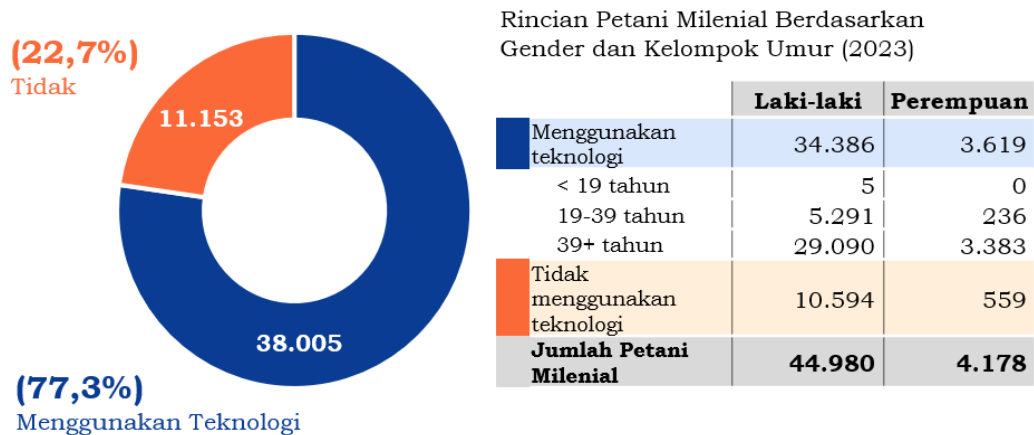
Gambar 2.252
Jumlah Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Pertanian Menurut Menurut Penguasaan Lahan Pertanian di Kabupaten Tangerang Tahun 2023
Sumber: Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Tangerang (2024)

Pada tahun 2023, jumlah petani gurem di Kabupaten Tangerang yaitu 78.464 atau 85,25% dari keseluruhan petani pengguna lahan pertanian. Berdasarkan grafik di atas, penguasaan lahan pertanian didominasi oleh lahan < 1 ha dimana jumlah usaha pertanian sebesar 94,59% dan rumah tangga pertanian sebesar 55,74%. Berdasarkan sub sektor pertanian, sub sektor dengan jumlah dan persentase petani gurem terbesar adalah sub sektor peternakan yaitu sebesar 40.619 petani atau 94,8% dari keseluruhan petani pengguna lahan sub sektor peternakan. Selain itu, persentase petani gurem terbesar di sektor hortikultura (93,4%) dan perkebunan (87,2%).

8) Petani Milenial dan *Urban Farming*

Petani milenial merupakan penduduk berumur 19-39 tahun yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan, dan/atau melakukan usaha pertanian menggunakan teknologi digital dan/atau alat mesin pertanian (alsintan) modern.

⁴ Halim, A., & Faisal, M. (2022). Analisis hubungan penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap. *Pallangga Praja*, 4(1), 11-22.



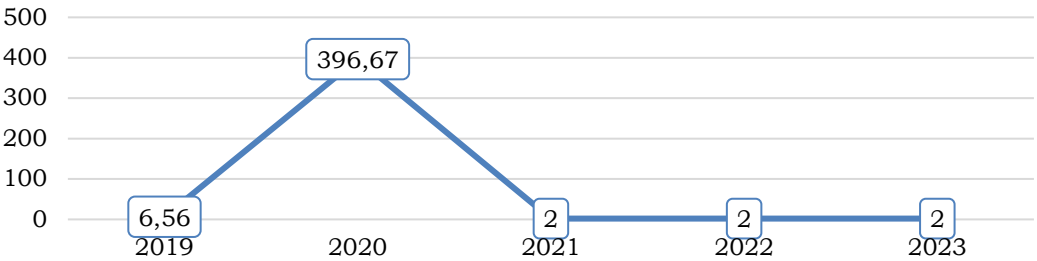
Gambar 2.253
Jumlah Petani Milenial di Kabupaten Tangerang Tahun 2023
Sumber: Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Tangerang (2024)

Berdasarkan diagram diatas, petani milenial di Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 49.158 petani dan 77,3% diantaranya menggunakan teknologi digital dan alat pertanian modern. Dukungan penyediaan dan inovasi dalam pengembangan infrastruktur pertanian diperlukan untuk mendorong produktivitas pertanian dan regenerasi petani.

Urban Farming adalah kegiatan mengusahakan pertanian di lahan yang terbatas, sebagian besar menggunakan media tanam, tidak di permukaan lahan secara langsung atau menggunakan pot dan sejenisnya, serta menggunakan teknologi seperti hidroponik, aquaponik, vertiuklture, media terpal, dan sejenisnya. Berdasarkan data dari Sensus Pertanian BPS Kabupaten Tangerang (2023), terdapat 118 Usaha Pertanian Perorangan dan 117 Rumah Tangga Usaha Pertanian dengan *Urban Farming*. Kecamatan Cikupa merupakan kecamatan dengan jumlah UPP dan RTUP terbanyak (40,7% dari total usaha *Urban Farming*).

- C) Kehutanan
1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Hutan dan lahan kritis yang terdapat di wilayah Kabupaten Tangerang dilakukan proses rehabilitasi untuk mengembalikan ke fungsi awal. Rehabilitasi paling banyak dilakukan pada tahun 2020 yakni mencapai 396,67 Ha. Sedangkan pada tahun lain dalam kurun waktu 2019-2023, jumlah rehabilitasi hutan dan lahan kritis hanya dilakukan pada lahan seluas 2 Ha.



Gambar 2.254
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2023
Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka, 2024

- D) Energi dan Sumber Daya Mineral
1) Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Persentase rumah tangga pengguna listrik Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% pada kurun waktu 2019-2022.

Persentase ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu listrik PLN, listrik Non PLN dan bukan listrik. Pada tahun 2023, persentase listrik PLN mencapai 99,76%, listrik non PLN mencapai 0,02% dan bukan listrik 0,22%. Persentase ini mengindikasikan bahwa energi listrik yang dibutuhkan masyarakat sudah bisa ditanggung oleh PLN.

Tabel 2.37
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024

Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik						
Jenis Listrik	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Listrik PLN	99,84%	99,23%	99,96%	99,94%	99,76%	100
Listrik Non-PLN	0,16%	0,77%	0,04%	0,06%	0,02%	0
Bukan Listrik	0	0	0	0	0,22%	0

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

2) Penggunaan Listrik per Kapita

Penggunaan listrik per kapita menunjukkan konsumsi listrik dari aktivitas perekonomian, aktivitas rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam lima tahun terakhir, pelanggan listrik di Kabupaten Tangerang meningkat dengan rata-rata 11,9% per tahun. Hal ini selaras dengan penggunaan listrik yang juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk opimalisasi pemenuhan listrik serta transisi untuk penggunaan EBT sebagai sumber energi listrik alternatif di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.38
Penggunaan Listrik per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

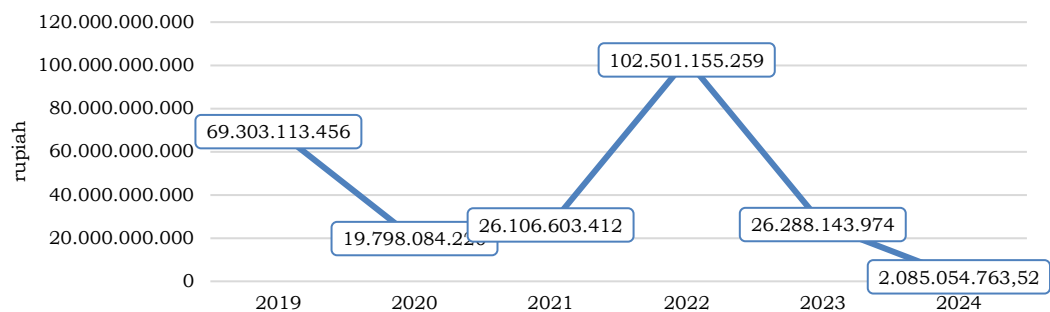
Tahun	Penggunaan Listrik (KWh)*	Pelanggan Listrik	Penggunaan Listrik per Kapita (KWh)
2019	6.114.278.154,0	917.146,0	1.666,7
2020	5.851.133.660,0	969.308,0	1.509,1
2021	6.430.657.471,0	1.024.463,0	1.569,3
2022	6.824.099.764,0	1.082.241,0	1.576,4
2023	8.557.188.168,2	1.414.477,0	1.512,4
2024	4,198,706,165	1,423,968	11.794

Keterangan
*) Penggunaan Listrik (KWh) = Listrik yang Terjual (KWh) - Susut Hilang (KWh)
**) Penggunaan Listrik per Kapita (KWH) = Pengguna Listrik (KWh) / [Pelanggan Listrik (x4 dengan asumsi 1 keluarga terdiri atas 4 jiwa)]
Sumber : BPS Provinsi Banten dan Olahan Penyusun (2024)

E) Perdagangan

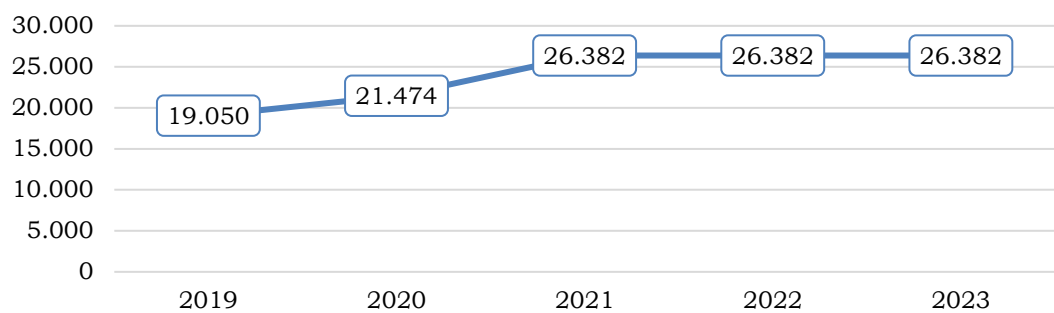
1) Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih adalah nilai total barang dan jasa ekspor suatu wilayah dikurangi nilai semua barang dan jasa yang diimpor. Nilai ekspor bersih perdagangan Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dalam rentang waktu 2019-2024. Nilai ekspor bersih Kabupaten Tangerang cenderung tinggi yang menunjukkan kuatnya nilai ekspor dan perkembangan perdagangan wilayah Kabupaten Tangerang.



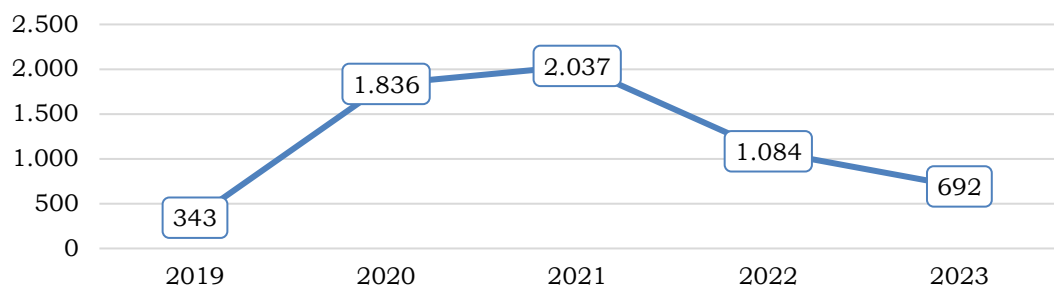
Gambar 2.255
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

- 2) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
- Pembinaan kelompok pedagang/usaha informal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang/usaha informal. Pada 2019-2021, cakupan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, pada tahun selanjutnya cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sama dengan jumlah 26.382 kelompok. Jumlah ini tergolong tinggi yang mengindikasikan cakupan pembinaan dan upaya pengembangan perdagangan yang semakin meningkat dan merata.



Gambar 2.256
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

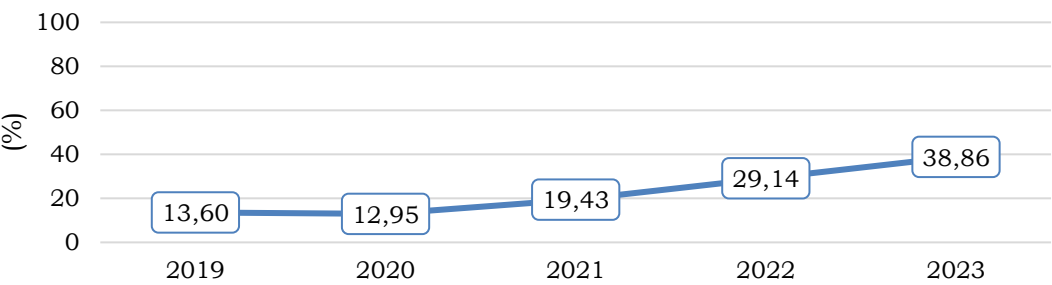
- F) Perindustrian
- 1) Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
- Kabupaten Tangerang memiliki cakupan bina kelompok pengrajin yang berfluktuatif. Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2019 mencapai 343 perajin. Angka ini meningkat pesat ketika pandemi pada tahun 2020 menjadi 1.836 pengrajin dan 2.037 pengrajin pada tahun 2021. Tetapi pada tahun 2022, cakupan tersebut menurun menjadi 1.084 pengrajin dan 692 pengrajin pada tahun 2023. Fluktuasi ini menandakan bahwa program untuk mendukung pengrajin Kabupaten Tangerang masih belum optimal.



Gambar 2.257
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

2) Pelaku IKM yang Berpeluang Ekspor

Pelaku usaha Industri Kecil-Menengah (IKM) yang memiliki kapasitas untuk ekspor menunjukkan daya saing dan inovasi produk di pasar internasional. Dalam lima tahun terakhir, beberapa IKM binaan pemerintah melakukan ekspor ke berbagai negara hingga Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Pada tahun 2021, 42 produk UMKM mengikuti World Expo Dubai 2021 serta 21 UMKM/IKM diikutsertakan dalam Indonesia Trade Promotion Center di Korea Selatan. Pada tahun 2023, ribuan produk makanan IKM di ekspor ke Taiwan. Pada awal tahun 2024, IKM binaan melakukan ekspor produk sepatu *dox* (4.044 pasang sepatu) ke Senegal.



Gambar 2.258
Persentase Pelaku IKM yang Berpeluang Ekspor di Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Berdasarkan grafik di atas, tren dalam lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan peningkatan pelaku IKM yang berpeluang ekspor. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk mengakselerasi kapasitas pelaku IKM untuk mengakses pasar ekspor melalui kemitraan inovasi produk, permodalan, manajemen bisnis usaha, promosi, dan lain sebagainya.

G) Transmigrasi

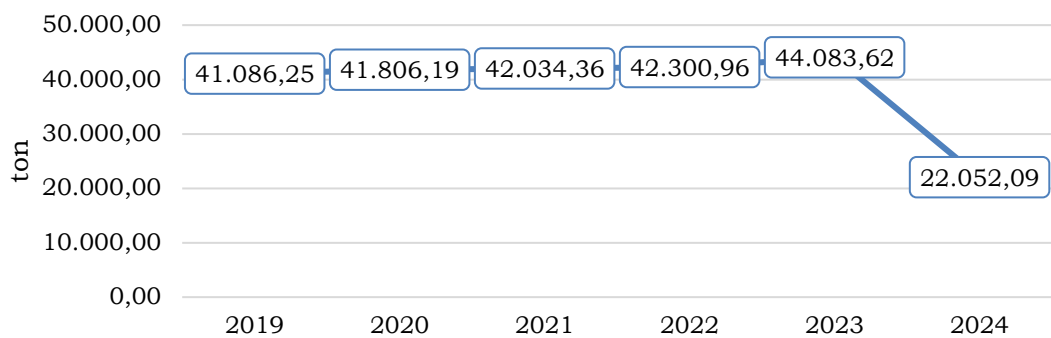
1) Persentase Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi swakarsa merupakan pemberangkatan transmigrasi atas biaya sendiri di Kabupaten Tangerang tidak ada transmigrasi swakarsa, adapun Dinas Tenaga Kerja melakukan transmigrasi swakarya yaitu seleksi terhadap calon transmigran yang dibiayai oleh APBD.

H) Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Produksi perikanan merupakan seluruh hasil kegiatan yang didapatkan dan diolah dari penangkapan dan budidaya ikan/binatang air yang dilakukan pada air tawar dan air laut. Jumlah produksi perikanan didapatkan dari perorangan maupun usaha perikanan. Produksi perikanan Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2019-2024. Pada tahun 2019, produksi perikanan mencapai 41.086,25 ton dan pada tahun 2024 mencapai 22.052,09 ton.



Gambar 2.259
Produksi Perikanan (Ton) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Data Statistik Sektorial Kabupaten Tangerang, 2023 dan 2024

Kabupaten Tangerang memiliki produksi perikanan yang terbagi menjadi dua, yaitu penangkapan dan budidaya. Pada produksi perikanan penangkapan, sumber yang memiliki kontribusi tinggi yaitu perikanan tangkap di laut dengan jumlah tertinggi pada tahun 2024 yaitu 21,962.18 ton. Sedangkan pada jenis perikanan budidaya, sumber yang memiliki kontribusi tertinggi di Kabupaten Tangerang yaitu Tambak yang mencapai angka tertinggi 10,942 ton pada tahun 2024.

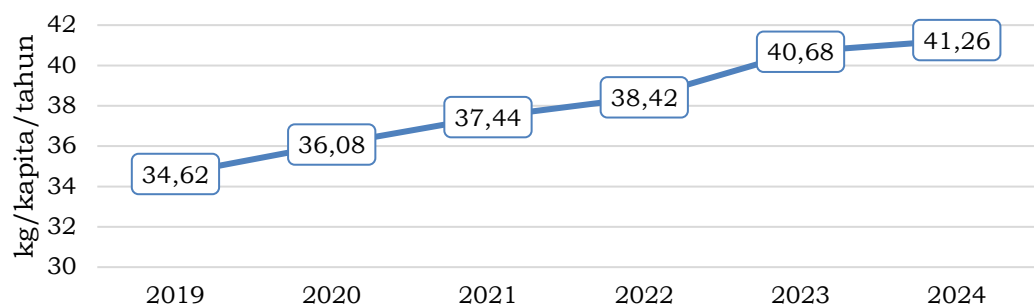
Tabel 2.39
Proporsi Produksi Perikanan (Ton) Berdasarkan Jenis Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

Produksi Perikanan						
Jenis Perikanan	Produksi (Ton)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penangkapan	20.798,49	21.023,71	21.063,25	21.148,45	21.920,57	22,052.09
Perikanan Tangkap di Laut	20.590,52	20.814,30	20.942,33	21.059,60	21.831,19	21,962.18
Perikanan Perairan Daratan	207,97	209,41	120,92	88,85	89,38	89.92
Rawa/Swamp	104,29	11,08	24,74	24,88	25,03	19.78
Waduk/Situ/Danau	103,68	15,99	35,34	35,54	35,75	35.97
Sungai	0	182,34	60,84	28,43	28,6	34.17
Budidaya	20.287,80	20.705,65	20.907,51	21.088,55	22.073,67	20,604
Tambak	12.137,70	11.625	11.896	11.992	12.569,12	10,942
Kolam Air Tenang	7.536,70	8.479,65	8.411,33	8.495,00	8.881,76	9.030,17
Sawah	0	0	0	0	0	
Jaring Apung Tawar	613,4	601	600,18	601,55	622,79	632.43
Budidaya Laut	0	0	0	0	0	
Total	41.086,25	41.806,19	42.034,36	42.300,96	44.083,62	42.656,09

Sumber: Data Statistik Sektorial Kabupaten Tangerang, 2023 dan 2024; Analisis Penyusun

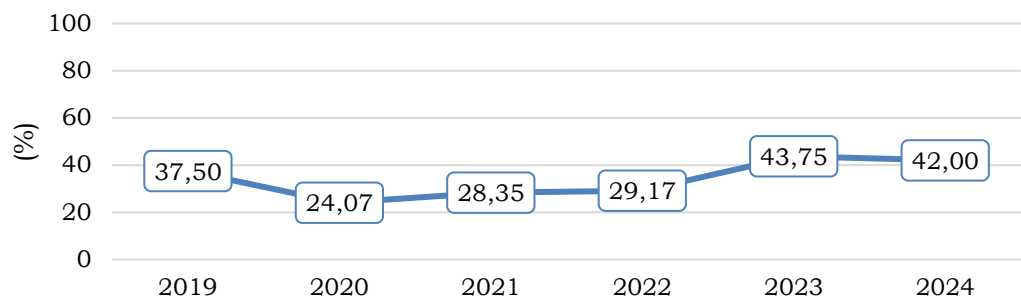
2) Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan didapatkan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga ditambahkan dengan konsumsi di luar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat selama setahun per kapita. Pada lima tahun terakhir, konsumsi ikan Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 mencapai angka 41,26 kg/kapita/tahun. Peningkatan ini dapat berimplikasi bahwa ikan menjadi makanan yang semakin digemari oleh masyarakat.



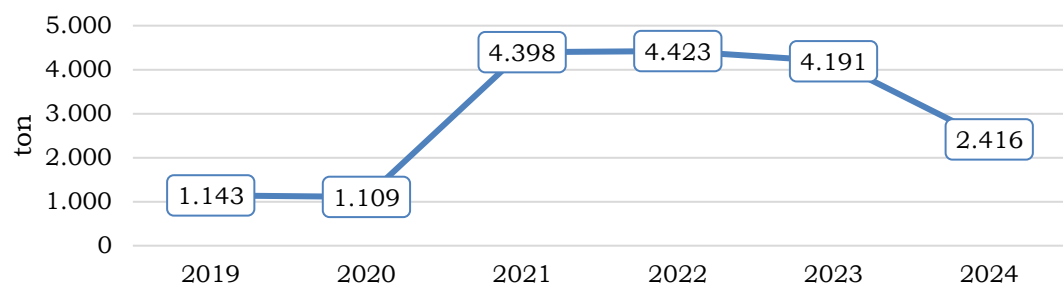
Gambar 2.260
Konsumsi Ikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Data Sektoral dan Opendata, Kabupaten Tangerang 2024

- 3) Cakupan Bina Kelompok Nelayan
- Cakupan bina kelompok nelayan pada Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dalam kurun 2019-2023. Hal ini dapat berimplikasi bahwa upaya pembinaan yang dilakukan pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2023, angka tersebut meningkat drastis hingga 44,75% yang menandakan bahwa upaya kesejahteraan nelayan juga sangat meningkat. Selain itu, pada tahun 2023-2024 hanya ada 1 nelayan (dari 4270 nelayan) yang mendapatkan bantuan permodalan. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas nelayan melalui pengadaan sarana-prasarana serta pendanaan dalam rangka mengakselerasi produktivitas perikanan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.261
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2023

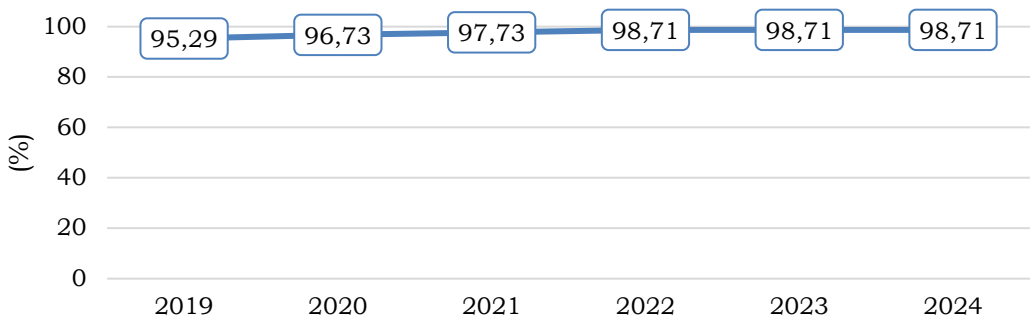
- 4) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
- Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan jumlah produksi ikan/binatang air yang dihasilkan oleh kelompok nelayan dalam kurun waktu tertentu. Di Kabupaten Tangerang, terdapat lonjakan yang tinggi dari tahun 2020 yang hanya 1.109 ton menjadi 4.398 ton pada tahun 2021. Peningkatan ini berimplikasi bahwa kebutuhan perikanan Kabupaten Tangerang semakin meningkat dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2.262
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 - 2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2023 dan 2024

5) Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Dalam lima tahun terakhir proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman terjadi peningkatan di Kabupaten Tangerang. Grafik ini dapat berimplikasi bahwa semakin banyak ikan yang ditangkap aman untuk dikonsumsi karena masih mencapai 98.71% dari batasan 80% tangkapan maksimum lestari Kabupaten Tangerang.

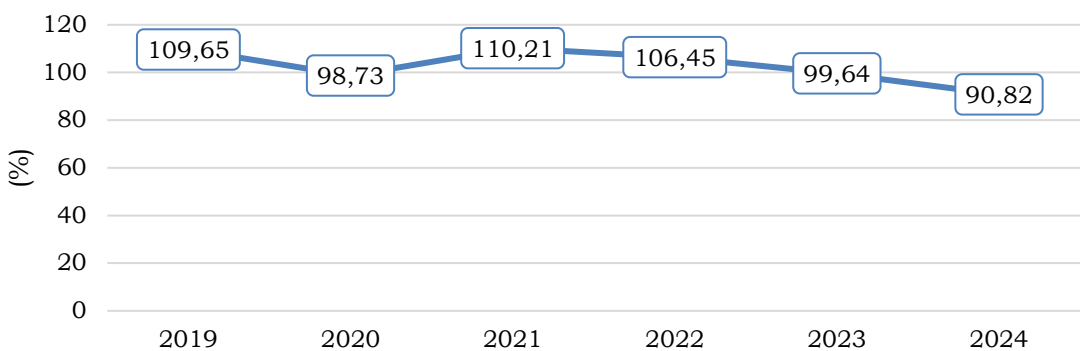


Gambar 2.263
Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman
Kabupaten Tangerang 2019 - 2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2023 dan 2024

6) Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Jika NTN >100, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. NTN = 100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas. Sementara itu, jika NTN <100, kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit.

Dalam lima tahun terakhir, nilai tukar nelayan Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, 2021, dan 2022, nilai NTN lebih dari 100, dan menunjukkan kesejahteraan nelayan lebih baik. Sementara itu, pada tahun 2020 dan 2024 terjadi penurunan nilai NTN. Namun demikian, sektor perikanan Kabupaten Tangerang masih menjadi sumber penghasilan nelayan ke depannya.



Gambar 2.264
Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Tangerang 2019 - 2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2023 dan 2024

2.1.4.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang

A) Administrasi Pemerintahan

1) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan suatu penilaian atas upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pada tahun 2019 hingga 2022, IRB cenderung mengalami peningkatan dengan capaian 62,74 dengan kategori BB/baik, perlu sedikit perbaikan.

Pada tahun 2023, komponen penilaian Indeks RB berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 9 Tahun 2023. Didapatkan perolehan RB General sebesar 65,94 dan RB Tematik sebesar 10,73. Hasil akhir evaluasi menunjukkan bahwa capaian Indeks RB di Kabupaten Tangerang tahun 2023 adalah 76,67 dengan kategori BB, tahun 2024 meningkat menjadi A- atau 84,56.

Tabel 2.40
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 20243

Indeks Reformasi Birokrasi					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
50,37	58,39	58,84	62,74	76,67	84,56

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

2) Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. IPP diukur berdasarkan enam aspek, yaitu (1) kebijakan pelayanan; (2) profesionalisme SDM; (3) sarana dan prasarana; (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); (5) konsultasi dan pengaduan; serta (6) inovasi pelayanan. Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah sebesar 4,12 dan menurun di tahun 2023 menjadi sebesar 4,08, hasil evaluasi RB tahun 2024, nilai IPP menjadi 4,17 di tahun 2024.

Tabel 2.41
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang Tahun 2021 – 2024

Indeks Pelayanan Publik			
2021	2022	2023	2024
3,91	4,12	4,08	4,17

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

3) Indeks Kepuasan Masyarakat

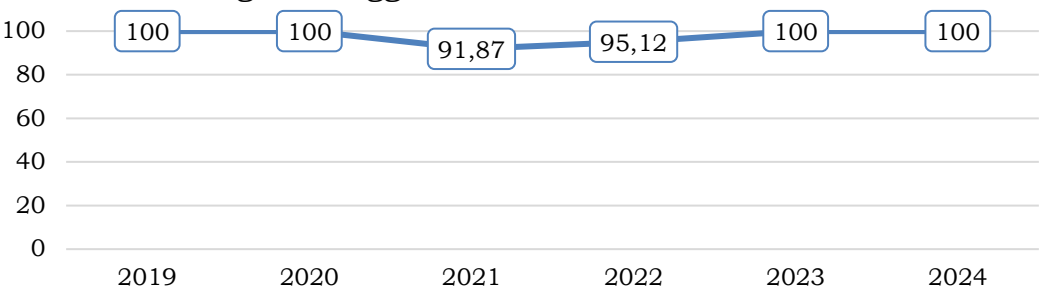
Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja bidang layanan masyarakat. Capaian indeks meningkat di tahun 2020, tetapi terus menurun hingga tahun 2023, sebesar 84,79, tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 85,72. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan instansi pelayanan publik perlu kembali memaksimalkan pelayanan masyarakat.

Tabel 2.42
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
83,66	86,36	85,95	85,18	84,79	85,72

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

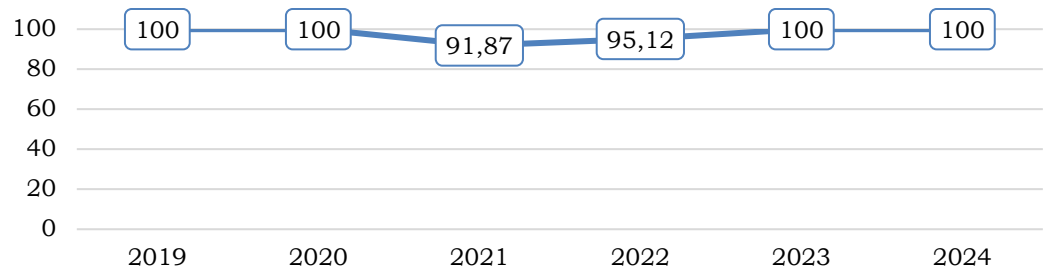
- B) **Perencanaan Pembangunan**
- 1) **Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda**
RPJPD merupakan salah satu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan jangka panjang pembangunan suatu daerah. Selama kurun waktu 2019-2025 terdapat dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dalam Perda sekali 20 tahun, selama tidak ada perubahan terhadap RPJPD.
- 2) **Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD/RPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada**
Selaras dengan RPJPD, dokumen RPD juga menjadi salah satu instrumen perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu daerah, dalam kurun waktu 2024-2026, dalam tiap-tiap tahunnya terdapat dokumen RPJMD/RPD yang telah ditetapkan dalam Perda/Perkada.
- 3) **Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan Perkada**
Dokumen RKPD di wilayah ini juga telah ditetapkan dengan perkada pada tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 2019-2025. Hal ini menunjukkan adanya tindak lanjut dalam perencanaan pembangunan daerah.
- 4) **Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan Perda**
Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang, Kabupaten Tangerang telah memiliki dokumen RTRW yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011 – 2031.
- 5) **Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD**
Secara umum, penjabaran konsistensi program RPJMD dalam RKPD telah terlaksana dengan baik meski mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022. Namun di tahun 2024 capaian tersebut kembali meningkat hingga 100%.



Gambar 2.265
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber: Data Sektoral dan Opendata, Kabupaten Tangerang 2024

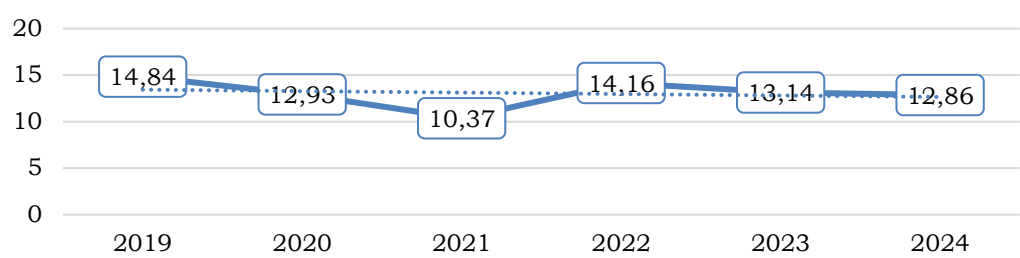
- 6) Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD
- Penjabaran program RKPD dalam APBD belum menunjukkan konsistensi yang baik. Pada tahun 2019 hingga 2020, program RKPD telah dijabarkan dengan baik ke dalam APBD. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi penurunan, meskipun pada tahun 2022 kembali meningkat dan kembali ke capaian 100% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan penjabaran konsistensi untuk dapat mewujudkan perencanaan yang baik di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.266
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam RPJMD Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: Data Sektoral dan Opendata, Kabupaten Tangerang 2024

- C) Keuangan
- 1) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
- Selama 16 tahun berturut-turut, Kabupaten Tangerang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* dari BPK mengenai laporan keuangan Kabupaten Tangerang. Laporan keuangan yang telah disajikan meliputi hal-hal material, posisi keuangan daerah (neraca), laporan arus kas, laporan realisasi anggaran (LRA), serta data-data yang membersamainya. Opini WTP yang ke-17 yang didapatkan oleh Kabupaten Tangerang mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang dilakukan telah disajikan secara wajar, memadai, dan informatif.

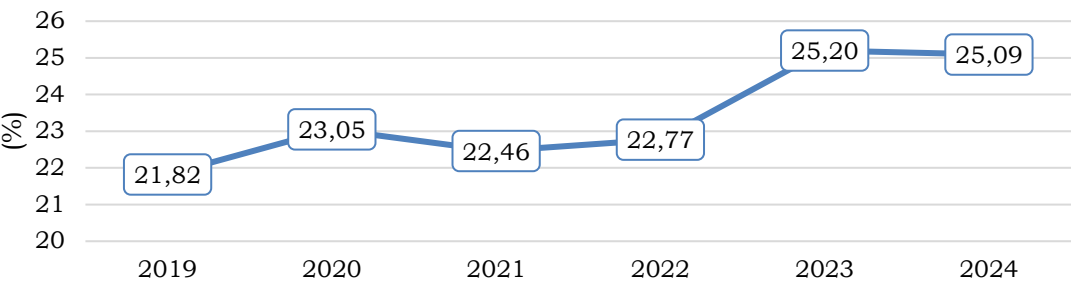
- 2) Persentase SILPA
- SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dalam penyusunan APBD, angka SILPA ini seharusnya mencapai angka nol, yang menandakan bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Tetapi realisasinya, SILPA terbentuk karena pelampauan target pendapatan, tidak tercapainya target realisasi belanja serta SILPA tahun sebelumnya. Pada grafik di bawah, persentase SILPA yang ada menggambarkan besaran transaksi yang berjalan di Kabupaten Tangerang. Persentase SILPA fluktuatif cenderung menurun menandakan mulai stabilnya perencanaan dan penyerapan anggaran.



Gambar 2.267
Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Tangerang 2019 - 2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024

3) Persentase Belanja Pendidikan

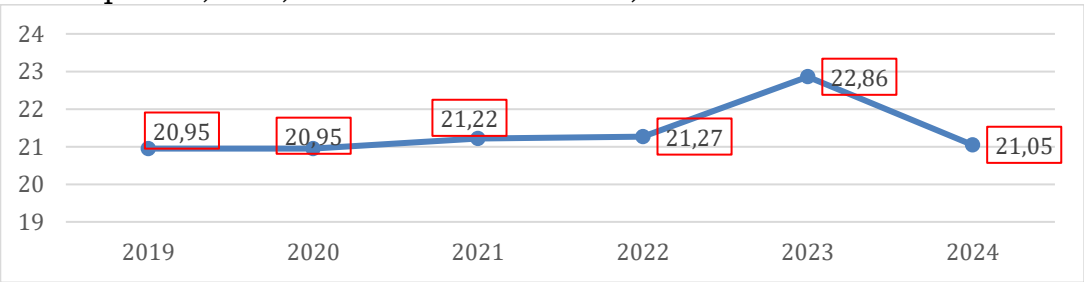
Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kabupaten Tangerang memiliki persentase belanja pendidikan yang stabil meningkat setiap tahunnya. Pada grafik di bawah, dalam tahun 2019 - 2023 persentase yang semula berada di 21,82% stabil pada tahun 2020. Lalu persentase tersebut meningkat terus hingga pada tahun 2023 mencapai 25,20%.



Gambar 2.268
Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: BPKAD2 Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

4) Persentase Belanja Kesehatan

Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan. Kabupaten Tangerang memiliki persentase belanja kesehatan yang stabil meningkat setiap tahunnya. Pada grafik di bawah, dalam tahun 2019 - 2024 persentase yang semula berada di 20,95% stabil pada tahun 2020. Lalu persentase tersebut meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 22,86%, dan 2024 sebesar 21,06%.



Gambar 2.269
Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: BPKAD2 Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

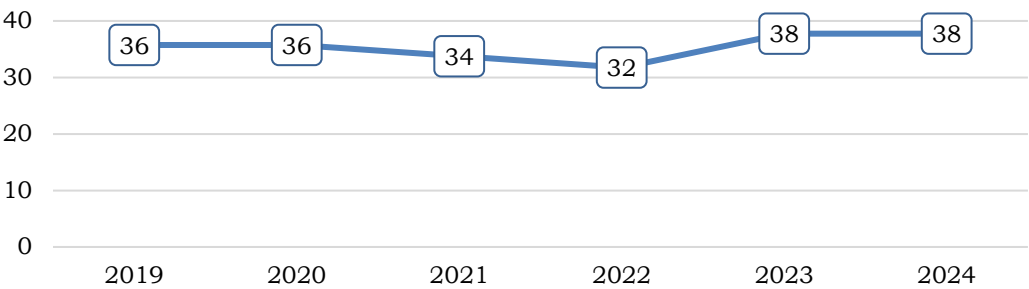
D) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1) Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai di Kabupaten Tangerang mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan layanan di wilayah ini. Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, rata-rata lama pegawai dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan mencapai lima hari. Nilai ini cenderung stagnan dalam kurun waktu 2019 - 2023.

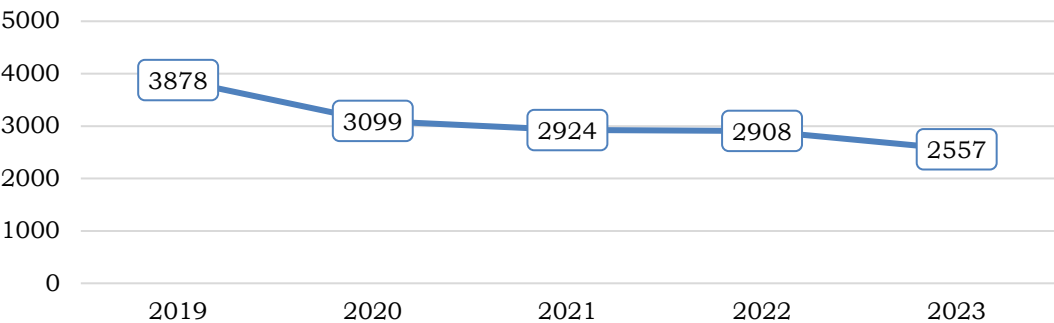
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, pengembangan kompetensi ASN dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, dan/atau pelatihan. Berdasarkan informasi dari instansi terkait, pejabat maupun ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan pelatihan formal masih relatif sedikit.

- 2) Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah
- Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten Tangerang cenderung sama tiap tahunnya, yakni berkisar pada jumlah 32-38 jabatan. Selanjutnya, jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2024, yakni mencapai angka 38 jabatan.



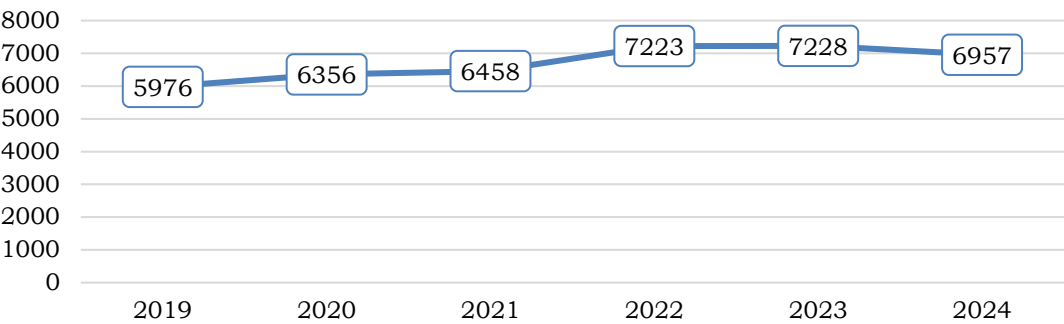
Gambar 2.270
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, 2024

- 3) Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah
- Jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Tangerang mengalami penurunan pada kurun waktu 2019-2023. Pada 2023, terdapat 2557 jabatan administrasi di wilayah ini. Hal ini menunjukkan jabatan administrasi yang semakin terbatas dari waktu ke waktu.



Gambar 2.271
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, 2024

- 4) Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah
- Jabatan fungsional tertentu di pemerintahan Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada kurun waktu 2019-2024. Hal ini menunjukkan bertambahnya jumlah jabatan fungsional tertentu dalam pemerintahan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.272
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, 2024

E) Penelitian dan Pengembangan
1) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur dan menilai penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Di tahun 2023, capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tangerang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebesar 61,49 dengan kategori sangat inovatif, dan tahun 2024 mendapat nilai 63,15.

Tabel 2.43
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

Indeks Inovasi Daerah					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.274	41,16	54,7	54,7	61,49	63,15

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, 2024

- 2) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
- Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan hasil perbandingan antara jumlah kelitbangan (ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah) dalam RKPD dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang mencapai persentase 100% yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang semakin baik dalam implementasi rencana kelitbangan.
- 3) Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
- Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan persentase realisasi program inovasi dan invensi pemerintah. Persentase ini ditentukan dengan jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang memanfaatkan 100% hasil kelitbangan yang menandakan bahwa Kabupaten Tangerang terus berkembang untuk menerapkan nilai praktis dan konteks keilmuan.
- 4) Penerapan SIDA : Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah
- Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan adalah persentase hasil perbandingan antara jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dengan jumlah inovasi yang diusulkan. Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDA. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang mencapai persentase 100%. Hal ini menandakan bahwa penerapan kebijakan inovasi di Kabupaten Tangerang telah semakin berkembang.
- 5) Jumlah Inovasi yang diimplementasikan
- Jumlah inovasi daerah yang diimplementasikan merupakan banyaknya dokumen inovasi daerah yang disusun oleh seluruh perangkat daerah dan ditetapkan oleh keputusan kepala daerah. Kabupaten Tangerang memiliki peningkatan jumlah inovasi yang diimplementasikan dalam lima tahun terakhir (2019-2023). Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah semakin inovatif dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan potensi-potensi yang ada.

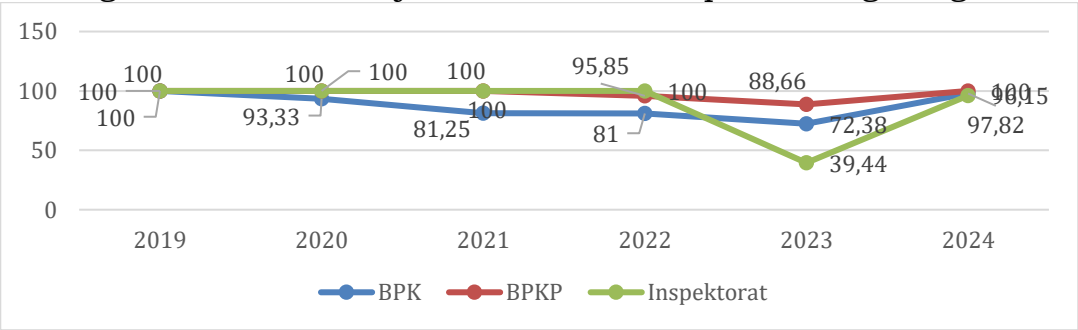
Tabel 2.44
Kebijakan Inovasi yang Diimplementasikan Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 – 2023

Jumlah Inovasi yang diimplementasikan				
2019	2020	2021	2022	2023
45	45	56	68	81

Sumber: SK Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang dan RPJMD Perubahan Kabupaten Tangerang 2019-2024

F) Pengawasan
1) Persentase Tindak Lanjut Temuan

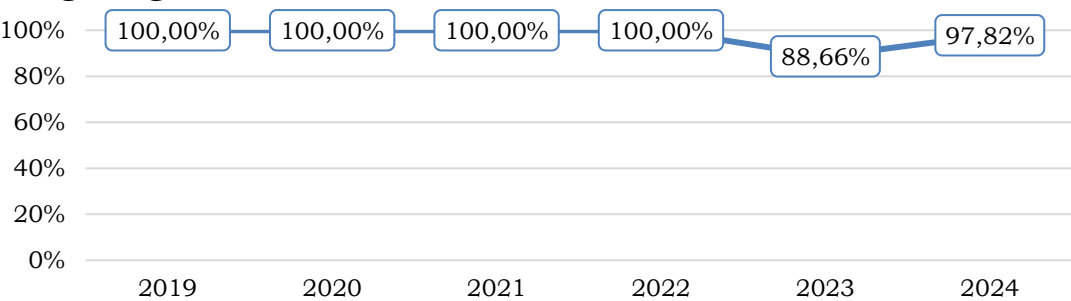
Persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten Tangerang belum sempurna. Baik temuan dari BPK maupun Inspektorat, masih menunjukkan adanya temuan yang belum ditangani. Hal ini semakin menurun dan pada 2023 mencapai nilai terendah dalam kurun waktu 2019-2023. Hal ini memerlukan pengoptimalan untuk meningkatkan tindak lanjut temuan di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.273
Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Inspektorat Kabupaten Tangerang, 2024

2) Jumlah Temuan BPK

Jumlah temuan BPK merupakan temuan yang didapatkan dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jumlah temuan ini mencerminkan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Tangerang. Jumlah temuan BPK di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 2019-2022 dan menurun di tahun 2023. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya sistem pelaporan pemerintahan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.274
Jumlah Temuan BPK Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: BPK Kabupaten Tangerang, 2024

G) Sekretariat Dewan

1) Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan Kabupaten

Rencana kerja tahunan merupakan pedoman bagi sekretariat dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang juga menunjukkan kegiatan akan terlaksana dengan lebih efisien.

Kabupaten Tangerang telah menyediakan rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD kabupaten dalam kurun waktu 2019-2023.

- 2) Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Tersusunnya dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam RPJMD dan RPJPD dapat meningkatkan keselarasan visi, misi, dan isu strategis daerah yang akan diselesaikan dengan program kerja DPRD. Kabupaten Tangerang telah melakukan integrasi program kerja DPRD dalam RPJMD dan RPJPD dalam tahun 2019-2023.

- 3) Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Program kerja DPRD Kabupaten Tangerang telah terintegrasi dalam kurun waktu 2019-2023 pada dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD, baik untuk fungsi pengawasan, pembentukan perda, serta fungsi anggaran.

2.1.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci (IKK) yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah. Pengukuran IKK sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

Tabel 2.45
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92.114954
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	108.90136
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95.604786
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	88.322296

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian
			yangberpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0.8668367
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
1.b.12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100
1.b.13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100
1.b.14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	0
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	6.4153543
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	61.250814
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96.890798

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian
		Penataan Ruang		
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	99.252137
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	95.18542
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100
1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	3.0558097
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2.8871808
1.d.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	38.436045
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	73.969868
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	14.67
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	60
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.1367787
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21.899612
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	48.085443
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	76.73302
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	77.949733
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100
2.g.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	4.0696424
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	95.68004
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	97.617351
2.i.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	4.8926551

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian
2.i.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0
2.i.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0
2.i.6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0
2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	55.87
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	63.500023
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	25
2.k.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99.999675
2.k.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	58.242353
2.k.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	91.359312
2.k.1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	72.881356
2.l.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100
2.l.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	41.860465
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	1.84
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	75.570052
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	4.8528049
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0.4
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0.35

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100
2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	6.0402685
2.p.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	4.0156693
2.q	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-11.50746
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.0194772
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1.1490255
2.r.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	37
2.s.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100
2.s.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100
2.t	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	93.953488
2.u	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	0
2.v.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	69.34
2.v.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	52.7
2.w.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	100
2.w.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100
3.a	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	101.45655
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	19.955477
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	19.939557
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	96.608948

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.5606476
3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	15.298588
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	493.72664
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	-30.78286
3.d	Urusan Pilihan	Kehutanan		100
3.e	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0
3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	47.513268
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku;	100
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	22.509703
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	146.58
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	5.0719823
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0
3.g.5	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100
3.g.6	Urusan Pilihan	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100
3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	100
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	8.5910318
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	54.293216
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3
4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	62.232102
4.a.6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	10
4.b.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0
4.b.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	35.811543

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian
4.b.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	25.708
4.b.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	22.454442
4.c.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	79.275591
4.c.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22.771654
4.c.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100
4.d.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	13.481535
4.d.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	24.00089
4.d.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	4
4.d.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	10.021277
4.e.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units);	95.841377
4.e.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information	100

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Tangerang yang belum terpenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota
- b) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota
- c) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
- d) Tersedianya tanah untuk Masyarakat
- e) Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
- f) Terlestarikannya Cagar Budaya
- g) Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota
- h) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
- i) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.yang ditandatangani pada kuartal pertama

IKK tersebut diatas tidak ada datanya karena bukan Kewenangan pemerintah Kabupaten Tangerang, sedangkan untuk IKK Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama, akan ditindaklanjuti pada tahun 2026.

2.1.6 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. APBD dialokasikan secara tegas dan jelas untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Capaian SPM Kabupaten Tangerang meliputi SPM pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Pemerintah daerah menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance* dan SPM sebagai usaha pemerintah daerah untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin SPM dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah, maka penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Tabel di bawah ini merupakan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.46
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					98.53%
1 .	Pendidikan Anak Usia Dini					97.75%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	89816	89816	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.75%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	88.74%
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	72.07	27.93	72.07%
	2 . Angka partisipasi murni	%	72.07	33.65	38.42	46.69%
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	54.64	49.02	5.62	89.71%
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	57.96	55.01	2.95	94.91%
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0.13	0.19	-0.06	100.00%
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	6.98	6.98	0	100.00%
	7 . Indeks distribusi guru	%	0.21	0.2	0.01	95.24%
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	23.8	32.4	-8.6	100.00%
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	0.09	0.18	-0.09	100.00%
2 .	Pendidikan Dasar					99.82%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	516997	516997	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.82%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	99.10%
	SD (2024)					98.50%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	104.12	-4.12	100.00%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.39	0.61	99.39%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	60.06	66.56	-6.5	100.00%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	47.87	60.83	-12.96	100.00%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3.06	3.78	-0.72	100.00%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.65	1.51	0.14	91.52%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	68.95	72.26	-3.31	100.00%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	67.04	70.7	-3.66	100.00%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55.17	54.46	0.71	98.71%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	27.5	6.98	20.52	100.00%
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.33	0.3	0.03	90.91%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	86.55	27.16	59.39	100.00%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	24.4	63.95	-39.55	100.00%
	SMP (2024)					99.70%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	106.93	-6.93	100.00%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	97.49	2.51	97.49%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	56.12	60.18	-4.06	100.00%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	40.04	55.34	-15.3	100.00%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	4	6.26	-2.26	100.00%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.45	3.13	-1.68	100.00%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	64.86	65.07	-0.21	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	63.41	68.54	-5.13	100.00%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54.58	53.84	0.74	98.64%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	43	5.12	37.88	100.00%
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.28	0.28	0	100.00%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	85.1	29.26	55.84	100.00%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	15.2	60.09	-44.89	100.00%
3 .	Pendidikan Kesetaraan					98.03%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	16004	16004	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.03%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	90.15%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	69.79	30.21	69.79%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	38.85	61.15	38.85%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	12.87	29.82	-16.95	100.00%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	18.93	34.44	-15.51	100.00%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	2.64	1.92	0.72	72.73%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.36	2.09	-0.73	100.00%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	61.41	60.68	0.73	98.81%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	59.52	57.63	1.89	96.82%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53.55	50.83	2.72	94.92%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100.00%
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	100.00%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00%
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KESEHATAN		TUNTAS UTAMA			99.74%
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	61053	61053	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	49800	49800	0	100.00%
	2 . Tablet tambah darah	Tablet	10989540	10989540	0	100.00%
	(180 tablet x jumlah ibu hamil)					
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	61053	61053	0	100.00%
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	61053	61053	0	100.00%
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	61053	61053	0	100.00%
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	9158	9158	0	100.00%
	(proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)					
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	61053	61053	0	100.00%
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	61053	61053	0	100.00%
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	61053	61053	0	100.00%
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	61053	61053	0	100.00%
	11 . Gel USG	Botol	4070	4070	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	(untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)					
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	Orang	160	160	0	100.00%
	(angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"					
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	351	351	0	100.00%
	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)					
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1472	1472	0	100.00%
	(angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)					
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	72	72	0	100.00%
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	72	72	0	100.00%
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	61053	61053	0	100.00%
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	58410	58410	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Formulir partograf	Formulir	58410	58410	0	100.00%
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	58410	58410	0	100.00%
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	58410	58410	0	100.00%
	(Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	58410	58410	0	100.00%
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	160	160	0	100.00%
	(angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)					
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Paket	1472	1472	0	100.00%
	(angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)					
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	351	351	0	100.00%
	(angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)					
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	72	72	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	72	72	0	100.00%
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					99.63%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	55500	55500	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.63%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	98.14%
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	55500	41028	14472	73.92%
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	55500	55500	0	100.00%
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	55500	55500	0	100.00%
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	55500	55500	0	100.00%
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	166500	166500	0	100.00%
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	55500	55500	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	72	72	0	100.00%
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	160	160	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1438	1438	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	345	345	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	72	72	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	49	49	0	100.00%
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	64	64	0	100.00%
	14 . Kader Kesehatan	Orang	6162	6162	0	100.00%
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					98.73%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	284085	284085	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.73%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	93.63%
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	284085	284085	0	100.00%
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	284085	284085	0	100.00%
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	284085	284085	0	100.00%
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	284085	284085	0	100.00%
	(sesuai standar 6-11 bulan)					
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	284085	284085	0	100.00%
	(sesuai standar 12-59 bulan)					
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	56590	56590	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	225456	225456	0	100.00%
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	112728	82785	29943	73.44%
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	169092	78496	90596	46.42%
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	56364	56364	0	100.00%
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	68867	31969	36898	46.42%
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	68867	68867	0	100.00%
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	284085	284085	0	100.00%
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	284085	284085	0	100.00%
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	72	72	0	100.00%
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	158	158	0	100.00%
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1198	1198	0	100.00%
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	309	309	0	100.00%
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	86	86	0	100.00%
	20 . Guru PAUD	Orang	1926	1926	0	100.00%
	21 . Kader Kesehatan	Orang	10422	10422	0	100.00%
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	556948	556948	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Buku	445558	445558	0	100.00%
	(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)					
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	445558	445558	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)					
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	445558	445558	0	100.00%
	(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)					
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	445558	445558	0	100.00%
	(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)					
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	445558	445558	0	100.00%
	(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)					
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	133259	133259	0	100.00%
	(Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)					
	7 . Alat Pemeriksaan Hb	Alat	44	44	0	100.00%
	(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)					
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	44	44	0	100.00%
	(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)					
	9 . Media promosi kesehatan	Paket	44	44	0	100.00%
	(Media khusus remaja sehat)					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	266664	266664	0	100.00%
	(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)					
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	263	263	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1454	1454	0	100.00%
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	363	363	0	100.00%
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	76	76	0	100.00%
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	72	72	0	100.00%
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	75	75	0	100.00%
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	3923	3923	0	100.00%
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	10726	10726	0	100.00%
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					98.56%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2246044	2246044	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.56%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	92.82%
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	49	49	0	100.00%
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	274	274	0	100.00%
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	44	44	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	4 . Alat : Glukometer	Unit	44	44	0	100.00%
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	44	44	0	100.00%
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	2246044	2246044	0	100.00%
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	44	21	23	47.73%
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	21027	21027	0	100.00%
	9 . Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	44	44	0	100.00%
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	44	44	0	100.00%
	(Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)					
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	88	88	0	100.00%
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	44	44	0	100.00%
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	92599	14676	77923	15.85%
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	133	133	0	100.00%
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	731	731	0	100.00%
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	305	305	0	100.00%
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	86	86	0	100.00%
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	56	56	0	100.00%
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	173	173	0	100.00%
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	192092	192092	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	44	44	0	100.00%
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	44	44	0	100.00%
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	44	44	0	100.00%
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	192092	192092	0	100.00%
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	152073	152073	0	100.00%
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	152073	152073	0	100.00%
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	44	44	0	100.00%
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	155	155	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1440	1440	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	356	356	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	76	76	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	69	69	0	100.00%
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	987	987	0	100.00%
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	729628	729628	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	130	130	0	100.00%
	(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)					
	2 . Obat Hipertensi	Paket	729628	729628	0	100.00%
	3 . Tensimeter	Unit	44	44	0	100.00%
	(mengukur tekanan darah)					
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	44	44	0	100.00%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	230	230	0	100.00%
	(peningkatan pengetahuan masyarakat)					
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	129	129	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	703	703	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	296	296	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	44	44	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	44	44	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	44	44	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	56	56	0	100.00%
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	43632	43632	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	43632	43632	0	100.00%
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	44	44	0	100.00%
	(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)					
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	43632	43632	0	100.00%
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	44	44	0	100.00%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	528	528	0	100.00%
	(minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)					
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	128	128	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	684	684	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	295	295	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	44	44	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	53	53	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	65	65	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	44	44	0	100.00%
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4255	4255	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	88	88	0	100.00%
	bentuk fisik atau elektronik)					
	2 . Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	4255	4255	0	100.00%
	(pengobatan/medikasi)					
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	4255	4255	0	100.00%
	(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)					
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	100	100	0	100.00%
	(pencatatan dan pelaporan)					
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	271	271	0	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	44	44	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	44	44	0	100.00%
	(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)					
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	44	44	0	100.00%
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	6	6	0	100.00%
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	48636	48636	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	46	46	0	100.00%
	2 . Reagen Zn TB	Kit	608	608	0	100.00%
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	2455	2455	0	100.00%
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	97272	97272	0	100.00%
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	38908	38908	0	100.00%
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	48636	48636	0	100.00%
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	46	46	0	100.00%
	8 . Tuberkulin	Vial	1042	1042	0	100.00%
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	46	46	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	46	46	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	46	46	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	44	44	0	100.00%
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	46	46	0	100.00%
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	2	2	0	100.00%
	15 . Kader Kesehatan	Orang	44	44	0	100.00%
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	82235	82235	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	46	46	0	100.00%
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	82235	82235	0	100.00%
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	82235	82235	0	100.00%
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	82235	82235	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	46	46	0	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	46	46	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	46	46	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	46	46	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	44	44	0	100.00%
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	44	44	0	100.00%
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2594448	2594448	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	JARINGAN PERPIPAAN					
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	648612	648612	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	648612	648612	0	100.00%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	5642	5642	0	100.00%
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	5642	5642	0	100.00%
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	24284	32244	-7960	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	3471	3471	0	100.00%
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	2600	4590	-1990	100.00%
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	3471	3471	0	100.00%
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00%
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					<u>3603</u>
	Download SK Yang Telah Di Upload <u>3603-20250110083306</u> Surat BPBD ke 1.pdf					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	40	40	0	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	10	10	0	100.00%
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00%
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00%
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00%
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-100%	100.00%
	Ada Relokasi Program Pemerintah					<u>3603</u>
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1.PENDATAAN					
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH	DOWNLOAD		100		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	DOWNLOAD		100		
	2.PERHITUNGAN					
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	DOWNLOAD		100		
	3.PERENCANAAN					
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :	DOWNLOAD		100		
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :	DOWNLOAD		100		
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					100.00%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	350	350	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	1710	1710	0	100.00%
	(jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)					
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	Dokumen	19	19	0	100.00%
	(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)					
	Data Dukung : 3603-20241016013147SOP Satpol PP.pdf Status : Approved					
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	447	447	0	100.00%
	(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100.00%
	Data Dukung : 3603-20241115091515Standar Pelayanan.pdf Status : Approved					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0	0	0	100.00%
	(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)					
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	0	0	0	100.00%
	(pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)					
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	103092	103092	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	1	1	0	100.00%
	(tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)					
	Data Dukung : 3603-20240930015645LAMPIRAN RPB Kabupaten Tangerang Final EDIT 2 BAGHUK 0792023.docx Status : Approved					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	7705	7705	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang	150	150	0	100.00%
	(tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)					
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	60	60	0	100.00%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	590	590	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	Unit	151	151	0	100.00%
	(seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)					
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang	590	590	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	(terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)					
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	25000	25000	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Posko	1	1	0	100.00%
	(terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)					
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	25000	25000	0	100.00%
	(penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)					
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana	Dokumen	1	1	0	100.00%
	(penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)					
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Layanan	0	0	0	100.00%
	(respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)					
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	5	5	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					100.00%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3000	3000	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	250	250	0	100.00%
	(Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)					
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	3	3	0	100.00%
	(seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)					
	Data Dukung : 3603-20240704032832SOP Kedaruratan dan Logistik.zip Status : Approved					
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	562	562	0	100.00%
	(pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)					
	4 . Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	200	200	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	(jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)					
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	250	250	0	100.00%
	(korban jiwa langsung)					
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	250	250	0	100.00%
	(korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)					
A	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00%
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	145	145	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	145	145	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
	2 . Penyediaan permakanan	Orang	145	145	0	100.00%
	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)					
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100.00%
	(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)					
	4 . Penyediaan sandang	Orang	25	25	0	100.00%
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)					
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	110	110	0	100.00%
	(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)					
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	145	145	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	145	145	0	100.00%
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	145	145	0	100.00%
	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	11	11	0	100.00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	145	145	0	100.00%
	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)					
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	0	100.00%
	(pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)					
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
	13 . Layanan rujukan	Orang	25	25	0	100.00%
	(layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)					
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	125	125	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	125	125	0	100.00%
	layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	4	4	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)					
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	125	125	0	100.00%
	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)					
	4 . Penyediaan sandang	Orang	100	100	0	100.00%
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)					
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	125	125	0	100.00%
	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	125	125	0	100.00%
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	125	125	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	12	12	0	100.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	125	125	0	100.00%
	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)					
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	9	9	0	100.00%
	(pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)					
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	7	7	0	100.00%
	(pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
	12 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00%
	(layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)					
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	125	125	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	125	125	0	100.00%
	layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	2	2	0	100.00%
	(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)					
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	125	125	0	100.00%
	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)					
	4 . Penyediaan sandang	Orang	100	100	0	100.00%
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)					
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	50	50	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)					
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	125	125	0	100.00%
	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	125	125	0	100.00%
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	125	125	0	100.00%
	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	20	20	0	100.00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	125	125	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)					
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	0	100.00%
	(pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)					
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100.00%
	(pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
	13 . Layanan rujukan	Orang	3	3	0	100.00%
	(layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)					
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	110	110	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	110	110	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100.00%
	layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis					
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	110	110	0	100.00%
	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)					
	4 . Penyediaan sandang	Orang	25	25	0	100.00%
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)					
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	110	110	0	100.00%
	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	110	110	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	110	110	0	100.00%
	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	10	10	0	100.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	110	110	0	100.00%
	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)					
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	100	100	0	100.00%
	(pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)					
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	100	100	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	(pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
	12 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00%
	(layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)					
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	900	914	-14	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	900	914	-14	100.00%
	(penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)					
	2 . Penyediaan sandang	Orang	600	644	-44	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
	(pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	3	3	0	100.00%
	(tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)					
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	20	20	0	100.00%
	(merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)					
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	20	20	0	100.00%
	(upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)					

<https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

2.1.7 PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memainkan peranan yang penting bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD disamping pajak dan retribusi, sehingga pengelolaan BUMD membutuhkan penanganan yang serius dan profesional berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi: transparency, accountability, responsibility, independency, fairness.*

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang memiliki 5 (Lima) Badan Usaha Milik Daerah yaitu;

1. PDAM TIRTA KERTA RAHARJA

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (PERUMDAM TKR) pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10/Huk/1976 tanggal 13 April 1976 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Kabupaten Tangerang, yang beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.

Maksud pendirian PERUMDAM TKR yaitu melaksanakan Penyelenggaraan SPAM bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang. Pendirian PERUMDAM TKR bertujuan untuk:

- a) Menyediakan Air Minum bagi masyarakat, khususnya di Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- b) Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c) Tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pemerintah Daerah, PERUMDAM TKR dan masyarakat;
- d) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah melalui dividen; dan
- e) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

2. PD. PASAR NIAGA KERTA RAHARJA

Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, didirikan dengan Perda No 25 Tahun 2004, tertanggal 14 Juli 2004, yang telah diperbaharui dengan Perda No 03 Tahun 2013 tentang perubahan pertama Perda No 25 Tahun 2004 dan Perda No 17 Tahun 2014 Tentang perubahan kedua Perda No. 25 Tahun 2004 dan beroperasi pada tahun 2005. Dalam perjalanannya pengelolaan PD Pasar tidaklah mudah, karena dalam transisi peralihan system pengelolaan pasar dari Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (KUPT) ke sistem Perusahaan sangat berbeda.

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja, maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja, adalah sebagai berikut;

- a) Membangun, memelihara dan mengembangkan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b) Menyediakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- c) Memberikan dukungan dan kontribusi dalam mendukung kebijakan serta program Pemerintah Daerah dibidang ekonomi, perdagangan, ketahanan pangan, perlindungan konsumen serta bidang terkait lainnya;

- d) Membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah;
- e) Melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang pasar;
- f) Memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan asset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktifitas dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
- g) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3. PT. MITRA KERTA RAHARJA

PT Mitra Kerta Raharja (Perseroda) pada awalnya berbadan hukum Perseroan Terbatas yang merupakan Holding Company yang didirikan dengan dasar hukum Perda Kab. Tangerang No. 19 tahun 2006 tentang pendirian PT Mitra Kerta Raharja (Perseroda). PT Mitra Kerta Raharja (Perseroda) didirikan berdasarkan akta notaris di Tangerang Nomor 14 tanggal 11 September 2007. Akte pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan SK. No: AHU - 01866-AH.01.01 tanggal 5 Januari 2008. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2019 yang merubah nomenklatur dari Perseroan Terbatas Mitra Kerta Raharja menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

PT Mitra Kerta Raharja (Perseroda) berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan sesuai Perda Kab. Tangerang No. 10 tahun 2019 melakukan usaha di bidang agrobisnis dan jasa parkir, farmasi, kepelabuhanan, keuangan, dan permodalan, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, bandara dan dermaga, multimedia, pasar, air bersih, pengelolaan air limbah, perbengkelan, persampahan, jasa konstruksi, pariwisata, perparkiran, pengelolaan jalan tol dan periklanan.

4. PT. LKM ARTHA RAHARJA

PT LKM Artha Kertaraharja (Perseroda) Kabupaten Tangerang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan 10 Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 04 Tahun 2015 tentang "Perubahan Lembaga Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan Terbatas", berdiri tahun 2015 dan berdasarkan Akta Pendirian No. 32 Tanggal 21 Desember 2015 yang diaktakan oleh Notaris Syahrudin, SH. di wilayah Pandeglang, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-2473998.AH.01.01. Tahun 2015, pada Perda No 8 Tahun 2019, terdapat perubahan badan hukum dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang diaktekan dalam akta notaris No. 10 tanggal 30 Juli 2020 oleh Notaris Nur Aziz Hakim, SH, MM, MKn. di Tangerang serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0054385.AH.01.02. tahun 2020.

Tujuan dari Pendirian PT. LKM. Artha Kerta Raharja adalah;

- a) Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b) Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat;
- c) Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir;

- d) Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah;
- e) Meningkatkan kualitas pengelolaan investasi Daerah;
- f) Mengoptimalkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
- g) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

5. PD. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG

Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kerta Raharja didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2007, tanggal 6 Juni 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dan telah mendapat izin operasional dari Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/3/Kep.GBI/DpG/2008, tanggal 22 Januari 2008 serta mulai melaksanakan kegiatan operasional sejak tanggal 08 Februari 2008. Berdasarkan pendiriannya PD. BPR Kerta Raharja merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang Keuangan/Perbankan dan penggerak serta pendorong laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan. PD. BPR Kerta Raharja berkedudukan di Jalan Raya Serang KM. 15 No. 1 Cikupa Kabupaten Tangerang dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Tangerang dan sekitarnya.

Tujuan dari Pendirian PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG adalah;

- a) Membantu mendinging pertumbuhan ekonomi kerakyatan;
- b) Membantu mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
- c) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 2.47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

BUMD	STATUS	AUDITED KEUANGAN	PERMODALAN
Perumda Air Minum Tirta Kertaraharja	Sehat	Akuntan Publik	Pemda Kab. Tangerang : 36%
		Independen	Pemerintah Pusat : 3%
		Karsono Soewito	Lainnya : 61%
Perumda Pasar Niaga Kertaraharja	Sehat	Akuntan Publik	Pemda Kab. Tangerang :
		Independen	Rp. 21,173,385,042,- (100%)
		Sukardi Hasan & Rekan	
Perseroda Lembaga Keuangan Mikro Artha Kertaraharja	Sehat	Akuntan Publik	Pemda Kab. Tangerang : 76,57%
		Independen	Pemprov. Banten : 11,12%
		Anderson & Partner	Pemprov Jawa Barat : 12,31%

Perseroda Bank Perkreditan Rakyat Kertaraharja Gemilang	Sehat	Akuntan Publik	Pemda Kab. Tangerang : 79,34%
		Independen	Pemprov. Banten : 20%
		Sabar Dan Publik	Pemprov Jawa Barat : 0,24%
			Bank BJB : 0,42%
Perseroda Mitra Kertaraharja	Sehat	Akuntan Publik	Pemda Kab.Tangerang : (53%)
		Independen	Swasta: (47%)
		Sukardi Hasan & Rekan	

2.1.8 KERJASAMA DAERAH

Kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Menjalin kerjasama dengan pemerintah kota- kota lain di dalam maupun luar negeri menjadi sesuatu kebutuhan, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya agar kerjasama yang telah dilakukan dapat terus berkembang, baik jumlah mitra kerjasama maupun kualitas program dan kegiatan kerjasama dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Tangerang sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, manusiawi, bermartabat, dan berwawasan lingkungan.

Di dalam negeri maupun di luar negeri adalah Pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang baik dengan lembaga/instansi sebagai berikut:

Tabel 2.48
Kerjasama Antar Daerah Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024

NO	SUBJEK		JUDUL	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
	MITRA KERJA SAMA	OPD					
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD)							
TW I							
1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU		KERJASAMA PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK	B/0004.4.7.1/4460 - TAPEM/MOU/2024 100.3.7.1/KB.06/T APEM/2024	04/03/2024	PELAYANAN PUBLIK	5 TAHUN
TW II							
1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN		KERJA SAMA ANTAR DAERAH	100.3.7/12/KS-K B/000.4.7.2/6979-TAPEM	26-042024	PELAYANAN PUBLIK	5 TAHUN
2	DINAS KOPRASI, USAHA KECIL MENENGAH,TENAGA KERJA,DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN	PEMBANGUNAN, PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DI SATUAN PEMUKIMAN LAGADING KAWASAN	100.3.7.1/13/KS-PKS B/000.4.7.2/6980-TAPEM	26-04-2024	PEMBANGUNAN DAERAH	5 TAHUN

NO	SUBJEK		JUDUL	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
	MITRA KERJA SAMA	OPD					
	PROPINSI SULAWESI TENGAH		TRANSMIGRASI PITU RIASE KECAMATAN PITU REASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN				
3							
TW III							
TW IV							
1	PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN		KERJASAMA ANTAR DAERAH	100.3.7.1/422-Bag.Tapem/2024 B/000.4.7.2/12604 - Bag.Tapem/XI/2024	18/11/24	KERJASAMA ANTAR DAERAH	5 TAHUN
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)							
TW I							
1	SEKOLAH TINNGI ILMU KESEHATAN MAYAPADA		TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	417.1/4213-Tapem/MOU/2024 001/STIKES-M/PKS/II/2024	02/19/2024	PENDIDIKAN	2 TAHUN
2	UNIVERSITAS GAJAH MADA		TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	B/000.4.7.1/4469-TAPEM/MOU/2024 2956/UNI.P/HK.08.00/2024	03/05/24	PENDIDIKAN	5 TAHUN
3	PT TANGGUH ARSHAKA INDONESIA	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAM KABUPATEN TANGERANG	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA	418.4/3894-TAPEM/PKS/2024 01/PK-TAI/I/2024	24-01-2024	LIMBAH DOMESTIK	2 TAHUN
4	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN	DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG	PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN KEFARMASIAN DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS, PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	417.1/4057-TAPEM/PKS/2024 002/PKS-FIKES-UPH/II/2024	07/02/24		3 TAHUN
TW II							
1	PT LAUTAN AIR INDONESIA		PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAANTAN GGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG	B/000.4.7.1/9148/V/Tapem/2024 033/Perj.Leg.LAI/V /2024	31/05/24	TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN	2 TAHUN
2	YAYASAN WAHANA VISI INDONESIA		PENYELENGGARAA N PENANGULANGAN BENCANA	249/KUAT/UrbanJ KT/VI/2024 B/000.4.7.2/9452-Tapem/Mou/2024	21/06/24	PENYELENGGARAA N PENANGGULANGAN BENCANA DI kABUPATEN tANGERANG	5 TAHUN
3	PT.INDAH KAPUK DAUA TBK		PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG	B/000.4.7.1/9516-TAPEM/VI/2024 001/MoU/PIK2-PEMKAB.TGR/VI/2024	26/06/24	PEMBANGUNAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNAGAN PERUSAHAAN	2 TAHUN

NO	SUBJEK		JUDUL	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
	MITRA KERJA SAMA	OPD					
4	PT LAUTAN AIR INDONESIA	DINAS PERUMAHAN,P EMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA	B/000.4.7.2/9149/V/2024 034/Perj.Leg.LAI/V/2024	31/05/24	LIMBAH	2 TAHUN
5	PT. Pantai Indah Kapuk Dua TBK	Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang	Program Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tangerang	B/00.4.7.2/9517-TAPEM/VI/2024 003/PKS/PIK2-DINKES/VI/2024	26/06/24	Pencegahan Penurunan Stunting	5 Tahun
TW III							
1	PT BALMER LAWRIE INDONESIA		PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAN DI KABUPATEN TANGERANG	B/000.4.7.1/10029-Tapem/VII/2024 01/BLI-HSE/MOU/VII/2024	15/07/2024	TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAN	2 TAHUN
2	PT MULYA ROHIMAH RAYA		PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAN DI KABUPATEN TANGERANG	B/000.4.7.1/10628-TAPEM/VIII/2024 056/MRR/VIII/2024	20/08/2024	LIMBAH DOMESTIK	2 TAHUN
3	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA)Tbk		PENYEDIAAN SARANA PRASARANA DAN PEMANFAATAN PRODUK, JASA DAN LAYANAN PERBANKAN DI KABUPATEN TANGERANG	B/000.4.7.1/10690-Tapem/MoU/2024 008/MOU/DIR-BB/VIII/2024	08/23/2024	LAYANAN PERBANKAN	3 TAHUN
4	PT PLN INDONESIA POWER UBP BANTEN 3 LONTAR		PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAN (TJSL) DI KABUPATEN TANGERANG	B/000.4.7.1/10999-TAPEM/MoU/2024 0008.MoU/LIT.00.04/PLNIP150000/2024	05/09/24	TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAN	5 TAHUN
5	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	B/000.4.7.1/10410-TAPEM/VIII/2024 010/MOU-APT/UTA'45/VIII/24	05-08-2024	PENDIDIKAN	2 TAHUN
6	SEKOLAH TINNGI ILMU KESEHATAN BANTEN	TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	B/000.4.7.1/10373-TAPEM/VIII/2024 023/MOU/043231	01-08-2024	PENDIDIKAN	2 TAHUN
7	UNIVERSITAS YARSI PRATAMA	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	B/000.4.7.2//10878-TAPEM/IX/2024 089/MOU-YUP/IX/2024	03-09-2024	PENDIDIKAN	5 TAHUN
8	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG	DINAS PEMUDA,OLAH RAGA,KEBUDAYAAN, DAN PARAWISATA KABUPATEN TANGERANG	PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA PARAWISATA MELALUI PROGRAM REFORMA AGRARIA	016/SKB-36.03.NT/VII/2024 B/000.4.7.2/10313-TAPEM/VII/2024	31-07-2024	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (REFORMA AGRARIA)	5 TAHUN

NO	SUBJEK		JUDUL	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
	MITRA KERJA SAMA	OPD					
1	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	NK 12 /D.4.3/08/2024 B/100.2.2/1003/VI II/Bappeda/2024	28-08-2024	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH	2 TAHUN
2	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG	NDA 52/D.4.3/08/2024 B/100.2.2/1003.1/VIII/Bappeda/2024	28-08-2024	PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI	2 TAHUN
TW IV							

Tabel 2.49
Kerjasama Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Pihak Ketiga dalam Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2024

NO	JENIS BANTUAN	NAMA PERUSAHAAN
1	Pemberian Makanan tambahan dan Vitamin serta Penyuluhan Kesehatan Balita & Ibu Hamil tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kampung Tegal Muri, Balaraja	PT. ADIS DIMENSION FOOTWEAR
2	Taman Baca Cemara di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi Periode Desember 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
3	Peningkatan Layanan Kesehatan Puskesmas Salembaran Jaya	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
4	Penanaman Pohong Mangrove Di Tangerang Mangrove Center Tanjung Pasir	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
5	Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan Teluknaga	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
6	BEDAH RUMAH WRGA KURANG MAMPU	PT. Charoen Pokphand Indonesia
7	Turnamen Sepak Bola "PIK 2 CUP" 2022 di Kecamatan Teluknaga - Kosambi	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
8	Penyediaan Akses Jaringan Transportasi Pemukiman Bagi Masyarakat Kecamatan Kosambi & Kecamatan Teluknaga	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
9	Pemberian 390 Pcs Galon Si Melon Sebagai Pelengkap Air Minum Si Melon	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
10	Pemberian Air Minum "Si Melon" Periode Desember 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
11	Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" di Kecamatan Teluknaga Periode Desember 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
12	Perayaan Bulan Bahasa Bersama Kak Rara	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI

NO	JENIS BANTUAN	NAMA PERUSAHAAN
13	Budidaya Ikan Kali Jaya	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
14	Lembaga Pelatihan Kerja Citra Kirana	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
15	Pemberian 100 Pcs Sabun Bayi Untuk Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
16	Penyuluhan Perbaikan Gizi Pada Ibu Hamil Dan Balita Periode Mei-Desember 2024 (Pendampingan Csr)	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
17	Budidaya Ikan Lele Salembaran Jaya	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
18	Budidaya Hewan Unggas Bersama Kelompok Fim Farm	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
19	Support Hut Pemkab Dalam Rangka Mendukung Umkm Lokal	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
20	Budidaya Ikan Ketapang Bersama Kube Ki Dalang	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
21	Kampung Adidaya Desa Wisata Kampung Melayu Barat	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
22	Bantuan Sarana Sanitasi 8 Unit Toilet Komunal	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
23	Taman Baca Cemara di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi Periode November 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
24	Balai Latihan Kerja Tahap 1, 2, & 3 Di Kecamatan Kosambi & Kecamatan Teluknaga	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
25	Pembuatan Green House Anggur Desa Salembaran Jati	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
26	Pemberian Air Minum "Si Melon" Periode November 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
27	Pemberian Air Minum "Si Melon" Periode Oktober 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
28	Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" di Kecamatan Teluknaga Periode November 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
29	Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" di Kecamatan Teluknaga Periode Oktober 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
30	Pembangunan Tugu Perbatasan Kabupaten Tangerang	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
31	Budidaya Ikan Nila Kelompok Tani Desa Salembaran Jati	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
32	Screening dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
33	Taman Baca Cemara di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi Periode Oktober 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
34	Bantuan Sarana Sanitasi 10 Unit Toilet Komunal	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
35	Pemberian Dana Beasiswa	PT Charoen Pokphand Indonesia

NO	JENIS BANTUAN	NAMA PERUSAHAAN
36	Pembangunan (Renovasi) Masjid Jamiaturohmah	PT Charoen Pokphand Indonesia
37	Kampung Adidaya Waru Brilliant Desa Bojong Renged	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
38	Bantuan kendaraan bermotor pengangkut sampah dan tong sampah kepada warga masyarakat Kp Bunut Desa Pasir Jaya Kecamatan Cikupo	PT Aetra Air Tangerang
39	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Muara	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
40	Bantuan Fasilitas Sarana Air Bersih Di Desa Muara	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
41	Taman Baca Cemara di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi Periode Mei 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
42	Taman Baca Cemara di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi Periode Maret 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
43	Bantuan 71 Unit Sarana Sanitasi Berkualitas Di Desa Muara	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
44	Festival Tabuh Bedug Kecamatan Teluknaga	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
45	Pik 2 Mendistribusikan 21 Ekor Hewan Kurban Untuk Wilayah Kecamatan Kosambi Dan Kecamatan Teluknaga	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
46	Penyediaan Akses Jaringan Transportasi Pemukiman Bagi Masyarakat Kecamatan Kosambi & Kecamatan Teluknaga	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
47	Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" di Kecamatan Teluknaga Periode Juni 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
48	Rumah Sampah Pantas Gemilang Tahap Iii Di Kecamatan Teluknaga	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
49	Pemberian 7 (Tujuh) Ekor Hewan Kurban	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
50	Penyaluran Dana Csr Untuk Sarana Ibadah (Pembangunan Masjid Jamie Nurul Jihad)	PT. Charoen Pokphand Indonesia
51	Kegiatan Penyaluran Dana Csr Untuk Sarana Pendidikan	PT. Charoen Pokphand Indonesia
52	Pemberian Air Minum "Si Melon" Periode Mei 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
53	Buka Bersama Ceria Bersama Anak Yatim Piatu Di Pik 2	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
54	Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" di Kecamatan Teluknaga Periode April 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
55	Kegiatan Santunan Anak Yatim Di Kecamatan Kosambi Dan Teluknaga Pada Bulan Suci Ramadhan	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
56	Rumah Sampah Pantas Gemilang Tahap Ii Di Kecamatan Teluknaga	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI

NO	JENIS BANTUAN	NAMA PERUSAHAAN
57	Rumah Sampah Pantas Gemilang Tahap I	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
58	Penyuluhan Perbaikan Gizi Pada Ibu Hamil Dan Balita Periode Januari-April 2024 (Pendampingan Csr)	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
59	Pemberian Air Minum "Si Melon" Periode April 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
60	Pemberian Air Minum "Si Melon" Periode Maret 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
61	Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" di Kecamatan Teluknaga Periode Maret 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
62	Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan Teluknaga	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
63	Penyediaan Akses Jaringan Transportasi Pemukiman Bagi Masyarakat Kecamatan Kosambi & Kecamatan Teluknaga	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
64	Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan Kosambi	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
65	Penyediaan Akses Jaringan Transportasi Pemukiman Bagi Masyarakat Kecamatan Kosambi & Kecamatan Teluknaga	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
66	Pemberian Sembako Kepada Masyarakat Desa Cangkudu, Sebanyak 1,273 Paket	PT Charoen Pokphand Indonesia
67	mkan telur bersama, serentak sebanyak 5,000 butir telur dalam acara HUT Balaraja ke 142,	PT Charoen Pokphand Indonesia
68	Bantuan 5 set Pompa dan Selang dalam Rangka Mitigasi Bencana Banjir	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
69	Istifalan Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
70	Bantuan Sosial Penanggulangan Banjir di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Pakuhaji	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
71	Pemberian Air Minum "Si Melon" Periode Februari 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
72	Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" di Kecamatan Teluknaga Periode Februari 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
73	Bantuan Kegiatan Kearifan Lokal Desa Tanjung Pasir	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
74	Lembaga Pelatihan Kerja Citra Kirana	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
75	Taman Baca Cemara di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi Periode Februari 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
76	Taman Baca Cemara di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi Periode Januari 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
77	Mangrove Conservation	PT. YKK AP Indonesia
78	Trembesi Planting	PT. YKK AP Indonesia

NO	JENIS BANTUAN	NAMA PERUSAHAAN
79	Bank Sampah Partnership	PT. YKK AP Indonesia
80	Plastic Campaign (Drop Box Pet)	PT. YKK AP Indonesia
81	Lingkungan (Bantuan renovasi, bantuan mesin potong dan fogging)	PT. Paramount Enterprise International
82	Kesehatan (Pemeriksaan kesehatan)	PT. Paramount Enterprise International
83	Pendidikan (Bantuan sarana dan prasarana sekolah)	PT. Paramount Enterprise International
84	Pencegahan dan Pengentasan Stunting	PT. Indomarco Prismatama
85	Lingkungan (Waste Recycle, Mangrove)	PT. Adis Dimention Footwear
86	Pengembangan Masyarakat (Pembinaan Kelompok Rengginang Senja, Adis Goes To Kp Kosambi, Beasiswa, Kebencanaan)	PT. Adis Dimention Footwear
87	Pembangunan Sarana Pendidikan	PT. Charoen Pokphand Indonesia
88	Pemberian Air Minum "Si Melon" Periode Januari 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
89	Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" di Kecamatan Teluknaga Periode Januari 2024	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
90	Bantuan Pagar dan Tiang BRC untuk Desa Pangkalan	PT. KUKUH MANDIRI LESTARI
91	Pembangunan Gedung Sarana Belajar - Mengajar Paud Kb Mahbubi Rt/Rw 04/03 Desa Cangkudu	PT. Charoen Pokphand Indonesia

2.2 Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

2.2.1 Evaluasi Terhadap RKPD Tahun 2024

Indikator Makro dalam RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tangerang menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta

pelaku pembangunan lainnya.

Tabel 2.50
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang
Tahun 2024

No	Uraian Indikator Makro	Satuan	Capaian			Target	
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,47	5,18	5,00	5,11 - 5,25	5,27 - 5,41
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,88	6,94	6,06	7,51	7,2
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,92	6,93	6,55	5,94	5,5
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,15	75,56	76,19	73,55	74,1
5	Index Gini	Poin	0.282	0,286	0,269	0,28	0,27

Sampai dengan tahun 2025, kondisi ekonomi makro cenderung positif, baik pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif, nilai tukar petani (NTP) bernilai positif. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2024 mencapai 5,00 persen cenderung lambat jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5,18 persen, pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2024 mencapai 4,79 persen jika dibandingkan dengan angka laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang yang tahun 2024 sebesar 5,00 persen.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha tahun 2024 sebesar 113.998, 21 (miliar Rp.) lebih besar dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 108.569,83 (miliar Rp.) dari segi Produksi terdapat kenaikan sekitar 5.428,38 (miliar Rp.) dari tahun 2023-2024. Terdapat dua (2) lapangan usaha Kabupaten Tangerang yang mengalami pertumbuhan negative yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan , dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas ditahun 2024. Beberapa sektor PDRB mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 yaitu :

- Konstruksi (5,98%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,94%)
- Transportasi dan Pergudangan (6,04%)
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,15%)
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (23,36%)
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (13,23%).

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 6,69% pada tahun 2024. Terjaganya konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali serta peningkatan mobilitas masyarakat. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan berlanjutnya Bansos PKH dan BPNT, Bansos dalam rangka penanganan dampak kenaikan harga BBM, Bansos dari Dana Insentif Daerah (DID), berbagai Bansos yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dinilai menjadi penyangga konsumsi masyarakat terutama dengan

pendapatan menengah kebawah.

Sementara itu, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh 13,77% sepanjang tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Sepanjang tahun 2024, konsumsi Pemerintah tumbuh 3,76% dengan, kinerja yang sangat baik tersebut tercermin dari peran belanja pemerintah di Kabupaten Tangerang yang semakin optimal sebagai shock absorber untuk menjaga konsumsi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Realisasi belanja daerah memberikan multiplier effect bagi perekonomian, baik terhadap aktivitas dunia usaha maupun konsumsi masyarakat melalui kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlintas.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi) tercatat tumbuh 3,52% sepanjang tahun 2024. Investasi asing di Kabupaten Tangerang mencapai 12.427.563,95 (juta Rp.) hal ini didorong oleh investasi sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, industri Logam Dasar, industri Alas Kaki. Investasi sektor perumahan seiring pengembangan berbagai proyek properti di Kabupaten Tangerang dengan adanya penetapan 2 Proyek Strategis Nasional di PIK 2 dan BSD serta penetapan BSD menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Dari sisi investasi, kinerja positif didukung investasi swasta masih akan menjadi motor penggerak pertumbuhan di tengah penyelesaian berbagai proyek PSN dan KEK yang terus dipercepat. Beberapa pembangunan PSN yang bersifat strategis dan multiyears seperti Pembangunan Tol Serpong – Balaraja, Proyek Pembangunan Kawasan Pantai Indah Kapuk II di Tangerang dan kawasan township Astra Land di Cikupa Tangerang.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2024 berada pada angka 6,06 persen atau sekitar 102.510 orang dengan 64.288 adalah laki-laki dan sekitar 38.222 adalah Perempuan, kategori pengangguran di Kabupaten Tangerang berupa mencari Pekerjaan sebanyak 88.756 orang, mempersiapkan usaha sebanyak 1.067 orang, dan merasa tidak mungkin mendapat Pekerjaan sebanyak 12.687 orang, dari segi Pendidikan jumlah yang paling banyak pengangguran adalah lulusan Sekolah Menengah Atas sebanyak 36.391 orang atau sekitar 35 persen dari angka pengangguran, sampai dengan bulan April 2025 angka pengangguran mengikuti angka 6,06 persen. Angka pengangguran cenderung menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 6,94 persen.

Angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2024 sebesar 6,55 persen, sedangkan angka kemiskinan tahun 2025 dari BPS belum rilis untuk Kabupaten/Kota, dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang sekitar 266.430 orang. Dibandingkan 2023, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 9.900 orang. Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar 632,941 (Rp/Kap/bulan). Sekitar 43 persen penduduk miskin di Kabupaten Tangerang tidak memiliki Pekerjaan, 39,15 persen bekerja di sektor formal, dan yang bekerja disektor informal sebesar 17,81 persen. Penurunan angka kemiskinan merupakan keberhasilan program pemerintah berupa bantuan kepada Masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Data index Gini pada tahun 2024, menurut data BPS Kabupaten Tangerang sekitar 0,269 poin, data ini menggambarkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Tangerang masih ada ketimpangan, tetapi jika dibandingkan tahun 2023 ketimpangan ini cenderung menuru dan mendekati angka nol. Perbedaan karakteristik perkotaan dan perdesaan menjadikan angka gini rasio lebih besar dari nol atau tidak ada ketimpangan.

Indeks Pembangunan Manusia sampai dengan tahun 2024 adalah 76,19 cenderung naik jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 75,56 poin, data tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 belum ada data dari BPS, dari angka tersebut capaian Pembangunan manusia di Kabupaten Tangerang cenderung meningkat setiap tahun. Komposit indeks Pembangunan manusia terdiri dari angka rata-rata lama Sekolah RLS), angka harapan lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup (UHH), pengeluaran perkapita, dari komposit IPM diatas kenaikan rata-rata lama Sekolah, lambatnya rata-rata lama Sekolah menggambarkan permasalahan dari segi akses, dan minat, walau Pendidikan negeri di Kabupaten Tangerang sudah digratiskan, dan beberapa usia sekolah yang melanjutkan sekolah dan atau ke pondok pesantren di luar Kabupaten Tangerang.

Indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan OPD. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di
Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Sampai
dengan Triwulan I

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi
		2024	2025	2026	2025 (Triwulan I)
Indeks Pendidikan	Indeks	0,69	0,7	0,71	
Indeks Kesehatan	Indeks	0,78	0,79	0,8	
Indeks pembangunan Pemuda	Indeks	52	53	54	
Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	62,67	63,17	63,67	
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,3	1,15	1,05	
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	2,14	2,26	2,38	
Laju Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	%	3,08	3,48	3,88	
Persentase Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	%	5,12	5,12	5,12	
Persentase Daya saing produk unggulan lokal	%	22,73	26,52	30,3	
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	3,41	3,57	3,73	
Indeks desa membangun	Indeks	0,7307	0,7407	0,7507	
Indeks ketahanan pangan	Indeks	77,5	78	78,5	
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	67,85	68,25	68,65	
Persentase PPKS yang berdaya	%	1,44	1,69	1,87	
Nilai Sakip	Nilai	76	78	80,5	

Nilai indeks kemandirian fiskal	Indeks	0,52	0,525	0,53	
Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	
Indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	75	81	
Maturitas SPIP terintegrasi	Angka	3	3	3	
Indeks SPBE	Indeks	3,17	3,19	3,21	
Indeks Pelayanan publik	Indeks	4,2	4,3	4,4	
Presentase infrastruktur dalam kondisi baik	%	94,5	95	95,5	
Presentase Realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai RTRW	%	37	55	55	
Rasio luas kawasan permukiman, perumahan dan pemakaman yang layak	Rasio	0,9439	0,9442	0,9442	
Rasio konektivitas kabupaten	Rasio	0,79	0,83	0,83	
Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	56,25	56,89	0,83	
Indeks resiko bencana (IRBI)	Indeks	120	115	115	
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	indeks	76,61	78	80	
Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	Persen	94,5	95	95,5	
Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	persen	37	55	55	
Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	point	0,9439	0,9442	0,9442	

Sebagaimana terlihat di atas, pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut dari 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan yaitu :

9 (sembilan) Indikator melampaui/melebihi target 17 (tiga belas) Indikator mencapai target 1 (satu) Indikator yang tidak mencapai target

Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang di masa mendatang.

2.2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan

Pencapaian target program yang telah tertuang dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dan 2025 (Triwulan I) telah dievaluasi. Secara umum target yang telah ditentukan telah tercapai, dan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2024

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN											
	DASAR								5.393.871.742.990,00	5.140.869.567.833,00	95,31	
1	URUSAN PEMERINTAHAN										97,78	
	BIDANG PENDIDIKAN								1.948.068.596.140,00	1.904.749.274.666,00		
		Dinas Pendidikan									97,78	Dinas Pendidikan
									1.948.068.596.140,00	1.904.749.274.666,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	95	95	100,00			98,34	Dinas Pendidikan
			KABUPATEN/KOTA						1.112.954.840.412,00	1.094.479.815.185,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	100	99,39	99,39			97,04	Dinas Pendidikan
			PENDIDIKAN	SD/MI					834.301.765.278,00	809.568.490.381,00		
				Angka Partisipasi Murni (APM)	%	100	97,76	97,76				Dinas Pendidikan
				SMP/MTs								
				Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	100	98,87	98,87				Dinas Pendidikan
				PAUD								
				Angka Partisipasi Murni (APM)	%	100	88,3	88,30				Dinas Pendidikan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				Non Formal/ Kesetaraan								
			PROGRAM	Persentase implementasi kurikulum muatan lokal	%	100	100	100,00			83,36	Dinas Pendidikan
			PENGEMBANGAN KURIKULUM						459.714.850,00	383.238.100,00		
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga	%	100	100	100,00			92,85	Dinas Pendidikan
				Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1					99.991.000,00	92.845.000,00		
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan	%	100	100	100,00			89,14	Dinas Pendidikan
				Pendidikan Non Formal)					252.284.600,00	224.886.000,00		
2	URUSAN										92,23	
	PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.016.190.756.019,00	1.859.536.622.034,00		
		Dinas Kesehatan,									92,23	Dinas Kesehatan
		RSUD, Puskesmas dan Labkesda							2.016.190.756.019,00	1.859.536.622.034,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			94,85	Dinas Kesehatan
			KABUPATEN/KOTA						56.416.321.566,00	53.510.990.138,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				Persentase Laporan Kinerja BLUD	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				Bidang Kesehatan								
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0,1	0,1	100,00			97,30	Dinas Kesehatan
			MASYARAKAT						313.015.189.342,00	304.574.788.710,00		
				Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang	%	85,19	85,19	100,00				Dinas Kesehatan
				Terakreditasi								
				Persentase ibu hamil	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil								
				Persentase ibu bersalin	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				mendapatkan pelayanan persalinan								
				Persentase bayi baru lahir	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir								
				Presentase pelayanan kesehatan	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				balita sesuai standar								
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				standar								
				Persentase orang usia 15-59	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar								
				Persentase warga negara usia 60	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar								
				Persentase penderita hipertensi	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								
				Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				standar								
				Persentase ODGJ berat yang	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar								

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				Persentase orang terduga TBC	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar								
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				standar								
				Persentase Balita Wasting	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,4	84,4	100,00				Dinas Kesehatan
				(IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas								
				Persentase Puskesmas dengan	%	85	85	100,00				Dinas Kesehatan
				Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial								
				Persentase alat kesehatan	%	81	81	100,00				Dinas Kesehatan
				memenuhi standar								
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	%	100	100	100,00			98,46	Dinas Kesehatan
									11.864.998.310,00	11.682.044.540,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				Ditingkatkan Mutu dan								
				Kompetensinya								
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				Praktik Tenaga Kesehatan								
			PROGRAM SEDIAAN	Persentase P-IRT yang sesuai standar	%	100	100	100,00			97,68	Dinas Kesehatan
			FARMASI, ALAT						778.206.260,00	760.187.780,00		
			KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									
				Persentase sarana kefarmasian	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				yang sesuai standar								
				Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				Kesehatan Lingkungan								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	%	100	100	100,00			91,12	Dinas Kesehatan
			KESEHATAN						1.634.116.040.541,00	1.489.008.610.866,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				pendidikan								
				Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				Mandiri								
				Persentase Organisasi	%	100	100	100,00				Dinas Kesehatan
				Masyarakat Kemitraan Bidang Kesehatan								
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN										96,03	
	PENATAAN RUANG								1.046.470.810.558,00	1.004.956.455.817,00		
		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air									96,83	Dinas Bina Marga
									574.497.357.383,00	556.296.285.963,00		dan Sumber Daya Air
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			96,57	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
			KABUPATEN/KOTA						39.829.542.091,00	38.463.203.082,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi	%	77,27	86,36	111,76			96,21	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya
									130.556.360.720,00	125.606.089.589,00		Air
				Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi	%	70,2	70,3	100,08				Dinas Bina Marga dan Sumber Daya
				Baik								Air
			PROGRAM PENGELOLAAN	Prosentase Infrastruktur Drainase dalam Kondisi Baik	%	11,93	11,93	100,00			95,09	Dinas Bina Marga
			DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						55.641.046.708,00	52.907.645.531,00		dan Sumber Daya Air
			PROGRAM	Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	%	3,38	3,867	114,41			97,37	Dinas Bina Marga
			PENYELENGGARAAN JALAN						348.470.407.864,00	339.319.347.761,00		dan Sumber Daya Air
		Dinas Tata Ruang dan									93,45	Dinas Tata Ruang
		Bangunan							313.934.789.901,00	293.374.935.750,00		dan Bangunan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			95,65	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
			KABUPATEN/KOTA						36.005.826.527,00	34.438.031.247,00		
			PROGRAM PENATAAN	Prosentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang	%	60	60	100,00			93,53	Dinas Tata Ruang dan Bangunan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			BANGUNAN GEDUNG									
				Berkualitas Baik					250.060.500.753,00	233.876.468.433,00		
			PROGRAM PENATAAN	Persentase Penataan Bangunan	%	40	40	100,00			92,53	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
			BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	dan Lingkungan yang Terselenggara					21.434.134.220,00	19.833.930.800,00		
			PROGRAM	Presentase Penataan Ruang yang Terselenggara	%	70	70	100,00			81,23	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
			PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						6.434.328.401,00	5.226.505.270,00		
		Dinas Perumahan, Pemukiman dan									98,26	Dinas Perumahan, Pemukiman dan
		Pemakaman							158.038.663.274,00	155.285.234.104,00		Pemakaman
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	Cakupan Sarana Air Bersih	%	72,67	72,5	99,77			81,94	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
			MINUM						5.466.392.600,00	4.479.208.163,00		
				Prosentase Terpenuhiya Pelayanan Pendistribusian Air	%	100	179,4	179,40				Dinas Perumahan, Pemukiman dan
				Bersih Bagi Masyarakat								Pemakaman
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Presentase kapasitas lumpur tinja	%	0,14	0,4	285,71			98,87	Dinas Perumahan, Pemukiman dan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			SISTEM AIR LIMBAH						40.318.904.767,00	39.861.336.619,00		Pemakaman
				Presentase meningkatnya sarana sanitasi bagi masyarkat miskin	%	96,61	96,61	100,00				Dinas Perumahan, Pemukiman dan
												Pemakaman
			PROGRAM	Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang Terpelihara	%	100	100	100,00			98,83	Dinas Perumahan,
			PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						112.253.365.907,00	110.944.689.322,00		Pemukiman dan Pemakaman
				Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun	%	14,14	14,14	100,00				Dinas Perumahan,
												Pemukiman dan Pemakaman
				Persentase Peningkatan kualitas permukiman tidak tertata	%	12,12	12,12	100,00				Dinas Perumahan,
												Pemukiman dan Pemakaman
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN										96,73	
	PERMUKIMAN								232.325.170.708,00	224.734.712.325,00		
		Dinas Perumahan, Pemukiman dan									96,73	Dinas Perumahan, Pemukiman dan
		Pemakaman							232.325.170.708,00	224.734.712.325,00		Pemakaman

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			92,60	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
			KABUPATEN/KOTA						18.575.347.092,00	17.200.784.124,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban	%	100	100	100,00			99,23	Dinas Perumahan, Pemukiman dan
			PERUMAHAN	Bencana					1.382.218.750,00	1.371.587.950,00		Pemakaman
				Persentase Pemenuhan	%	100	100	100,00				Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
				Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah								
				susun dan Apartemen								
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	%	100	100	100,00			99,58	Dinas Perumahan,
									30.735.570.800,00	30.607.037.000,00		Pemukiman dan Pemakaman
				Persentase Pemenuhan	%	8,27	8,27	100,00				Dinas Perumahan,
				Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman								Pemukiman dan Pemakaman
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase Perumahan Yang Memenuhi Standar	%	47,89	47,89	100,00			96,65	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			(PSU)						181.632.034.066,00	175.555.303.251,00		
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN										96,93	
	MASYARAKAT								88.129.200.588,00	85.419.887.379,00		
		Badan									96,76	Badan
		Penanggulangan Bencana Daerah							43.900.245.121,00	42.477.955.053,00		Penanggulangan Bencana Daerah
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			96,34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			KABUPATEN/KOTA						28.322.967.521,00	27.286.101.253,00		
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman	%	100	100	100,00			91,18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Bencana					1.601.915.000,00	1.460.615.600,00		
				Persentase Korban Bencana yang	%	100	100	100,00				Badan
				Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi								Penanggulangan Bencana Daerah

[illegible]

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	100	100,00				Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Perda dan Perkada	%	100	100	100,00				Satuan Polisi
				yang ditegakan								Pamong Praja
6	URUSAN PEMERINTAHAN										98,06	
	BIDANG SOSIAL								62.687.208.977,00	61.472.615.612,00		
		Dinas Sosial									98,06	Dinas Sosial
									62.687.208.977,00	61.472.615.612,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			97,34	Dinas Sosial
			KABUPATEN/KOTA						13.384.543.291,00	13.028.413.014,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkat	%	76,87	76,87	100,00			96,67	Dinas Sosial
				perannya dalam usaha kesejahteraan sosial					960.253.200,00	928.261.000,00		
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK	Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	%	16,67	3,33	19,98			27,54	Dinas Sosial

[illegible]

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
	KERJA								38.394.835.915,00	35.445.190.374,00		
		Dinas Tenaga Kerja									92,32	Dinas Tenaga Kerja
									38.394.835.915,00	35.445.190.374,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			93,30	Dinas Tenaga Kerja
			KABUPATEN/KOTA						17.333.190.719,00	16.171.360.644,00		
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Ketersediaan data	%	100	100	100,00			82,71	Dinas Tenaga Kerja
				makro dan mikro ketenagakerjaan					194.932.900,00	161.222.360,00		
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten	%	72,2	94,8	131,30			91,79	Dinas Tenaga Kerja
			PRODUKTIVITAS TENAGA						13.614.588.186,00	12.496.991.650,00		
			KERJA									
				Jumlah Lembaga Pelathian Kerja	Jumlah	30	28	93,33				Dinas Tenaga Kerja
				(LPK) yang terakreditasi								
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan	%	96,12	97,36	101,29			89,87	Dinas Tenaga Kerja

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				Kerja yang Terdaftar					3.960.318.480,00	3.559.297.780,00		
				Jumlah Wirausaha Baru	Orang/tahun	528	528	100,00				Dinas Tenaga Kerja
			PROGRAM HUBUNGAN	Angka sengketa Pengusaha-	%	1,34	2,6	194,03			92,85	Dinas Tenaga Kerja
			INDUSTRIAL	pekerja per tahun					3.291.805.630,00	3.056.317.940,00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN										97,40	
	PERLINDUNGAN ANAK								15.417.570.358,00	15.017.070.574,00		
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									97,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
									15.417.570.358,00	15.017.070.574,00		Perlindungan Anak
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			97,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
			KABUPATEN/KOTA						10.774.422.208,00	10.481.116.815,00		Perlindungan Anak
			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender	%	100	100	100,00			97,82	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PEREMPUAN						1.898.572.260,00	1.857.202.059,00		Perlindungan Anak
			PROGRAM PERLINDUNGAN	Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan	%	100	100	100,00			95,34	Dinas Pemberdayaan
			PEREMPUAN						724.289.030,00	690.540.530,00		
												Perempuan dan
												Perlindungan Anak
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	%	75	75	100,00			99,69	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
									394.318.910,00	393.083.110,00		Perlindungan Anak
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah	%	100	100	100,00			99,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
									35.956.400,00	35.846.800,00		Perlindungan Anak
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Seluruh Klaster Hak Anak	%	100	100	100,00			99,49	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
									664.864.760,00	661.503.560,00		Perlindungan Anak
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan terhadap Anak	%	100	100	100,00			97,04	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
									925.146.790,00	897.777.700,00		Perlindungan Anak

[illegible]

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peta Kerentanan dan Kerawanan	Dokumen	1	1	100,00			94,30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA)					895.295.330,00	844.272.730,00		
				Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi	%	72,72	73,64	101,27				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	%	80	98,33	122,91			95,18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pangan					144.178.500,00	137.230.000,00		
4	URUSAN PEMERINTAHAN										95,58	
	BIDANG PERTANAHAN								423.914.116.344,00	405.168.053.125,00		
		Dinas Perumahan, Pemukiman dan									95,58	Dinas Perumahan, Pemukiman dan
		Pemukaman							423.914.116.344,00	405.168.053.125,00		Pemukaman
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Kebutuhan Lahan bagi Kepentingan Umum	%	30,97	28,45	91,86			95,58	Dinas Perumahan,
									423.914.116.344,00	405.168.053.125,00		Pemukiman dan Pemakaman
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN										96,61	
	HIDUP								150.048.159.977,00	144.960.240.414,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
		Dinas Lingkungan									96,61	Dinas Lingkungan Hidup dan
		Hidup dan							150.048.159.977,00	144.960.240.414,00		Kebersihan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			96,78	Dinas Lingkungan Hidup dan
			KABUPATEN/KOTA						25.955.882.343,00	25.120.548.308,00		Kebersihan
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase dokumen Lingkungan Hidup	%	33	33	100,00			96,12	Dinas Lingkungan Hidup dan
									1.408.876.500,00	1.354.151.750,00		Kebersihan
			PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air	%	50	50	100,00			98,04	Dinas Lingkungan Hidup dan
			PENCEMARAN DAN/ATAU						5.310.262.063,00	5.205.995.806,00		Kebersihan
			KERUSAKAN									
			LINGKUNGAN HIDUP									
			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Kawasan	%	1,2	1,2	100,00			97,28	Dinas Lingkungan Hidup dan
			KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Keanekaragaman Hayati yang Terkelola					18.051.622.855,00	17.560.123.245,00		Kebersihan
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3	%	100	100	100,00			79,61	Dinas Lingkungan Hidup dan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			DAN LIMBAH BAHAN									
			BERBAHAYA DAN						353.174.100,00	281.174.100,00		Kebersihan
			BERACUN (LIMBAH B3)									
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	%	85	85	100,00			98,90	Dinas Lingkungan Hidup dan
			(PPLH)						578.463.500,00	572.103.500,00		Kebersihan
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Pembinaan dan Penilaian Terhadap Kinerja Masyarakat dalam pengelolaan	%	25	25	100,00			97,64	Dinas Lingkungan Hidup dan
			UNTUK MASYARAKAT	lingkungan hidup					584.678.710,00	570.891.410,00		Kebersihan
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN	Persentase Penanganan	%	100	100	100,00			98,81	Dinas Lingkungan Hidup dan
			LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup					437.789.000,00	432.591.300,00		Kebersihan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola	%	62	63,5	102,42			96,40	Dinas Lingkungan Hidup dan
									97.367.410.906,00	93.862.660.995,00		Kebersihan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN										90,55	
	PENCATATAN SIPIL								33.284.649.133,00	30.140.075.664,00		
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									90,55	Dinas
									33.284.649.133,00	30.140.075.664,00		Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			90,57	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			KABUPATEN/KOTA						30.418.791.138,00	27.549.813.430,00		
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Perekaman KTP-el	%	99	99,99	101,00			89,21	Dinas Kependudukan dan
									1.283.809.150,00	1.145.230.300,00		Pencatatan Sipil
				Cakupan SKPWN yang diterbitkan	%	100	100	100,00				Dinas Kependudukan dan
												Pencatatan Sipil
				Cakupan SKDWN yang diterbitkan	%	100	100	100,00				Dinas
												Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				Cakupan kepemilikan KIA	%	60	60,73	101,22				Dinas
												Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun	%	99	92,76	93,70			92,87	Dinas
									309.483.220,00	287.431.439,00		Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan	%	100	100	100,00				Dinas Kependudukan dan
												Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	%	100	100	100,00				Dinas Kependudukan dan
												Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian	%	100	100	100,00				Dinas
												Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	%	100	100	100,00			90,64	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			KEPENDUDUKAN						1.222.565.745,00	1.108.181.695,00		
				Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data	%	40	40	100,00				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				Kependudukan								
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan	%	100	100	100,00			98,84	Dinas Kependudukan dan
				Pengelolaan Profil Kependudukan					49.999.880,00	49.418.800,00		Pencatatan Sipil
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN										96,08	
	DESA								67.718.411.287,00	65.062.300.458,00		
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa									96,08	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
									67.718.411.287,00	65.062.300.458,00		Pemerintahan Desa
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			97,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
			KABUPATEN/KOTA						11.939.894.305,00	11.600.586.036,00		Pemerintahan Desa
			PROGRAM PENATAAN DESA	jumlah rekomendasi penataan desa	Jumlah	1	1	100,00			95,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
									2.039.982.750,00	1.949.462.750,00		Pemerintahan Desa
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya	Desa	1	1	100,00			99,46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
									919.548.750,00	914.568.750,00		Pemerintahan Desa
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Mandiri	Desa	25	42	168,00			87,18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
									10.524.001.640,00	9.175.256.992,00		Pemerintahan Desa
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	Jumlah Desa yang Menghasilkan PADes	Desa	2	2	100,00			97,94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
			KEMASYARAKATAN,						42.294.983.842,00	41.422.425.930,00		Pemerintahan Desa
			LEMBAGA ADAT DAN									
			MASYARAKAT HUKUM ADAT									
				Prosentase lembaga masyarakat yang difasilitasi	%	100	100	100,00				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
												Pemerintahan Desa
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA										98,34	
	BERENCANA								48.112.256.234,00	47.313.042.332,00		
		Dinas Pengendalian Penduduk dan									98,34	Dinas Pengendalian Penduduk dan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
		Keluarga Berencana							48.112.256.234,00	47.313.042.332,00		Keluarga Berencana
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			97,70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			KABUPATEN/KOTA						15.617.290.410,00	15.257.715.217,00		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Presentase rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian kependudukan (hasil sinkronisasi dan survey)	%	100	100	100,00			95,54	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				yang ditindaklanjuti					1.249.362.400,00	1.193.675.300,00		
				Persentase Rumah Data di	%	30	30	100,00				Dinas Pengendalian
				Kampung KB yang memenuhi klasifikasi Paripurna								Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase ketersediaan	%	100	100	100,00				Dinas Pengendalian
				pemetaan dan sistem informasi pengendalian kependudukan								Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive	%	71,25	71,25	100,00			98,06	Dinas Pengendalian Penduduk dan
			(KB)	Rate/ mCPR (%)					16.028.388.424,00	15.718.028.315,00		Keluarga Berencana
				Persentase Peserta KB Aktif (PA)	%	26,89	26,89	100,00				Dinas Pengendalian

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)								Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase hasil kegiatan	%	90	90	100,00				Dinas Pengendalian
				advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan keluarga								Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Kampung KB yang	%	60	60	100,00				Dinas Pengendalian
				dibina dan sesuai dengan standar penilaian								Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	Prosentase capaian kinerja pemberdayaan KKS	%	92	92	100,00			99,52	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			SEJAHTERA (KS)						15.217.215.000,00	15.143.623.500,00		
				Prosentase keluarga beresiko	%	93	93	100,00				Dinas Pengendalian
				yang mendapat pendampingan dan ditindaklanjuti								Penduduk dan Keluarga Berencana
				Prosentase kerjasama dengan mitra kerja	%	100	100	100,00				Dinas Pengendalian
												Penduduk dan Keluarga Berencana
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG										94,96	
	PERHUBUNGAN								128.384.537.355,00	121.919.198.903,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
		Dinas Perhubungan									94,96	Dinas Perhubungan
									128.384.537.355,00	121.919.198.903,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			94,47	Dinas Perhubungan
			KABUPATEN/KOTA						37.842.283.910,00	35.750.334.869,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Persentase Perlangkapan Jalan	%	58	91,67	158,05			95,17	Dinas Perhubungan
			JALAN (LLAJ)						90.542.253.445,00	86.168.864.034,00		
				Persentase Penanganan Titik	%	33,33	33,33	100,00				Dinas Perhubungan
				Kemacetan Lalu Lintas								
				Rasio tingkat keselamatan lalu	Rasio	0,3	0,3	100,00				Dinas Perhubungan
				lintas dan angkutan jalan								
				Terminal yang terbangun	Unit	1	0	0,00				Dinas Perhubungan
				Tersedianya Jaringan Angkutan	Jumlah	1	1	100,00				Dinas Perhubungan
				yang Beroperasi								

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI										98,40	
	DAN INFORMATIKA								104.585.809.786,00	102.910.850.896,00		
		Dinas Komunikasi									98,40	Dinas Komunikasi
		dan Informatika							104.585.809.786,00	102.910.850.896,00		dan Informatika
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			96,76	Dinas Komunikasi dan Informatika
			KABUPATEN/KOTA						37.450.114.906,00	36.236.249.304,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN	Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik	%	100	100	100,00			97,92	Dinas Komunikasi dan Informatika
			KOMUNIKASI PUBLIK						11.944.781.100,00	11.696.222.452,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet	%	100	100	100,00			99,61	Dinas Komunikasi dan Informatika
									55.190.913.780,00	54.978.379.140,00		
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN										93,75	
	MENENGAH								23.272.663.310,00	21.817.049.498,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
		Dinas Koperasi dan									93,75	Dinas Koperasi dan
		Usaha Mikro							23.272.663.310,00	21.817.049.498,00		Usaha Mikro
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			92,92	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			KABUPATEN/KOTA						11.345.693.274,00	10.542.131.035,00		
			PROGRAM PENGAWASAN	Persentase update dan jumlah	%	21,43	17,86	83,34			99,45	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan					253.985.580,00	252.600.900,00		
			PROGRAM PENILAIAN	Persentase update dan jumlah	%	27,03	7,14	26,42			99,73	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan					111.529.790,00	111.234.100,00		
			PROGRAM PENDIDIKAN	Persentase Jumlah Koperasi berkualitas	%	17,86	5,36	30,01			99,44	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						150.229.630,00	149.388.300,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan	%	26,79	35,18	131,32			92,17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			KOPERASI	perlindungan Koperasi					930.767.700,00	857.928.600,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan	%	2,8	9,84	351,43			93,03	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			(UMKM)						2.159.914.000,00	2.009.472.100,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana	%	2,14	1,42	66,36			94,88	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Pemerintah melalui UPDB					8.320.543.336,00	7.894.294.463,00		
				Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana	%	5,95	28,34	476,30				Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Pemerintah melalui UPDB								
				Prosentase Usaha Mikro yang	%	1,4	2,8	200,00				Dinas Koperasi dan
				Dipromosikan								Usaha Mikro
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN										94,12	
	MODAL								28.726.159.097,00	27.038.209.065,00		
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									94,12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
									28.726.159.097,00	27.038.209.065,00		Satu Pintu

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			94,92	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
			KABUPATEN/KOTA						21.641.444.357,00	20.542.358.145,00		Satu Pintu
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pengembangan Potensi Investasi Regional (PIR) di dalam Aplikasi Investasi	%	25	25	100,00			90,42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
									3.125.205.280,00	2.825.939.380,00		Satu Pintu
				Persentase implementasi pelayanan publik berbasis keterpaduan (MPP)	%	25	25	100,00				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
												Satu Pintu
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investasi	%	33,3	90,96	273,15			97,03	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
									502.112.300,00	487.212.500,00		Satu Pintu
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Perizinan yang sesuai SOP	%	75	79,3	105,73			86,07	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
									1.464.340.950,00	1.260.421.060,00		Satu Pintu
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar yang melaporkan	%	72	84,94	117,97			96,82	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				Laporan Kegiatan Penanaman								
				Modal (LKPM)					1.264.229.570,00	1.224.031.550,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN	Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	%	75	78	104,00			95,80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
			MODAL						728.826.640,00	698.246.430,00		Satu Pintu
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN										98,08	
	DAN OLAHRAGA								51.605.084.973,00	50.615.889.311,00		
		Dinas Pemuda, Olah									98,08	Dinas Pemuda, Olah
		Raga, Kebudayaan dan Pariwisata							51.605.084.973,00	50.615.889.311,00		Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			94,22	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
			KABUPATEN/KOTA						10.882.418.217,11	10.252.910.131,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	%	29	29	100,00			99,21	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
			KEPEMUDAAN						4.639.362.280,00	4.602.527.780,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Persentase pemenuhan	%	29	29	100,00			99,11	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
			KEOLAHRAGAAN	Pengembangan Kapasitas Dayasaing Keolahragaan					36.083.304.475,89	35.760.451.400,00		
14	URUSAN PEMERINTAHAN										95,52	
	BIDANG STATISTIK								1.488.331.340,00	1.421.609.140,00		
		Dinas Komunikasi									95,52	Dinas Komunikasi
		dan Informatika							1.488.331.340,00	1.421.609.140,00		dan Informatika
			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase statistik sektoral	%	60	60	100,00			95,52	Dinas Komunikasi dan Informatika
			STATISTIK SEKTORAL						1.488.331.340,00	1.421.609.140,00		
15	URUSAN PEMERINTAHAN										96,51	
	BIDANG PERSANDIAN								17.107.902.710,00	16.511.335.760,00		
		Dinas Komunikasi									96,51	Dinas Komunikasi
		dan Informatika							17.107.902.710,00	16.511.335.760,00		dan Informatika
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	prosentase layanan kemanan informasi	%	55	55	100,00			96,51	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			INFORMASI						17.107.902.710,00	16.511.335.760,00		
16	URUSAN PEMERINTAHAN										99,27	
	BIDANG KEBUDAYAAN								2.086.236.480,00	2.071.005.540,00		
		Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan									99,27	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan
		dan Pariwisata							2.086.236.480,00	2.071.005.540,00		dan Pariwisata
			PROGRAM	Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan	%	33	33	100,00			99,27	Dinas Pemuda, Olah
			PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						2.086.236.480,00	2.071.005.540,00		Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG										96,91	
	PERPUSTAKAAN								23.124.414.234,00	22.409.789.323,00		
		Dinas Perpustakaan									96,91	Dinas Perpustakaan
		dan Arsip							23.124.414.234,00	22.409.789.323,00		dan Arsip
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	99,7	99,70			96,85	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			KABUPATEN/KOTA						19.729.593.704,00	19.108.337.593,00		

[illegible]

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
	DAN PERIKANAN								28.110.753.602,00	27.002.470.266,00		
		Dinas Perikanan									96,06	Dinas Perikanan
									28.110.753.602,00	27.002.470.266,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			96,64	Dinas Perikanan
			KABUPATEN/KOTA						14.233.575.701,00	13.755.657.651,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN	Laju Produksi Perikanan Tangkap	%	0,6	0,6	100,00			91,09	Dinas Perikanan
			PERIKANAN TANGKAP						4.760.402.000,00	4.336.041.360,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN	Laju Produksi Perikanan Budidaya	%	1,5	1,5	100,00			97,08	Dinas Perikanan
			PERIKANAN BUDIDAYA						5.744.201.020,00	5.576.641.100,00		
			PROGRAM PENGOLAHAN	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	%	1,5	1,5	100,00			98,86	Dinas Perikanan
			DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						3.372.574.881,00	3.334.130.155,00		
2	URUSAN										96,79	
	PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								2.082.804.280,00	2.015.905.950,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
		Dinas Pemuda, Olah									96,79	Dinas Pemuda, Olah
		Raga, Kebudayaan dan Pariwisata							2.082.804.280,00	2.015.905.950,00		Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
			PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Pemenuhan	%	33	33	100,00			89,25	Dinas Pemuda, Olah
			DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					399.777.650,00	356.815.050,00		Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase dokumen hasil penguatan promosi dan laporan	%	33	33	100,00			98,52	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan
				kegiatan pariwisata					1.617.999.600,00	1.594.126.100,00		dan Pariwisata
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	33	33	100,00			99,90	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
			EKONOMI KREATIF						65.027.030,00	64.964.800,00		
3	URUSAN										97,30	
	PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								47.626.717.655,00	46.340.073.006,00		
		Dinas Pertanian dan									97,30	Dinas Pertanian dan
		Ketahanan Pangan							47.626.717.655,00	46.340.073.006,00		Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			97,94	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
	PERDAGANGAN								6.220.619.220,00	6.118.607.566,00		
		Dinas Perindustrian									98,36	Dinas Perindustrian
		dan Perdagangan							6.220.619.220,00	6.118.607.566,00		dan Perdagangan
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi	%	80	80	100,00			98,10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PERDAGANGAN	perdagangan					54.346.640,00	53.313.100,00		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang	%	50	50	100,00			99,54	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			BARANG PENTING	dimonitor/ dipantau					4.064.897.400,00	4.046.284.500,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan	%	62,27	62,27	100,00			96,40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Ekspor					448.838.650,00	432.696.406,00		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTP	%	88,44	172,38	194,91			95,81	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			KONSUMEN						1.539.827.530,00	1.475.369.760,00		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam	%	27	27	100,00			98,43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				Negeri					112.709.000,00	110.943.800,00		
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG										95,52	
	PERINDUSTRIAN								18.247.438.062,00	17.429.823.620,00		
		Dinas Perindustrian									95,52	Dinas Perindustrian
		dan Perdagangan							18.247.438.062,00	17.429.823.620,00		dan Perdagangan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			96,63	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			KABUPATEN/KOTA						14.977.159.202,00	14.471.958.596,00		
			PROGRAM PERENCANAAN	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	%	20,17	29,74	147,45			91,17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						1.251.344.000,00	1.140.844.264,00		
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN	Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang	%	24,95	24,95	100,00			86,83	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			USAHA INDUSTRI	diawasi					305.537.470,00	265.292.070,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan	%	24,95	24,95	100,00			90,56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				publikasi/diseminasi					1.713.397.390,00	1.551.728.690,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG										88,91	
	TRANSMIGRASI								22.911.580,00	20.369.580,00		
		Dinas Tenaga Kerja									88,91	Dinas Tenaga Kerja
									22.911.580,00	20.369.580,00		
			PROGRAM PEMBANGUNAN	Jumlah Animo masyarakat bertransmigrasi pada Tahun n	Jumlah	10	8	80,00			88,91	Dinas Tenaga Kerja
			KAWASAN TRANSMIGRASI						22.911.580,00	20.369.580,00		
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN											
	PEMERINTAHAN								326.250.872.343,00	304.299.022.526,00	93,27	
1	SEKRETARIAT DAERAH										93,89	
									197.476.555.236,00	185.411.880.547,00		
		Sekretariat Daerah									93,89	Sekretariat Daerah
									197.476.555.236,00	185.411.880.547,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pemenuhan admisntrasi umum dan Sarana prasarana	%	100	100	100,00			91,97	Sekretariat Daerah

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			KABUPATEN/KOTA						126.691.986.896,00	116.518.334.033,00		
				Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu	%	100	100	100,00				Sekretariat Daerah
				Komponen Pelaporan SAKIP	%	11,95	12,02	100,59				Sekretariat Daerah
				Persentase pemenuhan kegiatan	%	100	100	100,00				Sekretariat Daerah
				keprotokolan dan komunikasi pimpinan								
			PROGRAM	Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori	90	100	111,11			97,85	Sekretariat Daerah
			PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						66.329.858.040,00	64.902.723.314,00		
				Indeks Reformasi Hukum	Indeks	85	98,62	116,02				Sekretariat Daerah
				Prosentase Hasil Kebijakan Yang	%	100	100	100,00				Sekretariat Daerah
				ditetapkan								
			PROGRAM	Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan	%	100	100	100,00			89,59	Sekretariat Daerah
			PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						4.454.710.300,00	3.990.823.200,00		
				Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi	%	100	100	100,00				Sekretariat Daerah

[illegible]

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
									44.804.528.499,00	41.279.736.312,00		
		Badan Perencanaan Pembangunan									92,13	Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah							44.804.528.499,00	41.279.736.312,00		Daerah
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			91,13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			KABUPATEN/KOTA						25.284.616.227,00	23.042.116.862,00		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	%	100	100	100,00			93,62	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			PEMBANGUNAN DAERAH						6.249.285.842,00	5.850.351.920,00		
				Persentase Ketersedian Data Pembangunan	%	64	64	100,00				Badan Perencanaan Pembangunan
												Daerah
				Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan	%	100	100	100,00				Badan Perencanaan Pembangunan
				Pembangunan								Daerah
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Pemerintahan dan	%	100	100	100,00			93,34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PEMBANGUNAN DAERAH	Pembangunan Manusia					13.270.626.430,00	12.387.267.530,00		
				PD dengan kinerja baik lingkup	%	100	100	100,00				Badan Perencanaan
				Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								Pembangunan Daerah
				Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Perekonomian	%	100	100	100,00				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				dan SDA (Sumber Daya Alam)								
				PD dengan kinerja baik lingkup	%	100	100	100,00				Badan Perencanaan
				Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								Pembangunan Daerah
				Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Infrastruktur dan	%	100	100	100,00				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Kewilayahan								
				PD dengan kinerja baik ingkup Bidang Infrastruktur dan	%	100	100	100,00				Badan Perencanaan Pembangunan
				Kewilayahan								Daerah
2	KEUANGAN										97,30	
									1.101.104.855.448,00	1.071.404.133.807,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
		Badan Pendapatan									96,80	Badan Pendapatan
		Daerah							136.967.423.383,00	132.579.849.737,00		Daerah
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			97,39	Badan Pendapatan Daerah
			KABUPATEN/KOTA						125.119.887.683,00	121.856.586.367,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Kepatuhan Wajib	%	78	78	100,00			90,51	Badan Pendapatan
			PENDAPATAN DAERAH	Pajak					11.847.535.700,00	10.723.263.370,00		Daerah
				Persentase Pemenuhan	%	100	100	100,00				Badan Pendapatan Daerah
				Ketersediaan Dokumen								
				Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah								
				Persentase Pemenuhan Layanan	%	100	100	100,00				Badan Pendapatan Daerah
				dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah								
				Persentase Capaian Target Pajak	%	100	107,73	107,73				Badan Pendapatan
				Daerah								Daerah

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
		Badan Pengelola									95,65	Badan Pengelola
		Keuangan dan Aset Daerah							51.342.279.604,00	49.107.841.420,00		Keuangan dan Aset Daerah
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	96,67	96,67			96,24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			KABUPATEN/KOTA						30.463.104.539,00	29.317.332.598,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah	%	98	101,17	103,23			93,14	Badan Pengelola
									5.894.727.600,00	5.490.392.676,00		Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Kinerja Pengelolaan Akuntansi Daerah	%	92,5	100	108,11				Badan Pengelola
												Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%	100	100	100,00				Badan Pengelola
												Keuangan dan Aset Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase capaian kinerja pengelolaan aset daerah	%	95	100	105,26			95,43	Badan Pengelola
									14.984.447.465,00	14.300.116.146,00		Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase pemanfaatan barang milik daerah yang	%	75	75	100,00				Badan Pengelola Keuangan dan Aset

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				diginausahakan								Daerah
		SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH									97,47	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN
									912.795.152.461,00	889.716.442.650,00		DAERAH
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								97,47	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN
									912.795.152.461,00	889.716.442.650,00		DAERAH
3	KEPEGAWAIAN										95,69	
									31.460.620.826,00	30.103.490.907,00		
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya									95,69	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
		Manusia							31.460.620.826,00	30.103.490.907,00		Manusia
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			97,75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
			KABUPATEN/KOTA						23.936.876.996,00	23.398.324.220,00		Manusia
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN	Nilai	40	37,5	93,75			89,12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
									7.523.743.830,00	6.705.166.687,00		Manusia
				Nilai Aspek Pengadaan ASN	Nilai	40	40	100,00				Badan Kepegawaian dan Pengembangan
												Sumber Daya
												Manusia
				Nilai Aspek Pengembangan Karier	Nilai	67,5	75	111,11				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
												Manusia
				Nilai Aspek Manajemen Kinerja	Nilai	75	80	106,67				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
												Manusia
				Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai	40	40	100,00				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
												Manusia
				Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai	40	40	100,00				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
												Manusia
				Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan	Nilai	16	16	100,00				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
												Manusia
				Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai	20	22	110,00				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
												Manusia
4	PENDIDIKAN DAN										97,58	
	PELATIHAN								4.024.952.840,00	3.927.529.700,00		
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya									97,58	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
		Manusia							4.024.952.840,00	3.927.529.700,00		Manusia
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Aspek Pengembangan Karier	Nilai	67,5	75	111,11			97,58	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
									4.024.952.840,00	3.927.529.700,00		Manusia
5	PENELITIAN DAN										92,46	
	PENGEMBANGAN								5.592.912.100,00	5.171.215.900,00		
		Badan Perencanaan Pembangunan									92,46	Badan Perencanaan Pembangunan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
		Daerah							5.592.912.100,00	5.171.215.900,00		Daerah
			PROGRAM PENELITIAN	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi kebijakan	%	50	50	100,00			92,46	Badan Perencanaan
			DAN PENGEMBANGAN DAERAH						5.592.912.100,00	5.171.215.900,00		Pembangunan Daerah
				Persentase Inovasi Daerah yang Diimplementasikan	%	67	67	100,00				Badan Perencanaan
												Pembangunan Daerah
VI	UNSUR PENGAWASAN											
	URUSAN PEMERINTAHAN								57.306.500.355,00	53.363.431.093,00	93,12	
1	INSPEKTORAT DAERAH										93,12	
									57.306.500.355,00	53.363.431.093,00		
		Inspektorat									93,12	Inspektorat
		Kabupaten							57.306.500.355,00	53.363.431.093,00		Kabupaten
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	94,39	94,39			94,72	Inspektorat Kabupaten
			KABUPATEN/KOTA						40.783.473.993,00	38.631.707.393,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan 3E (Efektif,	%	33,16	33,16	100,00			89,33	Inspektorat Kabupaten
			PENGAWASAN	Efisien, Ekonomis)					11.380.526.462,00	10.166.785.100,00		
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas	%	41,38	41,38	100,00			88,77	Inspektorat Kabupaten
			ASISTENSI						5.142.499.900,00	4.564.938.600,00		
VII	UNSUR KEWILAYAHAN											
									743.174.799.979,00	733.508.405.955,00	98,70	
1	KECAMATAN										98,70	
									743.174.799.979,00	733.508.405.955,00		
		Kecamatan Tigaraksa									99,10	Kecamatan
									35.802.057.140,00	35.479.053.851,00		Tigaraksa
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			98,19	Kecamatan Tigaraksa
			KABUPATEN/KOTA						13.392.735.043,00	13.150.131.922,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100	100	100,00			99,63	Kecamatan Tigaraksa
			PELAYANAN PUBLIK						19.244.627.667,00	19.173.808.375,00		
				Persentase pemenuhan PATEN	%	100	100	100,00				Kecamatan
				sesuai dengan standar								Tigaraksa
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	85	85	100,00			99,64	Kecamatan Tigaraksa
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					2.108.139.920,00	2.100.577.120,00		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			99,92	Kecamatan Tigaraksa
			KETERTIBAN UMUM						524.185.410,00	523.752.834,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			99,72	Kecamatan Tigaraksa
			UMUM						207.477.300,00	206.903.800,00		
				Persentase tertib administrasi	%	100	100	100,00				Kecamatan
				pemerintahan desa								Tigaraksa
			PROGRAM PEMBINAAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			99,69	Kecamatan Tigaraksa

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						324.891.800,00	323.879.800,00		
		Kecamatan Cikupa									99,15	Kecamatan Cikupa
									33.278.957.099,00	32.995.858.838,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			98,08	Kecamatan Cikupa
			KABUPATEN/KOTA						11.080.802.633,00	10.867.530.709,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	92	92	100,00			99,66	Kecamatan Cikupa
			PELAYANAN PUBLIK						17.401.452.275,00	17.342.751.510,00		
				Persentase pemenuhan PATEN	%	100	100	100,00				Kecamatan Cikupa
				sesuai dengan standar								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	70	70	100,00			99,77	Kecamatan Cikupa
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					3.734.686.691,00	3.726.061.119,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Cikupa

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						471.616.400,00	471.616.400,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			99,62	Kecamatan Cikupa
			UMUM						263.281.000,00	262.281.000,00		
			PROGRAM PEMBINAAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	96,15	96,15	100,00			99,54	Kecamatan Cikupa
			DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						327.118.100,00	325.618.100,00		
		Kecamatan Panongan									98,34	Kecamatan
									26.596.286.979,00	26.155.275.072,00		Panongan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			96,10	Kecamatan Panongan
			KABUPATEN/KOTA						10.397.475.666,00	9.991.669.947,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	93	93	100,00			99,75	Kecamatan Panongan
			PELAYANAN PUBLIK						12.999.679.710,00	12.967.544.800,00		
				Persentase pemeliharaan Fasilitas	%	100	100	100,00				Kecamatan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				Umum yang terpelihara								Panongan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	28,57	28,57	100,00			99,93	Kecamatan Panongan
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					2.423.029.053,00	2.421.337.000,00		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			99,68	Kecamatan Panongan
			KETERTIBAN UMUM						301.644.600,00	300.694.350,00		
			PROGRAM	Persentase rekomendasi yang	%	100	100	100,00			99,93	Kecamatan
			PENYELENGGARAAN	ditindaklanjuti					288.348.150,00	288.133.275,00		Panongan
			URUSAN PEMERINTAHAN									
			UMUM									
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			99,88	Kecamatan Panongan
			PEMERINTAHAN DESA						186.109.800,00	185.895.700,00		
		Kecamatan Curug									98,86	Kecamatan Curug
									40.974.121.992,00	40.507.281.542,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			97,41	Kecamatan Curug
			KABUPATEN/KOTA						15.681.355.114,00	15.275.518.942,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	98,15	98,15	100,00			99,74	Kecamatan Curug
			PELAYANAN PUBLIK						20.232.074.422,00	20.178.672.000,00		
				Persentase pemenuhan PATEN	%	83	83	100,00				Kecamatan Curug
				sesuai dengan standar								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	79	79	100,00			99,89	Kecamatan Curug
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					3.890.407.156,00	3.885.954.800,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	72,5	72,5	100,00			99,61	Kecamatan Curug
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						512.369.900,00	510.393.500,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	80	80	100,00			99,89	Kecamatan Curug
			UMUM						477.313.400,00	476.778.300,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PEMBINAAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			99,65	Kecamatan Curug
			DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						180.602.000,00	179.964.000,00		
		Kecamatan Legok									98,66	Kecamatan Legok
									32.774.984.552,00	32.334.307.614,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			96,83	Kecamatan Legok
			KABUPATEN/KOTA						11.624.607.055,00	11.256.529.320,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	100	100,00			99,62	Kecamatan Legok
			PELAYANAN PUBLIK						18.000.490.578,00	17.932.970.684,00		
				Persentase pemeliharaan Fasilitas	%	100	100	100,00				Kecamatan Legok
				Umum yang terpelihara								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	100	100	100,00			99,77	Kecamatan Legok
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					2.229.012.619,00	2.223.933.310,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Legok
			KETERTIBAN UMUM						229.545.900,00	229.545.900,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Legok
			UMUM						510.507.500,00	510.507.500,00		
				Persentase tertib administrasi	%	100	100	100,00				Kecamatan Legok
				pemerintahan desa								
			PROGRAM PEMBINAAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Legok
			DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						180.820.900,00	180.820.900,00		
		Kecamatan Pasar									97,73	Kecamatan Pasar
		Kemis							49.453.512.330,00	48.333.256.404,00		Kemis
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	25	25	100,00			96,23	Kecamatan Pasar Kemis
			KABUPATEN/KOTA						19.345.887.352,00	18.617.504.404,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	25	25	100,00			99,73	Kecamatan Pasar Kemis

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PEMERINTAHAN DAN									
			PELAYANAN PUBLIK						8.426.661.180,00	8.404.131.200,00		
				Persentase pemeliharaan Fasilitas	%	85	85	100,00				Kecamatan Pasar
				Umum yang terpelihara								Kemis
			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	25	25	100,00			98,54	Kecamatan Pasar Kemis
				pembinaan/pemberdayaan					20.511.557.698,00	20.212.931.900,00		
			MASYARAKAT DESA DAN									
			KELURAHAN									
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	25	25	100,00			85,41	Kecamatan Pasar Kemis
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						412.525.000,00	352.337.300,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	25	25	100,00			98,63	Kecamatan Pasar Kemis
			UMUM						615.577.000,00	607.147.500,00		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	25	25	100,00			98,51	Kecamatan Pasar Kemis

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PEMERINTAHAN DESA						141.304.100,00	139.204.100,00		
		Kecamatan Balaraja									97,46	Kecamatan Balaraja
									23.411.064.747,00	22.816.618.317,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			96,12	Kecamatan Balaraja
			KABUPATEN/KOTA						9.283.042.891,00	8.922.932.017,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	100	100,00			99,64	Kecamatan Balaraja
			PELAYANAN PUBLIK						10.897.546.540,00	10.858.426.600,00		
				Persentase pemeliharaan Fasilitas	%	60	60	100,00				Kecamatan Balaraja
				Umum yang terpelihara								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	100	100	100,00			97,64	Kecamatan Balaraja
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					2.635.073.910,00	2.572.913.700,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			92,95	Kecamatan Balaraja

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						256.718.906,00	238.626.000,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			52,95	Kecamatan Balaraja
			UMUM						172.570.100,00	91.380.000,00		
			PROGRAM PEMBINAAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			79,67	Kecamatan Balaraja
			DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						166.112.400,00	132.340.000,00		
		Kecamatan Kresek									97,65	Kecamatan Kresek
									14.430.587.570,00	14.091.207.329,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			95,81	Kecamatan Kresek
			KABUPATEN/KOTA						7.558.142.834,00	7.241.821.569,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	89,25	89,25	100,00			99,67	Kecamatan Kresek
			PELAYANAN PUBLIK						5.664.416.386,00	5.645.451.500,00		
				Persentase pemeliharaan Fasilitas	%	89,25	89,25	100,00				Kecamatan Kresek

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				Umum yang terpelihara								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	100	100	100,00			99,53	Kecamatan Kresek
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					746.390.700,00	742.902.610,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Kresek
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						117.760.000,00	117.760.000,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	75	75	100,00			99,79	Kecamatan Kresek
			UMUM						285.722.950,00	285.116.950,00		
			PROGRAM PEMBINAAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Kresek
			DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						58.154.700,00	58.154.700,00		
		Kecamatan Kronjo									98,36	Kecamatan Kronjo
									22.436.410.369,00	22.069.076.719,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			95,99	Kecamatan Kronjo

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			KABUPATEN/KOTA						7.469.439.654,00	7.169.897.119,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	100	100,00			99,49	Kecamatan Kronjo
			PELAYANAN PUBLIK						13.381.516.415,00	13.313.814.000,00		
				Persentase pemeliharaan Fasilitas	%	100	100	100,00				Kecamatan Kronjo
				Umum yang terpelihara								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Kronjo
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					911.078.200,00	911.077.500,00		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	10	10	100,00			100,00	Kecamatan Kronjo
			KETERTIBAN UMUM						237.254.500,00	237.254.500,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			99,95	Kecamatan Kronjo
			UMUM						183.280.600,00	183.192.600,00		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Kronjo
			PEMERINTAHAN DESA						253.841.000,00	253.841.000,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
		Kecamatan Mauk									98,73	Kecamatan Mauk
									19.932.013.803,00	19.679.511.998,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	80	80	100,00			98,92	Kecamatan Mauk
			KABUPATEN/KOTA						9.478.249.025,00	9.376.208.498,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	85	85	100,00			99,18	Kecamatan Mauk
			PELAYANAN PUBLIK						8.361.165.628,00	8.292.785.800,00		
				Persentase pemeliharaan Fasilitas	%	85	85	100,00				Kecamatan Mauk
				Umum yang terpelihara								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	82	82	100,00			95,04	Kecamatan Mauk
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					1.610.525.150,00	1.530.705.300,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	83	83	100,00			98,97	Kecamatan Mauk
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						219.367.800,00	217.106.200,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Mauk
			UMUM						157.336.200,00	157.336.200,00		
				Persentase tertib administrasi	%	85	85	100,00				Kecamatan Mauk
				pemerintahan desa								
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	87	87	100,00			100,00	Kecamatan Mauk
			PEMERINTAHAN DESA						105.370.000,00	105.370.000,00		
		Kecamatan Rajeg									99,49	Kecamatan Rajeg
									26.854.960.726,00	26.718.925.228,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			99,14	Kecamatan Rajeg
			KABUPATEN/KOTA						9.830.953.566,00	9.746.817.846,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	100	100,00			99,71	Kecamatan Rajeg
			PELAYANAN PUBLIK						11.856.522.580,00	11.821.696.200,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				Persentase pemeliharaan Fasilitas	%	100	100	100,00				Kecamatan Rajeg
				Umum yang terpelihara								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	100	100	100,00			99,65	Kecamatan Rajeg
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					4.615.581.100,00	4.599.505.507,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			99,73	Kecamatan Rajeg
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						98.124.100,00	97.857.985,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			99,84	Kecamatan Rajeg
			UMUM						375.759.080,00	375.147.390,00		
				Persentase tertib administrasi	%	100	100	100,00				Kecamatan Rajeg
				pemerintahan desa								
			PROGRAM PEMBINAAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			99,85	Kecamatan Rajeg
			DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						78.020.300,00	77.900.300,00		
		Kecamatan Sepatan									98,83	Kecamatan Sepatan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
									26.045.872.887,00	25.741.703.808,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			98,24	Kecamatan Sepatan
			KABUPATEN/KOTA						9.874.277.584,00	9.700.307.288,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	91,35	91,35	100,00			99,18	Kecamatan Sepatan
			PELAYANAN PUBLIK						13.615.382.400,00	13.503.076.000,00		
				Persentase pemenuhan PATEN	%	91,35	91,35	100,00				Kecamatan Sepatan
				sesuai dengan standar								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	85	85	100,00			99,08	Kecamatan Sepatan
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					1.751.433.383,00	1.735.351.400,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			99,65	Kecamatan Sepatan
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						270.353.300,00	269.420.000,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	93	93	100,00			99,88	Kecamatan Sepatan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Teluknaga
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					1.587.540.750,00	1.587.540.750,00		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Teluknaga
			KETERTIBAN UMUM						226.953.950,00	226.953.950,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Teluknaga
			UMUM						169.825.500,00	169.825.500,00		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Teluknaga
			PEMERINTAHAN DESA						225.441.900,00	225.441.400,00		
		Kecamatan Cisoka									97,80	Kecamatan Cisoka
									20.858.796.999,00	20.399.721.506,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			95,54	Kecamatan Cisoka
			KABUPATEN/KOTA						9.023.547.270,00	8.620.932.303,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	100	100,00			99,65	Kecamatan Cisoka
			PELAYANAN PUBLIK						9.000.759.389,00	8.968.941.663,00		
				Persentase pemeliharaan Fasilitas	%	100	100	100,00				Kecamatan Cisoka
				Umum yang terpelihara								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	100	100	100,00			98,96	Kecamatan Cisoka
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					1.779.332.750,00	1.760.762.250,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Cisoka
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						236.285.200,00	236.285.200,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	83	83	100,00			99,24	Kecamatan Cisoka
			UMUM						547.442.900,00	543.290.600,00		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			99,29	Kecamatan Cisoka
			PEMERINTAHAN DESA						271.429.490,00	269.509.490,00		
		Kecamatan Pakuhaji									98,03	Kecamatan Pakuhaji

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
									24.158.378.006,00	23.681.562.986,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	90	90	100,00			97,71	Kecamatan Pakuhaji
			KABUPATEN/KOTA						10.255.501.785,00	10.020.211.626,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	95		0,00			98,89	Kecamatan Pakuhaji
			PELAYANAN PUBLIK						10.042.254.899,00	9.931.127.700,00		
				Persentase pemeliharaan Fasilitas	%	85		0,00				Kecamatan Pakuhaji
				Umum yang terpelihara								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	90		0,00			97,38	Kecamatan Pakuhaji
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					3.255.016.422,00	3.169.730.060,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	90		0,00			94,71	Kecamatan Pakuhaji
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						396.858.700,00	375.875.700,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	85		0,00			95,90	Kecamatan Pakuhaji

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			UMUM						66.856.600,00	64.117.300,00		
			PROGRAM PEMBINAAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	90		0,00			84,93	Kecamatan Pakuhaji
			DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						141.889.600,00	120.500.600,00		
		Kecamatan Kosambi									99,35	Kecamatan Kosambi
									35.894.053.122,00	35.661.921.050,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			98,72	Kecamatan Kosambi
			KABUPATEN/KOTA						15.375.362.963,00	15.179.315.410,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100	100	100,00			99,85	Kecamatan Kosambi
			PELAYANAN PUBLIK						14.242.735.408,00	14.221.612.400,00		
				Persentase pemenuhan PATEN	%	100	100	100,00				Kecamatan Kosambi
				sesuai dengan standar								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	70	70	100,00			99,72	Kecamatan Kosambi

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					5.438.887.001,00	5.423.925.490,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Kosambi
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						473.730.000,00	473.730.000,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Kosambi
			UMUM						172.393.500,00	172.393.500,00		
				Persentase tertib administrasi	%	100	100	100,00				Kecamatan Kosambi
				pemerintahan desa								
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Kosambi
			PEMERINTAHAN DESA						190.944.250,00	190.944.250,00		
		Kecamatan									99,19	Kecamatan
		Pagedangan							28.974.379.812,00	28.741.092.269,00		Pagedangan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			98,28	Kecamatan Pagedangan
			KABUPATEN/KOTA						10.946.866.338,00	10.759.099.659,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	89,5	89,5	100,00			99,72	Kecamatan Pagedangan
									13.529.039.304,00	13.491.796.000,00		
			PEMERINTAHAN DAN									
			PELAYANAN PUBLIK									
				Persentase pemeliharaan Fasilitas	%	90	90	100,00				Kecamatan
				Umum yang terpelihara								Pagedangan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	88	88	100,00			99,79	Kecamatan Pagedangan
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					4.025.647.470,00	4.017.369.910,00		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	75	75	100,00			100,00	Kecamatan Pagedangan
			KETERTIBAN UMUM						98.469.400,00	98.469.400,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	10	10	100,00			100,00	Kecamatan Pagedangan
			UMUM						129.336.400,00	129.336.400,00		
				Persentase tertib administrasi	%	88	88	100,00				Kecamatan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				pemerintahan desa								Pagedangan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Pagedangan
			PEMERINTAHAN DESA						245.020.900,00	245.020.900,00		
		Kecamatan Jambe									98,32	Kecamatan Jambe
									15.371.775.973,00	15.113.614.192,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			97,12	Kecamatan Jambe
			KABUPATEN/KOTA						7.813.279.941,00	7.588.474.035,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	89,25	89,25	100,00			99,52	Kecamatan Jambe
			PELAYANAN PUBLIK						6.397.771.762,00	6.366.775.387,00		
				Persentase pemenuhan PATEN	%	89,25	89,25	100,00				Kecamatan Jambe
				sesuai dengan standar								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	70	70	100,00			99,98	Kecamatan Jambe

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					567.343.800,00	567.249.300,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Jambe
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						151.531.000,00	151.531.000,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	89,25	89,25	100,00			99,92	Kecamatan Jambe
			UMUM						336.358.500,00	336.103.500,00		
				Persentase tertib administrasi	%	65,14	65,14	100,00				Kecamatan Jambe
				pemerintahan desa								
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			98,09	Kecamatan Jambe
			PEMERINTAHAN DESA						105.490.970,00	103.480.970,00		
		Kecamatan Jayanti									98,05	Kecamatan Jayanti
									14.721.108.515,00	14.433.353.448,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			96,32	Kecamatan Jayanti
			KABUPATEN/KOTA						6.584.443.162,00	6.341.973.708,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100	100	100,00			99,48	Kecamatan Jayanti
			PELAYANAN PUBLIK						6.226.879.213,00	6.194.618.200,00		
				Persentase pemenuhan PATEN	%	91,87	91,87	100,00				Kecamatan Jayanti
				sesuai dengan standar								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	100	100	100,00			99,56	Kecamatan Jayanti
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					1.463.460.140,00	1.457.088.040,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			99,62	Kecamatan Jayanti
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						118.488.700,00	118.038.700,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			96,44	Kecamatan Jayanti
			UMUM						172.110.700,00	165.976.800,00		
			PROGRAM PEMBINAAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			99,96	Kecamatan Jayanti
			DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						155.726.600,00	155.658.000,00		
		Kecamatan Kemiri									98,83	Kecamatan Kemiri

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
									16.438.177.540,00	16.245.794.079,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			97,95	Kecamatan Kemiri
			KABUPATEN/KOTA						7.241.696.410,00	7.092.903.949,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	91,5	91,5	100,00			99,47	Kecamatan Kemiri
			PELAYANAN PUBLIK						7.321.148.500,00	7.282.062.500,00		
				Persentase pemeliharaan Fasilitas	%	100	100	100,00				Kecamatan Kemiri
				Umum yang terpelihara								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	100	100	100,00			99,93	Kecamatan Kemiri
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					1.327.837.830,00	1.326.949.830,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			99,99	Kecamatan Kemiri
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						185.435.200,00	185.415.200,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	89,25	89,25	100,00			99,44	Kecamatan Kemiri

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			UMUM						187.047.200,00	186.005.200,00		
				Persentase tertib administrasi	%	100	100	100,00				Kecamatan Kemiri
				pemerintahan desa								
			PROGRAM PEMBINAAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			98,54	Kecamatan Kemiri
			DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						175.012.400,00	172.457.400,00		
		Kecamatan Sukadiri									98,32	Kecamatan Sukadiri
									15.260.293.177,00	15.003.496.302,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			97,13	Kecamatan Sukadiri
			KABUPATEN/KOTA						7.582.789.829,00	7.365.430.814,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	91	91	100,00			99,50	Kecamatan Sukadiri
			PELAYANAN PUBLIK						6.209.413.108,00	6.178.352.108,00		
				Persentase pemenuhan PATEN	%	100	100	100,00				Kecamatan Sukadiri
				sesuai dengan standar								

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	89	100	112,36			99,82	Kecamatan Sukadiri
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					1.079.830.700,00	1.077.937.300,00		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	77	77	100,00			98,72	Kecamatan Sukadiri
			KETERTIBAN UMUM						136.286.400,00	134.536.400,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	70	70	100,00			97,48	Kecamatan Sukadiri
			UMUM						123.016.000,00	119.913.700,00		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	89	89	100,00			98,74	Kecamatan Sukadiri
			PEMERINTAHAN DESA						128.957.140,00	127.325.980,00		
		Kecamatan Cisauk									99,11	Kecamatan Cisauk
									32.156.850.975,00	31.869.734.874,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	14,19	14,19	100,00			98,79	Kecamatan Cisauk
			KABUPATEN/KOTA						10.015.854.532,00	9.894.962.493,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	20,42	20,42	100,00			99,26	Kecamatan Cisauk
			PELAYANAN PUBLIK						18.894.943.431,00	18.754.781.940,00		
				Persentase pemenuhan PATEN	%	16,28	16,28	100,00				Kecamatan Cisauk
				sesuai dengan standar								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	18,25	18,25	100,00			99,46	Kecamatan Cisauk
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					2.353.013.412,00	2.340.207.041,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	24,12	24,12	100,00			99,34	Kecamatan Cisauk
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						227.801.100,00	226.287.900,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	14,63	14,63	100,00			97,12	Kecamatan Cisauk
			UMUM						399.007.700,00	387.509.700,00		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	15,31	15,31	100,00			99,91	Kecamatan Cisauk
			PEMERINTAHAN DESA						266.230.800,00	265.985.800,00		
		Kecamatan Sepatan									98,85	Kecamatan Sepatan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
		Timur							20.433.294.180,00	20.198.194.267,00		Timur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			97,67	Kecamatan Sepatan Timur
			KABUPATEN/KOTA						7.219.523.000,00	7.051.429.552,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara dan pemenuhan PATEN sesuai	%	100	100	100,00			99,45	Kecamatan Sepatan Timur
			PELAYANAN PUBLIK	dengan standar					11.768.871.680,00	11.703.930.015,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	85	85	100,00			99,93	Kecamatan Sepatan Timur
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					707.955.120,00	707.463.820,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum	%	100	100	100,00			99,87	Kecamatan Sepatan Timur
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						196.189.600,00	195.925.200,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			99,68	Kecamatan Sepatan Timur
			UMUM						320.326.180,00	319.301.480,00		
				Persentase tertib administrasi	%	42,86	42,86	100,00				Kecamatan Sepatan

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
				pemerintahan desa								Timur
			PROGRAM PEMBINAAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			99,87	Kecamatan Sepatan Timur
			DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						220.428.600,00	220.144.200,00		
		Kecamatan Sindang									99,16	Kecamatan Sindang
		Jaya							16.270.993.662,00	16.134.550.377,00		Jaya
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			98,77	Kecamatan Sindang Jaya
			KABUPATEN/KOTA						8.505.952.194,00	8.401.529.056,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	100	100,00			99,70	Kecamatan Sindang Jaya
			PELAYANAN PUBLIK						5.807.805.738,00	5.790.573.291,00		
				Persentase pemeliharaan Fasilitas	%	100	100	100,00				Kecamatan Sindang
				Umum yang terpelihara								Jaya
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	85	85	100,00			98,94	Kecamatan Sindang Jaya

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					1.393.143.400,00	1.378.355.700,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Sindang Jaya
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						190.356.800,00	190.356.800,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Sindang Jaya
			UMUM						159.559.030,00	159.559.030,00		
			PROGRAM PEMBINAAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Sindang Jaya
			DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						214.176.500,00	214.176.500,00		
		Kecamatan Kelapa									98,97	Kecamatan Kelapa
		Dua							48.526.527.077,00	48.024.338.735,00		Dua
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			98,06	Kecamatan Kelapa Dua
			KABUPATEN/KOTA						20.754.037.009,00	20.351.723.235,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	85	85	100,00			99,61	Kecamatan Kelapa Dua

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PELAYANAN PUBLIK						16.062.727.900,00	16.000.240.900,00		
				Persentase pemeliharaan Fasilitas	%	100	100	100,00				Kecamatan Kelapa
				Umum yang terpelihara								Dua
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	100	100	100,00			99,78	Kecamatan Kelapa Dua
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					10.868.158.468,00	10.844.065.600,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	3	3	100,00			99,34	Kecamatan Kelapa Dua
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						425.804.400,00	423.015.000,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			99,51	Kecamatan Kelapa Dua
			UMUM						304.812.500,00	303.308.000,00		
			PROGRAM PEMBINAAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			91,89	Kecamatan Kelapa Dua
			DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						110.986.800,00	101.986.000,00		
		Kecamatan Solear									99,23	Kecamatan Solear
									19.625.718.219,00	19.475.373.312,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			98,02	Kecamatan Solear
			KABUPATEN/KOTA						7.228.221.446,00	7.085.401.804,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	91,35	91,35	100,00			99,93	Kecamatan Solear
			PELAYANAN PUBLIK						10.550.248.223,00	10.542.736.218,00		
				Persentase pemenuhan PATEN	%	75	75	100,00				Kecamatan Solear
				sesuai dengan standar								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Solear
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					1.374.465.150,00	1.374.451.890,00		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	43	43	100,00			100,00	Kecamatan Solear
			KETERTIBAN UMUM						206.077.400,00	206.077.400,00		
			PROGRAM	Persentase rekomendasi yang	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Solear
			PENYELENGGARAAN	ditindaklanjuti					163.358.100,00	163.358.100,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			URUSAN PEMERINTAHAN									
			UMUM									
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Solear
			PEMERINTAHAN DESA						103.347.900,00	103.347.900,00		
		Kecamatan Mekar									98,82	Kecamatan Mekar
		Baru							20.459.464.962,00	20.217.669.558,00		Baru
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			97,96	Kecamatan Mekar Baru
			KABUPATEN/KOTA						9.024.399.593,00	8.840.695.974,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	100	100,00			99,38	Kecamatan Mekar Baru
			PELAYANAN PUBLIK						9.187.184.859,00	9.130.632.082,00		
				Persentase pemeliharaan Fasilitas	%	100	100	100,00				Kecamatan Mekar
				Umum yang terpelihara								Baru
			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	100	100	100,00			99,90	Kecamatan Mekar Baru

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			MASYARAKAT DESA DAN									
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					1.382.723.620,00	1.381.377.620,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			99,98	Kecamatan Mekar Baru
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						219.684.390,00	219.635.390,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			99,99	Kecamatan Mekar Baru
			UMUM						461.411.250,00	461.361.250,00		
			PROGRAM PEMBINAAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			99,95	Kecamatan Mekar Baru
			DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						184.061.250,00	183.967.242,00		
		Kecamatan									98,77	Kecamatan
		Sukamulya							16.344.846.390,00	16.143.845.658,00		Sukamulya
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			98,07	Kecamatan Sukamulya
			KABUPATEN/KOTA						7.953.802.666,00	7.800.407.835,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100	100	100,00			99,39	Kecamatan Sukamulya

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			PEMERINTAHAN DAN									
			PELAYANAN PUBLIK						6.534.274.026,00	6.494.161.200,00		
				Persentase pemenuhan PATEN	%	100	100	100,00				Kecamatan
				sesuai dengan standar								Sukamulya
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	100	100	100,00			99,50	Kecamatan Sukamulya
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					1.160.183.298,00	1.154.390.223,00		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			99,78	Kecamatan Sukamulya
			KETERTIBAN UMUM						161.184.000,00	160.834.000,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	25	25	100,00			100,00	Kecamatan Sukamulya
			UMUM						249.973.000,00	249.973.000,00		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			99,53	Kecamatan Sukamulya
			PEMERINTAHAN DESA						285.429.400,00	284.079.400,00		
		Kecamatan Gunung									99,41	Kecamatan Gunung

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
		Kaler							18.023.085.468,00	17.916.740.527,00		Kaler
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			98,80	Kecamatan Gunung Kaler
			KABUPATEN/KOTA						6.548.766.598,00	6.469.949.680,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	100	100,00			99,71	Kecamatan Gunung Kaler
			PELAYANAN PUBLIK						8.943.122.460,00	8.917.320.960,00		
				Persentase pemeliharaan Fasilitas	%	100	100	100,00				Kecamatan Gunung
				Umum yang terpelihara								Kaler
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat	%	100	100	100,00			99,90	Kecamatan Gunung Kaler
			KELURAHAN	pembinaan/pemberdayaan					1.747.259.780,00	1.745.590.730,00		
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Gunung Kaler
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						159.827.440,00	159.827.440,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00			99,99	Kecamatan Gunung Kaler

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			UMUM						455.448.470,00	455.390.997,00		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100,00			100,00	Kecamatan Gunung Kaler
			PEMERINTAHAN DESA						168.660.720,00	168.660.720,00		
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN											
	UMUM								118.795.778.333,00	115.628.531.201,00	97,33	
1	KESATUAN BANGSA										97,33	
	DAN POLITIK								118.795.778.333,00	115.628.531.201,00		
		Badan Kesatuan									97,33	Badan Kesatuan
		Bangsa dan Politik							118.795.778.333,00	115.628.531.201,00		Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100,00			96,08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			KABUPATEN/KOTA						12.904.192.029,00	12.397.988.224,00		
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA	Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	0,09	0,09	100,00			97,77	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			DAN KARAKTER						11.318.089.898,00	11.065.325.413,00		

NO	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
			KEBANGSAAN									
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	Persentase Pendidikan Politik di Daerah	%	8,61	8,61	100,00			98,35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			SERTA BUDAYA POLITIK						86.868.763.166,00	85.438.636.964,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	%	14,29	14,29	100,00			89,02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			KEMASYARAKATAN						1.220.422.400,00	1.086.446.400,00		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	0,19	0,19	100,00			89,13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			SOSIAL, DAN BUDAYA						2.642.030.000,00	2.354.811.000,00		
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	%	12,94	12,94	100,00			85,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			SOSIAL						3.842.280.840,00	3.285.323.200,00		

2.2.3 Evaluasi RKPD 2025 Sampai dengan Triwulan I

Hasil evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 memperlihatkan kondisi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I. Realisasi Pendapatan Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan I bila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2025 sebesar 19,59 %, sedangkan untuk belanja daerah jika dibandingkan dengan Belanja Daerah APBD Tahun 2025 sebesar 19,78 %.

Tabel 2.53
LRA Kabupaten Tangerang S.D Triwulan I Tahun 2025

KODE	URAIAN	APBD 2025	Penjabaran/ Pergeseran	Selisih	Realisasi SD TW I	%
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.681.265.325.888,00	4.681.265.325.888,00	-	1.002.275.031.567,70	21,41
4.1.01	Pajak Daerah	3.763.500.000.000,00	3.763.500.000.000,00	-	787.212.998.367,00	20,92
4.1.02	Retribusi Daerah	173.297.291.886,00	173.297.291.886,00	-	46.640.589.313,00	26,91
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.509.521.940,00	60.509.521.940,00	-	0,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.548.978.636.887,00	3.543.189.648.887,00	(5.788.988.000,00)	780.413.568.561,00	21,99
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.190.458.687.000,00	3.184.669.699.000,00	(5.788.988.000,00)	566.894.880.659,00	17,77
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	358.519.949.887,00	358.519.949.887,00	-	213.518.687.902,00	59,56
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	8.230.243.962.775,00	8.224.454.974.775,00	(5.788.988.000,00)	1.782.688.600.128,70	21,66
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	6.267.103.555.261,03	6.167.620.709.069,03	(99.482.846.192,00)	1.167.037.647.395,00	18,62
5.1.01	Belanja Pegawai	2.783.330.402.162,79	2.783.330.402.162,79	-	642.787.018.557,00	23,09
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.108.429.484.973,24	2.998.146.638.781,24	(110.282.846.192,00)	467.137.449.213,00	15,03
5.1.05	Belanja Hibah	356.074.068.125,00	365.574.068.125,00	9.500.000.000,00	57.113.179.625,00	16,04
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.269.600.000,00	20.569.600.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.363.427.081.497,97	1.465.120.939.689,97	101.693.858.192,00	89.923.547.324,00	6,60
5.2.01	Belanja Modal Tanah	106.598.843.340,00	106.598.843.340,00	-	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.609.434.585,00	381.563.279.033,00	8.953.844.448,00	22.445.593.303,00	6,02
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	359.108.873.878,40	446.709.482.297,40	87.600.608.419,00	5.842.524.892,00	1,63
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.918.129.984,57	506.057.535.309,57	5.139.405.325,00	61.520.631.129,00	12,28
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.551.895.500,00	23.551.895.500,00	-	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	639.904.210,00	639.904.210,00	-	114.798.000,00	17,94
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000,00	22.000.000.000,00	(8.000.000.000,00)	1.165.958.737,00	3,89
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	22.000.000.000,00	(8.000.000.000,00)	1.165.958.737,00	3,89
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	22.000.000.000,00	(8.000.000.000,00)	1.165.958.737,00	3,89
5.4	BELANJA TRANSFER	939.713.326.016,00	939.713.326.016,00	-	445.018.260.897,00	47,36
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	388.414.633.516,00	388.414.633.516,00	-	198.187.989.910,00	51,02
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	551.298.692.500,00	551.298.692.500,00	-	246.830.270.987,00	44,77
	JUMLAH BELANJA DAERAH	8.600.243.962.775,00	8.594.454.974.775,00	(5.788.988.000,00)	1.703.145.414.353,00	19,80
	SURPLUS / (DEFISIT)	(370.000.000.000,00)	(370.000.000.000,00)	-	79.543.185.775,70	(21,50)
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	-	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	-	0,00	0,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	317.647.451.336,00	317.647.451.336,00	-	0,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	82.352.548.664,00	82.352.548.664,00	-	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	0,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD 2025	Penjabaran/ Pergeseran	Selisih	Realisasi SD TW I	%
1	2	3	4	5	6	7
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	0,00	0,00
6.2.04.05	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	370.000.000.000,00	370.000.000.000,00	-	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(0,00)			79.543.185.775,70	0,00

Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 24,87% dan capaian anggaran sebesar 19,80%.

Tabel 2.54
Realisasi Keuangan dan Fisik s.d Triwulan I Tahun 2025

No	SKPD	Keuangan					FISIK
		APBD 2025	Penjabaran/ Pergeseran	Selisih	Realisasi	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan	2.168.955.692.156,00	2.177.937.080.969,00	8.981.388.813,00	306.204.282.341,00	14,12	20,07
2	Dinas Kesehatan	1.839.656.653.500,00	1.876.459.368.030,00	36.802.714.530,00	392.616.844.672,00	21,34	23,59
3	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	462.805.005.858,00	466.776.025.053,00	3.971.019.195,00	56.921.436.564,00	12,30	25
4	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	369.351.115.687,00	379.889.690.830,00	10.538.575.143,00	10.004.483.462,00	2,71	25
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43.871.119.801,00	43.369.043.801,00	(502.076.000,00)	7.411.672.939,00	16,89	
6	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman	359.117.406.681,00	356.864.665.726,00	(2.252.740.955,00)	7.930.629.014,00	2,21	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	37.063.200.873,00	35.484.232.298,00	(323.633.174.383,00)	8.663.596.020,00	23,38	17,72
8	Dinas Sosial	69.268.354.563,00	76.166.823.382,00	39.103.622.509,00	4.369.416.519,00	6,31	23,16
9	Dinas Tenaga Kerja	39.668.666.822,00	40.018.736.862,00	(29.249.617.701,00)	5.563.345.227,00	14,02	36,86
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.539.442.654,00	17.096.084.614,00	(22.572.582.208,00)	4.109.312.726,00	22,17	24,97
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	230.564.007.766,00	228.024.641.176,00	209.485.198.522,00	34.493.754.545,00	14,96	24,39
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41.333.640.489,00	39.490.854.887,00	(191.073.152.879,00)	6.627.624.139,00	16,03	20,42
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	48.525.151.892,00	46.608.235.692,00	(1.916.916.200,00)	7.598.721.301,00	15,66	25
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47.800.288.885,00	46.693.431.122,00	(1.831.720.770,00)	8.813.687.326,00	18,44	23,37
15	Dinas Perhubungan	112.081.047.278,00	112.035.550.903,00	(45.496.375,00)	18.762.327.599,00	16,74	25
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	85.135.850.043,00	83.760.409.523,00	(1.375.440.520,00)	15.811.236.165,00	18,57	23,96
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	32.489.233.631,00	30.712.313.288,00	(1.776.920.343,00)	5.292.081.539,00	16,29	24,59
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.685.815.142,00	25.307.188.787,00	(1.378.626.355,00)	6.123.476.496,00	22,95	23,77

No	SKPD	Keuangan					FISIK
		APBD 2025	Penjabaran/Pergeseran	Selisih	Realisasi	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	53.519.492.958,00	51.658.685.798,00	(1.860.807.160,00)	11.733.308.249,00	21,92	24,87
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	23.347.565.292,00	22.481.932.537,00	(865.632.755,00)	4.988.453.760,00	21,37	26,47
21	Dinas Perikanan	28.671.195.500,00	29.499.737.092,00	828.541.592,00	6.406.117.926,00	22,34	31,44
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.673.315.531,00	67.581.158.459,00	5.907.842.928,00	12.517.578.804,00	20,30	24,96
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.620.223.738,00	22.480.956.755,00	(139.266.983,00)	5.657.272.356,00	25,01	23,98
24	Sekretariat Daerah	219.420.416.672,00	230.826.014.162,00	11.405.597.490,00	66.973.862.301,00	30,52	24,09
25	Sekretariat DPRD	144.097.518.813,00	116.687.994.513,00	(27.409.524.300,00)	28.445.355.371,00	19,74	23,04
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46.902.646.111,00	43.143.127.351,00	(3.759.518.760,00)	7.491.675.965,00	15,97	20
27	Badan Pendapatan Daerah	123.959.296.973,00	121.681.951.873,00	(2.277.345.100,00)	15.363.059.080,00	12,39	40,51
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	48.282.119.994,00	45.650.816.424,00	(2.631.303.570,00)	10.841.772.056,00	22,46	24,95
29	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	969.713.326.016,00	961.713.326.016,00	(8.000.000.000,00)	446.184.219.634,00	46,01	38
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37.138.187.964,00	35.610.077.850,00	(1.528.110.114,00)	6.705.569.521,00	18,06	25
31	Inspektorat Kabupaten	57.855.198.017,00	51.940.972.317,00	(5.914.225.700,00)	11.170.727.603,00	19,31	25
32	Kecamatan Tigaraksa	34.795.485.273,00	34.101.958.934,00	(693.526.339,00)	8.382.249.362,00	24,09	24,17
33	Kecamatan Cikupa	29.364.821.059,00	28.625.457.349,00	(739.363.710,00)	8.079.772.614,00	27,52	24,82
34	Kecamatan Panongan	25.870.141.642,00	25.309.281.917,00	(560.859.725,00)	4.732.808.630,00	18,29	24,88
35	Kecamatan Curug	36.524.785.261,00	35.626.325.061,00	(898.460.200,00)	7.363.863.035,00	20,16	24,54
36	Kecamatan Legok	24.631.554.828,00	24.023.336.413,00	(608.218.415,00)	4.630.353.708,00	18,80	25
37	Kecamatan Pasar Kemis	46.221.671.658,00	45.360.972.828,00	(860.698.830,00)	12.533.212.225,00	27,12	24,17
38	Kecamatan Balaraja	22.419.038.340,00	21.935.882.340,00	(483.156.000,00)	4.631.483.206,00	20,66	25
39	Kecamatan Kresek	16.634.510.132,00	16.162.491.852,00	(472.018.280,00)	4.428.787.197,00	26,62	25
40	Kecamatan Kronjo	17.692.790.337,00	17.189.668.337,00	(503.122.000,00)	5.177.743.262,00	29,26	25
41	Kecamatan Mauk	20.494.391.880,00	20.589.171.337,00	94.779.457,00	4.834.340.638,00	23,59	24,94
42	Kecamatan Rajeg	31.449.254.733,00	30.851.737.283,00	(597.517.450,00)	6.425.528.710,00	20,43	23,15
43	Kecamatan Sepatan	26.356.932.549,00	25.898.072.849,00	(458.859.700,00)	5.024.595.894,00	19,06	24,11
44	Kecamatan Teluknaga	22.865.085.379,00	22.383.222.379,00	(481.863.000,00)	5.948.382.918,00	26,02	25
45	Kecamatan Cisoka	17.562.807.678,00	16.867.639.078,00	(695.168.600,00)	3.563.425.863,00	20,29	24,75
46	Kecamatan Pakuhaji	25.203.238.105,00	24.411.210.505,00	(792.027.600,00)	3.275.866.819,00	13,00	23,84
47	Kecamatan Kosambi	28.682.058.057,00	27.817.884.507,00	(864.173.550,00)	4.765.239.799,00	16,61	12,96
48	Kecamatan Pagedangan	26.964.129.080,00	26.425.153.880,00	(538.975.200,00)	4.685.412.665,00	17,38	24,7
49	Kecamatan Jambe	16.637.083.822,00	16.228.643.002,00	(408.440.820,00)	4.637.710.358,00	27,88	25
50	Kecamatan Jayanti	13.501.105.307,00	13.097.073.907,00	(404.031.400,00)	2.465.380.056,00	18,26	25
51	Kecamatan Kemiri	15.060.616.816,00	14.530.081.141,00	(530.535.675,00)	2.165.820.241,00	14,38	25
52	Kecamatan Sukadiri	14.526.222.431,00	14.146.952.861,00	(379.269.570,00)	2.534.585.168,00	17,45	22,92
53	Kecamatan Cisauk	23.060.107.845,00	22.437.418.277,00	(622.689.568,00)	4.284.865.506,00	18,58	25
54	Kecamatan Sepatan Timur	23.456.348.947,00	23.018.207.597,00	(438.141.350,00)	4.717.184.448,00	20,11	25
55	Kecamatan Sindang Jaya	20.017.117.416,00	19.449.633.131,00	(567.484.285,00)	4.212.443.054,00	21,04	25

No	SKPD	Keuangan					FISIK
		APBD 2025	Penjabaran/Pergeseran	Selisih	Realisasi	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Kecamatan Kelapa Dua	47.214.475.059,00	46.070.911.159,00	(1.143.563.900,00)	11.766.953.013,00	24,92	24,62
57	Kecamatan Solear	18.991.417.246,00	18.712.563.396,00	(278.853.850,00)	3.337.995.760,00	17,58	25
58	Kecamatan Mekar Baru	17.660.225.622,00	17.003.806.962,00	(656.418.660,00)	4.323.216.895,00	24,48	24,85
59	Kecamatan Sukamulya	14.930.071.430,00	14.459.911.880,00	(470.159.550,00)	3.329.700.821,00	22,30	25
60	Kecamatan Gunung Kaler	18.730.135.049,00	18.116.737.439,00	(613.397.610,00)	4.634.513.939,00	24,74	25
61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32.614.142.494,00	29.952.439.084,00	(2.661.703.410,00)	10.455.077.329,00	32,06	25
JUMLAH		8.600.243.962.775,00	8.594.454.974.775,00	(5.788.988.000,00)	1.703.145.414.353,00	19,80	24,87

Hasil evaluasi capaian pelaksanaan program 1tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 memperlihatkan kondisi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I. Realisasi Pendapatan Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan I bila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2025 sebesar 19,59 %, sedangkan untuk belanja daerah jika dibandingkan dengan Belanja Daerah APBD Tahun 2025 sebesar 19,78 %.

Tabel 2.55
Evaluasi Capaian Program Sampai dengan Triwulan I

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	95.5	1.277.952.984.744	25	246.195.015.672	25	246.195.015.672	26.18	19.26	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	100	898.758.503.285	99.39	26.482.177.000	99.39	26.482.177.000	99.39	2.95	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	100		97.49		97.49		97.49		Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	100		77.23		77.23		77.23		Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan	%	100		64.91		64.91		64.91		Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase implementasi kurikulum muatan lokal	%	100	835.523.500	25	0	25	0	25.00	0.00	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1	%	100	88.845.390	25	0	25	0	25.00	0.00	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal)	%	100	301.224.050	25	0	25	0	25.00	0.00	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	725.950.901.076	25	172.648.165.766	25	172.648.165.766	25.00	23.78	Dinas Kesehatan
	Persentase Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0.10	339.328.057.169	0.10	55.696.071.876	0.10	55.696.071.876	100.00	16.41	Dinas Kesehatan
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi	%	92.59		89.28		89.28		96.43		Dinas Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan keschatan sesuai standar	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100		19.75		19.75		19.75		Dinas Kesehatan
	Persentase Balita Wasting	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas	Angka	84.90		84.50		84.50		99.53		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial	%	90.00		20		20		22.22		Dinas Kesehatan
	Persentase alat kesehatan memenuhi standar	%	82.00		20		20		24.39		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	%	100	9.778.278.000	25	2.271.230.000	25	2.271.230.000	25.00	23.23	Dinas Kesehatan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase P-IRT yang sesuai standar	%	100	912.850.200	22	166.155.200	22	166.155.200	22.00	18.20	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar	%	100		16		16		16.00		Dinas Kesehatan
	Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	%	100	8.946.300.000	25	1.521.024.000	25	1.521.024.000	25.00	17.00	Dinas Kesehatan
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
	Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
	Persentase Organisasi Masyarakat kemitraan bidang Kesehatan	%	100		25		25		25.00		Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	41.907.063.983	100	10.332.859.879	100	10.332.859.879	100.00	24.66	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	31.266.052.793	100	7.461.135.532	100	7.461.135.532	100.00	23.86	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi	%	77.20	108.888.928.070	-	12.180.513.565	-	12.180.513.565	0.00	11.19	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
	Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik	%	90.9		-		-		0.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Sarana Air Bersih	%	80.67	69.808.787.430		67.500.000	0	67.500.000	0.00	0.10	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat	%	100				0		0.00		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase kapasitas lumpur tinja	%	0.143	13.161.927.338		0	0	0	0.00	0.00	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
	Persentase meningkatnya sarana sanitasi bagi masyarkat miskin	%	96.75				0		0.00		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase Infrastruktur Drainase dalam Kondisi Baik	%	12.43	51.545.695.891	-	2.717.977.200	-	2.717.977.200	0.00	5.27	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang Berkualitas Baik	%	65	318.858.762.657	-	2.936.403.670	-	2.936.403.670	0.00	0.92	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	%	45	25.056.426.000	-	78.460.250	-	78.460.250	0.00	0.31	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	%	4.89	264.434.337.110	-	31.769.591.840	-	31.769.591.840	0.00	12.01	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Penataan Ruang yang Terselenggara	%	73	4.708.449.380	-	12.090.000	-	12.090.000	0.00	0.26	Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	19.633.480.231		4.494.552.938	0	4.494.552.938	0.00	22.89	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	%	100	1.051.672.000		78.150.000	0	78.150.000	0.00	7.43	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
	Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen	%	100				0		0.00		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	%	11.09	42.237.200.693		0	0	0	0.00	0.00	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
	Persentase Pemenuhan Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman	%	100				0		0.00		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan Yang Memenuhi Standar	%	50.64	73.296.467.983		640.910.000	0	640.910.000	0.00	0.87	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	34.494.874.251	100	7.937.439.958	100	7.937.439.958	100.00	23.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	29.911.742.498	34.15	7.645.533.520	34.15	7.645.533.520	34.15	25.56	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum	%	100	5.572.489.800	11.03	1.018.062.500	11.03	1.018.062.500	11.03	18.27	Satuan Polisi Pamong Praja

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas yang terlatih	%	11		-		-		0.00		Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	%	100		24.75		24.75		24.75		Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	100		-		-		0.00		Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana	%	100	1.541.217.550	-	3.770.000	-	3.770.000	0.00	0.24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	%	100		100		100		100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Ketangguhan Desa (IKD) : 1.1 Desa Kelurahan tangguh bencana madya	Desa	100		100		100		100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang Mendapat Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	7.332.952.000	100	168.902.000	100	168.902.000	100.00	2.30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	14.735.497.502	38.03	3.436.815.219	38.03	3.436.815.219	38.03	23.32	Dinas Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	4.407.685.330	2.46	47.004.000	2.46	47.004.000	2.46	1.07	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	%	33.33	14.319.400	-	0	-	0	0.00	0.00	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I				K	Rp.(000)	
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	32.70	1.999.478.575	9.64	591.869.850	9.64	591.869.850	29.48	29.60	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	52.947.463.920	37.75	3.951.734.000	37.75	3.951.734.000	37.75	7.46	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	%	100	1.278.314.000	19.70	269.844.500	19.70	269.844.500	19.70	21.11	Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP	%	85	234.367.400	24.29	19.484.500	24.29	19.484.500	28.58	8.31	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	18.193.512.582	25	3.830.153.447	25	3.830.153.447	25.00	21.05	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Ketersediaan data makro dan mikro ketenagakerjaan	%	100	83.334.900	-	0	-	0	0.00	0.00	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten	%	75	15.249.465.980	11.23	1.161.745.200	11.23	1.161.745.200	14.97	7.62	Dinas Tenaga Kerja
	Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi	Jumlah	35		-		-		0.00		Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar	%	96.87	3.840.654.920	17	257.781.500	17	257.781.500	17.55	6.71	Dinas Tenaga Kerja
	Jumlah Wirausaha Baru	Orang/tahun	660		-		-		0.00		Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa Pengusaha-pekerja per tahun	%	1.25	2.617.026.850	0.8	313.665.080	0.8	313.665.080	64.00	11.99	Dinas Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	12.496.861.444	25	3.408.039.096	25	3.408.039.096	25.00	27.27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender	%	100	1.591.763.360	25	169.271.630	25	169.271.630	25.00	10.63	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan	%	100	747.714.990	25	123.900.000	25	123.900.000	25.00	16.57	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	%	100	613.265.120	25	53.817.000	25	53.817.000	25.00	8.78	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah	%	100	46.839.800	25	0	25	0	25.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Seluruh Klaster Hak Anak	%	100	905.067.200	25	91.610.000	25	91.610.000	25.00	10.12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan terhadap Anak	%	100	694.572.700	25	134.075.000	25	134.075.000	25.00	19.30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan yang Aktif	%	53.95	1.254.727.800	-	1.890.000	-	1.890.000	0.00	0.15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10%	%	100	5.255.155.390	25	70.952.600	25	70.952.600	25.00	1.35	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	%	23.03		-		-		0.00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	85.5		-		-		0.00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA)	Dokumen	1	604.603.940	-	61.638.070	-	61.638.070	0.00	10.19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi	%	86.36		-		-		0.00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	85	134.489.500	-	33.907.500	-	33.907.500	0.00	25.21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Kebutuhan Lahan bagi Kepentingan Umum	%	35.40	116.123.246.490		691.200.000	0	691.200.000	0.00	0.60	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	71.780.882.249	25	20.531.561.965	25	20.531.561.965	25.00	28.60	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Dibuat	Sungai	3	2.332.148.800	0	108.492.000	0	108.492.000	0.00	4.65	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air	%	50	1.523.172.520	0	22.500.000	0	22.500.000	0.00	1.48	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2.260.415.928		137.024.482	0	0	0.00	0.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I				K	Rp.(000)	
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Kawasan Keanekaragaman Hayati yang Terkelola	%	1.20	17.954.677.250	0	1.603.440.832	0	1.603.440.832	0.00	8.93	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3	%	100	95.227.740	25	26.672.400	25	26.672.400	25.00	28.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah	250	328.917.000	60	26.850.000	60	26.850.000	24.00	8.16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian terhadap Kinerja Masyarakat	Jumlah	27	741.396.000	27	20.900.000	27	20.900.000	100.00	2.82	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100	274.043.500	25	27.000.000	25	27.000.000	25.00	9.85	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola	%	62	104.267.511.463	15	4.525.347.500	15	4.525.347.500	24.19	4.34	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				1.059.874.992		259.964.775	0	0	0.00	0.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				1.196.370.000		294.150.933	0	0	0.00	0.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				1.218.036.000		268.225.920	0	0	0.00	0.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				1.164.780.000		254.344.393	0	0	0.00	0.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				976.314.000		205.484.690	0	0	0.00	0.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				1.428.766.992		315.797.244	0	0	0.00	0.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				1.088.262.000		242.805.320	0	0	0.00	0.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				1.199.550.000		250.525.645	0	0	0.00	0.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				1.043.874.000		206.415.376	0	0	0.00	0.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				6.785.200.992		1.158.471.800	0	0	0.00	0.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				9.305.219.750		6.197.676.500	0	0	0.00	0.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	29.886.040.837	100	6.285.247.599	100	6.285.247.599	100.00	21.03	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Perekaman KTP-el	%	99.47	8.532.136.550	99.999	132.671.500	99.999	132.671.500	100.53	1.55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan SKPWNl yang diterbitkan	%	100		100		100		100.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan SKDWNl yang diterbitkan	%	100		100		100		100.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan kepemilikan KIA	%	70		59.26		59.26		84.66		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun	%	99.50	165.920.000	91.81	96.680.040	91.81	96.680.040	92.27	58.27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan	%	100		100		100		100.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	%	100		100		100		100.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian	%	100		100		100		100.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	%	100	837.577.500	100	110.835.000	100	110.835.000	100.00	13.23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	%	85		0		0		0.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	69.180.000	100	2.190.000	100	2.190.000	100.00	3.17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	11.389.317.500	100	3.108.365.739	100	3.108.365.739	100.00	27.29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PENATAAN DESA	jumlah rekomendasi penataan desa	Jumlah	1	602.899.870	1	561.565.000	1	561.565.000	100.00	93.14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya	Desa	1	591.478.240	1	280.330.250	1	280.330.250	100.00	47.39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Mandiri	Desa	35	7.464.957.962	-	955.820.412	-	955.820.412	0.00	12.80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Desa yang Menghasilkan PADes	Desa	3	26.559.582.120	3	2.951.119.850	3	2.951.119.850	100.00	11.11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Prosentase lembaga masyarakat yang difasilitasi	%	100		100		100		100.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	19.103.850.958		4.246.203.156	0	4.246.203.156	0.00	22.23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Presentase rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian kependudukan (hasil sinkronisasi dan survey) yang ditindaklanjuti	%	100	1.187.345.600		238.616.800	0	238.616.800	0.00	20.10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Rumah Data di Kampung KB yang memenuhi klasifikasi Paripurna	%	35				0		0.00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase ketersediaan pemetaan dan sistem infomasi pengendalian kependudukan	%	100				0		0.00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Rate/ mCPR) (%)	%	71.50	10.292.019.763	-	1.454.151.070	-	1.454.151.070	0.00	14.13	Dinas Pengendalian Penduduk dan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
											Keluarga Berencana
	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	27.13		-		-		0.00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase hasil kegiatan advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan keluarga	%	95				0		0.00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung KB yang dibina dan sesuai dengan standar penilaian	%	70				0		0.00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase capaian kinerja pemberdayaan KKS	%	92.25	16.110.214.800	-	2.840.326.700	-	2.840.326.700	0.00	17.63	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prosentase keluarga beresiko yang mendapat pendampingan dan ditindaklanjuti	%	94		-		-		0.00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prosentase kerjasama dengan mitra kerja	%	100				0		0.00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	39.539.996.020	25	9.218.487.874	25	9.218.487.874	25.00	23.31	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Perlangkapan Jalan	%	75	72.495.554.883	-	11.918.878.386	-	11.918.878.386	0.00	16.44	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	%	66.67		-		-		0.00		Dinas Perhubungan
	Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio	0.5		-		-		0.00		Dinas Perhubungan
	Terminal yang terbangun	Unit	1		-		-		0.00		Dinas Perhubungan
	Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi	Jumlah	2		-		-		0.00		Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	26.229.898.323	25	6.694.154.312	25	6.694.154.312	25.00	25.52	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik	%	100	5.849.382.400	25	1.092.396.000	25	1.092.396.000	25.00	18.68	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet	%	100	46.786.349.000	25	0	25	0	25.00	0.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	12.397.908.461	25	3.449.992.063	25	3.449.992.063	25.00	27.83	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	%	21.43	130.555.500	7.5	48.170.800	7.5	48.170.800	35.00	36.90	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan	%	27.03	140.047.000	-	0	-	0	0.00	0.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Koperasi berkualitas	%	17.86	1.256.702.250	-	0	-	0	0.00	0.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	%	26.79	1.025.993.667	5.36	334.948.070	5.36	334.948.070	20.01	32.65	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan	%	3.1	6.739.147.682	0.586	435.996.500	0.586	435.996.500	18.90	6.47	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	%	2.14	9.021.958.728	0.35	1.022.974.106	0.35	1.022.974.106	16.36	11.34	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan	%	1.60		0.44		0.44		27.50		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Presentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Terfasilitasi dana Pemerintah melalui UPDB	%	5.95		2.25		2.25		37.82		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	22.252.876.267	42.28	5.640.579.246	42.28	5.640.579.246	42.28	25.35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pengembangan Potensi Investasi Regional (PIR) di dalam Aplikasi Investasi	%	25	792.034.100	5	76.065.000	5	76.065.000	20.00	9.60	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase implementasi pelayanan publik berbasis keterpaduan (MPP)	%	75		0		0		0.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investasi	%	33.33	341.600.580	22.5	21.860.000	22.5	21.860.000	67.51	6.40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Perizinan yang sesuai SOP	%	79.0	1.134.289.460	74	212.373.400	74	212.373.400	93.67	18.72	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	74	302.000.680	0	91.452.050	0	91.452.050	0.00	30.28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	%	80	484.387.700	67	81.146.800	67	81.146.800	83.75	16.75	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA											

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	12.514.793.828	25	2.740.170.145	25	2.740.170.145	25.00	21.90	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	%	33	6.249.370.800	8.3	1.990.904.160	8.3	1.990.904.160	25.15	31.86	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Dayasaing Keolahragaan	%	33	28.101.069.510	9	7.182.994.500	9	7.182.994.500	27.27	25.56	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase statistik sektoral	%	65	1.117.430.600	16.25	79.718.000	16.25	79.718.000	25.00	7.13	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	prosentase layanan kemanan informasi	%	65	3.777.349.200	16.25	128.840.515	16.25	128.840.515	25.00	3.41	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan	%	33	1.609.556.560	-	55.500.000	-	55.500.000	0.00	3.45	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	20.033.754.117	25	5.129.235.814	25	5.129.235.814	25.00	25.60	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase pemenuhan pembinaan perpustakaan	%	100	1.268.333.410	5	72.758.000	5	72.758.000	5.00	5.74	Dinas Perpustakaan dan Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip	%	100	995.315.600	3	56.106.000	3	56.106.000	3.00	5.64	Dinas Perpustakaan dan Arsip
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip	%	100	184.529.410	2	6.424.000	2	6.424.000	2.00	3.48	Dinas Perpustakaan dan Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	13.475.909.400	100	3.206.850.316	100	3.206.850.316	100.00	23.80	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	%	0.6	5.239.027.480	0.14	93.156.500	0.14	93.156.500	23.33	1.78	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya	%	1.5	6.704.475.300	0.35	2.030.142.860	0.35	2.030.142.860	23.33	30.28	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	%	1.5	4.080.324.912	0.2	1.075.968.250	0.2	1.075.968.250	13.33	26.37	Dinas Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	33	348.070.500	3	1.000.000	3	1.000.000	9.09	0.29	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	90	39.552.000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/ dipantau	%	75.00	1.785.062.000	72.22	556.318.140	72.22	556.318.140	96.29	31.17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor	%	65.93	808.985.467	0	84.007.000	0	84.007.000	0.00	10.38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTP	%	95.24	727.830.280	47.76	228.417.000	47.76	228.417.000	50.15	31.38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri	%	30	289.224.400	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	16.475.863.458	25	4.361.574.076	25	4.361.574.076	25.00	26.47	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	%	28.72	940.960.950	0	191.114.640	0	191.114.640	0.00	20.31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang diawasi	%	25.05	132.370.600	8.01	6.000.000	8.01	6.000.000	31.98	4.53	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi	%	25.05	1.281.107.600	4.37	229.841.500	4.37	229.841.500	17.45	17.94	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Animo masyarakat bertransmigrasi pada Tahun n	Jumlah	8	34.741.630	-	0	-	0	0.00	0.00	Dinas Tenaga Kerja
SEKRETARIAT DAERAH											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan admintrasi umum dan Sarana prasarana	%	100	119.505.346.014	25	23.644.162.345	25	23.644.162.345	25.00	19.79	Sekretariat Daerah
	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu	%	100		25		25		25.00		Sekretariat Daerah
	Komponen Pelaporan SAKIP	%	11.42		0		0		0.00		Sekretariat Daerah
	Persentase pemenuhan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	%	100		25		25		25.00		Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori	Tinggi	95.803.652.158	-	42.992.965.456	-	42.992.965.456	0.00	44.88	Sekretariat Daerah
	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	Baik		-		-		0.00		Sekretariat Daerah
	Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan	%	100		25		25		25.00		Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan	%	100	4.111.418.500	25	949.984.500	25	949.984.500	25.00	23.11	Sekretariat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
	Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan	%	100				0		0.00		Sekretariat Daerah
	Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Indeks	100		-		-		0.00		Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	9.850.000	23.16	19.734.502.605	23.16	19.734.502.605	23.16	200.350.28	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	80.594.800	24.22	8.710.852.766	24.22	8.710.852.766	24.22	10.808.21	Sekretariat DPRD
PERENCANAAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	23.489.906.821		5.292.991.637	0	5.292.991.637	0.00	22.53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	%	100	6.883.507.530		1.031.825.200	0	1.031.825.200	0.00	14.99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Ketersedian Data Pembangunan	%	66				0		0.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	%	100				0		0.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

[illegible]

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	110.749.252.523	25	15.330.705.721	25	15.330.705.721	25.00	13.84	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	28.473.269.179	23	8.491.323.182	23	8.491.323.182	23.00	29.82	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah	%	98.25	4.230.373.800	5	322.017.800	5	322.017.800	5.09	7.61	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Kinerja Pengelolaan Akuntansi Daerah	%	95		7		7		7.37		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%	100		14		14		14.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase capaian kinerja pengelolaan aset daerah	%	97	10.508.013.170	-	2.115.333.080	-	2.115.333.080	0.00	20.13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase pemanfaatan barang milik daerah yang digunausahakan	%	85		-		-		0.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	%	79	10.932.699.350	20	922.516.350	20	922.516.350	25.32	8.44	Badan Pendapatan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	%	100		25		25		25.00		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah	%	100		25		25		25.00		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Capaian Target Pajak Daerah	%	100		25		25		25.00		Badan Pendapatan Daerah
KEPEGAWAIAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	24.456.601.610	25	6.698.039.762	25	6.698.039.762	25.00	27.39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN	Nilai	37.5	5.082.612.740	-	634.396.800	-	634.396.800	0.00	12.48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Pengadaan ASN	Nilai	40		-		-		0.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Pengembangan Karier	Nilai	75		-		-		0.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai	40		-		-		0.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I				K	Rp.(000)	
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja	Nilai	80		-		-		0.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai	40		-		-		0.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan	Nilai	16		-		-		0.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai	24		-		-		0.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Aspek Pengembangan Karier	Nilai	75	6.070.863.500	-	125.400.000	-	125.400.000	0.00	2.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana kelitbangan	%	67	3.646.880.800		643.606.000	0	643.606.000	0.00	17.65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam penerapan Inovasi daerah	%	52				0		0.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
INSPEKTORAT DAERAH											

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	41.675.503.317	100	9.468.739.423	100	9.468.739.423	100.00	22.72	Inspektorat Kabupaten
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)	%	66.07	6.469.982.400	66.07	864.887.000	66.07	864.887.000	100.00	13.37	Inspektorat Kabupaten
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas	%	68.97	3.795.486.600	68.97	954.690.000	68.97	954.690.000	100.00	25.15	Inspektorat Kabupaten
KECAMATAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	13.216.713.375	30	3.505.736.865	30	3.505.736.865	30.00	26.53	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	10.700.483.470	25	2.359.905.250	25	2.359.905.250	25.00	22.05	Kecamatan Cikupa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	10.959.276.312	25	3.119.590.230	25	3.119.590.230	25.00	28.47	Kecamatan Panongan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	16.580.828.961	25	4.117.391.835	25	4.117.391.835	25.00	24.83	Kecamatan Curug

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	10.658.582.406	25	2.742.644.131	25	2.742.644.131	25.00	25.73	Kecamatan Legok
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	15.210.380.550	28	3.788.798.905	28	3.788.798.905	28.00	24.91	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	10.146.595.792	25	2.203.792.706	25	2.203.792.706	25.00	21.72	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	8.405.923.309		1.809.531.197	0	1.809.531.197	0.00	21.53	Kecamatan Kresek
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	8.438.542.238	25	1.975.355.438	25	1.975.355.438	25.00	23.41	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	9.468.961.725	20	2.591.126.498	20	2.591.126.498	20.00	27.36	Kecamatan Mauk
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	10.598.547.393	25	2.396.935.365	25	2.396.935.365	25.00	22.62	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	9.653.800.769	25	2.384.944.508	25	2.384.944.508	25.00	24.70	Kecamatan Sepatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	999.743.560	25	2.531.769.162	25	2.531.769.162	25.00	253.24	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	8.282.141.983	25	2.146.558.279	25	2.146.558.279	25.00	25.92	Kecamatan Cisoka
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	16.053.089.205	25	3.441.917.799	25	3.441.917.799	25.00	21.44	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	10.833.107.269	25	2.458.310.968	25	2.458.310.968	25.00	22.69	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	8.029.480.789		2.377.651.489	0	2.377.651.489	0.00	29.61	Kecamatan Jambe
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	6.544.069.367	25	1.429.678.258	25	1.429.678.258	25.00	21.85	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	7.870.399.316	100	1.705.883.541	100	1.705.883.541	100.00	21.67	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	8.839.150.121	25	1.916.828.168	25	1.916.828.168	25.00	21.69	Kecamatan Sukadiri

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	90	11.226.841.568		0	0	0	0.00	0.00	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	9.170.407.584	25	2.683.090.204	25	2.683.090.204	25.00	29.26	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	17.383.227.117	25	4.790.502.466	25	4.790.502.466	25.00	27.56	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	8.162.536.366		1.777.508.838	0	1.777.508.838	0.00	21.78	Kecamatan Solear
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	9.304.018.369	70	2.860.802.925	70	2.860.802.925	70.00	30.75	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	8.321.829.656	20	2.035.457.021	20	2.035.457.021	20.00	24.46	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	7.077.126.843	25	2.026.513.229	25	2.026.513.229	25.00	28.63	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	7.639.124.497	25	1.783.905.648	25	1.783.905.648	25.00	23.35	Kecamatan Sepatan Timur

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100	17.567.988.379	25	3.802.887.497	25	3.802.887.497	25.00	21.65	Kecamatan Tigaraksa
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	95.00	11.672.775.800	25	4.158.720.200	25	4.158.720.200	26.32	35.63	Kecamatan Cikupa
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Cikupa
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	94	11.127.570.777	23.50	778.370.000	23.50	778.370.000	25.00	6.99	Kecamatan Panongan
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Panongan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	98.30	14.856.288.200	20	2.570.013.200	20	2.570.013.200	20.35	17.30	Kecamatan Curug
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	84		20		20		23.81		Kecamatan Curug
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	8.926.964.000	25	707.981.000	25	707.981.000	25.00	7.93	Kecamatan Legok
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Legok
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	16.206.398.193	25	4.948.707.000	25	4.948.707.000	25.00	30.54	Kecamatan Pasar Kemis
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	87		20		20		22.99		Kecamatan Pasar Kemis

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	7.714.034.648	25	1.243.736.000	25	1.243.736.000	25.00	16.12	Kecamatan Balaraja
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	65		16.25		16.25		25.00		Kecamatan Balaraja
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	89.50	5.856.997.023		1.907.890.000	0	1.907.890.000	0.00	32.57	Kecamatan Kresek
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	89.50				0		0.00		Kecamatan Kresek
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	5.708.897.539	25	1.363.172.000	25	1.363.172.000	25.00	23.88	Kecamatan Kronjo
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Kronjo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	11.5	7.014.135.676	2	1.311.374.000	2	1.311.374.000	17.39	18.70	Kecamatan Mauk
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100		20		20		20.00		Kecamatan Mauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	15.219.398.530	25	2.931.225.000	25	2.931.225.000	25.00	19.26	Kecamatan Rajeg
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Rajeg
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	91.80	12.578.094.000	25	1.775.525.000	25	1.775.525.000	27.23	14.12	Kecamatan Sepatan
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	91.9		25		25		27.20		Kecamatan Sepatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100	9.602.661.800	25	2.977.960.600	25	2.977.960.600	25.00	31.01	Kecamatan Teluknaga
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	99		25		25		25.25		Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	5.704.444.895	-	815.669.384	-	815.669.384	0.00	14.30	Kecamatan Cisoka
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Cisoka
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	9.884.364.243	50	21.630.000	50	21.630.000	50.00	0.22	Kecamatan Pakuhaji
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	94		60		60		63.83		Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100	4.923.227.972	17	9.535.000	17	9.535.000	17.00	0.19	Kecamatan Kosambi
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100		17		17		17.00		Kecamatan Kosambi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	89.70	9.632.393.000	22,425	1.176.700.000	22,425	1.176.700.000	24.53	12.22	Kecamatan Pagedangan
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	92		23		23		25.00		Kecamatan Pagedangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	89.50	6.422.309.762		2.450.630.800	0	2.450.630.800	0.00	38.16	Kecamatan Jambe
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	89.50				0		0.00		Kecamatan Jambe

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100	4.629.298.040	7	385.540.000	7	385.540.000	7.00	8.33	Kecamatan Jayanti
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	91.94		25		25		27.19		Kecamatan Jayanti
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	91.7	4.703.682.825	91.7	0	91.7	0	100.00	0.00	Kecamatan Kemiri
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100		100		100		100.00		Kecamatan Kemiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	78	3.611.136.760	19	162.383.000	19	162.383.000	24.36	4.50	Kecamatan Sukadiri
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	92		23		23		25.00		Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100	7.520.579.517		0	0	0	0.00	0.00	Kecamatan Cisauk
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100				0		0.00		Kecamatan Cisauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	7.533.946.147	25	711.543.200	25	711.543.200	25.00	9.44	Kecamatan Sindang Jaya
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	90	10.552.362.000	25	1.954.762.000	25	1.954.762.000	27.78	18.52	Kecamatan Kelapa Dua
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Kelapa Dua

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100	9.144.356.830	10	1.153.495.172	10	1.153.495.172	10.00	12.61	Kecamatan Solear
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	78		20		20		25.64		Kecamatan Solear
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	80	4.922.691.883	47	251.944.570	47	251.944.570	58.75	5.12	Kecamatan Mekar Baru
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	70		48		48		68.57		Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100	4.358.608.000	25	1.017.390.000	25	1.017.390.000	25.00	23.34	Kecamatan Sukamulya
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100	8.112.829.031	25	1.506.721.450	25	1.506.721.450	25.00	18.57	Kecamatan Gunung Kaler
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100	13.270.026.700	25	2.373.474.000	25	2.373.474.000	25.00	17.89	Kecamatan Sepatan Timur
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	87	2.268.483.300	40	878.713.000	40	878.713.000	45.98	38.74	Kecamatan Tigaraksa

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	75.00	2.024.151.920	20	814.909.334	20	814.909.334	26.67	40.26	Kecamatan Cikupa
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	28.57	2.386.105.788	5	785.195.400	5	785.195.400	17.50	32.91	Kecamatan Panongan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	80	3.445.967.000	20	614.850.000	20	614.850.000	25.00	17.84	Kecamatan Curug
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	2.327.651.590	25	913.461.100	25	913.461.100	25.00	39.24	Kecamatan Legok
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	1.691.589.200	25	511.119.000	25	511.119.000	25.00	30.22	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	3.569.570.400	25	1.120.466.500	25	1.120.466.500	25.00	31.39	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	1.834.756.800		696.914.000	0	696.914.000	0.00	37.98	Kecamatan Kresek
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	2.849.605.860	25	1.925.629.800	25	1.925.629.800	25.00	67.58	Kecamatan Kronjo

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	1.181.105.550	20	383.737.500	20	383.737.500	20.00	32.49	Kecamatan Mauk
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	4.179.430.300	25	894.069.619	25	894.069.619	25.00	21.39	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	87	2.185.481.080	20	605.658.000	20	605.658.000	22.99	27.71	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	1.799.327.000	25	705.153.000	25	705.153.000	25.00	39.19	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	2.355.023.600	25	553.005.000	25	553.005.000	25.00	23.48	Kecamatan Cisoka
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	3.060.657.490	60	787.857.000	60	787.857.000	60.00	25.74	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	75.00	5.562.749.230	20	1.310.681.000	20	1.310.681.000	26.67	23.56	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	90.00	4.319.470.600	22,5	394.852.400	22,5	394.852.400	24.44	9.14	Kecamatan Pagedangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	75.00	1.356.344.030		593.642.800	0	593.642.800	0.00	43.77	Kecamatan Jambe
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	1.541.298.500	39	622.607.798	39	622.607.798	39.00	40.40	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	1.254.380.000	100	404.707.700	100	404.707.700	100.00	32.26	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	1.213.003.400	25	440.951.000	25	440.951.000	25.00	36.35	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	93.75	3.330.065.560		0	0	0	0.00	0.00	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	87	2.459.990.700	15	779.014.150	15	779.014.150	17.24	31.67	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	9.480.432.265	25	3.149.744.900	25	3.149.744.900	25.00	33.22	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	1.237.009.250		425.847.500	0	425.847.500	0.00	34.43	Kecamatan Solear

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	70	2.068.158.510	43	1.058.765.900	43	1.058.765.900	61.43	51.19	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	1.603.869.474	25	267.853.800	25	267.853.800	25.00	16.70	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	2.286.672.035	25	902.246.430	25	902.246.430	25.00	39.46	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	86.5	1.543.433.400	21.62	553.804.800	21.62	553.804.800	24.99	35.88	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	423.202.080	30	135.861.000	30	135.861.000	30.00	32.10	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	204.052.000	25	0	25	0	25.00	0.00	Kecamatan Cikupa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	213.859.900	25	57.461.000	25	57.461.000	25.00	26.87	Kecamatan Panongan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	73	300.021.000	15	42.948.000	15	42.948.000	20.55	14.31	Kecamatan Curug

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	93.685.000	25	13.800.000	25	13.800.000	25.00	14.73	Kecamatan Legok
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	29.887.000	25	11.268.000	25	11.268.000	25.00	37.70	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	162.346.700	25	38.180.000	25	38.180.000	25.00	23.52	Kecamatan Balaraja
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	95.379.000		11.424.000	0	11.424.000	0.00	11.98	Kecamatan Kresek
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	10	280.335.200	25	0	25	0	250.00	0.00	Kecamatan Kronjo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	72.334.800	20	22.340.000	20	22.340.000	20.00	30.88	Kecamatan Mauk
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	35.744.000	25	5.309.000	25	5.309.000	25.00	14.85	Kecamatan Rajeg
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	114.413.000	25	17.484.000	25	17.484.000	25.00	15.28	Kecamatan Sepatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	119.342.300	25	44.863.100	25	44.863.100	25.00	37.59	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	108.679.200	25	33.348.000	25	33.348.000	25.00	30.68	Kecamatan Cisoka
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	90.060.600	40	0	40	0	40.00	0.00	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	599.986.200		0	0	0	0.00	0.00	Kecamatan Kosambi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	80.00	60.119.800	20	0	20	0	25.00	0.00	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	83.656.000		25.984.000	0	25.984.000	0.00	31.06	Kecamatan Jambe
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	63.975.000	25	6.270.000	25	6.270.000	25.00	9.80	Kecamatan Jayanti
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	150.305.500	100	30.164.000	100	30.164.000	100.00	20.07	Kecamatan Kemiri

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	114.430.900	25	8.973.000	25	8.973.000	25.00	7.84	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	94.75	349.482.400		0	0	0	0.00	0.00	Kecamatan Cisauk
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	71.857.000	25	9.384.000	25	9.384.000	25.00	13.06	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	10	100.680.000	2	33.242.000	2	33.242.000	20.00	33.02	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	57	136.244.800	5	24.840.000	5	24.840.000	8.77	18.23	Kecamatan Solear
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	228.726.790	65	56.452.280	65	56.452.280	65.00	24.68	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	122.789.800	25	9.000.000	25	9.000.000	25.00	7.33	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	80.415.880	25	27.547.880	25	27.547.880	25.00	34.26	Kecamatan Gunung Kaler

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	141.965.250	25	6.000.000	25	6.000.000	25.00	4.23	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	456.733.800	10	37.335.000	10	37.335.000	10.00	8.17	Kecamatan Tigaraksa
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100		10		10		10.00		Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	200.475.000	25	17.430.000	25	17.430.000	25.00	8.69	Kecamatan Cikupa
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	483.384.500	25	41.418.600	25	41.418.600	25.00	8.57	Kecamatan Panongan
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Panongan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	81	350.521.500	20	18.960.000	20	18.960.000	24.69	5.41	Kecamatan Curug
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	89.30		20		20		22.40		Kecamatan Curug
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	371.262.400	25	24.044.000	25	24.044.000	25.00	6.48	Kecamatan Legok
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Legok
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	399.639.400	25	19.847.000	25	19.847.000	25.00	4.97	Kecamatan Pasar Kemis
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Pasar Kemis

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	222.740.600	25	13.130.000	25	13.130.000	25.00	5.89	Kecamatan Balaraja
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	88		22		22		25.00		Kecamatan Balaraja
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	85	341.350.000		0	0	0	0.00	0.00	Kecamatan Kresek
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	70.89				0		0.00		Kecamatan Kresek
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	225.161.000	25	0	25	0	25.00	0.00	Kecamatan Kronjo
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Kronjo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	191.095.110	20	0	20	0	20.00	0.00	Kecamatan Mauk
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	90		20		20		22.22		Kecamatan Mauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	167.992.000	25	15.173.000	25	15.173.000	25.00	9.03	Kecamatan Rajeg
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Rajeg
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	90		25		25		27.78		Kecamatan Rajeg
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	94	244.946.400	25	5.750.000	25	5.750.000	26.60	2.35	Kecamatan Sepatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	78		20		20		25.64		Kecamatan Sepatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	75	135.870.000	20	45.055.000	20	45.055.000	26.67	33.16	Kecamatan Teluknaga
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	84	375.591.800	25	6.001.200	25	6.001.200	29.76	1.60	Kecamatan Cisoka
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Cisoka
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	65	362.592.800	70	0	70	0	107.69	0.00	Kecamatan Pakuhaji
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100		42		42		42.00		Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	556.323.900		0	0	0	0.00	0.00	Kecamatan Kosambi
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100				0		0.00		Kecamatan Kosambi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	10	228.054.800	10	0	10	0	100.00	0.00	Kecamatan Pagedangan
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	90.00		22,5		22,5		24.44		Kecamatan Pagedangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	89.50	257.355.420		32.933.000	0	32.933.000	0.00	12.80	Kecamatan Jambe

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	70.89				0		0.00		Kecamatan Jambe
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	258.142.000	25	9.190.000	25	9.190.000	25.00	3.56	Kecamatan Jayanti
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Jayanti
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	89.50	413.858.500	89.50	0	89.50	0	100.00	0.00	Kecamatan Kemiri
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100		100		100		100.00		Kecamatan Kemiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	262.482.280	25	0	25	0	25.00	0.00	Kecamatan Sukadiri
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	94.00	314.899.800		0	0	0	0.00	0.00	Kecamatan Cisauk
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	94.00				0		0.00		Kecamatan Cisauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	47.999.500	25	4.686.500	25	4.686.500	25.00	9.76	Kecamatan Sindang Jaya
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	87		15		15		17.24		Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	349.380.800	25	57.100.000	25	57.100.000	25.00	16.34	Kecamatan Kelapa Dua
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	186.040.200		7.691.000	0	7.691.000	0.00	4.13	Kecamatan Solear
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	90		20		20		22.22		Kecamatan Solear
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	70	316.769.280	50	76.625.590	50	76.625.590	71.43	24.19	Kecamatan Mekar Baru
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	70		50		50		71.43		Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	50	158.372.200	15	0	15	0	30.00	0.00	Kecamatan Sukamulya
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	414.721.290	25	126.742.080	25	126.742.080	25.00	30.56	Kecamatan Gunung Kaler

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100		25		25		25.00		Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	220.179.750	25	0	25	0	25.00	0.00	Kecamatan Sepatan Timur
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	71.43		17.85		17.85		24.99		Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	168.838.000	15	21.716.000	15	21.716.000	15.00	12.86	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	203.725.000	25	15.885.000	25	15.885.000	25.00	7.80	Kecamatan Cikupa
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	139.084.640	25	7.519.000	25	7.519.000	25.00	5.41	Kecamatan Panongan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	92.698.400		0	0	0	0.00	0.00	Kecamatan Curug
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	133.003.200	25	0	25	0	25.00	0.00	Kecamatan Legok
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	96.479.000	25	9.774.000	25	9.774.000	25.00	10.13	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	120.594.200	25	4.810.000	25	4.810.000	25.00	3.99	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100.104.000		3.028.000	0	3.028.000	0.00	3.02	Kecamatan Kresek
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	190.248.500	25	0	25	0	25.00	0.00	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	74.253.000	20	13.595.000	20	13.595.000	20.00	18.31	Kecamatan Mauk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	50.142.000	25	21.235.000	25	21.235.000	25.00	42.35	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	128.967.000	25	9.170.000	25	9.170.000	25.00	7.11	Kecamatan Sepatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	137.619.000	25	39.625.000	25	39.625.000	25.00	28.79	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	41.757.600	25	8.844.000	25	8.844.000	25.00	21.18	Kecamatan Cisoka
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	0	40	0	40	0	40.00	0.00	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	122.508.000	20	3.106.000	20	3.106.000	20.00	2.54	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	136.041.600	25	0	25	0	25.00	0.00	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	79.497.000		7.347.500	0	7.347.500	0.00	9.24	Kecamatan Jambe
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	60.291.000	18	12.094.000	18	12.094.000	18.00	20.06	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	137.455.000	100	25.065.000	100	25.065.000	100.00	18.24	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	106.749.400	25	5.450.000	25	5.450.000	25.00	5.11	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	165.432.200	25	24.725.000	25	24.725.000	25.00	14.95	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	93.295.000	25	19.500.000	25	19.500.000	25.00	20.90	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	98.469.800		9.019.500	0	9.019.500	0.00	9.16	Kecamatan Solear
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	163.442.130	65	18.625.630	65	18.625.630	65.00	11.40	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	364.602.300	20	0	20	0	20.00	0.00	Kecamatan Sukamulya

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	144.972.360	25	44.742.870	25	44.742.870	25.00	30.86	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	264.759.200		0	0	0	0.00	0.00	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	203.478.000	25	0	25	0	25.00	0.00	Kecamatan Sepatan Timur
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	12.417.401.144	20	2.614.727.029	20	2.614.727.029	20.00	21.06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	0.09	6.725.332.420	0,02	518.347.800	0,02	518.347.800	0.00	7.71	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik di Daerah	%	8.61	6.529.299.800	1,72	6.112.465.300	1,72	6.112.465.300	11.61	93.62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	%	14.29	827.196.500	2,86	235.960.200	2,86	235.960.200	14.00	28.53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	0.19	1.152.080.500	0,04	413.392.000	0,04	413.392.000	0.00	35.88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	%	12.94	2.301.128.720	2,59	560.185.000	2,59	560.185.000	15.46	24.34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4		5		6		7		8
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											
NON URUSAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	10.913.884.772	80	2.522.767.819	80	2.522.767.819	80.00	23.12	Kecamatan Pakuhaji

2.2.4 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals(SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Laut; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

1. Tanpa Kemiskinan

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk mengentaskan kemiskinan tertuang dalam misi pemerintah daerah yang tertulis pada RPJPD Kabupateng Tangerang 2025-2045 pada misi ke-2 yaitu “mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal” dengan sasaran tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pada tahun 2025 pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Tangerang semakin meningkat, pengangguran menurun dan penduduk miskin berkurang. Hal serupa juga tercantum pada RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029, yakni pada misi ke-3 yaitu “Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan” dengan tujuan pada RPJMD untuk menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang selalu berupaya menekan tingkat kemiskinan yang diukur dari nilai persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun. Dari tujuh target pada Tujuan 1 SDGs yang ditetapkan oleh secara nasional, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan untuk dapat melaksanakan Target 1.2, Target 1.3, Target 1.4 dan Target 1.5.

Sehingga, terdapat enam belas target yang sudah dicapai, dengan sembilan target yang akan dicapai, dan dua target yang perlu perhatian khusus. Target yang perlu perhatian khusus yaitu pada indikator meningkatnya persentase KB baru metode kontrasepsi jangka panjang, Dimana indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi bisa dari sisi individu, sosial, maupun sistem pelayanan kesehatan. Dari sisi individual kemungkinan kurangnya pengetahuan dan informasi, dimana banyak pasangan usia subur yang kurang memahami manfaat, efektivitas, dan keamanan MKJP seperti IUD (Intrauterine Device), implan, atau sterilisasi.

Misinformasi atau mitos seputar efek samping juga sering menjadi hambatan. Faktor sosial dipengaruhi norma sosial atau budaya tertentu, mungkin memengaruhi keputusan pasangan dalam memilih metode kontrasepsi. Misalnya, ada anggapan bahwa MKJP hanya

untuk wanita yang tidak ingin memiliki anak lagi. Kemungkinan lainnya yaitu sistem pelayanan kesehatan dimana fasilitas kesehatan yang tidak memadai, kurangnya tenaga medis terlatih, atau sulitnya akses ke layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, memengaruhi rendahnya adopsi MKJP. Indikator selanjutnya yaitu menurunnya angka putus pakai alat kontrasepsi dimana faktor yang mempengaruhi yaitu, efek samping yang dirasakan setelah menggunakan kontrasepsi, penggunaan alat kontrasepsi tertentu, terutama yang tidak disubsidi atau tidak ditanggung asuransi, bisa menjadi hambatan, dan perubahan dalam rencana keluarga, seperti keinginan untuk segera memiliki anak, sering kali menyebabkan penghentian penggunaan kontrasepsi. Target-target tersebut perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah bersmaa OPD Kabupaten Tangerang dalam mendukung pencapaian Tujuan 1 SDGs. Secara detail pencapaian Tujuan 1 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.56
Hasil Evaluasi Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Progra m	Program	Kode Indikator SDGs	Indikator pada RPD	Satuan	Tahun Dasar 2020	Target Tahunan				Realisasi				Sumber Pendanan	Perangkat Daerah	Capaian
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional																
1106,15	Program Pemberdayaa n Fakir Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraa n Sosial (PPKS)	1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	6,23	5,64	5,15	4,78	5,94	7,12	6,92	6,93	6,55	APBD Kab Tangeran g	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah	
		1.2.1	Persentase penduduk diatas garis kemiskina n	Persen	93,77	94,36	94,85	95,22	94,06	92,88	93,08	93,07	93,45		Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah	
		1.2.1	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera	Persen	41,19	27,7	26,7	25,7		NA	NA	NA				N/A

		1.2.1	Menurunnya jumlah fakir miskin	orang	88,135	97,739	96,343	94,873	80,726	88,135	97,739	96,343	80,726		Dinas Sosial	
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.																
1106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi	1.3.1*	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	72	99,95	99,96	99,97	100	99,35	99,35	99,97	97,6	APBD Kab Tangerang	Dinas Sosial	
			Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Persen					30,04				30,04		Dinas Sosial	
		1.3.1*	Persentase penyandang penyakit sosial dan PPKS lainnya yang ditangani	Persen		20,56	29,16	38,17	NA	7,58	25,67	26,67	NA			NA
		1.3.1*	Persentase gelandangan pengemis yang ditangani	Persen		41	64	92	NA	4,51	25	50	NA			NA

	Kesejahteraan Sosial	1.3.1*	Prosentase lansia terlanter yang ditangani	Persen		6,88	10,04	14,05	NA	38,21	41,78	52,89	NA			NA
		1.3.1*	Prosentase anak terlanter yang ditangani	Persen		1,56	2,33	3,18	NA	1,2	2,05	2,39	NA			NA
		1.3.1*	Prosentase penyandang disabilitas yang ditangani	orang		19,71	30,66	42,12	NA	20,06	34,34	40,8	NA			NA
1106.17	Program Pembinaan Panti dan Rumah Singgah	1.3.1*	Prosentase (PPKS) yang mendapat pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi dengan cepat	Persen		61,59	73,33	100	NA	100	100	NA	NA			NA
1106.18	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.3.1*	Jumlah pendamping PKH yang aktif	orang		300	350	375	164	223	223	179	164			

		1.3.1*	Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen		100	100	100	100	100	100	100	105			
		1.3.1*	Prosentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana daerah/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	85	100			
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.																
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan	1.4.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	85,5	92,5	93,5	94,5	100	99,65	99,17	99,11	99,39	APBD Kab Tangerang	Dinas Pendidikan	

1101,24	Tahun Jenjang Sekolah Dasar	1.4.1*	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Nilai	0,038	0,04	0,04	0,05	0,05	28	29,62	27,99	27,65			
1101,23	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan	1.4.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	65,8	75,3	77,3	79,3	100	80,91	96,57	92,87	97,49			
	Tahun Jenjang Sekolah Menengah Pertama	1.4.1*	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Nilai	0,038	0,04	0,04	0,05	0,05	29	27,71	26,43	26,81			
	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	1.4.1*	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	81	82	83	84	95	83,21	97,44	100,67	100,27			

1102,26		1.4.1*	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	Nilai	0,157	0,16	0,164	0,168	0,019	0,013	0,013	NA	0,018		Dinas Kesehatan	
		1.4.1*	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Nilai	0,0062	0,0063	0,0064	0,0066	1	0,0008	0,0008	NA	0,8	APBD Kab Tangerang		
		1.4.1*	Rasio dokter per satuan penduduk	Nilai	0,026	0,031	0,036	0,043		0,052	0,052	NA	0,056			
		1.4.1*	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	Persen		100	100	100	100	101,2	85,4	93,2	100			
		1.4.1*	Persentase keluarga dengan akses jamban sehat	Persen		76	78	80	90	78,97	88,79	89,91	97,54			
1208,15	Program Keluarga Berencana	1.4.1*	Meningkatnya Persentase KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka	Persen	24,61	26,3	26,41	26,65	26,89	22,92	10,62	9,01	9,36	APBD Kab Tangerang	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

1.5.3	Program Penanggulangan Bencana	1.5.4*	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persentase	75	80	95	100	100	96	100	100	100	APBD Kab Tangerang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.5.1*	Jumlah desa dan kelurahan yang tanggap bencana	Desa / Kelurahan		55	56	56		53	56	56		APBD Kab Tangerang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Indeks Ketangguhan Desa (IKD) : 1.1 Desa Kelurahan tangguh bencana madya	Jumlah Desa dan Kelurahan					91				91			
		1.5.1*	Persentase korban bencana yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

1.5.4	Program Pencegahan , Penanggula n gan, Penyelamat a n Kebakaran dan Penyelamat a n Non Kebakaran		Persentase penangana n kebakaran dalam kurun waktu response time 15 menit	Persent a se	-	55	80	90		56	60	64				
			Persentase Korban Kebakaran dan non kebakaran yang mendapat Layanan Penyelamat a n dan Evakuasi	Persent a se					100				100			
			Jumlah masyarakat yang mendapat layanan pencegahan dan penanggula n gan bahaya kebakaran	Orang					1500				1500			

2. Tanpa Kelaparan

Dari delapan target pada Tujuan 2 SDGs yang ditetapkan secara nasional, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Target 2.1, Target 2.2, Target 2.3, Target 2.4 dan Target 2.5 yang akan diadopsi. Dalam target Tanpa Kelaparan terdapat tiga belas indikator yang diantaranya sembilan indikator yang sudah tercapai dan empat indikator yang hampir memenuhi capaian target. Indikator pertama yang hampir memenuhi capaian yaitu ketersediaan pangan utama, faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan hampir memenuhi capaian berasal dari aspek produksi, distribusi, kebijakan, hingga faktor eksternal seperti iklim. Indikator kedua prevalensi anemia ibu hamil, dimana faktor yang mempengaruhi dapat bersifat medis, sosial, ekonomi, hingga terkait dengan sistem pelayanan kesehatan. Indikator selanjutnya yaitu prevalensi balita gizi kurang dan presentase balita malnutrisi, faktor yang mempengaruhi berasal dari aspek individu, keluarga, lingkungan, hingga sistem pelayanan kesehatan. Secara detil pencapaian Tujuan 2 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.57
Hasil Evaluasi Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Program	Program	Kode Indikator SDGs	Indikator pada RPD	Satuan	Tahun Dasar 2020	Target Tahunan				Realisasi				Sumber Pendanaan	Perangkat Daerah	Capaian
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.																
1203,15	Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat	2.1.2*	Penguatan cadangan pangan	Ton	25	25	25	25	25	18,725	25	25	71,8	APBD Kab Tangerang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		2.1.2*	Ketersediaan pangan utama	Ton	448.491	816.655	866.655	916.655	405.917	359.552	413.371	379.113	402.320			

		2.1.2*	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persen	70	80	90	91	16,9	5,9	7,5	65	95,68			
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																
1102,17	Program UKM Rujukan	2.2.3*	Prevalensi anemia ibu hamil	Persen	NA	40	40	40	6	9,7	8,2	13.80	10	APBD Kab Tangerang	Dinas Kesehatan	
1102,26		2.2.1*	Persentase balita gizi buruk	Persen	1,1	2,5	3,75	3,65	3,5	0,64	0,4	0,4	1,1			
		2.2.2*	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	3,9	2,5	3,75	3,65	3,5	2,34	2,5	2,5	4,6			
	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	2.2.3*	Presentase anemia ibu hamil	Persen	11,7	36	34	32	6	9,7	8,2	13.80	10	APBD Kab Tangerang	Dinas Kesehatan	
		2.2.2*	Presentase balita malnutrisi	Persen	18	5	7,5	7,3	7	4,3	3,5	NA	5,8			

Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.																
2001,22	Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya	2.3.1*	Produktivitas perikanan budidaya	Ton/ha		4,9	5,1	5,4		4,9	4,9	5,4		APBD Kab Tangerang	Dinas Perikanan	
2003,16	Program peningkatan produksi dan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	2.3.1*	Persentase kenaikan produksi hasil pertanian	Persen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	APBD Kab Tangerang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2003,17	Program peningkatan produksi dan penerapan teknologi peternakan	2.3.1*	Persentase kenaikan produksi hasil peternakan	Persen	1,50	1,50	1,50	1,50	1	1,50	1,50	1,50	1	APBD Kab Tangerang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.																
		2.4.1	Prosentase Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi	Persen					77,27				86,36			

			Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuangan dalam Kondisi Baik	Persen					70,2				70,26			
01.03.10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Prosentase Infrastruktur Drainase dalam Kondisi Baik	Persen					0,52				0,52			
1103,36	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		Jumlah daerah Irigasi pada lahan pertanian berkelanjutan dalam kondisi	Lokasi	NA	6,00	14,00	0,00		6	14	14		APBD Kab Tangerang	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	
Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan serta spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.																
2001,1	Program Perikanan Budidaya Air Tawar/ Air Payau	2.5.1*	Laju produksi benih ikan di BBI	Persen		10	10	14	-	12,5	25,6	14,4	-	APBD Kab Tangerang	Dinas Perikanan	-

1102.26.00	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	3.2.1*	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Bayi	203	169	159	149	3	3	2,7	4,17	4	APBD Kab Tangerang	Dinas Kesehatan	
		3.2.1*	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	Persen		100	100	100	100	101	85,4	93,2	100			
		3.2.2*	Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap	Persen		100	100	100	100	104	87,37	95,87	100			
		3.2.1*	Cakupan Pelayanan kesehatan balita	Persen		100	100	100	100	98,2	86,7	97,85	100			
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.																
1102.27.00	Program Peningkatan Penanggulangan Penyakit	3.3.2*	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100	96,06	97,06	98,06	90	70,4	74,77	86,03	100	APBD Kab Tangerang	Dinas Kesehatan	
		3.3.3*	Angka kejadian malaria	Kasus		0	0	0	12	2	5	10	22			
		3.3.1*	Persentase Screning pada populasi yang beresiko terinfeksi HIV	Persen		100	100	100	100	71	86	93,5	100			

		3.3.1*	Persentase Pengendalian Penyakit menular	Persen		100	100	100	324	100	100	100	300			
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.																
1102.27.00	Program Peningkatan Penanggulangan Penyakit	3.4.1.(b)	Persentase pelayanan pada penderita hipertensi	Persen		100	100	100	100	75,3	92	100	100	APBD Kab Tangerang	Dinas Kesehatan	
		03.04.01	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persen		100	100	100	100	98	100		101,6			
		3.3.3*	Angka kejadian malaria	Kasus	0				12	5	10		22			
		3.3.1*	Persentase Screning pada populasi yang beresiko terinfeksi HIV	Persen		100	100	100	100	71	86	93,5	100			
		3.3.1*	Persentase Pengendalian Penyakit Menular	Persen		100	100	100	12	100	100	100	22			

4. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Dari 10 indikator pada Tujuan 4 SDGs yang ditetapkan secara nasional Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Target 4.1, Target 4.2, Target 4.5 dan Target 4.c yang akan diadopsi. Berdasarkan data target dan realisasi tahun 2024, diketahui bahwa pada Target 4 sebanyak delapan indikator telah mencapai target pada tahun 2024 dan terdapat dua indikator yang akan tercapai. Target yang akan dicapai yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket B dan Angka Partisipasi Murni PAUD, faktor penghambat dari indikator ini yaitu dalam perhitungan Angka Partisipasi Murni menggunakan usia anak berdasarkan jenjang sekolah, akan tetapi di masing-masing jenjang sekolah setiap usia anak berbeda- beda . Matriks capaian tujuan pendidikan berkualitas terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59
Hasil Evaluasi Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Program	Program	Kode Indikator SDGs	Indikator pada RPD	Satuan	Tahun	Target Tahunan				Realisai				Sumber Pendanaan	Perangkat Daerah	Capaian
					Dasar 2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.																
1101,24	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jenjang Sekolah Dasar	04.01.02	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	85,5	92,5	93,5	94,5	100	99,65	94. 8	99,11	111,02	APBD Kab Tangerang	Dinas Pendidikan	
1101,23	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan	04.01.02	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	65,8	75,3	77,3	79,3	100	80,91	74,2	92,87	97,76			

	Tahun Jenjang Sekolah Menengah Pertama	4.1.2.[a]	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,1	0,1			
		4.1.2.[a]	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,04	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04			
		04.01.02	Angka rata-rata lama SEKOLAH		8,39	8,28	8,29	8,9	8,9	8,61	8,92	8,93	8,93			
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.																
1101,15	Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	4.2.2*	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD		31	34	37	40	100	48,67	61,87	80	97,75	APBD Kab Tangerang	Dinas Pendidikan	
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.																
1101,24	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	4.5.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI		85,5	92,5	93,5	94,5	100	94,78	94,61	99,11	111,02	APBD Kab Tangerang	Dinas Pendidikan	
	Jenjang Sekolah Dasar															
		4.5.1*	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	100	100	100	100		100	100	100	100			

1101,23	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jenjang Sekolah Menengah Pertama	4.5.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs		65,8	75,3	77,3	79,3		74,2	74,02	92,87	97,76			
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.																
1101,17	Program Peningkatan Mutu Guru Dan Tenaga Kependidikan	4.c.1*	Prosentase Guru Dan Tenaga Kependidikan Yang Memiliki Kompetensi			40,75	48,84	56,93	56,93	61,25	65,5	31,93	61,9	APBD Kab Tangerang	Dinas Pendidikan	

5. Kesetaraan Gender

Dari 7 target pada Tujuan 5 SDGs yang ditetapkan secara nasional, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Target 5.1, Target 5.2, dan Target 5.5 yang akan diadopsi. Matriks capaian indikator pada Kesetaraan Gender sudah memenuhi capaian semua kecuali indikator proporsi kursi yang diduduki oleh Perempuan di DPR akan tercapai, hal ini kemungkinan adanya indikasi bahwa perempuan belum mendapatkan representasi yang setara dalam lembaga legislatif, yang dapat disebabkan oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, atau politik dan perempuan mungkin masih menghadapi kendala seperti kurangnya akses ke sumber daya politik, jaringan, dan dukungan dari partai politik atau masyarakat. Capaian matriks Kesetaraan Gender terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.60
Hasil Evaluasi Tujuan 5 Kesenjangan Gender

Kode Program	Program	Kode Indikator SDGs	Indikator pada RPD	Satuan	Tahun Dasar		Target Tahunan					Realisasi			Sumber Pendanaan	Perangkat Daerah	Capaian
1	2	3	4	5	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		15	16	17
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.																	
1202.15.00	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	5.1.1*	Cakupan Kelembagaan PUG yang Aktif	Persen	80	80	90	90	100	90	90	100	100	APBD Kab Tangerang	DPPPA		
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.																	
1202.19.00	Program Advokasi Dan Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak	5.2.1*	Presentase Desa yang telah Membentuk PATBM dan PTPA	Persen	55	55	100	100	100	55	100	100	100	APBD Kab Tangerang	DPPPA		
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.																	
1202.17.00	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	5.5.2*	Prosentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan	Persen	16,67	16,67	16,67	16,67	60	16,67	16,67	18,48	63,84	APBD Kab Tangerang	DPPPA		

		5.5.1*	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	54,7	3,28	3,48	3,68	80	3,68	3,68	52,52	86			
		5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	14	20	20	20	20	14	14	14	11			
		5.5.2*	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	22,72	23,97	24,47	24,97	N/A	24,97	24,97	88,71	38,53		Dinas tenaga kerja	
		5.5.2*	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	7,64	23,97	24,47	24,97	N/A	24,79	24,97	NA	24,83			

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Dari 8 target pada Tujuan 6 SDGs yang ditetapkan secara nasional, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Target 6.1, Target 6.2, dan Target 6.3 yang akan diadopsi. Matriks capaian pada tujuan air bersih dan sanitasi layak terdapat dua target yang akan memenuhi capaian dan dua target yang memenuhi capaian di wilayah Kabupaten Tangerang dalam mendukung pencapaian Tujuan 6 SDGs. Indikator yang hampir memenuhi capaian yaitu cakupan sarana air bersih dan meningkatnya kualitas air menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas air, namun masih ada hambatan yang mencegah pencapaian target sepenuhnya. Faktor-faktor yang memengaruhi ini bisa berasal dari aspek teknis, lingkungan, sosial, hingga kebijakan. Matriks capaian indikator-indikator pada setiap target tercantum dalam tabel dibawah ini.

1205,16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.3.1*	Meningkatnya kualitas air	Nilai		56,5	57	57,5	58	56,43	58,89	60,21	55,69	APBD Kab Tangerang	DLHK	

7. Energi Bersih dan Terjangkau

Pada Dokumen RAD TPB/SDGs Kabupaten Tangerang, Terdapat satu buah target dan indikator yang telah ditetapkan untuk Tujuan 7, yaitu Target 7.1 dengan indikator persentase rumah tangga yang menggunakan Listrik yang sudah memenuhi capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pemerintah atau lembaga terkait untuk akses listrik rumah tangga telah tercapai. Ini menunjukkan juga bahwa sebagian besar atau hampir semua rumah tangga di suatu wilayah sudah teraliri listrik, sesuai dengan standar aksesibilitas dan ketersediaan energi listrik yang diharapkan.

Tabel 2.62
Hasil Evaluasi Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Program	Program	Kode Indikator SDGs	Indikator pada RPD	Satuan	Tahun Dasar 2020	Target Tahunan				Realisasi				Sumber Pendanaan	Perangkat Daerah	Capaian
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.																
		7.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	Pesen	99,22	100	100	100	100	100	100	100	100	APBD Kab Tangerang	DPMPD	

		8.3.1*	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	APBD Kab Tangerang	Dinas Tenaga Kerja	
1207.16.00	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	8.3.1.(a)	Prosentase BUMDes yang Berkembang	Persen		32,52	36,59	40,65	10	33,33	38,62	61,9	13		DPMPD	
1211.18.00	Program Fasilitas i Pembinaan Koperasi Dan UMK	8.3.1.(a)	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	Persen		16,75	16,75	16,75	16,75	36,44	18,96	40,03	43,34		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
1211.16.00	Program Peningkatan Daya Saing	8.3.1.(a)	Prosentase Usaha Mikro yang Menjalin Kemitraan	Persen	100	0,12	0,16	0,2	0,24	0,12	0,16	0,2	0,24		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	8.3.1.(a)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dipromosikan	Persen	100	0,8	1	1,2	2,4	0,8	1,3	1,4	2,4			

1211.15.00	Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	8.3.1.(a)	Prosentase pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas usaha (HKI + PIRT dan Halal)	Persen		38,7	51,6	64,5	78	54,67	59,38	77,34	79,44		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
		8.3.1.(a)	Prosentase Pelaku Usaha Mikro Yang mengikuti Pelatihan (Kewirausahaan dan Pemasaran On Line)	Persen		57,9	77,2	96,5	91,5	69,17	79,6	89,73	93,66			
	Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				0,9	1,27	1,46		0,9	1,27	1,46			
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				0,86	0,86	1,06		0,86	0,86	1,06			
	Program penyadaran, pemberdayaan,													APBD Kab Tangerang		

1213.15.00	dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepemimpinan pemuda	8.3.1*	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen		98	98	100	100	90	90	95	100		DISPOR A BUDPAR	
		8.3.1*	Persentase Wirausaha Muda	Persen	67	72	77	82	87	60	80	82	87			
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.																
1201.15.00	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	8.5.2*	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	66,64	63,94	63,99	64,03	63,94	67,05	65,88	65,88	65,88	APBD Kab Tangerang	Dinas Tenaga Kerja	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	13,06	9,32	9,05	8,8		9,06	7,88	6,94	-		Bappeda	Data belum rilis
			Persentase Pencari kerja yang dilatih	Persen	6,8	5	5	5	N/A	11,1	10,34	11,05	13,86		Dinas Tenaga Kerja	

2002.15.00	Program pengembangan destinasi, kemitraan dan pemasaran	8.9.1.(b)	Presentase Jumlah kunjungan wisatawan	Persen	71	86	88	88	89	89	90	91	91	APBD Kab Tangerang	DISPORAB U DPAR	
	n pariwisata															
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua																
1211.17.00	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	8.10.1.(a)	Prosentase Koperasi Aktif	Persen	56,8	39,9	53,2	66,5		84,70	88,33	44,74	49,26	APBD Kab Tangerang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
			Prosentase Koperasi Berkualitass	Persen		60	80	100		84,73	86,43	65,48	71,81			
1211.18.00	Program Fasilitas i Pembiayaan Koperasi Dan UMK		Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	Persen		16,75	16,75	16,75	16,75	36,44	18,96	40,03	43,34			

9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Berdasarkan tujuan 9 SDGs yang ditetapkan di tingkat nasional, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan tiga target yang akan dilaksanakan yaitu Target 9.1, 9.2, dan Target 9.c. Matriks capaian indikator-indikator pada setiap target tercantum dalam tabel dibawah ini. Berdasarkan data target dan realisasi tahun 2024, diketahui bahwa pada Target 9 memenuhi semua capaian target program SDGs.

Tabel 2.64
Hasil Evaluasi Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Kode Program	Program	Kode Indikator SDGs	Indikator pada RPD	Satuan	Tahun Dasar 2020	Target Tahunan				Realisasi				Sumber Pendanaan	Perangkat Daerah	Capaian
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.																
1103.15.00	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	9.1.1(a)	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	87,55	89,06	90,57	92,08		90,74	92,59	93,45		APBD Kab Tangerang	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	
		9.1.1(a)	Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan	Persen	43,5	62,3	81,2	100		62,34	115,1	100				
01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan		Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	Persen				3,38					3,87			
1103,18	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan	9.1.1(a)	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Terpelihara	Ruas	165	165	222	114		165	222	114				
1103.37.00	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9.1.1(a)	Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	Persen	43,5	62,3	81,2	100		62,34	115,1	100				

1210,26	Program Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	9.c.1*	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi komunikasi		50	60	80	100	100	100	100	100	100	APBD Kab Tangerang	Dinas Komunikasi dan Informatika	

10. Berkurangnya Kesenjangan

Berdasarkan sepuluh target pada tujuan 10 SDGs yang ditetapkan di tingkat nasional, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan dua target yang akan dilaksanakan yaitu Target 10.4. Matriks capaian indikator-indikator pada setiap target tercantum dalam tabel dibawah ini. Berdasarkan data target dan realisasi tahun 2024, diketahui bahwa pada pencapaian Target 10 sudah memenuhi capaian target program SDGs.

Tabel 2.65
Hasil Evaluasi Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Program	Program	Kode Indikator SDGs	Indikator pada RPD	Satuan	Tahun Dasar 2020	Target Tahunan				Realisasi				Sumber Pendanaan	Perangkat Daerah	Capaian
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional																
1106.16.00	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	10.1.1.(a)	Prosentase Eks Penyandang Penyakit Sosial dan PMKS Lainnya yang ditangani	Persen		12,78	20,56	29,16	N/A	7,58	25,67	26,67	N/A			

1106.15.00	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	10.1.1.(a)	Menurunnya Jumlah Fakir Miskin	Orang		97.739	96.343	94.873	123.300	99.637	NA	NA	123.300			
1106.17.00	Program Pembinaan Panti Dan Rumah Singgah	10.1.1.(a)	Prosentase (PPKS) yang mendapat pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi dengan cepat	Persentase		61,59	73,33	100	N/A	100	100	0	N/A			
1207,16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	10.1.1.(b)	Pengembang an Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase		NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	N/A		DPMPD	
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.																
1106.18.00	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	10..4.1	Prosentase Terpenuhi nya a kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana daerah /kota	Persentase		100	100	100	100	100	100	NA	100	APBD Kab Tangerang	Dinas Sosial	

1205,15	Pengelolaan Persampahan	11.06.01	Persentase Timbunan Sampah yang terkelola	Ton/Hari	NA	3,15	4,2	5,25	5,75	3,35	5,25	6	6,5	APBD Kab Tangerang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas																
1205,19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	11.07.01	Persentase Kawasan Keanekaragaman Hayati yang Terkelola	persen	NA	2	2	2	2	1	2	2	2	APBD Kab Tangerang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
11.2. Pada tahun 2030 menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak penyandang difabilitas dan orang tua																
2 15 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Rasio Konektivitas Kabupaten Tangerang	Rasio					0,68				0,7	APBD Kab Tangerang	Dishub	
			V/C Rasio di Jalan Kabupaten Tangerang	Rasio					0,26				0,37			

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Dalam mencapai salah satu tujuan SDGs yaitu Tujuan 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab paling tidak melibatkan kedua belah pihak dalam entitas ekonomi yaitu konsumen dan produsen. Kedua belah pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas produksi (produsen) dan aktivitas konsumsi (konsumen). Berdasarkan 5 target yang terdapat pada tujuan ini, terdapat tiga indikator yang sudah tercapai dengan baik dan dua indikator yang hampir memenuhi capaian, yaitu jumlah Cadangan pangan pemerintah dan kualitas air, artinya ada kemajuan signifikan dalam ketersediaan stok pangan dan perbaikan kualitas air, namun masih terdapat tantangan yang membuat target

1205,15	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	12.5.1*	Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3	Persen	NA	3,15	4,2	5,25	100	3,35	5,25	6	150	APBD Kab Tangerang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
Target 12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka																
1205,16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	12.6.1*	Meningkatnya kualitas udara yang cukup	Nilai	NA	68	68,5	69	71	70,14	71,06	54,09	73,33	APBD Kab Tangerang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
		12.6.1*	Meningkatnya kualitas air	Nilai	NA	56,5	57	57,5	58	56,43	58,89	60,21	55,69			

13. Penanganan Perubahan Iklim

Pemerintah Kabupaten Tanengrang sesuai kewenangannya terus berupaya berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Komitmen Kabupaten Tangerang terhadap kelestarian lingkungan tersebut guna mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan 13 yaitu Tindakan untuk perubahan iklim. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan oleh seluruh sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Tangerang. Terdapat dua target yaitu target 13.1 dan 13.2 dimana status ketercapaian belum dapat ditentukan karena tidak tersedia data yang relevan.

Tabel 2.68
Hasil Evaluasi Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Program	Program	Kode Indikator SDGs	Indikator pada RPD	Satuan	Tahun Dasar 2020	Target Tahun					Realisasi			Sumber Pendanaan	Perangkat Daerah	Capaian
						2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara																
1105,25	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	13.1.1*	Terlaksananya a penyediaan Buffer Stock Bencana untuk Korban Bencana	Paket	NA	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	NA	N/A	NA	NA	
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional																
1205,18	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	13.2.1*	Meningkatnya kualitas akses informasi sumber daya alam	Persentase	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Kab Tangerang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	

14. Ekosistem Lautan

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh menjamin ketersediaan serta pengelolaan ekosistem laut, Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki dua target yang ingin dicapai, yaitu target 14.1 dan 14.7. OPD yang berkaitan dengan program tujuan 14 di Kabupaten Tangerang adalah Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat dua program yang sudah tidak berjalan, status ketercapaian SDGs Tujuan 14 yaitu terpenuhinya capaian pada

2001,21	Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan	14.07.01	Laju Produksi Perikanan Tangkap	Persentase	NA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	APBD Kab Tangerang	Dinas Perikanan	
2001,22	Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya	2.07.01 PM	Produktivitas Perikanan Budidaya	Ton/ha	NA	4,9	5,1	5,4		4,9	4,9	5,4			APBD Kab Tangerang	Dinas Perikanan	indikator tidak digunakan

15. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh menjamin ketersediaan serta pengelolaan ekosistem daratan, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengacu pada dokumen metadata indikator SDGs. Pada dokumen tersebut terdapat dua target yang ingin dicapai, namun yang diadopsi hanya satu target yaitu; target 15.1 Pada tahun 2024, Meningkatnya kualitas SDA dalam pengelolaan dan perlindungan konservasi SDA, dimana target ini perlu perhatian khusus dimana SDA seperti hutan, air, tanah, dan keanekaragaman hayati adalah sumber daya terbatas yang harus dikelola secara berkelanjutan agar tidak habis atau rusak dan eksploitasi berlebihan, deforestasi, pencemaran, dan penggunaan SDA yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Program meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam hampir memenuhi capaian, ini menunjukkan ada kemajuan dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan ekosistem, tetapi masih ada tantangan yang harus diatasi untuk mencapai target sepenuhnya. Konservasi SDA mencakup perlindungan hutan, air, tanah, keanekaragaman hayati, dan ekosistem lainnya agar tetap berkelanjutan. Secara rinci status ketercapaian Tujuan 15 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.70
Hasil Evaluasi Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode Program	Program	Kode Indikator SDGs	Indikator pada RPD	Satuan	Tahun Dasar 2020	Target Tahun 2021				Realisasi				Sumber Pendanaan	Perangkat Daerah	Capaian
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Target 15.1 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.																
1105,25	Program Pengelolaan RTH dan Konservasi Sumber Daya Alam	15.1.1*	Meningkatnya kualitas SDA dalam pengelolaan dan perlindungan konservasi SDA	Hektar	NA	5	5	5	5	2	2	2	2	APBD Kab Tangerang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
1205,17	Program Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam	15.1.1*	Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam	Persentase	NA	25	25	30	30	25	25	25	25	APBD Kab Tangerang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	

16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Pada Tujuan 16, berdasarkan 12 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 10 target. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Tangerang memilih tiga target, yaitu; target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak; target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua, dan target 16.9, Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. Pencapaian

target untuk mendukung SDGs Tujuan 16 di Kabupaten Tangerang dilaksanakan melalui program yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029. Program tersebut dilaksanakan oleh OPD atau dinas terkait. Berdasarkan tiga target SDGs Tujuan 16 yang ditetapkan oleh Kabupaten Tangerang, dijabarkan program dan indikator yang relevan dari RPD Kabupaten Tangerang. Berdasarkan status ketercapaian, Target 16 sudah memenuhi capaian kecuali pada program persentase akta kelahiran yang diterbitkan valid hampir mencapai target.

Tabel 2.71
Hasil Evaluasi Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Program	Program	Kode Indikator SDGs	Indikator pada RPD	Satuan	Tahun Dasar 2020		Trget Tahunan					Realisa si			Sumber Pendanaan	Perangkat Daerah	Capaian
						2021	2022	2023		2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak																	
1202,17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	16.2.1	Prosentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan	Persentase	NA	16,67	16,67	16,67		60	16,67	16,67	18,48	63,84	APBD Kab Tangerang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Disnaker	
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua																	
1202,19	Program Advokasi dan Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	16.3.1	Presentase Desa yang telah Membentuk PATBM dan PTPA	Persentase	50	55	100	100		100	55	100	100	100	APBD Kab Tangerang	Dinas Pemberdayaan Perempuan	
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran																	
1206,16	Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	16.9.1	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan Valid	Persentase	37	95	97	98		84,82	93,07	93,09		50,90	APBD Kab Tangerang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

17. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berkomitmen untuk meningkatkan peran dalam pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olahraga guna mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan 17 yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengacu pada dokumen meta data SDGs Nasional. Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Target 17.1 yang akan diadopsi. Tujuan 17 memiliki 19 target secara global, sehingga terdapat 18 target yang tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Adapun Target 17.1 adalah Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. Tujuan 17 pada SDGs di Kabupaten Tangerang diwujudkan melalui target 17.1 dengan menerapkan beberapa program. Program tersebut adalah program peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah dan program optimalisasi pengelolaan pajak PBB dan Non PBB yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Indikator 17.1.1 dan 17.1.1.(a) didekati masing-masing melalui jumlah pendapatan asli daerah dan presentase peningkatan pajak daerah lainnya. Berdasarkan data, target 17.1 memiliki status sudah tercapai dengan baik karena di tahun 2024.

Tabel 2.72
Hasil Evaluasi Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kode Program	Program	Kode Indikator SDGs	Indikator pada RPD	Satuan	Tahun Dasar 2020	Target Tahunan				Realisasi				Sumber Pendanaan	Perangkat Daerah	Canaian
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13		15	16	17
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya																
	Program Peningkatan Pengelolaan	17.1.1	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	Persentase					78				78	APBD Kab Tangerang	Badan Pendapatan Daerah	

	Pendapatan Asli Daerah		Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	Persentase					100				100			
			Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah	Persentase					100				100			
			Persentase Capaian Target Pajak Daerah	Persentase					100				107,73			

Keterangan

-  Sudah Tercapai
-  Akan Tercapai
-  Perlu Perhatian Khusus

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD, RPJPD dan RKPD). Adanya gap ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah, isu strategis ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan Pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pembahasan mengenai permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap beragam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal.

RKPD Tahun 2024 disebabkan dengan beberapa faktor dan beberapa permasalahan antara lain; Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja RKPD tahun 2024 antara lain:

1. Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain menggali dan mengembangkan potensi Daerah, kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM serta pengembangan sektor unggulan
2. Kurangnya Pemerataan Infrastruktur yang dapat menghambat dinamika aktivitas masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah
3. Perlunya peningkatan pemanfaatan output kegiatan yang sudah selesai Dilaksanakan.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur, dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
2. Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Banku Provinsi dan sumber dana lainnya
4. Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD.

Tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain:

1. Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sejak dini;
2. Proses penyusunan dokumen ke depannya akan dilaksanakan koordinasi secara mendalam, dengan menetapkan target yang sesuai dengan kondisi terkini, supaya dapat mendorong organisasi untuk berusaha lebih keras dalam mencapai hasil yang signifikan;
3. Memberikan perhatian khusus pada kinerja-kinerja yang masih membutuhkan upaya keras dalam pencapaian sasaran maupun program-program;
4. Melaksanakan peningkatan kapasitas perangkat daerah agar memahami tugas dan fungsinya untuk mencapai kinerja yang akan ditetapkan.

Berdasarkan Tabel 2.51 terdapat program kegiatan dan sub kegiatan yang belum maksimal capaian kinerjanya. Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahannya adalah sebagai berikut;

Tabel 2.73
Permasalahan Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Permasalahan	Solusi	OPD
1	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	Dikarenakan pencairan bersifat Kasuistik atau berdasarkan kejadian adanya Tenaga Eks Migran yang Kembali ke Kabupaten Tangerang di tahun 2024, hanya ada 1 orang (target 5 orang) sehingga tercapai 20%. Upaya yang sebelumnya telah dilakukan yaitu pengurangan anggaran dan target pada APBD-P dari yang targetnya 10 menjadi 5 orang dikarenakan pada tahun 2023 kasus migran terdapat 3 orang.	Menjadi bahan evaluasi pada tahun selanjutnya dengan menjadikan Tren kasus sebagai dasar penentuan target	Dinas Sosial
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Terminal yang terbangun	Kegagalan ini berakar pada kondisi lahan yang merupakan muara tempat berkumpulnya air saat banjir. Kondisi ini menghadirkan tantangan signifikan: • Biaya Pengurukan Tinggi: Lahan yang tergenang air memerlukan proses pengurukan yang ekstensif agar layak dibangun. • Risiko Banjir Berulang: Meskipun diuruk, lahan tersebut masih berisiko mengalami banjir di masa depan. Hal ini dapat merusak fasilitas terminal yang telah dibangun dan mengganggu operasionalnya. • Dampak Lingkungan: Pengurukan lahan basah dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti	Perlu dibuat kajian Penentuan titik lokasi terminal tipe C pada jaringan trayek yang aktif	Dinas Perhubungan

			hilangnya habitat alami dan perubahan hidrologi.		
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan	Rencana awal di renstra target 151 koperasi turun di renja menjadi 40 koperasi dikarenakan alokasi anggaran di prioritaskan untuk kegiatan pendukung usaha mikro dengan bertambahnya usaha mikro di tahun 2023 dari 25.198 menjadi 61.064	Pada tahun 2025, Bidang Koperasi menganggarkan Kembali untuk program penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	Masih banyaknya Koperasi yang belum menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) sehingga pengajuan pembiayaan koperasi belum dapat di realisasikan	Koordinasi dengan bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Tangerang terkait dengan perlunya pelatihan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

- Dari hasil evaluasi terhadap urusan pemerintahan, permasalahan yang dihadapi antara lain :
- a. Bidang Pendidikan
- Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 antara lain :
1. Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan dalam mengumpulkan data yang sesuai standar Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan dalam mengumpulkan data yang sesuai standar
 2. Belum adanya koordinasi lebih lanjut terhadap pemerintahan terkecil seperti di level desa/ kelurahan, kesulitan mendapatkan data dukung yang bersumber dari data sektoral seperti Provinsi dan Kementerian Agama
 3. Belum validnya data yang terintegrasi
 4. Kurangnya SDM yang memiki kompetensi dalam melakukan analisis data dan kesenjangan yang meliputi data sarana prasarana, data pendidik dan tenaga kependidikan serta data kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah kepadatan penduduk di suatu wilayah
 5. Kebutuhan peserta didik terhadap ruang kelas masih belum ideal
 6. Rendahnya fasilitas sekolah
 7. Rendahnya Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan
 8. Ketidakmampuan untuk memenuhi biaya personal merupakan salah satu faktor penyebab utama anak usia 5-6 tahun dari keluarga miskin belum mendapatkan layanan pendidikan di PAUD ataupun di SD/MI.
 9. Ketercukupan sumber daya manusia di satuan pendidikan untuk menyelenggarakan layanan belum

sesuai dengan rasio guru dan siswa yang berlaku dan Pemda perlu memastikan kecukupan tersebut.

10. Belum tersedianya data yang valid mengenai jumlah anak usia 16 hingga 18 tahun yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan dapat segera ditindaklanjuti dengan dukungan dari Pemda sebagai calon peserta pendidikan kesetaraan
11. Alokasi anggaran yang tersedia saat ini sebagian besar adalah untuk pemenuhan gaji dan tunjangan baik PNS maupun Non PNS (Termasuk di dalamnya guru dan tenaga kependidikan) sehingga memiliki keterbatasan anggaran untuk memaksimalkan pelayanan dasar
12. Kemampuan SDM dalam menganalisis rapor pendidikan ke dalam program kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian SPM masih terbatas

b. Bidang kesehatan

Permasalahan pada Bidang Kesehatan Tahun 2024 antara lain :

1. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 adalah sebanyak 34 kasus, dengan penyebab kematian dikarenakan perdarahan 20%, PEB/Eklampsia 47%, infeksi 12%, non obstetric 9%, lain-lain 12%
2. seluruh kasus kematian ibu dan 20 % kematian bayi sudah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di tingkat kabupaten oleh tim AMP Kabupaten Tangerang sebagai pembelajaran untuk mencegah kematian serupa di masa yang akan datang.
3. Jumlah kematian bayi tahun 2024 sebanyak 214 kasus kematian, penyebab terbanyak kematian bayi adalah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 27% dan urutan kedua Asfiksia 41%, Kelainan Kongenital 27%, dan lain-lain 7%, hal ini disebabkan karena banyaknya kasus ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kalori (KEK), ibu hamil dengan anemia serta komplikasi Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK) dan Preeklampsia Berat (PEB) pada ibu hamil.
4. Cakupan Balita yang ditimbang berat badannya (D/S) 67,5% dari target 80% dikarenakan Balita tidak datang ke Posyandu

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 antara lain :

1. Status kepemilikan jalan untuk Pembanagunan jalan;
2. Pembangunan di wilayah perbatasan;
3. Koordinasi lintas OPD terkait pembangunan jalan (ruas jalan yang di rencanakan di bangun beririsan dngan kegiatan opd lain)
4. Wilayah Kabupaten tangerang berada di hilir 2 wilayah sungai, yaitu WS cisadane dan WS cidurian
5. Belum adanya SK terkait kewenangan pengelolaan bidang SDA di wilayah Kabupaten Tangerang

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 antara lain :

1. Banyaknya usulan perbaikan sarana prasarana perumahan yang belum menjadi asset pemda sehingga tidak dapat direalisasikan;
 2. Pada sebagian TPU tidak ada batas antara TPU wakaf dan TPU milik pemda.
 3. Masih belum Optimalnya pemeliharaan dan pengelolaan TPU asset PEMDA.
 4. Rendahnya kesadaran Pengembang untuk menyerahkan PSU.
 5. Belum tuntasnya penanganan Permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Tangerang.
- e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Permasalahan pada Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat tahun 2024 antara lain:
1. Permasalahan sosial masyarakat yang bersifat kritis, berani melawan aparat, berfikir praktis dan pelaksanaan penertiban/penegakan perda/perkada yang terkesean mengedepankan aksi secara arogan.
 2. Kemungkinan munculnya pertentangan dalam melakukan tindakan refresip karena berbenturan dengan Hak asasi manusia (HAM)
 3. Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap peraturan daerah dan kepala daerah.
- f. Bidang Sosial
Permasalahan pada Bidang Sosial Tahun 2024 antara lain :
1. Belum optimalnya verifikasi dan validasi pendataan PMKS dan PSKS yang dilakukan oleh Operator Desa;
 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan bagi PPKS.
 3. Belum optimalnya penataan Taman Makam Pahlwan (TMP)
 4. Belum adanya kendaraan dapur umum adapun satu kendaraan dapur umum dengan status pinjam pakai dari Kemensos
 5. Belum tersedianya gudang bufferstock baik food dan non food food dan kantor Dinas Sosial yang tersendiri dikarenakan harus ada integrasi dengan mitra dinas sosial (Sekretariat Tagana, TKSK, IPSM, Karang Taruna, LKKS dan LK3)
- g. Bidang Tenaga Kerja
Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 antara lain :
1. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama pelatihan kerja dan penempatan dengan perusahaan pemberi kerja
 2. Masih banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja;
 3. Adanya efisiensi perusahaan dan relokasi perusahaan mengakibatkan terjadinya PHK berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran
 4. Belum optimalnya lembaga kerja sama Bipartit dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan;

5. Belum optimalnya pemahaman perusahaan dan pekerja/serikat pekerja/serikat buruh mengenai peraturan ketenagakerjaan.
- h. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 antara lain:
 1. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 2. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum
- i. Bidang Pangan
Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 antara lain :
 1. Peningkatan diversifikasi pangan
 2. Peningkatan kelembagaan LPM
 3. Pengurangan food loss dan food waste serta pemanfaatannya.
 4. Konsumsi pangan belum beragam, bergizi dan seimbang
 5. Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi
 6. Belum optimalnya kelembagaan kelompok ekonomi Petani (KEP)
- j. Bidang Pertanian
Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah masih adanya tidak ada kesepakatan harga pengadaan tanah antara pemilik tanah dengan harga yang ditetapkan oleh tim apresial.
- k. Bidang Lingkungan Hidup
Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 antara lain :
 1. Pengelolaan TPA Jatiwaringin belum optimal;
 2. Tindak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tangerang masih banyak.
 3. Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah(banyak yang sudah rusak) kurangnya alat berat/excavator dan dozer untuk pengangkutan sampah.
 4. Kurangnya armada truck sampah yang belum sesuai di bandingkan dengan luas wilayah kabupaten dan jumlah timbulan sampah yang harus di angkut
 5. Belum adanya teknologi alat pengelolaan sampah ramah lingkungan di TPA Jatiwaringin
 6. Masih rendahnya masyarakat kabupaten Tangerang dalam berperilaku hidup sehat ,bersih terutama dalam membuang sampah pada tempatnya
 7. Masih kurangnya Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang
- l. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 antara lain :
 1. Masih banyaknya warga Kabupaten Tangerang yang belum memiliki akte kelahiran anak usia 0- 18 Tahun;
 2. Belum terselesaikannya perekaman e-KTP setiap Tahunnya;
 3. Masih banyaknya warga Kabupaten Tangerang yang belum melaporkan kematian anggota keluarganya kepada Disdukcapil
 4. Belum tersedianya database penduduk rentan

- administrasi kependudukan di Kabupaten Tangerang
5. Masih rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital(IKD)
- m. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Permasalahan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024 antara lain :
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMDesa disebabkan kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUMDes dan pengurus BUMDes sehingga pengurus belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, peranan Kepala Desa dan BPD selaku penasehat dan pengawas masih belum optimal yang menyebabkan fungsi pengawasan (controlling) dalam manajemen BUMDes belum berjalan efektif;
 2. Pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa dikarenakan produk BUMDes yang tidak sesuai dengan potensi maupun harapan dari masyarakat desa;
- n. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 antara lain :
1. Kurangnya integrasi kebijakan antar-sektor menyebabkan ketidakefektifan dalam pencapaian target program Kampung Keluarga Berkualitas.
 2. Jumlah tenaga penyuluh dan kader yang tidak proporsional dengan sasaran program mengakibatkan cakupan layanan KB tidak merata.
 3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendataan keluarga berdampak pada ketidakakuratan basis data perencanaan pembangunan.
 4. Beban tugas ganda dan keterbatasan kapasitas kader menghambat efektifitas penyampaian pemahaman kepada keluarga sasaran (KRS)
 5. Minimnya pemahaman terhadap dampak fositif KB terhadap kesehatan produksi dan kesejahteraan keluarga.
 6. Pembatasan aktivitas selama masa pandemi menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam program KB yang sepenuhnya belum pulih
 7. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hubungan antara pengaturan jarak kelahiran dengan pencegahan stunting menghambat evektifitas program
- o. Bidang Perhubungan
Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 antara lain :
Masih banyaknya Pengaduan masyarakat terkait dengan Alat Penerangan Jalan, baik dari Pemeliharaan maupun Penyediaannya di Jalan yang berstatus Jalan Provinsi dan Jalan Nasional, hal ini di karenakan Kewenangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018. Tentang Alat Penerangan Jalan yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Pada Pasal 6 Ayat (2) untuk Kelas Jalan Provinsi Kewenangan. Pemeliharaan dan Penyediaan Alat Penerangan Jalan dilaksanakan oleh Gubernur dan Jalan Nasional oleh

Kementrian Perhubungan

- p. Bidang Komunikasi dan Informatika
- Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang dihadapi pada tahun 2024 adalah
1. Koordinasi dan Komunikasi:
 - a. Terlambatnya koordinasi antar perangkat daerah dalam menyampaikan prosedur layanan publik.
 2. Penggunaan Aplikasi dan Teknologi:
 - a. Kendala dalam penggunaan aplikasi Srikandi terkait akses yang lambat, kurangnya pemahaman terhadap panduan digital, dan kebiasaan konvensional dalam surat menyurat.
 - b. Implementasi aplikasi e-presensi Simona bagi pegawai non-ASN terkendala oleh jam kerja khusus di beberapa perangkat daerah.
 3. Pengumpulan Data dan Eviden:
 - a. Pengumpulan eviden untuk indikator SPBE memerlukan koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah terkait.
 - b. Pengumpulan data oleh perangkat daerah sering kali terlambat dari batas waktu yang ditentukan.
 4. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi:
 - a. Penyusunan draft Keputusan Bupati tentang SPBE memerlukan proses matching yang rumit antara peraturan yang ada dan usulan baru.
 - b. Ketidadaan blueprint jalur instalasi jaringan pada gedung pemerintahan menyulitkan penelusuran kendala dan penentuan jalur instalasi.
 5. Sumber Daya Manusia (SDM):
 - a. Kurangnya pemerataan kompetensi SDM dalam bidang teknis pengamanan informasi dan persandian.
 - b. Terbatasnya jumlah personel SDM yang mengelola keamanan informasi dan persandian
 6. Pergantian Personel:
 - a. Pergantian operator pengolah data di beberapa perangkat daerah menyebabkan hambatan dalam penyampaian materi.
- q. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 adalah
1. rendahnya produk UM yang memiliki legalitas
 2. kurangnya penguatan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro
 3. Rendahnya Produk Usaha Mikro yang Dipromosikan
 4. Rendahnya kemitraan bagi Pelaku Usaha Mikro dengan sesama Pelaku Usaha maupun Pelaku bisnis lainnya
 5. Rendahnya Kualitas SDM Usaha Mikro
 6. Belum maksimalnya pelayananpermodalan/pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro
 7. Rendahnya Kualitas SDM Koperasi
 8. Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi koperasi

9. Rendahnya Produktifitas dan daya saing produk Koperasi
 10. Belum optimalnya akses pemasaran bagi produk koperasi dan anggotanya
- r. Bidang Penanaman Modal
- Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah
1. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menyusun laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Sehingga kepatuhan dalam melaporkan LKPM belum optimal.
 2. Data realisasi investasi harus menunggu release dari kementerian Investasi/BKPM sehingga memperlambat proses pelaporan.
 3. Perubahan regulasi dan kebijakan perizinan berusaha dan non perizinan.
 4. Banyaknya pelaku usaha yang belum memahami teknis pengajuan perizinan berusaha seiring dengan penerapan system perizinan berusaha OSS RBA yang di kembangkan oleh kementerian investasi/BKPM RI.
 5. Kebutuhan anggaran dan SDM yang cukup besar terkait pengawasan dan pengendalian penanaman modal yang belum optimal dimana didalam permen investasi bkpm ri daerah wajib minimal satu kali melakukan monitoring NIB yang sudah diterbitkan dan sampai saat ini (2023) NIB yang sudah diterbitkan kurang lebih 58.000
- s. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah:
1. Belum optimalnya pembinaan terhadap wirausahawan muda pada setiap wilayah Kecamatan.
 2. Belum adanya sentra (sarana dan prasarana) pembinaan olahraga pelajar di kabupaten Tangerang untuk mengoptimalkan pplpd
 3. Masih banyaknya pelatih cabang olahraga yang belum bersertifikasi. belum optimalnya pembinaan terhadap Wira Usaha Baru (WUB).
- t. Bidang Kebudayaan
- Permasalahan bidang kebudayaan yang dihadapi Tahun 2024 antara lain:
1. Minimnya sarana dan prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni.
 2. Rendahnya jumlah sanggar/ lembaga seni yang memiliki legalitas formal.
 3. Belum adanya Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya. Minimnya pelaku seni tradisional untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya;
- u. Bidang Perpustakaan
- Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 antara lain :
1. Sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar;
 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia Perpustakaan masih terbatas.

v. Bidang Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 antara lain :

1. Masih rendahnya kepedulian Pimpinan/Perangkat Daerah sebagai Pencipta Arsip terhadap pengelolaan Arsip Dinamis yg menjadi tanggung jwbnya,
2. Belum tersedia SDM Kearsipan di setiap Perangkat Daerah,
3. Kompetensi SDM yang ada masih belum mumpuni,
4. Belum tersedia Saprak Kearsipan yang memadai di setiap Perangkat Daerah
5. Perangkat Daerah belum mengalokasikan untuk pengelolaan Arsip,
6. Rendahnya pemahaman penting nya arsip pd ASN,
7. Perhatian peningkatan kompetensi arsiparis (diklat, bimtek, ukom) masih terbatas.

w. Bidang Perikanan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 antara lain :

1. Masih sedikitnya nelayan yang berkelompok dan berbadan hukum;
2. Kuota yang terbatas sehingga belum bisa menyentuh keseluruhan nelayan sekaligus
3. Peserta yang kurang komitmen terhadap pelatihan sehingga saat pelatihannya ada peserta yang membatalkan karena suatu hal.
4. Minimnya pengetahuan para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan (POKLAHSAR) terkait kemasan dan packaging yang belum sesuai dengan standar seharusnya.

x. Bidang Pariwisata

Permasalahan bidang pariwisata yang dihadapi pada tahun 2024 adalah belum optimalnya sarana dan prasarana pada objek destinasi pariwisata di Kabupaten Tangerang.

y. Bidang Pertanian

Permasalahan bidang pertanian pada Tahun 2024 adalah:

1. Ketersediaan air di lahan pertanian
2. Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian (benih, pupuk, alsintan) bagi petani.
3. Insentif sarana produksi pertanian di KP2B
4. Peningkatan kompetensi, kapabilitas & profesionalitas pengelola puskesmas.
5. Peningkatan SDM Pertanian mll optimalisasi pemanfaatan Gedung Pusat Pelatihan SDM.
6. Serangan hama anomali iklim dan penyakit tanaman
7. Peningkatan pencegahan & pengendalian penyakit hewan menular serta zoonosis

z. Bidang Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 antara lain :

1. Pelaku usaha belum mengetahui mengenai peluang ekspor;
2. Kurangnya sosialisasi dan penyisiran potensi UTTP yang efektif bagi para pelaku usaha yang memiliki UTTP;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana tera/tera ulang;

4. Pemahaman terhadap tertib ukur bagi para pelaku usaha industri dan perdagangan dan IKM belum maksimal;
5. Sulitnya dalam mengakses ke perusahaan-perusahaan dan kurangnya petugas pengawasan;
6. Tidak hadirnya peserta sosialisasi “Program peningkatan sarana distribusi perdagangan” sesuai dengan undangan.

aa. Bidang Perindustrian

Permasalahan bidang kebudayaan yang dihadapi Tahun 2024 antara lain:

1. Sedikitnya pelaku usaha yang mau dilakukan pendampingan penerapan Industri Hijau (IH) karena masih bersifat sukarela (tidak wajib);
2. Proses pendaftaran merek (HKI) memerlukan waktu yang lama karena membutuhkan pemeriksaan komprehensif dan bertahap yang dilakukan oleh DJKI. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 23, disebutkan adanya pemeriksaan substantif terhadap merek yang memerlukan waktu 150 hari.

bb. Bidang Administrasi Pemerintahan

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 antara lain :
Regulasi target waktu pelayanan belum maksimal diterapkan. dikarenakan dalam penyelesaian pelaksanaan pelayanan perizinan belum semuanya bisa dijalankan sesuai SOP dan perlu didukung oleh OPD teknis terkait.

cc. Bidang Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah

1. Masih banyak perangkat daerah yang belum memahami pentingnya system pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi mengalami penurunan
2. Adanya temuan yang berulang di perangkat daerah disebabkan terbatasnya program pengawasan akibat belum terpenuhinya formasi jabatan fungsional pengaasan di insfektorat.

dd. Bidang Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi bidang penunjang fungsi Perencanaan pada Tahun 2024 antara lain :

1. Pengolahan dan Pemanfaatan data pendukung perencanaan yang belum optimal;
2. Sistem kendali pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan optimal;
3. Kapasitas dan kompetensi SDM perencanaan yang belum memadai;
4. Masih ada yang belum sinkron Program antara RPJMD, RENSTRA dan RKPD.

ee. Bidang Keuangan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 antara lain :

1. Masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh
2. Masih terdapat error system pada SIMPAD.
3. Peningkatan kopetensi dan pemahaman PPK pada OPD dalam menyusun laporan keuangan

4. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.
5. Target penyerapan anggaran masih belum sesuai dengan cash budget yang sudah ditetapkan.

ff. Bidang Penunjang Kepegawaian

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah :

1. Masih ada kesenjangan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi antara lain coaching mentoring selama proses pelaksanaan kinerja belum optimal dan Evaluasi kinerja periodik belum optimal serta feedback/umpan balik pada periode penilaian belum optimal.
2. Masih banyak ditemukan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN dikarenakan Pemahaman ASN tentang peraturan disiplin dan kode etik belum optimal
3. Belum optimalnya pelayanan kepegawaian ASN antara lain Pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian belum optimal dan adanya Layanan Kepegawaian yang belum terintegrasi dengan BKN.
4. Belum tersedianya pemetaan kompetensi teknis bagi ASN karena belum dilakukannya pengukuran kompetensi teknis bagi ASN, belum tersediannya panduan standar kompetensi jabatan level pelaksana dan fungsional dan belum tersediannya panduan rencana pengembangan karir ASN secara menyeluruh
5. Belum maksimalnya experiential learning (Pemangangan, Pertukaran Pegawai) dan sosio learning (coaching dan mentoring) oleh unit kerja
6. Belum tersediannya pengukuran dampak pengembangan kompetensi terhadap target capaian kinerja dimana evaluasi pasca pengembangan kompetensi masih terfokus kepada penilaian individual dan cenderung subjektif dan hasil evaluasi pasca pengembangan kompetensi belum dimaksimalkan untuk bahan kebijakan kepegawaian
7. Belum Optimalnya Penataan tenaga Non ASN
8. Masih rendahnya pencapaian pemetaan profil potensi dan kompetensi PNS

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang pada tahun 2026 merupakan penjabaran Visi Misi dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Selain itu juga mencakup kebijakan yang mendukung prioritas daerah yang berdasarkan Tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yaitu “Penguatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Melalui Kolaborasi Antar Sektor Untuk Menciptakan Pondasi Ketahanan Pangan”.

Penetapan program dan kegiatan prioritas didasarkan melalui harmonisasi dan keselarasan RPJMN, RPJMD Provinsi Banten dan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 diharapkan dapat memacu tercapainya target kinerja utama di tahun 2026 dan mendukung pencapaian target prioritas nasional, provinsi maupun Kabupaten Tangerang.

Arah kebijakan ekonomi daerah pada prinsipnya ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai dasar dalam perumusan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana, sehingga arah kebijakan ekonomi daerah perlu disusun berpedoman pada dokumen Rancangan RPJMD 2025-2029. Rancangan Ekonomi Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan formula bagi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang tahun 2026 yang keberhasilannya dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi makro untuk mencapai tujuan pembangunan serta mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi.

Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah dibangun atas dasar implementasi tema Pembangunan tahun 2026 yaitu “Penguatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Melalui Kolaborasi Antar Sektor Untuk Menciptakan Pondasi Ketahanan Pangan”, penanganan isu-isu strategis memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang mencakup tentang indikator ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah untuk Kabupaten Tangerang selaras dan sinergis dengan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan baik nasional maupun Provinsi Banten.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang melambat dari 5,18% di Tahun 2023 menjadi 5% di tahun 2024. Berikut adalah detail lebih lanjut tentang pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor di Kabupaten Tangerang:

- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib: Sektor ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu sebesar 15,29%.

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial: Sektor ini juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, mencapai 8,77%.
- Informasi dan Komunikasi: Pertumbuhan di sektor ini juga cukup baik, mencapai 8,4%.
- Konstruksi: Sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,13%.
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Sektor ini mengalami penurunan, yang menjadi salah satu faktor penyebab pelambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang.
- Pengadaan Listrik dan Gas: Sektor ini juga mengalami penurunan, yang turut menyebabkan pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, realisasi investasi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 mencapai Rp26,2 triliun, dengan sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menjadi penyumbang utama. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang beragam di berbagai sektor, dengan beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang signifikan, sementara yang lain mengalami penurunan. Untuk mencapai target pembangunan ekonomi diatas, penguatan atau peningkatan produktivitas di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan perlu mendapatkan prioritas guna memberikan kompensasi penurunan angka pengangguran dan kemiskinan yang signifikan.

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana termuat dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 diarahkan untuk Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing melalui peningkatan produktivitas dan kontribusi sektor unggulan dan sektor potensial, peningkatan skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD, Pengendalian Harga Bahan Pokok, peningkatan Kemandirian Desa, peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, Pengentasan kemiskinan, peningkatan cakupan penanganan PPKS, dan peningkatan Kualitas Keluarga. Kebijakan ini kemudian dijabarkan pada program pembangunan daerah prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode 2025- 2029 yang salah satunya adalah PROSPEK – Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah dengan kegiatan turunannya berupa Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan, Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM, Pembangunan Desa Mandiri Pangan (Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan), Penanganan Kolaborasi pengentasan kemiskinan, Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan, Pembangunan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Techno Park).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029. Pada tahun rencana 2026, diharapkan seluruh target pembangunan ekonomi di Kabupaten Tangerang dapat tercapai selain itu harus selaras juga dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2026, secara umum terangkum dalam indikator ekonomi makro seperti yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Keselarasan Target
Sasaran Indikator Makro Nasional, Provinsi Dengan Kabupaten Tangerang Tahun 2026

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL TAHUN 2026	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET RKPD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6 – 6,2	6.3	5.10	5.10	
2	PDRB Per Kapita (Juta)	80,0 – 82,4	76,2	60.57	60.57	
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	4	3,92	21.14	21.14	
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,25 – 4,85	4.45-5,15	6.25	6.25	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,45 – 6,65	6,45-6,65	6,00	6.00	
6	Rasio Gini	0,340 – 0,350	0,340-0,350	0.267	0.267	
7	Indeks Pembangunan Manusia (%)	0,57	0.57	76.50	76.50	
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	42,62 – 44,80	46.05	5,07	5,07	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	67,17	67,17	61.74	61.74	

Target pembangunan ekonomi makro di Kabupaten Tangerang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan, sumberdaya manusia, sumberdaya alam, serta peluang dan tantangan yang ada. Untuk meminimalisir dampak yang signifikan terhadap perlambatan ekonomi pada tahun 2024, Kabupaten Tangerang harus memaksimalkan Sektor unggulan. Sebagian besar jenis lapangan usaha PDRB (termasuk lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar) merupakan Sektor Potensial. Maka dari itu diperlukan upaya peningkatan daya saing melalui akselerasi produktivitas tenaga kerja, pengembangan pasar dan value added lapangan usaha tersebut. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar (Industri Pengolahan dan Konstruksi) dan jasa keuangan termasuk dalam kategori “Sektor Unggulan”, yaitu yang tumbuh cepat dan berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah. Hal ini didukung dengan posisi Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari penyangga Jakarta dan Jabodetabek menjadikannya daerah strategis untuk pengembangan sektor perindustrian dan sektor jasa.

Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kabupaten Tangerang sebesar 186.104,15 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 62.789,24 miliar rupiah (33,7% dari PDRB), lapangan usaha Konstruksi sebesar 30.437,51 miliar rupiah (16,3% dari PDRB) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21.127,95 miliar rupiah (11,4% dari PDRB). Jika melihat perbandingan kontribusi sektor lapangan usaha PDRB tahun 2019 dan 2024, sektor konstruksi dan real estate menunjukkan peningkatan karena berbagai proyek pembangunan strategis nasional dan daerah dalam lima tahun terakhir.

3.1.1 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional
Sasaran Pembangunan Tahun 2026 Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Bappenas diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran Ekonomi Makro 2026

No	Indikator	Sasaran 2026
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% _{yoy}): Akhir Periode	2,5±1,0
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	16.500 - 16.900 ^a
3	Cadangan Devisa (miliar US\$)	171,01–171,42
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,2–6,4
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(1,04)–(0,90)
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	21,18–21,20
7	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6–4,7
8	Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,00–24,70
9	Pendapatan Negara (% PDB)	12,22–13,35
10	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,45–11,40
11	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,22)–(0,40)
12	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,53)–(2,70)
13	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,8–39,9
14	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,17–7,18
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	2.093,3–2.175,3
16	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	915,4–1.006,5

Sumber : RKP Tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat relatif tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025 2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80 6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US\$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori upper middle-income country. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat.

Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,

program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur. PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3–2.175,3 triliun.

Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tecermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp194,30 - 205,31 triliun dan Rp68,04–71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14–52,37 persen terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00. Dalam upaya mencapai target investasi tersebut, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala yang dapat menghambat investasi. Salah satu aspek penting bagi iklim investasi adalah kepastian hukum, yang masih menghadapi tantangan akibat regulasi dan kewenangan yang tumpang tindih, implementasi kebijakan yang tidak konsisten, serta lemahnya penegakan hukum. Ketidakpastian hukum ini dapat mengurangi daya tarik investasi karena investor cenderung memilih negara dengan iklim investasi yang kondusif dan dapat diprediksi, baik dari segi biaya, jenis perizinan, maupun waktu pemrosesan.

Oleh karena itu, upaya strategis dan mendesak untuk meningkatkan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha guna memperkuat transformasi ekonomi, yang mencakup:

- (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga;
- (ii) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan; serta
- (iii) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor dan wilayah.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global yang didukung oleh ekspansi pasar ekspor, peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global, serta memanfaatkan peluang di tengah ketidakpastian geopolitik global melalui strategi:

- (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan tarif dan nontarif untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi;
- (ii) pengembangan pangsa pasar produk Indonesia termasuk

- penguatan promosi dan misi dagang, serta optimalisasi market intelligence, business matching dan pengamanan pasar ekspor;
- (iii) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan mendorong penguatan tatanan perdagangan global serta meningkatkan efektivitas implementasi Free Trade Agreement (FTA) dan/atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA);
 - (iv) peningkatan kapasitas eksportir untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor, termasuk pelatihan ekspor dan bisnis e commerce bagi pelaku UMKM, pengembangan exporter tools untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan;
 - (v) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan database informasi pasar potensial dan buyer secara real-time; serta
 - (vi) penguatan koordinasi kebijakan dan penyediaan data perdagangan jasa dan produk kreatif.

Tabel 3.3
Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2026 Sisi Pengeluaran (persen)

No.	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2026
1	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,53–5,83
2	Konsumsi Pemerintah	6,85–6,96
3	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	6,17–7,18
4	Ekspor Barang dan Jasa	7,05–7,17
5	Impor Barang dan Jasa	7,34–7,50
Pertumbuhan PDB		5,80–6,30

Sektor industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,85–6,38 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai trajectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 21,20 persen di tahun 2026. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2026 antara lain :

- (i) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2026, seperti proyek investasi petrokimia di Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta proyek hilirisasi nikel ke arah baterai di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah;
- (ii) penerapan teknologi 4.0 yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
- (iii) fasilitasi dan pendampingan sertifikasi industri hijau bagi 164 perusahaan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor Industrial Process and Production Use (IPPU) dan meningkatkan efisiensi produksi; serta
- (iv) penambahan kapasitas produksi industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mencapai 251.000 unit per tahun.

Selain itu, beberapa faktor demand side pun diperkirakan turut menjadi pendorong kinerja industri pengolahan, seperti:

- (i) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik;
- (ii) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali;
- (iii) perluasan program makan bergizi bagi anak dan ibu hamil yang mendorong permintaan subsektor industri makanan dan minuman; serta
- (iv) peningkatan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan yang didorong dengan kebutuhan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, penanggulangan penyakit, dan akses pelayanan kesehatan dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta. Sektor pertanian dalam arti luas pada tahun 2026 ditargetkan mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 3,09–3,33 persen. Pertumbuhan sektor pertanian utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Sektor konstruksi pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 7,80–7,91 persen, didorong oleh proyek-proyek seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit daerah dan pembangunan KI dan KEK.

Sektor perdagangan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,25–5,62 persen. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global, melalui strategi:

- (i) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah; (
- (ii) promosi dan misi dagang, serta kerja sama antardaerah di setiap provinsi;
- (iii) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah;
- (iv) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah;
- (v) pendampingan adaptasi e-commerce bagi pelaku usaha di daerah termasuk UMKM serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan e-commerce dan digitalisasi perdagangan;
- (vi) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah;
- (vii) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik;
- (viii) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya; serta
- (ix) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor. Pada

tahun 2026, rasio PDB pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60–4,70 persen serta diiringi oleh peningkatan nilai devisa pariwisata mencapai US\$22,00–24,70 miliar. Arah kebijakan pariwisata difokuskan pada peningkatan nilai tambah pariwisata yang dilakukan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Faktor Faktor pendukung kinerja sektor pariwisata meliputi:

- (i) peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan bandara, pelabuhan dan transportasi darat yang mempermudah akses wisatawan serta peningkatan jumlah rute penerbangan langsung internasional ke Indonesia;
- (ii) kebijakan peningkatan kualitas SDM pariwisata;
- (iii) pengembangan atraksi dan event berkualitas meliputi peningkatan penyelenggaraan acara berskala internasional;
- (iv) penguatan pariwisata berkelanjutan melalui pelestarian budaya, pengembangan desa wisata berbasis komunitas, dan peningkatan sertifikasi dan regulasi untuk destinasi wisata yang ramah lingkungan; serta
- (v) optimalisasi pemasaran pariwisata melalui AI dan digitalisasi sektor pariwisata (Tourism 5.0).

Tabel 3.4
Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2026 Sisi Lapangan Usaha (persen)

No.	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2026
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,09–3,33
2	Pertambangan dan Penggalian	1,70–1,85
3	Industri Pengolahan	5,85–6,38
4	Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	5,68–6,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,22–2,38
6	Konstruksi	7,80–7,91
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,25–5,62
8	Transportasi dan Pergudangan	9,60–10,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,67–9,82
10	Informasi dan Komunikasi	8,22–8,82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,88–7,08
12	Real Estate	2,78–2,98
13	Jasa Perusahaan	8,57–9,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,87–4,15
15	Jasa Pendidikan	4,07–4,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,18–9,31
17	Jasa lainnya	7,24–7,76
Pertumbuhan PDB		5,80–6,30

3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Banten

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2026 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2025 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2026. Arah kebijakan ekonomi Provinsi Banten juga mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi global dan nasional tahun 2026, sekaligus mengacu pada arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk Provinsi Banten.

Ekonomi Provinsi Banten triwulan I-2025 terhadap triwulan I 2024 tumbuh sebesar 5,19 persen (*y-on-y*) Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,62 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,20 persen; serta Jasa Pendidikan sebesar 6,89 persen. Lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian Provinsi Banten di antaranya adalah Industri Pengolahan sebesar 4,51 persen; Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,62 persen; Konstruksi sebesar 4,43 persen; Real Estate sebesar 4,11 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 4,59 persen. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) memiliki kontribusi sebesar 52,87 persen terhadap PDRB.

Kemudian komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 33,48 persen, komponen Total Net Ekspor sebesar 9,46 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,72 persen, dan Komponen Pengeluaran lembaga Non-Profit (PK-LNPRT) sebesar 0,45 persen. Melihat dinamika perekonomian sampai sejauh ini, ekonomi Provinsi Banten tahun 2026 diperkirakan tumbuh positif dibandingkan tahun 2024. Hal ini seiring optimisnya kinerja ekspor luar negeri yang berpengaruh terhadap kinerja domestik dan Banten dan peningkatan kinerja investasi. Selain itu, tingkat konsumsi dan iklim investasi diperkirakan akan lebih baik pasca tahun politik. Dari sisi pengeluaran, Investasi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan kinerja ekspor seiring Konsumsi RT yang tetap tumbuh positif pada 2025 meskipun terbatas. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih ditopang oleh sektor Industri Pengolahan, Konstruksi serta Transportasi walaupun tingkat konsumsi yang terbatas yang akan menghambat kinerja LU Perdagangan dan Real Estate. Pada tahun 2026 pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten diperkirakan tetap kuat pada kisaran 5,6-6,2% secara *year on year*.

Tabel 3.5
Target Indikator Makro Provinsi Banten 2026

Indikator	RKP 2026	RKPD 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6 – 6,2	6,3
PDRB per Kapita (juta)	80,0 – 82,4	76,2
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	4	3,92
Tingkat Kemiskinan (%)	4,25 – 4,85	4,45-5,15
Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (%)	6,45 – 6,65	6,45-6,65
Rasio Gini (Nilai)	0,340 – 0,350	0,340-0,350
Indeks Modal Manusia (Nilai)	0,57	0,57
Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	42,62 – 44,80	46,05
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Nilai)	67,17	67,17

Untuk mewujudkan berbagai target indikator diatas maka Kebijakan Perekonomian Daerah perlu diarahkan pada:

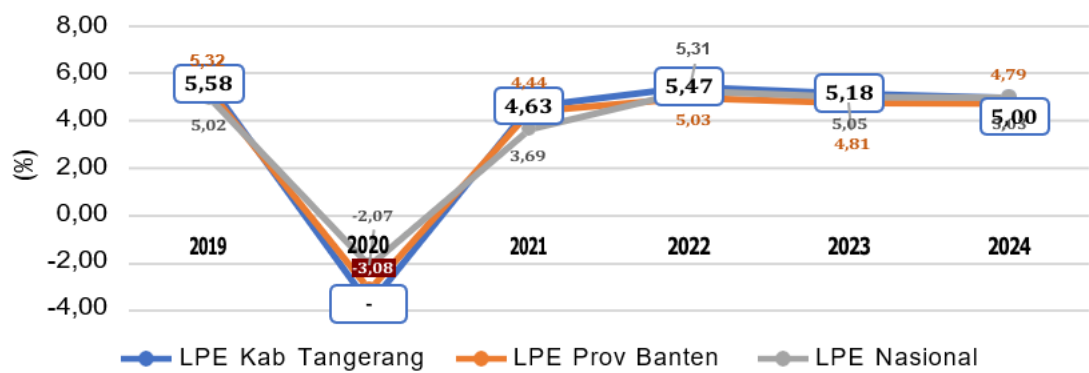
1. Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang merata antara Banten Selatan dan Banten Utara;
2. Peningkatan produktivitas ekonomi melalui modernisasi pertanian dan ekonomi biru;
3. Pengembangan industri kimia dasar dan hilirisasi output hasil industri tersebut;
4. Peningkatan investasi yang berkualitas melalui optimalisasi kepastian usaha;
5. Percepatan peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan belanja daerah untuk belanja produktif;
6. Peningkatan creative financing dan peran sektor swasta dalam Pembangunan daerah;
7. Peningkatan pendapatan perkapita Masyarakat.
8. Peningkatan kontribusi PDRB sektor maritim;
9. Peningkatan kontribusi PDRB sektor manufaktur;
10. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

3.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

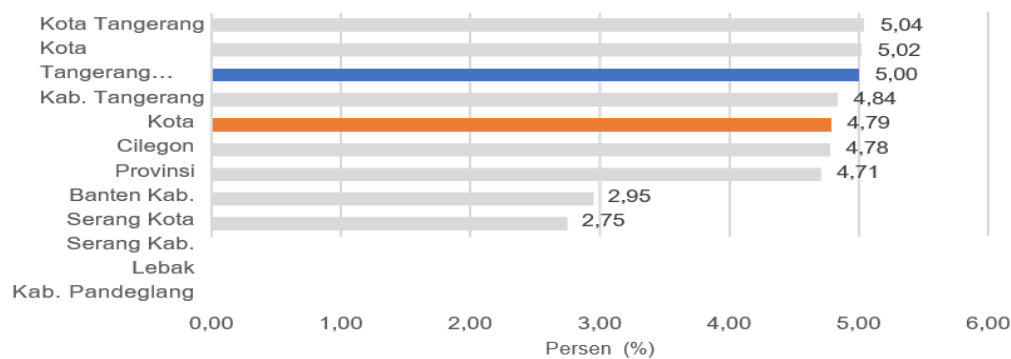
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi PDRB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah, bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa, bahan analisis produktivitas secara sektoral serta alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 disebutkan bahwa Misi Kedua adalah Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing dengan Tujuan Pertama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dan Sasaran pertama Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial, sasaran kedua Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD, sasaran ketiga Mengendalikan Harga Bahan Pokok. Sementara untuk Tujuan Kedua yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Sasaran kesatu Meningkatnya Kemandirian Desa, sasaran kedua Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja, dan sasaran ketiga Meningkatnya Kesejahteraan PPKS.

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2024 yang terukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan dari waktu ke waktu khususnya setelah adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi tren pada tahun 2022-2024 menunjukkan penurunan LPE. Capaian LPE tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi makro wilayah dari berbagai sektor.



Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: BPS, 2025



Gambar 3.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Pada tahun 2024, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang sebesar 5,00 persen dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian LPE Kabupaten Tangerang tertinggi ketiga. Secara lebih detail, lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tertinggi (2024), yaitu Administrasi Pemerintahan, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta jasa lainnya. PDRB menurut Lapangan Usaha :

Tabel 3.6
PDRB Per Sektor ADHK Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	2,84	-0,84	2,26	1,74	-0,28
B	Pertambangan dan Penggalian	2,30	-5,90	-9,45	-12,35	0,25	4,80
C	Industri Pengolahan	3,20	-8,47	4,26	5,44	7,01	4,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-4,23	-12,35	11,69	5,59	-0,45	13,42
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,71	8,60	5,81	1,35	5,69	1,93

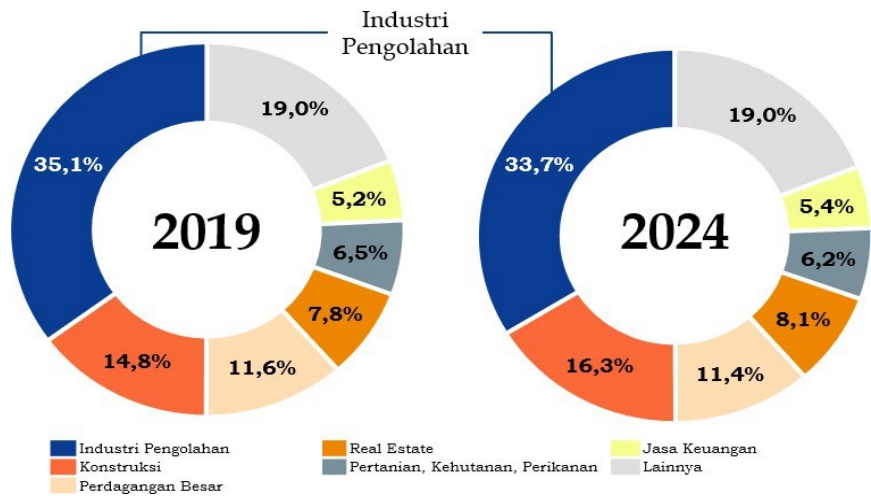
F	Konstruksi	9,44	-3,29	11,96	8,25	1,74	5,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,22	-3,70	1,82	3,27	4,83	5,94
H	Transportasi dan Pergudangan	9,55	-5,32	9,90	7,89	5,84	6,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,86	-5,63	4,45	8,33	8,93	9,15
J	Informasi dan Komunikasi	9,69	9,12	5,17	6,84	9,34	6,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,72	1,56	6,07	6,81	-0,48	0,90
L	Real Estate	9,49	1,96	3,07	5,19	5,20	5,33
M, N	Jasa Perusahaan	9,20	-6,00	-2,25	4,46	8,52	8,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,75	-0,38	-0,76	1,09	3,17	26,36
P	Jasa Pendidikan	8,30	0,62	-1,10	-0.09	6,82	7,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,13	4,41	9,14	2,92	8,94	13,23
R,S, T, U	Jasa Lainnya	9,36	-6,11	1,39	7,77	10,98	4,68
Produk Domestik Regional Bruto		5,56	-3,76	4,70	5,47	5,18	5,00

Tabel 3.7
PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024 (dalam Miliar Rupiah)

Kode	Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB dalam Miliar Rupiah					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	9.045,55	9.435,98	9.473,10	10.135,98	10.921,46	11.456,58
B	Pertambangan dan Penggalian	58,54	55,54	50,93	45,88	47,24	51,19
C	Industri Pengolahan	49.164,34	45.200,55	48.117,52	53.176,12	58.318,29	62.789,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.693,53	4.096,16	4.630,76	4.936,40	4.893,85	4.053,44
E	Pengadaan Air	85,48	93,49	100,24	102,87	110,40	119,98
F	Konstruksi	20.797,30	20.159,33	23.459,65	26.926,03	28.336,15	30.437,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.234,31	15.934,12	16.403,33	17.698,47	19.324,82	21.127,95
H	Transportasi dan Pergudangan	4.320,45	4.148,08	4.651,38	5.330,79	6.083,52	6.711,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.133,60	2.021,19	2.123,07	2.342,57	2.586,71	2.904,43
J	Informasi dan Komunikasi	4.505,50	4.898,70	5.144,75	5.553,03	6.132,02	6.587,77
K	Jasa Keuangan	7.290,26	7.412,07	8.239,97	9.597,07	9.774,50	9.966,91
L	Real Estate	10.957,41	11.392,27	11.859,43	12.706,97	13.853,03	15.035,63
M.N	Jasa Perusahaan	1.537,10	1.470,01	1.454,75	1.569,84	1.769,91	1.974,52
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.469,16	2.571,45	2.618,05	2.742,84	2.941,08	3.813,07

Kode	Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB dalam Miliar Rupiah					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
P	Jasa Pendidikan	3.899,57	3.981,03	3.957,24	4.030,36	4.404,83	4.941,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	656,87	695,57	774,48	811,76	917,22	1.063,50
R.S.T.U	Jasa lainnya	2.240,33	2.166,13	2.225,00	2.461,19	2.886,59	3.068,90
PDRB (dalam miliar rupiah)		140.089,29	135.731,68	145.283,68	160.168,18	173.301,26	186.104,15

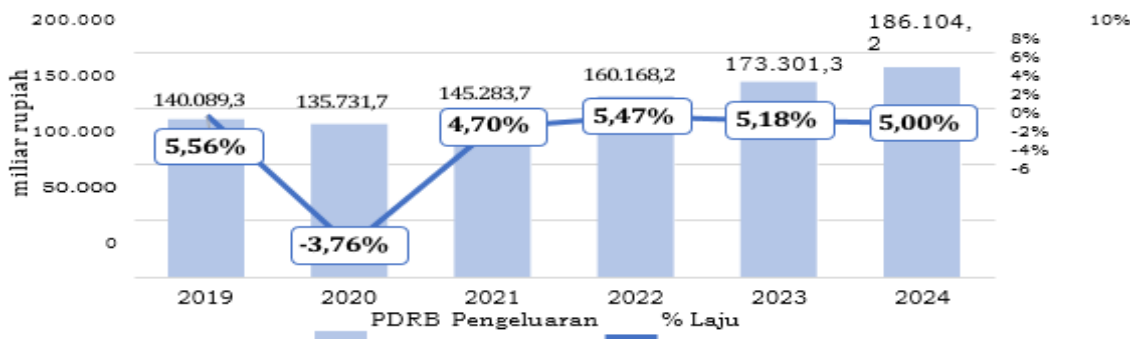
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)



Gambar 3.3
Perbandingan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB
Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dan Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kabupaten Tangerang sebesar 186.104,15 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 62.789,24 miliar rupiah (33,7% dari PDRB), lapangan usaha Konstruksi sebesar 30.437,51 miliar rupiah (16,3% dari PDRB) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21.127,95 miliar rupiah (11,4% dari PDRB). Jika melihat perbandingan kontribusi sektor lapangan usaha PDRB tahun 2019 dan 2024, sektor konstruksi dan real estate menunjukkan peningkatan karena berbagai proyek pembangunan strategis nasional dan daerah dalam lima tahun terakhir.

• PDRB menurut Pengeluaran



Gambar 3.4
PDRB ADH dan Laju PDRB ADHK menurut Pengeluaran
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 (dalam Juta Rupiah)
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Tabel 3.8
PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024 (dalam Juta Rupiah)

PDRB Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tangerang (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	72.998.709,26	71.693.730,68	74.770.602,15	81.562.475,55	88.647.200,83	97.947.130
Konsumsi LNPRT	710.429,81	679.685,90	701.768,54	749.881,39	811.729,66	951.440
Konsumsi Pemerintah	5.031.644,99	4.621.839,02	4.890.012,15	5.219.166,20	6.001.089,65	6.914.430
Pembentukan Modal Tetap Bruto	35.233.021,18	35.450.044,41	37.900.875,49	40.717.192,10	46.853.056,17	50.185.960
Perubahan Inventori	4.346,34	716,21	61,28	300,11	49.843,77	240.860
Net Ekspor	26.111.136,01	23.285.665,67	27.020.356,91	31.919.161,45	30.945.748,91	29.864.320
Ekspor	98.587.772,18	94.833.778,71	105.562.340,92	132.194.567,86	150.386.973,45	
Impor	72.476.636,17	71.548.113,04	78.541.984,01	100.275.406,41	119.441.224,54	
PDRB	140.089.287,58	135.731.681,88	145.283.676,52	160.168.176,80	173.302.663,99	186.104.150

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran tahun 2024, komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki kontribusi terbesar yaitu sekitar 52,63%. Hal tersebut juga berhubungan dengan tingkat inflasi di Kabupaten Tangerang yang mempengaruhi dengan daya beli masyarakat konsumsi barang dan jasa yang lebih lanjut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada Triwulan IV 2024, Tangerang mengalami inflasi yoy (year on year) sebesar 2,15%.. Selain itu, ekspor luar wilayah juga mempunyai peran penting yaitu sebesar 82,53% produk wilayah Kabupaten Tangerang diekspor ke luar wilayah.

Sementara itu, unsur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang dapat menggambarkan investasi, memberikan kontribusi sebesar 26,97% kepada perekonomian. Kinerja investasi Kabupaten Tangerang terlihat dari laju kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN. Dalam lima tahun terakhir, nilai PMDN Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif dan berhasil meningkat 55,3 dari tahun 2021-2022 (DPMPTSP, 2022). Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi.

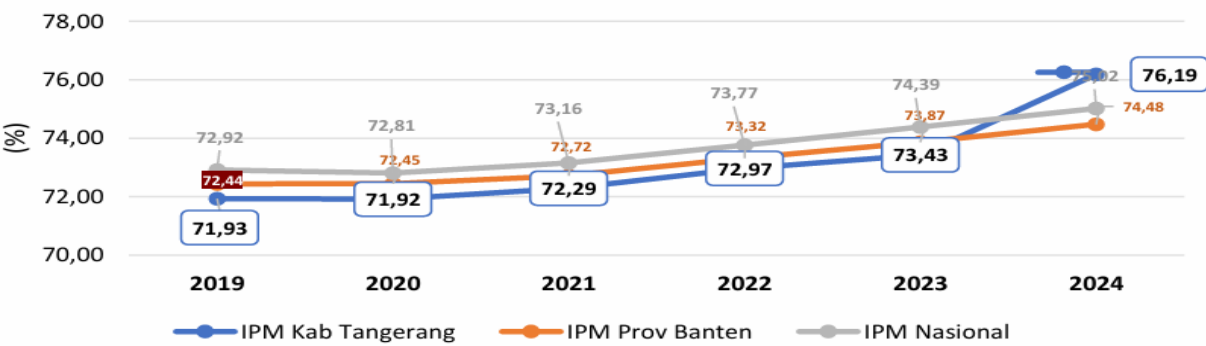
3.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berperan penting

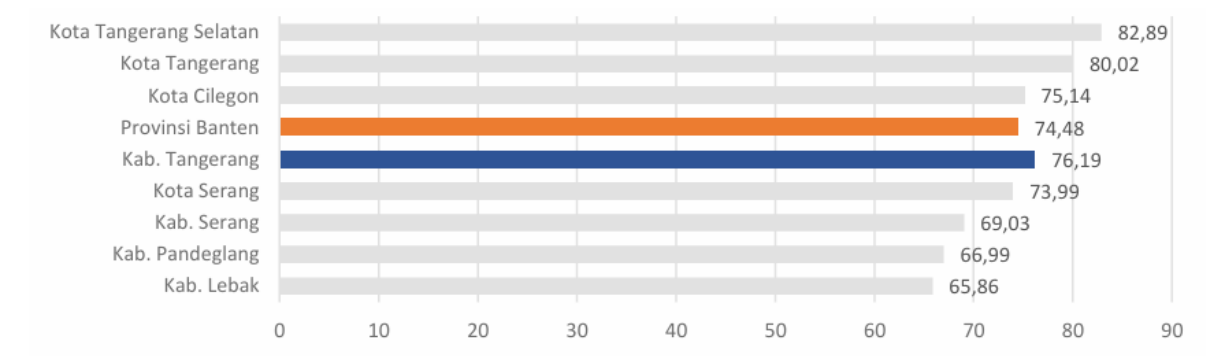
dalam mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran rata-rata capaian aspek utama pembangunan manusia yang meliputi umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Pengukuran IPM pada aspek kesehatan mengacu pada indikator angka harapan hidup. Aspek pengetahuan dapat diukur melalui indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk aspek hidup layak dapat diukur menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Diagram di bawah ini merupakan perbandingan IPM nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 76,19 dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut memberikan indikasi adanya peningkatan kualitas masyarakat di wilayah ini. Saat ini, IPM Kabupaten Tangerang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten. Namun, tetap terus diperlukan fokus penanganan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan daya saing SDM di Kabupaten Tangerang.



Gambar 3.5
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional, 2024

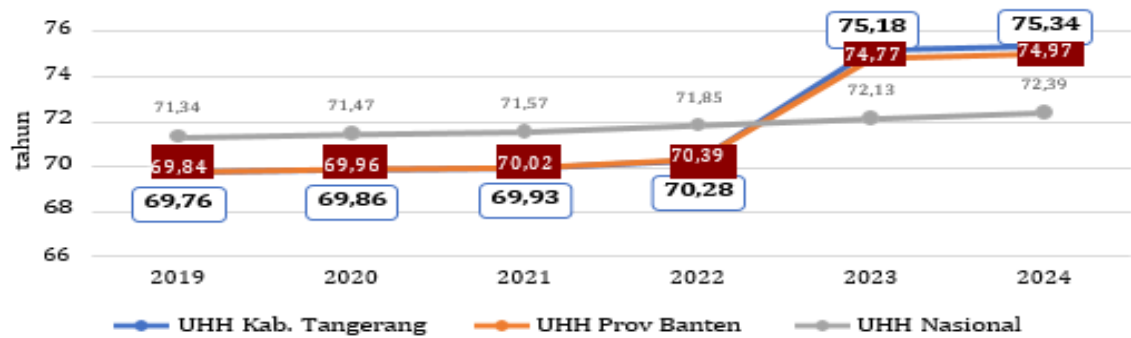
Dalam lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan, dan saat ini telah menempati urutan tertinggi ketiga di Provinsi Banten. Sementara itu, IPM tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan (sebesar 82,89).



Gambar 3.6
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

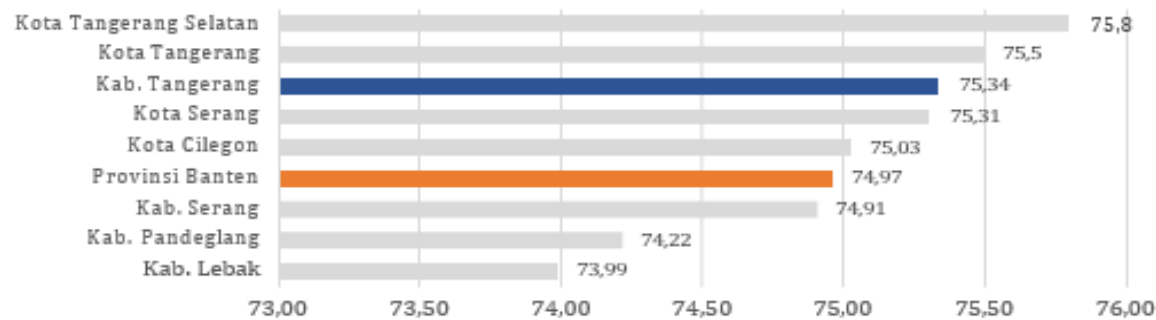
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2024

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan gambaran rerata perkiraan tingkat kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kesejahteraan melalui kondisi kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Tangerang mencapai nilai 75,34 tahun yang tergolong pada usia harapan hidup yang tinggi. UHH masyarakat Kabupaten Tangerang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.



Gambar 3.7
Usia Harapan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2024

Berdasarkan perbandingan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Banten, di tahun 2024, Usia Harapan Hidup di Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga dengan capaian tertinggi, tetapi sudah berada di atas capaian Provinsi Banten dan Nasional. Namun, tetap diperlukan arahan strategis dalam peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan kesehatan.

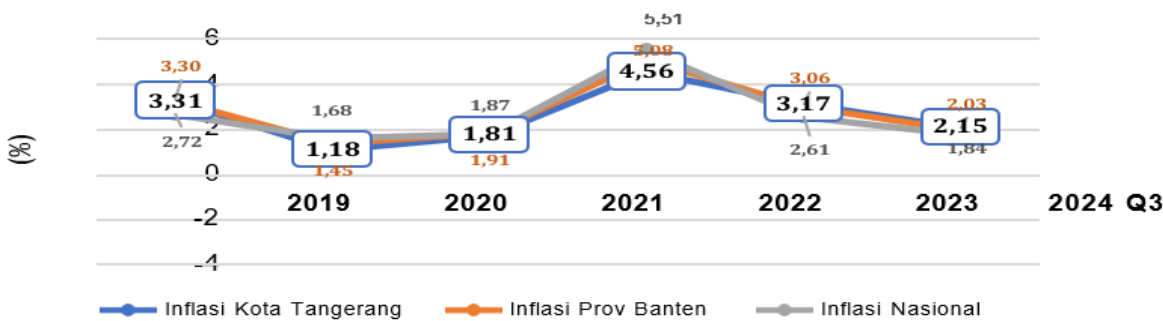


Gambar 3.8
Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024

3.2.3 Laju inflasi

Laju inflasi adalah persentase peningkatan kenaikan harga barang dan jasa konsumsi rumah tangga. Laju inflasi berpengaruh erat terhadap perekonomian masyarakat salah satunya adalah daya beli masyarakat. Inflasi Kabupaten Tangerang merujuk pada inflasi Kota Tangerang¹. Berdasarkan data BPD Kabupaten Tangerang, secara umum laju inflasi Kabupaten Tangerang meningkat drastis setelah menurun pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga di

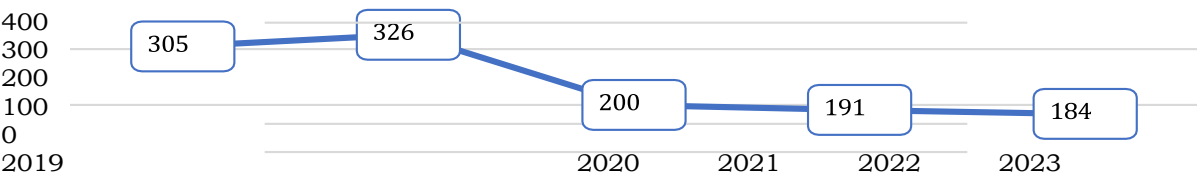
wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (2024), laju inflasi Q3 2024 (yoy), inflasi tetap terjaga mengalami perlambatan dari tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan inflasi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Penurunan laju inflasi perlu diperhatikan, karena deflasi yang berkepanjangan bisa mengindikasikan pelemahan ekonomi. Maka dari itu diharapkan inflasi terus terjaga di 2,5%+1,0%.



Gambar 3.9
Laju Inflasi Kota Tangerang (termasuk Kabupaten Tangerang) dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024); Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Banten, Bank Indonesia (2025)

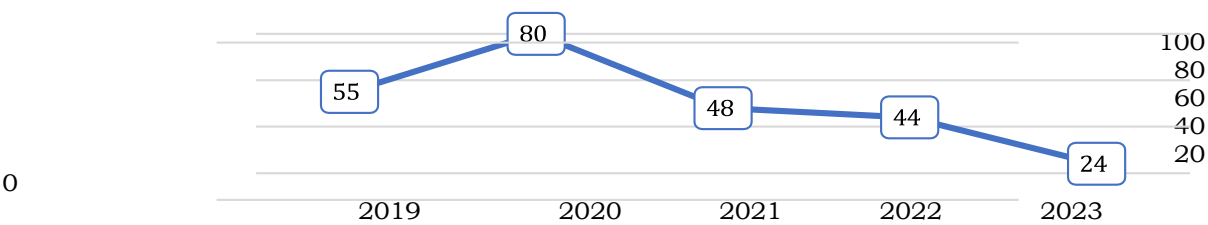
3.2.4 Tenaga Kerja

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja adalah fenomena yang banyak terjadi di dunia kerja. Pada 2021-2023, jumlah kasus sengketa pengusaha dan pekerja di Kabupaten Tangerang cenderung menurun drastis hingga angka 184. Meskipun demikian sengketa pengusaha-pekerja sempat meningkat pada tahun 2020 yakni saat Pandemi yang mungkin terjadi akibat tingginya kasus PHK.



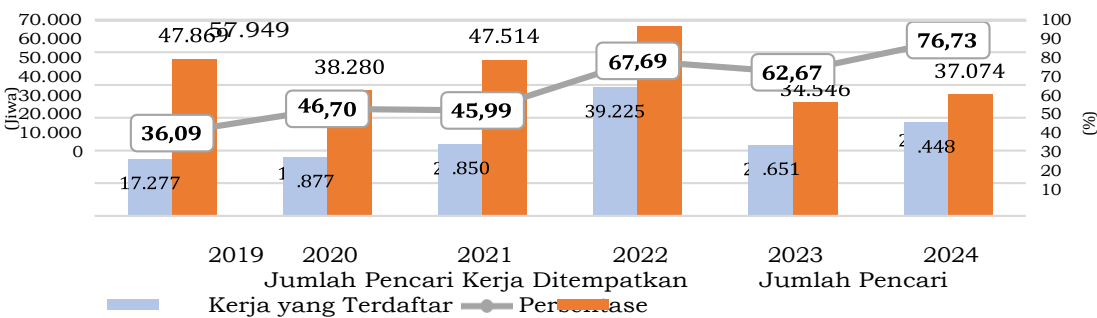
Gambar 3.10
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Sengketa perusahaan dengan pekerja sebagian diselesaikan melalui perjanjian bersama. Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama memiliki kecenderungan tren yang sama dengan jumlah sengketa pengusaha-pekerja. Namun, jumlah penyelesaian kasus ini masih jauh dari jumlah kasus yang terjadi. Hal ini menunjukkan masih adanya kasus ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan melalui perjanjian bersama.



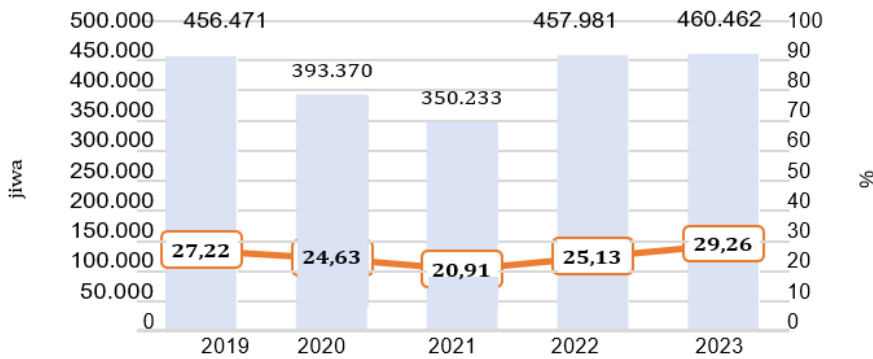
Gambar 3.11
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Tahun 2019- 2023
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024

Berdasarkan data tahun 2019-2024, menunjukkan peningkatan persentase pencari kerja yang ditempatkan. Akan tetapi, jumlah pencari kerja yang ditempatkan masih belum mengakomodasi seluruh pencari kerja di wilayah ini.



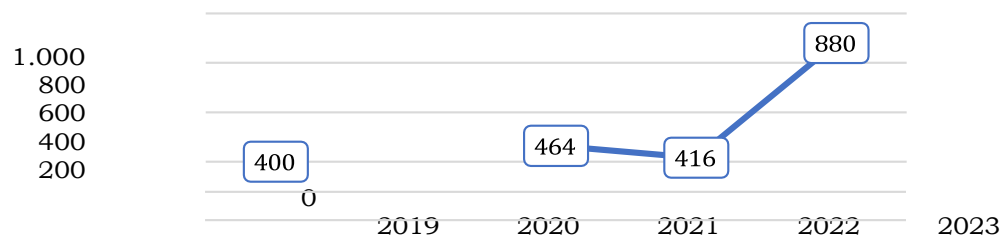
Gambar 3.12
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024

Gambar 3.14
Besaran dan Persentase Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024

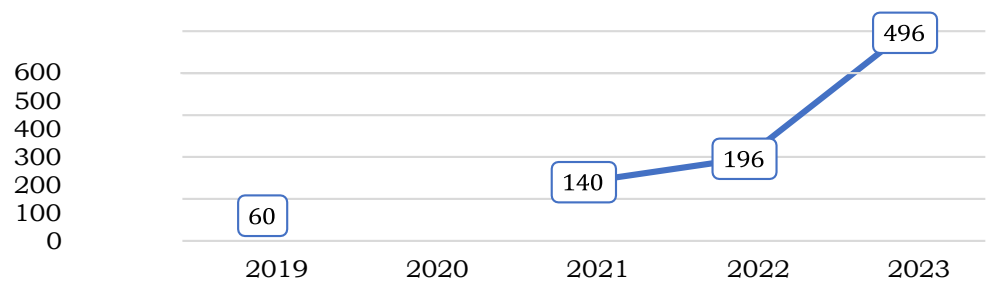
Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Salah satu bentuk pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan sesuai kompetensi pekerja. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada rentang waktu 2019-2023. Meskipun demikian pada 2020, tidak dilaksanakan pelatihan sesuai kompetensi karena adanya pandemi Covid-19.



Gambar 3.14
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024

Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain pelatihan sesuai kompetensi pekerja, juga terdapat pelatihan berbasis masyarakat. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada 2022 dan 2023 yakni 68 dan 204 jiwa.

Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain kedua pelatihan di atas, terdapat pelatihan lain yang dilakukan, yakni pelatihan kewirausahaan. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada rentang waktu 2019-2023. Meskipun demikian pada 2020, tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.



Gambar 3.15
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024

Kualitas tenaga kerja salah satunya dapat digambarkan melalui pendidikan terakhir tenaga kerja. Berdasarkan data tahun 2021-2024, rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2024, terdapat 1 lulusan S1/S2/S3 di antara 10 pekerja di wilayah Kabupaten Tangerang.

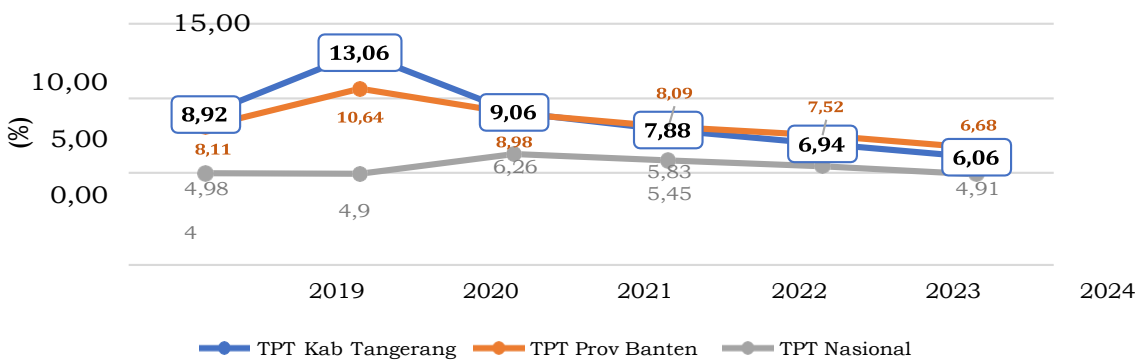
Tabel 3.9
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Rasio Lulusan S1/S2/S3					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	2:17	1:8	1:11	1:10

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024

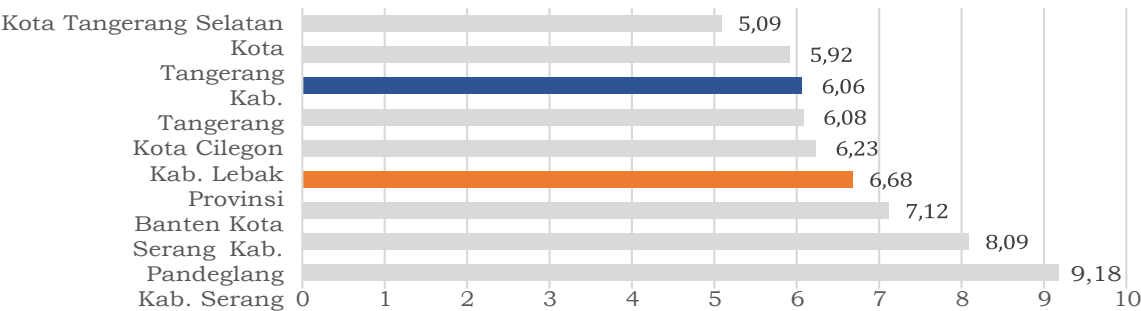
3.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan nilai persentase jumlah masyarakat yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPT digunakan sebagai alat evaluasi kondisi penyerapan tenaga kerja dalam suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 6,06% (102.510) jiwa tergolong dalam kategori sedang dan berada di atas TPT nasional. Kondisi ini mencerminkan tingginya pengangguran di wilayah Kabupaten Tangerang yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan. Kondisi ini memerlukan penanganan untuk dapat membuka lapangan kerja bagi seluruh masyarakat.



Gambar 3.16
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

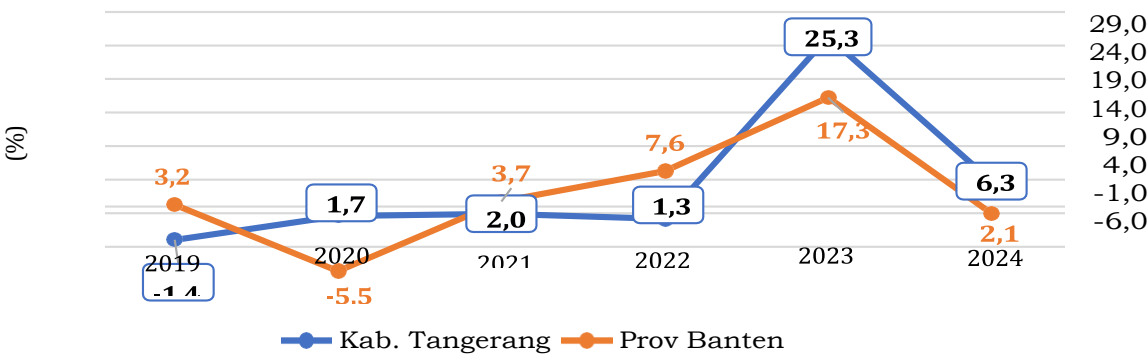
Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cenderung rendah dengan posisi ketiga terendah pada tahun 2024. Sementara itu, kabupaten/kota lain di Provinsi Banten dengan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah adalah Kota Tangerang Selatan dengan TPT sebesar 5,09%, sementara TPT tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Serang sebesar 9,18%.



Gambar 3.17
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

3.2.6 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

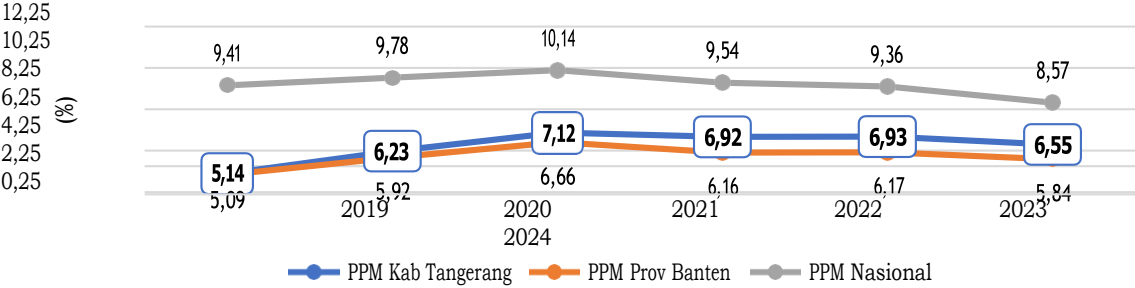
Laju pertumbuhan PDRB terhadap pekerja di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023, tetapi menurun pada tahun 2024. Hal ini disebabkan peningkatan partisipasi angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan PDRB Kabupaten Tangerang. Secara umum laju pertumbuhan PDRB ini tergolong rendah dan diperlukan strategi dalam mendorong produktivitas tenaga kerja dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang.



Gambar 3.18
Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Tenaga Kerja Kabupaten
Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Analisis Penyusun, Badan Pusat Statistik, 2024

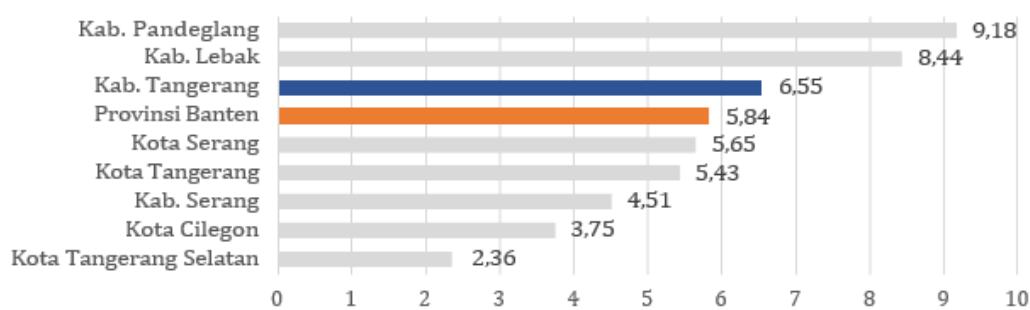
3.2.7 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dalam kurun waktu 2019-2021, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan akibat pandemi covid-19. Pada periode tahun 2022-2024, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan. Hal ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



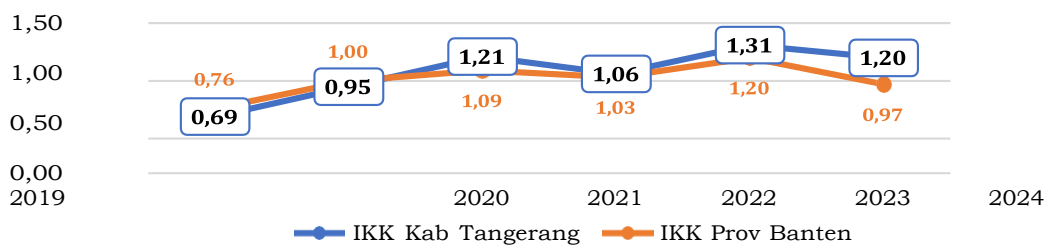
Gambar 3.19
Persentase Penduduk Misikin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional
Tahun 2019-2024

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2024. Kabupaten Tangerang berada pada posisi ke-tiga tertinggi dengan kedudukan di atas Provinsi Banten yang memiliki capaian sebesar 5,84%. Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Pandeglang dengan angka 9,18%. Sementara itu, tingkat kemiskinan paling rendah yaitu Kota Tangerang Selatan dengan angka 2,36%.



Gambar 3.20
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber : BPS, 2024

Rasio Kesenjangan Kemiskinan yang tinggi menunjukkan kualitas kesejahteraan yang belum optimal. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tangerang relatif tinggi yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang mencapai nilai 1,20. Tingginya indeks ini mengindikasikan besarnya gap antara pendapatan masyarakat miskin dengan garis kemiskinan Kabupaten Tangerang.



Gambar 3.21
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

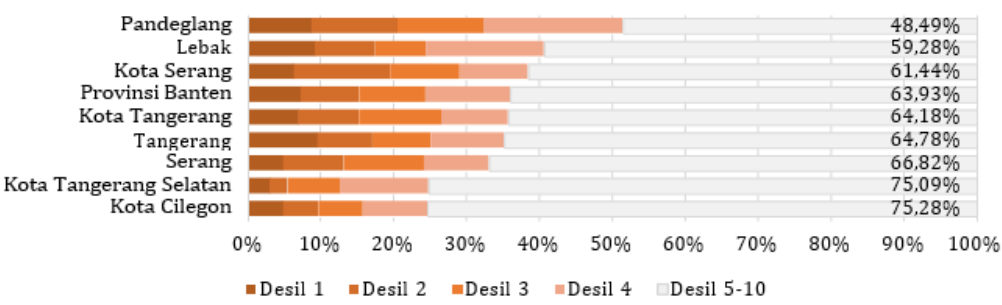
3.2.8 Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga (Desil dan/atau Kemiskinan

Tingkat kesejahteraan rumah tangga ditunjukkan dari persentase kelompok pendapatan dalam instrumen Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data P3KE digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan sosial bagi keluarga dan individu. Diagram dibawah ini menunjukkan persentase jumlah penduduk berdasarkan kelompok pendapatan desil 1 (10%), desil 2(20%), desil 3 (30%), desil 4 (40%), desil 5-10 (> 40%). Desil 1 termasuk dalam kelompok miskin dan Desil 2-4 termasuk dalam kelompok rentan miskin.

Berdasarkan gambar diatas, jumlah rumah tangga pada desil 1-4 di Kabupaten Tangerang terendah ke-4 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Jumlah rumah tangga dengan pendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 295.195 KK atau 35,2% dari total KK. Sementara itu, jumlah individu dengan pendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 1.169.049 jiwa.

3.2.9 Indeks Gini

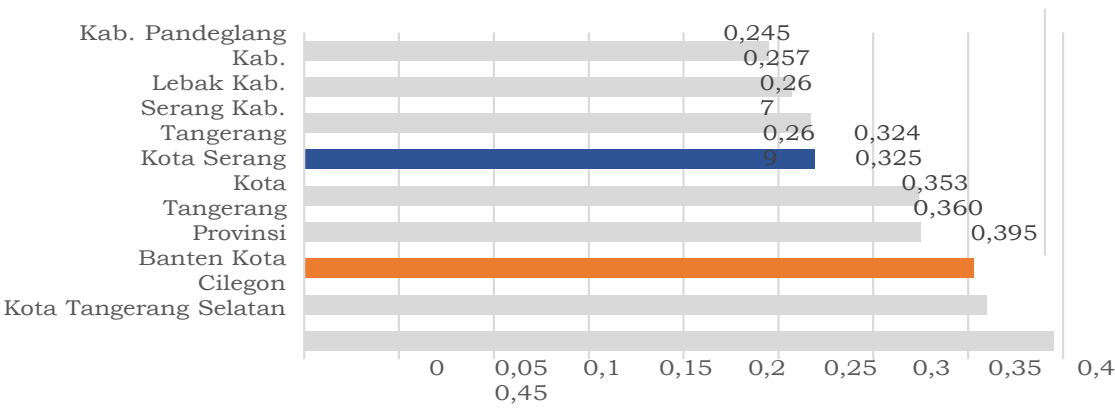
Indeks Gini merupakan salah satu tolak ukur dalam mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Pada tahun 2024, Indeks gini Kabupaten Tangerang sebesar 0,269 dalam kategori ‘Rendah’. Indeks tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang cenderung merata dan tidak memiliki gap yang tinggi antar kelompok masyarakat yang dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah ini cenderung rendah. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Gini Kabupaten Tangerang cenderung menurun dan capaian tersebut lebih baik dibandingkan Provinsi Banten dan nasional.



Sumber: Website P3KE Kemenko PMK (<https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>)

Gambar 3.22
Indeks Gini Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional
Tahun 2019- 2024

Indeks Gini Kabupaten Tangerang tergolong rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2024. Kabupaten Tangerang berada pada posisi ke-empat dengan kedudukan di atas Provinsi Banten yang memiliki capaian sebesar 0,353. Kabupaten/kota dengan indeks gini paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kota Tangerang dengan angka 0,395. Sementara itu, indeks gini paling rendah yaitu Kabupaten Pandeglang dengan angka 0,245.



Gambar 2.23
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

3.2.10 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025 dan 2026

Tabel 3.10
Target dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025 dan Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,07	5.10
2	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	58,64	60.57
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	Persen	11,58	21.14
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,05	6.25
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,06-6,62	6.00
6	Rasio Gini	Koefisien Gini	0,266-0,270	0.267
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks IPM	76,25	76.50
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	4,87	5,07
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	61,57	61.74

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Tahun 2026 sesuai dengan Rancangan RPJMD 2025-2029 adalah Meningkatkan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM

3.3 Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain- lain

Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator Tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong Peningkatan pendapatan Kabupaten Tangerang dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak, melakukan investasi, dan pengembangan potensi daerah. Berikut beberapa cara yang dilakukan:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak: Dilakukan melalui pemetaan wajib pajak, penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pemungutan pajak, dan peningkatan kualitas SDM di bidang pajak. Terkait penggunaan teknologi yaitu melalui Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah (SIWASJADA) yaitu inovasi yang memfasilitasi akses real-time terhadap data perpajakan, analisis yang lebih mendalam terhadap transaksi pajak, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait kebijakan perpajakan.
- Pengawasan dan pemungutan pajak secara ketat: Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan pada Bapenda Kabupaten Tangerang terus memantau dan menagih pajak kepada wajib pajak. Pengawasan dan Pemantauan antara lain dilakukan dengan memasang alat perekam data transaksi usaha (tapping box) untuk mempermudah pelaporan pajak dan mengurangi potensi kebocoran pajak, terutama dari sektor hotel, restoran, dan hiburan.
- Sosialisasi dan penyuluhan: Masyarakat diberi pemahaman tentang pentingnya pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah, dilakukan juga melalui kegiatan Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Penghargaan kepada wajib pajak yang taat: Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan motivasi mereka. Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan penghargaan PAK JAKA Digital Award kepada wajib pajak yang taat dan stakeholder. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam membangun Kabupaten Tangerang dan mendorong kepatuhan pajak. Penghargaan ini diberikan secara rutin setiap tahun melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Penghargaan ini mencakup berbagai kategori, termasuk pembayaran tepat waktu, pembayaran terbesar, dan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Dengan adanya penghargaan ini, Pemkab Tangerang berharap dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu dan taat dalam memenuhi

kewajibannya. Selain itu, penghargaan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pajak.

- Kerjasama dengan pihak ketiga: Bapenda berkoordinasi dengan pihak ketiga dalam pemungutan pajak. Pemda Kabupaten Tangerang telah menandatangani PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah. Selain itu juga telah dilakukan Kerjasama pertukaran data yang mencakup pertukaran data perpajakan antara pusat dan daerah, yang memungkinkan pemda untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) daerah dengan data dari pusat.
 - Memberdayakan personel di tingkat kelurahan dan kecamatan: Peran aktif personel di tingkat kelurahan dan kecamatan memperluas jangkauan pemungutan pajak, terutama untuk pajak yang rutin.
2. Untuk kelompok pendapatan transfer, arah kebijakannya mencakup:
- a. Peningkatan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk setiap obyek dari pendapatan transfer sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengadakan komunikasi yang intensif kepada lembaga ditingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana transfer bagi kabupaten/kota;
 - c. Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.
3. Untuk kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah, Lain-lain pendapatan yang sah dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang meliputi berbagai sumber pendapatan selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ini termasuk hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan potensi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Beberapa contoh lain-lain pendapatan yang sah:
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan: Seperti hasil penjualan tanah atau bangunan milik Pemda yang tidak dipisahkan.
 - Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan: Seperti hasil sewa lahan atau bangunan milik Pemda.
 - Jasa giro: Pendapatan dari bunga tabungan atau deposito

milik Pemda.

- Pendapatan bunga: Pendapatan dari bunga pinjaman atau investasi milik Pemda.
- Tuntutan ganti rugi: Uang ganti rugi yang diperoleh dari pihak ketiga akibat kerusakan atau kerugian yang dialami Pemda.
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing: Pendapatan dari selisih nilai tukar saat transaksi keuangan Pemda dalam mata uang asing.
- Hibah: Diberikan oleh pihak lain kepada Pemda sebagai kontribusi atau bantuan.
- Dana darurat: Dana yang dialokasikan untuk menghadapi keadaan darurat yang tidak terduga.
- Potensi lainnya: Pendapatan sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya hasil kerjasama dengan pihak ketiga, atau pendapatan dari kegiatan tertentu yang sah.

Tabel 3.11
Target Pendapatan Tahun 2026

Kode	Uraian	RKPD 2025	PROGNOSIS RKPD 2026	Naik/Turun	Persentase
4	PENDAPATAN DAERAH				
04:01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.681.265.325.888	4.924.846.618.018	243.581.292.130	5,20
04:01:01	Pajak Daerah	3.763.500.000.000	3.940.948.463.561	177.448.463.561	4,71
04:01:02	Retribusi Daerah	173.297.291.886	186.697.704.019	13.400.412.133	7,73
04:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.509.521.940	63.634.885.360	3.125.363.420	5,17
04:01:04	Lain-lain PAD yang Sah	683.958.512.062	733.565.565.078	49.607.053.016	7,25
04:02	PENDAPATAN TRANSFER	3.548.978.636.887	3.548.978.636.887	-	0,00
04:02:01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.190.458.687.000	3.190.458.687.000	-	0,00
04:02:02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	358.519.949.887	358.519.949.887	-	0,00
04:03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
04:03:03	Pendapatan Hibah				
	Jumlah Pendapatan	8.230.243.962.775	8.473.825.254.905	243.581.292.130	2,96

3.3.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpolat.

Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, dalam bentuk Program/Kegiatan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Nomenklatur Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

3.3.2.1 Belanja operasi Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

3.3.2.1.1 Belanja pegawai; Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi tersebut diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

3.3.2.1.2 Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Banten memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Belanja barang dan jasa;

3.3.2.1.3 Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan

Pemerintahan Daerah. Belanja hibah; Belanja yang bentuk belanjanya berupa uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau 371 perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus .

- 3.3.2.1.4 belanja bantuan sosial; Belanja yang bentuk belanjanya berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

3.3.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 3.3.2.2.1 Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- 3.3.2.2.2 Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

- 3.3.2.2.3 Batas minimal kapitalisasi aset. Batas minimal kapitalisasi aset diatur dalam Peraturan Gubernur.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Belanja modal meliputi:

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset

tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.3.2.3 Belanja tidak terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.3.2.4 Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

3.3.2.4.1 Belanja Bagi Hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.2.4.2 Belanja bantuan keuangan Kabupaten Tangerang terdiri dari bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Transfer Dana Desa

Arah kebijakan umum TKD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan.
2. Mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power.
3. Meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan.
4. Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah.
5. Untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan.

Arah kebijakan DBH Tahun 2026, yaitu:

1. Memperkuat sinkronisasi alokasi DBH dengan kebijakan pengelolaan pendapatan negara yang dibagihasilkan.
2. Mendorong perhitungan alokasi DBH yang transparan, akurat dan akuntabel.
3. Meningkatkan upaya hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja,

penguatan sinergi penggunaan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah kebijakan DAU Tahun 2026 yaitu:

1. Memperbaiki formula penghitungan alokasi DAU untuk mendorong pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam pelayanan publik termasuk penerapan DAU yang ditentukan penggunaannya.
2. Mendorong peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan karakteristik daerah.
3. Penguatan sinergi penggunaan DAU dengan prioritas nasional.
4. Menjaga pemenuhan layanan dasar kawasan afirmasi.
5. Perbaiki tata kelola DAU terutama dalam aspek perencanaan, penggunaan, dan pelaporan serta evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Arah kebijakan DAK Tahun 2026 secara umum, yaitu:

1. Mengarahkan pemanfaatan DAK untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung operasionalisasi layanan publik,
2. Memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya dengan menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta matching program, dan
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai dampak yang ditargetkan.

Arah kebijakan Dana Desa Tahun 2026, yaitu:

1. Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa, melalui:
 - a. Mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - b. Memberikan dukungan pada program ketahanan pangan/lambung pangan, energi, serta lembaga ekonomi desa lainnya (BUMDes dan UMKM);
 - c. Membangun dan memelihara infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa (gotong royong) meliputi akses air bersih dan sanitasi, revitalisasi rumah tidak layak huni, peningkatan ketahanan iklim, serta mitigasi risiko dan penanggulangan bencana;
 - d. Membangun infrastruktur digital dan teknologi di desa;
 - e. Mendukung operasional pemerintah desa paling tinggi 3 persen, dan/atau
 - f. Melaksanakan program prioritas desa lainnya.
2. Menambah kriteria alokasi afirmasi berupa desa yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana.
3. Memberikan dukungan dalam pembentukan dan/atau operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih, serta

dukungan insentif kepada desa yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui alokasi kinerja dan/atau insentif desa.

Arah kebijakan Dana Insentif Fiskal Tahun 2026, yaitu:

1. Mengalokasikan Dana Insentif Fiskal berdasarkan kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya, kinerja pemerintah daerah tahun berjalan, dan/atau kinerja spesifik pemerintah daerah;
2. Mempertajam indikator penilaian kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya atas pengelolaan keuangan pemerintah, pelayanan dasar, dukungan fokus kebijakan nasional, dan sinergi kebijakan pemerintah, di antaranya peningkatan ketahanan pangan dan/atau pengelolaan sampah;
3. Menggunakan indikator penilaian kinerja spesifik pemerintah daerah yang berkinerja baik sesuai prioritas nasional;
4. Mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah serta peningkatan kualitas penggunaan Dana Insentif Fiskal.

Tabel 3.12
Target Belanja Tahun 2026

Kode	Uraian	RKPD 2025	PROGNOSIS RKPD 2026	Naik/Turun	Persentase
5	BELANJA				
05:01	BELANJA OPERASI	6.241.703.120.755	6.613.699.540.997	371.996.420.242	5,96
05:01:01	Belanja Pegawai	2.805.311.576.632	2.937.104.666.909,54	131.793.090.278	4,70
05:01:02	Belanja Barang dan Jasa	3.025.084.568.832	3.162.153.054.807,36	137.068.485.975	4,53
05:01:05	Belanja Hibah	390.837.375.291	440.701.523.780,00	49.864.148.489	12,76
05:01:06	Belanja Bantuan Sosial	20.469.600.000	73.740.295.500,00	53.270.695.500	260,24
05:02	BELANJA MODAL	1.381.322.420.332	1.296.140.490.452	-85.181.929.879	-6,17
05:02:01	Belanja Modal Tanah	106.598.843.340	261.550.626.650	154.951.783.310	145,36
05:02:02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	379.749.129.174	346.668.833.028	-33.080.296.146	-8,71
05:02:03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	469.397.844.699	447.129.497.459	-22.268.347.240	-4,74
05:02:04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	402.024.707.619	217.892.683.615	-184.132.024.003	-45,80
05:02:05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.551.895.500	22.898.849.700	-653.045.800	-2,77
05:03	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	50.000.000.000	20.000.000.000	66,67
05:03:01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	50.000.000.000	20.000.000.000	66,67
05:04	BELANJA TRANSFER	944.978.421.689	963.985.223.456	19.006.801.767	2,01
05:04:01	Belanja Bagi Hasil	393.679.729.189	412.686.530.956	19.006.801.767	4,83
05:04:02	Belanja Bantuan Keuangan	551.298.692.500	551.298.692.500	-	0,00
	Jumlah Belanja	8.598.003.962.775	8.923.825.254.905	325.821.292.130	3,79
	Total Surplus/(Defisit)	-367.760.000.000	-450.000.000.000	-82.240.000.000	22,36

3.3.3 Pembiayaan Daerah

Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan SILPA tahun 2025 dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
- b. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari skema dana cadangan dan pembiayaan kreatif lainnya;
- c. Pengeluaran pembiayaan dapat diperuntukkan bagi BUMD, BUMN dan/atau perusahaan lainnya yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah dan ketentuan regulasi;
- d. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan.

Tabel 3.13
Target Pembiayaan Tahun 2026

Kode	Uraian	RKPD 2025	PROGNOSIS RKPD 2026	Naik/Turun	Persentase
6	PEMBIAYAAN				
06:01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	400.000.000.000	450.000.000.000	50.000.000.000	12,50
06:01:01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	400.000.000.000	450.000.000.000	50.000.000.000	12,50
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	400.000.000.000	450.000.000.000	50.000.000.000	12,50
06:02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
06:02:02	Penyertaan Modal Daerah	12.240.000.000		-	0,00
06:02:04	Pemberian Pinjaman Daerah	20.000.000.000	-	-	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
	Pembiayaan Netto	367.760.000.000	450.000.000.000	82.240.000.000	22,36
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)	-	0	-100,00
	TOTAL APBD	8.598.003.962.775	8.923.825.254.905		0,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD tersebut disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 2025–2030. Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 memperhatikan arah kebijakan jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2045 serta mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029. Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2026 juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 didasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030. Visi dan misi tersebut menjadi dasar dalam perumusan sasaran, arah kebijakan, program prioritas, serta target pembangunan. Visi RPJMD Tahun 2025–2029 ini tidak terlepas dari visi RPJPD Tahun 2025–2045 berupa “Terwujudnya Kabupaten Tangerang Gemilang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan” yang diwujudkan melalui visi RPJMD Tahun 2025–2029 yaitu :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing

(Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)

Penjabaran visi di atas merujuk pada kata kunci sebagai berikut:

a) Sejahtera

Sejahtera diwujudkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi. Selain itu, diwujudkan melalui harmonisasi kehidupan sosial (seperti kerukunan umat beragama, kualitas keluarga, dll) serta daya dukung lingkungan sebagai landasan pembangunan untuk mencapai kemajuan bersama. Didefinisikan dan diindikasikan dengan, Menurunnya Angka Kemiskinan serta Menurunnya Angka Pengangguran, Menipisnya Angka Gini Rasio, Tingginya Kerukunan Umat Beragama, Tingginya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana keagamaan, serta adanya stimulan/dukungan Pemda terhadap Kelompok Masyarakat yang berfokus didunia keagamaan.

b) Berdaya Saing

Berdaya saing digambarkan melalui inovasi dalam kebijakan/program dengan tetap memperhatikan nilai-nilai daerah dan kualitas sumber daya manusia yang adaptif. Selain itu, berdaya saing diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, serta perekonomian yang maju, sejalan dengan lingkungan hidup yang berkualitas. Didefinisikan dan diindikasikan dengan Menurunnya angka stunting dan gizi buruk, Kemudahan

berinvestasi, Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah, Infrastruktur yang Merata, Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tangerang tersebut telah dirumuskan upaya-upaya yang akan dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati melalui 6 (enam) misi dan misi ini menjadi Prioritas Daerah (PD) di Kabupaten Tangerang dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Lebih jauh, Prioritas Daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana kerja di setiap perangkat daerah Kabupaten Tangerang, dan intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan. Adapun misi RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu :

Misi Pertama : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Misi Kedua : Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing

Misi Ketiga : Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas

Misi Keempat : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

Misi Kelima : Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Misi Keenam : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan tahapan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 secara sistematis. Rincian tahapan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang Periode 1 (2025-2029) "Penguatan Modal Dasar"				
Arah Kebijakan Tahun 2026	Arah Kebijakan Tahun 2027	Arah Kebijakan Tahun 2028	Arah Kebijakan Tahun 2029	Arah Kebijakan Tahun 2030
Penguatan ekonomi lokal dan sumber daya manusia melalui kolaborasi antar sektor untuk menciptakan pondasi ketahanan pangan	Optimalisasi sektor industri, perdagangan, dan ketahanan pangan berbasis keberlanjutan.	Pengembangan Riset, Inovasi, dan Daya Saing Tenaga Kerja	Akselerasi Pembangunan Daerah yang Inklusif untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing

Berdasarkan tahapan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029, arah kebijakan pembangunan tahun 2026 ditetapkan sebagai dasar dalam merumuskan tema pembangunan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026.

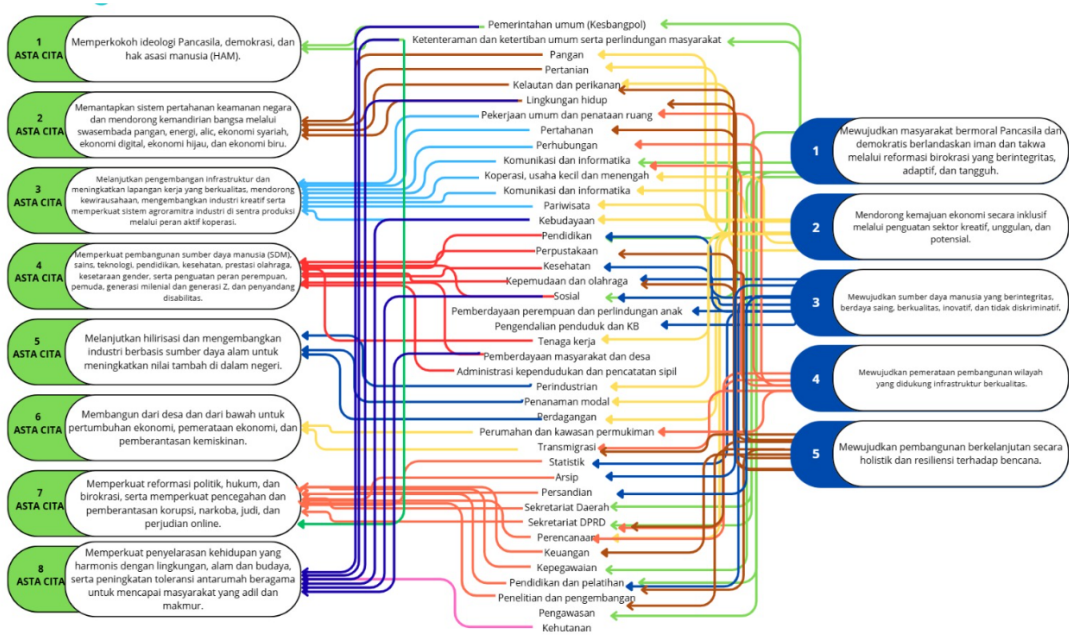
4.1. Tema Pembangunan Daerah

Tema RKPD Tahun 2026 juga disusun sebagai respon terhadap kondisi nasional yang merupakan tahun kedua masa pemerintahan Kepala Daerah terpilih pada 2024 yang lalu. Penyusunan tema pembangunan sinergi antara pusat, provinsi dan daerah, dalam tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 yaitu “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif “. RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2026 mengusung tema ini, dengan fokus pada peningkatan kemandirian pangan dan energi, serta pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif. Sedangkan tema pembangunan Provinsi Banten adalah “Penguatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan Melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan”.

Berdasarkan kedua tema tersebut dan sekaligus sebagai penjabaran dari Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, maka tema pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 disusun untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis daerah, provinsi dan nasional, tema tahun 2026 adalah “Penguatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Melalui Kolaborasi Antar Sektor Untuk Menciptakan Pondasi Ketahanan Pangan. Tema Pembangunan daerah menjadi pedoman dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai urusan wajib dan pilihan yang selanjutnya dijabarkan pada bab V RKPD ini lengkap dengan pagu indikator per Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan fiskal Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Berdasarkan penetapan tema diatas, terdapat keterkaitan yang erat antara tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Banten dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1
Konsistensi Tema Pembangunan Tahun 2026



Gambar 4.2
Kontribusi Urusan Pemerintah terhadap Asta Cita dan Prioritas Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2026, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2026 pada Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025- 2029.

Kedudukan RKP Tahun 2026 sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN Tahun 2025-2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2026 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya. Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2026 menjadi sangat strategis. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 adalah "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema ini menandakan tujuan pembangunan nasional 2026 fokus pada kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif.

Sementara itu pada tahun 2026 Pemerintah dalam hal ini sudah menetapkan sasaran pembangunan meliputi pertumbuhan ekonomi, penurunan emisi gas rumah kaca, peningkatan GNI per kapita, indeks kualitas lingkungan hidup, Indeks Modal Manusia, dan Rasio Gini sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6 – 6,2
2	PDRB Per Kapita (Juta)	80,0 – 82,4
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	4
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,25 – 4,85
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,45 – 6,65
6	Rasio Gini	0,340 – 0,350
7	Indeks Pembangunan Manusia (%)	0,57

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	42,62 – 44,80
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	67,17

Arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2026 umumnya berfokus pada beberapa hal utama, termasuk:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi:
Kebijakan pembangunan di tahun 2026 bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, misalnya dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,6-6,2%.
- Menurunkan tingkat kemiskinan:
Pembangunan juga berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, misalnya dengan menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,45-6,65%.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia:
Kebijakan pembangunan juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, misalnya melalui pendidikan dan kesehatan, misalnya dengan menargetkan Indeks Modal Manusia sebesar 0,57.
- Pengembangan ekonomi unggulan:
Pembangunan diarahkan untuk mengembangkan ekonomi unggulan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pertanian, UMKM, dan infrastruktur dasar.
- Perlindungan lingkungan:
Kebijakan pembangunan juga mempertimbangkan aspek lingkungan, misalnya dengan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik:
Pembangunan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan:
Arah kebijakan pembangunan juga menekankan pada pembangunan yang berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

4.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten
Tahun 2026

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Banten Tahun 2026 merupakan penjabaran dari dokumen Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2026 merupakan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 tahun ke-dua dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yaitu “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi dengan didukung oleh misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh
2. Mendorong Kemajuan Ekonomi secara Inklusif melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan dan Potensial
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berintegritas, berdaya Saing,

- Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif
- 4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas
 - 5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana
- Sementara itu Tujuan dan sasaran pada Rancangan RPJMD Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Target Tujuan Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2026				
VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026
BANTEN MAJU, ADIL MERATA TIDAK KORUPSI				
Misi 1, MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL PANCASILA DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA MELALUI REFORMASI BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN TANGGUH	T1. TERWUJUDNYA PEMERINTAH YANG KOLABORATIF, KAPABEL, DAN BERINTEGRITAS UNTUK MELAYANI MASYARAKAT	S1. Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	90,99
			Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	3,95
			Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)	66,77
			Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	3,95
			Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (Nilai)	94,04
			Indeks Kepuasan Stakeholder Pelayanan Umum dan Pimpinan (Nilai)	3,30
			Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah (SKM Biro Umum dan Perlengkapan) (Nilai)	3,30
			Kinerja Adminitrasi Kependudukan (Persen)	64,32
			Persentase Lembaga yang Dihubungkan Dengan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD (Nilai)	3,40

Gambar 4.3
Tujuan/Sasaran dan Indikator pada RKPD
Provinsi Banten Tahun 2026

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026
			Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)	66,77
			Indeks Reformasi Hukum (Nilai)	99,42
			Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan (Persen)	100,00
			Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan (Persen)	100,00
			Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province (Jumlah)	8,00
			Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan (Persen)	100,00
	S2. Terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit		Indeks Merit Sistem (Nilai)	331,00
			Indeks Merit Sistem (Nilai)	331,00
			Indeks Merit Sistem Pada Enam Dimensi (Nilai)	275,00
			Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Nilai)	37,00
	S3. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah organisasi		Nilai SAKP (Nilai)	72,00
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	79,00
			Nilai SAKP (Nilai)	72,00
			Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai)	11,80
			Skoring/Nilai LPPD (Nilai)	3,52
			Nilai Komponen Evaluasi Kinerja (Nilai)	16,50
			Nilai Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja (Nilai)	44,11
			Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Provinsi (Nilai)	92,30
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	79,00
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Opini)	WTP
			Persentase Aset Daerah yang Dimanfaatkan (Persen)	
	S4. Terwujudnya Transformasi Digital		Indeks Pemerintah Digital (Nilai)	1,80
			Indeks Pemerintah Digital (Nilai)	1,80
			Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Nilai)	66,30
			Indeks Satu Data Indonesia (Nilai)	66,00
			Indeks Pemerintahan Digital (Keamanan Siber) (Nilai)	2,00
			Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	77,48
			Tingkat Digitalisasi Arsip (Persen)	93,86
	S5. Terbangunnya		Indeks Integritas Nasional (Nilai)	74,00

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026
Misi 2. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL	T 2.1 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi	perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah (Nilai)	51,00
			Indeks Integritas Nasional (Nilai)	74,00
			Jumlah Unit Kerja Lolos WBK/WBBM (Unit)	3,00
			Maturitas SPIP (Nilai)	3,405
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai)	89,40
			Indeks ASN BerAkhlak (Nilai)	76,50
			Indeks Inovasi Daerah (Nilai)	51,00
			Persentase Riset dan Inovasi yang Termanfaatkan (Persen)	100,00
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	6,03
		S 2.1 Meningkatnya Produktivitas Ekonomi	Nilai PDRB ADHK (Triliun Rupiah)	593,11
			Pertumbuhan PDRB Sektor Industri (Persen)	6,06
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (Persen)	4,98
			Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persen)	33,49
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persen)	12,68
			Persentase Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen)	7,65
			Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif (Persen)	5,02
			Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Triliun Rupiah)	16,310
			Nilai PDRB Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah)	74,560
			Nilai PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Triliun Rupiah)	28,465
			Nilai PDRB Subkategori Perikanan (Triliun Rupiah)	2,628
			Nilai PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Triliun Rupiah)	28,465
			Nilai PDRB Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Triliun Rupiah)	27,572
		S 2.2 Meningkatnya Kualitas Investasi	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (Triliun Rupiah)	187,43
			Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (Triliun Rupiah)	187,43
			Nilai Realisasi Penanaman Modal (Triliun Rupiah)	109,27
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	91,70
		S 2.3 Meningkatnya Kemandirian	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (Persen)	67,49
			Rasio PAD Terhadap PDRB (Persen)	3,68

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026
		Keuangan Daerah	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	67,49
		S 2.4	Indeks Demokrasi	81,14-
		Meningkatnya Lingkungan Kondusif dan Demokratis	Indonesia (Nilai)	83,95
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Nilai)	90,00
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Nilai)	90,00
			Indeks Demokrasi Indonesia (Nilai)	81,43
			Indeks Harmoni Indonesia (Nilai)	6,60
	T 2.2		Tingkat Kemiskinan (Persen)	4,45-5,15
	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat		Rasio Gini (Nilai)	0,337-0,365
		S 2.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Nilai)	0,70
		Meningkatnya Keberfungsian Sosial, Individu, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Nilai)	0,70
			Indeks Kesejahteraan Sosial (Nilai)	0,58
		S 2.2	Persentase Kemiskinan Wilayah Perdesaan (Persen)	5,78
		Menurunnya Kemiskinan Wilayah Perdesaan	NTP Perikanan/NTN dan NTPI (Nilai)	102,00
			NTP Perikanan/NTN dan NTPI (Nilai)	102,00
			Nilai Tukar Petani/NTP (Nilai)	112,33
			Nilai Tukar Petani/NTP (Nilai)	112,33
			Indeks Desa (Nilai)	0,705
			Persentase Desa Mandiri (Persen)	24,15
		S 2.3	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Persen)	2,97
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan	Proporsi Jumlah Usaha Kecil yang naik skala (Persen)	4,80
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADBH (Persen)	0,770
			Rasio Kewirausahaan Daerah (Persen)	2,17
Misi 3. MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERINTEGRITAS, BERDAYA SAING, BERKUALITAS, INOVATIF, DAN TIDAK DISKRIMINATIF	T 3.1		Indeks Modal Manusia (Nilai)	0,570
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (Persen)	6,75-6,89
		S 3.1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (Tahun)	9,79-9,81
		Meningkatnya Intelektual dan Karakter Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13,27-
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (Nilai)	53,65-
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Nilai)	54,21
			Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (Tahun)	72,96
			Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	9,79-9,81
			Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13,27-
				13,30

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (Nilai)	55,81
			Indeks SPM Pendidikan (Nilai)	73,00
			IPK Dimensi Warisan Budaya (Nilai)	53,55
			IPK Dimensi ekspresi budaya (Nilai)	31,20
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Nilai)	72,96
			Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai)	75,30
			Usia Harapan Hidup (Nilai)	75,47
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (Persen)	19,50
			Usia Harapan Hidup (Nilai)	75,47
			Angka Kematian Ibu (Persen)	94,00
			Presentase Cakupan Intervensi Stunting (Persen)	70,00
			Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (Persen)	95,00
			Persentase Layanan Unggulan Kesehatan dan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi yang Tercapai (Persen)	25,00
			Indeks Pembangunan Olahraga (Nilai)	0,310
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga (Persen)	0,200
			Persentase atlit yang memperoleh medali tingkat regional/nasional (Persen)	50,00
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga (Persen)	0,200
			iBangga (Nilai)	65,63
			iBangga (Nilai)	65,63
			Indeks Pembangunan Gender/IPG (Nilai)	93,05
			Indeks Ketimpangan Gender/IKG (Nilai)	0,437
			Indeks Perlindungan Anak/IPA (Nilai)	73,22
			Angka Kelahiran Total TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun (Nilai)	1,98
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (Persen)	66,66
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/Tenaga kerja)	#####
			Persentase Pencari Kerja yang Diberdayakan dan Ditempatkan (Persen)	79,75
			Tingkat Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	65,52
			Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	53,57

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026
Misi 4. MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS	T 4.1 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	S 4.1 Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Infrastruktur	Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan (Persen)	33,53
			Persentase Ketenagakerjaan Layak (Persen)	62,81
			Indeks Williamson (Nilai)	0,747
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Nilai)	3,20
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Nilai)	3,20
			Persentase Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan (Persen)	96,79
			Persentase Tingkat Konektivitas Infrastruktur Jalan (Persen)	75,87
			Persentase Capaian Infrastruktur	19,51
			Keciptakarya (Persen)	
			Persentase Capaian Infrastruktur Sumber Daya Air (Persen)	29,22
			Persentase Pembinaan Pelaku Jasa Konstruksi (Persen)	32,04
			Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang (Persen)	46,34
			Konsumsi Listrik Perkapita (kWh)	2.395,00
			Rasio Elektrifikasi (Persen)	100,00
			Persentase pemenuhan penggunaan dan pemanfaatan tanah (Persen)	100,00
			Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan (Persen)	100,00
		S 4.2 Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (Persen)	68,98
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (Persen)	68,98
			Persentase Rumah/Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (Persen)	69,00
		S 4.3 Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas (Nilai)	0,70
			Rasio Konektivitas (Nilai)	0,72
			Rasio Konektivitas Darat (Nilai)	0,70
			Rasio Konektivitas Laut (Nilai)	0,80
			Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani (Nilai)	21,00
Misi 5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA HOLISTIK DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA	T 5.1 Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Berketahanan	S 5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Nilai)	67,17
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Nilai)	67,17
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah/IKLH (Nilai)	67,17
			Indeks Kualitas Air/IKA (Nilai)	67,73

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026
			Indeks Kualitas Air Laut/IKAL (Nilai)	83,11
			Indeks Kualitas Udara/IKU (Nilai)	64,67
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan/IKTL (Nilai)	61,91
	S 5.2		Indeks Ketahanan Pangan/IKP (Nilai)	79,75
	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Resiliensi Terhadap Bencana		Indeks Risiko Bencana/IRB (Nilai)	105,10-104,89
			Indeks Ketahanan Pangan/IKP (Nilai)	79,75
			Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	92,56
			Indeks Risiko Bencana (Nilai)	105,10-104,89
			Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten (Persen)	1,30
	S 5.3		Penurunan Intensitas Emisi GRK (Persen)	46,05
	Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon Yang Berkelanjutan		Persentase Penurunan Emisi GRK	
			A) Kumulatif (Persen)	2,75
			B) Tahunan (Persen)	10,93
			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah (Persen)	10,30
			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (Persen)	45,1
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (Persen)	26,74
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi (Persen)	5,57
			Persentase Pelayanan Kegeologian (Persen)	52,63
			Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	25,07
			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Persen)	1,48

4.2.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang. Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang periode 2025-2029 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Sejahtera dan berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang). Visi Pembangunan Daerah diterjemahkan dalam Misi Pembangunan Daerah yang diformulasikan ke dalam 6 (enam) Misi RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

- Misi Pertama : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
- Misi Kedua : Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing
- Misi Ketiga: Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas
- Misi Keempat : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas
- Misi Kelima : Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
- Misi Keenam : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Dalam tatanan operasional, jabaran visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan tersebut bisa saja dicapai dalam masa 5 (lima) tahun atau kurang, dan menjadi tolak ukur keberhasilan kepala daerah selama memimpin Kabupaten Tangerang. Tujuan dan sasaran tersebut disusun secara realistis dan terukur (kualitatif maupun kuantitatif). Lebih rinci terhadap hubungan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator dan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
	Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)								
	MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien								
1.1	1	Mewujudkan Birokrasi yang Responsif. Akuntabel. dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	Indeks	85,12	85,68	88,54	Meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar	Optimalisasi sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan
	1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	Indeks	4.23	4.27	4,40		Optimalisasi waktu penyelesaian pelayanan publik
									Meningkatkan layanan penanganan dan pengaduan
									Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
								Optimalisasi digitalisasi kearsipan	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi srikandi di level OPD

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
								Optimalisasi interoperabilitas data statistik sektoral antar perangkat daerah	Mendorong penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang mengacu kepada Proses Bisnis Statistik
								Meningkatkan kualitas layanan pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana (KB)	Integrasi sistem data kependudukan secara optimal
								Optimalisasi pengelolaan administrasi kependudukan yang menjamin	Meningkatkan sosialisasi terkait KB dan kependudukan untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat
								Mendorong terwujudnya layanan kependudukan yang terintegrasi teknologi/elektronik yang menjamin kesetaraan akses bagi	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
								pemenuhan hak identitas hukum yang setara bagi setiap warga negara	setiap warga
								Optimalisasi pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang adil, sensitif, dan inklusif	Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan dan anak
								Optimalisasi pemberdayaan dan pelayanan bagi PPKS yang berkeadilan dan inklusif	Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan PPKS
									Mendorong optimalisasi ketersediaan data

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
								melalui pendekatan berbasis hak	
									administrasi terkait layanan PPKS
								Optimalisasi pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal
									Oprimalisasi penindakan gangguan kamtibnas
									Optimalisasi penanganan konflik di masyarakat
								Mendorong pembanguna n karakter bangsa yang berpijak pada prinsip	Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
								demokrasi, ideologi nasional, dan kesadaran politik	Meningkatkan pemahaman politik dalam negeri
									Optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan (ormas)
									Menekan kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat
								Mendorong kemampuan desa dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif, dengan melibatkan kelompok rentan,	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan tingkat desa yang efektif dan akuntabel yang melibatkan kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
								perempuan dan kelompok minoritas	
	1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks SPBE (indeks)	Indeks	4,01	4,06	4,26	Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan program Sekretariat DPRD	Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembahasan Raperda yang difasilitasi
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	74,46	74,96	76,96	Optimalisasi operasional persandian dan pengamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE	Mendorong peningkatan kesadaran keamanan informasi dan kepatuhan prosedur bagi seluruh pegawai lingkup Kabupaten Tangerang
			Nilai AKIP (nilai)	Indeks	77,81	78,51	81,36	Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika	Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan satu pintu

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
			Indeks Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (indeks)	Indeks	91	92	96	Mendorong tata kelola SDM kepegawaian dan manajemen ASN yang optimal	Optimalisasi pengisian jabatan melalui fleksibilitas mutasi dan rotasi dalam memenuhi kebutuhan ASN
			Maturitas SPIP (indeks)	Indeks	4	4	4,1		Mendorong pengembangan kompetensi ASN
									Optimalisasi uji kompetensi ASN
									Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung kepegawaian dan pengembangan SDM
								Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Optimalisasi pelaksanaan perencanaan kinerja
									Optimalisasi pelaksanaan pengukuran kinerja
									Optimalisasi pelaksanaan evaluasi kinerja

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
									Optimalisasi konsistensi penjabaran dokumen perencanaan
								Optimalisasi fungsi penelitian dan pengembangan	Optimalisasi kebijakan disertai dengan basis data riset dan inovasi
								Optimalisasi tata kelola keuangan dan manajemen aset daerah	Optimalisasi pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)
									Mendorong penguatan dan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
								Meningkatkan kinerja pengawasan daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan SPIP
								Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang	Optimalisasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
	Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)								
								obyektif dan transparan	Optimalisasi kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan
									Optimalisasi kebijakan administrasi umum
	MISI 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing								
1.2	1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indeks	5,07	5,24	5,40	Peningkatan daya saing industri	Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas yang menjamin kesetaraan kesempatan usaha bagi semua warga
			Tingkat Inflasi (%)	Indeks	1,8 - 2,00	2,00	2,00		Meningkatkan sinkronisasi antar lembaga serta pelaku industri hingga terbentuk klaster guna menerapkan predict and prevent

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
									Penegakan regulasi pengembangan perindustrian dan kawasan industri
	1.1	Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	Indeks	33,55 - 33,75	33,55 - 33,75	33.70 - 33.90	Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan stabilitas kebutuhan pokok	Mendorong daya saing dan diversifikasi produk perdagangan-jasa (skala domestik dan global)
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	Indeks	11,15 - 11,35	11,21 - 11,37	11.33 - 11.50		Meningkatkan daya saing sektor ritel serta memperkuat sinergitas ritel tradisional dan modern
			Kontribusi sektor pertanian. kehutanan. dan perikanan terhadap PDRB (%)	Indeks	6,07 - 6,30	6,10 - 6,30	6.21 - 6.30		Pengembangan dan optimalisasi rantai yang menjembatani UKM dengan pasar

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	Indeks	1,76	1,83	2,15		Menjamin ketersediaan barang dan kebutuhan pokok daerah
								Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan	Peningkatan kapasitas petani, peternak, dan pelaku usaha sektor pertanian
	1.2	Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro-kecil, Menengah, koperasi dan BUMD	Kewirausahaan Daerah (Rasio)	Indeks	2,69	2,75	2,93		Mendorong produktivitas hasil pertanian dan peternakan
	1.3	Mengendalikan Harga Bahan Pokok	Indeks Perkembangan Harga (Indeks)	Indeks	5,11	5,14	5,28		Peningkatan kualitas dan daya saing produk (industri mikro/agribisnis) pertanian dan peternakan
								Peningkatan produktivitas dan nilai tambah	Pengembangan kapasitas kelembagaan perikanan dan

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
								sektor perikanan	bina kelompok nelayan
									Pengembangan sarana-prasarana dan teknologi yang mendukung sektor perikanan
									Peningkatan kualitas dan daya saing produk (industri mikro) hasil perikanan
								Optimalisasi pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan tata kelola kawasan strategis pariwisata serta pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan wisata
									Pembangunan dan pengembangan industri pariwisata berbasis MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions)

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
									Optimalisasi pengelolaan pelestarian cagar budaya dan objek budaya tak benda
									Peningkatan kunjungan wisata melalui peningkatan daya tarik objek dan produk ekonomi kreatif
								Peningkatan kerjasama antar daerah untuk pengembangan	Sinkronisasi regulasi dan kewenangan lintas hirarki vertikal (nasional - daerah) dan horizontal (daerah, K/L)
								infrastruktur skala regional dan nasional	Optimalisasi tata kelola kelembagaan pengelolaan kawasan aglomerasi

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
								Peningkatan realisasi investasi dan kemudahan iklim investasi	Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam penanaman modal dan investasi melalui penyederhanaan perizinan dan insentif terhadap investor
									Optimalisasi pengelolaan penanaman modal daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
								Meningkatnya daya saing mikro-kecil menengah, koperasi, dan BUMD	Peningkatan kapasitas usaha / skalabilitas UMKM, koperasi, BUMD dengan menjembatani pelaku usaha dan pasar domestik/internasional serta akses terhadap permodalan usaha dan digitalisasi

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
									Pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih untuk menggerakkan ekonomi desa
									Pengembangan kapasitas pembinaan dan inovasi koperasi, UMKM, dan BUMD
								Mendorong terciptanya wirausaha muda dan daya saing usaha kewirausahaan	Peningkatan kapasitas usaha / skalabilitas wirausaha
								Mendorong pengelolaan distribusi rantai pasok dan stabilitas harga bahan	Pengembangan infrastruktur distribusi dan tata kelola yang terintegrasi antara produksi (suplier) dengan distributor serta pasar

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
								pokok	Digitalisasi pemantauan harga dan stok pangan
	2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	6,05	5,74	4,59	Penguatan Ekonomi Desa dan pengelolaan aset desa	Pengembangan Sektor Unggulan Desa serta pengembangan UMKM Desa dan BUMDES
	2.1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa (Indeks)	Indeks	0,7830	0,7850	0,8190		Pengembangan infrastuktur dasar serta pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi desa mandiri
	2.2	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Persen	68,08	68,69	71,19		Pengembangan kegiatan konservasi lingkungan melalui pemberdayaan
								lokal (desa) yang Berkelanjutan	kelompok di desa (pokdarwis, PKK, karang taruna Bank Sampah, BUMDes,dll)

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
	2.3	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial IKESOS (indeks)	Persen	1,69	1,87	2,59	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Optimalisasi sistem jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan Optimalisasi implementasi kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan	Pengembangan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja dan pendidikan vokasi Peningkatan kesempatan kerja dengan menjembatani supply-demand tenaga kerja Peningkatan cakupan layanan jamsostek Menekan kasus perselisihan hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja Pengembangan upaya perlindungan sosial dan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
	Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)								
								penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Mensinergikan pemberdayaan masyarakat utamanya kaum rentan (PPKS, disabilitas, anak terlantar, dll)
								Penguatan Ekonomi dan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui
								kesejahteraan Keluarga	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
									Pengembangan keterampilan untuk perempuan, terutama dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
	MISI 3 : Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas								
1.3	1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	Persen	77,70	78,90	82,63	Meningkatkan kualitas dan	Pemerataan distribusi tenaga kesehatan

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
	1.1	Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal	Indeks Keluarga Sehat (IKS) (indeks)	Indeks	0,79	0,8	0,83	kuantitas SDM kesehatan	Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
			Prevalensi Stunting		21,4	20,08	15,50	Mendorong pemerataan fasilitas kesehatan yang sesuai standar	Mendorong integrasi antar layanan kesehatan
									Meningkatkan pemerataan alat kesehatan dan ketersediaan obat di seluruh fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan
									Mendorong peningkatan jumlah dan cakupan fasilitas kesehatan sebanding dengan jumlah peningkatan penduduk
								Meningkatkan akses menuju fasilitas layanan kesehatan	
								Optimalisasi pemberian asupan gizi bagi ibu hamil	Mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan gizi

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
								Mengoptimalkan pengawasan dan penanganan terhadap kasus stunting	Meningkatkan integrasi sistem monitoring stunting
	1.2	Meningkatnya kesehatan individu, Keluarga, dan masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Persen	98	98	100,00	Mendorong jaminan kesehatan masyarakat yang merata di seluruh lapisan	Mendorong peningkatan illiterasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64,87	66,16	70,15		Meningkatkan kemudahan/aksesibilitas masyarakat menuju layanan kesehatan
									Mengoptimalkan kualitas pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
								Meningkatkan pemerataan lingkungan yang sehat dan terbebas dari penyakit	Mendorong peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai lingkungan sehat dan PHBS
MISI 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas									
1.4	1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan (indeks)	Indeks	0,68	0,69	0,72	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan
			Indeks Harmoni (indeks)	Indeks	7,09	7,12	7,24	Mengoptimalkan akses peserta didik	Integrasi pendidikan inklusif dalam kurikulum
	1.1	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Rata Rata Lama Sekolah	Persen	9,63/9,16	9,88/9,26	10,66/9,66	penyandang disabilitas terhadap pendidikan	
			Harapan lama sekolah (tahun)	Persen	13,43/12,89	13,63/12,90	14,24/12,94		Mendorong pemerataan sarana prasarana yang

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
									menunjang pendidikan inklusif
								Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kuantitas jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kompetensi
									Mengoptimalkan kualitas SDM kependidikan
									Mendorong pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
								Optimalisasi pembentukan karakter peserta didik melalui penghayatan	Optimalisasi metode pembelajaran yang efektif

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
								nilai budaya dan kerukunan umat beragama	Mengintegrasikan nilai-nilai toleransi beragama melalui pendekatan kurikulum muatan lokal pendidikan
	1.2	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (lindeks)	Indeks	5,11	5,14	5,28	Peningkatan daya saing olahraga	Mengoptimalkan upaya pembinaan terhadap atlet yang berkualitas
	1.3	Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	52	52,73	56,2 – 58,1		
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	Indeks	74,1	74,2	74,42		Meningkatkan fasilitasi pemerintah dalam pembangunan sarana prasarana kesenian
			Indeks Karakter Masyarakat	Indeks	69,00	73,50	91,50		

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
	Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)								
	MISI 5 : Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur								
1.5	1	Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu. Berkualitas. dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (indeks)	Indeks	78	80	88	Pengembangan sarana prasarana dan utilitas permukiman yang terpadu	Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni
	1.1	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas	Indeks Infrastruktur Dasar (indeks)	Indeks	40	50	90		Pengembangan sarana-prasarana permukiman yang memadai
									Pengembangan skema pembiayaan kreatif untuk pembangunan dan pengadaan infrastruktur dasar dan penunjang
									permukiman (e.g. skema KPBU)
								Optimalisasi manajemen pengelolaan	Optimalnya tata kelola dan kelembagaan perhubungan

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
								kegiatan perhubungan yang meliputi pergerakan orang dan logistik yang terpadu dan ramah lingkungan	Pemenuhan serta pengembangan sarana-prasarana jalan dan pengawasan ketertiban lalu lintas
									Pengembangan sistem dan moda transportasi umum yang terintegrasinya (e.g. MRT, BRT, dan lain sebagainya)
								Optimalisasi pengelolaan infrastruktur persampahan, limbah, serta peningkatan kualitas udara	Pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah (e.g. insinerator) yang sirkular dan bersertifikasi
									Pengembangan skema pembiayaan kreatif untuk pembangunan dan pengadaan infrastruktur persampahan dan limbah (e.g. skema KPBU)

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
								Optimalisasi sistem data dan informasi spasial sektoral yang menyeluruh untuk mendukung penataan ruang,	Pengembangan kapasitas SDM dalam pendataan dan pengolahan sistem informasi spasial
MISI 6 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan									
1.6	1	Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persen	8,9	12,01	24,42	Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih dalam mendukung ketahanan air daerah	Optimalisasi tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan air baku dan air bersih
			Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	Indeks	78,16	79,01	82,49		Pengembangan sarana dan prasarana dalam pengelolaan air baku dan air bersih
	1.1	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,57	61,74	62,26	Mendorong pengembangan EBT untuk	Optimalisasi tata kelola dan manajemen dalam pengadaan dan pengembangan EBT

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
		Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan	Indeks Resiko Bencana (Indeks)	Indeks	125	124	120	ketahanan energi yang ramah lingkungan	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung elektrifikasi berbasis EBT
								Optimalisasi pengelolaan pangan daerah untuk menjamin ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketersediaan cadangan pangan daerah dan cadangan pangan masyarakat yang berkualitas
									Pemerataan cadangan pangan dan infrastruktur pendukungnya
	1.2	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	Persen	65,59	71,47	90,41	Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian	Pengembangan sistem terintegrasi dalam manajemen perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Persen	2,20	2,06	1,56	terhadap kerusakan lingkungan hidup,	Pemetaan kawasan konservasi, kawasan lindung, kawasan penyangga di tingkat detail (di tingkat persil lahan) dan sinkronisasi dengan aturan penataan ruang
								Pengembangan infrastruktur yang bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup	Mendorong inovasi dalam pengembangan infrastruktur berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup
									Penegakan regulasi untuk mendorong pengadaan dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
	Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)								
								Peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap risiko bencana	Optimalisasi tata kelola manajemen penanggulangan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana
									Pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana yang terpadu
								Peningkatan kapasitas adaptasi	Optimalisasi pelayanan pencegahan dan
								dan mitigasi masyarakat terhadap bencana	kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana

Tabel 4.4
Interkoneksi Prioritas Daerah Provinsi Banten dengan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2026	Program
1	2	3	4	5	6	7
PN. 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegrasi, Adaptif dan Tangguh	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	81,56	
PN. 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mendorong Kamajuan ekonomi secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan dan Potensial	Mewujudkan Perekonomian yang Kuat. Produktif. dan Berdaya Saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indeks	5,24	
			Tingkat Inflasi (%)	Persen	2,00	
PN. 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegrasi, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif dan Tidak Diskriminatif	Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas	Usia Harapan Hidup (tahun)	Persen	78,90	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2026	Program
Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi						
PN. 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas	Indeks Pendidikan (indeks)	Indeks	0,69	
			Indeks Harmoni (indeks)	Indeks	7,12	
PN. 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	80	
PN. 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persen	12,01	
			Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	Indeks	78,16	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2026	Program
PN. 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegrasi, Adaptif dan Tangguh	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	81,56	
PN. 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegrasi, Adaptif dan Tangguh	Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas	Usia Harapan Hidup (tahun)	Persen	78,90	
		Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas	Indeks Pendidikan (indeks)	Indeks	0,69	

4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan di semua wilayah. Untuk itu, implemementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan wadah agar terwujudnya keselarasan antara pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional Tahun 2026, Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif maka pembangunan diarahkan kepada:

1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah
2. Peningkatan Lapangan Kerja dan Pengangguran
3. Penanganan Stunting
4. Peningkatan Daya Saing Daerah

Program Strategis Pemerintah :

1. Swasembada Pangan
2. Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
3. Pembangunan 3 Juta Rumah bagi MBR
4. Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih
5. Sekolah Rakyat

Sasaran dan prioritas penyusunan RKP Tahun 2026 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z dan penyandang disabilitas)
5. Mengembangkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan anarko, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang

kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

Tabel 4.5
17 program terbaik Cepat dan 8 program Hasil terbaik cepat

No.	17 PROGRAM TERBAIK CEPAT	No.	8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1.	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1.	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2.	Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2.	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.
3.	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3.	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4.	Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4.	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5.	Pemberantasan kemiskinan.	5.	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6.	Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	6.	Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7.	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	7.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8.	Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	8.	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.
9.	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.		

No.	17 PROGRAM TERBAIK CEPAT	No.	8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
10.	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.		
11.	Menjamin pelestarian lingkungan hidup.		
12.	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.		
13.	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.		
14.	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya.		
15.	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.		
16.	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.		
17.	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.		

4.3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten

Prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2026 merupakan agenda pembangunan pemerintah Provinsi Banten tahunan yang menjadi tonggak capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 melalui rencana program pembangunan tahunan Provinsi Banten. Prioritas pembangunan Banten dirumuskan dari isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan Banten, yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMD tahun berjalan dan berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP), serta memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah dan pembangunan dalam RTRW Banten dan peraturan perundang-undangan terbaru. Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2026 adalah : “Implementasi pembangunan kolaboratif yang

Inklusif Sebagai Perwujudan Banten yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing” maka Pemerintah Banten menetapkan 5 (lima) Prioritas dan Usulan Prioritas Pembangunan Banten Tahun 2026 sebagai berikut :



Gambar 4.4
Prioritas Pembangunan Banten Tahun 2026

Gambar 4.5
Usulan Prioritas Kewenangan Provinsi

USULAN PRIORITAS KEWENANGAN PROVINSI

KAB/KOTA	USULAN	OUTPUT	VOLUME/SATUAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
KAB. PANDEGLANG	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Desa Teluk Kab. Pandeglang	Breachwater Brorjeng Tamboat Kapal	1 paket	Kec. Labuan	45.000.000.000,00
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban bencana Gempa	Pembangunan rumah rusak berat dan rusak sedang	- 70 Unit rumah rusak berat - 120 Unit rusak sedang	Kec. Tersebar di wilayah sekitar Kec. Sumur, Kab. Pandeglang	12.000.000.000
	Kajian sistem jaringan jalan baru exit Tol Cikur-luran Nasional AMD	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	Perbatasan Pandeglang-Labak	1.000.000.000
KAB. LEBAK	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Perbaikan pada beberapa komponen atau optimalisasi IPLT Regional/Dungung	1 Unit	Desa Sindangmulye, Kecamatan Maja	5.000.000.000
	Rehabilitasi Jalan	Penataan pedestrian, pemasangan median jalan, dan rehabilitasi jalan jenis konstruksi hotmix disertai pemasangan marka jalan	0,7 km	Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung)	1.900.000.000
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan jalan dan drainase lingkungan, optimalisasi TPS3R, dan penataan RTH	14,89 Ha	Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung	4.420.511.145
	Pembangunan TPA/TPST/SPA (Pembebasan lahan TPST Regional/Dungung)	Pembebasan lahan TPST Regional/Dungung	15 – 30 Ha	Desa Sindangmulye, Kec. Maja	30.000.000.000
KAB. SERANG	Penanganan Kawasan Kumuh di Desa Pontang Legon		14,35	Desa Pontang Legon, Kecamatan Tirtayasa	9.342.500.000
KAB. TANGERANG	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Negeri 30	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 30	16 RKB untuk 16 ROMBEL (@400.000.000)	Jl. Kp. Pabuaran Desa, Perahu, Kec. Sukamulya, Kabupaten Tangerang	6.400.000.000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Negeri 14	4 RKB untuk 14 ROMBEL (@400.000.000)	Cukang Galih, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang	1.600.000.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit Sekolah Baru SMA/SMK Negeri	1 UNIT	Desa Badak Anom, Kec. Sindang Jaya	10.000.000.000

KAB/KOTA	USULAN	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
KOTA SERANG	Pembangunan Jalan	Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase): - Pembangunan Saluran Induk Tengah Drainase Jalan Ruas (Ahmad Yani-Veteran) - Mayor Syafei ruas Serang-Cilegon (depan SPBU Kepandaian) - Drainase jalan raya Banten (Iopang-calung-bantenlama)	3 Lokasi (Drainase Ruas Jalan)	Kota Serang	62.000.000.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah PIU Terbangun	492 titik pada 8 ruas jalan	Kota Serang	98.400.000.000
	Pembangunan PIU				
KOTA CILEGON	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Penataan Daerah Irigasi Cibanten (Ruas DKT – Taman Sani) 2. Penataan Pedestrian Daerah Irigasi Cibanten 3. Normalisasi Sungai Ciwaka 4. Normalisasi Sungai Cigeplak	4 Lokus	Kota Serang	57.408.633.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				
	Pelatihan dan Sertifikasi Angkatan Kerja	Pelatihan dan Sertifikasi	100 Orang	BLK Provinsi Banten	1.200.000.000
	Pembangunan simpang tak sebidang dan Penataan jalan	Penataan jalan	800 Meter	Jl. Sudirman dengan perlintasan rel Kereta Api	313.600.000.000
KOTA TANGERANG	Peningkatan Kapasitas jalan	Pelebaran Jalan untuk akses Asrama Haji	300 Meter	Jalan Hasyim Ashari (depan Situ Cipondoh (Perumahan Lake View) dan Asrama Haji)	10.000.000.000
	Pembangunan Sekolah Berkebutuhan Khusus	USB SKH	1 Unit	Gd. SMK 2 Jl. Veteran Sukasari Kota Tangerang	15.000.000.000
	Pembangunan simpang tak sebidang dan Penataan jalan	Penataan jalan	800 Meter	Jl. Sudirman dengan perlintasan rel Kereta Api	313.600.000.000
KOTA TANGERANG SELATAN	Peningkatan Kapasitas jalan	Pelebaran Jalan untuk akses Asrama Haji	300 Meter	Jalan Hasyim Ashari (depan Situ Cipondoh (Perumahan Lake View) dan Asrama Haji)	10.000.000.000
	Pembangunan Sekolah Berkebutuhan Khusus	USB SKH	1 Unit	Gd. SMK 2 Jl. Veteran Sukasari Kota Tangerang	15.000.000.000
	Pembangunan Fly Over	Pembangunan Fly Over Pasar Serpong	1 Paket	Pasar Serpong	170.000.000.000
KOTA TANGERANG SELATAN	Pembangunan Fly Over	Pembangunan Fly Over Pasar Jombang	1 Paket	Pasar Jombang	170.000.000.000
	Pembangunan Fly Over	Lanjutan pelebaran Jalan Raya Siliwangi segmen parakan - muncul	1 Paket	Pelebaran simpang Muncul Jl. Pusptek Raya Siliwangi padjajaran Otista	50.000.000.000

Tabel 4.6
Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Tangerang

NO	KABUPATEN TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
1	Kawasan Pertumbuhan	Pembangunan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Sumber Daya Air, dan Hunian Layak	Pembangunan konektivitas kawasan produktif ekonomi
a	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang- Tangerang		Dukungan Pembangunan Transportasi Massal Aglomerasi DKJ (MRT East-West dan Transjakarta), Transportasi Massal Perkotaan, dan TOD
b	Kawasan Perkotaan Tangerang Raya (Bagian dari Aglomerasi DKJ)		Dukungan Pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja dan Tol Kamal- Teluk Naga-Rajeg
2	Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi		Dukungan Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di Kawasan Aglomerasi Jakarta (termasuk Tangerang Raya, Bekasi Raya, Depok, dan Bogor Raya) termasuk penerapan SIH3 dan FEWS
			Dukungan Pembangunan SPAM Regional dengan pemanfaatan air Beku Bendungan Karian dan Rencana Bendung Lepas Pantai Muara Sungai Cisadane
			Dukungan Optimalisasi Wilayah Sungai Cisadane dalam mendukung pemenuhan kebutuhan konservasi, air minum dan air pertanian
			Dukungan Reformasi pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
			Pembangunan PJU, sarana dan prasarana perhubungan
			Dukungan rintisan kereta api Tangerang-Serang
			Pembangunan PSU Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi
			Pembangunan Kebinamargaan
			Dukungan Pembangunan Perlindungan Abrasi Pantura Tangerang
			Pembangunan Dermaga

NO	KABUPATEN TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
			Penyebarangan Pelabuhan Cituis
		Akses Kesehatan bagi Warga dan Pelayanan Sosial Tanpa Diskriminasi	Dukungan Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita
			Dukungan Pencapaian UHC
			Dukungan Pembangunan Sekolah Rakyat
			Dukungan Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
		Sekolah Gratis Untuk SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Provinsi Banten	Dukungan Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah
			Pelaksanaan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Menengah dan Khusus
			Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA, SMK dan Pendidikan khusus (untuk Anak Berkebutuhan Khusus) dengan memperhatikan ketersediaan lahan
			Dukungan Pembangunan SDM Pedesaan Kabupaten Tangerang
		Zona Ekonomi Baru, Penguatan UMKM, Dan Pemerataan Ekonomi	Dukungan Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas
			Dukungan Optimalisasi Koperasi Merah Putih
		Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dukungan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital
			Dukungan Pengembangan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten (KEK BSD).
			Dukungan Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Banten
		Ketahanan Pangan	Dukungan Optimalisasi

NO	KABUPATEN TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		Yang Berkelanjutan	Kawasan Agriculture Kabupaten Tangerang
			Peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan Cituis menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai
		Investasi, Kemudahan Industri Dan Penyerapan Tenaga Kerja	Dukungan pembangunan industri pariwisata berbasis MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions)
		Tata Kelola Pemerintahan tidak korupsi dan Sistem Merit Dalam Birokras	Pembentukan Unit Layanan Berpredikat Zona Integritas
			Sinergi Peningkatan Pendapatan Daerah

4.3.2Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tangerang

Sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yaitu “Penguatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Melalui Kolaborasi Antar Sektor Untuk Menciptakan Pondasi Ketahanan Pangan”, maka untuk melihat sinkronisasi antara isu strategis dan penentuan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Sinkronisasi Permasalahan, Isu Strategis dengan
Prioritas Pembangunan Daerah

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS
Belum optimalnya pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan belum Efektif dan Efisien	Peningkatan tan kualitas Tata Kelola Pemerintaha yang Efektif dan Efisien
Lemahnya Daya Saing Perekonomian Daerah serta Belum Optimalnya Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Perekonomian belum Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing	Peningkatan produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM
Belum optimalnya layanan dan akses terhadap Kesehatan yang terpadu	Kesehatan belum berkualitas	Peningkatan kualitas sarana Prasarana serta mutu kesehatan
Belum optimalnya layanan dan akses terhadap Pendidikan yang terpadu	Pendidikan belum berkualitas	Peningkatan Sarana dan Prasaranan Mutu Pendidikan
Belum optimalnya kaetersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah	Belum optimalnya pemerataan dan keterpaduan Pembangunan infrastruktur wilayah	Peningkatan pemerataan dan keterpaduan Pembangunan infrastruktur wilayah
Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan hidup dan manajemen kebencanaan	Belum optimalnya perlindungan Dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Penetapan Prioritas Pembangunan RKPD 2026 tentunya tidak terlepas dari arah kebijakan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, dimana dokumen RKPD memiliki prioritas pembangunan yang masih dalam kerangka perencanaan lima tahunan. Keterkaitan antara kebijakan RPJMD dengan prioritas yang ditetapkan didalam RKPD Tahun 2026 Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Keterkaitan kebijakan RPJMD dengan prioritas RKPD

No	Visi dan Misi	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Daerah
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)				
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar	Optimalisasi sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
			Optimalisasi waktu penyelesaian pelayanan publik	
			Meningkatkan layanan penanganan dan pengaduan	
			Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	
		Optimalisasi digitalisasi kearsipan	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi srikandi di level OPD	
		Optimalisasi operasional persandian dan pengamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE	Mendorong peningkatan kesadaran keamanan informasi dan kepatuhan prosedur bagi seluruh pegawai lingkup Kabupaten Tangerang	
		Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika	Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan satu pintu	
		Optimalisasi interoperabilitas data statistik sektoral antar perangkat daerah	Mendorong penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang mengacu kepada Proses Bisnis Statistik	
		Meningkatkan kualitas layanan pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana (KB)	Integrasi sistem data kependudukan secara optimal	
			Meningkatkan sosialisasi terkait KB dan kependudukan untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat	

No	Visi dan Misi	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Daerah
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)				
		Optimalisasi pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan dan anak	
		Optimalisasi pemberdayaan dan pelayanan bagi PPKS	Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan PPKS	
			Mendorong optimalisasi ketersediaan data administrasi terkait layanan PPKS	
		Optimalisasi pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal	
			Optimalisasi penindakan gangguan kamtibmas	
			Optimalisasi penanganan konflik di masyarakat	
		Mendorong tata kelola SDM kepegawaian dan manajemen ASN yang optimal	Optimalisasi pengisian jabatan melalui fleksibilitas mutasi dan rotasi dalam memenuhi kebutuhan ASN	
			Mendorong pengembangan kompetensi ASN	
			Optimalisasi uji kompetensi ASN	
			Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung kepegawaian dan pengembangan SDM	
		Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Optimalisasi pelaksanaan perencanaan kinerja	
			Optimalisasi pelaksanaan pengukuran kinerja	

No	Visi dan Misi	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Daerah
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)				
			Optimalisasi pelaksanaan evaluasi kinerja	
			Optimalisasi konsistensi penjabaran dokumen perencanaan	
		Optimalisasi fungsi penelitian dan pengembangan	Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan	
		Optimalisasi tata kelola keuangan dan manajemen aset daerah	Optimalisasi pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)	
		Mendorong kemampuan desa dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan (meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa)	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan tingkat desa yang efektif dan akuntabel	
		Mendorong pembangunan karakter bangsa yang berpijak pada prinsip demokrasi, ideologi nasional, dan kesadaran politik	Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	
			Meningkatkan pemahaman politik dalam negeri	
			Optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan (ormas)	
			Menekan kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat	
		Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan program Sekretariat DPRD	Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembahasan Raperda yang difasilitasi	

No	Visi dan Misi	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Daerah
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)				
		Meningkatkan kinerja pengawasan daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan SPIP	
2	Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing industri	Pengembangan fasilitas pendukung perindustrian	Mewujudkan Perekonomian yang Kuat. Produktif. dan Berdaya Saing
			Penegakan regulasi pengembangan perindustrian dan kawasan industri	
		Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan stabilitas kebutuhan pokok	Mendorong daya saing dan diversifikasi produk perdagangan-jasa (skala domestik dan global)	
			Pengembangan dan optimalisasi rantai yang menjembatani UKM dengan pasar	
			Menjamin ketersediaan barang dan kebutuhan pokok daerah	
		Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan	Peningkatan kapasitas petani, peternak, dan pelaku usaha sektor pertanian	
			Mendorong produktivitas hasil pertanian dan peternakan	
			Peningkatan kualitas dan daya saing produk (industri mikro/agribisnis) pertanian dan peternakan	
		Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor perikanan	Pengembangan kapasitas kelembagaan perikanan dan bina kelompok nelayan	
			Pengembangan sarana-prasarana dan teknologi yang mendukung sektor perikanan	

No	Visi dan Misi	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Daerah
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)				
		Optimalisasi pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan kualitas dan daya saing produk (industri mikro) hasil perikanan	
			Pengembangan tata kelola kawasan strategis pariwisata serta pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan wisata	
			Optimalisasi pengelolaan pelestarian cagar budaya dan objek budaya tak benda	
			Peningkatan kunjungan wisata melalui peningkatan daya tarik objek dan produk ekonomi kreatif	
		Peningkatan kerjasama antar daerah untuk pengembangan infrastruktur skala regional dan nasional	Sinkornisasi regulasi dan kewenangan lintas hirarki vertikal (nasional - daerah) dan horizontal (daerah, K/L)	
			Optimalisasi tata kelola kelembagaan pengelolaan kawasan aglomerasi	
		Peningkatan realisasi investasi dan kemudahan iklim investasi	Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam penanaman modal dan investasi melalui penyederhanaan perizinan dan insentif terhadap investor	
			Optimalisasi pengelolaan penanaman modal daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif	

No	Visi dan Misi	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Daerah
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)				
		Meningkatnya daya saing mikro-kecil menengah, koperasi, dan BUMD	Peningkatan kapasitas usaha / skalabilitas UMKM, koperasi, BUMD dengan menjembatani pelaku usaha dan pasar domestik/internasional serta akses terhadap permodalan usaha dan digitalisasi	
			Pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih untuk menggerakkan ekonomi desa	
			Pengembangan kapasitas pembinaan dan inovasi koperasi, UMKM, dan BUMD	
		Mendorong terciptanya wirausaha muda dan daya saing usaha kewirausahaan	Peningkatan kapasitas usaha / skalabilitas wirausaha	
			Pengembangan kapasitas pembinaan dan inovasi kewirausahaan	
		Mendorong pengelolaan distribusi rantai pasok dan stabilitas harga bahan pokok	Pengembangan infrastruktur distribusi dan tata kelola yang terintegrasi antara produksi (suplier) dengan distributor serta pasar	
			Digitalisasi pemantauan harga dan stok pangan	
		Penguatan Ekonomi Desa dan pengelolaan aset desa	Pengembangan Sektor Unggulan Desa serta pengembangan UMKM Desa dan BUMDES	
			Pengembangan infratsruktur dasar serta pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi desa mandiri	

No	Visi dan Misi	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Daerah
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)				
		Pengelolaan Sumber Daya Alam lokal (desa) yang Berkelanjutan	Pengembangan kegiatan konservasi lingkungan melalui pemberdayaan kelompok di desa (pokdarwis, PKK, karang taruna Bank Sampah, BUMDes,dll)	
		Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Pengembangan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja dan pendidikan vokasi	
			Peningkatan kesempatan kerja dengan menjembatani supply-demand tenaga kerja	
		Optimalisasi sistem jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan	Peningkatan cakupan layanan jamsostek	
			Menekan kasus perselisihan hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja	
		Optimalisasi implementasi kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Pengembangan upaya perlindungan sosial dan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan	
			Mensinergikan pemberdayaan masyarakat utamanya kaum rentan (PPKS, disabilitas, anak terlantar, dll)	
		Penguatan Ekonomi dan kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Pengembangan keterampilan untuk perempuan, terutama dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)	
3	Mewujudkan Kesehatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas	Pemerataan distribusi tenaga kesehatan	Mewujudkan Kesehatan

No	Visi dan Misi	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Daerah
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)				
	yang Berkualitas	SDM kesehatan	Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	yang Berkualitas
		Mendorong pemerataan fasilitas kesehatan yang sesuai standar	Mendorong integrasi antar layanan kesehatan	
			Meningkatkan pemerataan alat kesehatan dan ketersediaan obat di seluruh fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan	
		Meningkatkan akses menuju fasilitas layanan kesehatan	Mendorong peningkatan jumlah dan cakupan fasilitas kesehatan sebanding dengan jumlah peningkatan penduduk	
		Optimalisasi pemberian asupan gizi bagi ibu hamil	Mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan gizi	
		Mengoptimalkan pengawasan dan penanganan terhadap kasus <i>stunting</i>	Meningkatkan integrasi sistem <i>monitoring stunting</i>	
		Mendorong jaminan kesehatan masyarakat yang merata di seluruh lapisan	Mendorong peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan	
			Meningkatkan kemudahan/aksesibilitas masyarakat menuju layanan kesehatan	
			Mengoptimalkan kualitas pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat	
		Meningkatkan pemerataan lingkungan yang sehat dan terbebas dari penyakit	Mendorong peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai lingkungan sehat dan PHBS	

No	Visi dan Misi	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Daerah
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)				
4	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas
		Mengoptimalkan akses peserta didik penyandang disabilitas terhadap pendidikan	Integrasi pendidikan inklusif dalam kurikulum	
			Mendorong pemerataan sarana prasarana yang menunjang pendidikan inklusif	
		Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kuantitas jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kompetensi	
			Mengoptimalkan kualitas SDM kependidikan	
			Mendorong pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	
		Optimalisasi pembentukan karakter peserta didik melalui penghayatan nilai budaya dan kerukunan umat beragama	Optimalisasi metode pembelajaran yang efektif	
			Mengintegrasikan nilai-nilai toleransi beragama melalui pendekatan kurikulum muatan lokal pendidikan	
		Peningkatan daya saing olahraga	Mengoptimalkan upaya pembinaan terhadap atlet yang berkualitas	
		Optimalisasi literasi dan numerasi masyarakat	Meningkatkan minat baca masyarakat	
		Meningkatkan pengembangan potensi kebudayaan	Mendorong peningkatan minat masyarakat terhadap kesenian lokal	

No	Visi dan Misi	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Daerah
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)				
			Meningkatkan fasilitasi pemerintah dalam pembangunan sarana prasarana kesenian	
5	Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan sarana prasarana dan utilitas permukiman yang terpadu	Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
			Pengembangan sarana-prasarana permukiman yang memadai	
			Pengembangan skema pembiayaan kreatif untuk pembangunan dan pengadaan infrastruktur dasar dan penunjang permukiman (e.g. skema KPBU)	
		Optimalisasi manajemen pengelolaan kegiatan perhubungan yang meliputi pergerakan orang dan logistik yang terpadu dan ramah lingkungan	Optimalnya tata kelola dan kelembagaan perhubungan	
			Pemenuhan serta pengembangan sarana-prasarana jalan dan pengawasan ketertiban lalu lintas	
			Pengembangan sistem dan moda transportasi umum yang terintegrasinya (e.g. MRT, BRT, dan lain sebagainya)	
		Optimalisasi pengelolaan infrastruktur persampahan, limbah, serta peningkatan kualitas udara	Pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah (e.g. insinerator) yang sirkular dan bersertifikasi	
			Pengembangan skema pembiayaan kreatif untuk pembangunan dan pengadaan infrastruktur persampahan dan limbah (e.g.	

No	Visi dan Misi	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Daerah
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)				
			skema KPBU)	
			Penegakan regulasi dan fungsi pengawasan dalam pengelolaan sampah dan limbah	
		Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur pendukung / utilitas jaringan listrik dan telekomunikasi	Penyediaan infrastruktur pendukung / utilitas jaringan listrik dan telekomunikasi melalui kerjasama dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah provinsi	
		Penegakan regulasi pemanfaatan kawasan bangunan dan fasilitas publik sesuai fungsinya,	Penegakan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang,	
			Penegakan bangunan yang tidak berizin maupun tidak sesuai dengan izin yang diperoleh,	
			Peningkatan luas dan pengelolaan RTH publik	
		Optimalisasi sistem data dan informasi spasial sektoral yang menyeluruh untuk mendukung penataan ruang,	Pengembangan kapasitas SDM dalam pendataan dan pengolahan sistem informasi spasial	
6	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih dalam mendukung ketahanan air daerah	Optimalisasi tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan air baku dan air bersih	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
			Pengembangan sarana dan prasarana dalam pengelolaan air baku dan air bersih	

No	Visi dan Misi	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Daerah
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)				
		Mendorong pengembangan EBT untuk ketahanan energi yang ramah lingkungan	Optimalisasi tata kelola dan manajemen dalam pengadaan dan pengembangan EBT	
			Pengembangan sarana dan prasarana pendukung elektrifikasi berbasis EBT	
		Optimalisasi pengelolaan pangan daerah untuk menjamin ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketersediaan cadangan pangan daerah dan cadangan pangan masyarakat yang berkualitas	
			Pemerataan cadangan pangan dan infrastruktur pendukungnya	
		Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup,	Pengembangan sistem terintegrasi dalam manajemen perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup	
			Pemetaan kawasan konservasi, kawasan lindung, kawasan penyangga di tingkat detail (di tingkat persil lahan) dan sinkronisasi dengan aturan penataan ruang	
		Pengembangan infrastruktur yang bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup	Mendorong inovasi dalam pengembangan infrastruktur berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup	
			Penegakan regulasi untuk mendorong pengadaan dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup	

No	Visi dan Misi	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Daerah
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)				
		Peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap risiko bencana	Optimalisasi tata kelola manajemen penanggulangan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana	
			Pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana yang terpadu	
		Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana	Optimalisasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana	

Keselarasan pembangunan dengan pemerintah provinsi dan pusat menjadi fokus agar adanya perencanaan yang terintegrasi sehingga dapat menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan lebih tepat sasaran. Keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 mengacu kepada sasaran dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Banten dan RKP tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.6
Keselarasan sasaran Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tangerang Tahun 2026



4.3.3 Kebijakan Percepatan Pencapaian Target SPM

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan nasional salah satunya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk Mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh Karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, mudah diukur, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya. Untuk mendukung pencapaian target SPM pada tahun 2026 disusun program prioritas untuk pencapaian SPM sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Kegiatan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
2026 Pendukung Pencapaian SPM

Urusan	OPD	Program	Pagu
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	968.296.277.036
		1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.052.840.000
		1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	700.000.000
		1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	300.000.000
Total Pagu			970.349.117.036
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	561.297.680.109
		1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9.752.199.333
		1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	899.958.896
		1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.064.747.533
Total Pagu			581.014.585.871
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.000.000.000
		2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.000.000.000
		2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	565.000.000
		2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100.000.000
		2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.000.000.000
		2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.300.000.000

Urusan	OPD	Program	Pagu
Total Pagu			4.965.000.000
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.857.250.000
		1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	998.491.100
		1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	9.690.247.000
Total Pagu			32.545.988.100
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	331.187.330.000,00
		1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	15.960.000.000,00
		1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	156.000.000,00
		1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	8.137.000.000,00
Total Pagu			355.440.330.000,00
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	55.132.940.500
		1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	16.537.500.000
Total Pagu			71.670.440.500
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.975.569.850
		1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	44.625.000.000
		1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	131.804.328.300
Total Pagu			178.404.898.150
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Perumahan, Pemukiman	2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	300.000.000.000,00

Urusan	OPD	Program	Pagu
BIDANG PERTANAHAN	dan Pemakaman	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	5.000.000.000,00
Total Pagu			305.000.000.000,00
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.836.999.000
		1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	10.000.000
		1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.740.000.000
		1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	52.947.000.000
		1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	615.528.000
		1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	317.636.400
Total Pagu			60.467.163.400

4.3.4 Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Pembangunan wilayah merupakan suatu proses perbaikan yang berkesinambungan yang memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada didalamnya. Fungsi dari pengembangan wilayah adalah untuk membina dan mengefektifkan keterhubungan dan ketergantungan antar wilayah yang berspesialisasi secara fungsional dan berorientasi pada pasar secara nasional. Menurut para ahli ekonomi dan perencanaan regional terdapat dua hal terpenting dalam pembangunan, yaitu menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Tidak adanya pemerataan dalam proses pembangunan akan mengakibatkan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah. Ketimpangan antar daerah dapat menimbulkan kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah, dan disparitas ekonomi yang semakin tajam. Regional Income Disparities atau ketimpangan wilayah adalah Ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan antar daerah didalam wilayah suatu Negara.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Banten dan terdiri atas 29 kecamatan serta 246 desa dan 28 kelurahan yang memiliki karakteristik topografi serta potensi sumber daya alam yang berbeda. Perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya ketimpangan dari sisi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang menyeluruh dari hulu hingga ke hilir. Konsep THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) menjadi salah satu solusi untuk menjawab persoalan tersebut. Implementasi konsep THIS tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui penyusunan dokumen perencanaan (RKPD) Tahun 2026. Penerapan

konsep THIS dalam dokumen perencanaan telah ditunjukkan oleh Tabel ... Tabel tersebut juga merupakan janji politik dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025-2029. Selain itu, pelaksanaan kegiatan telah diatur secara sistematis dan holistik dari hulu hingga ke hilir. Secara Integratif dapat dilihat dari dukungan sumber pendanaan oleh berbagai stakeholder terkait yang digunakan untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan/sub kegiatan pada Tahun 2026. Sedangkan secara spasial, dapat dilihat dari kesamaan lokasi pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh berbagai program/kegiatan dari beberapa stakeholder terkait.

Tabel 4.10
Program Unggulan Kabupaten Tangerang Tahun 2026

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
	xx	xx	xx	xx	xx	xx
1	PEMERINTAHAN INOVATIF, MAJU DAN SMART (PRIMA)					
1		Digitalisasi Sistem Pelayan kependudukan di kecamatan				29 Kecamatan
	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	7.01.01.2.06.0002	sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		- Pengadaan Sarana Prasarana Pencetakan (sesuai dengan Standar Dukcapil)	Kecamatan	23	6.900.000.000	Kecamatan
	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK,				
	7.01.2.2.02	Keg : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
	7.01.02.2.02.0003	Sub Keg :Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		- Rehab Ruang Pelayanan	Kecamatan	6	1.200.000.000	Kecamatan
2		Penyelenggaraan Command Center Data Terpadu				
	07:01:02	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
	7.01.2.2.02	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	7.01.02.2.02.0003	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				
		- Penyiapan Rancang Bangun Command Centre	Unit			Diskominfo

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	xx	xx	xx	xx	xx	xx
		- Penyiapan ruang command centre dan design interior	Unit	1	1.000.000.000	Diskominfo
		- Penyediaan Sarana Prasarana Command Centre	Unit			Diskominfo
3		Penyediaan <i>Mobil Training Unit</i> (MTU)				
	02:07:03	Program : pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja				
	02.07.03.2.01	Kegiatan : Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi				
	02.07.03.2.01.0001	Sub kegiatan : Pengadaan Sarana pelatihan Kerja Kabupaten/Kota				
		-MTU Tata Busana dan Otomotif	unit			Disnaker
		-MTU Las dan Referifrasi (AC)	unit	2	4.418.585.000	Disnaker
		-MTU Design Grafis, Barista dan Basic Office	unit			Disnaker
		-MTU Tata Boga, Tata Rias dan Tata Busana	unit			Disnaker
		-MTU Bahasa, Teknik Listrik dan Multimedia	unit			Disnaker
4		Pembangunan Gedung diorama				DTRB, Disperpusip
	01:03:09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				
		- Review DED	Ded			Disperpusip
	01:03:09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				
		- Pembangunan Gedung diorama	Unit	1	25.000.000.000	DTRB
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
	2.24.03.2.05	Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang				
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)				
		- Digital Konten Gedung Diorama	Unit			Disperpusip
5		Pembangunan Pusat Inovasi Pemuda				Disporabudpar
	02:19:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
	2.19.02.2.01.00016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan sarana Kepemudaan tingkat Kabupaten / Kota				
		- DED				Disporabudpar
	01:03:09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	xx	xx	xx	xx	xx	xx
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				
		- Renovasi Gedung Graha Pemuda (Eksterior, Interior)	Unit			DTRB
		Pengadaan Sarana Prasarana	Unit			
	02:19:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
	2.19.02.2.01.00016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan sarana Kepemudaan tingkat Kabupaten / Kota				
		- Pembangunan Inovator Hub (Ruang/tempat berkumpulnya komunitas wira usaha baru yang dibangun oleh para pemuda)			2.000.000.000	Disporabudpar
		a. Ruang Diskusi dan rapat				
		b. Ruang pelatihan				
		c. Ruang Laboratorium				
		d. Ruang Auditorium				
		e. Ruang Teknologi Informasi				
2	PROGRAM SOSIAL PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAERAH (PROSPEK)					
1		Pembentukan dan Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan dan Pusat Pengembangan UMKM dan IKM:				DINKOP

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		a. Pembangunan kawasan ekonomi kreatif di setiap kecamatan	Kecamatan	6	3.000.000.000	Kecamatan
		b. Pembangunan Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM				
	02:17:18	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
	02.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
	02.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				
		- penambahan Sarana dan Prasarana		1	300.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha kecil Memengah
		- Inkubasi usaha Mikro pada Pelaku UMKM		50	1.000.000.000	
		- Pengembangan Produk Unggulan Daerah di 10 Kecamatan		10	750.000.000	
2		Pembangunan Desa Mandiri Pangan pada 25 desa pertahun				
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM				

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	xx	xx	xx	xx	xx	xx
		RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN				
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				
		- Desa Mandiri Pangan Pertanian		5	1.000.000.000	DPKP
		- Desa Mandiri Pangan Perkebunan		5	1.000.000.000	DPKP
		- Desa Mandiri Pangan Perternakan		5	1.000.000.000	DPKP
		<i>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</i>				
		<i>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>				
		<i>Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>				
		- Desa Mandiri Pangan Perikanan		5	5.000.000.000	Dinas Perikanan
		a. Pelatihan budidaya Perikanan Kepada Masyarakat				
		b. bantuan Sarana Pendukung (Cold Storage)				
		c. Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan				
		d. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pemasaran Produk Perikanan				
		e. Pembentukan Kelembagaan Pembudidaya Perikanan				
		f. Pengadaan Mobile Training Unit Untuk Budidaya Perikanan				

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	xx	xx	xx	xx	xx	xx
		- Revitalisasi TPI (Rehab Bangunan, Pembangunan Sumur Bor, Pembangunan Depot Es, Sarpras pendukung Lainnya)		1	1.000.000.000	
		a. Kronjo				
		b. Cituis				
		c. Tanjung Pasir				
		- Pembangunan Balai Benih Skala Kabupaten (TPI Banyawakan) Kec. Kemeri				
		a. MasterPlan dan DED				
		b. Pembangunan Fisik (Gedung Kantor, Laboratorium, Gudang Pemagaran, Kolam Benih, Kolam Induk, Mess Diklat, Sasrana Air Bersih, Akses Jalan, Parkir, Aula Pelatihan)		1	2.000.000.000	
		- Pembangunan Wana Mina (Silvo Fisheries) Skala Kabupaten Di Desa Karang Anyar-Kemiri)				
		a. MasterPlan dan DED				
		b. Pembangunan Fisik (Gedung Kantor, Laboratorium, Gudang Pemagaran, Kolam Benih, Kolam Induk, Mess Diklat, Sasrana Air Bersih, Akses Jalan, Parkir, Aula Pelatihan)		1	2.000.000.000	
3		Penanganan Kolaborasi pengentasan kemiskinan di 50 desa				Bappeda, Dinsos, Kecamatan
	01:06:02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
	1.06.02.02.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosia				
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota				

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	xx	xx	xx	xx	xx	xx
		- Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi (Pembentukan UWEP Usaha Ekonomi Produktif)	Desa	10	2.600.000.000	Dinas Sosial
	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK,				
	7.01.2.2.02	Keg : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
	7.01.02.2.02.0003	Sub Keg :Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		- Pembangunan Rumah Layak huni Bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Unit	10	1.750.000.000	Kecamatan
		PROGRAM ...				
		KEG..				
		SUBKEG...				
		- Pengembangan Budidaya Ikan Payau	Unit	10	2.000.000.000	Dinas Perikanan
	03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	3.27.02.2.01	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN				
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				
		- Budidaya Pertanian Skala Rumah Tangga		10	2.000.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	02:09:04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	2.09.04.2.02	<i>PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</i>				
	2.09.04.2.02.0004	<i>Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</i>				
		- Penyediaan pangan dan nutrisi untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)		10	2.000.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4		Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan				Kecamatan
	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		- Bazar Murah Di 29 Kecamatan 4 Kali setiap TW	Kecamatan	29	11.600.000.000	Kecamatan
5		Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Tekno Park)				
		DED Tekno Park	Ded			Bappeda
	01:03:09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	xx	xx	xx	xx	xx	xx
		Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Tekno Park)	Unit	1	5.000.000.000	DTRB
		Pengembangan sarana prasarana	Paket			DTRB
3	TALENTA UNGGUL GENERASI SEHAT (TUNAS)					
	01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	1.02.02.2.02.00015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
1		Pencegahan dan penanganan Balita Stunting/gizi buruk serta penanganan ibu hamil KEK/Anemia dengan pemberian makanan tambahan ;	Desa			Dinkes, DPPKB, Kecamatan
		- Penanganan 32.650 ribu balita stunting/gizi buruk melalui PMT	Balita	6.620	3.923.137.200	Dinkes dan BLUD
		- Penanganan 6150 Ibu hamil KEK melalui PMT Lokal	Ibu Hami	950	2.938.437.720	Dinkes dan BLUD
		- Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Krs	2.500	2.500.000.000	DPPKB
2		Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD, Puskesmas, posyandu dan pustu bagi balita, ibu hamil, remaja dan lansia;				
	01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas				
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas				
	1.02.02.2.01.00014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
	1.02.02.2.01.00020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
	1.02.02.2.02.00022	Pengembangan Rumah Sakit				
		- Penambahan Sasrana Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD pada 4 RSUD:				4 RSUD
		- RSUD Tangerang		1,00	10.000.000.000	- RSUD Tangerang
		- RSUD Balaraja		1,00	30.000.000.000	- RSUD Balaraja
		- RSUD Pakuhaji		1,00	15.000.000.000	- RSUD Pakuhaji
		- RSUD Tigaraksa		1,00	51.000.000.000	- RSUD Tigaraksa
		- Penambahan Sasrana Prasarana untuk Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada Puskesmas, Pustu dan Posyandu (rehabiltasi dan penambahan alkes dan pemeliharaan alkes) :	44 Puskesmas,	8	16.000.000.000	Puskesmas
			43 Pustu	7	10.500.000.000	Dinas Kesehatan

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	xx	xx	xx	xx	xx	xx
		- Relokasi Puskesmas	5	1,00	23.000.000.000	Dinas Kesehatan
		- Penyediaan Mobil Puskesmas Keliling/Ambulance :		5,00	2.619.305.000	Dinas Kesehatan
3		Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih;				DBMSDA
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				
		- Sanitasi	Unit	250	2.500.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
		- Air Bersih	Unit	50	10.000.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
		- Pembangunan IPA Komunal	Unit	2	5.000.000.000	
5		Penyediaan mobil siaga dan sarana Prasarana pendukung bagi desa dan kelurahan				
		PROGRAM ...				
		KEG..				
		SUBKEG...				
		Mobil Siaga Kelurahan	Unit			DINKES dan DPMPD
		Operasional dan Pemeliharaan Mobil Siaga		28	5.600.000.000	
4	SEKOLAH TERPADU RAMAH ANAK (SETARA)					

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
1		Pembangunan Perpustakaan Modern Di Setiap Kecamatan				Disperpusip, Kecamatan
	07:01:01	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		- Pembangunan Gedung Perpustakaan		6	1.200.000.000	Kecamatan
	02:23:02	<i>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</i>				
		<i>Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				
		<i>Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				
		- Penyediaan Sarana dan Prasarana		6	1.200.000.000	Disperpusip
2		Pembangunan Trauma Healing Centre dan Pembangunan sentra Olahraga Kabupaten				DPPPA
		- Trauma Healing Centre				
	01:03:09	<i>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</i>				
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				
		a. DED	Unit			DTRB

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	01:03:09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				
		b. Pembangunan Rumah Trauma Healing	Unit			DTRB
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
	2.08.07.2.02.0008	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan				
		C. Penyediaan Sarpras dan SDM	Orang	1	2.500.000.000	DPPA
		- Sentra Olahraga Kabupaten				
	02:19:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				
		a. Master Plan dan DED				Disporabudpar
	01:03:09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				
		b. Pembangunan Sentra Olahraga Kabupaten		1	25.000.000.000	DTRB
	02:19:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				
		c. Pengembangan Sarana Prasarana				DISPORABUDPAR
3		Pembangunan Sekolah Inklusif dan Boarding School untuk Tingkat SMP dan Asrama Pondok Pesantren (ASPONTREN)				
	04:01:02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		Keg Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
		Sub kegiatan - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				
		- Pembangunan Aspontren beserta sarana pendukung		200	40.000.000.000	Setda

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	xx	xx	xx			xx
		- BOP Aspontren		1	250.000.000	Setda
		<i>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</i>				
		<i>KEG - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>				
		<i>SUBKEG Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>				
		-Sekolah Inlusif				
		a. menyusun regulasi inklusi	Perbup			Dinas Pendidikan
		b. pendataan siswa inklusi	Laporan			Dinas Pendidikan
		c. menyusun master plan penentuan Sekolah Inklusi	Dokumen			Dinas Pendidikan
		d. Modifikasi sarana prasarana sekolah inklusi	Sekolah	5	350.000.000	Dinas Pendidikan
		e. peningkatan kompetensi guru secara bertahap dan berkelanjutan pada Pendidikan formal	Orang			Dinas Pendidikan
		f. peningkatan kompetensi guru secara bertahap dan berkelanjutan baik pada Pendidikan pelatihan	Orang			Dinas Pendidikan
		g. penyediaan layanan konsultasi atas layanan inklusi kepada sekolah dan masyarakat	Orang			Dinas Pendidikan
		h. penyediaan layanan klinis kepada peserta didik penyandang disabilitas pembentukan komunitas belajar Pendidikan inklusif pada masing-masing jenjang	Paket			Dinas Pendidikan
		i. Pembentukan komunitas belajar pendidikan inklusi	Kegiatan			Dinas Pendidikan
		-Boarding School				Dinas Pendidikan
		<i>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</i>				
		<i>KEG Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>				

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	xx	xx	xx	xx	xx	xx
		<i>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</i>				
		a. Penyiapan DED	DED			Dinas Pendidikan
		b. Pembangunan Boarding Scholl	Unit			Dinas Pendidikan
		c. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung	Paket			Dinas Pendidikan
		-Rehabilitasi SD dan SMP				
		<i>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</i>				
		<i>KEG Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama</i>				
		<i>Rehabiltasi</i>				
		a. Penyiapan DED	DED			
		b. Rehabilitasi SD dan SMP	Unit	1	10.000.000.000	
4		Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan				
		<i>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</i>				
		<i>KEG Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>				
		<i>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</i>				
		a. Penyiapan DED	DED			Dinas Pendidikan
		b. Pembangunan Pusat pembelajaran dan Inovasi Pendidikan	Unit	1	20.000.000.000	Dinas Pendidikan
		c. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung	Paket			Dinas Pendidikan
5		Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swasta				
		<i>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</i>				
		<i>KEG Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama</i>				

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	xx	xx	xx	xx	xx	xx
		<i>SUBKEG Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</i>				
		- Beasiswa Sekolah Swasta Gratis			40.000.000.000	Dinas Pendidikan
		a. Tingkat SD dan Sederajat	Siswa			
		b. Tingkat SMP dan Sederajat	Siswa			
		<i>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</i>				
		<i>Keg Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>				
		<i>Sub kegiatan - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				
		- Beasiswa Perguruan Tinggi	Mahasiswa	300	50.000.000.000	Dinas Sosial
		- BOP Beasiswa		1	1.500.000.000	
5	SISTEM LINGKUNGAN YANG AMAN, RAMAH DAN BERKESINAMBUNGAN (SELARAS)					
1		Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional				DPPP
		<i>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</i>				
		<i>KEG Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>				
		<i>SUBKEG Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</i>				
		a. Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi MBR	Rumah	1000	35.000.000.000	DPPP
	01:03:09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				
		b. Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala nasional				
		- Penyiapan DED	DED			DTRB
		- Pembangunan Pusat Riset Mangrove	Unit	1	2.000.000.000	DTRB
		- Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung	Paket			
2		Pengelolaan dan Pengolahan Sampah secara terpadu dari hulu ke hilir :				
	02:19:03	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah				
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				
		Optimalisasi TPS3R Baru 5 Unit Tahunan	Unit	5	5.000.000.000	DLHK
	02:19:03	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan,				

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	xx	xx	xx	xx	xx	xx
		biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				
		Pembentukan Bank Sampah	Unit	30	500.000.000	DLHK
	02:19:03	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				
		Revitalisasi TPA Jatiwaringin	unit			
		1. Pembangunan Akses Jalan		1	12.000.000.000	DLHK
		2. Pengadaan Lahan 1.5 Ha		1	7.500.000.000	DLHK
		3. Pengembangan Jaringan Listrik		1	500.000.000	DLHK
		4. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (LEACHATE)		1	3.000.000.000	DLHK
		5. Teknologi Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan		1	17.000.000.000	DLHK
3		Revitalisasi Drainase Pada Ruas Jalan Strategis Kabupaten, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan Penghubung antar Kawasan Perumahan dan Permukiman serta Penyediaan Angkutan Sekolah dan Angkutan Publik				
		<i>-Revitalisasi Drainase Pada Ruas Jalan Strategis Kabupaten</i>				
		1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Km	3	7.383.000.000	DBMSDA
		<i>-Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten</i>				

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
	xx	xx	xx	xx	xx	xx
		1.03.10.2.01.0059 Rekontruksi Jalan				
		-Pembangunan Jalan, Drainase, dan Pedestrian Bojong-Pemda		1	10.000.000.000	DBMSDA
		-Penyediaan Angkutan Sekolah dan Angkutan Publik				
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN				
	2.15.02.2.09	KEG. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota				
		Sewa Kendaraan	Unit			Dinas Perhubungan
		- Bus Sekolah		13	3.900.000.000	
		- Bus Rapid Transit (BRT)		0	-	
4		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
	02:11:04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
	2.11.04.2.01	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA				
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				
		- Penyiapan Design RTH				DLHK
		- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kecamatan	5	3.750.000.000	DLHK

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	2026		OPD Penanggung jawab
				K	Rp	
				xx	xx	
5		Pembangunan Kolam Retensi/Polder/Bendung/Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku, Sekaligus Kawasan Wisata Baru				
		1.Lanjutan Tandon sudirman	Unit	1	14.000.000.000	DBMSDA
		2. polder cibadak baru	Unit	1	1.500.000.000	DBMSDA
		3. Tandon Solear	Unit			DBMSDA
		4. Tandon Curug Kulon	Unit			DBMSDA

4.4 Pokok-pokok Pikiran DPRD

Selain memuat sasaran pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Tangerang, prioritas pembangunan daerah juga disusun dengan memperhatikan pandangan dan pertimbangan DPRD. Pandangan dan pertimbangan DPRD menggambarkan permasalahan pembangunan daerah untuk diselaraskan dalam dokumen rencana pembangunan daerah sehingga dapat menghasilkan prioritas pembangunan daerah, yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan Nasional. Pandangan dan pertimbangan tersebut berupa saran dan pendapat, yang berisi pokok-pokok pikiran DPRD, berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat. Pokok-pokok pikiran tersebut menjadi bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Rekapitulasi Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yang telah diinput melalui aplikasi SIPD adalah sebagaimana berikut: (terlampir)

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada Tahun 2026 untuk menjabarkan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029. Rencana Kerja yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merupakan perencanaan integrasi program, kegiatan dan sub kegiatan dari semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tangerang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi nya masing-masing. Perumusan program dan kegiatan prioritas tiap perangkat daerah dilakukan melalui berbagai tahap perencanaan yang melibatkan masyarakat dan stakeholders terkait sebagai bagian dari pihak yang menerima hasil pembangunan tersebut. Agenda pendanaan pembangunan Kabupaten Tangerang tahun 2026 diprioritaskan kepada 5 (lima) prioritas pembangunan daerah meliputi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efesien; Peningkatan Produktifitas sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM; Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Kesehatan, Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan dan Peningkatan Pemerataan dan Keterpaduan Pembangunan Insfrastruktur Wilayah.

Tabel 5.1
Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2026

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efesien	1.156.849.001.700
2	Peningkatan Produktifitas sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM	808.064.952.102
3	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Kesehatan	1.102.097.761.563
4	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan	2.238.355.549.189
5	Peningkatan Pemerataan dan Keterpaduan Pembangunan Insfrastruktur Wilayah	2.293.053.030.416
6	Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.325.404.959.935
Total		8.923.825.254.905

Dukungan pendanaan pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten meliputi Mewujudkan Masyarakat yang bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang berintegras adiktif dan Tangguh, Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan dan Potensial , Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegrasi Berdaya Saing Berkualitas, Inovatif dan Tidak Diskriminatif, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Di dukung Insfrastuktur Yang Berkualitas dan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik Dan Resilensi Terhadap Bencana. dukungan pendanaan tercantum ditabel berikut.

Tabel 5.2
Dukungan Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Banten Tahun 2026

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Mewujudkan Masyarakat yang bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang berintegras adiktif dan Tangguh	803.398.439.621,00
2	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan dan Potensial	1.308.064.952.102,00
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegrasi Berdaya Saing Berkualitas, Inovatif dan Tidak Diskriminatif	3.652.427.478.632,00
4	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Di dukung Insfrastuktur Yang Berkualitas	2.251.934.791.057,00
5	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik Dan Resilensi Terhadap Bencana	907.999.593.493,00
Total		8.923.825.254.905

Dukungan pendanaan pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan nasional tercantum ditabel berikut.

Tabel 5.3
Dukungan Pendanaan Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2026

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	75.038.621.217,00
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	278.390.036.345,00
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkwalitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.336.658.034.440,00
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z dan penyandang disabilitas)	3.652.427.478.632,00
5	Mengembangkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	408.936.272.594,00
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	679.620.403.804,00
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan	528.359.818.404,00

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
	pemberantasan korupsi dan anrkoba, judi dan penyelundupan.	
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur	964.394.589.469,00
Total		8.923.825.254.905

Pelaksanaan program dan kegiatan sumber dana APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ditujukan untuk melaksanakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka Pemenuhan standar pelayanan minimal, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan fungsi Penunjang. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2026 untuk mendukung terwujudnya sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan prioritas nasional. Rencana pendanaan indikatif dalam rangka pelaksanaan Program merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 ke dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Pendanaan Program Kegiatan dalam rangka pencapaian target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pagu Indikatif pada masing masing Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan dan program Tahun 2026 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 4
Pagu Indikatif berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Anggaran
1	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan	2.203.792.334.467
2	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	1.007.977.429.449
3	1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD Puskesmas Rajeg	5.518.067.831
4	1.02.0.00.0.00.01.0002 BLUD Puskesmas Teluknaga	5.478.158.079
5	1.02.0.00.0.00.01.0003 BLUD Puskesmas Kronjo	5.157.378.789
6	1.02.0.00.0.00.01.0004 BLUD Puskesmas Sindang Jaya	4.754.763.534
7	1.02.0.00.0.00.01.0005 BLUD Puskesmas Curug	5.109.862.668
8	1.02.0.00.0.00.01.0006 BLUD Puskesmas Cikupa	5.475.077.289
9	1.02.0.00.0.00.01.0007 BLUD Puskesmas Mauk	7.755.879.393
10	1.02.0.00.0.00.01.0008 BLUD Puskesmas Balaraja	4.971.600.759
11	1.02.0.00.0.00.01.0009 BLUD Puskesmas Kutabumi	5.241.725.228
12	1.02.0.00.0.00.01.0010 BLUD Puskesmas Sepatan	7.693.976.521
13	1.02.0.00.0.00.01.0011 BLUD Puskesmas Cikuya	5.474.030.223

No	Perangkat Daerah	Anggaran
14	1.02.0.00.0.00.01.0012 BLUD Puskesmas Cisoka	6.082.267.320
15	1.02.0.00.0.00.01.0013 BLUD Puskesmas Gembong	3.233.903.740
16	1.02.0.00.0.00.01.0014 BLUD Puskesmas Kelapa Dua	3.653.593.209
17	1.02.0.00.0.00.01.0015 BLUD Puskesmas Kedaung Barat	5.724.519.026
18	1.02.0.00.0.00.01.0016 BLUD Puskesmas Jambe	4.329.454.843
19	1.02.0.00.0.00.01.0017 BLUD Puskesmas Jalan Emas	2.683.020.116
20	1.02.0.00.0.00.01.0018 BLUD Puskesmas Pagedangan	4.808.753.824
21	1.02.0.00.0.00.01.0019 BLUD Puskesmas Jayanti	4.227.272.158
22	1.02.0.00.0.00.01.0020 BLUD Puskesmas Pakuhaji	5.669.778.281
23	1.02.0.00.0.00.01.0021 BLUD Puskesmas Pasir Nangka	3.599.880.983
24	1.02.0.00.0.00.01.0022 BLUD Puskesmas Sukamulya	4.430.159.412
25	1.02.0.00.0.00.01.0023 BLUD Puskesmas Sukadiri	3.550.687.701
26	1.02.0.00.0.00.01.0024 BLUD Puskesmas Tigaraksa	4.928.823.198
27	1.02.0.00.0.00.01.0025 BLUD Puskesmas Kresek	4.780.838.842
28	1.02.0.00.0.00.01.0026 BLUD Puskesmas Binong	2.609.162.263
29	1.02.0.00.0.00.01.0027 BLUD Puskesmas Bojong Kamal	2.752.230.590
30	1.02.0.00.0.00.01.0028 BLUD Puskesmas Bojong Nangka	2.970.223.663
31	1.02.0.00.0.00.01.0029 BLUD Puskesmas Cisauk	3.303.198.006
32	1.02.0.00.0.00.01.0030 BLUD Puskesmas Gunung Kaler	4.432.827.741
33	1.02.0.00.0.00.01.0031 BLUD Puskesmas Jalan Kutai	1.659.829.765
34	1.02.0.00.0.00.01.0032 BLUD Puskesmas Kemiri	4.978.122.925
35	1.02.0.00.0.00.01.0033 BLUD Puskesmas Kosambi	3.554.959.990
36	1.02.0.00.0.00.01.0034 BLUD Puskesmas Legok	4.085.954.210
37	1.02.0.00.0.00.01.0035 BLUD Puskesmas Mekar Baru	3.543.489.614
38	1.02.0.00.0.00.01.0036 BLUD Puskesmas Panongan	4.635.267.629
39	1.02.0.00.0.00.01.0037 BLUD Puskesmas Pasir Jaya	2.829.922.924
40	1.02.0.00.0.00.01.0038 BLUD Puskesmas Salembaran Jaya	2.871.582.149
41	1.02.0.00.0.00.01.0039 BLUD Puskesmas Sukatani	4.621.285.460

No	Perangkat Daerah	Anggaran
42	1.02.0.00.0.00.01.0040 BLUD Puskesmas Sukawali	3.824.770.954
43	1.02.0.00.0.00.01.0041 BLUD Puskesmas Suradita	3.405.206.259
44	1.02.0.00.0.00.01.0042 BLUD Puskesmas Tegal Angus	3.945.558.206
45	1.02.0.00.0.00.01.0043 BLUD Puskesmas Pasar Kemis	3.342.182.284
46	1.02.0.00.0.00.01.0044 RSUD Pakuhaji	45.565.044.850
47	1.02.0.00.0.00.01.0045 BLUD Puskesmas Caringin	2.489.137.655
48	1.02.0.00.0.00.01.0046 RSUD Balaraja	256.100.000.000
49	1.02.0.00.0.00.01.0047 RSUD Kabupaten Tangerang	466.563.987.500
50	1.02.0.00.0.00.01.0048 BLUD Labkesda	2.350.000.000
51	1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	335.151.493.329
52	1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan	288.773.357.621
53	1.04.1.05.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43.605.004.024
54	1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman	463.373.270.206
55	1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja	34.851.573.367
56	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial	75.528.960.981
57	2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja	30.226.533.075
58	2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.904.993.634
59	2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	120.983.942.603
60	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.805.843.206
61	2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	53.016.687.289
62	2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	42.250.612.605
63	2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan	95.248.409.998
64	2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	66.863.777.872
65	2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	35.084.362.709
66	2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Dana Bergulir	5.281.324.648
67	2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.400.187.623
68	2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	52.805.730.484
69	2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip	27.862.297.703

No	Perangkat Daerah	Anggaran
70	3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan	33.041.909.070
71	3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.673.765.186
72	3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.536.084.971
73	4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah	58.356.408.764,
74	4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD	135.048.330.682
75	5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55.027.462.922
76	5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah	123.303.825.223
77	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	48.531.959.871
78	5.02.0.00.0.00.03.0000 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1.013.985.223.456
79	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.180.414.702,
80	6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten	48.098.483.371
81	7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tigaraksa	28.556.092.621
82	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Cikupa	24.822.447.096
83	7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Panongan	22.239.320.449
84	7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Curug	28.470.281.291
85	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Legok	22.961.238.873
86	7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Pasar Kemis	33.944.454.233
87	7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Balaraja	20.869.171.096
88	7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kresek	14.686.308.088
89	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kronjo	16.960.536.447
90	7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Mauk	16.735.752.294
91	7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rajeg	26.819.918.592
92	7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Sepatan	25.191.679.356
93	7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Teluknaga	21.071.452.463
94	7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Cisoka	16.425.463.138
95	7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pakuhaji	17.104.329.000
96	7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Kosambi	22.148.315.009
97	7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Pagedangan	23.097.507.789

No	Perangkat Daerah	Anggaran
98	7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Jambe	16.237.466.261
99	7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Jayanti	13.355.143.261
100	7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Kemiri	13.365.328.006
101	7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Sukadiri	13.557.519.893
102	7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Cisauk	17.697.333.839
103	7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Sepatan Timur	21.146.915.529
104	7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Sindang Jaya	17.990.206.384
105	7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kelapa Dua	29.379.076.320
106	7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Solear	18.262.624.145
107	7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Mekar Baru	18.335.854.254
108	7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Sukamulya	16.288.441.166
109	7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Gunung Kaler	14.269.342.412
110	8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40.187.047.850
Jumlah Anggaran		8.923.825.254.905

Tabel 5.5
Rekapitulasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2026 per Urusan

No	Urusan	Anggaran (Rp)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	5.351.178.120.753
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	960.430.292.574
3	Unsur Pemerintahan Pilihan	127.164.917.667
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	413.543.361.150
5	Unsur Pemerintahan Umum	40.187.047.850
6	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1.280.577.214.674
7	Unsur Kewilayahan	702.645.816.866
8	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	48.098.483.371
Jumlah Anggaran		8.923.825.254.905

Sementara untuk Daftar Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 yang memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif secara rinci dapat dilihat pada lampiran .

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Indikator kinerja daerah ini merupakan target kepala daerah yang harus dicapai dan didukung Perangkat Daerah yang merupakan target selama lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029, target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun indikator makro sebagai tujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah terlihat pada Tabel 6.1:

Tabel 6.1
Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Tangerang Tahun 2026

No.	Indikator	Satuan	Capaian			Target	
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,47	5,18	5,00	5,07	5,10
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,88	6,94	6,06	6,00	6,00
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,92	6,93	6,55	6,05	6,25
4	Rasio Gini	Indeks	0,282	0,286	0,269	0,268	0,267
5	Tingkat Inflasi	Persen	4,56	3,17	1,8	1,8-2,00	2,00
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,15	75,56	76,19	76,25	76,50

Sumber : Rakortekrenbang Provinsi Banten, 2025

Indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan OPD. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Perumusan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator- indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan

kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026 yang telah direncanakan. Indikator-indikator kinerja tersebut dituangkan dalam tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang
Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	76,67 (2023)	79,90	85,68
2	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	indeks	4,08 (2023)	4,20	4,27
3	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	82,28	75,00	81,00
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	indeks	73,96	74,46	74,96
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	persen (%)	5,00	5,07	5,10
6	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	persen (%)	33,74	33,55 - 33,75	33,55 - 33,75
7	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	persen (%)	11,35	11,15 - 11,35	11,21 - 11,37
8	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan terhadap PDRB (%)	persen (%)	6,16	6,07 - 6,30	6,10 - 6,30
9	Indeks Desa (Indeks)	indeks	0,7812	0,7830	0,785
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	persen (%)	65,88	68,08	68,69
11	Usia Harapan Hidup (tahun)	tahun	75,34	77,70	78,90
12	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	indeks	0,79	0,79	0,8
13	Prevalensi Stunting	persen (%)	26,4 (2023)	21,40	20,08

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6
14	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	persen (%)	83,21 (2022)	98	99,17
15	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	64.71 (2023)	64,87	66
16	Rata Rata Lama Sekolah	tahun	9,06	9,63/9,16	9,88
17	Harapan lama sekolah (tahun)	tahun	12,88	13,43/12.89	13,63
18	Indeks Infrastruktur	indeks	N/A	40,00	50,00
19	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	persen (%)	63,91	65,59	71,47
20	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	persen (%)	2,59 (2023)	2,20	2,06
21	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	indeks	77,6	78,16	79,01
22	Indeks Perkembangan Harga	Indeks	4,13	5,11	5,14
23	Indeks Risiko Bencana	Indeks	125,22	125,00	124
24	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	52,70	74,1	74,2
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	55,87	61,57	61,74
26	Nilai AKIP	Angka	75,2	77,81	78,51
27	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,359	3,370	3,4
28	Tingkat Kemiskinan ((%)	%	6,55	6,05	6,25

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 Kab. Tangerang

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
AA					
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,88	13,43	13,63
2	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	77,60	78,16	79,01
3	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Persentase	1,00	1,00	1,00
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,06	9,63	9,88
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68,48	68,08	68,69
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
AA					
1	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	n/a	4,87	5,06
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
AA					
1	Indeks Harmoni	Indeks	706,00	709,00	712,00
2	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,79	0,79	0,80
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		77,60	77,70	77,80
4	Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	75,31	75,31	75,41
5	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		81,15	81,16	81,17
6	Indeks Pendidikan	Angka	0,68	0,68	0,69
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00	5,07	5,24
8	Nilai AKIP	Angka	75,50	75,80	75,90
9	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	84,70	84,90	85,00
10	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai		1,00	1,00	1,00
11	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi	%	80,00	80,00	85,00
12	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	85,00	85,00	85,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6
13	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100,00	100,00	100,00
14	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00
15	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	69,00	69,00	69,00
16	Presentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan	%	100,00	100,00	100,00
17	Persentase sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	%	85,00	86,00	87,00
18	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100,00	100,00	100,00
19	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	26,40	20,90	17,50
20	Produksi Olahan Perikanan	Ton	0,00	1,50	2,50
21	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	Kuintal/Ha	49,00	49,40	49,60
22	Tingkat Inflasi	%	1,80	2,00	2,00
23	Tingkat Kemiskinan	%	6,55	6,05	6,25
24	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,34	77,70	78,90
25	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,67	3,75	3,78
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM				
AA					
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	orang	2,00	3,90	3,80
2	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	kasus	12.391	11.881	10.202
3	Indeks SPM Kesehatan Kabupaten/Kota	%	99,74	100,00	100,00
4	Persentase BOR Rumah Sakit Pemerintah	%	61,83	62,00	63,00
5	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	98,00	98,00	98,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6
6	Cakupan Bina Kelompok Petani	Kelompok	1,00	1,33	1,33
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,70	89,80	89,85
9	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	5,11	5,11	5,14
10	Indeks Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	Angka	9.974,00	100,00	100,00
11	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	84,56	85,12	85,68
12	Jumlah produk hukum yang difasilitasi pembahasannya (PRIORITAS)	%	80,14	87,50	88,88
13	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.192.000,0 0	22.073,44	2.225.003,00
14	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	92,11	100,00	100,00
15	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,93	100,00	100,00
16	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	88,32	100,00	100,00
17	Penerbitan Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia (SKDWINI)	%	100,00	100,00	100,00
18	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	100,00	100,00	100,00
19	Persentase Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik	%	5.826,00	6.226,00	6.426,00
20	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	8.917,00	9.029,00	9.085,00
21	Persentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan. analisis. dan publikasi/diseminasi	%	24,95	25,37	26,07

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6
22	Persentase Hewan Sakit yang Dapat Disembuhkan	%	0,00	70,00	75,00
23	Persentase Implementasi Kurikulum	%	855,00	2.855,00	4.355,00
24	Persentase Lumbung Pangan yang Aktif	%	39,47	67,34	70,00
25	Persentase Pelaku Usaha IKM yang memiliki izin/legalitas yang diawasi	%	0,00	25,27	27,08
26	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00
27	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1	%	8.914,00	9.064,00	9.164,00
28	Persentase Produk Hewan yang Memenuhi SNI	%	62,00	80,00	82,00
29	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	50,00	75,00	75,00
30	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100,00	100,00	100,00
31	Presentase Pelaku IKM yang Mendapatkan Pendampingan/Pembinaan dan Pelatihan	%	0,00	15,70	16,61
32	Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitasi Persidangan Tepat Waktu	%	0,00	88,11	89,10
33	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah	%	2.706,00	2.806,00	2.856,00
34	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	41,00	41,00	55,00

Tabel 6.4
Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 1	0	0.00	0.00	0	0
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 1	0	0.00	0.00	0	0
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 879.93. luas	5,63%	5.63	6.42	0	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
			daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 13716					
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 678384. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 1107551	48,77%	53.05	61.25	69,3	73,7
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 1073115. Jumlah rumah di Kabupaten A = 1107551	97,56%	98.02	96.89	98,1	98.7

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 1858. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 1872	95%	99.90	99.25	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 944.82. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 992.61	92,59%	94.20	95.19	0	0
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 31977. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 1107551	3,32%	3.10	2.89	0	0
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 89069. Jumlah unit rumah kab/kota = 231733	27,56%	29.31	38.44	0	0
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 2436222. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 3293533	55,98%	55.40	73.97	0	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	14,26%	14.34	14.67	0	0
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 1015. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 1015	89,93%	94.60	100.00	100.00	100
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 914. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 914	85,45%	100.00	100.00	100.00	100

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 3. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 5	100%	100.00	60.00	60.00	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 712. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 520549	4,58%	0.17	0.14	0.14	0.137
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 113998.21. Jumlah tenaga kerja = 520549	Rp. 56.636.673	23.89	21.90	Rp. 59.000.000	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 3039. Jumlah Perusahaan = 6320	36,28%	56.15	48.09	42%	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 28448. Jumlah pencaker yang terdaftar = 37074	67,68%	62.67	76.73	74%	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 6793236983968. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 8714894514624	51,79%	73.82	77.95	51,82%	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 49. Jumlah penduduk perempuan = 1204037	9,62	5.86	4.07	9,26	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 195.723. Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 204.56	9,05%	9.82	95.68	9,05%	100

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 0. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 1	0	0.00	0.00	0	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 0. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 1	0	0.00	0.00	0	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 0. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 1	0	100.00	0.00	0	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas	55,88%	49.79	55.87	56,25%	61,74

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
			Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut IKAL).					
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 536920. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 845543	56,75%	57.53	63.50	57,5%	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 50. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 200	11,68%	12.00	25.00	11%	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 2458208. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 2458216	99,25%	98.98	100.00	99,47%	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 583243. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 1001407	39,99%	50.73	58.24	70%	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 936020. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 1024548	93,07%	93.12	91.36	99,5%	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 43. Jumlah PD = 59	66,66%	55.93	72.88	85,48%	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 18. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 43	93.70%	72.09	41.86	10.31%	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	jumlah anak rata- rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila	2.13	2.10	1.84	2.07	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Berkaitan Pelayanan Dasar			perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung					
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 438598. Jumlah Pasangan Usia Subur = 580386	70.75%	67.46	75.57	71.50%	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 28165. Jumlah Pasangan Usia Subur = 580386	10.40%	11.64	4.85	10.10%	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0.95	0.70	0.40	0.79	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,5	0.28	0.35	0,8	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 2435870. Jumlah penduduk = 2435870	92.40%	71.65	100.00	92.75%	92.8
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 54. Jumlah seluruh koperasi aktif = 894	11.78%	13.47	6.04	16%	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = -3416515. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 29689561	67.81%	56.67	-11.51	5,12%	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikali 100%	0,011%	0.02	0.02	0,3%	0.4

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 9085. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 790670	0.92%	1.05	1.15	0.74%	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	38%	81.00	37.00	50%	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 606. Jumlah area penilaian = 645	63.41%	58.29	93.95	58.14%	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 0. Jumlah cagar budaya yang terdata = 1	0	0.00	0.00	4%	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	79.65	55.58	69.34	79.71	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	55.58	49.93	52.70	55.64	0
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Jumlah total Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik + persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN dibagi 4	38.5	55.00	100.00	38.8	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek	Jumlah total Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan	33	66.00	100.00	33.3	100

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
		kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten dengan NSPK + Tingkat kesesuaian autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dan arsip dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK dibagi 6					
Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 43737.92. Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 43110	99.03% (42.237 ton)	101.63	101.46	100% (43.562 ton)	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 7261. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 36386	2,00%	88.89	19.96	3,57%	0
Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 740539. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 3713919	3,25%	45.45	19.94	3,57%	0
Urusan Pilihan	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 1129803. Jumlah kamar yang tersedia = 1169460	4.32%	96.14	96.61	7%	0
Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 2904.43. Total PDRB Berlaku = 186104.15	1,46%	1.49	1.56	1,55%	1,83
Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 706734713754. Total realisasi PAD = 4619607545898.5	14,01%	14.80	15.30	14,15%	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pilihan	Pertanian	Produktivitas; pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 322364. luas panen = 65292	4,93%	493.17	493.73	4,94%	0
Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -869. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 2823	0,53%	1.99	-30.78	1%	0
Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 1	0	0.00	0.000	0	0
Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 13439. RDKK = 28284.731	35,91%	31.93	47.51	38%	0
Urusan Pilihan	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 174. Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 773	3.07%	28.19	22.51	4,5%	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 229. Jumlah izin yang dikeluarkan = 4515	21,33%	1.46	5.07	21,66%	0
Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 1	-	0.00	0.00	2%	0
Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 2. Jumlah izin yang dikeluarkan = 2	-	100.00	100.00	2%	100

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
		kabupaten/kota						
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 748699356424. Jumlah APBD = 8714894514624	9.59%	8.90	8.59	8.70%	0
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD = 4619607545898.5. Jumlah Pendapatan pada APBD = 8508627520109.5	55.33%	55.69	54.29	46,84%	0
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/level 3) berdasarkan laporan Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	3.00	3.00	3	3,400
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Karakteristik Level Kapabilitas APIP	3	3.00	3.00	3	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 5423462081496. jumlah belanja APBD = 8714894514624	83.07%	58.99	62.23	84.10%	0
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	WTP	10.00	10.00	10	0
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 2716	1,20%	0.00	0.00	2%	0
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 4629. Jumlah seluruh pengadaan = 12926	13,50%	38.96	35.81	8,21%	0
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 2102939691486. total belanja operasi dan modal = 8180098466763	48,33%	54.15	25.71	51%	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 329825304633. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 1468864379539	59,54%	23.96	22.45	70%	0
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 2517. Jumlah seluruh pegawai = 3175	77091%	77.54	79.28	80,00%	0
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 723. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak	13,16%	23.30	22.77	32,00%	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
			termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 3175					
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 723. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 723	82,09%	89.83	100.00	85,00%	0
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja = 8714894514624. Total Belanja APBD = 7679570516011	92.73%	10.91	13.48	93.70%	0
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi = 4619607545898. Total PAD dalam APBD = 3725463206124	117.12%	29.74	24.00	120%	0
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = 790731300553.54. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 7890524478549	14.58%	15.37	10.02	2.81%	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 12. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12	83.33%	100.00	100.00	90%	100
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 119813. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 130069	N/A	N/A	92,11	94,9	96,3
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 417579. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 383447	N/A	N/A	108,90	111,3	112,6
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 174995. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 183040	N/A	N/A	95,60	97,9	99,0
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	N/A	N/A	88,32	90,6	91,7

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
		menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 16004. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 18120					
	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 2999. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 3459706	N/A	N/A	0,87	0,86	0,89
	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 24. Jumlah RS di kabupaten/kota = 24	N/A	N/A	100	100	100
	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 58714. Jumlah sasaran ibu bersalin di kabupaten/kota = 58714	N/A	N/A	100	100	100
	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 58410. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 58410	N/A	N/A	100	100	100

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 55500. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 55500	N/A	N/A	100	100	100
	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 284085. Jumlah balita di kabupaten/kota = 284085	N/A	N/A	100	100	100
	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 556948. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 556948	N/A	N/A	100	100	100
	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 2246044. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 2246044	N/A	N/A	100	100	100
	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 192092. Jumlah orang warga negara usia 60	N/A	N/A	100	100	100

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
			tahun di kabupaten/kota = 192092					
	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 729628. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 729628	N/A	N/A	100	100	100
	Kesehatan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 43632. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 43632	N/A	N/A	100	100	100
	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 4255. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 4255	N/A	N/A	100	100	100
	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 48636. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 48636	N/A	N/A	100	100	100

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 82235. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 82235	N/A	N/A	100	100	100
	Tenaga Kerja	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 187. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 187	N/A	N/A	100	100	100
	Tenaga Kerja	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 1253. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 1253	N/A	N/A	100	100	100

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 10. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 10	N/A	N/A	100	100	100
	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 126. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 126	N/A	N/A	100	100	100
	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 167. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 5465	N/A	N/A	3,0558097	7,2	11,1

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 25. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 25	N/A	N/A	100	100	100
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 15. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 15	N/A	N/A	100	100	100
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 2452679. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 2452679	N/A	N/A	100	100	100
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 208. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 208	N/A	N/A	100	100	100

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingk = 373. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 373	N/A	N/A	100	100	100
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	N/A	N/A	14,67	0	0
	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 113998.21. Jumlah tenaga kerja = 520549	N/A	N/A	21,90	0	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 179. Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 179	N/A	N/A	100	100	100
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 56809379.18. seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 56809379.18	N/A	N/A	100	100	100
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 294452. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 301639	N/A	N/A	97,6173505	0	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 2779487. Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 56809379.18	N/A	N/A	4,8926551	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 1. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 1	N/A	N/A	100	100	100
	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 60. Jumlah PD = 60	N/A	N/A	100	100	100

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 14. Jumlah Layanan Publik = 14	N/A	N/A	100	100	100
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 54. Jumlah seluruh koperasi aktif = 894	N/A	N/A	6,0402685	0	0
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 2450. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 61011	N/A	N/A	4,0156693	0	0
	Perencanaan	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 60. jumlah PD = 60	N/A	N/A	100	100	100

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
	Perencanaan	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 60. jumlah PD = 60	N/A	N/A	100	100	100
	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 24533. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 24533	N/A	N/A	100	100	100
	Perdagangan	Persentase alat, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Terasah yang berlaku pada tahun berjalan = 2889346. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 2889346	N/A	N/A	100	100	100
	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN		N/A	N/A	146,58	0	0

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	RUMUS	CAPAIAN			TARGET	
				2022	2023	2024	2025	2026
		yang ditetapkan dalam RPIK						
	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 2. Jumlah izin yang dikeluarkan = 2	N/A	N/A	100	100	100
	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		N/A	N/A	100	100	100
		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 8714754421629. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 9092893599225	N/A	N/A	95,8413769	0	0

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan mengemban misi pelaksanaan pembangunan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaannya, prioritas dan sasaran pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat. Perangkat daerah dan seluruh stakeholder pembangunan termasuk masyarakat luas berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang tercantum didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 serta menjamin konsistensi, sinergitas, dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasil tersebut secara berkala kepada Bupati melalui Bappeda, BPKAD serta Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Untuk substansi/muatan berkenaan dengan transisi perencanaan akan dilakukan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 seiring telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD 2025-2029. Akhirnya dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 mampu mendorong pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029.

BUPATI TANGERANG

Ttd.

H. MOCH. MAESYAL RASYID